

# **PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019



TAHUN ANGGARAN 2020



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Penyusunan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 34);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Kepada Bank Riau Kepri dan Perusahaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 19);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 68);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 73);
40. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 524);

41. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 458);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
dan  
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Anambas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
6. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan Pemerintah Daerah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan;

7. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
8. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
9. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu priode pelaporan;
10. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama priode tertentu;
11. Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
12. Catatan Atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai;
13. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah adalah laporan yang menyajikan ikhtisar informasi keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dalam satu priode pelaporan.

## Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri atas :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

### Pasal 3

- (1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.1.121.205.421.730,97
b. Belanja	<u>Rp.1.114.711.162.520,99</u>
Surplus/Defisit	<u>Rp. 6.494.259.209,98</u>
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 57.989.127.236,42
- Pengeluaran	<u>Rp. 500.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp. 57.489.127.236,42</u>
Silpa	<u>Rp. 63.983.386.446,40</u>

- (2) Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp90.143.734.724,23) dengan rincian sebagai berikut ;

1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp.1.211.349.156.455,20
2. Realisasi	<u>Rp.1.121.205.421.730,97</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	<u>(Rp. 90.143.734.724,23)</u>

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp153.859.046.174,63 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp.1.268.570.208.695,62
2. Realisasi	<u>Rp.1.114.711.162.520,99</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	<u>Rp. 153.859.046.174,63</u>

- c. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp268.074.996,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp. 57.721.052.240,42
2. Realisasi	<u>Rp. 57.989.127.236,42</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	<u>Rp. 268.074.996,00</u>

- d. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 500.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp. 500.000.000,00</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	<u>Rp. 0,00</u>



#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	57.221.052.240,42
b.	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan Tahun Berjalan	Rp.	57.221.052.240,42
c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	63.983.386.446,40
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
e.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	63.983.386.446,40

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp.	1.905.003.912.037,80
b.	Jumlah Kewajiban	Rp.	11.410.928.666,00
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.893.592.983.371,80
d.	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp.	1.905.003.912.037,80

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a.	Jumlah Pendapatan	Rp.	1.103.928.292.287,66
b.	Jumlah Beban	Rp.	848.907.735.820,14
c.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi	Rp.	255.020.556.467,52
d.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp.	48.402.352.359,00
e.	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	303.422.908.826,52
f.	Pos Luar Biasa	Rp.	0,00
g.	Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp.	303.422.908.826,52

## Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

a.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi :	
	Jumlah Arus Masuk Kas	Rp.1.121.217.514.230,97
	Jumlah Arus Kas Keluar	Rp. 751.907.921.020,23
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	<u>Rp. 369.309.593.210,74</u>
b.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan :	
	Jumlah Arus Masuk Kas	Rp. 0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	Rp. 362.815.334.000,76
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	<u>Rp (362.815.334.000,76)</u>
c.	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan :	
	Jumlah Arus Masuk Kas	Rp. 768.074.996,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	<u>Rp. 500.000.000,00</u>
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan	Rp. 268.074.996,00
d.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran :	
	Jumlah Arus Masuk Kas	Rp. 74.625.543.462,36
	Jumlah Arus Keluar Kas	<u>Rp. 74.606.127.631,36</u>
	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp. 19.415.831,00
e.	Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	Rp. 6.781.750.036,98
f.	Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 57.221.052.240,42
g.	Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 64.002.802.277,40
h.	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 0,00
i.	Kas di Puskesmas FKTP	Rp. 0,00
j.	Kas di Bendahara BOS	Rp. 0,00
k.	Kas Lainnya	Rp. 0,00
l.	Saldo Akhir Kas	Rp. 64.002.802.277,40

## Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp.1.649.904.219.242,99
b.	Suplus/Defisit - Laporan Operasional	Rp. 303.422.908.826,52

- |    |   |                         |
|----|---|-------------------------|
| c. | Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/<br>Kesalahan Mendasar | (Rp. 59.734.144.697,71) |
| d. | Ekuitas Akhir   | Rp.1.893.592.983.371,80 |

#### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g yang memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yaitu terdiri dari

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan; dan
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

- (2) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 11

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 28 Agustus 2020

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa  
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,



SAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020  
NOMOR 78

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU (2,16/2020)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

1. PENJELASAN UMUM

Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diikuti dengan perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan Keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Selain peraturan perundang-undangan tersebut diatas, penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga diatur dalam Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 298 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir dan dipertegas dengan ayat (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 79



# LAMPIRAN I



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	9%
1	PENDAPATAN – LRA				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA				
3	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	19,151,855,000.00	16,913,698,911.36	(2,238,156,088.64)	88.31
4	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	5,035,952,375.00	4,998,895,282.00	(37,057,093.00)	99.26
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	1,934,686,786.00	1,451,789,587.00	(482,897,199.00)	75.04
6	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	16,844,103,967.00	13,195,937,534.60	(3,648,166,432.40)	78.34
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s/d 6)	42,966,598,128.00	36,560,321,314.96	(6,406,276,813.04)	85.09
8	PENDAPATAN TRANSFER – LRA		-		
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA BAGI HASIL PAJAK – LRA		-		
10	Bagi Hasil Pajak – LRA	61,514,108,532.00	44,678,061,732.00	(16,836,046,800.00)	72.63
11	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	429,128,664,369.00	371,235,764,748.00	(57,892,899,621.00)	86.51
12	Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	385,760,629,000.00	388,403,719,000.00	2,643,090,000.00	100.69
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	163,204,246,201.00	161,416,927,702.00	(1,787,318,499.00)	98.90
14	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA	20,525,979,429.00	19,321,535,229.00	(1,204,444,200.00)	94.13
15	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER – DANA BAGI HASIL PAJAK – LRA (10 s/d 14)	1,060,133,627,531.00	985,056,008,411.00	(75,077,619,120.00)	92.92
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA – LRA		-		
17	Dana Otonomi Khusus (Dana Desa)- LRA	51,179,675,000.00	51,179,675,000.00	-	100.00
18	Dana Keistimewaan – LRA	0.00	-	-	-
19	Dana Penyesuaian – LRA	0.00	-	-	-
20	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA – LRA (17 s/d 19)	51,179,675,000.00	51,179,675,000.00	-	100.00
21	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI – LRA		-		
22	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	38,268,855,796.20	37,621,584,350.00	(647,271,446.20)	98.31
23	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI- LRA (22)	38,268,855,796.20	37,621,584,350.00	(647,271,446.20)	98.31
24	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER – LRA (15 + 20 + 23)	1,149,582,158,327.20	1,073,857,267,761.00	(75,724,890,566.20)	93.41
25	BANTUAN KEUANGAN – LRA				
26	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya – LRA	8,000,000,000.00	-	(8,000,000,000.00)	-
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA				
28	PENDAPATAN HIBAH –LRA				
29	Pendapatan Hibah dari Pemerintah –LRA	10,800,400,000.00	10,787,832,655.01	(12,567,344.99)	99.88
30	JUMLAH PENDAPATAN – LRA (7 + 24 + 26 + 29)	1,211,349,156,455.20	1,121,205,421,730.97	(90,143,734,724.23)	92.56
31	BELANJA				
32	BELANJA OPERASI				
33	Belanja Pegawai	406,455,018,250.58	357,208,194,340.00	(49,246,823,910.58)	87.88
34	Belanja Barang dan Jasa	280,899,680,612.22	256,272,782,230.23	(24,626,898,381.99)	91.23
35	Belanja Subsidi	0.00	-	-	-
36	Belanja Hibah	4,541,892,000.00	4,278,388,000.00	(263,504,000.00)	94.20
37	Belanja Bantuan Sosial	183,555,000.00	156,555,000.00	(27,000,000.00)	85.29
38	Belanja Bantuan Keuangan	90,791,708,360.00	82,812,329,950.00	(7,979,378,410.00)	91.21
39	JUMLAH BELANJA OPERASI – LRA (33 s/d 38)	782,871,854,222.80	700,728,249,520.23	(82,143,604,702.57)	89.51
40	BELANJA MODAL		-		
41	Belanja Modal Tanah	5,523,633,288.00	4,022,083,585.00	(1,501,549,703.00)	72.82
42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66,171,152,439.20	58,640,818,568.76	(7,530,333,870.44)	88.62
43	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	194,406,143,172.42	156,832,046,585.00	(37,574,096,587.42)	80.67
44	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	165,603,254,728.20	141,090,121,189.00	(24,513,133,539.20)	85.20
45	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,225,527,845.00	2,218,168,073.00	(7,359,772.00)	99.67
46	JUMLAH BELANJA MODAL – LRA (41 s/d 45)	433,929,711,472.82	362,803,238,000.76	(71,126,473,472.06)	83.61



NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	9%)
47	BELANJA TAK TERDUGA		-		
48	Belanja Tak Terduga	588,968,000.00	-	(588,968,000.00)	-
49	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA - LRA	588,968,000.00	-	(588,968,000.00)	-
50	JUMLAH BELANJA (39 + 46 + 49)	1,217,390,533,695.62	1,063,531,487,520.99	(153,859,046,174.63)	87.36
51	TRANSFER		-		
52	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		-		
53	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	51,179,675,000.00	51,179,675,000.00	-	100.00
54	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0.00	-		-
55	JUMLAH TRANSFER (53 DAN 54)	51,179,675,000.00	51,179,675,000.00	-	100.00
56	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (50 + 55)	1,268,570,208,695.62	1,114,711,162,520.99	(153,859,046,174.63)	87.87
			-		
57	SURPLUS / (DEFISIT) (30 - 56)	(57,221,052,240.42)	6,494,259,209.98	63,715,311,450.40	(11.35)
			-		
58	PEMBIAYAAN		-		
59	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		-		
60	Penggunaan SiLPA	57,221,052,240.42	57,221,052,240.42	-	100.00
61	Penerimaan Kembali Piutang	500,000,000.00	768,074,996.00	268,074,996.00	153.61
62	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (60 DAN 61)	57,721,052,240.42	57,989,127,236.42	268,074,996.00	100.46
63	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		-		
64	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	500,000,000.00	500,000,000.00	-	100.00
65	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (64)	500,000,000.00	500,000,000.00	-	100.00
66	PEMBIAYAAN NETTO (62 - 65)	57,221,052,240.42	57,489,127,236.42	268,074,996.00	100.47
			-		
67	SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN (57 + 66)	(0.00)	63,983,386,446.40	63,983,386,446.40	0

Sumber Data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK -RI Audited Tahun 2019

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS, SH

# LAMPIRAN I.1



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	<b>PENDAPATAN</b>	1.211.349.156.455,20	1.121.205.421.730,97	(90.143.734.724,23)	92,56
4.1	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	18.464.162.187,00	7.708.686.365,00	(10.755.475.822,00)	41,75
4.1.01	<b>Pendidikan</b>	10.800.400.000,00	0,00	(10.800.400.000,00)	0,00
4.1.01.1.01.01	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	10.800.400.000,00	0,00	(10.800.400.000,00)	0,00
4.1.02	<b>Kesehatan</b>	7.653.262.187,00	7.677.278.713,00	24.016.526,00	100,31
4.1.02.1.02.01	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.653.262.187,00	7.677.278.713,00	24.016.526,00	100,31
4.1.03	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	10.500.000,00	31.407.652,00	20.907.652,00	299,12
4.1.03.1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.500.000,00	31.407.652,00	20.907.652,00	299,12
4.2	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	755.952.375,00	215.558.885,00	(540.393.490,00)	28,51
4.2.09	<b>Perhubungan</b>	467.352.375,00	118.661.000,00	(348.691.375,00)	25,39
4.2.09.2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	467.352.375,00	118.661.000,00	(348.691.375,00)	25,39
4.2.11	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	240.000.000,00	96.423.510,00	(143.576.490,00)	40,18
4.2.11.2.11.01	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	240.000.000,00	96.423.510,00	(143.576.490,00)	40,18
4.2.12	<b>Penanaman Modal</b>	48.600.000,00	474.375,00	(48.125.625,00)	0,98
4.2.12.2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	48.600.000,00	474.375,00	(48.125.625,00)	0,98
4.4	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>	1.192.129.041.893,20	1.113.281.176.480,97	(78.847.865.412,23)	93,39
4.4.04	<b>Keuangan</b>	1.192.129.041.893,20	1.113.281.176.480,97	(78.847.865.412,23)	93,39
4.4.04.4.04.05	BADAN KEUANGAN DAERAH	1.192.129.041.893,20	1.113.281.176.480,97	(78.847.865.412,23)	93,39

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5	<b>BELANJA</b>	1.268.570.208.695,62	1.114.711.162.520,99	(153.859.046.174,63)	87,87
5.1	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	743.697.544.634,87	625.979.995.851,59	(117.717.548.783,28)	84,17
5.1.01	<b>Pendidikan</b>	241.384.578.581,55	201.629.734.929,59	(39.754.843.651,96)	83,53
5.1.01.1.01.01	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	241.384.578.581,55	201.629.734.929,59	(39.754.843.651,96)	83,53
5.1.01.1.01.01.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	119.812.662.754,93	88.101.005.698,00	(31.711.657.056,93)	73,53
5.1.01.1.01.01.1.1	Belanja Pegawai	119.812.662.754,93	88.101.005.698,00	(31.711.657.056,93)	73,53
5.1.01.1.01.01.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	121.571.915.826,62	113.528.729.231,59	(8.043.186.595,03)	93,38
5.1.01.1.01.01.2.1	Belanja Pegawai	35.087.288.500,00	34.000.708.472,00	(1.086.580.028,00)	96,90
5.1.01.1.01.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.657.924.950,78	31.496.729.016,83	(1.161.195.933,95)	96,44
5.1.01.1.01.01.2.3	Belanja Modal	53.826.702.375,84	48.031.291.742,76	(5.795.410.633,08)	89,23
5.1.02	<b>Kesehatan</b>	196.442.089.984,43	169.976.221.843,00	(26.465.868.141,43)	86,53
5.1.02.1.02.01	<b>DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	196.442.089.984,43	169.976.221.843,00	(26.465.868.141,43)	86,53
5.1.02.1.02.01.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	39.489.912.670,45	39.064.208.426,00	(425.704.244,45)	98,92
5.1.02.1.02.01.1.1	Belanja Pegawai	39.489.912.670,45	39.064.208.426,00	(425.704.244,45)	98,92
5.1.02.1.02.01.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	156.952.177.313,98	130.912.013.417,00	(26.040.163.896,98)	83,41
5.1.02.1.02.01.2.1	Belanja Pegawai	15.106.947.499,98	12.419.205.979,00	(2.687.741.520,98)	82,21
5.1.02.1.02.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.793.229.538,00	48.674.971.551,00	(4.118.257.987,00)	92,20
5.1.02.1.02.01.2.3	Belanja Modal	89.052.000.276,00	69.817.835.887,00	(19.234.164.389,00)	78,40
5.1.03	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	225.545.488.657,89	178.775.599.961,00	(46.769.888.696,89)	79,26
5.1.03.1.03.01	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	225.545.488.657,89	178.775.599.961,00	(46.769.888.696,89)	79,26
5.1.03.1.03.01.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	6.532.566.374,00	5.779.261.155,00	(753.305.219,00)	88,47
5.1.03.1.03.01.1.1	Belanja Pegawai	6.532.566.374,00	5.779.261.155,00	(753.305.219,00)	88,47
5.1.03.1.03.01.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	219.012.922.283,89	172.996.338.806,00	(46.016.583.477,89)	78,99
5.1.03.1.03.01.2.1	Belanja Pegawai	4.579.315.000,00	4.033.169.123,00	(546.145.877,00)	88,07
5.1.03.1.03.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.174.291.330,20	28.170.886.089,00	(5.003.405.241,20)	84,92
5.1.03.1.03.01.2.3	Belanja Modal	181.259.315.953,69	140.792.283.594,00	(40.467.032.359,69)	77,67
5.1.04	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>	39.583.646.000,00	36.791.375.393,00	(2.792.270.607,00)	92,95
5.1.04.1.03.01	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	39.583.646.000,00	36.791.375.393,00	(2.792.270.607,00)	92,95
5.1.04.1.03.01.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	39.583.646.000,00	36.791.375.393,00	(2.792.270.607,00)	92,95
5.1.04.1.03.01.2.1	Belanja Pegawai	154.475.000,00	120.850.000,00	(33.625.000,00)	78,23
5.1.04.1.03.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.329.407.000,00	491.848.393,00	(837.558.607,00)	37,00
5.1.04.1.03.01.2.3	Belanja Modal	38.099.764.000,00	36.178.677.000,00	(1.921.087.000,00)	94,96

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.05	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	36.742.968.420,00	35.084.788.904,00	(1.658.179.516,00)	95,49
5.1.05.1.05.01	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>	14.005.994.575,00	13.514.975.588,00	(491.018.987,00)	96,49
5.1.05.1.05.01.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.706.718.975,00	3.528.869.068,00	(177.849.907,00)	95,20
5.1.05.1.05.01.1.1	Belanja Pegawai	3.706.718.975,00	3.528.869.068,00	(177.849.907,00)	95,20
5.1.05.1.05.01.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	10.299.275.600,00	9.986.106.520,00	(313.169.080,00)	96,96
5.1.05.1.05.01.2.1	Belanja Pegawai	7.049.713.000,00	6.748.035.521,00	(301.677.479,00)	95,72
5.1.05.1.05.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.990.892.600,00	1.980.336.999,00	(10.555.601,00)	99,47
5.1.05.1.05.01.2.3	Belanja Modal	1.258.670.000,00	1.257.734.000,00	(936.000,00)	99,93
5.1.05.1.05.02	<b>BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	7.715.472.281,00	7.483.564.157,00	(231.908.124,00)	96,99
5.1.05.1.05.02.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	4.353.242.081,00	4.201.095.966,00	(152.146.115,00)	96,50
5.1.05.1.05.02.1.1	Belanja Pegawai	4.353.242.081,00	4.201.095.966,00	(152.146.115,00)	96,50
5.1.05.1.05.02.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.362.230.200,00	3.282.468.191,00	(79.762.009,00)	97,63
5.1.05.1.05.02.2.1	Belanja Pegawai	1.113.817.000,00	1.041.018.111,00	(72.798.889,00)	93,46
5.1.05.1.05.02.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.123.505.200,00	2.116.578.080,00	(6.927.120,00)	99,67
5.1.05.1.05.02.2.3	Belanja Modal	124.908.000,00	124.872.000,00	(36.000,00)	99,97
5.1.05.1.05.03	<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	9.222.929.464,00	8.928.574.022,00	(294.355.442,00)	96,81
5.1.05.1.05.03.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	6.018.112.464,00	5.823.831.818,00	(194.280.646,00)	96,77
5.1.05.1.05.03.1.1	Belanja Pegawai	6.018.112.464,00	5.823.831.818,00	(194.280.646,00)	96,77
5.1.05.1.05.03.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.204.817.000,00	3.104.742.204,00	(100.074.796,00)	96,88
5.1.05.1.05.03.2.1	Belanja Pegawai	1.978.230.000,00	1.910.761.351,00	(67.468.649,00)	96,59
5.1.05.1.05.03.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.057.923.000,00	1.026.473.853,00	(31.449.147,00)	97,03
5.1.05.1.05.03.2.3	Belanja Modal	168.664.000,00	167.507.000,00	(1.157.000,00)	99,31
5.1.05.4.01.03	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	5.798.572.100,00	5.157.675.137,00	(640.896.963,00)	88,95
5.1.05.4.01.03.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	5.798.572.100,00	5.157.675.137,00	(640.896.963,00)	88,95
5.1.05.4.01.03.2.1	Belanja Pegawai	168.325.000,00	164.817.000,00	(3.508.000,00)	97,92
5.1.05.4.01.03.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.536.543.000,00	4.899.322.637,00	(637.220.363,00)	88,49
5.1.05.4.01.03.2.3	Belanja Modal	93.704.100,00	93.535.500,00	(168.600,00)	99,82
5.1.06	<b>Sosial</b>	3.998.772.991,00	3.722.274.821,00	(276.498.170,00)	93,09
5.1.06.1.05.03	<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	3.998.772.991,00	3.722.274.821,00	(276.498.170,00)	93,09
5.1.06.1.05.03.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.998.772.991,00	3.722.274.821,00	(276.498.170,00)	93,09
5.1.06.1.05.03.2.1	Belanja Pegawai	541.928.500,00	519.977.500,00	(21.951.000,00)	95,95
5.1.06.1.05.03.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.344.284.491,00	3.092.211.321,00	(252.073.170,00)	92,46
5.1.06.1.05.03.2.3	Belanja Modal	112.560.000,00	110.086.000,00	(2.474.000,00)	97,80



NOMOR URUT	URAIAN	Jumlah (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.2	Usan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	113.788.397,104,23	105.642.396,100,00	(8.146.001,004,23)		92,84
5.2.01	Tenaga Kerja	1.388,870,400,00	1.306,120,459,00	(82.749,941,00)		94,04
5.2.01.2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	1.388,870,400,00	1.306,120,459,00	(82.749,941,00)		94,04
5.2.01.2.12.01.2	BELANJA LANGSUNG	1.388,870,400,00	1.306,120,459,00	(82.749,941,00)		94,04
5.2.01.2.12.01.2.1	Belanja Pegawai	405,630,000,00	401,580,000,00	(4.050,000,00)		99,00
5.2.01.2.12.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	983,240,400,00	904,540,459,00	(78.699,941,00)		92,00
5.2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.545,174,000,00	1.321,344,664,00	(223,829,336,00)		85,51
5.2.02.1.05.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN	1.545,174,000,00	1.321,344,664,00	(223,829,336,00)		85,51
5.2.02.1.05.03.2	BELANJA LANGSUNG	1.545,174,000,00	1.321,344,664,00	(223,829,336,00)		85,51
5.2.02.1.05.03.2.1	Belanja Pegawai	94,370,000,00	58,445,000,00	(35,925,000,00)		61,93
5.2.02.1.05.03.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.450,804,000,00	1.262,899,664,00	(187,904,336,00)		87,05
5.2.03	Pangan	319,880,000,00	291,325,103,00	(28,554,897,00)		91,07
5.2.03.3.01.01	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	319,880,000,00	291,325,103,00	(28,554,897,00)		91,07
5.2.03.3.01.01.2	BELANJA LANGSUNG	319,880,000,00	291,325,103,00	(28,554,897,00)		91,07
5.2.03.3.01.01.2.1	Belanja Pegawai	22,810,000,00	20,760,000,00	(2,050,000,00)		91,01
5.2.03.3.01.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	297,070,000,00	270,565,103,00	(26,504,897,00)		91,08
5.2.03.3.01.01.2.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2.04	Pertanian	584,936,000,00	495,371,765,00	(89,564,235,00)		84,69
5.2.04.4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	584,936,000,00	495,371,765,00	(89,564,235,00)		84,69
5.2.04.4.01.03.2	BELANJA LANGSUNG	584,936,000,00	495,371,765,00	(89,564,235,00)		84,69
5.2.04.4.01.03.2.1	Belanja Pegawai	99,748,000,00	81,748,000,00	(18,000,000,00)		81,95
5.2.04.4.01.03.2.2	Belanja Barang dan Jasa	485,188,000,00	413,623,765,00	(71,564,235,00)		85,25
5.2.05	Lingkungan Hidup	5.730,708,571,00	5.462,511,077,00	(268,197,494,00)		95,32
5.2.05.1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN	2.479,556,000,00	2.339,167,874,00	(140,388,126,00)		94,34
5.2.05.1.03.01.2	BELANJA LANGSUNG	2.479,556,000,00	2.339,167,874,00	(140,388,126,00)		94,34
5.2.05.1.03.01.2.1	Belanja Pegawai	58,550,000,00	53,820,000,00	(4,730,000,00)		91,92
5.2.05.1.03.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.421,006,000,00	2.285,347,874,00	(135,658,126,00)		94,40
5.2.05.2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	3.251,152,571,00	3.123,343,203,00	(127,809,368,00)		96,07
5.2.05.2.09.01.2	BELANJA LANGSUNG	3.251,152,571,00	3.123,343,203,00	(127,809,368,00)		96,07
5.2.05.2.09.01.2.1	Belanja Pegawai	110,250,000,00	107,250,000,00	(3,000,000,00)		97,28
5.2.05.2.09.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.109,069,571,00	2.000,611,803,00	(108,457,768,00)		94,86
5.2.05.2.09.01.2.3	Belanja Modal	1.031,833,000,00	1.015,481,400,00	(16,351,600,00)		98,42

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.06	<b>Administrasi Kependudukan dan Capil</b>	7.550.592.306,00	7.458.777.266,00	(91.815.040,00)	98,78
5.2.06.2.06.01	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	7.550.592.306,00	7.458.777.266,00	(91.815.040,00)	98,78
5.2.06.2.06.01.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.893.077.406,00	3.845.959.230,00	(47.118.176,00)	98,79
5.2.06.2.06.01.1.1	Belanja Pegawai	3.893.077.406,00	3.845.959.230,00	(47.118.176,00)	98,79
5.2.06.2.06.01.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.657.514.900,00	3.612.818.036,00	(44.696.864,00)	98,78
5.2.06.2.06.01.2.1	Belanja Pegawai	1.154.670.000,00	1.121.419.947,00	(33.250.053,00)	97,12
5.2.06.2.06.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.034.385.000,00	2.027.268.089,00	(7.116.911,00)	99,65
5.2.06.2.06.01.2.3	Belanja Modal	468.459.900,00	464.130.000,00	(4.329.900,00)	99,08
5.2.07	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	4.088.719.400,00	3.934.419.526,00	(154.299.874,00)	96,23
5.2.07.1.05.03	<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	1.629.786.500,00	1.535.254.573,00	(94.531.927,00)	94,20
5.2.07.1.05.03.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.629.786.500,00	1.535.254.573,00	(94.531.927,00)	94,20
5.2.07.1.05.03.2.1	Belanja Pegawai	99.060.000,00	96.980.000,00	(2.080.000,00)	97,90
5.2.07.1.05.03.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.530.726.500,00	1.438.274.573,00	(92.451.927,00)	93,96
5.2.07.4.01.05	<b>KECAMATAN SIANTAN</b>	458.350.000,00	440.261.500,00	(18.088.500,00)	96,05
5.2.07.4.01.05.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	458.350.000,00	440.261.500,00	(18.088.500,00)	96,05
5.2.07.4.01.05.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	2.790.000,00	(210.000,00)	93,00
5.2.07.4.01.05.2.2	Belanja Barang dan Jasa	455.350.000,00	437.471.500,00	(17.878.500,00)	96,07
5.2.07.4.01.06	<b>KECAMATAN JEMAJA</b>	371.765.000,00	344.865.000,00	(26.900.000,00)	92,76
5.2.07.4.01.06.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	371.765.000,00	344.865.000,00	(26.900.000,00)	92,76
5.2.07.4.01.06.2.1	Belanja Pegawai	38.875.000,00	38.871.000,00	(4.000,00)	99,99
5.2.07.4.01.06.2.2	Belanja Barang dan Jasa	332.890.000,00	305.994.000,00	(26.896.000,00)	91,92
5.2.07.4.01.06.2.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.07.4.01.07	<b>KECAMATAN PALMATAK</b>	473.700.000,00	473.486.800,00	(213.200,00)	99,95
5.2.07.4.01.07.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	473.700.000,00	473.486.800,00	(213.200,00)	99,95
5.2.07.4.01.07.2.1	Belanja Pegawai	9.710.000,00	9.710.000,00	0,00	100,00
5.2.07.4.01.07.2.2	Belanja Barang dan Jasa	413.990.000,00	413.781.800,00	(208.200,00)	99,95
5.2.07.4.01.07.2.3	Belanja Modal	50.000.000,00	49.995.000,00	(5.000,00)	99,99
5.2.07.4.01.08	<b>KECAMATAN SIANTAN TIMUR</b>	288.750.000,00	282.561.253,00	(6.188.747,00)	97,86
5.2.07.4.01.08.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	288.750.000,00	282.561.253,00	(6.188.747,00)	97,86
5.2.07.4.01.08.2.1	Belanja Pegawai	5.472.000,00	5.472.000,00	0,00	100,00
5.2.07.4.01.08.2.2	Belanja Barang dan Jasa	283.278.000,00	277.089.253,00	(6.188.747,00)	97,82
5.2.07.4.01.09	<b>KECAMATAN SIANTAN SELATAN</b>	241.217.900,00	241.035.900,00	(182.000,00)	99,92
5.2.07.4.01.09.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	241.217.900,00	241.035.900,00	(182.000,00)	99,92

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.07.4.01.09.2.1	Belanja Pegawai	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00
5.2.07.4.01.09.2.2	Belanja Barang dan Jasa	237.967.900,00	237.785.900,00	(182.000,00)	99,92
5.2.07.4.01.10	<b>KECAMATAN JEMAJA TIMUR</b>	252.350.000,00	248.508.000,00	(3.842.000,00)	98,48
5.2.07.4.01.10.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	252.350.000,00	248.508.000,00	(3.842.000,00)	98,48
5.2.07.4.01.10.2.2	Belanja Barang dan Jasa	252.350.000,00	248.508.000,00	(3.842.000,00)	98,48
5.2.07.4.01.11	<b>KECAMATAN SIANTAN TENGAH</b>	241.100.000,00	241.100.000,00	0,00	100,00
5.2.07.4.01.11.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	241.100.000,00	241.100.000,00	0,00	100,00
5.2.07.4.01.11.2.1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00
5.2.07.4.01.11.2.2	Belanja Barang dan Jasa	233.000.000,00	233.000.000,00	0,00	100,00
5.2.07.4.01.12	<b>KECAMATAN SIANTAN UTARA</b>	74.700.000,00	70.790.000,00	(3.910.000,00)	94,77
5.2.07.4.01.12.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	74.700.000,00	70.790.000,00	(3.910.000,00)	94,77
5.2.07.4.01.12.2.1	Belanja Pegawai	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00
5.2.07.4.01.12.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.100.000,00	70.790.000,00	(3.310.000,00)	95,53
5.2.07.4.01.13	<b>KECAMATAN JEMAJA BARAT</b>	57.000.000,00	56.556.500,00	(443.500,00)	99,22
5.2.07.4.01.13.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	57.000.000,00	56.556.500,00	(443.500,00)	99,22
5.2.07.4.01.13.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	56.556.500,00	(443.500,00)	99,22
5.2.08	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	3.519.284.900,00	2.905.982.462,00	(613.302.438,00)	82,57
5.2.08.1.02.01	<b>DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	3.519.284.900,00	2.905.982.462,00	(613.302.438,00)	82,57
5.2.08.1.02.01.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.519.284.900,00	2.905.982.462,00	(613.302.438,00)	82,57
5.2.08.1.02.01.2.1	Belanja Pegawai	126.212.500,00	114.900.000,00	(11.312.500,00)	91,04
5.2.08.1.02.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.111.541.500,00	1.509.551.562,00	(601.989.938,00)	71,49
5.2.08.1.02.01.2.3	Belanja Modal	1.281.530.900,00	1.281.530.900,00	0,00	100,00
5.2.09	<b>Perhubungan</b>	40.508.798.862,25	38.454.966.334,00	(2.053.832.528,25)	94,93
5.2.09.2.09.01	<b>DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	40.508.798.862,25	38.454.966.334,00	(2.053.832.528,25)	94,93
5.2.09.2.09.01.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	6.092.001.076,96	5.730.715.095,00	(361.285.981,96)	94,07
5.2.09.2.09.01.1.1	Belanja Pegawai	6.092.001.076,96	5.730.715.095,00	(361.285.981,96)	94,07
5.2.09.2.09.01.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	34.416.797.785,29	32.724.251.239,00	(1.692.546.546,29)	95,08
5.2.09.2.09.01.2.1	Belanja Pegawai	6.153.795.400,00	5.847.385.974,00	(306.409.426,00)	95,02
5.2.09.2.09.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.226.316.492,00	4.969.291.063,00	(257.025.429,00)	95,08
5.2.09.2.09.01.2.3	Belanja Modal	23.036.685.893,29	21.907.574.202,00	(1.129.111.691,29)	95,10
5.2.10	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	16.264.976.885,00	15.669.787.689,00	(595.189.196,00)	96,34
5.2.10.2.10.01	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK</b>	11.845.439.885,00	11.374.886.351,00	(470.553.534,00)	96,03
5.2.10.2.10.01.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.637.248.683,00	3.478.632.222,00	(158.616.461,00)	95,64

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.10.2.10.01.1.1	Belanja Pegawai	3.637.248.683,00	3.478.632.222,00	(158.616.461,00)	95,64
5.2.10.2.10.01.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	8.208.191.202,00	7.896.254.129,00	(311.937.073,00)	96,20
5.2.10.2.10.01.2.1	Belanja Pegawai	1.252.657.500,00	1.193.411.849,00	(59.245.651,00)	95,27
5.2.10.2.10.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.334.838.217,00	5.103.340.637,00	(231.497.580,00)	95,66
5.2.10.2.10.01.2.3	Belanja Modal	1.620.695.485,00	1.599.501.643,00	(21.193.842,00)	98,69
5.2.10.4.01.03	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	4.419.537.000,00	4.294.901.338,00	(124.635.662,00)	97,18
5.2.10.4.01.03.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	4.419.537.000,00	4.294.901.338,00	(124.635.662,00)	97,18
5.2.10.4.01.03.2.1	Belanja Pegawai	175.550.000,00	165.950.000,00	(9.600.000,00)	94,53
5.2.10.4.01.03.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.231.987.000,00	4.117.016.338,00	(114.970.662,00)	97,28
5.2.10.4.01.03.2.3	Belanja Modal	12.000.000,00	11.935.000,00	(65.000,00)	99,46
5.2.11	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	7.543.491.362,98	7.277.418.341,00	(266.073.021,98)	96,47
5.2.11.2.11.01	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>	7.543.491.362,98	7.277.418.341,00	(266.073.021,98)	96,47
5.2.11.2.11.01.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.762.742.362,98	3.626.819.596,00	(135.922.766,98)	96,39
5.2.11.2.11.01.1.1	Belanja Pegawai	3.762.742.362,98	3.626.819.596,00	(135.922.766,98)	96,39
5.2.11.2.11.01.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.780.749.000,00	3.650.598.745,00	(130.150.255,00)	96,56
5.2.11.2.11.01.2.1	Belanja Pegawai	1.419.690.000,00	1.350.816.909,00	(68.873.091,00)	95,15
5.2.11.2.11.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.739.534.500,00	1.681.106.136,00	(58.428.364,00)	96,64
5.2.11.2.11.01.2.3	Belanja Modal	621.524.500,00	618.675.700,00	(2.848.800,00)	99,54
5.2.12	<b>Penanaman Modal</b>	7.298.076.322,00	7.108.543.743,00	(189.532.579,00)	97,40
5.2.12.2.12.01	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA</b>	7.298.076.322,00	7.108.543.743,00	(189.532.579,00)	97,40
5.2.12.2.12.01.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	5.140.857.922,00	4.968.726.141,00	(172.131.781,00)	96,65
5.2.12.2.12.01.1.1	Belanja Pegawai	5.140.857.922,00	4.968.726.141,00	(172.131.781,00)	96,65
5.2.12.2.12.01.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	2.157.218.400,00	2.139.817.602,00	(17.400.798,00)	99,19
5.2.12.2.12.01.2.1	Belanja Pegawai	1.042.180.000,00	1.029.091.368,00	(13.088.632,00)	98,74
5.2.12.2.12.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	978.160.000,00	973.986.334,00	(4.173.666,00)	99,57
5.2.12.2.12.01.2.3	Belanja Modal	136.878.400,00	136.739.900,00	(138.500,00)	99,90
5.2.13	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	14.334.218.500,00	10.982.297.018,00	(3.351.921.482,00)	76,62
5.2.13.1.01.01	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	14.334.218.500,00	10.982.297.018,00	(3.351.921.482,00)	76,62
5.2.13.1.01.01.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	14.334.218.500,00	10.982.297.018,00	(3.351.921.482,00)	76,62
5.2.13.1.01.01.2.1	Belanja Pegawai	234.927.000,00	219.402.000,00	(15.525.000,00)	93,39
5.2.13.1.01.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.639.041.500,00	8.373.411.231,00	(3.265.630.269,00)	71,94
5.2.13.1.01.01.2.3	Belanja Modal	2.460.250.000,00	2.389.483.787,00	(70.766.213,00)	97,12
5.2.14	<b>Statistik</b>	252.753.655,00	239.613.562,00	(13.140.093,00)	94,80
5.2.14.2.10.01	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK</b>	252.753.655,00	239.613.562,00	(13.140.093,00)	94,80

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.14.2.10.01.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	252.753.655,00	239.613.562,00	(13.140.093,00)	94,80
5.2.14.2.10.01.2.1	Belanja Pegawai	81.945.000,00	78.745.000,00	(3.200.000,00)	96,09
5.2.14.2.10.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	170.808.655,00	160.868.562,00	(9.940.093,00)	94,18
5.2.15	<b>Persandian</b>	159.750.000,00	153.840.028,00	(5.909.972,00)	96,30
5.2.15.2.10.01	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK</b>	159.750.000,00	153.840.028,00	(5.909.972,00)	96,30
5.2.15.2.10.01.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	159.750.000,00	153.840.028,00	(5.909.972,00)	96,30
5.2.15.2.10.01.2.1	Belanja Pegawai	14.850.000,00	9.350.000,00	(5.500.000,00)	62,96
5.2.15.2.10.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	144.900.000,00	144.490.028,00	(409.972,00)	99,72
5.2.16	<b>Kebudayaan</b>	2.270.265.940,00	2.153.449.893,00	(116.816.047,00)	94,85
5.2.16.3.02.01	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>	2.270.265.940,00	2.153.449.893,00	(116.816.047,00)	94,85
5.2.16.3.02.01.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	2.270.265.940,00	2.153.449.893,00	(116.816.047,00)	94,85
5.2.16.3.02.01.2.1	Belanja Pegawai	30.500.000,00	26.950.000,00	(3.550.000,00)	88,36
5.2.16.3.02.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.175.765.940,00	2.126.499.893,00	(49.266.047,00)	97,74
5.2.16.3.02.01.2.3	Belanja Modal	64.000.000,00	0,00	(64.000.000,00)	0,00
5.2.17	<b>Perpustakaan</b>	346.400.000,00	345.402.621,00	(997.379,00)	99,71
5.2.17.4.01.03	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	346.400.000,00	345.402.621,00	(997.379,00)	99,71
5.2.17.4.01.03.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	346.400.000,00	345.402.621,00	(997.379,00)	99,71
5.2.17.4.01.03.2.1	Belanja Pegawai	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	100,00
5.2.17.4.01.03.2.2	Belanja Barang dan Jasa	312.650.000,00	311.654.021,00	(995.979,00)	99,68
5.2.17.4.01.03.2.3	Belanja Modal	25.000.000,00	24.998.600,00	(1.400,00)	99,99
5.2.18	<b>Kearsipan</b>	81.500.000,00	81.224.549,00	(275.451,00)	99,66
5.2.18.4.01.03	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	81.500.000,00	81.224.549,00	(275.451,00)	99,66
5.2.18.4.01.03.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	81.500.000,00	81.224.549,00	(275.451,00)	99,66
5.2.18.4.01.03.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.500.000,00	81.224.549,00	(275.451,00)	99,66
5.3	<b>Urusan Pilihan</b>	68.580.494.206,00	62.776.459.013,00	(5.804.035.193,00)	91,54
5.3.01	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	24.313.311.060,00	22.328.352.473,00	(1.984.958.587,00)	91,84
5.3.01.3.01.01	<b>DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN</b>	24.313.311.060,00	22.328.352.473,00	(1.984.958.587,00)	91,84
5.3.01.3.01.01.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	10.879.592.700,00	9.852.748.990,00	(1.026.843.710,00)	90,56
5.3.01.3.01.01.1.1	Belanja Pegawai	10.879.592.700,00	9.852.748.990,00	(1.026.843.710,00)	90,56
5.3.01.3.01.01.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	13.433.718.360,00	12.475.603.483,00	(958.114.877,00)	92,87
5.3.01.3.01.01.2.1	Belanja Pegawai	3.569.790.500,00	3.313.156.629,00	(256.633.871,00)	92,81
5.3.01.3.01.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.176.754.760,00	8.595.647.754,00	(581.107.006,00)	93,67
5.3.01.3.01.01.2.3	Belanja Modal	687.173.100,00	566.799.100,00	(120.374.000,00)	82,48

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.3.02	<b>Pariwisata</b>	13.334.171.610,00	12.129.034.487,00	(1.205.137.123,00)	90,96
5.3.02.3.02.01	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>	13.334.171.610,00	12.129.034.487,00	(1.205.137.123,00)	90,96
5.3.02.3.02.01.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	4.552.943.550,00	4.004.036.143,00	(548.907.407,00)	87,94
5.3.02.3.02.01.1.1	Belanja Pegawai	4.552.943.550,00	4.004.036.143,00	(548.907.407,00)	87,94
5.3.02.3.02.01.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	8.781.228.060,00	8.124.998.344,00	(656.229.716,00)	92,53
5.3.02.3.02.01.2.1	Belanja Pegawai	1.212.907.500,00	1.040.448.531,00	(172.458.969,00)	85,78
5.3.02.3.02.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.354.000.470,00	5.205.731.509,00	(148.268.961,00)	97,23
5.3.02.3.02.01.2.3	Belanja Modal	2.214.320.090,00	1.878.818.304,00	(335.501.786,00)	84,85
5.3.03	<b>Pertanian</b>	4.344.704.300,00	3.455.089.541,00	(889.614.759,00)	79,52
5.3.03.3.01.01	<b>DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN</b>	4.344.704.300,00	3.455.089.541,00	(889.614.759,00)	79,52
5.3.03.3.01.01.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	4.344.704.300,00	3.455.089.541,00	(889.614.759,00)	79,52
5.3.03.3.01.01.2.1	Belanja Pegawai	64.925.000,00	55.800.000,00	(9.125.000,00)	85,95
5.3.03.3.01.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.168.779.300,00	3.294.990.341,00	(873.788.959,00)	79,04
5.3.03.3.01.01.2.3	Belanja Modal	111.000.000,00	104.299.200,00	(6.700.800,00)	93,96
5.3.06	<b>Perdagangan</b>	12.974.249.909,00	12.634.125.113,00	(340.124.796,00)	97,38
5.3.06.2.11.01	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>	12.974.249.909,00	12.634.125.113,00	(340.124.796,00)	97,38
5.3.06.2.11.01.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	12.974.249.909,00	12.634.125.113,00	(340.124.796,00)	97,38
5.3.06.2.11.01.2.1	Belanja Pegawai	76.081.000,00	24.700.000,00	(51.381.000,00)	32,47
5.3.06.2.11.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	886.586.500,00	860.007.598,00	(26.578.902,00)	97,00
5.3.06.2.11.01.2.3	Belanja Modal	12.011.582.409,00	11.749.417.515,00	(262.164.894,00)	97,82
5.3.07	<b>Perindustrian</b>	13.466.057.327,00	12.082.673.599,00	(1.383.383.728,00)	89,73
5.3.07.2.11.01	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>	13.466.057.327,00	12.082.673.599,00	(1.383.383.728,00)	89,73
5.3.07.2.11.01.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	13.466.057.327,00	12.082.673.599,00	(1.383.383.728,00)	89,73
5.3.07.2.11.01.2.1	Belanja Pegawai	50.525.000,00	44.875.000,00	(5.650.000,00)	88,82
5.3.07.2.11.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	376.552.200,00	365.681.595,00	(10.870.605,00)	97,11
5.3.07.2.11.01.2.3	Belanja Modal	13.038.980.127,00	11.672.117.004,00	(1.366.863.123,00)	89,52
5.3.08	<b>Transmigrasi</b>	148.000.000,00	147.183.800,00	(816.200,00)	99,45
5.3.08.2.12.01	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA</b>	148.000.000,00	147.183.800,00	(816.200,00)	99,45
5.3.08.2.12.01.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	148.000.000,00	147.183.800,00	(816.200,00)	99,45
5.3.08.2.12.01.2.1	Belanja Pegawai	36.250.000,00	35.450.000,00	(800.000,00)	97,79
5.3.08.2.12.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	111.750.000,00	111.733.800,00	(16.200,00)	99,99
5.4	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>	342.503.772.750,52	320.312.311.556,40	(22.191.461.194,12)	93,52
5.4.01	<b>Administrasi Pemerintahan</b>	130.368.417.153,58	122.697.729.445,00	(7.670.687.708,58)	94,12
5.4.01.4.01.01	<b>DPRD</b>	1.592.919.950,00	1.463.041.566,00	(129.878.384,00)	91,85

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.4.01.4.01.01.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.592.919.950,00	1.463.041.566,00	(129.878.384,00)	91,85
5.4.01.4.01.01.1.1	Belanja Pegawai	1.592.919.950,00	1.463.041.566,00	(129.878.384,00)	91,85
5.4.01.4.01.02	<b>KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH</b>	1.200.139.375,00	888.798.643,00	(311.340.732,00)	74,06
5.4.01.4.01.02.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.200.139.375,00	888.798.643,00	(311.340.732,00)	74,06
5.4.01.4.01.02.1.1	Belanja Pegawai	1.200.139.375,00	888.798.643,00	(311.340.732,00)	74,06
5.4.01.4.01.03	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	54.046.989.699,00	51.845.489.284,00	(2.201.500.415,00)	95,93
5.4.01.4.01.03.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	14.451.792.620,00	13.806.767.520,00	(645.025.100,00)	95,54
5.4.01.4.01.03.1.1	Belanja Pegawai	14.451.792.620,00	13.806.767.520,00	(645.025.100,00)	95,54
5.4.01.4.01.03.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	39.595.197.079,00	38.038.721.764,00	(1.556.475.315,00)	96,07
5.4.01.4.01.03.2.1	Belanja Pegawai	8.666.183.698,00	8.394.553.494,00	(271.630.204,00)	96,87
5.4.01.4.01.03.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.011.884.501,00	23.816.939.858,00	(1.194.944.643,00)	95,22
5.4.01.4.01.03.2.3	Belanja Modal	5.917.128.880,00	5.827.228.412,00	(89.900.468,00)	98,48
5.4.01.4.01.04	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	39.690.483.908,00	36.374.323.921,00	(3.316.159.987,00)	91,64
5.4.01.4.01.04.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	12.243.305.777,00	11.985.445.063,00	(257.860.714,00)	97,89
5.4.01.4.01.04.1.1	Belanja Pegawai	12.243.305.777,00	11.985.445.063,00	(257.860.714,00)	97,89
5.4.01.4.01.04.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	27.447.178.131,00	24.388.878.858,00	(3.058.299.273,00)	88,86
5.4.01.4.01.04.2.1	Belanja Pegawai	2.157.917.500,00	2.048.360.271,00	(109.557.229,00)	94,92
5.4.01.4.01.04.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.293.395.331,00	21.367.385.287,00	(2.926.010.044,00)	87,96
5.4.01.4.01.04.2.3	Belanja Modal	995.865.300,00	973.133.300,00	(22.732.000,00)	97,72
5.4.01.4.01.05	<b>KECAMATAN SIANTAN</b>	7.530.160.787,00	7.190.887.425,00	(339.273.362,00)	95,49
5.4.01.4.01.05.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.125.757.287,00	3.022.772.459,00	(102.984.828,00)	96,71
5.4.01.4.01.05.1.1	Belanja Pegawai	3.125.757.287,00	3.022.772.459,00	(102.984.828,00)	96,71
5.4.01.4.01.05.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	4.404.403.500,00	4.168.114.966,00	(236.288.534,00)	94,64
5.4.01.4.01.05.2.1	Belanja Pegawai	1.429.350.000,00	1.385.125.166,00	(44.224.834,00)	96,91
5.4.01.4.01.05.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.842.378.500,00	1.760.171.900,00	(82.206.600,00)	95,54
5.4.01.4.01.05.2.3	Belanja Modal	1.132.675.000,00	1.022.817.900,00	(109.857.100,00)	90,30
5.4.01.4.01.06	<b>KECAMATAN JEMAJA</b>	7.161.983.790,00	6.750.668.791,00	(411.314.999,00)	94,26
5.4.01.4.01.06.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.850.250.740,00	3.470.904.843,00	(379.345.897,00)	90,15
5.4.01.4.01.06.1.1	Belanja Pegawai	3.850.250.740,00	3.470.904.843,00	(379.345.897,00)	90,15
5.4.01.4.01.06.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.311.733.050,00	3.279.763.948,00	(31.969.102,00)	99,03
5.4.01.4.01.06.2.1	Belanja Pegawai	1.607.245.000,00	1.585.763.619,00	(21.481.381,00)	98,66
5.4.01.4.01.06.2.2	Belanja Barang dan Jasa	934.804.199,00	929.771.079,00	(5.033.120,00)	99,46
5.4.01.4.01.06.2.3	Belanja Modal	769.683.851,00	764.229.250,00	(5.454.601,00)	99,29



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.4.01.4.01.07	<b>KECAMATAN PALMATAK</b>	5.027.961.961,58	4.906.355.575,00	(121.606.386,58)	97,58
5.4.01.4.01.07.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.981.157.961,58	2.886.679.065,00	(94.478.896,58)	96,83
5.4.01.4.01.07.1.1	Belanja Pegawai	2.981.157.961,58	2.886.679.065,00	(94.478.896,58)	96,83
5.4.01.4.01.07.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	2.046.804.000,00	2.019.676.510,00	(27.127.490,00)	98,67
5.4.01.4.01.07.2.1	Belanja Pegawai	1.236.815.000,00	1.209.954.001,00	(26.860.999,00)	97,83
5.4.01.4.01.07.2.2	Belanja Barang dan Jasa	716.216.000,00	716.005.509,00	(210.491,00)	99,97
5.4.01.4.01.07.2.3	Belanja Modal	93.773.000,00	93.717.000,00	(56.000,00)	99,94
5.4.01.4.01.08	<b>KECAMATAN SIANTAN TIMUR</b>	2.765.410.379,00	2.587.941.210,00	(177.469.169,00)	93,58
5.4.01.4.01.08.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.656.187.947,00	1.497.583.538,00	(158.604.409,00)	90,42
5.4.01.4.01.08.1.1	Belanja Pegawai	1.656.187.947,00	1.497.583.538,00	(158.604.409,00)	90,42
5.4.01.4.01.08.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.109.222.432,00	1.090.357.672,00	(18.864.760,00)	98,30
5.4.01.4.01.08.2.1	Belanja Pegawai	600.150.000,00	587.374.897,00	(12.775.103,00)	97,87
5.4.01.4.01.08.2.2	Belanja Barang dan Jasa	411.858.000,00	408.187.200,00	(3.670.800,00)	99,11
5.4.01.4.01.08.2.3	Belanja Modal	97.214.432,00	94.795.575,00	(2.418.857,00)	97,51
5.4.01.4.01.09	<b>KECAMATAN SIANTAN SELATAN</b>	2.654.718.910,00	2.590.163.078,00	(64.555.832,00)	97,57
5.4.01.4.01.09.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.792.478.210,00	1.742.676.400,00	(49.801.810,00)	97,22
5.4.01.4.01.09.1.1	Belanja Pegawai	1.792.478.210,00	1.742.676.400,00	(49.801.810,00)	97,22
5.4.01.4.01.09.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	862.240.700,00	847.486.678,00	(14.754.022,00)	98,29
5.4.01.4.01.09.2.1	Belanja Pegawai	395.882.400,00	383.290.000,00	(12.592.400,00)	96,82
5.4.01.4.01.09.2.2	Belanja Barang dan Jasa	456.194.300,00	455.496.678,00	(697.622,00)	99,85
5.4.01.4.01.09.2.3	Belanja Modal	10.164.000,00	8.700.000,00	(1.464.000,00)	85,60
5.4.01.4.01.10	<b>KECAMATAN JEMAJA TIMUR</b>	3.623.176.950,00	3.447.212.736,00	(175.964.214,00)	95,14
5.4.01.4.01.10.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.709.816.950,00	2.574.943.541,00	(134.873.409,00)	95,02
5.4.01.4.01.10.1.1	Belanja Pegawai	2.709.816.950,00	2.574.943.541,00	(134.873.409,00)	95,02
5.4.01.4.01.10.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	913.360.000,00	872.269.195,00	(41.090.805,00)	95,50
5.4.01.4.01.10.2.1	Belanja Pegawai	637.260.000,00	612.530.062,00	(24.729.938,00)	96,12
5.4.01.4.01.10.2.2	Belanja Barang dan Jasa	271.100.000,00	259.739.133,00	(11.360.867,00)	95,81
5.4.01.4.01.10.2.3	Belanja Modal	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00
5.4.01.4.01.11	<b>KECAMATAN SIANTAN TENGAH</b>	3.642.509.315,00	3.545.734.049,00	(96.775.266,00)	97,34
5.4.01.4.01.11.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.077.335.315,00	2.012.136.894,00	(65.198.421,00)	96,86
5.4.01.4.01.11.1.1	Belanja Pegawai	2.077.335.315,00	2.012.136.894,00	(65.198.421,00)	96,86
5.4.01.4.01.11.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.565.174.000,00	1.533.597.155,00	(31.576.845,00)	97,98
5.4.01.4.01.11.2.1	Belanja Pegawai	662.640.000,00	633.238.716,00	(29.401.284,00)	95,56
5.4.01.4.01.11.2.2	Belanja Barang dan Jasa	472.204.000,00	472.128.439,00	(75.561,00)	99,98

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.4.01.4.01.11.2.3	Belanja Modal	430.330.000,00	428.230.000,00	(2.100.000,00)	99,51
5.4.01.4.01.12	<b>KECAMATAN SIANTAN UTARA</b>	502.497.174,00	432.627.982,00	(69.869.192,00)	86,10
5.4.01.4.01.12.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	326.597.174,00	265.455.882,00	(61.141.292,00)	81,28
5.4.01.4.01.12.1.1	Belanja Pegawai	326.597.174,00	265.455.882,00	(61.141.292,00)	81,28
5.4.01.4.01.12.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	175.900.000,00	167.172.100,00	(8.727.900,00)	95,04
5.4.01.4.01.12.2.1	Belanja Pegawai	11.350.000,00	11.110.000,00	(240.000,00)	97,89
5.4.01.4.01.12.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	94.519.000,00	(481.000,00)	99,49
5.4.01.4.01.12.2.3	Belanja Modal	69.550.000,00	61.543.100,00	(8.006.900,00)	88,49
5.4.01.4.01.13	<b>KECAMATAN JEMAJA BARAT</b>	929.464.955,00	674.485.185,00	(254.979.770,00)	72,57
5.4.01.4.01.13.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	630.494.955,00	382.577.025,00	(247.917.930,00)	60,68
5.4.01.4.01.13.1.1	Belanja Pegawai	630.494.955,00	382.577.025,00	(247.917.930,00)	60,68
5.4.01.4.01.13.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	298.970.000,00	291.908.160,00	(7.061.840,00)	97,64
5.4.01.4.01.13.2.1	Belanja Pegawai	20.925.000,00	20.925.000,00	0,00	100,00
5.4.01.4.01.13.2.2	Belanja Barang dan Jasa	210.020.000,00	203.085.660,00	(6.934.340,00)	96,70
5.4.01.4.01.13.2.3	Belanja Modal	68.025.000,00	67.897.500,00	(127.500,00)	99,81
5.4.02	<b>Pengawasan</b>	13.266.654.000,00	12.780.499.523,00	(486.154.477,00)	96,34
5.4.02.4.01.03	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	426.500.000,00	364.702.400,00	(61.797.600,00)	85,51
5.4.02.4.01.03.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	426.500.000,00	364.702.400,00	(61.797.600,00)	85,51
5.4.02.4.01.03.2.1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	22.000.000,00	(2.000.000,00)	91,67
5.4.02.4.01.03.2.2	Belanja Barang dan Jasa	402.500.000,00	342.702.400,00	(59.797.600,00)	85,14
5.4.02.4.02.01	<b>INSPEKTORAT</b>	12.840.154.000,00	12.415.797.123,00	(424.356.877,00)	96,70
5.4.02.4.02.01.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	6.932.850.000,00	6.754.433.808,00	(178.416.192,00)	97,43
5.4.02.4.02.01.1.1	Belanja Pegawai	6.932.850.000,00	6.754.433.808,00	(178.416.192,00)	97,43
5.4.02.4.02.01.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	5.907.304.000,00	5.661.363.315,00	(245.940.685,00)	95,84
5.4.02.4.02.01.2.1	Belanja Pegawai	1.686.869.668,00	1.636.275.088,00	(50.594.580,00)	97,00
5.4.02.4.02.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.117.695.232,00	3.922.819.627,00	(194.875.605,00)	95,27
5.4.02.4.02.01.2.3	Belanja Modal	102.739.100,00	102.268.600,00	(470.500,00)	99,54
5.4.03	<b>Perencanaan</b>	13.847.625.320,12	12.691.257.188,00	(1.156.368.132,12)	91,65
5.4.03.4.01.03	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	1.801.941.500,00	1.777.825.598,00	(24.115.902,00)	98,66
5.4.03.4.01.03.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.801.941.500,00	1.777.825.598,00	(24.115.902,00)	98,66
5.4.03.4.01.03.2.1	Belanja Pegawai	225.419.000,00	210.786.000,00	(14.633.000,00)	93,51
5.4.03.4.01.03.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.557.695.000,00	1.548.212.098,00	(9.482.902,00)	99,39
5.4.03.4.01.03.2.3	Belanja Modal	18.827.500,00	18.827.500,00	0,00	100,00
5.4.03.4.03.01	<b>BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN DAERAH</b>	12.045.683.820,12	10.913.431.590,00	(1.132.252.230,12)	90,60

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.4.03.4.03.01.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	6.213.103.394,12	5.281.211.866,00	(931.891.528,12)	85,00
5.4.03.4.03.01.1.1	Belanja Pegawai	6.213.103.394,12	5.281.211.866,00	(931.891.528,12)	85,00
5.4.03.4.03.01.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	5.832.580.426,00	5.632.219.724,00	(200.360.702,00)	96,56
5.4.03.4.03.01.2.1	Belanja Pegawai	1.856.475.000,00	1.730.914.302,00	(125.560.698,00)	93,24
5.4.03.4.03.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.582.110.426,00	3.525.298.022,00	(56.812.404,00)	98,41
5.4.03.4.03.01.2.3	Belanja Modal	393.995.000,00	376.007.400,00	(17.987.600,00)	95,43
5.4.04	<b>Keuangan</b>	172.455.123.906,98	160.730.446.290,00	(11.724.677.616,98)	93,20
5.4.04.4.04.05	<b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b>	172.455.123.906,98	160.730.446.290,00	(11.724.677.616,98)	93,20
5.4.04.4.04.05.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	157.949.383.975,58	147.184.733.092,00	(10.764.650.883,58)	93,18
5.4.04.4.04.05.1.1	Belanja Pegawai	10.663.585.615,58	8.757.785.142,00	(1.905.800.473,58)	82,13
5.4.04.4.04.05.1.4	Belanja Hibah	4.541.892.000,00	4.278.388.000,00	(263.504.000,00)	94,20
5.4.04.4.04.05.1.5	Belanja Bantuan Sosial	183.555.000,00	156.555.000,00	(27.000.000,00)	85,29
5.4.04.4.04.05.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	141.971.383.360,00	133.992.004.950,00	(7.979.378.410,00)	94,38
5.4.04.4.04.05.1.8	Belanja Tidak Terduga	588.968.000,00	0,00	(588.968.000,00)	0,00
5.4.04.4.04.05.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	14.505.739.931,40	13.545.713.198,00	(960.026.733,40)	93,38
5.4.04.4.04.05.2.1	Belanja Pegawai	6.147.280.000,00	5.650.549.048,00	(496.730.952,00)	91,92
5.4.04.4.04.05.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.665.977.031,40	7.225.030.850,00	(440.946.181,40)	94,25
5.4.04.4.04.05.2.3	Belanja Modal	692.482.900,00	670.133.300,00	(22.349.600,00)	96,77
5.4.05	<b>Kepegawaian</b>	11.512.984.794,84	10.422.362.120,40	(1.090.622.674,44)	90,53
5.4.05.4.05.08	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	11.512.984.794,84	10.422.362.120,40	(1.090.622.674,44)	90,53
5.4.05.4.05.08.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	4.286.452.793,00	3.829.328.700,00	(457.124.093,00)	89,34
5.4.05.4.05.08.1.1	Belanja Pegawai	4.286.452.793,00	3.829.328.700,00	(457.124.093,00)	89,34
5.4.05.4.05.08.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	7.226.532.001,84	6.593.033.420,40	(633.498.581,44)	91,23
5.4.05.4.05.08.2.1	Belanja Pegawai	949.280.000,00	845.470.909,00	(103.809.091,00)	89,06
5.4.05.4.05.08.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.013.197.001,84	5.499.173.326,40	(514.023.675,44)	91,45
5.4.05.4.05.08.2.3	Belanja Modal	264.055.000,00	248.389.185,00	(15.665.815,00)	94,07
5.4.07	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>	1.052.967.575,00	990.016.990,00	(62.950.585,00)	94,02
5.4.07.4.01.03	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	494.737.975,00	455.376.217,00	(39.361.758,00)	92,04
5.4.07.4.01.03.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	494.737.975,00	455.376.217,00	(39.361.758,00)	92,04
5.4.07.4.01.03.2.1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00
5.4.07.4.01.03.2.2	Belanja Barang dan Jasa	491.937.975,00	452.576.217,00	(39.361.758,00)	92,00
5.4.07.4.03.01	<b>BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN DAERAH</b>	558.229.600,00	534.640.773,00	(23.588.827,00)	95,77
5.4.07.4.03.01.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	558.229.600,00	534.640.773,00	(23.588.827,00)	95,77



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
6.1	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
6.1.01	<b>Pendidikan</b>				
6.1.01.1.01.01	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>				
6.1.01.1.01.01.4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	212.612.031.947,59	212.612.031.947,59	0,00
6.1.01.1.01.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	212.612.031.947,59	212.612.031.947,59	0,00
6.1.02	<b>Kesehatan</b>				
6.1.02.1.02.01	<b>DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				
6.1.02.1.02.01.4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	165.204.925.592,00	165.204.925.592,00	0,00
6.1.02.1.02.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	165.204.925.592,00	165.204.925.592,00	0,00
6.1.03	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
6.1.03.1.03.01	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				
6.1.03.1.03.01.4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	217.874.735.076,00	217.874.735.076,00	0,00
6.1.03.1.03.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	217.874.735.076,00	217.874.735.076,00	0,00
6.1.05	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>				
6.1.05.1.05.01	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>				
6.1.05.1.05.01.4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	13.514.975.588,00	13.514.975.588,00	0,00
6.1.05.1.05.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	13.514.975.588,00	13.514.975.588,00	0,00
6.1.05.1.05.02	<b>BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>				
6.1.05.1.05.02.4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	7.483.564.157,00	7.483.564.157,00	0,00
6.1.05.1.05.02.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	7.483.564.157,00	7.483.564.157,00	0,00
6.1.05.1.05.03	<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>				
6.1.05.1.05.03.4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	15.507.448.080,00	15.507.448.080,00	0,00
6.1.05.1.05.03.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	15.507.448.080,00	15.507.448.080,00	0,00
6.2	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>				
6.2.06	<b>Administrasi Kependudukan dan Capil</b>				
6.2.06.2.06.01	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				
6.2.06.2.06.01.4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	7.458.777.266,00	7.458.777.266,00	0,00
6.2.06.2.06.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	7.458.777.266,00	7.458.777.266,00	0,00
6.2.09	<b>Perhubungan</b>				
6.2.09.2.09.01	<b>DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6.2.09.2.09.01.4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	41.459.648.537,00	41.459.648.537,00	0,00
6.2.09.2.09.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	41.459.648.537,00	41.459.648.537,00	0,00
6.2.10	<b>Komunikasi dan Informatika</b>				
6.2.10.2.10.01	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK</b>				
6.2.10.2.10.01.4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	11.768.339.941,00	11.768.339.941,00	0,00
6.2.10.2.10.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	11.768.339.941,00	11.768.339.941,00	0,00
6.2.11	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>				
6.2.11.2.11.01	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>				
6.2.11.2.11.01.4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	31.897.793.543,00	31.897.793.543,00	0,00
6.2.11.2.11.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	31.897.793.543,00	31.897.793.543,00	0,00
6.2.12	<b>Penanaman Modal</b>				
6.2.12.2.12.01	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA</b>				
6.2.12.2.12.01.4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	8.561.373.627,00	8.561.373.627,00	0,00
6.2.12.2.12.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	8.561.373.627,00	8.561.373.627,00	0,00
6.3	<b>Urusan Pilihan</b>				
6.3.01	<b>Kelautan dan Perikanan</b>				
6.3.01.3.01.01	<b>DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN</b>				
6.3.01.3.01.01.4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	26.074.767.117,00	26.074.767.117,00	0,00
6.3.01.3.01.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	26.074.767.117,00	26.074.767.117,00	0,00
6.3.02	<b>Pariwisata</b>				
6.3.02.3.02.01	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>				
6.3.02.3.02.01.4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	14.282.484.380,00	14.282.484.380,00	0,00
6.3.02.3.02.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	14.282.484.380,00	14.282.484.380,00	0,00
6.4	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>				
6.4.01	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
6.4.01.4.01.01	<b>DPRD</b>				
6.4.01.4.01.01.4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	1.463.041.566,00	1.463.041.566,00	0,00
6.4.01.4.01.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	1.463.041.566,00	1.463.041.566,00	0,00
6.4.01.4.01.02	<b>KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH</b>				
6.4.01.4.01.02.4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	888.798.643,00	888.798.643,00	0,00
6.4.01.4.01.02.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	888.798.643,00	888.798.643,00	0,00
6.4.01.4.01.03	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6.4.01.4.01.03.4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	64.817.968.909,00	64.817.968.909,00	0,00
6.4.01.4.01.03.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	64.817.968.909,00	64.817.968.909,00	0,00
6.4.01.4.01.04	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>				
6.4.01.4.01.04.4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	36.374.323.921,00	36.374.323.921,00	0,00
6.4.01.4.01.04.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	36.374.323.921,00	36.374.323.921,00	0,00
6.4.01.4.01.05	<b>KECAMATAN SIANTAN</b>				
6.4.01.4.01.05.4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	7.631.148.925,00	7.631.148.925,00	0,00
6.4.01.4.01.05.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	7.631.148.925,00	7.631.148.925,00	0,00
6.4.01.4.01.06	<b>KECAMATAN JEMAJA</b>				
6.4.01.4.01.06.4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	7.095.533.791,00	7.095.533.791,00	0,00
6.4.01.4.01.06.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	7.095.533.791,00	7.095.533.791,00	0,00
6.4.01.4.01.07	<b>KECAMATAN PALMATAK</b>				
6.4.01.4.01.07.4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	5.379.842.375,00	5.379.842.375,00	0,00
6.4.01.4.01.07.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	5.379.842.375,00	5.379.842.375,00	0,00
6.4.01.4.01.08	<b>KECAMATAN SIANTAN TIMUR</b>				
6.4.01.4.01.08.4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	2.870.502.463,00	2.870.502.463,00	0,00
6.4.01.4.01.08.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	2.870.502.463,00	2.870.502.463,00	0,00
6.4.01.4.01.09	<b>KECAMATAN SIANTAN SELATAN</b>				
6.4.01.4.01.09.4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	2.831.198.978,00	2.831.198.978,00	0,00
6.4.01.4.01.09.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	2.831.198.978,00	2.831.198.978,00	0,00
6.4.01.4.01.10	<b>KECAMATAN JEMAJA TIMUR</b>				
6.4.01.4.01.10.4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	3.695.720.736,00	3.695.720.736,00	0,00
6.4.01.4.01.10.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	3.695.720.736,00	3.695.720.736,00	0,00
6.4.01.4.01.11	<b>KECAMATAN SIANTAN TENGAH</b>				
6.4.01.4.01.11.4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	3.786.834.049,00	3.786.834.049,00	0,00
6.4.01.4.01.11.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	3.786.834.049,00	3.786.834.049,00	0,00
6.4.01.4.01.12	<b>KECAMATAN SIANTAN UTARA</b>				
6.4.01.4.01.12.4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	503.417.982,00	503.417.982,00	0,00
6.4.01.4.01.12.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	503.417.982,00	503.417.982,00	0,00
6.4.01.4.01.13	<b>KECAMATAN JEMAJA BARAT</b>				
6.4.01.4.01.13.4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	731.041.685,00	731.041.685,00	0,00
6.4.01.4.01.13.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	731.041.685,00	731.041.685,00	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6 . 4.02	<b>Pengawasan</b>				
6 . 4.02 . 4.02.01	<b>INSPEKTORAT</b>				
6 . 4.02 . 4.02.01 . 4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	12.415.797.123,00	12.415.797.123,00	0,00
6 . 4.02 . 4.02.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	12.415.797.123,00	12.415.797.123,00	0,00
6 . 4.03	<b>Perencanaan</b>				
6 . 4.03 . 4.03.01	<b>BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN DAERAH</b>				
6 . 4.03 . 4.03.01 . 4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	11.448.072.363,00	11.448.072.363,00	0,00
6 . 4.03 . 4.03.01 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	11.448.072.363,00	11.448.072.363,00	0,00
6 . 4.04	<b>Keuangan</b>				
6 . 4.04 . 4.04.05	<b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b>				
6 . 4.04 . 4.04.05 . 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	57.721.052.240,42	57.989.127.236,42	268.074.996,00	100,46
6 . 4.04 . 4.04.05 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	57.221.052.240,42	57.221.052.240,42	0,00	100,00
6 . 4.04 . 4.04.05 . 1 . 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	500.000.000,00	768.074.996,00	268.074.996,00	153,61
6 . 4.04 . 4.04.05 . 2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00
6 . 4.04 . 4.04.05 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00
6 . 4.04 . 4.04.05 . 4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	(1.010.039.857.427,39)	(1.010.039.857.427,39)	0,00
6 . 4.04 . 4.04.05 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	(1.010.039.857.427,39)	(1.010.039.857.427,39)	0,00
6 . 4.05	<b>Kepegawaian</b>				
6 . 4.05 . 4.05.08	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
6 . 4.05 . 4.05.08 . 4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	10.422.362.120,40	10.422.362.120,40	0,00
6 . 4.05 . 4.05.08 . 4 . 1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	10.422.362.120,40	10.422.362.120,40	0,00


  
 Parempa, 28 Agustus 2020  
**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,**  
**ABDUL HARIS, S.H.**



# LAMPIRAN I.2



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**  
**RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00.0.00.00.00.00.4	<b>PENDAPATAN</b>	1.211.349.156.455,20	1.121.205.421.730,97	(90.143.734.724,23)	92,56	PERDA Nomor : 2 Tahun 2011 PERDA Nomor : 2 Tahun 2011 PERDA Nomor : 2 Tahun 2011 PERDA Nomor : 2 Tahun 2011 Permendagri 21 Tahun 2011 PERDA Nomor : 3 Tahun 2011 PERDA Nomor : 3 Tahun 2011 PERDA Nomor : 8 Tahun 2014 PERDA No. 3 Tahun 2012 Permendagri 21 Tahun 2011 Permendagri 21 Tahun 2011 Permendagri 21 Tahun 2011 Perpres No. 32 Tahun 2014, SE Mendagri 900
0.00.0.00.00.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	42.966.598.128,00	36.560.321.314,96	(6.406.276.813,04)	85,09	
0.00.0.00.00.00.00.4.1.1	Hasil Pajak Daerah	19.151.855.000,00	16.913.698.911,36	(2.238.156.088,64)	88,31	
0.00.0.00.00.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.035.952.375,00	4.997.895.282,00	(38.057.093,00)	99,24	
0.00.0.00.00.00.00.4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.934.686.786,00	1.451.789.587,00	(482.897.199,00)	75,04	
0.00.0.00.00.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.844.103.967,00	13.196.937.534,60	(3.647.166.432,40)	78,35	
0.00.0.00.00.00.00.4.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.060.133.627.531,00	985.056.008.411,00	(75.077.619.120,00)	92,92	
0.00.0.00.00.00.00.4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	490.642.772.901,00	415.913.826.480,00	(74.728.946.421,00)	84,77	
0.00.0.00.00.00.00.4.2.2	Dana Alokasi Umum	385.760.629.000,00	388.403.719.000,00	2.643.090.000,00	100,69	
0.00.0.00.00.00.00.4.2.3	Dana Alokasi Khusus	183.730.225.630,00	180.738.462.931,00	(2.991.762.699,00)	98,37	
0.00.0.00.00.00.00.4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	108.248.930.796,20	99.589.092.005,01	(8.659.838.791,19)	92,00	SK Gubernur Kepri No. .... Tahun 2016 PERPRES No. 137 Tahun 2016 Peraturan Gubernur Kepri
0.00.0.00.00.00.00.4.3.1	Pendapatan Hibah	10.800.400.000,00	10.787.832.655,01	(12.567.344,99)	99,88	
0.00.0.00.00.00.00.4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	38.268.855.796,20	37.621.584.350,00	(647.271.446,20)	98,31	
0.00.0.00.00.00.00.4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	51.179.675.000,00	51.179.675.000,00	0,00	100,00	
0.00.0.00.00.00.00.4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	8.000.000.000,00	0,00	(8.000.000.000,00)	0,00	
0.00.0.00.00.00.00.5	<b>BELANJA</b>	1.268.570.208.695,62	1.114.711.162.520,99	(153.859.046.174,63)	87,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	441.891.703.444,60	391.055.399.453,00	(50.836.303.991,60)	88,50	PP RI Nomor 70 Tahun 2015 PP No. 69 Tahun 2010 DAK Non Fisik T.A 2018  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 PP Nomor 83 Tahun 2012
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	293.405.765.709,60	251.739.652.860,00	(41.666.112.849,60)	85,80	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	Belanja Hibah	4.541.892.000,00	4.278.388.000,00	(263.504.000,00)	94,20	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	183.555.000,00	156.555.000,00	(27.000.000,00)	85,29	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	141.971.383.360,00	133.992.004.950,00	(7.979.378.410,00)	94,38	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	588.968.000,00	0,00	(588.968.000,00)	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.200.139.375,00	888.798.643,00	(311.340.732,00)	74,06	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	826.678.505.251,02	723.655.763.067,99	(103.022.742.183,03)	87,54	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 2 . 1	<b>Non Program</b>	0,00	(12.092.500,00)	(12.092.500,00)	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 2 . 2	<i>Non Kegiatan</i>	0,00	(12.092.500,00)	(12.092.500,00)	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 2 . 3	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	(12.096.000,00)	(12.096.000,00)	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 2 . 3	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	192.230.430.444,38	178.548.803.429,40	(13.681.627.014,98)	92,88	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 2 . 3 . 1	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	2.176.680.000,00	1.669.366.425,00	(507.313.575,00)	76,69	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 2 . 3 . 1	Belanja Barang dan Jasa	1.576.680.000,00	1.108.366.425,00	(468.313.575,00)	70,30	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 2 . 3 . 1	Belanja Modal	600.000.000,00	561.000.000,00	(39.000.000,00)	93,50	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 2 . 3 . 2	<i>Jasa Administrasi Keuangan</i>	1.965.100.000,00	1.938.400.000,00	(26.700.000,00)	98,64	PERBUP Nomor : 19 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 2 . 3 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.941.100.000,00	1.914.400.000,00	(26.700.000,00)	98,62	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 2 . 3 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 2 . 3 . 2 . 2	<i>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</i>	6.791.654.999,98	6.202.411.250,00	(589.243.749,98)	91,32	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 2 . 3 . 2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.790.614.999,98	6.201.371.250,00	(589.243.749,98)	91,32	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 2 . 3 . 2 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 2 . 3 . 2 . 2 . 2	<i>Rapat-Rapat, Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah</i>	4.625.560.200,00	4.524.198.501,00	(101.361.699,00)	97,81	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 2 . 3 . 2 . 2 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	4.625.560.200,00	4.524.198.501,00	(101.361.699,00)	97,81	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 2 . 3 . 2 . 2 . 2 . 2	<i>Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran</i>	1.631.280.000,00	1.573.144.249,00	(58.135.751,00)	96,44	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 2 . 3 . 2 . 2 . 2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.631.280.000,00	1.573.144.249,00	(58.135.751,00)	96,44	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 2 . 3 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2	<i>Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran</i>	77.752.021.598,00	73.028.048.146,00	(4.723.973.452,00)	93,92	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 2 . 3 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	77.719.741.598,00	73.013.748.146,00	(4.705.993.452,00)	93,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.280.000,00	14.300.000,00	(17.980.000,00)	44,30	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 19	<i>Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran</i>	5.784.040.400,00	5.530.867.224,00	(253.173.176,00)	95,62	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.699.240.400,00	5.449.667.224,00	(249.573.176,00)	95,62	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.800.000,00	81.200.000,00	(3.600.000,00)	95,75	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 19	<i>Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrator/Teknis Perkantoran</i>	1.211.490.000,00	1.144.411.909,00	(67.078.091,00)	94,46	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.211.490.000,00	1.144.411.909,00	(67.078.091,00)	94,46	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 19	<i>Penyediaan Rutinitas Perkantoran</i>	509.672.432,00	503.582.775,00	(6.089.657,00)	98,81	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	411.858.000,00	408.187.200,00	(3.670.800,00)	99,11	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.214.432,00	94.795.575,00	(2.418.857,00)	97,51	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 20	<i>Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran</i>	544.950.000,00	535.124.897,00	(9.825.103,00)	98,20	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	544.950.000,00	535.124.897,00	(9.825.103,00)	98,20	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 20	<i>Penyediaan Rutinitas Perkantoran</i>	67.123.100.521,40	64.324.619.226,40	(2.798.481.295,00)	95,83	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	730.485.000,00	708.395.456,00	(22.089.544,00)	96,98	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.096.527.694,40	47.461.417.598,40	(1.635.110.096,00)	96,67	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.296.087.827,00	16.154.806.172,00	(1.141.281.655,00)	93,40	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 20	<i>Penyediaan Rutinitas Perkantoran</i>	889.288.400,00	885.849.733,00	(3.438.667,00)	99,61	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	739.510.000,00	736.209.833,00	(3.300.167,00)	99,55	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	136.878.400,00	136.739.900,00	(138.500,00)	99,90	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 21	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan</i>	5.682.400.000,00	4.789.401.200,00	(892.998.800,00)	84,28	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.682.400.000,00	4.789.401.200,00	(892.998.800,00)	84,28	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 21	<i>Penyediaan Rutinitas Perkantoran UPTD SPAM</i>	2.054.200.000,00	1.538.770.538,00	(515.429.462,00)	74,91	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	207.600.000,00	123.900.000,00	(83.700.000,00)	59,68	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.266.600.000,00	946.259.538,00	(320.340.462,00)	74,71	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	580.000.000,00	468.611.000,00	(111.389.000,00)	80,80	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 21	<i>Rutinitas Perkantoran UPTD Perikanan, Pertanian Dan Pangan</i>	180.700.000,00	135.513.000,00	(45.187.000,00)	74,99	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	950.000,00	750.000,00	(200.000,00)	78,95	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.750.000,00	85.390.000,00	(39.360.000,00)	68,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	55.000.000,00	49.373.000,00	(5.627.000,00)	89,77	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 22	<i>Penyediaan Rutinitas Perkantoran Puskesmas Tarempa</i>	673.321.000,00	526.602.119,00	(146.718.881,00)	78,21	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.450.000,00	7.200.000,00	(2.250.000,00)	76,19	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	485.844.000,00	353.768.719,00	(132.075.281,00)	72,82	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	178.027.000,00	165.633.400,00	(12.393.600,00)	93,04	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 23	<i>Dukungan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	1.513.130.000,00	1.470.400.414,00	(42.729.586,00)	97,18	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	749.750.000,00	749.400.000,00	(350.000,00)	99,95	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	581.655.000,00	540.916.414,00	(40.738.586,00)	93,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	181.725.000,00	180.084.000,00	(1.641.000,00)	99,10	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 23	<i>Penyediaan Rutinitas Perkantoran Puskesmas Letung</i>	270.400.000,00	254.319.700,00	(16.080.300,00)	94,05	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	268.850.000,00	254.319.700,00	(14.530.300,00)	94,60	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 24	<i>Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi, Komisi, Badan Anggaran</i>	913.500.000,00	204.200.000,00	(709.300.000,00)	22,35	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	913.500.000,00	204.200.000,00	(709.300.000,00)	22,35	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 24	<i>Penyediaan Rutinitas Perkantoran Puskesmas Palmatak</i>	508.800.000,00	506.182.250,00	(2.617.750,00)	99,49	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	507.900.000,00	505.282.250,00	(2.617.750,00)	99,48	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 25	<i>Penyediaan Rutinitas Perkantoran Puskesmas Siantan Tengah</i>	293.467.495,00	288.520.495,00	(4.947.000,00)	98,31	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	600.000,00	(150.000,00)	80,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	277.525.495,00	272.729.495,00	(4.796.000,00)	98,27	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.192.000,00	15.191.000,00	(1.000,00)	99,99	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 26	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD</i>	819.710.000,00	483.367.189,00	(336.342.811,00)	58,97	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	819.710.000,00	483.367.189,00	(336.342.811,00)	58,97	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 26	<i>Penyediaan Rutinitas Perkantoran Puskesmas Siantan Timur</i>	372.685.000,00	327.333.580,00	(45.351.420,00)	87,83	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.002.700,00	304.651.280,00	(45.351.420,00)	87,04	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.432.300,00	20.432.300,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 27	<i>Penyediaan Rutinitas Perkantoran Puskesmas Siantan Selatan</i>	244.920.000,00	232.004.854,00	(12.915.146,00)	94,73	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.200.000,00	(300.000,00)	80,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	224.170.000,00	216.055.654,00	(8.114.346,00)	96,38	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.250.000,00	14.749.200,00	(4.500.800,00)	76,62	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 28	<i>Penyediaan Rutinitas Perkantoran Puskesmas Jemaja Timur</i>	498.760.000,00	438.324.423,00	(60.435.577,00)	87,88	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	312.375.000,00	258.944.453,00	(53.430.547,00)	82,90	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	186.385.000,00	179.379.970,00	(7.005.030,00)	96,24	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 30	<i>Penyediaan Rutinitas Perkantoran Instalasi Farmasi</i>	208.700.000,00	201.755.413,00	(6.944.587,00)	96,67	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	208.700.000,00	201.755.413,00	(6.944.587,00)	96,67	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 31	<i>Penyediaan Jasa Kalibrasi</i>	1.119.848.500,00	281.989.738,00	(837.858.762,00)	25,18	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.119.848.500,00	281.989.738,00	(837.858.762,00)	25,18	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 32	<i>Penyediaan Rutinitas Perkantoran Rumah Sakit Umum Daerah Palmatok</i>	1.912.981.000,00	1.553.334.736,00	(359.646.264,00)	81,20	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.791.981.000,00	1.432.471.236,00	(359.509.764,00)	79,94	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	121.000.000,00	120.863.500,00	(136.500,00)	99,89	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 33	<i>Penyediaan Rutinitas Perkantoran Rumah Sakit Umum Daerah Jemaja</i>	1.130.864.155,00	1.016.934.466,00	(113.929.689,00)	89,93	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	917.370.655,00	818.162.349,00	(99.208.306,00)	89,19	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	208.693.500,00	193.972.117,00	(14.721.383,00)	92,95	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 34	<i>Penyediaan Rutinitas Perkantoran Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa</i>	2.827.204.743,00	2.439.824.979,00	(387.379.764,00)	86,30	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.225.000,00	8.400.000,00	(1.825.000,00)	82,15	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.924.559.443,00	1.670.544.679,00	(254.014.764,00)	86,80	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 34 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	892.420.300,00	760.880.300,00	(131.540.000,00)	85,26	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02	<b>Prog Peningkatan dan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	647.950.000,00	303.447.959,00	(344.502.041,00)	46,83	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 11	<i>Pengadaan Tanah Bagi Bidang Pariwisata</i>	647.950.000,00	303.447.959,00	(344.502.041,00)	46,83	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.250.000,00	23.250.000,00	(3.000.000,00)	88,57	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.800.000,00	114.917.959,00	(56.882.041,00)	66,89	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	449.900.000,00	165.280.000,00	(284.620.000,00)	36,74	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	77.062.148.726,49	54.487.936.415,00	(22.574.212.311,49)	70,71	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 03	<i>Pembangunan Gedung Kantor</i>	28.504.669.687,49	22.791.041.855,00	(5.713.627.832,49)	79,96	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	93.110.000,00	64.550.000,00	(28.560.000,00)	69,33	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.236.243.836,00	14.233.391.417,00	(3.002.852.419,00)	82,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.175.315.851,49	8.493.100.438,00	(2.682.215.413,49)	76,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 11	Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	2.010.766.039,00	1.119.539.365,00	(891.226.674,00)	55,68	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.450.000,00	38.800.000,00	(650.000,00)	98,35	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	461.682.751,00	349.663.077,00	(112.019.674,00)	75,74	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.509.633.288,00	731.076.288,00	(778.557.000,00)	48,43	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 46	Pembangunan Gedung Kantor (Multi Years)	45.115.024.000,00	29.231.537.119,00	(15.883.486.881,00)	64,79	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	215.652.000,00	209.698.247,00	(5.953.753,00)	97,24	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	44.896.372.000,00	29.021.838.872,00	(15.874.533.128,00)	64,64	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 48	Peningkatan Kinerja Penunjang Kelurahan	1.431.689.000,00	1.345.818.076,00	(85.870.924,00)	94,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	197.550.000,00	197.156.819,00	(393.181,00)	99,80	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.026.139.000,00	1.002.240.257,00	(23.898.743,00)	97,67	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	208.000.000,00	146.421.000,00	(61.579.000,00)	70,39	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.275.414.001,84	3.137.220.750,00	(138.193.251,84)	95,78	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 19	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	92.950.000,00	92.950.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 20	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	3.182.464.001,84	3.044.270.750,00	(138.193.251,84)	95,66	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.750.000,00	18.900.000,00	(8.850.000,00)	68,11	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.154.714.001,84	3.025.370.750,00	(129.343.251,84)	95,90	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	133.300.000,00	133.290.946,00	(9.054,00)	99,99	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 05	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan sistem Pengadaan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran (Sirup dan tepra)	133.300.000,00	133.290.946,00	(9.054,00)	99,99	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	77.100.000,00	77.100.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.200.000,00	56.190.946,00	(9.054,00)	99,98	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 07	Program Perencanaan Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan	893.181.250,00	772.265.876,00	(120.915.374,00)	86,46	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 07 . 07	Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kerjasama	310.531.250,00	308.993.079,00	(1.538.171,00)	99,50	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 07 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	284.431.250,00	282.893.079,00	(1.538.171,00)	99,46	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 07 . 08	Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Ekonomi	85.500.000,00	80.833.500,00	(4.666.500,00)	94,54	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.500.000,00	80.833.500,00	(4.666.500,00)	94,54	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 07 . 09	Kegiatan Penyelenggaraan Tim Pengendalian Inflasi Daerah	151.650.000,00	116.994.500,00	(34.655.500,00)	77,15	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	151.650.000,00	116.994.500,00	(34.655.500,00)	77,15	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 07 . 10	Penyelenggaraan Pengembangan Pengelolaan BUMD	250.000.000,00	181.903.297,00	(68.096.703,00)	72,76	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 07 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	181.903.297,00	(68.096.703,00)	72,76	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 07 . 11	Kegiatan Penyelenggaraan pengembangan Infrastruktur	95.500.000,00	83.541.500,00	(11.958.500,00)	87,48	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.500.000,00	83.541.500,00	(11.958.500,00)	87,48	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 12	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.115.705.500,00	1.764.296.593,00	(351.408.907,00)	83,39	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 12 . 01	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dan Uji Kompetensi	437.227.000,00	378.216.412,00	(59.010.588,00)	86,50	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 12 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.450.000,00	20.550.000,00	(3.900.000,00)	84,05	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	412.777.000,00	357.666.412,00	(55.110.588,00)	86,65	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 12 . 04	Monitoring dan Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS dan PTT Daerah	785.000.000,00	784.721.588,00	(278.412,00)	99,96	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 12 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 12 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	761.750.000,00	761.471.588,00	(278.412,00)	99,96	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 12 . 07	Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara	590.000.000,00	333.892.860,00	(256.107.140,00)	56,59	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 12 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	114.325.000,00	75.350.000,00	(38.975.000,00)	65,91	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 12 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	358.275.000,00	141.676.960,00	(216.598.040,00)	39,54	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 12 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	117.400.000,00	116.865.900,00	(534.100,00)	99,55	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 12 . 09	Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan II Menggunakan CAT	150.000.000,00	116.386.525,00	(33.613.475,00)	77,59	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 12 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.950.000,00	28.950.000,00	(3.000.000,00)	90,61	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 12 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.050.000,00	87.436.525,00	(30.613.475,00)	74,07	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 12 . 11	Pelantikan, Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Administrasi Aparatur	153.478.500,00	151.079.208,00	(2.399.292,00)	98,44	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 12 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.800.000,00	47.800.000,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 12 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.678.500,00	103.279.208,00	(2.399.292,00)	97,73	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Keluarga Berencana</b>	3.519.284.900,00	2.905.982.462,00	(613.302.438,00)	82,57	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Fisik Program Keluarga Berencana (DAK)</i>	1.378.545.900,00	1.372.182.762,00	(6.363.138,00)	99,54	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.225.000,00	4.800.000,00	(5.425.000,00)	46,94	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.790.000,00	85.851.862,00	(938.138,00)	98,92	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.281.530.900,00	1.281.530.900,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 15	<i>Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)</i>	1.940.889.000,00	1.336.511.700,00	(604.377.300,00)	68,86	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	113.650.000,00	110.100.000,00	(3.550.000,00)	96,88	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.827.239.000,00	1.226.411.700,00	(600.827.300,00)	67,12	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 21	<i>Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan KB</i>	199.850.000,00	197.288.000,00	(2.562.000,00)	98,72	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.337.500,00	0,00	(2.337.500,00)	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.512.500,00	197.288.000,00	(224.500,00)	99,89	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	11.942.935.665,00	11.107.768.431,00	(835.167.234,00)	93,01	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01	<i>Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan</i>	4.293.540.000,00	4.128.590.249,00	(164.949.751,00)	96,16	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.292.140.000,00	4.127.190.249,00	(164.949.751,00)	96,16	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07	<i>Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)</i>	7.509.109.665,00	6.843.519.629,00	(665.590.036,00)	91,14	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.507.109.665,00	6.843.519.629,00	(663.590.036,00)	91,16	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08	<i>Manajemen Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Non Fisik)</i>	140.286.000,00	135.658.553,00	(4.627.447,00)	96,70	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.486.000,00	127.858.553,00	(4.627.447,00)	96,51	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Pelayanan Informasi Publik</b>	580.483.660,00	555.982.779,00	(24.500.881,00)	95,78	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 17	<i>Monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID)</i>	580.483.660,00	555.982.779,00	(24.500.881,00)	95,78	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	296.557.500,00	276.400.000,00	(20.157.500,00)	93,20	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	283.926.160,00	279.582.779,00	(4.343.381,00)	98,47	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>	86.153.617.498,02	68.280.372.312,00	(17.873.245.186,02)	79,25	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03	<i>Pembangunan Jalan</i>	54.818.372.498,02	37.182.073.312,00	(17.636.299.186,02)	67,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.825.000,00	30.200.000,00	(6.625.000,00)	82,01	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	661.266.150,00	643.724.341,00	(17.541.809,00)	97,35	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	54.120.281.348,02	36.508.148.971,00	(17.612.132.377,02)	67,46	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10	<i>Pembangunan Jalan (DAK)</i>	31.335.245.000,00	31.098.299.000,00	(236.946.000,00)	99,24	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	280.420.000,00	179.249.000,00	(101.171.000,00)	63,92	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.006.825.000,00	30.871.050.000,00	(135.775.000,00)	99,56	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	298.291.000,00	291.028.000,00	(7.263.000,00)	97,57	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 16	<i>Pembangunan Prasana dan Fasilitas Perhubungan Darat</i>	298.291.000,00	291.028.000,00	(7.263.000,00)	97,57	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	2.525.000,00	(6.475.000,00)	28,06	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.545.000,00	7.857.000,00	(688.000,00)	91,95	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	280.746.000,00	280.646.000,00	(100.000,00)	99,96	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</b>	992.321.600,00	913.377.719,00	(78.943.881,00)	92,04	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11	<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat Pesisir</i>	239.850.000,00	232.559.136,00	(7.290.864,00)	96,96	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	237.450.000,00	230.159.136,00	(7.290.864,00)	96,93	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12	<i>Pembinaan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan POKDAKAN</i>	652.471.600,00	591.481.477,00	(60.990.123,00)	90,65	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.397.500,00	6.097.500,00	(1.300.000,00)	82,43	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	621.422.600,00	561.732.477,00	(59.690.123,00)	90,39	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	23.651.500,00	23.651.500,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 13	<i>Pendampingan dan Pengembangan KUB</i>	100.000.000,00	89.337.106,00	(10.662.894,00)	89,34	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.256.000,00	32.256.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.744.000,00	49.508.006,00	(10.235.994,00)	82,87	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.000.000,00	7.573.100,00	(426.900,00)	94,66	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	2.814.007.300,00	2.622.196.182,00	(191.811.118,00)	93,18	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09	<i>Pendampingan Jaminan Sosial Bagi Lanjut Usia dan Penyandang Cacat</i>	70.000.000,00	60.255.200,00	(9.744.800,00)	86,08	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.976.000,00	0,00	(5.976.000,00)	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.024.000,00	60.255.200,00	(3.768.800,00)	94,11	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 20	<i>Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)</i>	165.981.400,00	146.763.699,00	(19.217.701,00)	88,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.945.000,00	6.945.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	159.036.400,00	139.818.699,00	(19.217.701,00)	87,92	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 21	<i>Pengadaan Beras Sejahtera (RASTRA) Otonomi</i>	1.827.767.200,00	1.825.277.758,00	(2.489.442,00)	99,86	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	103.580.000,00	103.355.000,00	(225.000,00)	99,78	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.687.827.200,00	1.687.694.058,00	(133.142,00)	99,99	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	36.360.000,00	34.228.700,00	(2.131.300,00)	94,14	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 23	<i>Updating, Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan</i>	349.194.900,00	335.717.903,00	(13.476.997,00)	96,14	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.594.900,00	134.117.903,00	(13.476.997,00)	90,87	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 24	<i>Operasional Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)</i>	327.066.000,00	180.213.800,00	(146.852.200,00)	55,10	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.290.000,00	48.690.000,00	(4.600.000,00)	91,37	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	273.776.000,00	131.523.800,00	(142.252.200,00)	48,04	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 25	<i>Operasional Sistem Layanan Rujuk Terpadu (SLRT) Kayuh Serentak Langkah Sepijak Kabupaten Kepulauan Anambas</i>	73.997.800,00	73.967.822,00	(29.978,00)	99,96	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.272.800,00	72.242.822,00	(29.978,00)	99,96	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	767.539.000,00	764.881.734,00	(2.657.266,00)	99,65	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 13	<i>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan FKDM Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Anambas</i>	100.000.000,00	99.945.750,00	(54.250,00)	99,95	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.350.000,00	92.295.750,00	(54.250,00)	99,94	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14	<i>Peningkatan Peran Kewaspadaan Dini dan FKDM Kabupaten Kepulauan Anambas</i>	376.215.000,00	373.758.736,00	(2.456.264,00)	99,35	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	149.700.000,00	147.250.000,00	(2.450.000,00)	98,36	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	226.515.000,00	226.508.736,00	(6.264,00)	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 15	<i>Penyelenggaraan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas</i>	291.324.000,00	291.177.248,00	(146.752,00)	99,95	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	120.200.000,00	120.200.000,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.124.000,00	170.977.248,00	(146.752,00)	99,91	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	1.392.567.000,00	1.387.724.726,00	(4.842.274,00)	99,65	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11	<i>Sosialisasi Kebijakan Kependudukan (DAK Non Fisik)</i>	211.230.000,00	211.136.800,00	(93.200,00)	99,96	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	207.750.000,00	207.656.800,00	(93.200,00)	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14	<i>Penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten</i>	71.538.000,00	71.393.550,00	(144.450,00)	99,80	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.150.000,00	19.150.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.388.000,00	52.243.550,00	(144.450,00)	99,72	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 18	<i>Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)</i>	306.360.000,00	304.264.456,00	(2.095.544,00)	99,32	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.260.000,00	34.260.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	204.100.000,00	202.154.756,00	(1.945.244,00)	99,05	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	68.000.000,00	67.849.700,00	(150.300,00)	99,78	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 24	<i>Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)</i>	356.359.000,00	355.764.750,00	(594.250,00)	99,83	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.600.000,00	81.300.000,00	(300.000,00)	99,63	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	274.759.000,00	274.464.750,00	(294.250,00)	99,89	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 26	<i>Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)</i>	205.895.000,00	204.331.420,00	(1.563.580,00)	99,24	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	158.495.000,00	156.931.420,00	(1.563.580,00)	99,01	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 27	<i>Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)</i>	241.185.000,00	240.833.750,00	(351.250,00)	99,85	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	167.385.000,00	167.033.750,00	(351.250,00)	99,79	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	426.780.000,00	381.523.515,00	(45.256.485,00)	89,40	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01	<i>Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</i>	185.030.000,00	153.350.635,00	(31.679.365,00)	82,88	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.399.000,00	24.399.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	160.631.000,00	128.951.635,00	(31.679.365,00)	80,28	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air</i>	241.750.000,00	228.172.880,00	(13.577.120,00)	94,38	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	235.800.000,00	222.222.880,00	(13.577.120,00)	94,24	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif</b>	173.950.000,00	173.514.731,00	(435.269,00)	99,75	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14	<i>Survei, Verifikasi, Penyaluran, Pendampingan dan Penagihan Dana Bergulir</i>	173.950.000,00	173.514.731,00	(435.269,00)	99,75	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	173.950.000,00	173.514.731,00	(435.269,00)	99,75	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	4.297.118.080,00	3.758.712.898,00	(538.405.182,00)	87,47	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 20	<i>Pengadaan Perlengkapan Sekolah</i>	1.168.850.000,00	1.036.258.064,00	(132.591.936,00)	88,66	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	726.150.000,00	610.778.064,00	(115.371.936,00)	84,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	434.400.000,00	417.180.000,00	(17.220.000,00)	96,04	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	487.550.000,00	483.035.000,00	(4.515.000,00)	99,07	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	131.000.000,00	130.102.000,00	(898.000,00)	99,31	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	351.800.000,00	348.183.000,00	(3.617.000,00)	98,97	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 59	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)	267.600.000,00	267.600.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	267.600.000,00	267.600.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 68	Pembangunan dan Pemasangan Batu Miring, Paving Blok dan Pagar Sekolah	1.331.550.000,00	1.153.489.500,00	(178.060.500,00)	86,63	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	682.850.000,00	616.973.000,00	(65.877.000,00)	90,35	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 68 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	639.800.000,00	527.616.500,00	(112.183.500,00)	82,47	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 69	Pembangunan Ruang Kelas Baru	621.568.080,00	617.061.903,00	(4.506.177,00)	99,28	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.670.000,00	9.670.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 69 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	607.748.080,00	603.241.903,00	(4.506.177,00)	99,26	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 70	Pelaksanaan Apresiasi PTK PAUD-DIKMAS	420.000.000,00	201.268.431,00	(218.731.569,00)	47,92	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.475.000,00	13.275.000,00	(7.200.000,00)	64,84	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	399.525.000,00	187.993.431,00	(211.531.569,00)	47,05	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	159.750.000,00	153.840.028,00	(5.909.972,00)	96,30	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01	Pengadaan Sarana Pendukung Operasional Sandi dan Telekomunikasi	159.750.000,00	153.840.028,00	(5.909.972,00)	96,30	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.850.000,00	9.350.000,00	(5.500.000,00)	62,96	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.900.000,00	144.490.028,00	(409.972,00)	99,72	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	Program Pengembangan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	1.392.380.000,00	545.087.538,00	(847.292.462,00)	39,15	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02	Peningkatan Kualitas Permukiman	1.392.380.000,00	545.087.538,00	(847.292.462,00)	39,15	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	945.380.000,00	110.173.538,00	(835.206.462,00)	11,65	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	444.000.000,00	434.914.000,00	(9.086.000,00)	97,95	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	346.400.000,00	345.402.621,00	(997.379,00)	99,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01	<i>Penyediaan dan Pengelolaan Perpustakaan Daerah</i>	346.400.000,00	345.402.621,00	(997.379,00)	99,71	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	312.650.000,00	311.654.021,00	(995.979,00)	99,68	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.000.000,00	24.998.600,00	(1.400,00)	99,99	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>	252.753.655,00	239.613.562,00	(13.140.093,00)	94,80	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10	<i>Pengolahan, Updating, dan Analisis Data Statistik Daerah</i>	252.753.655,00	239.613.562,00	(13.140.093,00)	94,80	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.945.000,00	78.745.000,00	(3.200.000,00)	96,09	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	170.808.655,00	160.868.562,00	(9.940.093,00)	94,18	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	2.155.538.000,00	2.093.506.434,00	(62.031.566,00)	97,12	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02	<i>Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan</i>	898.920.000,00	874.065.222,00	(24.854.778,00)	97,24	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.650.000,00	46.795.222,00	(20.854.778,00)	69,17	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	828.520.000,00	824.520.000,00	(4.000.000,00)	99,52	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 16	<i>Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan Dan Pesisir Perairan</i>	1.077.272.000,00	1.057.423.958,00	(19.848.042,00)	98,16	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.049.022.000,00	1.029.413.958,00	(19.608.042,00)	98,13	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	26.000.000,00	25.760.000,00	(240.000,00)	99,08	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 17	<i>Peningkatan Pengelolaan Sampah 3R</i>	179.346.000,00	162.017.254,00	(17.328.746,00)	90,34	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.321.000,00	39.872.254,00	(5.448.746,00)	87,98	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	132.000.000,00	120.120.000,00	(11.880.000,00)	91,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	700.789.500,00	696.242.233,00	(4.547.267,00)	99,35	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06	<i>Semarak Anambas</i>	700.789.500,00	696.242.233,00	(4.547.267,00)	99,35	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	685.839.500,00	681.292.233,00	(4.547.267,00)	99,34	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	1.365.327.000,00	1.364.732.476,00	(594.524,00)	99,96	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10	<i>Festival Padang Melang</i>	1.365.327.000,00	1.364.732.476,00	(594.524,00)	99,96	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.637.500,00	3.637.500,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.361.689.500,00	1.361.094.976,00	(594.524,00)	99,96	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</b>	494.737.975,00	455.376.217,00	(39.361.758,00)	92,04	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04	<i>Perencanaan Pembangunan Bidang Pengelolaan Batas Negara dan Infrastruktur Kawasan Perbatasan</i>	430.890.000,00	391.528.242,00	(39.361.758,00)	90,87	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	428.090.000,00	388.728.242,00	(39.361.758,00)	90,81	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05	<i>Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (GERBANGDUTAS) Kabupaten Kepulauan Anambas</i>	63.847.975,00	63.847.975,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.847.975,00	63.847.975,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>	148.000.000,00	147.183.800,00	(816.200,00)	99,45	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09	<i>Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi</i>	148.000.000,00	147.183.800,00	(816.200,00)	99,45	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.250.000,00	35.450.000,00	(800.000,00)	97,79	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.750.000,00	111.733.800,00	(16.200,00)	99,99	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	631.510.000,00	489.850.957,00	(141.659.043,00)	77,57	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14	<i>Peningkatan dan Penguatan Peran Serta Forum Anak</i>	166.400.000,00	163.955.050,00	(2.444.950,00)	98,53	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.735.000,00	2.210.000,00	(525.000,00)	80,80	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	163.665.000,00	161.745.050,00	(1.919.950,00)	98,83	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 15	<i>Pengiriman Peserta HAN Tingkat Provinsi Kepri</i>	40.000.000,00	31.708.850,00	(8.291.150,00)	79,27	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.000.000,00	(750.000,00)	80,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.250.000,00	28.708.850,00	(7.541.150,00)	79,20	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 19	<i>Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD)</i>	425.110.000,00	294.187.057,00	(130.922.943,00)	69,20	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	83.100.000,00	50.550.000,00	(32.550.000,00)	60,83	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	342.010.000,00	243.637.057,00	(98.372.943,00)	71,24	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	1.092.530.000,00	931.370.450,00	(161.159.550,00)	85,25	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03	<i>Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah</i>	481.480.000,00	360.272.650,00	(121.207.350,00)	74,83	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	87.480.000,00	54.900.000,00	(32.580.000,00)	62,76	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	394.000.000,00	305.372.650,00	(88.627.350,00)	77,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10	<i>Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah</i>	611.050.000,00	571.097.800,00	(39.952.200,00)	93,46	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.445.000,00	37.945.000,00	(5.500.000,00)	87,34	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	567.605.000,00	533.152.800,00	(34.452.200,00)	93,93	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	16.982.012.061,00	15.255.649.643,00	(1.726.362.418,00)	89,83	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01	<i>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>	1.776.435.800,00	1.611.478.388,00	(164.957.412,00)	90,71	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.776.435.800,00	1.611.478.388,00	(164.957.412,00)	90,71	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02	<i>Rapat Rapat Paripurna</i>	436.635.000,00	433.026.300,00	(3.608.700,00)	99,17	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.350.000,00	9.550.000,00	(800.000,00)	92,27	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	426.285.000,00	423.476.300,00	(2.808.700,00)	99,34	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03	<i>Kegiatan Reses</i>	1.609.600.000,00	1.554.630.800,00	(54.969.200,00)	96,58	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.609.600.000,00	1.554.630.800,00	(54.969.200,00)	96,58	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04	<i>Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah</i>	574.000.000,00	426.401.500,00	(147.598.500,00)	74,29	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	574.000.000,00	426.401.500,00	(147.598.500,00)	74,29	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05	<i>Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD</i>	1.751.425.261,00	1.480.093.966,00	(271.331.295,00)	84,51	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.751.425.261,00	1.480.093.966,00	(271.331.295,00)	84,51	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06	<i>Pembahasan Ranperda APBD dan Perubahan APBD</i>	1.142.370.000,00	942.357.089,00	(200.012.911,00)	82,49	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.350.000,00	17.350.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.125.020.000,00	925.007.089,00	(200.012.911,00)	82,22	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07	<i>Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD</i>	355.000.000,00	354.565.480,00	(434.520,00)	99,88	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	355.000.000,00	354.565.480,00	(434.520,00)	99,88	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08	<i>Penyusunan Program Tahunan DPRD</i>	42.890.000,00	42.575.500,00	(314.500,00)	99,27	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.890.000,00	42.575.500,00	(314.500,00)	99,27	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09	<i>Pembahasan KUA dan PPAS</i>	386.250.000,00	360.616.768,00	(25.633.232,00)	93,36	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	386.250.000,00	360.616.768,00	(25.633.232,00)	93,36	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10	<i>Pembentukan Panitia Khusus / Panitia Kerja</i>	2.394.139.000,00	2.264.816.834,00	(129.322.166,00)	94,60	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.394.139.000,00	2.264.816.834,00	(129.322.166,00)	94,60	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11	<i>Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD</i>	2.890.569.000,00	2.720.890.298,00	(169.678.702,00)	94,13	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.890.569.000,00	2.720.890.298,00	(169.678.702,00)	94,13	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12	<i>Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD</i>	2.750.000.000,00	2.533.389.018,00	(216.610.982,00)	92,12	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000.000,00	2.533.389.018,00	(216.610.982,00)	92,12	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 13	Rapat Rapat Anggota DPRD	227.698.000,00	225.942.000,00	(1.756.000,00)	99,23	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.350.000,00	9.550.000,00	(800.000,00)	92,27	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	217.348.000,00	216.392.000,00	(956.000,00)	99,56	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14	Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD	645.000.000,00	304.865.702,00	(340.134.298,00)	47,27	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	645.000.000,00	304.865.702,00	(340.134.298,00)	47,27	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	749.453.900,00	719.824.110,00	(29.629.790,00)	96,05	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06	Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten	89.379.000,00	89.275.500,00	(103.500,00)	99,88	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.609.000,00	81.505.500,00	(103.500,00)	99,87	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07	Pembinaan dan Pendampingan Desa	100.000.000,00	98.304.700,00	(1.695.300,00)	98,30	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.610.000,00	11.610.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.390.000,00	86.694.700,00	(1.695.300,00)	98,08	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10	Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG-PKK) Tingkat Kabupaten	274.296.300,00	256.917.030,00	(17.379.270,00)	93,66	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	269.606.300,00	252.227.030,00	(17.379.270,00)	93,55	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 18	Pelaksanaan Jambore PKK Kabupaten Kepulauan Anambas	285.778.600,00	275.326.880,00	(10.451.720,00)	96,34	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.690.000,00	3.640.000,00	(1.050.000,00)	77,61	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	281.088.600,00	271.686.880,00	(9.401.720,00)	96,66	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>	319.880.000,00	291.325.103,00	(28.554.897,00)	91,07	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01	Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan Daerah	60.000.000,00	54.334.100,00	(5.665.900,00)	90,56	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.670.000,00	5.670.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.330.000,00	48.664.100,00	(5.665.900,00)	89,57	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03	Lomba Cipta Menu	121.900.000,00	110.515.203,00	(11.384.797,00)	90,66	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.750.000,00	11.000.000,00	(1.750.000,00)	86,27	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.150.000,00	99.515.203,00	(9.634.797,00)	91,17	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	137.980.000,00	126.475.800,00	(11.504.200,00)	91,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.390.000,00	4.090.000,00	(300.000,00)	93,17	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.590.000,00	122.385.800,00	(11.204.200,00)	91,61	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	1.010.790.000,00	1.007.542.559,00	(3.247.441,00)	99,68	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10	<i>Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Bidang Pariwisata</i>	1.010.790.000,00	1.007.542.559,00	(3.247.441,00)	99,68	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	325.500.000,00	322.500.000,00	(3.000.000,00)	99,08	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	685.290.000,00	685.042.559,00	(247.441,00)	99,96	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>	2.502.676.000,00	2.372.961.850,00	(129.714.150,00)	94,82	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02	<i>Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan</i>	1.415.676.000,00	1.367.455.062,00	(48.220.938,00)	96,59	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	111.725.000,00	110.375.000,00	(1.350.000,00)	98,79	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.303.951.000,00	1.257.080.062,00	(46.870.938,00)	96,41	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 15	<i>Pengembangan Kapasitas Anggota Gerakan Pramuka</i>	1.087.000.000,00	1.005.506.788,00	(81.493.212,00)	92,50	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.200.000,00	28.600.000,00	(1.600.000,00)	94,70	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	996.800.000,00	917.506.788,00	(79.293.212,00)	92,05	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	60.000.000,00	59.400.000,00	(600.000,00)	99,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</b>	2.858.590.700,00	2.324.879.792,00	(533.710.908,00)	81,33	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02	<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian/Perkebunan</i>	1.680.500.000,00	1.276.835.210,00	(403.664.790,00)	75,98	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	3.850.000,00	(3.050.000,00)	55,80	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.673.600.000,00	1.272.985.210,00	(400.614.790,00)	76,06	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 16	<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK)</i>	849.845.700,00	833.117.700,00	(16.728.000,00)	98,03	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	849.845.700,00	833.117.700,00	(16.728.000,00)	98,03	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 20	<i>Pengembangan Pertanian Areal Tanam Padi Sawah (Cetak Sawah)</i>	45.135.028,00	45.135.028,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.135.028,00	45.135.028,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 21	<i>Pengembangan Pertanian Areal Tanam Padi Sawah (Optimasi)</i>	283.109.972,00	169.791.854,00	(113.318.118,00)	59,97	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	282.209.972,00	168.891.854,00	(113.318.118,00)	59,85	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	120.000.000,00	119.275.829,00	(724.171,00)	99,40	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14	<i>Pengembangan Kerjasama Promosi dan Investasi</i>	120.000.000,00	119.275.829,00	(724.171,00)	99,40	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.850.000,00	44.350.000,00	(500.000,00)	98,89	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.150.000,00	74.925.829,00	(224.171,00)	99,70	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	1.516.328.000,00	1.405.811.450,00	(110.516.550,00)	92,71	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01	<i>Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan</i>	146.455.000,00	145.802.472,00	(652.528,00)	99,55	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.000.000,00	41.500.000,00	(500.000,00)	98,81	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.455.000,00	104.302.472,00	(152.528,00)	99,85	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02	<i>Koordinasi dan Penyelesaian Kerugian Daerah (TPTGR)</i>	150.149.000,00	146.756.100,00	(3.392.900,00)	97,74	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.600.000,00	72.000.000,00	(600.000,00)	99,17	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.549.000,00	74.756.100,00	(2.792.900,00)	96,40	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04	<i>Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</i>	104.354.000,00	104.185.000,00	(169.000,00)	99,84	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.348.000,00	36.348.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.006.000,00	67.837.000,00	(169.000,00)	99,75	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05	<i>Kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Kepulauan Anambas</i>	1.047.770.000,00	945.076.878,00	(102.693.122,00)	90,20	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	136.000.000,00	134.500.000,00	(1.500.000,00)	98,90	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	911.770.000,00	810.576.878,00	(101.193.122,00)	88,90	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08	<i>Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)</i>	67.600.000,00	63.991.000,00	(3.609.000,00)	94,66	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.600.000,00	63.991.000,00	(3.609.000,00)	94,66	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan</b>	81.500.000,00	81.224.549,00	(275.451,00)	99,66	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08	<i>Pemanfaatan dan Pengelolaan Arsip Digital</i>	81.500.000,00	81.224.549,00	(275.451,00)	99,66	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.500.000,00	81.224.549,00	(275.451,00)	99,66	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	2.977.728.350,00	2.935.489.479,00	(42.238.871,00)	98,58	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06	<i>Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)</i>	103.350.000,00	102.987.245,00	(362.755,00)	99,65	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.350.000,00	102.987.245,00	(362.755,00)	99,65	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08	<i>Penyusunan Rancangan RKPD</i>	244.375.000,00	242.162.623,00	(2.212.377,00)	99,09	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	140.150.000,00	139.450.000,00	(700.000,00)	99,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.225.000,00	102.712.623,00	(1.512.377,00)	98,55	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09	<i>Penyelenggaraan Musrenbang RKPD</i>	301.844.350,00	301.666.600,00	(177.750,00)	99,94	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	291.244.350,00	291.066.600,00	(177.750,00)	99,94	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12	<i>Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)</i>	84.796.500,00	83.766.550,00	(1.029.950,00)	98,79	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.746.500,00	73.716.550,00	(1.029.950,00)	98,62	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 13	<i>Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah</i>	293.336.000,00	278.900.400,00	(14.435.600,00)	95,08	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.750.000,00	64.950.000,00	(4.800.000,00)	93,12	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	223.586.000,00	213.950.400,00	(9.635.600,00)	95,69	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 20	<i>Penyusunan KUA dan PPAS</i>	251.435.000,00	251.167.708,00	(267.292,00)	99,89	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	246.485.000,00	246.217.708,00	(267.292,00)	99,89	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 35	<i>Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi</i>	577.467.500,00	576.102.408,00	(1.365.092,00)	99,76	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	113.250.000,00	113.250.000,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	464.217.500,00	462.852.408,00	(1.365.092,00)	99,71	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 40	<i>Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya</i>	716.444.000,00	706.920.524,00	(9.523.476,00)	98,67	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.844.000,00	2.711.000,00	(8.133.000,00)	25,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	705.600.000,00	704.209.524,00	(1.390.476,00)	99,80	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 42	<i>Inventarisasi dan Pembakuan Nama Rupa Bumi</i>	74.500.000,00	74.040.310,00	(459.690,00)	99,38	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.500.000,00	65.040.310,00	(459.690,00)	99,30	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 43	<i>Penyusunan Lakip</i>	330.180.000,00	317.775.111,00	(12.404.889,00)	96,24	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	92.325.000,00	85.825.000,00	(6.500.000,00)	92,96	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	219.027.500,00	213.122.611,00	(5.904.889,00)	97,30	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 43 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.827.500,00	18.827.500,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15	<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>	1.891.092.125,00	1.870.319.071,00	(20.773.054,00)	98,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11	<i>Pengendalian dan Pengawasan Retribusi Pasar</i>	212.200.000,00	211.155.800,00	(1.044.200,00)	99,51	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.550.000,00	74.864.800,00	(685.200,00)	99,09	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	136.000.000,00	135.641.000,00	(359.000,00)	99,74	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 17	<i>Penyediaan Sarana Dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal (DAK)</i>	1.458.737.125,00	1.441.005.056,00	(17.732.069,00)	98,78	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.500.000,00	4.700.000,00	(6.800.000,00)	40,87	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.500.000,00	59.445.298,00	(54.702,00)	99,91	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.387.737.125,00	1.376.859.758,00	(10.877.367,00)	99,22	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 18	<i>Monitoring Barang Beredar dan Stabilisasi Harga</i>	220.155.000,00	218.158.215,00	(1.996.785,00)	99,09	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	220.155.000,00	218.158.215,00	(1.996.785,00)	99,09	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16	<b>Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	490.993.485,00	451.744.043,00	(39.249.442,00)	92,01	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01	<i>Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi</i>	321.518.485,00	287.521.395,00	(33.997.090,00)	89,43	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	319.418.485,00	285.421.395,00	(33.997.090,00)	89,36	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02	<i>Sosialisasi Internet Sehat</i>	169.475.000,00	164.222.648,00	(5.252.352,00)	96,90	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	525.000,00	525.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.950.000,00	157.922.648,00	(5.027.352,00)	96,91	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.000.000,00	5.775.000,00	(225.000,00)	96,25	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16	<b>Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	489.473.191,00	416.004.790,00	(73.468.401,00)	84,99	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07	<i>Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS</i>	359.473.191,00	289.496.590,00	(69.976.601,00)	80,53	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.000.000,00	22.000.000,00	(11.000.000,00)	66,67	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	326.473.191,00	267.496.590,00	(58.976.601,00)	81,94	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 15	<i>Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dalam "sehari Bersama Lanjut Usia (Lansia)"</i>	130.000.000,00	126.508.200,00	(3.491.800,00)	97,31	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.605.000,00	4.605.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.395.000,00	121.903.200,00	(3.491.800,00)	97,22	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16	<b>Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota</b>	6.779.352.050,00	6.414.285.900,00	(365.066.150,00)	94,62	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01	<i>Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Satuan Harga Barang (SHB)</i>	269.941.300,00	267.749.300,00	(2.192.000,00)	99,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	269.941.300,00	267.749.300,00	(2.192.000,00)	99,19	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03	<i>Penyusunan dan Pembahasan Perubahan APBD</i>	1.000.834.500,00	969.668.200,00	(31.166.300,00)	96,89	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	502.175.000,00	483.375.000,00	(18.800.000,00)	96,26	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	498.659.500,00	486.293.200,00	(12.366.300,00)	97,52	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04	<i>Penyusunan dan Pembahasan APBD</i>	1.089.515.000,00	1.072.305.200,00	(17.209.800,00)	98,42	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	507.175.000,00	504.400.000,00	(2.775.000,00)	99,45	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	582.340.000,00	567.905.200,00	(14.434.800,00)	97,52	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05	<i>Penyusunan LPP APBD</i>	150.732.100,00	150.210.100,00	(522.000,00)	99,65	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.732.100,00	141.210.100,00	(522.000,00)	99,63	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06	<i>Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	422.871.150,00	422.871.150,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	120.750.000,00	120.750.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	302.121.150,00	302.121.150,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07	<i>Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah</i>	989.050.000,00	909.824.500,00	(79.225.500,00)	91,99	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	499.600.000,00	490.450.000,00	(9.150.000,00)	98,17	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	489.450.000,00	419.374.500,00	(70.075.500,00)	85,68	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10	<i>Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD</i>	255.805.000,00	246.159.900,00	(9.645.100,00)	96,23	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.550.000,00	16.500.000,00	(2.050.000,00)	88,95	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	237.255.000,00	229.659.900,00	(7.595.100,00)	96,80	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 14	<i>Rekonsiliasi Data Keuangan Triwulan PD dan Instansi Vertikal Lainnya</i>	507.570.000,00	485.698.900,00	(21.871.100,00)	95,69	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.355.000,00	42.892.500,00	(4.462.500,00)	90,58	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	460.215.000,00	442.806.400,00	(17.408.600,00)	96,22	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 15	<i>Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah</i>	820.365.000,00	759.732.350,00	(60.632.650,00)	92,61	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	201.000.000,00	199.500.000,00	(1.500.000,00)	99,25	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	589.365.000,00	532.732.350,00	(56.632.650,00)	90,39	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.000.000,00	27.500.000,00	(2.500.000,00)	91,67	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 17	<i>Sensus Barang Milik Daerah</i>	1.272.668.000,00	1.130.066.300,00	(142.601.700,00)	88,80	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	422.700.000,00	348.775.000,00	(73.925.000,00)	82,51	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	849.968.000,00	781.291.300,00	(68.676.700,00)	91,92	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga</b>	1.259.205.000,00	1.244.537.431,00	(14.667.569,00)	98,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06	<i>Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga</i>	508.705.000,00	504.771.199,00	(3.933.801,00)	99,23	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.693.000,00	6.393.000,00	(300.000,00)	95,52	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	502.012.000,00	498.378.199,00	(3.633.801,00)	99,28	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 13	<i>Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga</i>	200.000.000,00	192.738.732,00	(7.261.268,00)	96,37	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	4.550.000,00	(100.000,00)	97,85	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.350.000,00	188.188.732,00	(7.161.268,00)	96,33	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 14	<i>Pembinaan Olahraga</i>	250.500.000,00	249.011.400,00	(1.488.600,00)	99,41	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.809.000,00	7.009.000,00	(800.000,00)	89,76	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	242.691.000,00	242.002.400,00	(688.600,00)	99,72	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 19	<i>Pengiriman Atlet Daerah</i>	300.000.000,00	298.016.100,00	(1.983.900,00)	99,34	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	3.700.000,00	(1.500.000,00)	71,15	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	294.800.000,00	294.316.100,00	(483.900,00)	99,84	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>	44.707.000,00	41.925.040,00	(2.781.960,00)	93,78	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03	<i>Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP</i>	44.707.000,00	41.925.040,00	(2.781.960,00)	93,78	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.707.000,00	41.925.040,00	(2.781.960,00)	93,78	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>	426.500.000,00	364.702.400,00	(61.797.600,00)	85,51	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01	<i>Percepatan dan Pengendalian Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Daerah</i>	166.000.000,00	130.091.400,00	(35.908.600,00)	78,37	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	166.000.000,00	130.091.400,00	(35.908.600,00)	78,37	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02	<i>Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan</i>	260.500.000,00	234.611.000,00	(25.889.000,00)	90,06	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	22.000.000,00	(2.000.000,00)	91,67	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	236.500.000,00	212.611.000,00	(23.889.000,00)	89,90	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16	<b>Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</b>	494.907.000,00	418.310.800,00	(76.596.200,00)	84,52	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01	<i>Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/ Pergantian Waktu Anggota DPRD</i>	17.025.000,00	0,00	(17.025.000,00)	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.275.000,00	0,00	(16.275.000,00)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02	<i>Penyusunan Memori Jabatan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 2014-2019</i>	170.250.000,00	136.810.100,00	(33.439.900,00)	80,36	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.500.000,00	136.810.100,00	(32.689.900,00)	80,71	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03	<i>Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Masa Bhakti 2019-2024</i>	307.632.000,00	281.500.700,00	(26.131.300,00)	91,51	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	2.200.000,00	(1.100.000,00)	66,67	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	304.332.000,00	279.300.700,00	(25.031.300,00)	91,78	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	144.605.000,00	144.189.400,00	(415.600,00)	99,71	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05	<i>Penataan RTH</i>	144.605.000,00	144.189.400,00	(415.600,00)	99,71	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.180.000,00	142.764.400,00	(415.600,00)	99,71	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16	<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>	1.302.480.000,00	1.054.941.873,00	(247.538.127,00)	80,99	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 16	<i>Operasional Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT)</i>	650.980.000,00	597.366.745,00	(53.613.255,00)	91,76	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	2.250.000,00	(1.350.000,00)	62,50	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.680.000,00	462.064.345,00	(38.615.655,00)	92,29	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	146.700.000,00	133.052.400,00	(13.647.600,00)	90,70	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 28	<i>Pengembangan Budidaya Rumput Laut</i>	651.500.000,00	457.575.128,00	(193.924.872,00)	70,23	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.350.000,00	4.050.000,00	(1.300.000,00)	75,70	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	521.150.000,00	428.857.628,00	(92.292.372,00)	82,29	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	125.000.000,00	24.667.500,00	(100.332.500,00)	19,73	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	156.917.000,00	152.086.955,00	(4.830.045,00)	96,92	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09	<i>Implementasi dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)</i>	156.917.000,00	152.086.955,00	(4.830.045,00)	96,92	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.250.000,00	53.450.000,00	(4.800.000,00)	91,76	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.667.000,00	98.636.955,00	(30.045,00)	99,97	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16	<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>	658.580.000,00	593.184.200,00	(65.395.800,00)	90,07	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 13	<i>Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata (DAK Non Fisik)</i>	658.580.000,00	593.184.200,00	(65.395.800,00)	90,07	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	624.080.000,00	558.684.200,00	(65.395.800,00)	89,52	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16	<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>	161.875.000,00	159.514.200,00	(2.360.800,00)	98,54	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09	<i>Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna</i>	141.875.000,00	140.094.200,00	(1.780.800,00)	98,74	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.610.000,00	11.610.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.265.000,00	128.484.200,00	(1.780.800,00)	98,63	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11	<i>Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)</i>	20.000.000,00	19.420.000,00	(580.000,00)	97,10	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.755.000,00	4.755.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.245.000,00	14.665.000,00	(580.000,00)	96,20	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16	<b>Program Pengembangan Perwilayahan Industri</b>	13.466.057.327,00	12.082.673.599,00	(1.383.383.728,00)	89,73	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10	<i>Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas (DAK)</i>	13.354.980.127,00	11.971.824.299,00	(1.383.155.828,00)	89,64	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.875.000,00	34.375.000,00	(5.500.000,00)	86,21	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	276.125.000,00	265.332.295,00	(10.792.705,00)	96,09	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.038.980.127,00	11.672.117.004,00	(1.366.863.123,00)	89,52	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11	<i>Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)</i>	111.077.200,00	110.849.300,00	(227.900,00)	99,79	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.650.000,00	10.500.000,00	(150.000,00)	98,59	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.427.200,00	100.349.300,00	(77.900,00)	99,92	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	3.228.139.000,00	3.010.489.720,00	(217.649.280,00)	93,26	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04	<i>Rakor FKUB Kabupaten dan FKUB Kec. Se Kabupaten Kepulauan Anambas</i>	69.221.000,00	69.221.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.823.000,00	5.823.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.398.000,00	63.398.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05	<i>Pembentukan Pusat Pendidikan wawasan Kebangsaan (PPWK) Kab. Kep. Anambas dan Sosialisasi Empat (4) Pilar kebangsaan Tahun 2014</i>	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.823.000,00	5.823.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.177.000,00	89.177.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06	<i>Safari Ramadhan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas</i>	1.561.243.000,00	1.496.996.420,00	(64.246.580,00)	95,88	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.549.893.000,00	1.485.646.420,00	(64.246.580,00)	95,85	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08	<i>Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH)</i>	541.950.000,00	418.718.100,00	(123.231.900,00)	77,26	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	541.650.000,00	418.718.100,00	(122.931.900,00)	77,30	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09	<i>Penyelenggaraan Ibadah Haji Umroh</i>	860.725.000,00	830.554.200,00	(30.170.800,00)	96,49	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57.575.000,00	57.567.000,00	(8.000,00)	99,99	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	803.150.000,00	772.987.200,00	(30.162.800,00)	96,24	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 13	<i>Dialog Interaktif Antar Umat Beragama</i>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.223.000,00	6.223.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.777.000,00	93.777.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	280.900.000,00	279.525.672,00	(1.374.328,00)	99,51	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 13	<i>Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan</i>	205.900.000,00	205.069.807,00	(830.193,00)	99,60	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	107.400.000,00	106.925.000,00	(475.000,00)	99,56	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.500.000,00	98.144.807,00	(355.193,00)	99,64	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 20	<i>Pengendalian dan pengawasan penanaman Modal dan Perizinan</i>	75.000.000,00	74.455.865,00	(544.135,00)	99,27	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	9.750.000,00	(250.000,00)	97,50	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	64.705.865,00	(294.135,00)	99,55	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	112.400.000,00	107.667.948,00	(4.732.052,00)	95,79	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 14	<i>Pemantapan Pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)</i>	112.400.000,00	107.667.948,00	(4.732.052,00)	95,79	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.400.000,00	107.667.948,00	(4.732.052,00)	95,79	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	3.546.366.849,00	3.530.441.400,00	(15.925.449,00)	99,55	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04	<i>Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan</i>	3.044.213.849,00	3.036.532.400,00	(7.681.449,00)	99,75	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	9.000.000,00	(600.000,00)	93,75	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.275.000,00	53.246.000,00	(1.029.000,00)	98,10	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.980.338.849,00	2.974.286.400,00	(6.052.449,00)	99,80	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05	<i>Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Darat</i>	200.750.000,00	196.455.000,00	(4.295.000,00)	97,86	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	850.000,00	(600.000,00)	58,62	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.300.000,00	195.605.000,00	(3.695.000,00)	98,15	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06	<i>Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas Laut</i>	301.403.000,00	297.454.000,00	(3.949.000,00)	98,69	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.950.000,00	700.000,00	(2.250.000,00)	23,73	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	298.453.000,00	296.754.000,00	(1.699.000,00)	99,43	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16	<b>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	1.951.978.390,00	1.690.696.000,00	(261.282.390,00)	86,61	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03	<i>Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan</i>	1.951.978.390,00	1.690.696.000,00	(261.282.390,00)	86,61	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.825.000,00	4.350.000,00	(2.475.000,00)	63,74	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	892.213.390,00	732.646.000,00	(159.567.390,00)	82,12	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.052.940.000,00	953.700.000,00	(99.240.000,00)	90,57	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	21.922.646.907,00	21.983.579.239,00	60.932.332,00	100,28	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02	<i>Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan</i>	8.673.155.000,00	10.680.701.310,00	2.007.546.310,00	123,15	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.673.155.000,00	10.680.701.310,00	2.007.546.310,00	123,15	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 20	<i>Pelayanan Penyakit Tidak Menular</i>	69.850.000,00	67.270.655,00	(2.579.345,00)	96,31	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.250.000,00	67.270.655,00	(1.979.345,00)	97,14	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 21	<i>Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi</i>	81.000.000,00	0,00	(81.000.000,00)	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	0,00	(81.000.000,00)	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 22	<i>Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tarempa (DAK Non Fisik)</i>	689.668.678,00	598.481.070,00	(91.187.608,00)	86,78	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	25.200.000,00	(4.800.000,00)	84,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	659.668.678,00	573.281.070,00	(86.387.608,00)	86,90	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 23	<i>Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Letung (DAK Non Fisik)</i>	824.351.297,00	729.558.350,00	(94.792.947,00)	88,50	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	90.000.000,00	57.500.000,00	(32.500.000,00)	63,89	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	734.351.297,00	672.058.350,00	(62.292.947,00)	91,52	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 24	<i>Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Palmatak (DAK Non Fisik)</i>	842.409.025,00	842.048.100,00	(360.925,00)	99,96	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	787.409.025,00	787.048.100,00	(360.925,00)	99,95	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 25	<i>Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Siantan Tengah (DAK Non Fisik)</i>	738.581.250,00	738.441.321,00	(139.929,00)	99,98	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	738.581.250,00	738.441.321,00	(139.929,00)	99,98	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 26	<i>Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Siantan Timur (DAK Non Fisik)</i>	754.143.750,00	728.542.870,00	(25.600.880,00)	96,61	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	50,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	739.143.750,00	721.042.870,00	(18.100.880,00)	97,55	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 27	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Siantan Selatan (DAK Non Fisik)	628.596.000,00	466.779.130,00	(161.816.870,00)	74,26	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	603.596.000,00	441.779.130,00	(161.816.870,00)	73,19	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 28	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Jemaja Timur (DAK Non Fisik)	791.250.000,00	759.016.550,00	(32.233.450,00)	95,93	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	761.250.000,00	729.016.550,00	(32.233.450,00)	95,77	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 29	Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik)	373.000.000,00	350.070.757,00	(22.929.243,00)	93,85	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.820.000,00	71.220.000,00	(1.600.000,00)	97,80	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.180.000,00	278.850.757,00	(21.329.243,00)	92,89	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 31	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tarempa	891.765.666,00	655.966.679,00	(235.798.987,00)	73,56	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.900.000,00	1.800.000,00	(14.100.000,00)	11,32	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	773.865.666,00	609.754.711,00	(164.110.955,00)	78,79	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	102.000.000,00	44.411.968,00	(57.588.032,00)	43,54	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 32	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Letung	514.168.164,00	432.430.200,00	(81.737.964,00)	84,10	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.900.000,00	1.500.000,00	(11.400.000,00)	11,63	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	363.268.164,00	324.129.800,00	(39.138.364,00)	89,23	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	138.000.000,00	106.800.400,00	(31.199.600,00)	77,39	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 33	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Palmatak	856.120.200,00	816.624.554,00	(39.495.646,00)	95,39	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.400.000,00	17.700.000,00	(5.700.000,00)	75,64	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	734.865.700,00	708.805.054,00	(26.060.646,00)	96,45	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.854.500,00	90.119.500,00	(7.735.000,00)	92,10	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 34	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Siantan Tengah	372.751.440,00	248.920.050,00	(123.831.390,00)	66,78	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	83,33	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	335.641.440,00	212.904.450,00	(122.736.990,00)	63,43	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 34 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.110.000,00	31.015.600,00	(94.400,00)	99,70	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 35	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Siantan Timur	331.320.000,00	258.367.412,00	(72.952.588,00)	77,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.150.000,00	600.000,00	(11.550.000,00)	4,94	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	297.056.000,00	246.382.412,00	(50.673.588,00)	82,94	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 35 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	22.114.000,00	11.385.000,00	(10.729.000,00)	51,48	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 36	<i>Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Siantan Selatan</i>	260.452.517,00	166.276.950,00	(94.175.567,00)	63,84	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	600.000,00	(11.400.000,00)	5,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	214.297.517,00	135.496.950,00	(78.800.567,00)	63,23	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	34.155.000,00	30.180.000,00	(3.975.000,00)	88,36	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 37	<i>Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Jemaja Timur</i>	227.688.400,00	165.398.800,00	(62.289.600,00)	72,64	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	1.500.000,00	(6.000.000,00)	20,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.188.400,00	144.601.200,00	(55.587.200,00)	72,23	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 37 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	19.297.600,00	(702.400,00)	96,49	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 46	<i>Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) (DAK Non Fisik)</i>	798.000.000,00	744.460.846,00	(53.539.154,00)	93,29	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	90.000.000,00	72.100.000,00	(17.900.000,00)	80,11	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	708.000.000,00	672.360.846,00	(35.639.154,00)	94,97	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 47	<i>Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Klaim INA-CBGs</i>	3.104.375.520,00	2.435.889.500,00	(668.486.020,00)	78,47	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.104.375.520,00	2.435.889.500,00	(668.486.020,00)	78,47	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 49	<i>Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Daerah Sulit dan Terpencil</i>	100.000.000,00	98.334.135,00	(1.665.865,00)	98,33	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.334.135,00	(1.665.865,00)	98,33	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	58.866.214.178,62	53.607.253.353,59	(5.258.960.825,03)	91,07	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 20	<i>Pengadaan Perlengkapan Sekolah</i>	7.132.564.845,00	7.116.138.723,00	(16.426.122,00)	99,77	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.350.000,00	43.350.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.790.776.200,00	4.780.726.050,00	(10.050.150,00)	99,79	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.298.438.645,00	2.292.062.673,00	(6.375.972,00)	99,72	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 44	<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah</i>	6.549.943.519,64	6.343.291.482,00	(206.652.037,64)	96,84	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.325.000,00	43.000.000,00	(13.325.000,00)	76,34	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.731.594,00	116.970.700,00	(25.760.894,00)	81,95	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.350.886.925,64	6.183.320.782,00	(167.566.143,64)	97,36	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 80	<i>Pembangunan Batu Miring, Pagar, Parit, Semenisasi dan Pavingblock Sekolah</i>	13.374.438.955,00	12.819.010.700,00	(555.428.255,00)	95,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	91.825.000,00	90.950.000,00	(875.000,00)	99,05	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	742.877.000,00	646.830.100,00	(96.046.900,00)	87,07	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 80 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.539.736.955,00	12.081.230.600,00	(458.506.355,00)	96,34	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 85	<i>Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (DAK)</i>	1.847.015.146,00	1.816.590.146,00	(30.425.000,00)	98,35	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 85 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	33,33	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	40.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.791.015.146,00	1.770.595.146,00	(20.420.000,00)	98,86	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 89	<i>Pembangunan Jamban Siswa (DAK)</i>	1.430.865.416,00	1.418.219.816,00	(12.645.600,00)	99,12	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	33,33	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	33.775.000,00	(2.225.000,00)	93,82	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 89 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.379.865.416,00	1.379.444.816,00	(420.600,00)	99,97	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 90	<i>Pengadaan Peralatan Media Pendidikan (DAK)</i>	677.664.912,00	627.186.240,00	(50.478.672,00)	92,55	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.500.000,00	49.515.000,00	(38.985.000,00)	55,95	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 90 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	589.164.912,00	577.671.240,00	(11.493.672,00)	98,05	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 92	<i>Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD dan SMP</i>	11.623.737.560,98	7.903.923.267,59	(3.719.814.293,39)	68,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.677.252.048,78	5.210.011.380,83	532.759.332,05	111,39	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 92 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.946.485.512,20	2.693.911.886,76	(4.252.573.625,44)	38,78	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 94	<i>Pembangunan Ruang Laboratorium IPA (DAK)</i>	1.968.682.500,00	1.956.637.500,00	(12.045.000,00)	99,39	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 94 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.990.000,00	36.945.000,00	(45.000,00)	99,88	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 94 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.919.692.500,00	1.919.692.500,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 106	<i>Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Berikut Sanitasi dan Perabotannya SD dan SMP</i>	3.009.697.000,00	2.929.641.222,00	(80.055.778,00)	97,34	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.750.000,00	13.950.000,00	(8.800.000,00)	61,32	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.554.000,00	120.853.000,00	(20.701.000,00)	85,38	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 106 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.845.393.000,00	2.794.838.222,00	(50.554.778,00)	98,22	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 108	<i>Pembangunan Majelis Guru Berikut Sanitasi dan Perabotnya SD dan SMP</i>	822.748.318,00	809.491.042,00	(13.257.276,00)	98,39	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 108 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.950.000,00	3.450.000,00	(500.000,00)	87,34	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.372.000,00	30.542.750,00	(1.829.250,00)	94,35	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 108 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	786.426.318,00	775.498.292,00	(10.928.026,00)	98,61	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 109	<i>Pembangunan Jamban Siswa/Atau Guru Berikut Sanitasinya SD dan SMP</i>	925.290.000,00	923.846.000,00	(1.444.000,00)	99,84	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 109 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.473.000,00	35.323.500,00	(149.500,00)	99,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 109 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	882.667.000,00	881.372.500,00	(1.294.500,00)	99,85	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 110	Pembangunan Rumah Dinas Guru Guru SD dan SMP	2.787.494.000,00	2.546.992.255,00	(240.501.745,00)	91,37	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 110 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.200.000,00	11.425.000,00	(7.775.000,00)	59,51	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.758.678,00	104.178.900,00	(25.579.778,00)	80,29	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 110 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.638.535.322,00	2.431.388.355,00	(207.146.967,00)	92,15	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 120	Pengadaan Peralatan Komputer	2.260.145.000,00	2.229.502.378,00	(30.642.622,00)	98,64	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 120 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.425.000,00	12.075.000,00	(1.350.000,00)	89,94	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.438.000,00	107.030.500,00	(5.407.500,00)	95,19	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 120 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.134.282.000,00	2.110.396.878,00	(23.885.122,00)	98,88	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 121	Pendataan dan Sertifikasi Melek Al-Quran Siswa Muslim Dikdas	100.000.000,00	99.553.000,00	(447.000,00)	99,55	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 121 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 121 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.250.000,00	92.803.000,00	(447.000,00)	99,52	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 124	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	150.000.000,00	125.347.000,00	(24.653.000,00)	83,56	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	125.347.000,00	(24.653.000,00)	83,56	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 201	Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya (DAK)	3.833.966.706,00	3.574.516.082,00	(259.450.624,00)	93,23	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 201 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	12.000.000,00	(18.000.000,00)	40,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 201 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	193.297.162,00	162.991.000,00	(30.306.162,00)	84,32	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 201 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.610.669.544,00	3.399.525.082,00	(211.144.462,00)	94,15	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 202	Pembangunan Ruang Inklusi (DAK)	371.960.300,00	367.366.500,00	(4.593.800,00)	98,76	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 202 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 202 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	367.460.300,00	367.366.500,00	(93.800,00)	99,97	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	4.674.638.935,00	4.394.370.844,00	(280.268.091,00)	94,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan (DAK)	4.674.638.935,00	4.394.370.844,00	(280.268.091,00)	94,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.850.000,00	11.250.000,00	(6.600.000,00)	63,03	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.245.000,00	52.760.589,00	(4.484.411,00)	92,17	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.599.543.935,00	4.330.360.255,00	(269.183.680,00)	94,15	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17	Program Akuntabilitas dan Koordinasi Aparatur Pengawasan	240.523.000,00	214.324.639,00	(26.198.361,00)	89,11	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03	Verifikasi LHKPN/LHKASN	88.816.000,00	85.250.032,00	(3.565.968,00)	95,98	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.506.668,00	32.306.668,00	(200.000,00)	99,38	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.809.332,00	40.508.964,00	(3.300.368,00)	92,47	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.500.000,00	12.434.400,00	(65.600,00)	99,48	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04	Monitoring Dan Evaluasi Pelayanan Publik	60.837.000,00	45.045.281,00	(15.791.719,00)	74,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.837.000,00	45.045.281,00	(15.791.719,00)	74,04	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05	<i>Monitoring Dan Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi</i>	90.870.000,00	84.029.326,00	(6.840.674,00)	92,47	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.870.000,00	84.029.326,00	(6.840.674,00)	92,47	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	3.280.209.200,00	3.242.112.309,00	(38.096.891,00)	98,84	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01	<i>Peningkatan Sarana Penunjang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)</i>	590.270.000,00	572.106.398,00	(18.163.602,00)	96,92	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	175.550.000,00	165.950.000,00	(9.600.000,00)	94,53	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	402.720.000,00	394.221.398,00	(8.498.602,00)	97,89	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.000.000,00	11.935.000,00	(65.000,00)	99,46	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06	<i>Sewa Dedicated Website dan Email Server</i>	162.250.000,00	149.392.582,00	(12.857.418,00)	92,08	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.250.000,00	43.250.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.000.000,00	106.142.582,00	(12.857.418,00)	89,20	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 13	<i>sewa bandwidth</i>	2.527.689.200,00	2.520.613.329,00	(7.075.871,00)	99,72	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.925.000,00	3.550.000,00	(375.000,00)	90,45	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.523.764.200,00	2.517.063.329,00	(6.700.871,00)	99,73	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</b>	38.191.266.000,00	36.246.287.855,00	(1.944.978.145,00)	94,91	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01	<i>Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan</i>	38.191.266.000,00	36.246.287.855,00	(1.944.978.145,00)	94,91	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	151.475.000,00	120.850.000,00	(30.625.000,00)	79,78	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	384.027.000,00	381.674.855,00	(2.352.145,00)	99,39	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	37.655.764.000,00	35.743.763.000,00	(1.912.001.000,00)	94,92	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17	<b>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong</b>	10.573.453.341,20	10.001.640.808,00	(571.812.533,20)	94,59	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03	<i>Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (DAK)</i>	6.777.391.239,00	6.777.175.486,00	(215.753,00)	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.234.750,00	25.019.000,00	(215.750,00)	99,15	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.728.156.489,00	6.728.156.486,00	(3,00)	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05	<i>Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong</i>	3.796.062.102,20	3.224.465.322,00	(571.596.780,20)	84,94	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.150.000,00	19.750.000,00	(2.400.000,00)	89,16	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	232.543.102,20	226.000.322,00	(6.542.780,20)	97,19	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.541.369.000,00	2.978.715.000,00	(562.654.000,00)	84,11	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	695.292.500,00	684.073.849,00	(11.218.651,00)	98,39	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11	<i>Bimbingan Teknis Bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)</i>	80.000.000,00	71.335.500,00	(8.664.500,00)	89,17	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.555.000,00	3.555.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.445.000,00	67.780.500,00	(8.664.500,00)	88,67	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 13	<i>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara kesejahteraan sosial LKKS, KT, TKSK, PSM, LKS dan LK3</i>	78.000.000,00	77.732.800,00	(267.200,00)	99,66	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.825.000,00	76.557.800,00	(267.200,00)	99,65	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 23	<i>Pembinaan, Pemberdayaan, Pendampingan dan Monitoring Evaluasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Kampung Siaga Bencana</i>	537.292.500,00	535.005.549,00	(2.286.951,00)	99,57	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	126.477.500,00	126.327.500,00	(150.000,00)	99,88	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	334.615.000,00	332.820.749,00	(1.794.251,00)	99,46	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	76.200.000,00	75.857.300,00	(342.700,00)	99,55	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>	84.850.000,00	84.349.550,00	(500.450,00)	99,41	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07	<i>Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak</i>	84.850.000,00	84.349.550,00	(500.450,00)	99,41	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.300.000,00	72.799.550,00	(500.450,00)	99,32	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17	<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>	401.312.600,00	382.553.818,00	(18.758.782,00)	95,33	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01	<i>Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan</i>	401.312.600,00	382.553.818,00	(18.758.782,00)	95,33	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.350.000,00	27.350.000,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	373.962.600,00	355.203.818,00	(18.758.782,00)	94,98	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	1.569.476.440,00	1.457.207.660,00	(112.268.780,00)	92,85	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01	<i>Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah</i>	1.569.476.440,00	1.457.207.660,00	(112.268.780,00)	92,85	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.550.000,00	12.000.000,00	(3.550.000,00)	77,17	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.489.926.440,00	1.445.207.660,00	(44.718.780,00)	97,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	64.000.000,00	0,00	(64.000.000,00)	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	3.029.686.450,00	2.972.931.430,00	(56.755.020,00)	98,13	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02	<i>Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata</i>	1.598.842.520,00	1.542.519.104,00	(56.323.416,00)	96,48	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.425.000,00	9.275.000,00	(5.150.000,00)	64,30	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.108.000,00	79.582.570,00	(525.430,00)	99,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.504.309.520,00	1.453.661.534,00	(50.647.986,00)	96,63	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16	<i>Penyusunan Masterplan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas</i>	1.430.843.930,00	1.430.412.326,00	(431.604,00)	99,97	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.415.693.930,00	1.415.262.326,00	(431.604,00)	99,97	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17	<b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>	5.472.131.760,00	5.361.606.413,00	(110.525.347,00)	97,98	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02	<i>Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</i>	299.750.000,00	298.470.601,00	(1.279.399,00)	99,57	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.600.000,00	78.320.601,00	(1.279.399,00)	98,39	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 23	<i>Penyediaan Armada Penangkapan Ikan (DAK)</i>	2.536.531.960,00	2.522.219.360,00	(14.312.600,00)	99,44	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.600.000,00	2.700.000,00	(10.900.000,00)	19,85	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.522.931.960,00	2.519.519.360,00	(3.412.600,00)	99,86	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 26	<i>Pelayanan Perlindungan Nelayan</i>	284.699.800,00	252.980.200,00	(31.719.600,00)	88,86	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.122.000,00	31.063.000,00	(14.059.000,00)	68,84	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	227.577.800,00	209.917.200,00	(17.660.600,00)	92,24	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 31	<i>Penyediaan Armada Penangkapan Ikan</i>	685.450.000,00	667.743.727,00	(17.706.273,00)	97,42	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	3.475.000,00	(3.725.000,00)	48,26	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	678.250.000,00	664.268.727,00	(13.981.273,00)	97,94	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 33	<i>Penyediaan Alat Penangkapan Ikan</i>	147.025.000,00	135.573.900,00	(11.451.100,00)	92,21	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.975.000,00	2.875.000,00	(1.100.000,00)	72,33	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.050.000,00	132.698.900,00	(10.351.100,00)	92,76	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 34	<i>Penyediaan Alat Bantu Penangkapan</i>	1.518.675.000,00	1.484.618.625,00	(34.056.375,00)	97,76	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.650.000,00	7.150.000,00	(500.000,00)	93,46	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.511.025.000,00	1.477.468.625,00	(33.556.375,00)	97,78	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	495.671.500,00	446.870.000,00	(48.801.500,00)	90,15	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09	<i>Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah</i>	269.374.500,00	238.809.480,00	(30.565.020,00)	88,65	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.692.500,00	2.517.500,00	(175.000,00)	93,50	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	266.682.000,00	236.291.980,00	(30.390.020,00)	88,60	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16	<i>Penataan dan Pembinaan Koperasi</i>	226.297.000,00	208.060.520,00	(18.236.480,00)	91,94	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.167.500,00	2.167.500,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	224.129.500,00	205.893.020,00	(18.236.480,00)	91,86	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	3.276.565.571,00	3.083.403.343,00	(193.162.228,00)	94,10	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01	<i>Penyusunan Dokumen Kajian Dampak Lingkungan</i>	2.479.556.000,00	2.339.167.874,00	(140.388.126,00)	94,34	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.550.000,00	53.820.000,00	(4.730.000,00)	91,92	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.421.006.000,00	2.285.347.874,00	(135.658.126,00)	94,40	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02	<i>Adipura Desa</i>	175.750.000,00	153.693.300,00	(22.056.700,00)	87,45	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.800.000,00	17.800.000,00	(3.000.000,00)	85,58	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.950.000,00	135.893.300,00	(19.056.700,00)	87,70	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan</i>	100.000.000,00	84.748.500,00	(15.251.500,00)	84,75	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.050.000,00	59.798.500,00	(15.251.500,00)	79,68	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05	<i>Pemantauan Kualitas Lingkungan</i>	111.246.571,00	102.796.571,00	(8.450.000,00)	92,40	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.396.571,00	86.178.171,00	(8.218.400,00)	91,29	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.250.000,00	7.018.400,00	(231.600,00)	96,81	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06	<i>Pengawasan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup</i>	109.663.000,00	109.390.300,00	(272.700,00)	99,75	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.850.000,00	26.850.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.750.000,00	44.477.300,00	(272.700,00)	99,39	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	38.063.000,00	38.063.000,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 13	<i>Penyusunan Dokumen Lingkungan</i>	300.350.000,00	293.606.798,00	(6.743.202,00)	97,75	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	296.950.000,00	290.206.798,00	(6.743.202,00)	97,73	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>	11.083.157.784,00	10.763.806.042,00	(319.351.742,00)	97,12	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15	<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional (DAK)</i>	1.848.467.438,00	1.833.978.234,00	(14.489.204,00)	99,22	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.300.000,00	2.950.000,00	(6.350.000,00)	31,72	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.699.700,00	45.392.197,00	(307.503,00)	99,33	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.793.467.738,00	1.785.636.037,00	(7.831.701,00)	99,56	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 32	<i>Pembangunan Gudang Non SRG (Silpa DAK)</i>	5.198.396.000,00	4.939.622.153,00	(258.773.847,00)	95,02	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.720.000,00	10.500.000,00	(12.220.000,00)	46,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.676.000,00	51.169.152,00	(4.506.848,00)	91,91	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.120.000.000,00	4.877.953.001,00	(242.046.999,00)	95,27	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 36	<i>Kajian Sistem Logistik Daerah</i>	381.985.000,00	347.694.739,00	(34.290.261,00)	91,02	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.536.000,00	0,00	(18.536.000,00)	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	363.449.000,00	347.694.739,00	(15.754.261,00)	95,67	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 37	<i>Pembangunan Sarana Parkir Pasar Ikan Suka Ramai</i>	160.342.000,00	158.988.000,00	(1.354.000,00)	99,16	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.325.000,00	1.600.000,00	(725.000,00)	68,82	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	9.671.000,00	(629.000,00)	93,89	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 37 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	147.717.000,00	147.717.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 38	<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional</i>	3.493.967.346,00	3.483.522.916,00	(10.444.430,00)	99,70	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.050.000,00	4.300.000,00	(6.750.000,00)	38,91	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.256.800,00	53.612.197,00	(2.644.603,00)	95,30	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 38 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.426.660.546,00	3.425.610.719,00	(1.049.827,00)	99,97	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>	2.810.764.510,00	2.734.001.707,00	(76.762.803,00)	97,27	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09	<i>Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Dalam Pembangunan Masyarakat dan Desa</i>	2.458.932.900,00	2.399.164.953,00	(59.767.947,00)	97,57	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.007.000,00	68.193.000,00	(814.000,00)	98,82	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.339.925.900,00	2.280.976.953,00	(58.948.947,00)	97,48	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	49.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10	<i>Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11	<i>Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Serentak</i>	137.850.000,00	126.371.054,00	(11.478.946,00)	91,67	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.850.000,00	15.150.000,00	(700.000,00)	95,58	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.000.000,00	111.221.054,00	(10.778.946,00)	91,16	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14	<i>Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	111.860.000,00	110.738.800,00	(1.121.200,00)	99,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.925.000,00	8.595.000,00	(330.000,00)	96,30	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.935.000,00	102.143.800,00	(791.200,00)	99,23	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 17	<i>Sosialisasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Berdasarkan Tipologi Desa</i>	102.121.610,00	97.726.900,00	(4.394.710,00)	95,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.561.610,00	87.166.900,00	(4.394.710,00)	95,20	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17	<b>Program Peningkatan Pelayanan Humas dan Protokoler DPRD</b>	1.935.250.000,00	1.923.117.700,00	(12.132.300,00)	99,37	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01	<i>Jasa dan Sarana Penunjang Humas dan Protokoler DPRD</i>	1.935.250.000,00	1.923.117.700,00	(12.132.300,00)	99,37	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.750.000,00	12.600.000,00	(150.000,00)	98,82	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.894.500.000,00	1.882.929.700,00	(11.570.300,00)	99,39	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	28.000.000,00	27.588.000,00	(412.000,00)	98,53	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17	<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</b>	801.264.000,00	723.825.759,00	(77.438.241,00)	90,34	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12	<i>Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Ibu-Ibu Rumah Tangga dan Wanita Karir</i>	495.000.000,00	437.811.689,00	(57.188.311,00)	88,45	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	493.215.000,00	436.026.689,00	(57.188.311,00)	88,40	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 13	<i>Pengembangan Fungsi dan Peran Serta Dharma Wanita Persatuan dalam Pembangunan Daerah</i>	306.264.000,00	286.014.070,00	(20.249.930,00)	93,39	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	900.000,00	(2.100.000,00)	30,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	303.264.000,00	285.114.070,00	(18.149.930,00)	94,02	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga</b>	10.320.806.500,00	7.150.992.787,00	(3.169.813.713,00)	69,29	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02	<i>Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga</i>	10.320.806.500,00	7.150.992.787,00	(3.169.813.713,00)	69,29	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.675.000,00	38.800.000,00	(9.875.000,00)	79,71	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.871.881.500,00	4.782.109.000,00	(3.089.772.500,00)	60,75	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.400.250.000,00	2.330.083.787,00	(70.166.213,00)	97,08	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17	<b>Program Peningkatan, Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan</b>	2.834.654.100,00	2.411.406.417,00	(423.247.683,00)	85,07	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08	<i>Peningkatan Kualitas SDM Para Penyuluh Agama</i>	134.800.000,00	101.261.650,00	(33.538.350,00)	75,12	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.600.000,00	97.061.650,00	(33.538.350,00)	74,32	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09	<i>Pelaksanaan STQ/ MTQ Tingkat Kabupaten</i>	830.454.100,00	763.904.300,00	(66.549.800,00)	91,99	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	735.250.000,00	668.868.800,00	(66.381.200,00)	90,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	93.704.100,00	93.535.500,00	(168.600,00)	99,82	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10	<i>Pelaksanaan STQ/ MTQ Tingkat Provinsi</i>	1.039.300.000,00	934.560.992,00	(104.739.008,00)	89,92	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	78.700.000,00	76.700.000,00	(2.000.000,00)	97,46	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	960.600.000,00	857.860.992,00	(102.739.008,00)	89,30	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11	<i>Pembinaan Wawasan Keagamaan dan Akhlakul Qorimah</i>	830.100.000,00	611.679.475,00	(218.420.525,00)	73,69	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.700.000,00	13.500.000,00	(1.200.000,00)	91,84	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	815.400.000,00	598.179.475,00	(217.220.525,00)	73,36	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	378.080.400,00	298.577.900,00	(79.502.500,00)	78,97	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11	<i>Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)</i>	206.210.000,00	129.819.000,00	(76.391.000,00)	62,95	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.850.000,00	21.850.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	184.360.000,00	107.969.000,00	(76.391.000,00)	58,56	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 13	<i>Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama TRIPARTIT</i>	171.870.400,00	168.758.900,00	(3.111.500,00)	98,19	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.280.000,00	57.230.000,00	(1.050.000,00)	98,20	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.590.400,00	111.528.900,00	(2.061.500,00)	98,19	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17	<b>Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	755.446.560,00	721.130.265,00	(34.316.295,00)	95,46	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01	<i>Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat</i>	193.267.560,00	192.522.665,00	(744.895,00)	99,61	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.175.000,00	1.875.000,00	(300.000,00)	86,21	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	179.842.560,00	179.449.665,00	(392.895,00)	99,78	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.250.000,00	11.198.000,00	(52.000,00)	99,54	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16	<i>Pelatihan Kader Posyandu</i>	386.329.000,00	353.751.894,00	(32.577.106,00)	91,57	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.325.000,00	48.850.000,00	(475.000,00)	99,04	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	326.504.000,00	294.506.894,00	(31.997.106,00)	90,20	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.500.000,00	10.395.000,00	(105.000,00)	99,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 20	<i>Kampanye Kesehatan dalam Rangka Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)</i>	175.850.000,00	174.855.706,00	(994.294,00)	99,43	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.850.000,00	174.855.706,00	(994.294,00)	99,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18	<b>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	62.978.000,00	62.978.000,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04	<i>Rakor Forum Pembauran Kebangsaan</i>	62.978.000,00	62.978.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.823.000,00	5.823.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.155.000,00	57.155.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 13	<i>Dialog Interaktif Antar Umat Beragama</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18	<b>Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa</b>	3.829.267.000,00	3.722.794.940,00	(106.472.060,00)	97,22	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04	<i>Media Center Pemerintah KKA</i>	3.829.267.000,00	3.722.794.940,00	(106.472.060,00)	97,22	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.829.267.000,00	3.722.794.940,00	(106.472.060,00)	97,22	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>	9.345.146.937,29	9.281.328.835,00	(63.818.102,29)	99,32	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04	<i>Pembangunan Pelabuhan</i>	9.345.146.937,29	9.281.328.835,00	(63.818.102,29)	99,32	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.975.000,00	49.975.000,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	423.945.000,00	423.602.300,00	(342.700,00)	99,92	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.871.226.937,29	8.807.751.535,00	(63.475.402,29)	99,28	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18	<b>Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong</b>	3.632.182.511,18	3.616.489.500,00	(15.693.011,18)	99,57	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03	<i>Pembangunan Turap/Talud/Bronjong</i>	3.632.182.511,18	3.616.489.500,00	(15.693.011,18)	99,57	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.950.000,00	21.650.000,00	(1.300.000,00)	94,34	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.765.000,00	54.451.000,00	(314.000,00)	99,43	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.554.467.511,18	3.540.388.500,00	(14.079.011,18)	99,60	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>	261.780.000,00	259.675.265,00	(2.104.735,00)	99,20	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05	<i>Pembinaan, Pengawasan dan Peningkatan Administrasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan</i>	202.500.000,00	200.474.147,00	(2.025.853,00)	99,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	188.250.000,00	186.224.147,00	(2.025.853,00)	98,92	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 12	<i>Penyusunan SPM Kabupaten Kepulauan Anambas</i>	59.280.000,00	59.201.118,00	(78.882,00)	99,87	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.280.000,00	59.201.118,00	(78.882,00)	99,87	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	299.850.000,00	252.106.580,00	(47.743.420,00)	84,08	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 15	<i>Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket (UNPK) Pendidikan Non Formal</i>	50.000.000,00	46.159.900,00	(3.840.100,00)	92,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.672.500,00	4.672.500,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.327.500,00	41.487.400,00	(3.840.100,00)	91,53	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 17	<i>Pembinaan Penyelenggaraan Kesetaraan Paket</i>	100.000.000,00	87.045.450,00	(12.954.550,00)	87,05	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.000.000,00	55.200.000,00	(10.800.000,00)	83,64	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	31.845.450,00	(2.154.550,00)	93,66	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 18	<i>Pendataan Keaksaraan Fungsional</i>	50.000.000,00	39.733.700,00	(10.266.300,00)	79,47	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.300.000,00	33.033.700,00	(10.266.300,00)	76,29	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 20	<i>Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal</i>	99.850.000,00	79.167.530,00	(20.682.470,00)	79,29	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.350.000,00	2.200.000,00	(150.000,00)	93,62	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.500.000,00	76.967.530,00	(20.532.470,00)	78,94	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18	<b>Program pengembangan Sistem Informasi Pertanahan</b>	158.156.000,00	113.848.250,00	(44.307.750,00)	71,98	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 101	<i>Pembinaan Teknis Pengukuran dan Pemetaan Tanah</i>	158.156.000,00	113.848.250,00	(44.307.750,00)	71,98	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 101 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.399.000,00	51.399.000,00	(18.000.000,00)	74,06	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 101 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.757.000,00	62.449.250,00	(26.307.750,00)	70,36	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18	<b>Program Peningkatan dan Penguatan Kapasitas, Kapabilitas Kelembagaan/SDM Aparatur Pengawas</b>	256.571.000,00	244.445.891,00	(12.125.109,00)	95,27	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01	<i>Diklat Penjenjangan dan Peningkatan Kapabilitas APIP</i>	256.571.000,00	244.445.891,00	(12.125.109,00)	95,27	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	256.571.000,00	244.445.891,00	(12.125.109,00)	95,27	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	174.802.800,00	167.439.009,00	(7.363.791,00)	95,79	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 10	<i>Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan APBDesa</i>	73.802.800,00	72.735.700,00	(1.067.100,00)	98,55	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.625.000,00	6.625.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.177.800,00	66.110.700,00	(1.067.100,00)	98,41	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 13	<i>Rapat Koordinasi Pemerintah Desa dan Penyusunan Produk Hukum Desa</i>	101.000.000,00	94.703.309,00	(6.296.691,00)	93,77	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.525.000,00	88.228.309,00	(6.296.691,00)	93,34	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</b>	50.000.000,00	49.999.000,00	(1.000,00)	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 02	<i>Pendampingan dan Pelaksanaan Inseminasi Buatan</i>	50.000.000,00	49.999.000,00	(1.000,00)	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.999.000,00	(1.000,00)	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	53.822.530,00	53.822.530,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03	<i>Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya</i>	53.822.530,00	53.822.530,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.822.530,00	53.822.530,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sosial dan Budaya</b>	246.909.000,00	245.859.000,00	(1.050.000,00)	99,57	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04	<i>Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya</i>	246.909.000,00	245.859.000,00	(1.050.000,00)	99,57	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.550.000,00	20.550.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	226.359.000,00	225.309.000,00	(1.050.000,00)	99,54	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18	<b>Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba</b>	251.531.000,00	213.804.950,00	(37.726.050,00)	85,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 02	<i>Penyuluhan Tentang Penyalahgunaan NAPZA dan Pergaulan Bebas Dikalangan Remaja</i>	251.531.000,00	213.804.950,00	(37.726.050,00)	85,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.975.000,00	19.975.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	231.556.000,00	193.829.950,00	(37.726.050,00)	83,71	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19	<b>Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>	191.823.190,00	153.640.500,00	(38.182.690,00)	80,09	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05	<i>Pendampingan Pegelolaan Keuangan Desa</i>	191.823.190,00	153.640.500,00	(38.182.690,00)	80,09	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	186.323.190,00	148.140.500,00	(38.182.690,00)	79,51	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19	<b>Program Pemeberdayaan penyuluhan Pertanian, Perkebunan lapangan</b>	1.351.263.600,00	995.861.199,00	(355.402.401,00)	73,70	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 04	<i>Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian dan Perkebunan</i>	1.351.263.600,00	995.861.199,00	(355.402.401,00)	73,70	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.575.000,00	19.500.000,00	(6.075.000,00)	76,25	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.214.688.600,00	872.061.999,00	(342.626.601,00)	71,79	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	111.000.000,00	104.299.200,00	(6.700.800,00)	93,96	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	1.180.320.000,00	1.178.960.800,00	(1.359.200,00)	99,88	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01	<i>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah</i>	242.200.000,00	242.075.751,00	(124.249,00)	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 65
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.200.000,00	122.075.751,00	(124.249,00)	99,90	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 03	<i>Ligitasi dan non Litigasi</i>	652.750.000,00	651.539.612,00	(1.210.388,00)	99,81	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.350.000,00	64.350.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	588.400.000,00	587.189.612,00	(1.210.388,00)	99,79	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06	<i>Penyusunan Produk Hukum Kepala daerah</i>	285.370.000,00	285.345.437,00	(24.563,00)	99,99	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	114.900.000,00	114.900.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	170.470.000,00	170.445.437,00	(24.563,00)	99,99	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19	<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>	403.153.000,00	402.954.319,00	(198.681,00)	99,95	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 17	<i>Kegiatan Sosialisasi Undang - Undang Pemilu</i>	185.600.000,00	185.557.600,00	(42.400,00)	99,98	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	182.075.000,00	182.032.600,00	(42.400,00)	99,98	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 19	<i>Manajemen, Pelatihan dan Monitoring Ormas, LSM Penerima dana Bansos/Hibah dan Update Data Ormas dan LSM</i>	67.072.000,00	67.072.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.772.000,00	64.772.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 22	<i>Pemantauan Penyelenggaraan Pemilihan Umum</i>	150.481.000,00	150.324.719,00	(156.281,00)	99,90	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.950.000,00	16.796.219,00	(153.781,00)	99,09	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.531.000,00	133.528.500,00	(2.500,00)	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	339.473.000,00	332.484.317,00	(6.988.683,00)	97,94	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07	<i>Pengawasan Depot Air Minum dan Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman</i>	90.473.000,00	89.058.630,00	(1.414.370,00)	98,44	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.473.000,00	89.058.630,00	(1.414.370,00)	98,44	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 09	<i>Pembinaan Teknis Penyelenggaraan KKS di daerah Binaan</i>	249.000.000,00	243.425.687,00	(5.574.313,00)	97,76	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.100.000,00	165.530.967,00	(3.569.033,00)	97,89	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	78.100.000,00	76.094.720,00	(2.005.280,00)	97,43	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19	<b>Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konversi Sungai</b>	13.239.298.347,00	13.054.943.477,00	(184.354.870,00)	98,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01	<i>Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku</i>	873.501.000,00	858.997.201,00	(14.503.799,00)	98,34	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	4.300.000,00	(950.000,00)	81,90	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	168.251.000,00	164.172.201,00	(4.078.799,00)	97,58	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	700.000.000,00	690.525.000,00	(9.475.000,00)	98,65	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02	<i>Rehabilitasi Dan Perlindungan Daerah Tangkapan Air</i>	1.107.123.000,00	1.098.931.488,00	(8.191.512,00)	99,26	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	150.000,00	(2.250.000,00)	6,25	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.104.723.000,00	1.098.781.488,00	(5.941.512,00)	99,46	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 03	<i>Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya</i>	11.258.674.347,00	11.097.014.788,00	(161.659.559,00)	98,56	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.370.000,00	0,00	(12.370.000,00)	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.590.000,00	134.980.703,00	(7.609.297,00)	94,66	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.103.714.347,00	10.962.034.085,00	(141.680.262,00)	98,72	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19	<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>	5.057.461.884,00	4.976.652.931,00	(80.808.953,00)	98,40	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01	<i>Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut</i>	1.079.051.000,00	1.068.266.500,00	(10.784.500,00)	99,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.875.000,00	5.575.000,00	(2.300.000,00)	70,79	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.625.000,00	66.331.500,00	(7.293.500,00)	90,09	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	997.551.000,00	996.360.000,00	(1.191.000,00)	99,88	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 04	<i>Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat</i>	1.383.733.117,00	1.374.462.617,00	(9.270.500,00)	99,33	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.950.000,00	8.950.000,00	(5.000.000,00)	64,16	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.750.000,00	106.663.500,00	(4.086.500,00)	96,31	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.259.033.117,00	1.258.849.117,00	(184.000,00)	99,99	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05	<i>Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)</i>	1.925.310.767,00	1.903.956.714,00	(21.354.053,00)	98,89	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.425.000,00	9.125.000,00	(300.000,00)	96,82	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	201.090.000,00	189.656.947,00	(11.433.053,00)	94,31	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.714.795.767,00	1.705.174.767,00	(9.621.000,00)	99,44	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06	<i>Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)</i>	669.367.000,00	629.967.100,00	(39.399.900,00)	94,11	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	2.725.000,00	(2.975.000,00)	47,81	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.855.000,00	39.430.100,00	(36.424.900,00)	51,98	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	587.812.000,00	587.812.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	3.938.987.000,00	3.392.076.427,00	(546.910.573,00)	86,12	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01	<i>Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik</i>	890.478.000,00	779.074.629,00	(111.403.371,00)	87,49	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.476.000,00	1.575.000,00	(5.901.000,00)	21,07	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	883.002.000,00	777.499.629,00	(105.502.371,00)	88,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 23	<i>Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional</i>	200.000.000,00	190.870.600,00	(9.129.400,00)	95,44	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.700.000,00	17.100.000,00	(4.600.000,00)	78,80	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	178.300.000,00	173.770.600,00	(4.529.400,00)	97,46	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 31	<i>Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah</i>	150.000.000,00	101.383.584,00	(48.616.416,00)	67,59	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.475.000,00	98.858.584,00	(48.616.416,00)	67,03	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 32	<i>Pelatihan Penyusunan soal US dan USBN</i>	425.814.000,00	406.351.990,00	(19.462.010,00)	95,43	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.950.000,00	26.950.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	398.864.000,00	379.401.990,00	(19.462.010,00)	95,12	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 35	<i>Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan</i>	200.000.000,00	116.356.450,00	(83.643.550,00)	58,18	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.558.000,00	6.558.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	193.442.000,00	109.798.450,00	(83.643.550,00)	56,76	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 38	<i>Diklat Guru Bidang Studi</i>	448.000.000,00	355.472.921,00	(92.527.079,00)	79,35	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	438.350.000,00	345.822.921,00	(92.527.079,00)	78,89	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 45	<i>Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal/Eksternal (SPMI/SPME)</i>	278.660.000,00	244.095.300,00	(34.564.700,00)	87,60	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	275.135.000,00	240.570.300,00	(34.564.700,00)	87,44	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 46	<i>Diklat Kurikulum</i>	500.000.000,00	495.201.600,00	(4.798.400,00)	99,04	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	487.450.000,00	482.651.600,00	(4.798.400,00)	99,02	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 47	<i>Diklat Bendahara BOS dan BOSDA</i>	526.000.000,00	401.526.403,00	(124.473.597,00)	76,34	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.625.000,00	4.625.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	521.375.000,00	396.901.403,00	(124.473.597,00)	76,13	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 48	<i>Diklat Mahir Dasar Pendidik PAUD</i>	320.035.000,00	301.742.950,00	(18.292.050,00)	94,28	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	315.435.000,00	297.142.950,00	(18.292.050,00)	94,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19	<b>Program Peningkatan Pengawasan Aparatur Negara</b>	1.535.874.000,00	1.485.851.150,00	(50.022.850,00)	96,74	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01	<i>Review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)</i>	42.573.100,00	42.546.100,00	(27.000,00)	99,94	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.873.100,00	38.846.100,00	(27.000,00)	99,93	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02	<i>Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD</i>	109.399.900,00	102.720.251,00	(6.679.649,00)	93,89	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.959.900,00	98.280.251,00	(6.679.649,00)	93,64	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 03	<i>Review Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD</i>	47.200.000,00	46.476.265,00	(723.735,00)	98,47	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.200.000,00	46.476.265,00	(723.735,00)	98,47	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 04	<i>Review Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas</i>	73.433.881,00	73.338.881,00	(95.000,00)	99,87	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.620.000,00	9.620.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.813.881,00	63.718.881,00	(95.000,00)	99,85	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07	<i>Kegiatan Saber Pungli</i>	539.271.000,00	505.965.347,00	(33.305.653,00)	93,82	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	310.000.000,00	280.315.000,00	(29.685.000,00)	90,42	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	229.271.000,00	225.650.347,00	(3.620.653,00)	98,42	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 08	<i>Opname Kas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas</i>	47.833.000,00	47.833.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.833.000,00	47.833.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 09	<i>Monev Laporan Gratifikasi</i>	45.870.000,00	39.553.481,00	(6.316.519,00)	86,23	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.870.000,00	39.553.481,00	(6.316.519,00)	86,23	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 10	<i>Kegiatan Pemeriksaan Reguler Perangkat Daerah</i>	193.243.119,00	192.779.800,00	(463.319,00)	99,76	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	193.243.119,00	192.779.800,00	(463.319,00)	99,76	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 11	<i>Periksaan Desa</i>	277.000.000,00	276.944.000,00	(56.000,00)	99,98	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	277.000.000,00	276.944.000,00	(56.000,00)	99,98	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 13	<i>Review Penyerapan Anggaran PBJ dan Dana Desa</i>	59.840.000,00	58.448.889,00	(1.391.111,00)	97,68	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.840.000,00	58.448.889,00	(1.391.111,00)	97,68	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 14	<i>Koordinasi, dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH)</i>	100.210.000,00	99.245.136,00	(964.864,00)	99,04	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.210.000,00	99.245.136,00	(964.864,00)	99,04	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19	<b>Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana</b>	467.153.000,00	464.357.444,00	(2.795.556,00)	99,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01	<i>Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</i>	467.153.000,00	464.357.444,00	(2.795.556,00)	99,40	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	439.953.000,00	437.157.444,00	(2.795.556,00)	99,36	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	9.683.733.500,00	9.494.198.644,00	(189.534.856,00)	98,04	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 11	<i>Penilaian Angka Kredit Guru</i>	243.327.500,00	218.599.600,00	(24.727.900,00)	89,84	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.700.000,00	65.700.000,00	(9.000.000,00)	87,95	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	168.627.500,00	152.899.600,00	(15.727.900,00)	90,67	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 12	<i>Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)</i>	5.900.000.000,00	5.817.972.500,00	(82.027.500,00)	98,61	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	720.632.000,00	715.857.000,00	(4.775.000,00)	99,34	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.179.368.000,00	5.102.115.500,00	(77.252.500,00)	98,51	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 19	<i>Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)</i>	169.199.500,00	159.538.900,00	(9.660.600,00)	94,29	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.050.000,00	4.750.000,00	(300.000,00)	94,06	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	164.149.500,00	154.788.900,00	(9.360.600,00)	94,30	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 20	<i>Pelaksanaan Olimpiade Sains Siswa Nasional (OSN)</i>	137.275.000,00	129.558.000,00	(7.717.000,00)	94,38	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.950.000,00	3.900.000,00	(1.050.000,00)	78,79	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.325.000,00	125.658.000,00	(6.667.000,00)	94,96	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 24	<i>Pelaksanaan Akreditasi Sekolah</i>	200.000.000,00	193.922.831,00	(6.077.169,00)	96,96	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.525.000,00	188.447.831,00	(6.077.169,00)	96,88	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 25	<i>Penyediaan Beasiswa Mahasiswa</i>	2.445.771.500,00	2.428.177.313,00	(17.594.187,00)	99,28	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.500.000,00	4.200.000,00	(15.300.000,00)	21,54	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.426.271.500,00	2.423.977.313,00	(2.294.187,00)	99,91	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 28	<i>Penyelenggaraan Beasiswa Dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan</i>	588.160.000,00	546.429.500,00	(41.730.500,00)	92,90	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	573.160.000,00	531.429.500,00	(41.730.500,00)	92,72	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	300.000.000,00	273.809.092,00	(26.190.908,00)	91,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 08	<i>Peningkatan Imunisasi</i>	50.000.000,00	42.465.092,00	(7.534.908,00)	84,93	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.800.000,00	29.265.092,00	(7.534.908,00)	79,52	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 09	<i>Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah</i>	50.000.000,00	46.689.000,00	(3.311.000,00)	93,38	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	46.689.000,00	(3.311.000,00)	93,38	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 13	<i>Pelayanan Vaksinasi Anak Sekolah dan Jemaah Haji</i>	50.000.000,00	49.839.600,00	(160.400,00)	99,68	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000,00	18.939.600,00	(160.400,00)	99,16	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 14	<i>Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS</i>	50.000.000,00	38.164.000,00	(11.836.000,00)	76,33	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.200.000,00	21.364.000,00	(11.836.000,00)	64,35	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 16	<i>Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular TB</i>	50.000.000,00	47.966.000,00	(2.034.000,00)	95,93	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	47.966.000,00	(2.034.000,00)	95,93	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 18	<i>Pencegahan Penularan Penyakit Endemik Malaria</i>	50.000.000,00	48.685.400,00	(1.314.600,00)	97,37	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	22.185.400,00	(1.314.600,00)	94,41	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20	<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>	907.650.000,00	904.689.850,00	(2.960.150,00)	99,67	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07	<i>Pemetaan Pencegahan Dini dan Pengurangan Resiko Bencana</i>	907.650.000,00	904.689.850,00	(2.960.150,00)	99,67	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.950.000,00	34.950.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.400.000,00	80.100.850,00	(2.299.150,00)	97,21	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	790.300.000,00	789.639.000,00	(661.000,00)	99,92	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20	<b>Program Pengembangan dan Perluasan Jaringan Teknologi Komunikasi dan Informasi</b>	1.772.200.000,00	1.683.423.712,00	(88.776.288,00)	94,99	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01	<i>Peningkatan Akses Telekomunikasi</i>	216.400.000,00	168.743.342,00	(47.656.658,00)	77,98	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	214.300.000,00	166.643.342,00	(47.656.658,00)	77,76	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03	<i>Kegiatan Pengembangan Jaringan Internet Perkantoran Pemerintah Daerah</i>	1.555.800.000,00	1.514.680.370,00	(41.119.630,00)	97,36	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.475.000,00	13.125.000,00	(4.350.000,00)	75,11	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	374.340.000,00	353.617.132,00	(20.722.868,00)	94,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.163.985.000,00	1.147.938.238,00	(16.046.762,00)	98,62	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>	13.762.440.264,00	12.141.664.393,00	(1.620.775.871,00)	88,22	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02	<i>Pendampingan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah</i>	1.214.475.000,00	1.123.064.799,00	(91.410.201,00)	92,47	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.209.975.000,00	1.123.064.799,00	(86.910.201,00)	92,82	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06	<i>Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum</i>	5.174.139.000,00	3.744.224.334,00	(1.429.914.666,00)	72,36	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	170.725.000,00	161.150.000,00	(9.575.000,00)	94,39	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.578.414.000,00	1.423.763.620,00	(154.650.380,00)	90,20	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.425.000.000,00	2.159.310.714,00	(1.265.689.286,00)	63,05	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 10	<i>Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)</i>	2.014.358.000,00	2.013.511.000,00	(847.000,00)	99,96	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.009.358.000,00	2.008.511.000,00	(847.000,00)	99,96	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 11	<i>Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK)</i>	5.359.468.264,00	5.260.864.260,00	(98.604.004,00)	98,16	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.733.999.998,00	1.733.999.994,00	(4,00)	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.615.468.266,00	3.516.864.266,00	(98.604.000,00)	97,27	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	3.399.435.000,00	3.212.055.134,00	(187.379.866,00)	94,49	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02	<i>Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)</i>	469.875.000,00	457.276.281,00	(12.598.719,00)	97,32	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	223.875.000,00	213.875.000,00	(10.000.000,00)	95,53	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	246.000.000,00	243.401.281,00	(2.598.719,00)	98,94	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06	<i>Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Serta Pelajar/ Mahasiswa</i>	280.000.000,00	248.602.400,00	(31.397.600,00)	88,79	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000,00	248.602.400,00	(31.397.600,00)	88,79	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07	<i>Peliputan dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas</i>	596.660.000,00	565.536.647,00	(31.123.353,00)	94,78	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	98.400.000,00	78.000.000,00	(20.400.000,00)	79,27	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	452.631.800,00	441.908.447,00	(10.723.353,00)	97,63	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	45.628.200,00	45.628.200,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 08	<i>Jasa Protokol dan Sarana Penunjang Layanan Keprotokolan KDH/WKDH</i>	602.900.000,00	577.682.982,00	(25.217.018,00)	95,82	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	231.300.000,00	212.600.000,00	(18.700.000,00)	91,92	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	371.600.000,00	365.082.982,00	(6.517.018,00)	98,25	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 09	<i>Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah</i>	1.450.000.000,00	1.362.956.824,00	(87.043.176,00)	94,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000.000,00	1.362.956.824,00	(87.043.176,00)	94,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21	<b>Program Adiwiyata</b>	154.000.000,00	141.411.900,00	(12.588.100,00)	91,83	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 03	<i>Pembinaan Adiwiyata</i>	154.000.000,00	141.411.900,00	(12.588.100,00)	91,83	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	137.800.000,00	125.211.900,00	(12.588.100,00)	90,86	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan</b>	129.850.000,00	123.382.800,00	(6.467.200,00)	95,02	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01	<i>Pelayanan Penerbitan Izin dan Pencatatan Usaha Perikanan</i>	129.850.000,00	123.382.800,00	(6.467.200,00)	95,02	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.900.000,00	111.432.800,00	(6.467.200,00)	94,51	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	432.365.000,00	392.058.103,00	(40.306.897,00)	90,68	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02	<i>Diseminasi Informasi</i>	200.965.000,00	185.885.103,00	(15.079.897,00)	92,50	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	525.000,00	525.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.440.000,00	180.520.103,00	(14.919.897,00)	92,37	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000,00	4.840.000,00	(160.000,00)	96,80	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 16	<i>Pemeliharaan Local Area Network (LAN) SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas</i>	231.400.000,00	206.173.000,00	(25.227.000,00)	89,10	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	70.050.000,00	70.050.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.350.000,00	136.123.000,00	(25.227.000,00)	84,37	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21	<b>Program Pengendalian Banjir</b>	1.823.456.000,00	1.375.564.000,00	(447.892.000,00)	75,44	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 12	<i>Pembangunan Pemecah Ombak</i>	1.823.456.000,00	1.375.564.000,00	(447.892.000,00)	75,44	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.075.000,00	4.200.000,00	(6.875.000,00)	37,92	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.336.000,00	76.675.000,00	(1.661.000,00)	97,88	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.734.045.000,00	1.294.689.000,00	(439.356.000,00)	74,66	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	428.372.600,00	428.099.600,00	(273.000,00)	99,94	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08	<i>Pemantauan dan Pengamatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	428.372.600,00	428.099.600,00	(273.000,00)	99,94	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.400.000,00	100.300.000,00	(100.000,00)	99,90	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	327.972.600,00	327.799.600,00	(173.000,00)	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	972.982.000,00	827.225.642,00	(145.756.358,00)	85,02	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08	<i>Persiapan Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)</i>	328.182.000,00	307.327.142,00	(20.854.858,00)	93,65	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	252.582.000,00	231.727.142,00	(20.854.858,00)	91,74	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 13	<i>Persiapan Akreditasi Rumah Sakit (DAK Non Fisik)</i>	644.800.000,00	519.898.500,00	(124.901.500,00)	80,63	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	644.800.000,00	519.898.500,00	(124.901.500,00)	80,63	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22	<b>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya</b>	68.193.680.132,00	49.091.926.084,00	(19.101.754.048,00)	71,99	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01	<i>Pembangunan Puskesmas</i>	49.348.355.453,00	34.988.405.682,00	(14.359.949.771,00)	70,90	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	106.150.000,00	8.000.000,00	(98.150.000,00)	7,54	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	296.160.000,00	291.597.000,00	(4.563.000,00)	98,46	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	48.946.045.453,00	34.688.808.682,00	(14.257.236.771,00)	70,87	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 02	<i>Pembangunan Puskesmas Pembantu</i>	211.049.000,00	210.249.000,00	(800.000,00)	99,62	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.875.000,00	2.500.000,00	(375.000,00)	86,96	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.810.000,00	21.540.000,00	(270.000,00)	98,76	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	186.364.000,00	186.209.000,00	(155.000,00)	99,92	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 06	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)</i>	11.630.212.991,00	9.008.469.050,00	(2.621.743.941,00)	77,46	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	65.000.000,00	29.650.000,00	(35.350.000,00)	45,62	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	172.522.491,00	143.899.550,00	(28.622.941,00)	83,41	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.392.690.500,00	8.834.919.500,00	(2.557.771.000,00)	77,55	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 07	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas</i>	1.724.823.834,00	1.618.757.186,00	(106.066.648,00)	93,85	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.525.000,00	650.000,00	(1.875.000,00)	25,74	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	20.275.000,00	(1.725.000,00)	92,16	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.700.298.834,00	1.597.832.186,00	(102.466.648,00)	93,97	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 26	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi</i>	499.873.236,00	498.470.036,00	(1.403.200,00)	99,72	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.596.800,00	(1.403.200,00)	97,19	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	443.873.236,00	443.873.236,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 27	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)</i>	4.779.365.618,00	2.767.575.130,00	(2.011.790.488,00)	57,91	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.050.000,00	5.050.000,00	(10.000.000,00)	33,55	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.730.000,00	153.242.140,00	(32.487.860,00)	82,51	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.578.585.618,00	2.609.282.990,00	(1.969.302.628,00)	56,99	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22	<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>	275.900.000,00	261.969.200,00	(13.930.800,00)	94,95	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 11	<i>Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	275.900.000,00	261.969.200,00	(13.930.800,00)	94,95	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	193.900.000,00	180.500.000,00	(13.400.000,00)	93,09	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.000.000,00	81.469.200,00	(530.800,00)	99,35	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 .	<b>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</b>	19.981.715.035,00	19.513.109.969,00	(468.605.066,00)	97,65	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 18	<i>Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit</i>	5.479.249.135,00	5.441.401.813,00	(37.847.322,00)	99,31	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.250.000,00	2.800.000,00	(11.450.000,00)	19,65	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.065.000,00	76.789.463,00	(23.275.537,00)	76,74	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.364.934.135,00	5.361.812.350,00	(3.121.785,00)	99,94	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 27	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK)</i>	10.998.337.113,00	10.841.748.765,00	(156.588.348,00)	98,58	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.725.000,00	11.250.000,00	(13.475.000,00)	45,50	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	344.741.000,00	215.504.114,00	(129.236.886,00)	62,51	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.628.871.113,00	10.614.994.651,00	(13.876.462,00)	99,87	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 31	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit</i>	3.504.128.787,00	3.229.959.391,00	(274.169.396,00)	92,18	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.625.000,00	5.550.000,00	(2.075.000,00)	72,79	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	274.400.000,00	41.066.555,00	(233.333.445,00)	14,97	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.222.103.787,00	3.183.342.836,00	(38.760.951,00)	98,80	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	7.113.653.000,00	5.181.083.141,00	(1.932.569.859,00)	72,83	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 12	<i>Pembebasan Lahan</i>	4.405.050.000,00	3.223.772.705,00	(1.181.277.295,00)	73,18	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.500.000,00	64.075.000,00	(5.425.000,00)	92,19	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.550.000,00	698.710.705,00	(501.839.295,00)	58,20	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.135.000.000,00	2.460.987.000,00	(674.013.000,00)	78,50	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 13	<i>Pembangunan Ruang Terbuka Hijau</i>	200.300.000,00	128.578.560,00	(71.721.440,00)	64,19	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	800.000,00	650.000,00	(150.000,00)	81,25	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.500.000,00	127.928.560,00	(71.571.440,00)	64,12	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 14	<i>Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)</i>	573.103.000,00	464.747.798,00	(108.355.202,00)	81,09	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	331.500.000,00	254.200.000,00	(77.300.000,00)	76,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	241.603.000,00	210.547.798,00	(31.055.202,00)	87,15	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 15	<i>Revisi Perda RTRW</i>	1.935.200.000,00	1.363.984.078,00	(571.215.922,00)	70,48	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	682.800.000,00	524.550.000,00	(158.250.000,00)	76,82	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.252.400.000,00	839.434.078,00	(412.965.922,00)	67,03	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 27	<b>Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan</b>	60.000.000,00	59.044.187,00	(955.813,00)	98,41	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 27 . 01	<i>Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri</i>	60.000.000,00	59.044.187,00	(955.813,00)	98,41	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.370.000,00	6.370.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.630.000,00	52.674.187,00	(955.813,00)	98,22	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 28	<b>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b>	495.677.500,00	438.794.036,00	(56.883.464,00)	88,52	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 04	<i>Audit Maternal Perinatal</i>	89.677.500,00	87.944.736,00	(1.732.764,00)	98,07	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.417.500,00	1.417.500,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.260.000,00	86.527.236,00	(1.732.764,00)	98,04	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 12	<i>Penyediaan Rumah Tunggu Ibu Hamil (DAK Non Fisik)</i>	406.000.000,00	350.849.300,00	(55.150.700,00)	86,42	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	406.000.000,00	350.849.300,00	(55.150.700,00)	86,42	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 242	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>	1.228.152.000,00	1.147.187.500,00	(80.964.500,00)	93,41	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 242 . 01	<i>Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan</i>	412.926.000,00	368.049.000,00	(44.877.000,00)	89,13	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 242 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	223.650.000,00	222.350.000,00	(1.300.000,00)	99,42	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 242 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.929.000,00	74.441.000,00	(3.488.000,00)	95,52	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 242 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	111.347.000,00	71.258.000,00	(40.089.000,00)	64,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 242 . 02	<i>Pelayanan Kesehatan Masyarakat</i>	237.729.500,00	218.503.500,00	(19.226.000,00)	91,91	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 242 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.150.000,00	44.750.000,00	(2.400.000,00)	94,91	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 242 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.571.500,00	102.808.500,00	(16.763.000,00)	85,98	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 242 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	71.008.000,00	70.945.000,00	(63.000,00)	99,91	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 242 . 03	<i>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</i>	510.400.000,00	493.538.500,00	(16.861.500,00)	96,70	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 242 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	468.000.000,00	468.000.000,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 242 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.817.000,00	17.020.600,00	(16.796.400,00)	50,33	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 242 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.583.000,00	8.517.900,00	(65.100,00)	99,24	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 242 . 04	<i>Pelatihan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</i>	36.591.500,00	36.591.500,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 242 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.557.500,00	1.557.500,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 242 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.034.000,00	35.034.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 242 . 05	<i>Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan</i>	30.505.000,00	30.505.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 242 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.557.500,00	1.557.500,00	0,00	100,00	Permendagri Nomor 27 Tahun 2013
0.00 . 0.00.00 . 00 . 242 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.947.500,00	28.947.500,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 243	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	1.079.848.000,00	1.071.602.000,00	(8.246.000,00)	99,24	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 243 . 01	<i>Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi (Swakelola)</i>	471.305.000,00	463.077.000,00	(8.228.000,00)	98,25	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 243 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 243 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.155.000,00	0,00	(3.155.000,00)	0,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 243 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	458.400.000,00	453.327.000,00	(5.073.000,00)	98,89	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 243 . 02	<i>Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman, Kelurahan</i>	207.050.000,00	207.050.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 243 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 243 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 243 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 243 . 03	<i>Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan</i>	401.493.000,00	401.475.000,00	(18.000,00)	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 243 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 243 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.635.000,00	2.635.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 243 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	393.708.000,00	393.690.000,00	(18.000,00)	100,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(57.221.052.240,42)	6.494.259.209,98	63.715.311.450,40	(11,35)	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	57.721.052.240,42	57.989.127.236,42	268.074.996,00	100,46	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	57.221.052.240,42	57.221.052.240,42	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	500.000.000,00	768.074.996,00	268.074.996,00	153,61	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 6 . 2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	57.221.052.240,42	57.489.127.236,42	268.074.996,00	100,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7



Tarapaya, 28 Agustus 2020

**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,**

**ABDUL HAKIS, S.H.**

# LAMPIRAN I.3



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**  
**REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,**  
**ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN**  
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	65.780.039.499,98	134.008.001.109,98	363.996.288.705,53	563.784.329.315,49	(84.302.605.594,90)	85,05
1.01	Pendidikan	60.958.543.057,00	121.949.357.939,83	296.573.822.723,76	479.481.723.720,59		
		35.087.288.500,00	32.657.924.950,78	53.826.702.375,84	121.571.915.826,62	(8.043.186.595,03)	93,38
		34.000.708.472,00	31.496.729.016,83	48.031.291.742,76	113.528.729.231,59		
1.01 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA	35.087.288.500,00	32.657.924.950,78	53.826.702.375,84	121.571.915.826,62	(8.043.186.595,03)	93,38
		34.000.708.472,00	31.496.729.016,83	48.031.291.742,76	113.528.729.231,59		
1.01 . 1.01.01 . 01	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA	35.087.288.500,00	32.657.924.950,78	53.826.702.375,84	121.571.915.826,62	(8.043.186.595,03)	93,38
		34.000.708.472,00	31.496.729.016,83	48.031.291.742,76	113.528.729.231,59		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	33.663.750.000,00	5.814.397.432,00	1.949.434.800,00	41.427.582.232,00	(1.236.132.841,00)	97,02
		32.723.370.972,00	5.531.289.490,00	1.936.788.929,00	40.191.449.391,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	739.350.000,00	0,00	0,00	739.350.000,00	(55.500.000,00)	92,49
		683.850.000,00	0,00	0,00	683.850.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	32.901.900.000,00	0,00	0,00	32.901.900.000,00	(884.879.028,00)	97,31
		32.017.020.972,00	0,00	0,00	32.017.020.972,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	22.500.000,00	5.814.397.432,00	1.949.434.800,00	7.786.332.232,00	(295.753.813,00)	96,20
		22.500.000,00	5.531.289.490,00	1.936.788.929,00	7.490.578.419,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10.550.000,00	285.080.836,00	2.762.800.000,00	3.058.430.836,00	(225.498.898,00)	92,63
		10.550.000,00	282.416.000,00	2.539.965.938,00	2.832.931.938,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03	Pembangunan Gedung Kaptor	10.550.000,00	285.080.836,00	2.762.800.000,00	3.058.430.836,00	(225.498.898,00)	92,63
		10.550.000,00	282.416.000,00	2.539.965.938,00	2.832.931.938,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	46.575.000,00	2.216.795.000,00	2.033.748.080,00	4.297.118.080,00	(538.405.182,00)	87,47
		39.375.000,00	1.823.116.495,00	1.896.221.403,00	3.758.712.898,00		



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 20	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	8.300.000,00	726.150.000,00	434.400.000,00	1.168.850.000,00	(132.591.936,00)	88,66
		8.300.000,00	610.778.064,00	417.180.000,00	1.036.258.064,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.750.000,00	131.000.000,00	351.800.000,00	487.550.000,00	(4.515.000,00)	99,07
		4.750.000,00	130.102.000,00	348.183.000,00	483.035.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 59	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)	0,00	267.600.000,00	0,00	267.600.000,00	0,00	100,00
		0,00	267.600.000,00	0,00	267.600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 68	Pembangunan dan Pemasangan Batu Miring, Paving Blok dan Pagar Sekolah	8.900.000,00	682.850.000,00	639.800.000,00	1.331.550.000,00	(178.060.500,00)	86,63
		8.900.000,00	616.973.000,00	527.616.500,00	1.153.489.500,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 69	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.150.000,00	9.670.000,00	607.748.080,00	621.568.080,00	(4.506.177,00)	99,28
		4.150.000,00	9.670.000,00	603.241.903,00	617.061.903,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 70	Pelaksanaan Apresiasi PTK PAUD-DIKMAS	20.475.000,00	399.525.000,00	0,00	420.000.000,00	(218.731.569,00)	47,92
		13.275.000,00	187.993.431,00	0,00	201.268.431,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	341.225.000,00	11.444.269.682,78	47.080.719.495,84	58.866.214.178,62	(5.258.960.825,03)	91,07
		254.100.000,00	11.694.837.880,83	41.658.315.472,76	53.607.253.353,59		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 20	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	43.350.000,00	4.790.776.200,00	2.298.438.645,00	7.132.564.845,00	(16.426.122,00)	99,77
		43.350.000,00	4.780.726.050,00	2.292.062.673,00	7.116.138.723,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	56.325.000,00	142.731.594,00	6.350.886.925,64	6.549.943.519,64	(206.652.037,64)	96,84
		43.000.000,00	116.970.700,00	6.183.320.782,00	6.343.291.482,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 80	Pembangunan Batu Miring, Pagar, Parit, Semenisasi dan Pavingblok Sekolah	91.825.000,00	742.877.000,00	12.539.736.955,00	13.374.438.955,00	(555.428.255,00)	95,85
		90.950.000,00	646.830.100,00	12.081.230.600,00	12.819.010.700,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 85	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (DAK)	15.000.000,00	41.000.000,00	1.791.015.146,00	1.847.015.146,00	(30.425.000,00)	98,35
		5.000.000,00	40.995.000,00	1.770.595.146,00	1.816.590.146,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 89	Pembangunan Jamban Siswa (DAK)	15.000.000,00	36.000.000,00	1.379.865.416,00	1.430.865.416,00	(12.645.600,00)	99,12
		5.000.000,00	33.775.000,00	1.379.444.816,00	1.418.219.816,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 90	Pengadaan Peralatan Media Pendidikan (DAK)	0,00	88.500.000,00	589.164.912,00	677.664.912,00	(50.478.672,00)	92,55
		0,00	49.515.000,00	577.671.240,00	627.186.240,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 92	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD dan SMP	0,00	4.677.252.048,78	6.946.485.512,20	11.623.737.560,98	(3.719.814.293,39)	68,00
		0,00	5.210.011.380,83	2.693.911.886,76	7.903.923.267,59		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 94	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA (DAK)	12.000.000,00	36.990.000,00	1.919.692.500,00	1.968.682.500,00	(12.045.000,00)	99,39
		0,00	36.945.000,00	1.919.692.500,00	1.956.637.500,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 106	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Berikut Sanitasi dan Perabotannya SD dan SMP	22.750.000,00	141.554.000,00	2.845.393.000,00	3.009.697.000,00	(80.055.778,00)	97,34
		13.950.000,00	120.853.000,00	2.794.838.222,00	2.929.641.222,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 108	Pembangunan Majelis Guru Berikut Sanitasi dan Perabotnya SD dan SMP	3.950.000,00	32.372.000,00	786.426.318,00	822.748.318,00	(13.257.276,00)	98,39
		3.450.000,00	30.542.750,00	775.498.292,00	809.491.042,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 109	Pembangunan Jamban Siswa/Atau Guru Berikut Sanitasinya SD dan SMP	7.150.000,00	35.473.000,00	882.667.000,00	925.290.000,00	(1.444.000,00)	99,84
		7.150.000,00	35.323.500,00	881.372.500,00	923.846.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 110	Pembangunan Rumah Dinas Guru Guru SD dan SMP	19.200.000,00	129.758.678,00	2.638.535.322,00	2.787.494.000,00	(240.501.745,00)	91,37
		11.425.000,00	104.178.900,00	2.431.388.355,00	2.546.992.255,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 120	Pengadaan Peralatan Komputer	13.425.000,00	112.438.000,00	2.134.282.000,00	2.260.145.000,00	(30.642.622,00)	98,64
		12.075.000,00	107.030.500,00	2.110.396.878,00	2.229.502.378,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 121	Pendataan dan Sertifikasi Melek Al-Quran Siswa Muslim Dikdas	6.750.000,00	93.250.000,00	0,00	100.000.000,00	(447.000,00)	99,55
		6.750.000,00	92.803.000,00	0,00	99.553.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 124	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	(24.653.000,00)	83,56
		0,00	125.347.000,00	0,00	125.347.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 201	Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya (DAK)	30.000.000,00	193.297.162,00	3.610.669.544,00	3.833.966.706,00	(259.450.624,00)	93,23
		12.000.000,00	162.991.000,00	3.399.525.082,00	3.574.516.082,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 202	Pembangunan Ruang Inklusi (DAK)	4.500.000,00	0,00	367.460.300,00	371.960.300,00	(4.593.800,00)	98,76
		0,00	0,00	367.366.500,00	367.366.500,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Program Pendidikan Non Formal	79.722.500,00	220.127.500,00	0,00	299.850.000,00	(47.743.420,00)	84,08
		68.772.500,00	183.334.080,00	0,00	252.106.580,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 15	Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket (UNPK) Pendidikan Non Formal	4.672.500,00	45.327.500,00	0,00	50.000.000,00	(3.840.100,00)	92,32
		4.672.500,00	41.487.400,00	0,00	46.159.900,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 17	Pembinaan Penyelenggaraan Kesetaraan Paket	66.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100.000.000,00	(12.954.550,00)	87,05
		55.200.000,00	31.845.450,00	0,00	87.045.450,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 18	Pendataan Keaksaraan Fungsional	6.700.000,00	43.300.000,00	0,00	50.000.000,00	(10.266.300,00)	79,47
		6.700.000,00	33.033.700,00	0,00	39.733.700,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 20	Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	2.350.000,00	97.500.000,00	0,00	99.850.000,00	(20.682.470,00)	79,29
		2.200.000,00	76.967.530,00	0,00	79.167.530,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	100.159.000,00	3.838.828.000,00	0,00	3.938.987.000,00	(546.910.573,00)	86,12
		89.658.000,00	3.302.418.427,00	0,00	3.392.076.427,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 01	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	7.476.000,00	883.002.000,00	0,00	890.478.000,00	(111.403.371,00)	87,49
		1.575.000,00	777.499.629,00	0,00	779.074.629,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 23	Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional	21.700.000,00	178.300.000,00	0,00	200.000.000,00	(9.129.400,00)	95,44
		17.100.000,00	173.770.600,00	0,00	190.870.600,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 31	Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah	2.525.000,00	147.475.000,00	0,00	150.000.000,00	(48.616.416,00)	67,59
		2.525.000,00	98.858.584,00	0,00	101.383.584,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 32	Pelatihan Penyusunan soal US dan USBN	26.950.000,00	398.864.000,00	0,00	425.814.000,00	(19.462.010,00)	95,43
		26.950.000,00	379.401.990,00	0,00	406.351.990,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 35	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	6.558.000,00	193.442.000,00	0,00	200.000.000,00	(83.643.550,00)	58,18
		6.558.000,00	109.798.450,00	0,00	116.356.450,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 38	Diklat Guru Bidang Studi	9.650.000,00	438.350.000,00	0,00	448.000.000,00	(92.527.079,00)	79,35
		9.650.000,00	345.822.921,00	0,00	355.472.921,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 45	Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal/Eksternal (SPMI/SPME)	3.525.000,00	275.135.000,00	0,00	278.660.000,00	(34.564.700,00)	87,60
		3.525.000,00	240.570.300,00	0,00	244.095.300,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 46	Diklat Kurikulum	12.550.000,00	487.450.000,00	0,00	500.000.000,00	(4.798.400,00)	99,04
		12.550.000,00	482.651.600,00	0,00	495.201.600,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 47	Diklat Bendahara BOS dan BOSDA	4.625.000,00	521.375.000,00	0,00	526.000.000,00	(124.473.597,00)	76,34
		4.625.000,00	396.901.403,00	0,00	401.526.403,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 48	Diklat Mahir Dasar Pendidik PAUD	4.600.000,00	315.435.000,00	0,00	320.035.000,00	(18.292.050,00)	94,28
		4.600.000,00	297.142.950,00	0,00	301.742.950,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	845.307.000,00	8.838.426.500,00	0,00	9.683.733.500,00	(189.534.856,00)	98,04
		814.882.000,00	8.679.316.644,00	0,00	9.494.198.644,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 11	Penilaian Angka Kredit Guru	74.700.000,00	168.627.500,00	0,00	243.327.500,00	(24.727.900,00)	89,84
		65.700.000,00	152.899.600,00	0,00	218.599.600,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 12	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)	720.632.000,00	5.179.368.000,00	0,00	5.900.000.000,00	(82.027.500,00)	98,61
		715.857.000,00	5.102.115.500,00	0,00	5.817.972.500,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 19	Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	5.050.000,00	164.149.500,00	0,00	169.199.500,00	(9.660.600,00)	94,29
		4.750.000,00	154.788.900,00	0,00	159.538.900,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 20	Pelaksanaan OLimpiade Sains Siswa Nasional (OSN)	4.950.000,00	132.325.000,00	0,00	137.275.000,00	(7.717.000,00)	94,38
		3.900.000,00	125.658.000,00	0,00	129.558.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 24	Pelaksanaan Akreditasi Sekolah	5.475.000,00	194.525.000,00	0,00	200.000.000,00	(6.077.169,00)	96,96
		5.475.000,00	188.447.831,00	0,00	193.922.831,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 25	Penyediaan Beasiswa Mahasiswa	19.500.000,00	2.426.271.500,00	0,00	2.445.771.500,00	(17.594.187,00)	99,28
		4.200.000,00	2.423.977.313,00	0,00	2.428.177.313,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 28	Penyelenggaraan Beasiswa Dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan	15.000.000,00	573.160.000,00	0,00	588.160.000,00	(41.730.500,00)	92,90
		15.000.000,00	531.429.500,00	0,00	546.429.500,00		
1.02	Kesehatan	15.106.947.499,98	52.793.229.538,00	89.052.000.276,00	156.952.177.313,98	(26.040.163.896,98)	83,41
		12.419.205.979,00	48.674.971.551,00	69.817.835.887,00	130.912.013.417,00		
1.02 . 1.02.01	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15.106.947.499,98	52.793.229.538,00	89.052.000.276,00	156.952.177.313,98	(26.040.163.896,98)	83,41
		12.419.205.979,00	48.674.971.551,00	69.817.835.887,00	130.912.013.417,00		
1.02 . 1.02.01 . 01	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN	2.352.382.500,00	28.580.506.838,00	86.965.366.676,00	117.898.256.014,00	(19.868.872.931,00)	83,15
		2.027.463.949,00	27.988.395.102,00	68.013.524.032,00	98.029.383.083,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.717.275.000,00	2.809.779.592,00	401.750.000,00	4.928.804.592,00	(1.123.715.212,00)	77,20
		1.587.981.449,00	1.822.347.050,00	394.760.881,00	3.805.089.380,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	456.900.000,00	0,00	0,00	456.900.000,00	(77.550.000,00)	83,03
		379.350.000,00	0,00	0,00	379.350.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	1.238.550.000,00	0,00	0,00	1.238.550.000,00	(50.603.551,00)	95,91
		1.187.946.449,00	0,00	0,00	1.187.946.449,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	21.825.000,00	1.689.931.092,00	401.750.000,00	2.113.506.092,00	(157.702.899,00)	92,54
		20.685.000,00	1.540.357.312,00	394.760.881,00	1.955.803.193,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 31	Penyediaan Jasa Kalibrasi	0,00	1.119.848.500,00	0,00	1.119.848.500,00	(837.858.762,00)	25,18
		0,00	281.989.738,00	0,00	281.989.738,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	3.400.000,00	11.799.249.665,00	0,00	11.802.649.665,00	(830.539.787,00)	92,96
		1.400.000,00	10.970.709.878,00	0,00	10.972.109.878,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.400.000,00	4.292.140.000,00	0,00	4.293.540.000,00	(164.949.751,00)	96,16
		1.400.000,00	4.127.190.249,00	0,00	4.128.590.249,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 07	Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	2.000.000,00	7.507.109.665,00	0,00	7.509.109.665,00	(665.590.036,00)	91,14
		0,00	6.843.519.629,00	0,00	6.843.519.629,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	163.420.000,00	9.850.585.000,00	0,00	10.014.005.000,00	1.926.832.703,00	119,24
		143.320.000,00	11.797.517.703,00	0,00	11.940.837.703,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 02	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	0,00	8.673.155.000,00	0,00	8.673.155.000,00	2.007.546.310,00	123,15
		0,00	10.680.701.310,00	0,00	10.680.701.310,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 20	Pelayanan Penyakit Tidak Menular	600.000,00	69.250.000,00	0,00	69.850.000,00	(2.579.345,00)	96,31
		0,00	67.270.655,00	0,00	67.270.655,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 29	Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik)	72.820.000,00	300.180.000,00	0,00	373.000.000,00	(22.929.243,00)	93,85
		71.220.000,00	278.850.757,00	0,00	350.070.757,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 46	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) (DAK Non Fisik)	90.000.000,00	708.000.000,00	0,00	798.000.000,00	(53.539.154,00)	93,29
		72.100.000,00	672.360.846,00	0,00	744.460.846,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 49	Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Daerah Sulit dan Terpencil	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	(1.665.865,00)	98,33
		0,00	98.334.135,00	0,00	98.334.135,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	<b>Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	51.500.000,00	682.196.560,00	21.750.000,00	755.446.560,00	(34.316.295,00)	95,46
		50.725.000,00	648.812.265,00	21.593.000,00	721.130.265,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 01	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	2.175.000,00	179.842.560,00	11.250.000,00	193.267.560,00	(744.895,00)	99,61
		1.875.000,00	179.449.665,00	11.198.000,00	192.522.665,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 16	Pelatihan Kader Posyandu	49.325.000,00	326.504.000,00	10.500.000,00	386.329.000,00	(32.577.106,00)	91,57
		48.850.000,00	294.506.894,00	10.395.000,00	353.751.894,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 20	Kampanye Kesehatan dalam Rangka Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	0,00	175.850.000,00	0,00	175.850.000,00	(994.294,00)	99,43
		0,00	174.855.706,00	0,00	174.855.706,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	0,00	53.822.530,00	0,00	53.822.530,00	0,00	100,00
		0,00	53.822.530,00	0,00	53.822.530,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	0,00	53.822.530,00	0,00	53.822.530,00	0,00	100,00
		0,00	53.822.530,00	0,00	53.822.530,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	1.800.000,00	259.573.000,00	78.100.000,00	339.473.000,00	(6.988.683,00)	97,94
		1.800.000,00	254.589.597,00	76.094.720,00	332.484.317,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 07	Pengawasan Depot Air Minum dan Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman	0,00	90.473.000,00	0,00	90.473.000,00	(1.414.370,00)	98,44
		0,00	89.058.630,00	0,00	89.058.630,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 09	Pembinaan Teknis Penyelenggaraan KKS di daerah Binaan	1.800.000,00	169.100.000,00	78.100.000,00	249.000.000,00	(5.574.313,00)	97,76
		1.800.000,00	165.530.967,00	76.094.720,00	243.425.687,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	87.400.000,00	212.600.000,00	0,00	300.000.000,00	(26.190.908,00)	91,27
		87.400.000,00	186.409.092,00	0,00	273.809.092,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 08	Peningkatan Imunisasi	13.200.000,00	36.800.000,00	0,00	50.000.000,00	(7.534.908,00)	84,93
		13.200.000,00	29.265.092,00	0,00	42.465.092,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 09	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	(3.311.000,00)	93,38
		0,00	46.689.000,00	0,00	46.689.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 13	Pelayanan Vaksinasi Anak Sekolah dan Jemaah Haji	30.900.000,00	19.100.000,00	0,00	50.000.000,00	(160.400,00)	99,68
		30.900.000,00	18.939.600,00	0,00	49.839.600,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 14	Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS	16.800.000,00	33.200.000,00	0,00	50.000.000,00	(11.836.000,00)	76,33
		16.800.000,00	21.364.000,00	0,00	38.164.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 16	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular TB	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	(2.034.000,00)	95,93
		0,00	47.966.000,00	0,00	47.966.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 18	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik Malaria	26.500.000,00	23.500.000,00	0,00	50.000.000,00	(1.314.600,00)	97,37
		26.500.000,00	22.185.400,00	0,00	48.685.400,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	75.600.000,00	897.382.000,00	0,00	972.982.000,00	(145.756.358,00)	85,02
		75.600.000,00	751.625.642,00	0,00	827.225.642,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 08	Persiapan Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	75.600.000,00	252.582.000,00	0,00	328.182.000,00	(20.854.858,00)	93,65
		75.600.000,00	231.727.142,00	0,00	307.327.142,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 13	Persiapan Akreditasi Rumah Sakit (DAK Non Fisik)	0,00	644.800.000,00	0,00	644.800.000,00	(124.901.500,00)	80,63
		0,00	519.898.500,00	0,00	519.898.500,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22	<b>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya</b>	197.600.000,00	748.222.491,00	67.247.857.641,00	68.193.680.132,00	(19.101.754.048,00)	71,99
		51.850.000,00	679.150.490,00	48.360.925.594,00	49.091.926.084,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 01	Pembangunan Puskesmas	106.150.000,00	296.160.000,00	48.946.045.453,00	49.348.355.453,00	(14.359.949.771,00)	70,90
		8.000.000,00	291.597.000,00	34.688.808.682,00	34.988.405.682,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 02	Pembangunan Puskesmas Pembantu	2.875.000,00	21.810.000,00	186.364.000,00	211.049.000,00	(800.000,00)	99,62
		2.500.000,00	21.540.000,00	186.209.000,00	210.249.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)	65.000.000,00	172.522.491,00	11.392.690.500,00	11.630.212.991,00	(2.621.743.941,00)	77,46
		29.650.000,00	143.899.550,00	8.834.919.500,00	9.008.469.050,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	2.525.000,00	22.000.000,00	1.700.298.834,00	1.724.823.834,00	(106.066.648,00)	93,85
		650.000,00	20.275.000,00	1.597.832.186,00	1.618.757.186,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 26	Peningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi	6.000.000,00	50.000.000,00	443.873.236,00	499.873.236,00	(1.403.200,00)	99,72
		6.000.000,00	48.596.800,00	443.873.236,00	498.470.036,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)	15.050.000,00	185.730.000,00	4.578.585.618,00	4.779.365.618,00	(2.011.790.488,00)	57,91
		5.050.000,00	153.242.140,00	2.609.282.990,00	2.767.575.130,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23	<i>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</i>	46.600.000,00	719.206.000,00	19.215.909.035,00	19.981.715.035,00	(468.605.066,00)	97,65
		19.600.000,00	333.360.132,00	19.160.149.837,00	19.513.109.969,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 18	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	14.250.000,00	100.065.000,00	5.364.934.135,00	5.479.249.135,00	(37.847.322,00)	99,31
		2.800.000,00	76.789.463,00	5.361.812.350,00	5.441.401.813,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK)	24.725.000,00	344.741.000,00	10.628.871.113,00	10.998.337.113,00	(156.588.348,00)	98,58
		11.250.000,00	215.504.114,00	10.614.994.651,00	10.841.748.765,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 31	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	7.625.000,00	274.400.000,00	3.222.103.787,00	3.504.128.787,00	(274.169.396,00)	92,18
		5.550.000,00	41.066.555,00	3.183.342.836,00	3.229.959.391,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 27	<i>Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan</i>	6.370.000,00	53.630.000,00	0,00	60.000.000,00	(955.813,00)	98,41
		6.370.000,00	52.674.187,00	0,00	59.044.187,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 27 . 01	Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri	6.370.000,00	53.630.000,00	0,00	60.000.000,00	(955.813,00)	98,41
		6.370.000,00	52.674.187,00	0,00	59.044.187,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28	<i>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</i>	1.417.500,00	494.260.000,00	0,00	495.677.500,00	(56.883.464,00)	88,52
		1.417.500,00	437.376.536,00	0,00	438.794.036,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 04	Audit Maternal Perinatal	1.417.500,00	88.260.000,00	0,00	89.677.500,00	(1.732.764,00)	98,07
		1.417.500,00	86.527.236,00	0,00	87.944.736,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 12	Penyediaan Rumah Tunggu Ibu Hamil (DAK Non Fisik)	0,00	406.000.000,00	0,00	406.000.000,00	(55.150.700,00)	86,42
		0,00	350.849.300,00	0,00	350.849.300,00		
1.02 . 1.02.01 . 02	<b>PUSKESMAS</b>	12.754.564.999,98	24.212.722.700,00	2.086.633.600,00	39.053.921.299,98	(6.171.290.965,98)	84,20
		10.391.742.030,00	20.686.576.449,00	1.804.311.855,00	32.882.630.334,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	12.411.914.999,98	12.951.678.293,00	1.641.400.100,00	27.004.993.392,98	(4.300.763.147,98)	84,07
		10.155.042.030,00	11.078.086.428,00	1.471.101.787,00	22.704.230.245,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	473.399.999,98	0,00	0,00	473.399.999,98	(9.599.999,98)	97,97
		463.800.000,00	0,00	0,00	463.800.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	11.907.090.000,00	0,00	0,00	11.907.090.000,00	(2.241.197.970,00)	81,18
		9.665.892.030,00	0,00	0,00	9.665.892.030,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	0,00	5.682.400.000,00	0,00	5.682.400.000,00	(892.998.800,00)	84,28
		0,00	4.789.401.200,00	0,00	4.789.401.200,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 22	Penyediaan Rutinitas Perkantoran Puskesmas Tarempa	9.450.000,00	485.844.000,00	178.027.000,00	673.321.000,00	(146.718.881,00)	78,21
		7.200.000,00	353.768.719,00	165.633.400,00	526.602.119,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 23	Penyediaan Rutinitas Perkantoran Puskesmas Letung	1.550.000,00	268.850.000,00	0,00	270.400.000,00	(16.080.300,00)	94,05
		0,00	254.319.700,00	0,00	254.319.700,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 24	Penyediaan Rutinitas Perkantoran Puskesmas Palmatak	900.000,00	507.900.000,00	0,00	508.800.000,00	(2.617.750,00)	99,49
		900.000,00	505.282.250,00	0,00	506.182.250,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 25	Penyediaan Rutinitas Perkantoran Puskesmas Slantan Tengah	750.000,00	277.525.495,00	15.192.000,00	293.467.495,00	(4.947.000,00)	98,31
		600.000,00	272.729.495,00	15.191.000,00	288.520.495,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 26	Penyediaan Rutinitas Perkantoran Puskesmas Slantan Timur	2.250.000,00	350.002.700,00	20.432.300,00	372.685.000,00	(45.351.420,00)	87,83
		2.250.000,00	304.651.280,00	20.432.300,00	327.333.580,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 27	Penyediaan Rutinitas Perkantoran Puskesmas Slantan Selatan	1.500.000,00	224.170.000,00	19.250.000,00	244.920.000,00	(12.915.146,00)	94,73
		1.200.000,00	216.055.654,00	14.749.200,00	232.004.854,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 28	Penyediaan Rutinitas Perkantoran Puskesmas Jemaja Timur	0,00	312.375.000,00	186.385.000,00	498.760.000,00	(60.435.577,00)	87,88
		0,00	258.944.453,00	179.379.970,00	438.324.423,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 30	Penyediaan Rutinitas Perkantoran Instalasi Farmasi	0,00	208.700.000,00	0,00	208.700.000,00	(6.944.587,00)	96,67
		0,00	201.755.413,00	0,00	201.755.413,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 32	Penyediaan Rutinitas Perkantoran Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak	0,00	1.791.981.000,00	121.000.000,00	1.912.981.000,00	(359.646.264,00)	81,20
		0,00	1.432.471.236,00	120.863.500,00	1.553.334.736,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 33	Penyediaan Rutinitas Perkantoran Rumah Sakit Umum Daerah Jemaja	4.800.000,00	917.370.655,00	208.693.500,00	1.130.864.155,00	(113.929.689,00)	89,93
		4.800.000,00	818.162.349,00	193.972.117,00	1.016.934.466,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 34	Penyediaan Rutinitas Perkantoran Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa	10.225.000,00	1.924.559.443,00	892.420.300,00	2.827.204.743,00	(387.379.764,00)	86,30
		8.400.000,00	1.670.544.679,00	760.880.300,00	2.439.824.979,00		



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.02 . 1.02.01 . 02 . 15	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	7.800.000,00	132.486.000,00	0,00	140.286.000,00	(4.627.447,00)	96,70
		7.800.000,00	127.858.553,00	0,00	135.658.553,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 15 . 08	Manajemen Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Non Fisik)	7.800.000,00	132.486.000,00	0,00	140.286.000,00	(4.627.447,00)	96,70
		7.800.000,00	127.858.553,00	0,00	135.658.553,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 16	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	334.850.000,00	11.128.558.407,00	445.233.500,00	11.908.641.907,00	(1.865.900.371,00)	84,33
		228.900.000,00	9.480.631.468,00	333.210.068,00	10.042.741.536,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 16 . 21	Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi	0,00	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00	(81.000.000,00)	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 16 . 22	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tarempa (DAK Non Fisik)	30.000.000,00	659.668.678,00	0,00	689.668.678,00	(91.187.608,00)	86,78
		25.200.000,00	573.281.070,00	0,00	598.481.070,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 16 . 23	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Letung (DAK Non Fisik)	90.000.000,00	734.351.297,00	0,00	824.351.297,00	(94.792.947,00)	88,50
		57.500.000,00	672.058.350,00	0,00	729.558.350,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 16 . 24	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Palmatak (DAK Non Fisik)	55.000.000,00	787.409.025,00	0,00	842.409.025,00	(360.925,00)	99,96
		55.000.000,00	787.048.100,00	0,00	842.048.100,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 16 . 25	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Siantan Tengah (DAK Non Fisik)	0,00	738.581.250,00	0,00	738.581.250,00	(139.929,00)	99,98
		0,00	738.441.321,00	0,00	738.441.321,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 16 . 26	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Siantan Timur (DAK Non Fisik)	15.000.000,00	739.143.750,00	0,00	754.143.750,00	(25.600.880,00)	96,61
		7.500.000,00	721.042.870,00	0,00	728.542.870,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 16 . 27	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Siantan Selatan (DAK Non Fisik)	25.000.000,00	603.596.000,00	0,00	628.596.000,00	(161.816.870,00)	74,26
		25.000.000,00	441.779.130,00	0,00	466.779.130,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 16 . 28	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Jemaja Timur (DAK Non Fisik)	30.000.000,00	761.250.000,00	0,00	791.250.000,00	(32.233.450,00)	95,93
		30.000.000,00	729.016.550,00	0,00	759.016.550,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 16 . 31	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tarempa	15.900.000,00	773.865.666,00	102.000.000,00	891.765.666,00	(235.798.987,00)	73,56
		1.800.000,00	609.754.711,00	44.411.968,00	655.966.679,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 16 . 32	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Letung	12.900.000,00	363.268.164,00	138.000.000,00	514.168.164,00	(81.737.964,00)	84,10
		1.500.000,00	324.129.800,00	106.800.400,00	432.430.200,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 16 . 33	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Palmatak	23.400.000,00	734.865.700,00	97.854.500,00	856.120.200,00	(39.495.646,00)	95,39
		17.700.000,00	708.805.054,00	90.119.500,00	816.624.554,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.02 . 1.02.01 . 02 . 16 . 34	Penyediaan Blaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Siantan Tengah	6.000.000,00	335.641.440,00	31.110.000,00	372.751.440,00	(123.831.390,00)	66,78
		5.000.000,00	212.904.450,00	31.015.600,00	248.920.050,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 16 . 35	Penyediaan Blaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Siantan Timur	12.150.000,00	297.056.000,00	22.114.000,00	331.320.000,00	(72.952.588,00)	77,98
		600.000,00	246.382.412,00	11.385.000,00	258.367.412,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 16 . 36	Penyediaan Blaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Siantan Selatan	12.000.000,00	214.297.517,00	34.155.000,00	260.452.517,00	(94.175.567,00)	63,84
		600.000,00	135.496.950,00	30.180.000,00	166.276.950,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 16 . 37	Penyediaan Blaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Jemaja Timur	7.500.000,00	200.188.400,00	20.000.000,00	227.688.400,00	(62.289.600,00)	72,64
		1.500.000,00	144.601.200,00	19.297.600,00	165.398.800,00		
1.02 . 1.02.01 . 02 . 16 . 47	Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Klairp INA-CBGs	0,00	3.104.375.520,00	0,00	3.104.375.520,00	(668.486.020,00)	78,47
		0,00	2.435.889.500,00	0,00	2.435.889.500,00		
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.579.315.000,00	33.174.291.330,20	181.259.315.953,69	219.012.922.283,89	(46.016.583.477,89)	78,99
		4.033.169.123,00	28.170.886.089,00	140.792.283.594,00	172.996.338.806,00		
1.03 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.579.315.000,00	33.174.291.330,20	181.259.315.953,69	219.012.922.283,89	(46.016.583.477,89)	78,99
		4.033.169.123,00	28.170.886.089,00	140.792.283.594,00	172.996.338.806,00		
1.03 . 1.03.01 . 01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.579.315.000,00	33.174.291.330,20	181.259.315.953,69	219.012.922.283,89	(46.016.583.477,89)	78,99
		4.033.169.123,00	28.170.886.089,00	140.792.283.594,00	172.996.338.806,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 00	Non Program	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.092.500,00)	0,00
		0,00	3.500,00	(12.096.000,00)	(12.092.500,00)		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.092.500,00)	0,00
		0,00	3.500,00	(12.096.000,00)	(12.092.500,00)		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.027.085.000,00	2.941.333.940,00	4.233.161.141,00	10.201.580.081,00	(1.725.249.442,00)	83,09
		2.802.944.123,00	2.508.549.316,00	3.164.837.200,00	8.476.330.639,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	624.750.000,00	0,00	0,00	624.750.000,00	(88.800.000,00)	85,79
		535.950.000,00	0,00	0,00	535.950.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	2.186.560.000,00	17.640.000,00	0,00	2.204.200.000,00	(65.880.877,00)	97,01
		2.138.319.123,00	0,00	0,00	2.138.319.123,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	8.175.000,00	1.657.093.940,00	3.653.161.141,00	5.318.430.081,00	(1.055.139.103,00)	80,16
		4.775.000,00	1.562.289.778,00	2.696.226.200,00	4.263.290.978,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAUAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 21	Penyediaan Rutinitas Perkantoran UPTD SPAM	207.600.000,00	1.266.600.000,00	580.000.000,00	2.054.200.000,00	(515.429.462,00)	74,91
		123.900.000,00	946.259.538,00	468.611.000,00	1.538.770.538,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	85.560.000,00	17.166.815.000,00	53.308.887.851,49	70.561.262.851,49	(21.371.615.815,49)	69,71
		54.000.000,00	14.160.673.664,00	34.974.973.372,00	49.189.647.036,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 03	Pembangunan Gedung Kantor	82.560.000,00	16.951.163.000,00	8.412.515.851,49	25.446.238.851,49	(5.488.128.934,49)	78,43
		54.000.000,00	13.950.975.417,00	5.953.134.500,00	19.958.109.917,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 46	Pembangunan Gedung Kantor (Multi Years)	3.000.000,00	215.652.000,00	44.896.372.000,00	45.115.024.000,00	(15.883.486.881,00)	64,79
		0,00	209.698.247,00	29.021.838.872,00	29.231.537.119,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15	<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>	84.825.000,00	941.686.150,00	85.127.106.348,02	86.153.617.498,02	(17.873.245.186,02)	79,25
		78.200.000,00	822.973.341,00	67.379.198.971,00	68.280.372.312,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 03	Pembangunan Jalan	36.825.000,00	661.266.150,00	54.120.281.348,02	54.818.372.498,02	(17.636.299.186,02)	67,83
		30.200.000,00	643.724.341,00	36.508.148.971,00	37.182.073.312,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 10	Pembangunan Jalan (DAK)	48.000.000,00	280.420.000,00	31.006.825.000,00	31.335.245.000,00	(236.946.000,00)	99,24
		48.000.000,00	179.249.000,00	30.871.050.000,00	31.098.299.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16	<b>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	6.825.000,00	892.213.390,00	1.052.940.000,00	1.951.978.390,00	(261.282.390,00)	86,61
		4.350.000,00	732.646.000,00	953.700.000,00	1.690.696.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 03	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	6.825.000,00	892.213.390,00	1.052.940.000,00	1.951.978.390,00	(261.282.390,00)	86,61
		4.350.000,00	732.646.000,00	953.700.000,00	1.690.696.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17	<b>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong</b>	46.150.000,00	257.777.852,20	10.269.525.489,00	10.573.453.341,20	(571.812.533,20)	94,59
		43.750.000,00	251.019.322,00	9.706.871.486,00	10.001.640.808,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 03	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (DAK)	24.000.000,00	25.234.750,00	6.728.156.489,00	6.777.391.239,00	(215.753,00)	100,00
		24.000.000,00	25.019.000,00	6.728.156.486,00	6.777.175.486,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 05	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	22.150.000,00	232.543.102,20	3.541.369.000,00	3.796.062.102,20	(571.596.780,20)	84,94
		19.750.000,00	226.000.322,00	2.978.715.000,00	3.224.465.322,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18	<b>Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong</b>	22.950.000,00	54.765.000,00	3.554.467.511,18	3.632.182.511,18	(15.693.011,18)	99,57
		21.650.000,00	54.451.000,00	3.540.388.500,00	3.616.489.500,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	22.950.000,00	54.765.000,00	3.554.467.511,18	3.632.182.511,18	(15.693.011,18)	99,57
		21.650.000,00	54.451.000,00	3.540.388.500,00	3.616.489.500,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19	<b>Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konversi Sungai</b>	20.020.000,00	1.415.564.000,00	11.803.714.347,00	13.239.298.347,00	(184.354.870,00)	98,61
		4.450.000,00	1.397.934.392,00	11.652.559.085,00	13.054.943.477,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 01	Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku	5.250.000,00	168.251.000,00	700.000.000,00	873.501.000,00	(14.503.799,00)	98,34
		4.300.000,00	164.172.201,00	690.525.000,00	858.997.201,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 02	Rehabilitasi Dan Perlindungan Daerah Tangkapan Air	2.400.000,00	1.104.723.000,00	0,00	1.107.123.000,00	(8.191.512,00)	99,26
		150.000,00	1.098.781.488,00	0,00	1.098.931.488,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 03	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	12.370.000,00	142.590.000,00	11.103.714.347,00	11.258.674.347,00	(161.659.559,00)	98,56
		0,00	134.980.703,00	10.962.034.085,00	11.097.014.788,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>	190.225.000,00	6.531.746.998,00	7.040.468.266,00	13.762.440.264,00	(1.620.775.871,00)	88,22
		176.150.000,00	6.289.339.413,00	5.676.174.980,00	12.141.664.393,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 02	Pendampingan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	4.500.000,00	1.209.975.000,00	0,00	1.214.475.000,00	(91.410.201,00)	92,47
		0,00	1.123.064.799,00	0,00	1.123.064.799,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 06	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	170.725.000,00	1.578.414.000,00	3.425.000.000,00	5.174.139.000,00	(1.429.914.666,00)	72,36
		161.150.000,00	1.423.763.620,00	2.159.310.714,00	3.744.224.334,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 10	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)	5.000.000,00	2.009.358.000,00	0,00	2.014.358.000,00	(847.000,00)	99,96
		5.000.000,00	2.008.511.000,00	0,00	2.013.511.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 11	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK)	10.000.000,00	1.733.999.998,00	3.615.468.266,00	5.359.468.264,00	(98.604.004,00)	98,16
		10.000.000,00	1.733.999.994,00	3.516.864.266,00	5.260.864.260,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21	<b>Program Pengendalian Banjir</b>	11.075.000,00	78.336.000,00	1.734.045.000,00	1.823.456.000,00	(447.892.000,00)	75,44
		4.200.000,00	76.675.000,00	1.294.689.000,00	1.375.564.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 12	Pembangunan Pemecah Ombak	11.075.000,00	78.336.000,00	1.734.045.000,00	1.823.456.000,00	(447.892.000,00)	75,44
		4.200.000,00	76.675.000,00	1.294.689.000,00	1.375.564.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	1.084.600.000,00	2.894.053.000,00	3.135.000.000,00	7.113.653.000,00	(1.932.569.859,00)	72,83
		843.475.000,00	1.876.621.141,00	2.460.987.000,00	5.181.083.141,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 12	Pembebasan Lahan	69.500.000,00	1.200.550.000,00	3.135.000.000,00	4.405.050.000,00	(1.181.277.295,00)	73,18
		64.075.000,00	698.710.705,00	2.460.987.000,00	3.223.772.705,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 13	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	800.000,00	199.500.000,00	0,00	200.300.000,00	(71.721.440,00)	64,19
		650.000,00	127.928.560,00	0,00	128.578.560,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 14	Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	331.500.000,00	241.603.000,00	0,00	573.103.000,00	(108.355.202,00)	81,09
		254.200.000,00	210.547.798,00	0,00	464.747.798,00		
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 15	Revisi Perda RTRW	682.800.000,00	1.252.400.000,00	0,00	1.935.200.000,00	(571.215.922,00)	70,48
		524.550.000,00	839.434.078,00	0,00	1.363.984.078,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	154.475.000,00	1.329.407.000,00	38.099.764.000,00	39.583.646.000,00	(2.792.270.607,00)	92,95
		120.850.000,00	491.848.393,00	36.178.677.000,00	36.791.375.393,00		
1.04 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	154.475.000,00	1.329.407.000,00	38.099.764.000,00	39.583.646.000,00	(2.792.270.607,00)	92,95
		120.850.000,00	491.848.393,00	36.178.677.000,00	36.791.375.393,00		
1.04 . 1.03.01 . 01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG	154.475.000,00	1.329.407.000,00	38.099.764.000,00	39.583.646.000,00	(2.792.270.607,00)	92,95
		120.850.000,00	491.848.393,00	36.178.677.000,00	36.791.375.393,00		
1.04 . 1.03.01 . 01 . 15	Program Pengembangan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	3.000.000,00	945.380.000,00	444.000.000,00	1.392.380.000,00	(847.292.462,00)	39,15
		0,00	110.173.538,00	434.914.000,00	545.087.538,00		
1.04 . 1.03.01 . 01 . 15 . 02	Peningkatan Kualitas Permukiman	3.000.000,00	945.380.000,00	444.000.000,00	1.392.380.000,00	(847.292.462,00)	39,15
		0,00	110.173.538,00	434.914.000,00	545.087.538,00		
1.04 . 1.03.01 . 01 . 17	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	151.475.000,00	384.027.000,00	37.655.764.000,00	38.191.266.000,00	(1.944.978.145,00)	94,91
		120.850.000,00	381.674.855,00	35.743.763.000,00	36.246.287.855,00		
1.04 . 1.03.01 . 01 . 17 . 01	Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	151.475.000,00	384.027.000,00	37.655.764.000,00	38.191.266.000,00	(1.944.978.145,00)	94,91
		120.850.000,00	381.674.855,00	35.743.763.000,00	36.246.287.855,00		
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	10.310.085.000,00	10.708.863.800,00	1.645.946.100,00	22.664.894.900,00	(1.133.902.848,00)	95,00
		9.864.631.983,00	10.022.711.569,00	1.643.648.500,00	21.530.992.052,00		
1.05 . 1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7.049.713.000,00	1.990.892.600,00	1.258.670.000,00	10.299.275.600,00	(313.169.080,00)	96,96
		6.748.035.521,00	1.980.336.999,00	1.257.734.000,00	9.986.106.520,00		
1.05 . 1.05.01 . 01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERMUKIMAN	7.049.713.000,00	1.990.892.600,00	1.258.670.000,00	10.299.275.600,00	(313.169.080,00)	96,96
		6.748.035.521,00	1.980.336.999,00	1.257.734.000,00	9.986.106.520,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.720.463.000,00	1.498.520.000,00	468.370.000,00	8.687.353.000,00	(296.005.130,00)	96,59
		6.432.285.521,00	1.490.967.349,00	468.095.000,00	8.391.347.870,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	539.400.000,00	0,00	0,00	539.400.000,00	(10.217.500,00)	98,11
		529.182.500,00	0,00	0,00	529.182.500,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	6.173.148.000,00	0,00	0,00	6.173.148.000,00	(273.489.979,00)	95,57
		5.899.658.021,00	0,00	0,00	5.899.658.021,00		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	7.915.000,00	1.498.520.000,00	468.370.000,00	1.974.805.000,00	(12.297.651,00)	99,38
		3.445.000,00	1.490.967.349,00	468.095.000,00	1.962.507.349,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20	<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>	34.950.000,00	82.400.000,00	790.300.000,00	907.650.000,00	(2.960.150,00)	99,67
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 07	Pemetaan Pencegahan Dini dan Pengurangan Resiko Bencana	34.950.000,00	80.100.850,00	789.639.000,00	904.689.850,00	(2.960.150,00)	99,67
1.05 . 1.05.01 . 01 . 21	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	100.400.000,00	327.972.600,00	0,00	428.372.600,00	(273.000,00)	99,94
1.05 . 1.05.01 . 01 . 21 . 08	Pemantauan dan Pengamatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.400.000,00	327.972.600,00	0,00	428.372.600,00	(273.000,00)	99,94
1.05 . 1.05.01 . 01 . 22	<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>	193.900.000,00	82.000.000,00	0,00	275.900.000,00	(13.930.800,00)	94,95
1.05 . 1.05.01 . 01 . 22 . 11	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	193.900.000,00	82.000.000,00	0,00	275.900.000,00	(13.930.800,00)	94,95
1.05 . 1.05.02	<b>BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	1.113.817.000,00	2.123.505.200,00	124.908.000,00	3.362.230.200,00	(79.762.009,00)	97,63
1.05 . 1.05.02 . 01	<b>BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	1.113.817.000,00	2.123.505.200,00	124.908.000,00	3.362.230.200,00	(79.762.009,00)	97,63
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	789.800.000,00	949.631.200,00	124.908.000,00	1.864.339.200,00	(76.906.062,00)	95,87
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	91.620.000,00	0,00	0,00	91.620.000,00	(3.985.000,00)	95,65
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	688.380.000,00	0,00	0,00	688.380.000,00	(65.235.108,00)	90,52
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	9.800.000,00	949.631.200,00	124.908.000,00	1.084.339.200,00	(7.685.954,00)	99,29
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15	<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	277.550.000,00	489.989.000,00	0,00	767.539.000,00	(2.657.266,00)	99,65
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 13	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan FKDM Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Anambas	7.650.000,00	92.350.000,00	0,00	100.000.000,00	(54.250,00)	99,95
		7.650.000,00	92.295.750,00	0,00	99.945.750,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI				(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			JUMLAH		
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 14	Peningkatan Peran Kewaspadaan Dini dan FKDM Kabupaten Kepulauan Anambas	149.700.000,00	226.515.000,00	0,00	376.215.000,00	(2.456.264,00)	99,35
		147.250.000,00	226.508.736,00	0,00	373.758.736,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 15	Penyelenggaraan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas	120.200.000,00	171.124.000,00	0,00	291.324.000,00	(146.752,00)	99,95
		120.200.000,00	170.977.248,00	0,00	291.177.248,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 16	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	17.869.000,00	246.352.000,00	0,00	264.221.000,00	0,00	100,00
		17.869.000,00	246.352.000,00	0,00	264.221.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 04	Rakor FKUB Kabupaten dan FKUB Kec. Se Kabupaten Kepulauan Anambas	5.823.000,00	63.398.000,00	0,00	69.221.000,00	0,00	100,00
		5.823.000,00	63.398.000,00	0,00	69.221.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 05	Pembentukan Pusat Pendidikan wawasan Kebangsaan (PPWK) Kab. Kep. Anambas dan Sosialisasi Empat (4) Pilar kebangsaan Tahun 2014	5.823.000,00	89.177.000,00	0,00	95.000.000,00	0,00	100,00
		5.823.000,00	89.177.000,00	0,00	95.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 13	Dialog Interaktif Antar Umat Beragama	6.223.000,00	93.777.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100,00
		6.223.000,00	93.777.000,00	0,00	100.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	5.823.000,00	57.155.000,00	0,00	62.978.000,00	0,00	100,00
		5.823.000,00	57.155.000,00	0,00	62.978.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 04	Rakor Forum Pembauran Kebangsaan	5.823.000,00	57.155.000,00	0,00	62.978.000,00	0,00	100,00
		5.823.000,00	57.155.000,00	0,00	62.978.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 13	Dialog Interaktif Antar Umat Beragama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19	Program Pendidikan Politik Masyarakat	22.775.000,00	380.378.000,00	0,00	403.153.000,00	(198.681,00)	99,95
		22.621.219,00	380.333.100,00	0,00	402.954.319,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 17	Kegiatan Sosialisasi Undang - Undang Pemilu	3.525.000,00	182.075.000,00	0,00	185.600.000,00	(42.400,00)	99,98
		3.525.000,00	182.032.600,00	0,00	185.557.600,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 19	Manajemen, Pelatihan dan Monitoring Ormas, LSM Penerima dana Bansos/Hibah dan Update Data Ormas dan LSM	2.300.000,00	64.772.000,00	0,00	67.072.000,00	0,00	100,00
		2.300.000,00	64.772.000,00	0,00	67.072.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 22	Pemantauan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	16.950.000,00	133.531.000,00	0,00	150.481.000,00	(156.281,00)	99,90
		16.796.219,00	133.528.500,00	0,00	150.324.719,00		
1.05 . 1.05.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	2.146.555.000,00	6.594.466.000,00	262.368.100,00	9.003.389.100,00	(740.971.759,00)	91,77
		2.075.578.351,00	5.925.796.490,00	261.042.500,00	8.262.417.341,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.05 . 1.05.03 . 01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	1.978.230.000,00	1.057.923.000,00	168.664.000,00	3.204.817.000,00	(100.074.796,00)	96,88
		1.910.761.351,00	1.026.473.853,00	167.507.000,00	3.104.742.204,00		
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.978.230.000,00	1.057.923.000,00	168.664.000,00	3.204.817.000,00	(100.074.796,00)	96,88
		1.910.761.351,00	1.026.473.853,00	167.507.000,00	3.104.742.204,00		
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	168.450.000,00	0,00	0,00	168.450.000,00	(16.800.000,00)	90,03
		151.650.000,00	0,00	0,00	151.650.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	1.808.455.000,00	7.205.000,00	0,00	1.815.660.000,00	(50.243.649,00)	97,23
		1.758.211.351,00	7.205.000,00	0,00	1.765.416.351,00		
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	1.325.000,00	1.050.718.000,00	168.664.000,00	1.220.707.000,00	(33.031.147,00)	97,29
		900.000,00	1.019.268.853,00	167.507.000,00	1.187.675.853,00		
1.05 . 4.01.03 . 02	BAGIAN BINA KESEJAHTERAAN RAKYAT	168.325.000,00	5.536.543.000,00	93.704.100,00	5.798.572.100,00	(640.896.963,00)	88,95
		164.817.000,00	4.899.322.637,00	93.535.500,00	5.157.675.137,00		
1.05 . 4.01.03 . 02 . 16	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	69.225.000,00	2.894.693.000,00	0,00	2.963.918.000,00	(217.649.280,00)	92,66
		68.917.000,00	2.677.351.720,00	0,00	2.746.268.720,00		
1.05 . 4.01.03 . 02 . 16 . 06	Safari Ramadhan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	11.350.000,00	1.549.893.000,00	0,00	1.561.243.000,00	(64.246.580,00)	95,88
		11.350.000,00	1.485.646.420,00	0,00	1.496.996.420,00		
1.05 . 4.01.03 . 02 . 16 . 08	Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH)	300.000,00	541.650.000,00	0,00	541.950.000,00	(123.231.900,00)	77,26
		0,00	418.718.100,00	0,00	418.718.100,00		
1.05 . 4.01.03 . 02 . 16 . 09	Penyelenggaraan Ibadah Haji Umroh	57.575.000,00	803.150.000,00	0,00	860.725.000,00	(30.170.800,00)	96,49
		57.567.000,00	772.987.200,00	0,00	830.554.200,00		
1.05 . 4.01.03 . 02 . 17	Program Peningkatan, Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan	99.100.000,00	2.641.850.000,00	93.704.100,00	2.834.654.100,00	(423.247.683,00)	85,07
		95.900.000,00	2.221.970.917,00	93.535.500,00	2.411.406.417,00		
1.05 . 4.01.03 . 02 . 17 . 08	Peningkatan Kualitas SDM Para Penyuluh Agama	4.200.000,00	130.600.000,00	0,00	134.800.000,00	(33.538.350,00)	75,12
		4.200.000,00	97.061.650,00	0,00	101.261.650,00		
1.05 . 4.01.03 . 02 . 17 . 09	Pelaksanaan STQ/ MTQ Tingkat Kabupaten	1.500.000,00	735.250.000,00	93.704.100,00	830.454.100,00	(66.549.800,00)	91,99
		1.500.000,00	668.868.800,00	93.535.500,00	763.904.300,00		
1.05 . 4.01.03 . 02 . 17 . 10	Pelaksanaan STQ/ MTQ Tingkat Provinsi	78.700.000,00	960.600.000,00	0,00	1.039.300.000,00	(104.739.008,00)	89,92
		76.700.000,00	857.860.992,00	0,00	934.560.992,00		



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.05 . 4.01.03 . 02 . 17 . 11	Pembinaan Wawasan Keagamaan dan Akhlakul Qorimah	14.700.000,00	815.400.000,00	0,00	830.100.000,00	(218.420.525,00)	73,69
		13.500.000,00	598.179.475,00	0,00	611.679.475,00		
1.06	Sosial	541.928.500,00	3.344.284.491,00	112.560.000,00	3.998.772.991,00	(276.498.170,00)	93,09
		519.977.500,00	3.092.211.321,00	110.086.000,00	3.722.274.821,00		
1.06 . 1.05.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	541.928.500,00	3.344.284.491,00	112.560.000,00	3.998.772.991,00	(276.498.170,00)	93,09
		519.977.500,00	3.092.211.321,00	110.086.000,00	3.722.274.821,00		
1.06 . 1.05.03 . 01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	541.928.500,00	3.344.284.491,00	112.560.000,00	3.998.772.991,00	(276.498.170,00)	93,09
		519.977.500,00	3.092.211.321,00	110.086.000,00	3.722.274.821,00		
1.06 . 1.05.03 . 01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	373.116.000,00	2.404.531.300,00	36.360.000,00	2.814.007.300,00	(191.811.118,00)	93,18
		362.315.000,00	2.225.652.482,00	34.228.700,00	2.622.196.182,00		
1.06 . 1.05.03 . 01 . 15 . 09	Pendampingan Jaminan Sosial Bagi Lanjut Usia dan Penyandang Cacat	5.976.000,00	64.024.000,00	0,00	70.000.000,00	(9.744.800,00)	86,08
		0,00	60.255.200,00	0,00	60.255.200,00		
1.06 . 1.05.03 . 01 . 15 . 20	Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	6.945.000,00	159.036.400,00	0,00	165.981.400,00	(19.217.701,00)	88,42
		6.945.000,00	139.818.699,00	0,00	146.763.699,00		
1.06 . 1.05.03 . 01 . 15 . 21	Pengadaan Beras Sejahtera (RASTRA) Otonomi	103.580.000,00	1.687.827.200,00	36.360.000,00	1.827.767.200,00	(2.489.442,00)	99,86
		103.355.000,00	1.687.694.058,00	34.228.700,00	1.825.277.758,00		
1.06 . 1.05.03 . 01 . 15 . 23	Updating, Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan	201.600.000,00	147.594.900,00	0,00	349.194.900,00	(13.476.997,00)	96,14
		201.600.000,00	134.117.903,00	0,00	335.717.903,00		
1.06 . 1.05.03 . 01 . 15 . 24	Operasional Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	53.290.000,00	273.776.000,00	0,00	327.066.000,00	(146.852.200,00)	55,10
		48.690.000,00	131.523.800,00	0,00	180.213.800,00		
1.06 . 1.05.03 . 01 . 15 . 25	Operasional Sistem Layanan Rujuk Terpadu (SLRT) Kayuh Serentak Langkah Sepijak Kabupaten Kepulauan Anambas	1.725.000,00	72.272.800,00	0,00	73.997.800,00	(29.978,00)	99,96
		1.725.000,00	72.242.822,00	0,00	73.967.822,00		
1.06 . 1.05.03 . 01 . 16	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	37.605.000,00	451.868.191,00	0,00	489.473.191,00	(73.468.401,00)	84,99
		26.605.000,00	389.399.790,00	0,00	416.004.790,00		
1.06 . 1.05.03 . 01 . 16 . 07	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	33.000.000,00	326.473.191,00	0,00	359.473.191,00	(69.976.601,00)	80,53
		22.000.000,00	267.496.590,00	0,00	289.496.590,00		
1.06 . 1.05.03 . 01 . 16 . 15	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dalam "sehari Bersama Lanjut Usia (Lansia)"	4.605.000,00	125.395.000,00	0,00	130.000.000,00	(3.491.800,00)	97,31
		4.605.000,00	121.903.200,00	0,00	126.508.200,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.06 . 1.05.03 . 01 . 17	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	131.207.500,00	487.885.000,00	76.200.000,00	695.292.500,00	(11.218.651,00)	98,39
		131.057.500,00	477.159.049,00	75.857.300,00	684.073.849,00		
1.06 . 1.05.03 . 01 . 17 . 11	Bimbingan Teknis Bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	3.555.000,00	76.445.000,00	0,00	80.000.000,00	(8.664.500,00)	89,17
		3.555.000,00	67.780.500,00	0,00	71.335.500,00		
1.06 . 1.05.03 . 01 . 17 . 13	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara kesejahteraan sosial LKKS, KT, TKSK, PSM, LKS dan LK3	1.175.000,00	76.825.000,00	0,00	78.000.000,00	(267.200,00)	99,66
		1.175.000,00	76.557.800,00	0,00	77.732.800,00		
1.06 . 1.05.03 . 01 . 17 . 23	Pembinaan, Pemberdayaan, Pendampingan dan Monitoring Evaluasi Taruna Slaga Bencana (TAGANA) dan Kampung Slaga Bencana	126.477.500,00	334.615.000,00	76.200.000,00	537.292.500,00	(2.286.951,00)	99,57
		126.327.500,00	332.820.749,00	75.857.300,00	535.005.549,00		
2	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	12.655.152.400,00	47.798.459.175,00	30.808.858.078,29	91.262.469.653,29	(7.270.925.837,29)	92,03
		12.054.949.047,00	42.436.548.637,00	29.500.046.132,00	83.991.543.816,00		
2.01	<b>Tenaga Kerja</b>	405.630.000,00	983.240.400,00	0,00	1.388.870.400,00	(82.749.941,00)	94,04
		401.580.000,00	904.540.459,00	0,00	1.306.120.459,00		
2.01 . 2.12.01	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA</b>	405.630.000,00	983.240.400,00	0,00	1.388.870.400,00	(82.749.941,00)	94,04
		401.580.000,00	904.540.459,00	0,00	1.306.120.459,00		
2.01 . 2.12.01 . 01	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA</b>	405.630.000,00	983.240.400,00	0,00	1.388.870.400,00	(82.749.941,00)	94,04
		401.580.000,00	904.540.459,00	0,00	1.306.120.459,00		
2.01 . 2.12.01 . 01 . 15	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	325.500.000,00	685.290.000,00	0,00	1.010.790.000,00	(3.247.441,00)	99,68
		322.500.000,00	685.042.559,00	0,00	1.007.542.559,00		
2.01 . 2.12.01 . 01 . 15 . 10	Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Bidang Pariwisata	325.500.000,00	685.290.000,00	0,00	1.010.790.000,00	(3.247.441,00)	99,68
		322.500.000,00	685.042.559,00	0,00	1.007.542.559,00		
2.01 . 2.12.01 . 01 . 17	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	80.130.000,00	297.950.400,00	0,00	378.080.400,00	(79.502.500,00)	78,97
		79.080.000,00	219.497.900,00	0,00	298.577.900,00		
2.01 . 2.12.01 . 01 . 17 . 11	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	21.850.000,00	184.360.000,00	0,00	206.210.000,00	(76.391.000,00)	62,95
		21.850.000,00	107.969.000,00	0,00	129.819.000,00		
2.01 . 2.12.01 . 01 . 17 . 13	Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama TRIPARTIT	58.280.000,00	113.590.400,00	0,00	171.870.400,00	(3.111.500,00)	98,19
		57.230.000,00	111.528.900,00	0,00	168.758.900,00		
2.02	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	94.370.000,00	1.450.804.000,00	0,00	1.545.174.000,00	(223.829.336,00)	85,51
		58.445.000,00	1.262.899.664,00	0,00	1.321.344.664,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.02 . 1.05.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	94.370.000,00	1.450.804.000,00	0,00	1.545.174.000,00	(223.829.336,00)	85,51
		58.445.000,00	1.262.899.664,00	0,00	1.321.344.664,00		
2.02 . 1.05.03 . 01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	94.370.000,00	1.450.804.000,00	0,00	1.545.174.000,00	(223.829.336,00)	85,51
		58.445.000,00	1.262.899.664,00	0,00	1.321.344.664,00		
2.02 . 1.05.03 . 01 . 15	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	89.585.000,00	541.925.000,00	0,00	631.510.000,00	(141.659.043,00)	77,57
		55.760.000,00	434.090.957,00	0,00	489.850.957,00		
2.02 . 1.05.03 . 01 . 15 . 14	Peningkatan dan Penguatan Peran Serta Forum Anak	2.735.000,00	163.665.000,00	0,00	166.400.000,00	(2.444.950,00)	98,53
		2.210.000,00	161.745.050,00	0,00	163.955.050,00		
2.02 . 1.05.03 . 01 . 15 . 15	Pengiriman Peserta HAN Tingkat Provinsi Kepri	3.750.000,00	36.250.000,00	0,00	40.000.000,00	(8.291.150,00)	79,27
		3.000.000,00	28.708.850,00	0,00	31.708.850,00		
2.02 . 1.05.03 . 01 . 15 . 19	Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD)	83.100.000,00	342.010.000,00	0,00	425.110.000,00	(130.922.943,00)	69,20
		50.550.000,00	243.637.057,00	0,00	294.187.057,00		
2.02 . 1.05.03 . 01 . 16	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	0,00	112.400.000,00	0,00	112.400.000,00	(4.732.052,00)	95,79
		0,00	107.667.948,00	0,00	107.667.948,00		
2.02 . 1.05.03 . 01 . 16 . 14	Pemantapan Pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	0,00	112.400.000,00	0,00	112.400.000,00	(4.732.052,00)	95,79
		0,00	107.667.948,00	0,00	107.667.948,00		
2.02 . 1.05.03 . 01 . 17	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	4.785.000,00	796.479.000,00	0,00	801.264.000,00	(77.438.241,00)	90,34
		2.685.000,00	721.140.759,00	0,00	723.825.759,00		
2.02 . 1.05.03 . 01 . 17 . 12	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Ibu-Ibu Rumah Tangga dan Wanita Karir	1.785.000,00	493.215.000,00	0,00	495.000.000,00	(57.188.311,00)	88,45
		1.785.000,00	436.026.689,00	0,00	437.811.689,00		
2.02 . 1.05.03 . 01 . 17 . 13	Pengembangan Fungsi dan Peran Serta Dharma Wanita Persatuan dalam Pembangunan Daerah	3.000.000,00	303.264.000,00	0,00	306.264.000,00	(20.249.930,00)	93,39
		900.000,00	285.114.070,00	0,00	286.014.070,00		
2.03	Pangan	22.810.000,00	297.070.000,00	0,00	319.880.000,00	(28.554.897,00)	91,07
		20.760.000,00	270.565.103,00	0,00	291.325.103,00		
2.03 . 3.01.01	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	22.810.000,00	297.070.000,00	0,00	319.880.000,00	(28.554.897,00)	91,07
		20.760.000,00	270.565.103,00	0,00	291.325.103,00		
2.03 . 3.01.01 . 01	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	22.810.000,00	297.070.000,00	0,00	319.880.000,00	(28.554.897,00)	91,07
		20.760.000,00	270.565.103,00	0,00	291.325.103,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.03 . 3.01.01 . 01 . 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	22.810.000,00	297.070.000,00	0,00	319.880.000,00	(28.554.897,00)	91,07
		20.760.000,00	270.565.103,00	0,00	291.325.103,00		
2.03 . 3.01.01 . 01 . 15 . 01	Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan Daerah	5.670.000,00	54.330.000,00	0,00	60.000.000,00	(5.665.900,00)	90,56
		5.670.000,00	48.664.100,00	0,00	54.334.100,00		
2.03 . 3.01.01 . 01 . 15 . 03	Lomba Cipta Menu	12.750.000,00	109.150.000,00	0,00	121.900.000,00	(11.384.797,00)	90,66
		11.000.000,00	99.515.203,00	0,00	110.515.203,00		
2.03 . 3.01.01 . 01 . 15 . 07	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	4.390.000,00	133.590.000,00	0,00	137.980.000,00	(11.504.200,00)	91,66
		4.090.000,00	122.385.800,00	0,00	126.475.800,00		
2.04	Pertanahan	99.748.000,00	485.188.000,00	0,00	584.936.000,00	(89.564.235,00)	84,69
		81.748.000,00	413.623.765,00	0,00	495.371.765,00		
2.04 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	99.748.000,00	485.188.000,00	0,00	584.936.000,00	(89.564.235,00)	84,69
		81.748.000,00	413.623.765,00	0,00	495.371.765,00		
2.04 . 4.01.03 . 01	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM	99.748.000,00	485.188.000,00	0,00	584.936.000,00	(89.564.235,00)	84,69
		81.748.000,00	413.623.765,00	0,00	495.371.765,00		
2.04 . 4.01.03 . 01 . 15	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	30.349.000,00	396.431.000,00	0,00	426.780.000,00	(45.256.485,00)	89,40
		30.349.000,00	351.174.515,00	0,00	381.523.515,00		
2.04 . 4.01.03 . 01 . 15 . 01	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	24.399.000,00	160.631.000,00	0,00	185.030.000,00	(31.679.365,00)	82,88
		24.399.000,00	128.951.635,00	0,00	153.350.635,00		
2.04 . 4.01.03 . 01 . 15 . 14	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air	5.950.000,00	235.800.000,00	0,00	241.750.000,00	(13.577.120,00)	94,38
		5.950.000,00	222.222.880,00	0,00	228.172.880,00		
2.04 . 4.01.03 . 01 . 18	Program pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	69.399.000,00	88.757.000,00	0,00	158.156.000,00	(44.307.750,00)	71,98
		51.399.000,00	62.449.250,00	0,00	113.848.250,00		
2.04 . 4.01.03 . 01 . 18 . 101	Pembinaan Teknis Pengukuran dan Pemetaan Tanah	69.399.000,00	88.757.000,00	0,00	158.156.000,00	(44.307.750,00)	71,98
		51.399.000,00	62.449.250,00	0,00	113.848.250,00		
2.05	Lingkungan Hidup	168.800.000,00	4.530.075.571,00	1.031.833.000,00	5.730.708.571,00	(268.197.494,00)	95,32
		161.070.000,00	4.285.959.677,00	1.015.481.400,00	5.462.511.077,00		
2.05 . 2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	168.800.000,00	4.530.075.571,00	1.031.833.000,00	5.730.708.571,00	(268.197.494,00)	95,32
		161.070.000,00	4.285.959.677,00	1.015.481.400,00	5.462.511.077,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.05 . 2.09.01 . 01	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN	168.800.000,00	4.530.075.571,00	1.031.833.000,00	5.730.708.571,00	(268.197.494,00)	95,32
		161.070.000,00	4.285.959.677,00	1.015.481.400,00	5.462.511.077,00		
2.05 . 2.09.01 . 01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	7.025.000,00	1.161.993.000,00	986.520.000,00	2.155.538.000,00	(62.031.566,00)	97,12
		7.025.000,00	1.116.081.434,00	970.400.000,00	2.093.506.434,00		
2.05 . 2.09.01 . 01 . 15 . 02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan	2.750.000,00	67.650.000,00	828.520.000,00	898.920.000,00	(24.854.778,00)	97,24
		2.750.000,00	46.795.222,00	824.520.000,00	874.065.222,00		
2.05 . 2.09.01 . 01 . 15 . 16	Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan Dan Pesisir Perairan	2.250.000,00	1.049.022.000,00	26.000.000,00	1.077.272.000,00	(19.848.042,00)	98,16
		2.250.000,00	1.029.413.958,00	25.760.000,00	1.057.423.958,00		
2.05 . 2.09.01 . 01 . 15 . 17	Peningkatan Pengelolaan Sampah 3R	2.025.000,00	45.321.000,00	132.000.000,00	179.346.000,00	(17.328.746,00)	90,34
		2.025.000,00	39.872.254,00	120.120.000,00	162.017.254,00		
2.05 . 2.09.01 . 01 . 16	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.425.000,00	143.180.000,00	0,00	144.605.000,00	(415.600,00)	99,71
		1.425.000,00	142.764.400,00	0,00	144.189.400,00		
2.05 . 2.09.01 . 01 . 16 . 05	Penataan RTH	1.425.000,00	143.180.000,00	0,00	144.605.000,00	(415.600,00)	99,71
		1.425.000,00	142.764.400,00	0,00	144.189.400,00		
2.05 . 1.03.01 . 01 . 17	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	144.150.000,00	3.087.102.571,00	45.313.000,00	3.276.565.571,00	(193.162.228,00)	94,10
		136.420.000,00	2.901.901.943,00	45.081.400,00	3.083.403.343,00		
2.05 . 1.03.01 . 01 . 17 . 01	Penyusunan Dokumen Kajian Dampak Lingkungan	58.550.000,00	2.421.006.000,00	0,00	2.479.556.000,00	(140.388.126,00)	94,34
		53.820.000,00	2.285.347.874,00	0,00	2.339.167.874,00		
2.05 . 2.09.01 . 01 . 17 . 02	Adipura Desa	20.800.000,00	154.950.000,00	0,00	175.750.000,00	(22.056.700,00)	87,45
		17.800.000,00	135.893.300,00	0,00	153.693.300,00		
2.05 . 2.09.01 . 01 . 17 . 03	Kegiatan Penyelenggaraan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	24.950.000,00	75.050.000,00	0,00	100.000.000,00	(15.251.500,00)	84,75
		24.950.000,00	59.798.500,00	0,00	84.748.500,00		
2.05 . 2.09.01 . 01 . 17 . 05	Pemantauan Kualitas Lingkungan	9.600.000,00	94.396.571,00	7.250.000,00	111.246.571,00	(8.450.000,00)	92,40
		9.600.000,00	86.178.171,00	7.018.400,00	102.796.571,00		
2.05 . 2.09.01 . 01 . 17 . 06	Pengawasan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	26.850.000,00	44.750.000,00	38.063.000,00	109.663.000,00	(272.700,00)	99,75
		26.850.000,00	44.477.300,00	38.063.000,00	109.390.300,00		
2.05 . 2.09.01 . 01 . 17 . 13	Penyusunan Dokumen Lingkungan	3.400.000,00	296.950.000,00	0,00	300.350.000,00	(6.743.202,00)	97,75
		3.400.000,00	290.206.798,00	0,00	293.606.798,00		
2.05 . 2.09.01 . 01 . 21	Program Adiwiyata	16.200.000,00	137.800.000,00	0,00	154.000.000,00	(12.588.100,00)	91,83
		16.200.000,00	125.211.900,00	0,00	141.411.900,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.05 . 2.09.01 . 01 . 21 . 03	Pembinaan Adiwiyata	16.200.000,00	137.800.000,00	0,00	154.000.000,00	(12.588.100,00)	91,83
		16.200.000,00	125.211.900,00	0,00	141.411.900,00		
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	1.154.670.000,00	2.034.385.000,00	468.459.900,00	3.657.514.900,00	(44.696.864,00)	98,78
		1.121.419.947,00	2.027.268.089,00	464.130.000,00	3.612.818.036,00		
2.06 . 2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	1.154.670.000,00	2.034.385.000,00	468.459.900,00	3.657.514.900,00	(44.696.864,00)	98,78
		1.121.419.947,00	2.027.268.089,00	464.130.000,00	3.612.818.036,00		
2.06 . 2.06.01 . 01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN -----	1.154.670.000,00	2.034.385.000,00	468.459.900,00	3.657.514.900,00	(44.696.864,00)	98,78
		1.121.419.947,00	2.027.268.089,00	464.130.000,00	3.612.818.036,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	894.980.000,00	969.508.000,00	400.459.900,00	2.264.947.900,00	(39.854.590,00)	98,24
		862.029.947,00	966.783.063,00	396.280.300,00	2.225.093.310,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	64.800.000,00	0,00	0,00	64.800.000,00	(675.000,00)	98,96
		64.125.000,00	0,00	0,00	64.125.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	826.455.000,00	0,00	0,00	826.455.000,00	(32.275.053,00)	96,09
		794.179.947,00	0,00	0,00	794.179.947,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	3.725.000,00	969.508.000,00	400.459.900,00	1.373.692.900,00	(6.904.537,00)	99,50
		3.725.000,00	966.783.063,00	396.280.300,00	1.366.788.363,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	259.690.000,00	1.064.877.000,00	68.000.000,00	1.392.567.000,00	(4.842.274,00)	99,65
		259.390.000,00	1.060.485.026,00	67.849.700,00	1.387.724.726,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 11	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan (DAK Non Fisik)	3.480.000,00	207.750.000,00	0,00	211.230.000,00	(93.200,00)	99,96
		3.480.000,00	207.656.800,00	0,00	211.136.800,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 14	Penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten	19.150.000,00	52.388.000,00	0,00	71.538.000,00	(144.450,00)	99,80
		19.150.000,00	52.243.550,00	0,00	71.393.550,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 18	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	34.260.000,00	204.100.000,00	68.000.000,00	306.360.000,00	(2.095.544,00)	99,32
		34.260.000,00	202.154.756,00	67.849.700,00	304.264.456,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 24	Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)	81.600.000,00	274.759.000,00	0,00	356.359.000,00	(594.250,00)	99,83
		81.300.000,00	274.464.750,00	0,00	355.764.750,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 26	Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)	47.400.000,00	158.495.000,00	0,00	205.895.000,00	(1.563.580,00)	99,24
		47.400.000,00	156.931.420,00	0,00	204.331.420,00		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 27	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	73.800.000,00	167.385.000,00	0,00	241.185.000,00	(351.250,00)	99,85
		73.800.000,00	167.033.750,00	0,00	240.833.750,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	168.067.000,00	3.870.652.400,00	50.000.000,00	4.088.719.400,00	(154.299.874,00)	96,23
		165.173.000,00	3.719.251.526,00	49.995.000,00	3.934.419.526,00		
2.07 . 1.05.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	99.060.000,00	1.530.726.500,00	0,00	1.629.786.500,00	(94.531.927,00)	94,20
		96.980.000,00	1.438.274.573,00	0,00	1.535.254.573,00		
2.07 . 1.05.03 . 01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	99.060.000,00	1.530.726.500,00	0,00	1.629.786.500,00	(94.531.927,00)	94,20
		96.980.000,00	1.438.274.573,00	0,00	1.535.254.573,00		
2.07 . 1.05.03 . 01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	28.760.000,00	720.693.900,00	0,00	749.453.900,00	(29.629.790,00)	96,05
		27.710.000,00	692.114.110,00	0,00	719.824.110,00		
2.07 . 1.05.03 . 01 . 15 . 06	Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten	7.770.000,00	81.609.000,00	0,00	89.379.000,00	(103.500,00)	99,88
		7.770.000,00	81.505.500,00	0,00	89.275.500,00		
2.07 . 1.05.03 . 01 . 15 . 07	Pembinaan dan Pendampingan Desa	11.610.000,00	88.390.000,00	0,00	100.000.000,00	(1.695.300,00)	98,30
		11.610.000,00	86.694.700,00	0,00	98.304.700,00		
2.07 . 1.05.03 . 01 . 15 . 10	Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG-PKK) Tingkat Kabupaten	4.690.000,00	269.606.300,00	0,00	274.296.300,00	(17.379.270,00)	93,66
		4.690.000,00	252.227.030,00	0,00	256.917.030,00		
2.07 . 1.05.03 . 01 . 15 . 18	Pelaksanaan Jambore PKK Kabupaten Kepulauan Anambas	4.690.000,00	281.088.600,00	0,00	285.778.600,00	(10.451.720,00)	96,34
		3.640.000,00	271.686.880,00	0,00	275.326.880,00		
2.07 . 1.05.03 . 01 . 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	16.365.000,00	145.510.000,00	0,00	161.875.000,00	(2.360.800,00)	98,54
		16.365.000,00	143.149.200,00	0,00	159.514.200,00		
2.07 . 1.05.03 . 01 . 16 . 09	Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna	11.610.000,00	130.265.000,00	0,00	141.875.000,00	(1.780.800,00)	98,74
		11.610.000,00	128.484.200,00	0,00	140.094.200,00		
2.07 . 1.05.03 . 01 . 16 . 11	Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	4.755.000,00	15.245.000,00	0,00	20.000.000,00	(580.000,00)	97,10
		4.755.000,00	14.665.000,00	0,00	19.420.000,00		
2.07 . 1.05.03 . 01 . 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	35.335.000,00	316.496.610,00	0,00	351.831.610,00	(16.994.856,00)	95,17
		34.305.000,00	300.531.754,00	0,00	334.836.754,00		
2.07 . 1.05.03 . 01 . 17 . 11	Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Serentak	15.850.000,00	122.000.000,00	0,00	137.850.000,00	(11.478.946,00)	91,67
		15.150.000,00	111.221.054,00	0,00	126.371.054,00		
2.07 . 1.05.03 . 01 . 17 . 14	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	8.925.000,00	102.935.000,00	0,00	111.860.000,00	(1.121.200,00)	99,00
		8.595.000,00	102.143.800,00	0,00	110.738.800,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.07 . 1.05.03 . 01 . 17 . 17	Sosialisasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Berdasarkan Tipologi Desa	10.560.000,00	91.561.610,00	0,00	102.121.610,00	(4.394.710,00)	95,70
		10.560.000,00	87.166.900,00	0,00	97.726.900,00		
2.07 . 1.05.03 . 01 . 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	13.100.000,00	161.702.800,00	0,00	174.802.800,00	(7.363.791,00)	95,79
		13.100.000,00	154.339.009,00	0,00	167.439.009,00		
2.07 . 1.05.03 . 01 . 18 . 10	Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan APBDesa	6.625.000,00	67.177.800,00	0,00	73.802.800,00	(1.067.100,00)	98,55
		6.625.000,00	66.110.700,00	0,00	72.735.700,00		
2.07 . 1.05.03 . 01 . 18 . 13	Rapat Koordinasi Pemerintah Desa dan Penyusunan Produk Hukum Desa	6.475.000,00	94.525.000,00	0,00	101.000.000,00	(6.296.691,00)	93,77
		6.475.000,00	88.228.309,00	0,00	94.703.309,00		
2.07 . 1.05.03 . 01 . 19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	5.500.000,00	186.323.190,00	0,00	191.823.190,00	(38.182.690,00)	80,09
		5.500.000,00	148.140.500,00	0,00	153.640.500,00		
2.07 . 1.05.03 . 01 . 19 . 05	Pendampingan Pegelolaan Keuangan Desa	5.500.000,00	186.323.190,00	0,00	191.823.190,00	(38.182.690,00)	80,09
		5.500.000,00	148.140.500,00	0,00	153.640.500,00		
2.07 . 4.01.05	KECAMATAN SIANTAN	3.000.000,00	455.350.000,00	0,00	458.350.000,00	(18.088.500,00)	96,05
		2.790.000,00	437.471.500,00	0,00	440.261.500,00		
2.07 . 4.01.05 . 01	KECAMATAN SIANTAN	3.000.000,00	455.350.000,00	0,00	458.350.000,00	(18.088.500,00)	96,05
		2.790.000,00	437.471.500,00	0,00	440.261.500,00		
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	3.000.000,00	455.350.000,00	0,00	458.350.000,00	(18.088.500,00)	96,05
		2.790.000,00	437.471.500,00	0,00	440.261.500,00		
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 09	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Dalam Pembangunan Masyarakat dan Desa	3.000.000,00	455.350.000,00	0,00	458.350.000,00	(18.088.500,00)	96,05
		2.790.000,00	437.471.500,00	0,00	440.261.500,00		
2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 10	Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.07 . 4.01.06	KECAMATAN JEMAJA	38.875.000,00	332.890.000,00	0,00	371.765.000,00	(26.900.000,00)	92,76
		38.871.000,00	305.994.000,00	0,00	344.865.000,00		
2.07 . 4.01.06 . 01	KECAMATAN JEMAJA	38.875.000,00	332.890.000,00	0,00	371.765.000,00	(26.900.000,00)	92,76
		38.871.000,00	305.994.000,00	0,00	344.865.000,00		
2.07 . 4.01.06 . 01 . 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	38.875.000,00	332.890.000,00	0,00	371.765.000,00	(26.900.000,00)	92,76
		38.871.000,00	305.994.000,00	0,00	344.865.000,00		
2.07 . 4.01.06 . 01 . 17 . 09	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Dalam Pembangunan Masyarakat dan Desa	38.875.000,00	332.890.000,00	0,00	371.765.000,00	(26.900.000,00)	92,76
		38.871.000,00	305.994.000,00	0,00	344.865.000,00		



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.07 . 4.01.06 . 01 . 17 . 10	Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.07 . 4.01.07	KECAMATAN PALMATAK	9.710.000,00	413.990.000,00	50.000.000,00	473.700.000,00	(213.200,00)	99,95
		9.710.000,00	413.781.800,00	49.995.000,00	473.486.800,00		
2.07 . 4.01.07 . 01	KECAMATAN PALMATAK	9.710.000,00	413.990.000,00	50.000.000,00	473.700.000,00	(213.200,00)	99,95
		9.710.000,00	413.781.800,00	49.995.000,00	473.486.800,00		
2.07 . 4.01.07 . 01 . 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	9.710.000,00	413.990.000,00	50.000.000,00	473.700.000,00	(213.200,00)	99,95
		9.710.000,00	413.781.800,00	49.995.000,00	473.486.800,00		
2.07 . 4.01.07 . 01 . 17 . 09	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Dalam Pembangunan Masyarakat dan Desa	9.710.000,00	413.990.000,00	50.000.000,00	473.700.000,00	(213.200,00)	99,95
		9.710.000,00	413.781.800,00	49.995.000,00	473.486.800,00		
2.07 . 4.01.08	KECAMATAN SIANTAN TIMUR	5.472.000,00	283.278.000,00	0,00	288.750.000,00	(6.188.747,00)	97,86
		5.472.000,00	277.089.253,00	0,00	282.561.253,00		
2.07 . 4.01.08 . 01	KECAMATAN SIANTAN TIMUR	5.472.000,00	283.278.000,00	0,00	288.750.000,00	(6.188.747,00)	97,86
		5.472.000,00	277.089.253,00	0,00	282.561.253,00		
2.07 . 4.01.08 . 01 . 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	5.472.000,00	283.278.000,00	0,00	288.750.000,00	(6.188.747,00)	97,86
		5.472.000,00	277.089.253,00	0,00	282.561.253,00		
2.07 . 4.01.08 . 01 . 17 . 09	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Dalam Pembangunan Masyarakat dan Desa	5.472.000,00	283.278.000,00	0,00	288.750.000,00	(6.188.747,00)	97,86
		5.472.000,00	277.089.253,00	0,00	282.561.253,00		
2.07 . 4.01.09	KECAMATAN SIANTAN SELATAN	3.250.000,00	237.967.900,00	0,00	241.217.900,00	(182.000,00)	99,92
		3.250.000,00	237.785.900,00	0,00	241.035.900,00		
2.07 . 4.01.09 . 01	KECAMATAN SIANTAN SELATAN	3.250.000,00	237.967.900,00	0,00	241.217.900,00	(182.000,00)	99,92
		3.250.000,00	237.785.900,00	0,00	241.035.900,00		
2.07 . 4.01.09 . 01 . 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	3.250.000,00	237.967.900,00	0,00	241.217.900,00	(182.000,00)	99,92
		3.250.000,00	237.785.900,00	0,00	241.035.900,00		
2.07 . 4.01.09 . 01 . 17 . 09	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Dalam Pembangunan Masyarakat dan Desa	3.250.000,00	237.967.900,00	0,00	241.217.900,00	(182.000,00)	99,92
		3.250.000,00	237.785.900,00	0,00	241.035.900,00		
2.07 . 4.01.10	KECAMATAN JEMAJA TIMUR	0,00	252.350.000,00	0,00	252.350.000,00	(3.842.000,00)	98,48
		0,00	248.508.000,00	0,00	248.508.000,00		
2.07 . 4.01.10 . 01	KECAMATAN JEMAJA TIMUR	0,00	252.350.000,00	0,00	252.350.000,00	(3.842.000,00)	98,48
		0,00	248.508.000,00	0,00	248.508.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.07 . 4.01.10 . 01 . 17	<i>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</i>	0,00	252.350.000,00	0,00	252.350.000,00	(3.842.000,00)	98,48
		0,00	248.508.000,00	0,00	248.508.000,00		
2.07 . 4.01.10 . 01 . 17 . 09	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Dalam Pembangunan Masyarakat dan Desa	0,00	252.350.000,00	0,00	252.350.000,00	(3.842.000,00)	98,48
		0,00	248.508.000,00	0,00	248.508.000,00		
2.07 . 4.01.11	KECAMATAN SIANTAN TENGAH	8.100.000,00	233.000.000,00	0,00	241.100.000,00	0,00	100,00
		8.100.000,00	233.000.000,00	0,00	241.100.000,00		
2.07 . 4.01.11 . 01	KECAMATAN SIANTAN TENGAH	8.100.000,00	233.000.000,00	0,00	241.100.000,00	0,00	100,00
		8.100.000,00	233.000.000,00	0,00	241.100.000,00		
2.07 . 4.01.11 . 01 . 17	<i>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</i>	8.100.000,00	233.000.000,00	0,00	241.100.000,00	0,00	100,00
		8.100.000,00	233.000.000,00	0,00	241.100.000,00		
2.07 . 4.01.11 . 01 . 17 . 09	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Dalam Pembangunan Masyarakat dan Desa	8.100.000,00	233.000.000,00	0,00	241.100.000,00	0,00	100,00
		8.100.000,00	233.000.000,00	0,00	241.100.000,00		
2.07 . 4.01.12	KECAMATAN SIANTAN UTARA	600.000,00	74.100.000,00	0,00	74.700.000,00	(3.910.000,00)	94,77
		0,00	70.790.000,00	0,00	70.790.000,00		
2.07 . 4.01.12 . 01	KECAMATAN SIANTAN UTARA	600.000,00	74.100.000,00	0,00	74.700.000,00	(3.910.000,00)	94,77
		0,00	70.790.000,00	0,00	70.790.000,00		
2.07 . 4.01.12 . 01 . 17	<i>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</i>	600.000,00	74.100.000,00	0,00	74.700.000,00	(3.910.000,00)	94,77
		0,00	70.790.000,00	0,00	70.790.000,00		
2.07 . 4.01.12 . 01 . 17 . 09	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Dalam Pembangunan Masyarakat dan Desa	600.000,00	74.100.000,00	0,00	74.700.000,00	(3.910.000,00)	94,77
		0,00	70.790.000,00	0,00	70.790.000,00		
2.07 . 4.01.13	KECAMATAN JEMAJA BARAT	0,00	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	(443.500,00)	99,22
		0,00	56.556.500,00	0,00	56.556.500,00		
2.07 . 4.01.13 . 01	KECAMATAN JEMAJA BARAT	0,00	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	(443.500,00)	99,22
		0,00	56.556.500,00	0,00	56.556.500,00		
2.07 . 4.01.13 . 01 . 17	<i>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</i>	0,00	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	(443.500,00)	99,22
		0,00	56.556.500,00	0,00	56.556.500,00		
2.07 . 4.01.13 . 01 . 17 . 09	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Dalam Pembangunan Masyarakat dan Desa	0,00	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	(443.500,00)	99,22
		0,00	56.556.500,00	0,00	56.556.500,00		
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	126.212.500,00	2.111.541.500,00	1.281.530.900,00	3.519.284.900,00	(613.302.438,00)	82,57
		114.900.000,00	1.509.551.562,00	1.281.530.900,00	2.905.982.462,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.08 . 1.02.01	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	126.212.500,00	2.111.541.500,00	1.281.530.900,00	3.519.284.900,00	(613.302.438,00)	82,57
		114.900.000,00	1.509.551.562,00	1.281.530.900,00	2.905.982.462,00		
2.08 . 1.02.01 . 01	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	126.212.500,00	2.111.541.500,00	1.281.530.900,00	3.519.284.900,00	(613.302.438,00)	82,57
		114.900.000,00	1.509.551.562,00	1.281.530.900,00	2.905.982.462,00		
2.08 . 1.02.01 . 01 . 15	Program Keluarga Berencana	126.212.500,00	2.111.541.500,00	1.281.530.900,00	3.519.284.900,00	(613.302.438,00)	82,57
		114.900.000,00	1.509.551.562,00	1.281.530.900,00	2.905.982.462,00		
2.08 . 1.02.01 . 01 . 15 . 09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Fisik Program Keluarga Berencana (DAK)	10.225.000,00	86.790.000,00	1.281.530.900,00	1.378.545.900,00	(6.363.138,00)	99,54
		4.800.000,00	85.851.862,00	1.281.530.900,00	1.372.182.762,00		
2.08 . 1.02.01 . 01 . 15 . 15	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)	113.650.000,00	1.827.239.000,00	0,00	1.940.889.000,00	(604.377.300,00)	68,86
		110.100.000,00	1.226.411.700,00	0,00	1.336.511.700,00		
2.08 . 1.02.01 . 01 . 15 . 21	Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan KB	2.337.500,00	197.512.500,00	0,00	199.850.000,00	(2.562.000,00)	98,72
		0,00	197.288.000,00	0,00	197.288.000,00		
2.09	Perhubungan	6.153.795.400,00	5.226.316.492,00	23.036.685.893,29	34.416.797.785,29	(1.692.546.546,29)	95,08
		5.847.385.974,00	4.969.291.063,00	21.907.574.202,00	32.724.251.239,00		
2.09 . 2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	6.153.795.400,00	5.226.316.492,00	23.036.685.893,29	34.416.797.785,29	(1.692.546.546,29)	95,08
		5.847.385.974,00	4.969.291.063,00	21.907.574.202,00	32.724.251.239,00		
2.09 . 2.09.01 . 01	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	6.153.795.400,00	5.226.316.492,00	23.036.685.893,29	34.416.797.785,29	(1.692.546.546,29)	95,08
		5.847.385.974,00	4.969.291.063,00	21.907.574.202,00	32.724.251.239,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.986.570.400,00	3.261.550.741,00	236.005.000,00	9.484.126.141,00	(353.236.277,00)	96,28
		5.707.910.974,00	3.187.721.050,00	235.257.840,00	9.130.889.864,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 07	Penyedlaan Jasa Adminlstrasi Keuangan	276.480.000,00	0,00	0,00	276.480.000,00	(25.436.250,00)	90,80
		251.043.750,00	0,00	0,00	251.043.750,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung AdministrasiTeknis Perkantoran	5.699.240.400,00	84.800.000,00	0,00	5.784.040.400,00	(253.173.176,00)	95,62
		5.449.667.224,00	81.200.000,00	0,00	5.530.867.224,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	10.850.000,00	3.176.750.741,00	236.005.000,00	3.423.605.741,00	(74.626.851,00)	97,82
		7.200.000,00	3.106.521.050,00	235.257.840,00	3.348.978.890,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	39.450.000,00	461.682.751,00	1.509.633.288,00	2.010.766.039,00	(891.226.674,00)	55,68
		38.800.000,00	349.663.077,00	731.076.288,00	1.119.539.365,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 11	Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	39.450.000,00	461.682.751,00	1.509.633.288,00	2.010.766.039,00	(891.226.674,00)	55,68
		38.800.000,00	349.663.077,00	731.076.288,00	1.119.539.365,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	9.000.000,00	8.545.000,00	280.746.000,00	298.291.000,00	(7.263.000,00)	97,57
		2.525.000,00	7.857.000,00	280.646.000,00	291.028.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 16	Pembangunan Prasana dan Fasilitas Perhubungan Darat	9.000.000,00	8.545.000,00	280.746.000,00	298.291.000,00	(7.263.000,00)	97,57
		2.525.000,00	7.857.000,00	280.646.000,00	291.028.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	14.000.000,00	552.028.000,00	2.980.338.849,00	3.546.366.849,00	(15.925.449,00)	99,55
		10.550.000,00	545.605.000,00	2.974.286.400,00	3.530.441.400,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	9.600.000,00	54.275.000,00	2.980.338.849,00	3.044.213.849,00	(7.681.449,00)	99,75
		9.000.000,00	53.246.000,00	2.974.286.400,00	3.036.532.400,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 05	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Darat	1.450.000,00	199.300.000,00	0,00	200.750.000,00	(4.295.000,00)	97,86
		850.000,00	195.605.000,00	0,00	196.455.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 06	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas Laut	2.950.000,00	298.453.000,00	0,00	301.403.000,00	(3.949.000,00)	98,69
		700.000,00	296.754.000,00	0,00	297.454.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17	<b>Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	17.850.000,00	57.245.000,00	4.599.543.935,00	4.674.638.935,00	(280.268.091,00)	94,00
		11.250.000,00	52.760.589,00	4.330.360.255,00	4.394.370.844,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 12	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan (DAK)	17.850.000,00	57.245.000,00	4.599.543.935,00	4.674.638.935,00	(280.268.091,00)	94,00
		11.250.000,00	52.760.589,00	4.330.360.255,00	4.394.370.844,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>	49.975.000,00	423.945.000,00	8.871.226.937,29	9.345.146.937,29	(63.818.102,29)	99,32
		49.975.000,00	423.602.300,00	8.807.751.535,00	9.281.328.835,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 04	Pembangunan Pelabuhan	49.975.000,00	423.945.000,00	8.871.226.937,29	9.345.146.937,29	(63.818.102,29)	99,32
		49.975.000,00	423.602.300,00	8.807.751.535,00	9.281.328.835,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19	<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>	36.950.000,00	461.320.000,00	4.559.191.884,00	5.057.461.884,00	(80.808.953,00)	98,40
		26.375.000,00	402.082.047,00	4.548.195.884,00	4.976.652.931,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 01	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	7.875.000,00	73.625.000,00	997.551.000,00	1.079.051.000,00	(10.784.500,00)	99,00
		5.575.000,00	66.331.500,00	996.360.000,00	1.068.266.500,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 04	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	13.950.000,00	110.750.000,00	1.259.033.117,00	1.383.733.117,00	(9.270.500,00)	99,33
		8.950.000,00	106.663.500,00	1.258.849.117,00	1.374.462.617,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 05	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	9.425.000,00	201.090.000,00	1.714.795.767,00	1.925.310.767,00	(21.354.053,00)	98,89
		9.125.000,00	189.656.947,00	1.705.174.767,00	1.903.956.714,00		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 06	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guadrail)	5.700.000,00	75.855.000,00	587.812.000,00	669.367.000,00	(39.399.900,00)	94,11
		2.725.000,00	39.430.100,00	587.812.000,00	629.967.100,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.10	Komunikasi dan Informatika	1.428.207.500,00	9.566.825.217,00	1.632.695.485,00	12.627.728.202,00	(436.572.735,00)	96,54
		1.359.361.849,00	9.220.356.975,00	1.611.436.643,00	12.191.155.467,00		
2.10 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	1.252.657.500,00	5.334.838.217,00	1.620.695.485,00	8.208.191.202,00	(311.937.073,00)	96,20
		1.193.411.849,00	5.103.340.637,00	1.599.501.643,00	7.896.254.129,00		
2.10 . 2.10.01 . 01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	1.252.657.500,00	5.334.838.217,00	1.620.695.485,00	8.208.191.202,00	(311.937.073,00)	96,20
		1.193.411.849,00	5.103.340.637,00	1.599.501.643,00	7.896.254.129,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	816.150.000,00	980.349.372,00	445.710.485,00	2.242.209.857,00	(99.170.276,00)	95,58
		781.786.849,00	920.304.327,00	440.948.405,00	2.143.039.581,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	120.900.000,00	0,00	0,00	120.900.000,00	(3.600.000,00)	97,02
		117.300.000,00	0,00	0,00	117.300.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	687.750.000,00	0,00	0,00	687.750.000,00	(30.763.151,00)	95,53
		656.986.849,00	0,00	0,00	656.986.849,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	7.500.000,00	980.349.372,00	445.710.485,00	1.433.559.857,00	(64.807.125,00)	95,48
		7.500.000,00	920.304.327,00	440.948.405,00	1.368.752.732,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15	Program Pelayanan Informasi Publik	296.557.500,00	283.926.160,00	0,00	580.483.660,00	(24.500.881,00)	95,78
		276.400.000,00	279.582.779,00	0,00	555.982.779,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 17	Monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID)	296.557.500,00	283.926.160,00	0,00	580.483.660,00	(24.500.881,00)	95,78
		276.400.000,00	279.582.779,00	0,00	555.982.779,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	2.625.000,00	482.368.485,00	6.000.000,00	490.993.485,00	(39.249.442,00)	92,01
		2.625.000,00	443.344.043,00	5.775.000,00	451.744.043,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	2.100.000,00	319.418.485,00	0,00	321.518.485,00	(33.997.090,00)	89,43
		2.100.000,00	285.421.395,00	0,00	287.521.395,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 02	Sosialisasi Internet Sehat	525.000,00	162.950.000,00	6.000.000,00	169.475.000,00	(5.252.352,00)	96,90
		525.000,00	157.922.648,00	5.775.000,00	164.222.648,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	47.175.000,00	2.642.764.200,00	0,00	2.689.939.200,00	(19.933.289,00)	99,26
		46.800.000,00	2.623.205.911,00	0,00	2.670.005.911,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 06	Sewa Dedicated Website dan Email Server	43.250.000,00	119.000.000,00	0,00	162.250.000,00	(12.857.418,00)	92,08
		43.250.000,00	106.142.582,00	0,00	149.392.582,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 13	sewa bandwidth	3.925.000,00	2.523.764.200,00	0,00	2.527.689.200,00	(7.075.871,00)	99,72
		3.550.000,00	2.517.063.329,00	0,00	2.520.613.329,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20	<i>Program Pengembangan dan Perluasan Jaringan Teknologi Komunikasi dan Informasi</i>	19.575.000,00	588.640.000,00	1.163.985.000,00	1.772.200.000,00	(88.776.288,00)	94,99
		15.225.000,00	520.260.474,00	1.147.938.238,00	1.683.423.712,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 01	Peningkatan Akses Telekomunikasi	2.100.000,00	214.300.000,00	0,00	216.400.000,00	(47.656.658,00)	77,98
		2.100.000,00	166.643.342,00	0,00	168.743.342,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 03	Kegiatan Pengembangan Jaringan Internet Perkantoran Pemerintah Daerah	17.475.000,00	374.340.000,00	1.163.985.000,00	1.555.800.000,00	(41.119.630,00)	97,36
		13.125.000,00	353.617.132,00	1.147.938.238,00	1.514.680.370,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 21	<i>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</i>	70.575.000,00	356.790.000,00	5.000.000,00	432.365.000,00	(40.306.897,00)	90,68
		70.575.000,00	316.643.103,00	4.840.000,00	392.058.103,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 21 . 02	Diseminasi Informasi	525.000,00	195.440.000,00	5.000.000,00	200.965.000,00	(15.079.897,00)	92,50
		525.000,00	180.520.103,00	4.840.000,00	185.885.103,00		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 21 . 16	Pemeliharaan Local Area Network (LAN) SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	70.050.000,00	161.350.000,00	0,00	231.400.000,00	(25.227.000,00)	89,10
		70.050.000,00	136.123.000,00	0,00	206.173.000,00		
2.10 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	175.550.000,00	4.231.987.000,00	12.000.000,00	4.419.537.000,00	(124.635.662,00)	97,18
		165.950.000,00	4.117.016.338,00	11.935.000,00	4.294.901.338,00		
2.10 . 4.01.03 . 06	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	175.550.000,00	402.720.000,00	12.000.000,00	590.270.000,00	(18.163.602,00)	96,92
		165.950.000,00	394.221.398,00	11.935.000,00	572.106.398,00		
2.10 . 4.01.03 . 06 . 17	<i>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</i>	175.550.000,00	402.720.000,00	12.000.000,00	590.270.000,00	(18.163.602,00)	96,92
		165.950.000,00	394.221.398,00	11.935.000,00	572.106.398,00		
2.10 . 4.01.03 . 06 . 17 . 01	Peningkatan Sarana Penunjang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	175.550.000,00	402.720.000,00	12.000.000,00	590.270.000,00	(18.163.602,00)	96,92
		165.950.000,00	394.221.398,00	11.935.000,00	572.106.398,00		
2.10 . 4.01.03 . 09	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	0,00	3.829.267.000,00	0,00	3.829.267.000,00	(106.472.060,00)	97,22
		0,00	3.722.794.940,00	0,00	3.722.794.940,00		
2.10 . 4.01.03 . 09 . 18	<i>Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa</i>	0,00	3.829.267.000,00	0,00	3.829.267.000,00	(106.472.060,00)	97,22
		0,00	3.722.794.940,00	0,00	3.722.794.940,00		
2.10 . 4.01.03 . 09 . 18 . 04	Media Center Pemerintah KKA	0,00	3.829.267.000,00	0,00	3.829.267.000,00	(106.472.060,00)	97,22
		0,00	3.722.794.940,00	0,00	3.722.794.940,00		
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.419.690.000,00	1.739.534.500,00	621.524.500,00	3.780.749.000,00	(130.150.255,00)	96,56
		1.350.816.909,00	1.681.106.136,00	618.675.700,00	3.650.598.745,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.11 . 2.11.01	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1.419.690.000,00	1.739.534.500,00	621.524.500,00	3.780.749.000,00	(130.150.255,00)	96,56
		1.350.816.909,00	1.681.106.136,00	618.675.700,00	3.650.598.745,00		
2.11 . 2.11.01 . 01	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1.419.690.000,00	1.739.534.500,00	621.524.500,00	3.780.749.000,00	(130.150.255,00)	96,56
		1.350.816.909,00	1.681.106.136,00	618.675.700,00	3.650.598.745,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.414.830.000,00	1.074.773.000,00	621.524.500,00	3.111.127.500,00	(80.913.486,00)	97,40
		1.346.131.909,00	1.065.406.405,00	618.675.700,00	3.030.214.014,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	198.990.000,00	0,00	0,00	198.990.000,00	(1.620.000,00)	99,19
		197.370.000,00	0,00	0,00	197.370.000,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrator/Teknis Perkantoran	1.211.490.000,00	0,00	0,00	1.211.490.000,00	(67.078.091,00)	94,46
		1.144.411.909,00	0,00	0,00	1.144.411.909,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	4.350.000,00	1.074.773.000,00	621.524.500,00	1.700.647.500,00	(12.215.395,00)	99,28
		4.350.000,00	1.065.406.405,00	618.675.700,00	1.688.432.105,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 15	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif	0,00	173.950.000,00	0,00	173.950.000,00	(435.269,00)	99,75
		0,00	173.514.731,00	0,00	173.514.731,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 . 14	Survei, Verifikasi, Penyaluran, Pendampingan dan Penagihan Dana Bergulir	0,00	173.950.000,00	0,00	173.950.000,00	(435.269,00)	99,75
		0,00	173.514.731,00	0,00	173.514.731,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	4.860.000,00	490.811.500,00	0,00	495.671.500,00	(48.801.500,00)	90,15
		4.685.000,00	442.185.000,00	0,00	446.870.000,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 09	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	2.692.500,00	266.682.000,00	0,00	269.374.500,00	(30.565.020,00)	88,65
		2.517.500,00	236.291.980,00	0,00	238.809.480,00		
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 16	Penataan dan Pembinaan Koperasi	2.167.500,00	224.129.500,00	0,00	226.297.000,00	(18.236.480,00)	91,94
		2.167.500,00	205.893.020,00	0,00	208.060.520,00		
2.12	Penanaman Modal	1.042.180.000,00	978.160.000,00	136.878.400,00	2.157.218.400,00	(17.400.798,00)	99,19
		1.029.091.368,00	973.986.334,00	136.739.900,00	2.139.817.602,00		
2.12 . 2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	1.042.180.000,00	978.160.000,00	136.878.400,00	2.157.218.400,00	(17.400.798,00)	99,19
		1.029.091.368,00	973.986.334,00	136.739.900,00	2.139.817.602,00		
2.12 . 2.12.01 . 01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	1.042.180.000,00	978.160.000,00	136.878.400,00	2.157.218.400,00	(17.400.798,00)	99,19
		1.029.091.368,00	973.986.334,00	136.739.900,00	2.139.817.602,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	879.930.000,00	739.510.000,00	136.878.400,00	1.756.318.400,00	(15.302.299,00)	99,13
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	868.066.368,00	736.209.833,00	136.739.900,00	1.741.016.101,00	(8.720.000,00)	89,77
		85.200.000,00	0,00	0,00	85.200.000,00		
		76.480.000,00	0,00	0,00	76.480.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	781.830.000,00	0,00	0,00	781.830.000,00	(3.143.632,00)	99,60
		778.686.368,00	0,00	0,00	778.686.368,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	12.900.000,00	739.510.000,00	136.878.400,00	889.288.400,00	(3.438.667,00)	99,61
		12.900.000,00	736.209.833,00	136.739.900,00	885.849.733,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	44.850.000,00	75.150.000,00	0,00	120.000.000,00	(724.171,00)	99,40
		44.350.000,00	74.925.829,00	0,00	119.275.829,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 14	Pengembangan Kerjasama Promosi dan Investasi	44.850.000,00	75.150.000,00	0,00	120.000.000,00	(724.171,00)	99,40
		44.350.000,00	74.925.829,00	0,00	119.275.829,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	117.400.000,00	163.500.000,00	0,00	280.900.000,00	(1.374.328,00)	99,51
		116.675.000,00	162.850.672,00	0,00	279.525.672,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 13	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	107.400.000,00	98.500.000,00	0,00	205.900.000,00	(830.193,00)	99,60
		106.925.000,00	98.144.807,00	0,00	205.069.807,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 20	Pengendalian dan pengawasan penanaman Modal dan Perizinan	10.000.000,00	65.000.000,00	0,00	75.000.000,00	(544.135,00)	99,27
		9.750.000,00	64.705.865,00	0,00	74.455.865,00		
2.13	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	234.927.000,00	11.639.041.500,00	2.460.250.000,00	14.334.218.500,00	(3.351.921.482,00)	76,62
		219.402.000,00	8.373.411.231,00	2.389.483.787,00	10.982.297.018,00		
2.13 . 1.01.01	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	234.927.000,00	11.639.041.500,00	2.460.250.000,00	14.334.218.500,00	(3.351.921.482,00)	76,62
		219.402.000,00	8.373.411.231,00	2.389.483.787,00	10.982.297.018,00		
2.13 . 1.01.01 . 01	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	234.927.000,00	11.639.041.500,00	2.460.250.000,00	14.334.218.500,00	(3.351.921.482,00)	76,62
		219.402.000,00	8.373.411.231,00	2.389.483.787,00	10.982.297.018,00		
2.13 . 1.01.01 . 01 . 15	<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>	141.925.000,00	2.300.751.000,00	60.000.000,00	2.502.676.000,00	(129.714.150,00)	94,82
		138.975.000,00	2.174.586.850,00	59.400.000,00	2.372.961.850,00		
2.13 . 1.01.01 . 01 . 15 . 02	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	111.725.000,00	1.303.951.000,00	0,00	1.415.676.000,00	(48.220.938,00)	96,59
		110.375.000,00	1.257.080.062,00	0,00	1.367.455.062,00		
2.13 . 1.01.01 . 01 . 15 . 15	Pengembangan Kapasitas Anggota Gerakan Pramuka	30.200.000,00	996.800.000,00	60.000.000,00	1.087.000.000,00	(81.493.212,00)	92,50
		28.600.000,00	917.506.788,00	59.400.000,00	1.005.506.788,00		



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.13 . 1.01.01 . 01 . 16	<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga</b>	24.352.000,00	1.234.853.000,00	0,00	1.259.205.000,00	(14.667.569,00)	98,84
		21.652.000,00	1.222.885.431,00	0,00	1.244.537.431,00		
2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 06	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	6.693.000,00	502.012.000,00	0,00	508.705.000,00	(3.933.801,00)	99,23
		6.393.000,00	498.378.199,00	0,00	504.771.199,00		
2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 13	Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga	4.650.000,00	195.350.000,00	0,00	200.000.000,00	(7.261.268,00)	96,37
		4.550.000,00	188.188.732,00	0,00	192.738.732,00		
2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 14	Pembinaan Olahraga	7.809.000,00	242.691.000,00	0,00	250.500.000,00	(1.488.600,00)	99,41
		7.009.000,00	242.002.400,00	0,00	249.011.400,00		
2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 19	Pengiriman Atlet Daerah	5.200.000,00	294.800.000,00	0,00	300.000.000,00	(1.983.900,00)	99,34
		3.700.000,00	294.316.100,00	0,00	298.016.100,00		
2.13 . 1.01.01 . 01 . 17	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga</b>	48.675.000,00	7.871.881.500,00	2.400.250.000,00	10.320.806.500,00	(3.169.813.713,00)	69,29
		38.800.000,00	4.782.109.000,00	2.330.083.787,00	7.150.992.787,00		
2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 . 02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	48.675.000,00	7.871.881.500,00	2.400.250.000,00	10.320.806.500,00	(3.169.813.713,00)	69,29
		38.800.000,00	4.782.109.000,00	2.330.083.787,00	7.150.992.787,00		
2.13 . 1.01.01 . 01 . 18	<b>Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba</b>	19.975.000,00	231.556.000,00	0,00	251.531.000,00	(37.726.050,00)	85,00
		19.975.000,00	193.829.950,00	0,00	213.804.950,00		
2.13 . 1.01.01 . 01 . 18 . 02	Penyuluhan Tentang Penyalahgunaan NAPZA dan Pergaulan Bebas Dikalangan Remaja	19.975.000,00	231.556.000,00	0,00	251.531.000,00	(37.726.050,00)	85,00
		19.975.000,00	193.829.950,00	0,00	213.804.950,00		
2.14	<b>Statistik</b>	81.945.000,00	170.808.655,00	0,00	252.753.655,00	(13.140.093,00)	94,80
		78.745.000,00	160.868.562,00	0,00	239.613.562,00		
2.14 . 2.10.01	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK</b>	81.945.000,00	170.808.655,00	0,00	252.753.655,00	(13.140.093,00)	94,80
		78.745.000,00	160.868.562,00	0,00	239.613.562,00		
2.14 . 2.10.01 . 01	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK</b>	81.945.000,00	170.808.655,00	0,00	252.753.655,00	(13.140.093,00)	94,80
		78.745.000,00	160.868.562,00	0,00	239.613.562,00		
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15	<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>	81.945.000,00	170.808.655,00	0,00	252.753.655,00	(13.140.093,00)	94,80
		78.745.000,00	160.868.562,00	0,00	239.613.562,00		
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 10	Pengolahan, Updating, dan Analisis Data Statistik Daerah	81.945.000,00	170.808.655,00	0,00	252.753.655,00	(13.140.093,00)	94,80
		78.745.000,00	160.868.562,00	0,00	239.613.562,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.15	Persandian	14.850.000,00	144.900.000,00	0,00	159.750.000,00	(5.909.972,00)	96,30
		9.350.000,00	144.490.028,00	0,00	153.840.028,00		
2.15 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	14.850.000,00	144.900.000,00	0,00	159.750.000,00	(5.909.972,00)	96,30
		9.350.000,00	144.490.028,00	0,00	153.840.028,00		
2.15 . 2.10.01 . 01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	14.850.000,00	144.900.000,00	0,00	159.750.000,00	(5.909.972,00)	96,30
		9.350.000,00	144.490.028,00	0,00	153.840.028,00		
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	14.850.000,00	144.900.000,00	0,00	159.750.000,00	(5.909.972,00)	96,30
		9.350.000,00	144.490.028,00	0,00	153.840.028,00		
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 01	Pengadaan Sarana Pendukung Operasional Sandi dan Telekomunikasi	14.850.000,00	144.900.000,00	0,00	159.750.000,00	(5.909.972,00)	96,30
		9.350.000,00	144.490.028,00	0,00	153.840.028,00		
2.16	Kebudayaan	30.500.000,00	2.175.765.940,00	64.000.000,00	2.270.265.940,00	(116.816.047,00)	94,85
		26.950.000,00	2.126.499.893,00	0,00	2.153.449.893,00		
2.16 . 3.02.01	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	30.500.000,00	2.175.765.940,00	64.000.000,00	2.270.265.940,00	(116.816.047,00)	94,85
		26.950.000,00	2.126.499.893,00	0,00	2.153.449.893,00		
2.16 . 3.02.01 . 01	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	30.500.000,00	2.175.765.940,00	64.000.000,00	2.270.265.940,00	(116.816.047,00)	94,85
		26.950.000,00	2.126.499.893,00	0,00	2.153.449.893,00		
2.16 . 3.02.01 . 01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	14.950.000,00	685.839.500,00	0,00	700.789.500,00	(4.547.267,00)	99,35
		14.950.000,00	681.292.233,00	0,00	696.242.233,00		
2.16 . 3.02.01 . 01 . 15 . 06	Semarak Anambas	14.950.000,00	685.839.500,00	0,00	700.789.500,00	(4.547.267,00)	99,35
		14.950.000,00	681.292.233,00	0,00	696.242.233,00		
2.16 . 3.02.01 . 01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	15.550.000,00	1.489.926.440,00	64.000.000,00	1.569.476.440,00	(112.268.780,00)	92,85
		12.000.000,00	1.445.207.660,00	0,00	1.457.207.660,00		
2.16 . 3.02.01 . 01 . 17 . 01	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	15.550.000,00	1.489.926.440,00	64.000.000,00	1.569.476.440,00	(112.268.780,00)	92,85
		12.000.000,00	1.445.207.660,00	0,00	1.457.207.660,00		
2.17	Perpustakaan	8.750.000,00	312.650.000,00	25.000.000,00	346.400.000,00	(997.379,00)	99,71
		8.750.000,00	311.654.021,00	24.998.600,00	345.402.621,00		
2.17 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	8.750.000,00	312.650.000,00	25.000.000,00	346.400.000,00	(997.379,00)	99,71
		8.750.000,00	311.654.021,00	24.998.600,00	345.402.621,00		
2.17 . 4.01.03 . 08	BAGIAN ORGANISASI PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI	8.750.000,00	312.650.000,00	25.000.000,00	346.400.000,00	(997.379,00)	99,71
		8.750.000,00	311.654.021,00	24.998.600,00	345.402.621,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.17 . 4.01.03 . 08 . 15	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	8.750.000,00	312.650.000,00	25.000.000,00	346.400.000,00	(997.379,00)	99,71
		8.750.000,00	311.654.021,00	24.998.600,00	345.402.621,00		
2.17 . 4.01.03 . 08 . 15 . 01	Penyediaan dan Pengelolaan Perpustakaan Daerah	8.750.000,00	312.650.000,00	25.000.000,00	346.400.000,00	(997.379,00)	99,71
		8.750.000,00	311.654.021,00	24.998.600,00	345.402.621,00		
2.18	<b>Kearsipan</b>	0,00	81.500.000,00	0,00	81.500.000,00	(275.451,00)	99,66
		0,00	81.224.549,00	0,00	81.224.549,00		
2.18 . 4.01.03	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	0,00	81.500.000,00	0,00	81.500.000,00	(275.451,00)	99,66
		0,00	81.224.549,00	0,00	81.224.549,00		
2.18 . 4.01.03 . 08	<b>BAGIAN ORGANISASI PERPUSTAKAAN DAN Kearsipan</b>	0,00	81.500.000,00	0,00	81.500.000,00	(275.451,00)	99,66
		0,00	81.224.549,00	0,00	81.224.549,00		
2.18 . 4.01.03 . 08 . 15	<b>Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan</b>	0,00	81.500.000,00	0,00	81.500.000,00	(275.451,00)	99,66
		0,00	81.224.549,00	0,00	81.224.549,00		
2.18 . 4.01.03 . 08 . 15 . 08	Pemanfaatan dan Pengelolaan Arsip Digital	0,00	81.500.000,00	0,00	81.500.000,00	(275.451,00)	99,66
		0,00	81.224.549,00	0,00	81.224.549,00		
3	<b>Urusan Pilihan</b>	5.010.479.000,00	20.074.423.230,00	28.063.055.726,00	53.147.957.956,00	(4.228.284.076,00)	92,04
		4.514.430.160,00	18.433.792.597,00	25.971.451.123,00	48.919.673.880,00		
3.01	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	3.569.790.500,00	9.176.754.760,00	687.173.100,00	13.433.718.360,00	(958.114.877,00)	92,87
		3.313.156.629,00	8.595.647.754,00	566.799.100,00	12.475.603.483,00		
3.01 . 3.01.01	<b>DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN</b>	3.569.790.500,00	9.176.754.760,00	687.173.100,00	13.433.718.360,00	(958.114.877,00)	92,87
		3.313.156.629,00	8.595.647.754,00	566.799.100,00	12.475.603.483,00		
3.01 . 3.01.01 . 01	<b>DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN</b>	3.569.790.500,00	9.176.754.760,00	687.173.100,00	13.433.718.360,00	(958.114.877,00)	92,87
		3.313.156.629,00	8.595.647.754,00	566.799.100,00	12.475.603.483,00		
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	3.439.140.000,00	1.955.973.400,00	141.821.600,00	5.536.935.000,00	(514.640.322,00)	90,71
		3.216.740.129,00	1.669.699.949,00	135.854.600,00	5.022.294.678,00		
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	230.100.000,00	0,00	0,00	230.100.000,00	(12.375.000,00)	94,62
		217.725.000,00	0,00	0,00	217.725.000,00		
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	3.193.890.000,00	0,00	0,00	3.193.890.000,00	(206.299.871,00)	93,54
		2.987.590.129,00	0,00	0,00	2.987.590.129,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	14.200.000,00	1.831.223.400,00	86.821.600,00	1.932.245.000,00	(250.778.451,00)	87,02
		10.675.000,00	1.584.309.949,00	86.481.600,00	1.681.466.549,00		
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 21	Rutinitas Perkantoran UPTD Perikanan, Pertanian Dan Pangan	950.000,00	124.750.000,00	55.000.000,00	180.700.000,00	(45.187.000,00)	74,99
		750.000,00	85.390.000,00	49.373.000,00	135.513.000,00		
3.01 . 3.01.01 . 01 . 15	<b>Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</b>	42.053.500,00	918.616.600,00	31.651.500,00	992.321.600,00	(78.943.881,00)	92,04
		40.753.500,00	841.399.619,00	31.224.600,00	913.377.719,00		
3.01 . 3.01.01 . 01 . 15 . 11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat Pesisir	2.400.000,00	237.450.000,00	0,00	239.850.000,00	(7.290.864,00)	96,96
		2.400.000,00	230.159.136,00	0,00	232.559.136,00		
3.01 . 3.01.01 . 01 . 15 . 12	Pembinaan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan POKDAKAN	7.397.500,00	621.422.600,00	23.651.500,00	652.471.600,00	(60.990.123,00)	90,65
		6.097.500,00	561.732.477,00	23.651.500,00	591.481.477,00		
3.01 . 3.01.01 . 01 . 15 . 13	Pendampingan dan Pengembangan KUB	32.256.000,00	59.744.000,00	8.000.000,00	100.000.000,00	(10.662.894,00)	89,34
		32.256.000,00	49.508.006,00	7.573.100,00	89.337.106,00		
3.01 . 3.01.01 . 01 . 16	<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>	8.950.000,00	1.021.830.000,00	271.700.000,00	1.302.480.000,00	(247.538.127,00)	80,99
		6.300.000,00	890.921.973,00	157.719.900,00	1.054.941.873,00		
3.01 . 3.01.01 . 01 . 16 . 16	Operasional Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT)	3.600.000,00	500.680.000,00	146.700.000,00	650.980.000,00	(53.613.255,00)	91,76
		2.250.000,00	462.064.345,00	133.052.400,00	597.366.745,00		
3.01 . 3.01.01 . 01 . 16 . 28	Pengembangan Budidaya Rumput Laut	5.350.000,00	521.150.000,00	125.000.000,00	651.500.000,00	(193.924.872,00)	70,23
		4.050.000,00	428.857.628,00	24.667.500,00	457.575.128,00		
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17	<b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>	77.697.000,00	5.162.434.760,00	232.000.000,00	5.472.131.760,00	(110.525.347,00)	97,98
		47.413.000,00	5.082.193.413,00	232.000.000,00	5.361.606.413,00		
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 . 02	Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	150.000,00	79.600.000,00	220.000.000,00	299.750.000,00	(1.279.399,00)	99,57
		150.000,00	78.320.601,00	220.000.000,00	298.470.601,00		
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 . 23	Penyediaan Armada Penangkapan Ikan (DAK)	13.600.000,00	2.522.931.960,00	0,00	2.536.531.960,00	(14.312.600,00)	99,44
		2.700.000,00	2.519.519.360,00	0,00	2.522.219.360,00		
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 . 26	Pelayanan Perlindungan Nelayan	45.122.000,00	227.577.800,00	12.000.000,00	284.699.800,00	(31.719.600,00)	88,86
		31.063.000,00	209.917.200,00	12.000.000,00	252.980.200,00		
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 . 31	Penyediaan Armada Penangkapan Ikan	7.200.000,00	678.250.000,00	0,00	685.450.000,00	(17.706.273,00)	97,42
		3.475.000,00	664.268.727,00	0,00	667.743.727,00		
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 . 33	Penyediaan Alat Penangkapan Ikan	3.975.000,00	143.050.000,00	0,00	147.025.000,00	(11.451.100,00)	92,21
		2.875.000,00	132.698.900,00	0,00	135.573.900,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 . 34	Penyediaan Alat Bantu Penangkapan	7.650.000,00	1.511.025.000,00	0,00	1.518.675.000,00	(34.056.375,00)	97,76
		7.150.000,00	1.477.468.625,00	0,00	1.484.618.625,00		
3.01 . 3.01.01 . 01 . 21	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan</b>	1.950.000,00	117.900.000,00	10.000.000,00	129.850.000,00	(6.467.200,00)	95,02
		1.950.000,00	111.432.800,00	10.000.000,00	123.382.800,00		
3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 01	Pelayanan Penerbitan Izin dan Pencatatan Usaha Perikanan	1.950.000,00	117.900.000,00	10.000.000,00	129.850.000,00	(6.467.200,00)	95,02
		1.950.000,00	111.432.800,00	10.000.000,00	123.382.800,00		
3.02	<b>Pariwisata</b>	1.212.907.500,00	5.354.000.470,00	2.214.320.090,00	8.781.228.060,00	(656.229.716,00)	92,53
		1.040.448.531,00	5.205.731.509,00	1.878.818.304,00	8.124.998.344,00		
3.02 . 3.02.01	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>	1.212.907.500,00	5.354.000.470,00	2.214.320.090,00	8.781.228.060,00	(656.229.716,00)	92,53
		1.040.448.531,00	5.205.731.509,00	1.878.818.304,00	8.124.998.344,00		
3.02 . 3.02.01 . 01	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>	1.212.907.500,00	5.354.000.470,00	2.214.320.090,00	8.781.228.060,00	(656.229.716,00)	92,53
		1.040.448.531,00	5.205.731.509,00	1.878.818.304,00	8.124.998.344,00		
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.118.945.000,00	1.700.629.040,00	260.110.570,00	3.079.684.610,00	(188.982.331,00)	93,86
		954.636.031,00	1.676.189.478,00	259.876.770,00	2.890.702.279,00		
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	212.100.000,00	0,00	0,00	212.100.000,00	(79.050.000,00)	62,73
		133.050.000,00	0,00	0,00	133.050.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	897.120.000,00	0,00	0,00	897.120.000,00	(85.258.969,00)	90,50
		811.861.031,00	0,00	0,00	811.861.031,00		
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	9.725.000,00	1.700.629.040,00	260.110.570,00	1.970.464.610,00	(24.673.362,00)	98,75
		9.725.000,00	1.676.189.478,00	259.876.770,00	1.945.791.248,00		
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02	<b>Prog Peningkatan dan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	26.250.000,00	171.800.000,00	449.900.000,00	647.950.000,00	(344.502.041,00)	46,83
		23.250.000,00	114.917.959,00	165.280.000,00	303.447.959,00		
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 11	Pengadaan Tanah Bagi Bidang Pariwisata	26.250.000,00	171.800.000,00	449.900.000,00	647.950.000,00	(344.502.041,00)	46,83
		23.250.000,00	114.917.959,00	165.280.000,00	303.447.959,00		
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	3.637.500,00	1.361.689.500,00	0,00	1.365.327.000,00	(594.524,00)	99,96
		3.637.500,00	1.361.094.976,00	0,00	1.364.732.476,00		
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 10	Festival Padang Melang	3.637.500,00	1.361.689.500,00	0,00	1.365.327.000,00	(594.524,00)	99,96
		3.637.500,00	1.361.094.976,00	0,00	1.364.732.476,00		
3.02 . 3.02.01 . 01 . 16	<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>	34.500.000,00	624.080.000,00	0,00	658.580.000,00	(65.395.800,00)	90,07
		34.500.000,00	558.684.200,00	0,00	593.184.200,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 . 13	Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata (DAK Non Fisik)	34.500.000,00	624.080.000,00	0,00	658.580.000,00	(65.395.800,00)	90,07
		34.500.000,00	558.684.200,00	0,00	593.184.200,00		
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	29.575.000,00	1.495.801.930,00	1.504.309.520,00	3.029.686.450,00	(56.755.020,00)	98,13
		24.425.000,00	1.494.844.896,00	1.453.661.534,00	2.972.931.430,00		
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	14.425.000,00	80.108.000,00	1.504.309.520,00	1.598.842.520,00	(56.323.416,00)	96,48
		9.275.000,00	79.582.570,00	1.453.661.534,00	1.542.519.104,00		
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 16	Penyusunan Masterplan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas	15.150.000,00	1.415.693.930,00	0,00	1.430.843.930,00	(431.604,00)	99,97
		15.150.000,00	1.415.262.326,00	0,00	1.430.412.326,00		
3.03	<b>Pertanian</b>	64.925.000,00	4.168.779.300,00	111.000.000,00	4.344.704.300,00	(889.614.759,00)	79,52
		55.800.000,00	3.294.990.341,00	104.299.200,00	3.455.089.541,00		
3.03 . 3.01.01	<b>DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN</b>	64.925.000,00	4.168.779.300,00	111.000.000,00	4.344.704.300,00	(889.614.759,00)	79,52
		55.800.000,00	3.294.990.341,00	104.299.200,00	3.455.089.541,00		
3.03 . 3.01.01 . 01	<b>DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN</b>	64.925.000,00	4.168.779.300,00	111.000.000,00	4.344.704.300,00	(889.614.759,00)	79,52
		55.800.000,00	3.294.990.341,00	104.299.200,00	3.455.089.541,00		
3.03 . 3.01.01 . 01 . 15	<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</b>	7.800.000,00	2.850.790.700,00	0,00	2.858.590.700,00	(533.710.908,00)	81,33
		4.750.000,00	2.320.129.792,00	0,00	2.324.879.792,00		
3.03 . 3.01.01 . 01 . 15 . 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian/Perkebunan	6.900.000,00	1.673.600.000,00	0,00	1.680.500.000,00	(403.664.790,00)	75,98
		3.850.000,00	1.272.985.210,00	0,00	1.276.835.210,00		
3.03 . 3.01.01 . 01 . 15 . 16	Penyedlaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK)	0,00	849.845.700,00	0,00	849.845.700,00	(16.728.000,00)	98,03
		0,00	833.117.700,00	0,00	833.117.700,00		
3.03 . 3.01.01 . 01 . 15 . 20	Pengembangan Pertanian Areal Tanam Padi Sawah (Cetak Sawah)	0,00	45.135.028,00	0,00	45.135.028,00	0,00	100,00
		0,00	45.135.028,00	0,00	45.135.028,00		
3.03 . 3.01.01 . 01 . 15 . 21	Pengembangan Pertanian Areal Tanam Padi Sawah (Optimasi)	900.000,00	282.209.972,00	0,00	283.109.972,00	(113.318.118,00)	59,97
		900.000,00	168.891.854,00	0,00	169.791.854,00		
3.03 . 3.01.01 . 01 . 17	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>	11.550.000,00	73.300.000,00	0,00	84.850.000,00	(500.450,00)	99,41
		11.550.000,00	72.799.550,00	0,00	84.349.550,00		
3.03 . 3.01.01 . 01 . 17 . 07	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	11.550.000,00	73.300.000,00	0,00	84.850.000,00	(500.450,00)	99,41
		11.550.000,00	72.799.550,00	0,00	84.349.550,00		
3.03 . 3.01.01 . 01 . 18	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</b>	20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	50.000.000,00	(1.000,00)	100,00
		20.000.000,00	29.999.000,00	0,00	49.999.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
3.03 . 3.01.01 . 01 . 18 . 02	Pendampingan dan Pelaksanaan Inseminasi Buatan	20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	50.000.000,00	(1.000,00)	100,00
		20.000.000,00	29.999.000,00	0,00	49.999.000,00		
3.03 . 3.01.01 . 01 . 19	<b>Program Pemeberdayaan penyuluhan Pertanian, Perkebunan Iapangan</b>	25.575.000,00	1.214.688.600,00	111.000.000,00	1.351.263.600,00	(355.402.401,00)	73,70
		19.500.000,00	872.061.999,00	104.299.200,00	995.861.199,00		
3.03 . 3.01.01 . 01 . 19 . 04	Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian dan Perkebunan	25.575.000,00	1.214.688.600,00	111.000.000,00	1.351.263.600,00	(355.402.401,00)	73,70
		19.500.000,00	872.061.999,00	104.299.200,00	995.861.199,00		
3.06	<b>Perdagangan</b>	76.081.000,00	886.586.500,00	12.011.582.409,00	12.974.249.909,00	(340.124.796,00)	97,38
		24.700.000,00	860.007.598,00	11.749.417.515,00	12.634.125.113,00		
3.06 . 2.11.01	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>	76.081.000,00	886.586.500,00	12.011.582.409,00	12.974.249.909,00	(340.124.796,00)	97,38
		24.700.000,00	860.007.598,00	11.749.417.515,00	12.634.125.113,00		
3.06 . 2.11.01 . 01	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>	76.081.000,00	886.586.500,00	12.011.582.409,00	12.974.249.909,00	(340.124.796,00)	97,38
		24.700.000,00	860.007.598,00	11.749.417.515,00	12.634.125.113,00		
3.06 . 2.11.01 . 01 . 15	<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>	12.150.000,00	355.205.000,00	1.523.737.125,00	1.891.092.125,00	(20.773.054,00)	98,90
		5.350.000,00	352.468.313,00	1.512.500.758,00	1.870.319.071,00		
3.06 . 2.11.01 . 01 . 15 . 11	Pengendalian dan Pengawasan Retribusi Pasar	650.000,00	75.550.000,00	136.000.000,00	212.200.000,00	(1.044.200,00)	99,51
		650.000,00	74.864.800,00	135.641.000,00	211.155.800,00		
3.06 . 2.11.01 . 01 . 15 . 17	Penyediaan Sarana Dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal (DAK)	11.500.000,00	59.500.000,00	1.387.737.125,00	1.458.737.125,00	(17.732.069,00)	98,78
		4.700.000,00	59.445.298,00	1.376.859.758,00	1.441.005.056,00		
3.06 . 2.11.01 . 01 . 15 . 18	Monitoring Barang Beredar dan Stabilisasi Harga	0,00	220.155.000,00	0,00	220.155.000,00	(1.996.785,00)	99,09
		0,00	218.158.215,00	0,00	218.158.215,00		
3.06 . 2.11.01 . 01 . 17	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>	63.931.000,00	531.381.500,00	10.487.845.284,00	11.083.157.784,00	(319.351.742,00)	97,12
		19.350.000,00	507.539.285,00	10.236.916.757,00	10.763.806.042,00		
3.06 . 2.11.01 . 01 . 17 . 15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional (DAK)	9.300.000,00	45.699.700,00	1.793.467.738,00	1.848.467.438,00	(14.489.204,00)	99,22
		2.950.000,00	45.392.197,00	1.785.636.037,00	1.833.978.234,00		
3.06 . 2.11.01 . 01 . 17 . 32	Pembangunan Gudang Non SRG (Silpa DAK)	22.720.000,00	55.676.000,00	5.120.000.000,00	5.198.396.000,00	(258.773.847,00)	95,02
		10.500.000,00	51.169.152,00	4.877.953.001,00	4.939.622.153,00		
3.06 . 2.11.01 . 01 . 17 . 36	Kajian Sistem Logistik Daerah	18.536.000,00	363.449.000,00	0,00	381.985.000,00	(34.290.261,00)	91,02
		0,00	347.694.739,00	0,00	347.694.739,00		
3.06 . 2.11.01 . 01 . 17 . 37	Pembangunan Sarana Parkir Pasar Ikan Suka Ramai	2.325.000,00	10.300.000,00	147.717.000,00	160.342.000,00	(1.354.000,00)	99,16
		1.600.000,00	9.671.000,00	147.717.000,00	158.988.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
3.06 . 2.11.01 . 01 . 17 . 38	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional	11.050.000,00	56.256.800,00	3.426.660.546,00	3.493.967.346,00	(10.444.430,00)	99,70
		4.300.000,00	53.612.197,00	3.425.610.719,00	3.483.522.916,00		
3.07	Perindustrian	50.525.000,00	376.552.200,00	13.038.980.127,00	13.466.057.327,00	(1.383.383.728,00)	89,73
		44.875.000,00	365.681.595,00	11.672.117.004,00	12.082.673.599,00		
3.07 . 2.11.01	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	50.525.000,00	376.552.200,00	13.038.980.127,00	13.466.057.327,00	(1.383.383.728,00)	89,73
		44.875.000,00	365.681.595,00	11.672.117.004,00	12.082.673.599,00		
3.07 . 2.11.01 . 01	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	50.525.000,00	376.552.200,00	13.038.980.127,00	13.466.057.327,00	(1.383.383.728,00)	89,73
		44.875.000,00	365.681.595,00	11.672.117.004,00	12.082.673.599,00		
3.07 . 2.11.01 . 01 . 16	Program Pengembangan Perwilayahan Industri	50.525.000,00	376.552.200,00	13.038.980.127,00	13.466.057.327,00	(1.383.383.728,00)	89,73
		44.875.000,00	365.681.595,00	11.672.117.004,00	12.082.673.599,00		
3.07 . 2.11.01 . 01 . 16 . 10	Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas (DAK)	39.875.000,00	276.125.000,00	13.038.980.127,00	13.354.980.127,00	(1.383.155.828,00)	89,64
		34.375.000,00	265.332.295,00	11.672.117.004,00	11.971.824.299,00		
3.07 . 2.11.01 . 01 . 16 . 11	Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	10.650.000,00	100.427.200,00	0,00	111.077.200,00	(227.900,00)	99,79
		10.500.000,00	100.349.300,00	0,00	110.849.300,00		
3.08	Transmigrasi	36.250.000,00	111.750.000,00	0,00	148.000.000,00	(816.200,00)	99,45
		35.450.000,00	111.733.800,00	0,00	147.183.800,00		
3.08 . 2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	36.250.000,00	111.750.000,00	0,00	148.000.000,00	(816.200,00)	99,45
		35.450.000,00	111.733.800,00	0,00	147.183.800,00		
3.08 . 2.12.01 . 01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	36.250.000,00	111.750.000,00	0,00	148.000.000,00	(816.200,00)	99,45
		35.450.000,00	111.733.800,00	0,00	147.183.800,00		
3.08 . 2.12.01 . 01 . 15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	36.250.000,00	111.750.000,00	0,00	148.000.000,00	(816.200,00)	99,45
		35.450.000,00	111.733.800,00	0,00	147.183.800,00		
3.08 . 2.12.01 . 01 . 15 . 09	Indentifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	36.250.000,00	111.750.000,00	0,00	148.000.000,00	(816.200,00)	99,45
		35.450.000,00	111.733.800,00	0,00	147.183.800,00		
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	28.403.442.266,00	79.018.797.097,24	11.061.508.963,00	118.483.748.326,24	(7.220.926.674,84)	93,91
		27.051.820.573,00	73.453.083.056,40	10.757.918.022,00	111.262.821.651,40		
4.01	Administrasi Pemerintahan	17.425.718.598,00	54.715.054.831,00	9.589.409.463,00	81.730.182.892,00	(5.032.235.886,00)	93,84
		16.872.225.226,00	50.483.429.743,00	9.342.292.037,00	76.697.947.006,00		



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	8.666.183.698,00	25.011.884.501,00	5.917.128.880,00	39.595.197.079,00	(1.556.475.315,00)	96,07
		8.394.553.494,00	23.816.939.858,00	5.827.228.412,00	38.038.721.764,00		
4.01 . 4.01.03 . 01	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM	238.125.000,00	434.250.000,00	0,00	672.375.000,00	(14.624.572,00)	97,82
		228.125.000,00	429.625.428,00	0,00	657.750.428,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	14.250.000,00	188.250.000,00	0,00	202.500.000,00	(2.025.853,00)	99,00
		14.250.000,00	186.224.147,00	0,00	200.474.147,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 05	Pembinaan, Pengawasan dan Peningkatan Administrasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	14.250.000,00	188.250.000,00	0,00	202.500.000,00	(2.025.853,00)	99,00
		14.250.000,00	186.224.147,00	0,00	200.474.147,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	223.875.000,00	246.000.000,00	0,00	469.875.000,00	(12.598.719,00)	97,32
		213.875.000,00	243.401.281,00	0,00	457.276.281,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 02	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	223.875.000,00	246.000.000,00	0,00	469.875.000,00	(12.598.719,00)	97,32
		213.875.000,00	243.401.281,00	0,00	457.276.281,00		
4.01 . 4.01.03 . 03	BAGIAN HUKUM	299.250.000,00	881.070.000,00	0,00	1.180.320.000,00	(1.359.200,00)	99,88
		299.250.000,00	879.710.800,00	0,00	1.178.960.800,00		
4.01 . 4.01.03 . 03 . 19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	299.250.000,00	881.070.000,00	0,00	1.180.320.000,00	(1.359.200,00)	99,88
		299.250.000,00	879.710.800,00	0,00	1.178.960.800,00		
4.01 . 4.01.03 . 03 . 19 . 01	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	120.000.000,00	122.200.000,00	0,00	242.200.000,00	(124.249,00)	99,95
		120.000.000,00	122.075.751,00	0,00	242.075.751,00		
4.01 . 4.01.03 . 03 . 19 . 03	Ligitasi dan non Litigasi	64.350.000,00	588.400.000,00	0,00	652.750.000,00	(1.210.388,00)	99,81
		64.350.000,00	587.189.612,00	0,00	651.539.612,00		
4.01 . 4.01.03 . 03 . 19 . 06	Penyusunan Produk Hukum Kepala daerah	114.900.000,00	170.470.000,00	0,00	285.370.000,00	(24.563,00)	99,99
		114.900.000,00	170.445.437,00	0,00	285.345.437,00		
4.01 . 4.01.03 . 04	BAGIAN BINA EKONOMI, INFRASTRUKTUR, SUMBER DAYA ALAM DAN ADMINISTRASI	0,00	582.650.000,00	0,00	582.650.000,00	(119.377.203,00)	79,51
		0,00	463.272.797,00	0,00	463.272.797,00		
4.01 . 4.01.03 . 04 . 07	Program Perencanaan Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan	0,00	582.650.000,00	0,00	582.650.000,00	(119.377.203,00)	79,51
		0,00	463.272.797,00	0,00	463.272.797,00		
4.01 . 4.01.03 . 04 . 07 . 08	Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Ekonomi	0,00	85.500.000,00	0,00	85.500.000,00	(4.666.500,00)	94,54
		0,00	80.833.500,00	0,00	80.833.500,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.03 . 04 . 07 . 09	Kegiatan Penyelenggaraan Tim Pengendalian Inflasi Daerah	0,00	151.650.000,00	0,00	151.650.000,00	(34.655.500,00)	77,15
		0,00	116.994.500,00	0,00	116.994.500,00		
4.01 . 4.01.03 . 04 . 07 . 10	Penyelenggaraan Pengembangan Pengelolaan BUMD	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	(68.096.703,00)	72,76
		0,00	181.903.297,00	0,00	181.903.297,00		
4.01 . 4.01.03 . 04 . 07 . 11	Kegiatan Penyelenggaraan pengembangan Infrastruktur	0,00	95.500.000,00	0,00	95.500.000,00	(11.958.500,00)	87,48
		0,00	83.541.500,00	0,00	83.541.500,00		
4.01 . 4.01.03 . 06	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	826.850.000,00	637.855.000,00	181.725.000,00	1.646.430.000,00	(42.738.640,00)	97,40
		826.500.000,00	597.107.360,00	180.084.000,00	1.603.691.360,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	749.750.000,00	581.655.000,00	181.725.000,00	1.513.130.000,00	(42.729.586,00)	97,18
		749.400.000,00	540.916.414,00	180.084.000,00	1.470.400.414,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 23	Dukungan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	749.750.000,00	581.655.000,00	181.725.000,00	1.513.130.000,00	(42.729.586,00)	97,18
		749.400.000,00	540.916.414,00	180.084.000,00	1.470.400.414,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	77.100.000,00	56.200.000,00	0,00	133.300.000,00	(9.054,00)	99,99
		77.100.000,00	56.190.946,00	0,00	133.290.946,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 05	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan sistem Pengadaan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran (Sirup dan tepra)	77.100.000,00	56.200.000,00	0,00	133.300.000,00	(9.054,00)	99,99
		77.100.000,00	56.190.946,00	0,00	133.290.946,00		
4.01 . 4.01.03 . 07	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	6.972.258.698,00	21.592.547.701,00	5.689.775.680,00	34.254.582.079,00	(1.321.956.447,00)	96,14
		6.750.078.494,00	20.581.030.926,00	5.601.516.212,00	32.932.625.632,00		
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.972.258.698,00	19.862.547.701,00	5.689.775.680,00	32.524.582.079,00	(1.203.515.671,00)	96,30
		6.750.078.494,00	18.969.471.702,00	5.601.516.212,00	31.321.066.408,00		
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	1.576.680.000,00	600.000.000,00	2.176.680.000,00	(507.313.575,00)	76,69
		0,00	1.108.366.425,00	561.000.000,00	1.669.366.425,00		
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	369.600.000,00	0,00	0,00	369.600.000,00	(21.000.000,00)	94,32
		348.600.000,00	0,00	0,00	348.600.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 18	Rapat-Rapat, Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah	0,00	4.625.560.200,00	0,00	4.625.560.200,00	(101.361.699,00)	97,81
		0,00	4.524.198.501,00	0,00	4.524.198.501,00		
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	6.069.808.698,00	0,00	0,00	6.069.808.698,00	(198.775.660,00)	96,73
		5.871.033.038,00	0,00	0,00	5.871.033.038,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 20	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	532.850.000,00	13.660.307.501,00	5.089.775.680,00	19.282.933.181,00	(375.064.737,00)	98,05
		530.445.456,00	13.336.906.776,00	5.040.516.212,00	18.907.868.444,00		
4.01 . 4.01.03 . 07 . 20	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	0,00	1.730.000.000,00	0,00	1.730.000.000,00	(118.440.776,00)	93,15
		0,00	1.611.559.224,00	0,00	1.611.559.224,00		
4.01 . 4.01.03 . 07 . 20 . 06	Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Serta Pelajar/ Mahasiswa	0,00	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	(31.397.600,00)	88,79
		0,00	248.602.400,00	0,00	248.602.400,00		
4.01 . 4.01.03 . 07 . 20 . 09	Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	0,00	1.450.000.000,00	0,00	1.450.000.000,00	(87.043.176,00)	94,00
		0,00	1.362.956.824,00	0,00	1.362.956.824,00		
4.01 . 4.01.03 . 08	<b>BAGIAN ORGANISASI PERPUSTAKAAN DAN</b>	0,00	59.280.000,00	0,00	59.280.000,00	(78.882,00)	99,87
		0,00	59.201.118,00	0,00	59.201.118,00		
4.01 . 4.01.03 . 08 . 18	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>	0,00	59.280.000,00	0,00	59.280.000,00	(78.882,00)	99,87
		0,00	59.201.118,00	0,00	59.201.118,00		
4.01 . 4.01.03 . 08 . 18 . 12	Penyusunan SPM Kabupaten Kepulauan Anambas	0,00	59.280.000,00	0,00	59.280.000,00	(78.882,00)	99,87
		0,00	59.201.118,00	0,00	59.201.118,00		
4.01 . 4.01.03 . 09	<b>BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL</b>	329.700.000,00	824.231.800,00	45.628.200,00	1.199.560.000,00	(56.340.371,00)	95,30
		290.600.000,00	806.991.429,00	45.628.200,00	1.143.219.629,00		
4.01 . 4.01.03 . 09 . 20	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	329.700.000,00	824.231.800,00	45.628.200,00	1.199.560.000,00	(56.340.371,00)	95,30
		290.600.000,00	806.991.429,00	45.628.200,00	1.143.219.629,00		
4.01 . 4.01.03 . 09 . 20 . 07	Peliputan dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	98.400.000,00	452.631.800,00	45.628.200,00	596.660.000,00	(31.123.353,00)	94,78
		78.000.000,00	441.908.447,00	45.628.200,00	565.536.647,00		
4.01 . 4.01.03 . 09 . 20 . 08	Jasa Protokol dan Sarana Penunjang Layanan Keprotokolan KDH/WKDH	231.300.000,00	371.600.000,00	0,00	602.900.000,00	(25.217.018,00)	95,82
		212.600.000,00	365.082.982,00	0,00	577.682.982,00		
4.01 . 4.01.04	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	2.157.917.500,00	24.293.395.331,00	995.865.300,00	27.447.178.131,00	(3.058.299.273,00)	88,86
		2.048.360.271,00	21.367.385.287,00	973.133.300,00	24.388.878.858,00		
4.01 . 4.01.04 . 01	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	2.157.917.500,00	24.293.395.331,00	995.865.300,00	27.447.178.131,00	(3.058.299.273,00)	88,86
		2.048.360.271,00	21.367.385.287,00	973.133.300,00	24.388.878.858,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	2.102.317.500,00	4.964.826.270,00	967.865.300,00	8.035.009.070,00	(1.243.208.355,00)	84,53
		1.997.110.271,00	3.849.145.144,00	945.545.300,00	6.791.800.715,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	198.750.000,00	540.000,00	0,00	199.290.000,00	(19.500.000,00)	90,22
		179.250.000,00	540.000,00	0,00	179.790.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	1.873.567.500,00	2.545.000,00	0,00	1.876.112.500,00	(85.107.229,00)	95,46
		1.788.460.271,00	2.545.000,00	0,00	1.791.005.271,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	30.000.000,00	3.228.531.270,00	967.865.300,00	4.226.396.570,00	(92.958.315,00)	97,80
		29.400.000,00	3.158.492.955,00	945.545.300,00	4.133.438.255,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi, Komisi, Badan Anggaran	0,00	913.500.000,00	0,00	913.500.000,00	(709.300.000,00)	22,35
		0,00	204.200.000,00	0,00	204.200.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	819.710.000,00	0,00	819.710.000,00	(336.342.811,00)	58,97
		0,00	483.367.189,00	0,00	483.367.189,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	38.050.000,00	16.943.962.061,00	0,00	16.982.012.061,00	(1.726.362.418,00)	89,83
		36.450.000,00	15.219.199.643,00	0,00	15.255.649.643,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	0,00	1.776.435.800,00	0,00	1.776.435.800,00	(164.957.412,00)	90,71
		0,00	1.611.478.388,00	0,00	1.611.478.388,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 02	Rapat Rapat Paripurna	10.350.000,00	426.285.000,00	0,00	436.635.000,00	(3.608.700,00)	99,17
		9.550.000,00	423.476.300,00	0,00	433.026.300,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 03	Kegiatan Reses	0,00	1.609.600.000,00	0,00	1.609.600.000,00	(54.969.200,00)	96,58
		0,00	1.554.630.800,00	0,00	1.554.630.800,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 04	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	0,00	574.000.000,00	0,00	574.000.000,00	(147.598.500,00)	74,29
		0,00	426.401.500,00	0,00	426.401.500,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 05	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	1.751.425.261,00	0,00	1.751.425.261,00	(271.331.295,00)	84,51
		0,00	1.480.093.966,00	0,00	1.480.093.966,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 06	Pembahasan Ranperda APBD dan Perubahan APBD	17.350.000,00	1.125.020.000,00	0,00	1.142.370.000,00	(200.012.911,00)	82,49
		17.350.000,00	925.007.089,00	0,00	942.357.089,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 07	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	0,00	355.000.000,00	0,00	355.000.000,00	(434.520,00)	99,88
		0,00	354.565.480,00	0,00	354.565.480,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 08	Penyusunan Program Tahunan DPRD	0,00	42.890.000,00	0,00	42.890.000,00	(314.500,00)	99,27
		0,00	42.575.500,00	0,00	42.575.500,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 09	Pembahasan KUA dan PPAS	0,00	386.250.000,00	0,00	386.250.000,00	(25.633.232,00)	93,36
		0,00	360.616.768,00	0,00	360.616.768,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI				(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			JUMLAH		
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 10	Pembentukan Panitia Khusus / Panitia Kerja	0,00	2.394.139.000,00	0,00	2.394.139.000,00	(129.322.166,00)	94,60
		0,00	2.264.816.834,00	0,00	2.264.816.834,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 11	Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	2.890.569.000,00	0,00	2.890.569.000,00	(169.678.702,00)	94,13
		0,00	2.720.890.298,00	0,00	2.720.890.298,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 12	Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	2.750.000.000,00	0,00	2.750.000.000,00	(216.610.982,00)	92,12
		0,00	2.533.389.018,00	0,00	2.533.389.018,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 13	Rapat Rapat Anggota DPRD	10.350.000,00	217.348.000,00	0,00	227.698.000,00	(1.756.000,00)	99,23
		9.550.000,00	216.392.000,00	0,00	225.942.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 14	Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD	0,00	645.000.000,00	0,00	645.000.000,00	(340.134.298,00)	47,27
		0,00	304.865.702,00	0,00	304.865.702,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 16	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	4.800.000,00	490.107.000,00	0,00	494.907.000,00	(76.596.200,00)	84,52
		2.200.000,00	416.110.800,00	0,00	418.310.800,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 16 . 01	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/ Pergantian Waktu Anggota DPRD	750.000,00	16.275.000,00	0,00	17.025.000,00	(17.025.000,00)	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 16 . 02	Penyusunan Memori Jabatan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 2014-2019	750.000,00	169.500.000,00	0,00	170.250.000,00	(33.439.900,00)	80,36
		0,00	136.810.100,00	0,00	136.810.100,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 16 . 03	Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Masa Bhakti 2019-2024	3.300.000,00	304.332.000,00	0,00	307.632.000,00	(26.131.300,00)	91,51
		2.200.000,00	279.300.700,00	0,00	281.500.700,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17	Program Peningkatan Pelayanan Humas dan Protokoler DPRD	12.750.000,00	1.894.500.000,00	28.000.000,00	1.935.250.000,00	(12.132.300,00)	99,37
		12.600.000,00	1.882.929.700,00	27.588.000,00	1.923.117.700,00		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 01	Jasa dan Sarana Penunjang Humas dan Protokoler DPRD	12.750.000,00	1.894.500.000,00	28.000.000,00	1.935.250.000,00	(12.132.300,00)	99,37
		12.600.000,00	1.882.929.700,00	27.588.000,00	1.923.117.700,00		
4.01 . 4.01.05	KECAMATAN SIANTAN	1.429.350.000,00	1.842.378.500,00	1.132.675.000,00	4.404.403.500,00	(236.288.534,00)	94,64
		1.385.125.166,00	1.760.171.900,00	1.022.817.900,00	4.168.114.966,00		
4.01 . 4.01.05 . 01	KECAMATAN SIANTAN	1.429.350.000,00	1.842.378.500,00	1.132.675.000,00	4.404.403.500,00	(236.288.534,00)	94,64
		1.385.125.166,00	1.760.171.900,00	1.022.817.900,00	4.168.114.966,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	864.850.000,00	767.566.500,00	335.837.000,00	1.968.253.500,00	(64.893.010,00)	96,70
		822.318.347,00	748.193.143,00	332.849.000,00	1.903.360.490,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	137.100.000,00	0,00	0,00	137.100.000,00	(22.425.000,00)	83,64
		114.675.000,00	0,00	0,00	114.675.000,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	724.500.000,00	0,00	0,00	724.500.000,00	(20.106.653,00)	97,22
		704.393.347,00	0,00	0,00	704.393.347,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	3.250.000,00	767.566.500,00	335.837.000,00	1.106.653.500,00	(22.361.357,00)	97,98
		3.250.000,00	748.193.143,00	332.849.000,00	1.084.292.143,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	197.550.000,00	876.600.000,00	208.000.000,00	1.282.150.000,00	(84.603.024,00)	93,40
		197.156.819,00	853.969.157,00	146.421.000,00	1.197.546.976,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 48	Peningkatan Kinerja Penunjang Kelurahan	197.550.000,00	876.600.000,00	208.000.000,00	1.282.150.000,00	(84.603.024,00)	93,40
		197.156.819,00	853.969.157,00	146.421.000,00	1.197.546.976,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 242	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	357.200.000,00	195.057.000,00	130.438.000,00	682.695.000,00	(78.564.500,00)	88,49
		355.900.000,00	158.009.600,00	90.220.900,00	604.130.500,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 242 . 01	Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	2.850.000,00	75.619.000,00	111.347.000,00	189.816.000,00	(44.877.000,00)	76,36
		1.550.000,00	72.131.000,00	71.258.000,00	144.939.000,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 242 . 02	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1.550.000,00	90.821.000,00	16.508.000,00	108.879.000,00	(16.826.000,00)	84,55
		1.550.000,00	74.058.000,00	16.445.000,00	92.053.000,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 242 . 03	Ketenraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	352.800.000,00	28.617.000,00	2.583.000,00	384.000.000,00	(16.861.500,00)	95,61
		352.800.000,00	11.820.600,00	2.517.900,00	367.138.500,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 243	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9.750.000,00	3.155.000,00	458.400.000,00	471.305.000,00	(8.228.000,00)	98,25
		9.750.000,00	0,00	453.327.000,00	463.077.000,00		
4.01 . 4.01.05 . 01 . 243 . 01	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi (Swakelola)	9.750.000,00	3.155.000,00	458.400.000,00	471.305.000,00	(8.228.000,00)	98,25
		9.750.000,00	0,00	453.327.000,00	463.077.000,00		
4.01 . 4.01.06	KECAMATAN JEMAJA	1.607.245.000,00	934.804.199,00	769.683.851,00	3.311.733.050,00	(31.969.102,00)	99,03
		1.585.763.619,00	929.771.079,00	764.229.250,00	3.279.763.948,00		
4.01 . 4.01.06 . 01	KECAMATAN JEMAJA	1.607.245.000,00	934.804.199,00	769.683.851,00	3.311.733.050,00	(31.969.102,00)	99,03
		1.585.763.619,00	929.771.079,00	764.229.250,00	3.279.763.948,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.212.230.000,00	680.488.199,00	115.475.851,00	2.008.194.050,00	(28.283.202,00)	98,59
		1.193.148.619,00	676.722.979,00	110.039.250,00	1.979.910.848,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	97.200.000,00	0,00	0,00	97.200.000,00	(11.175.000,00)	88,50
		86.025.000,00	0,00	0,00	86.025.000,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	1.114.210.000,00	4.890.000,00	0,00	1.119.100.000,00	(8.246.381,00)	99,26
		1.106.303.619,00	4.550.000,00	0,00	1.110.853.619,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	820.000,00	675.598.199,00	115.475.851,00	791.894.050,00	(8.861.821,00)	98,88
		820.000,00	672.172.979,00	110.039.250,00	783.032.229,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	149.539.000,00	0,00	149.539.000,00	(1.267.900,00)	99,15
		0,00	148.271.100,00	0,00	148.271.100,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 48	Peningkatan Kinerja Penunjang Kelurahan	0,00	149.539.000,00	0,00	149.539.000,00	(1.267.900,00)	99,15
		0,00	148.271.100,00	0,00	148.271.100,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 242	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	384.715.000,00	100.242.000,00	60.500.000,00	545.457.000,00	(2.400.000,00)	99,56
		382.315.000,00	100.242.000,00	60.500.000,00	543.057.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 242 . 01	Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	220.800.000,00	2.310.000,00	0,00	223.110.000,00	0,00	100,00
		220.800.000,00	2.310.000,00	0,00	223.110.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 242 . 02	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	45.600.000,00	28.750.500,00	54.500.000,00	128.850.500,00	(2.400.000,00)	98,14
		43.200.000,00	28.750.500,00	54.500.000,00	126.450.500,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 242 . 03	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	115.200.000,00	5.200.000,00	6.000.000,00	126.400.000,00	0,00	100,00
		115.200.000,00	5.200.000,00	6.000.000,00	126.400.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 242 . 04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1.557.500,00	35.034.000,00	0,00	36.591.500,00	0,00	100,00
		1.557.500,00	35.034.000,00	0,00	36.591.500,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 242 . 05	Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	1.557.500,00	28.947.500,00	0,00	30.505.000,00	0,00	100,00
		1.557.500,00	28.947.500,00	0,00	30.505.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 243	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.300.000,00	4.535.000,00	593.708.000,00	608.543.000,00	(18.000,00)	100,00
		10.300.000,00	4.535.000,00	593.690.000,00	608.525.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 243 . 02	Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan	5.150.000,00	1.900.000,00	200.000.000,00	207.050.000,00	0,00	100,00
		5.150.000,00	1.900.000,00	200.000.000,00	207.050.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 243 . 03	Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan	5.150.000,00	2.635.000,00	393.708.000,00	401.493.000,00	(18.000,00)	100,00
		5.150.000,00	2.635.000,00	393.690.000,00	401.475.000,00		
4.01 . 4.01.07	KECAMATAN PALMATAK	1.236.815.000,00	716.216.000,00	93.773.000,00	2.046.804.000,00	(27.127.490,00)	98,67
		1.209.954.001,00	716.005.509,00	93.717.000,00	2.019.676.510,00		
4.01 . 4.01.07 . 01	KECAMATAN PALMATAK	1.236.815.000,00	716.216.000,00	93.773.000,00	2.046.804.000,00	(27.127.490,00)	98,67
		1.209.954.001,00	716.005.509,00	93.717.000,00	2.019.676.510,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	1.236.815.000,00	716.216.000,00	93.773.000,00	2.046.804.000,00	(27.127.490,00)	98,67
		1.209.954.001,00	716.005.509,00	93.717.000,00	2.019.676.510,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	48.600.000,00	0,00	0,00	48.600.000,00	0,00	100,00
		48.600.000,00	0,00	0,00	48.600.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	1.186.815.000,00	0,00	0,00	1.186.815.000,00	(26.860.999,00)	97,74
		1.159.954.001,00	0,00	0,00	1.159.954.001,00		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	1.400.000,00	716.216.000,00	93.773.000,00	811.389.000,00	(266.491,00)	99,97
		1.400.000,00	716.005.509,00	93.717.000,00	811.122.509,00		
4.01 . 4.01.08	<b>KECAMATAN SIANTAN TIMUR</b>	600.150.000,00	411.858.000,00	97.214.432,00	1.109.222.432,00	(18.864.760,00)	98,30
		587.374.897,00	408.187.200,00	94.795.575,00	1.090.357.672,00		
4.01 . 4.01.08 . 01	<b>KECAMATAN SIANTAN TIMUR</b>	600.150.000,00	411.858.000,00	97.214.432,00	1.109.222.432,00	(18.864.760,00)	98,30
		587.374.897,00	408.187.200,00	94.795.575,00	1.090.357.672,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	600.150.000,00	411.858.000,00	97.214.432,00	1.109.222.432,00	(18.864.760,00)	98,30
		587.374.897,00	408.187.200,00	94.795.575,00	1.090.357.672,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	54.600.000,00	0,00	0,00	54.600.000,00	(2.950.000,00)	94,60
		51.650.000,00	0,00	0,00	51.650.000,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	600.000,00	411.858.000,00	97.214.432,00	509.672.432,00	(6.089.657,00)	98,81
		600.000,00	408.187.200,00	94.795.575,00	503.582.775,00		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	544.950.000,00	0,00	0,00	544.950.000,00	(9.825.103,00)	98,20
		535.124.897,00	0,00	0,00	535.124.897,00		
4.01 . 4.01.09	<b>KECAMATAN SIANTAN SELATAN</b>	395.882.400,00	456.194.300,00	10.164.000,00	862.240.700,00	(14.754.022,00)	98,29
		383.290.000,00	455.496.678,00	8.700.000,00	847.486.678,00		
4.01 . 4.01.09 . 01	<b>KECAMATAN SIANTAN SELATAN</b>	395.882.400,00	456.194.300,00	10.164.000,00	862.240.700,00	(14.754.022,00)	98,29
		383.290.000,00	455.496.678,00	8.700.000,00	847.486.678,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	395.882.400,00	456.194.300,00	10.164.000,00	862.240.700,00	(14.754.022,00)	98,29
		383.290.000,00	455.496.678,00	8.700.000,00	847.486.678,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	61.200.000,00	0,00	0,00	61.200.000,00	0,00	100,00
		61.200.000,00	0,00	0,00	61.200.000,00		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	333.932.400,00	0,00	0,00	333.932.400,00	(12.592.400,00)	96,23
		321.340.000,00	0,00	0,00	321.340.000,00		



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 20	Penyedlaan Rutinitas Perkantoran	750.000,00	456.194.300,00	10.164.000,00	467.108.300,00	(2.161.622,00)	99,54
		750.000,00	455.496.678,00	8.700.000,00	464.946.678,00		
4.01 . 4.01.10	KECAMATAN JEMAJA TIMUR	637.260.000,00	271.100.000,00	5.000.000,00	913.360.000,00	(41.090.805,00)	95,50
		612.530.062,00	259.739.133,00	0,00	872.269.195,00		
4.01 . 4.01.10 . 01	KECAMATAN JEMAJA TIMUR	637.260.000,00	271.100.000,00	5.000.000,00	913.360.000,00	(41.090.805,00)	95,50
		612.530.062,00	259.739.133,00	0,00	872.269.195,00		
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	637.260.000,00	271.100.000,00	5.000.000,00	913.360.000,00	(41.090.805,00)	95,50
		612.530.062,00	259.739.133,00	0,00	872.269.195,00		
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	57.600.000,00	0,00	0,00	57.600.000,00	(9.600.000,00)	83,33
		48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	579.660.000,00	0,00	0,00	579.660.000,00	(15.129.938,00)	97,39
		564.530.062,00	0,00	0,00	564.530.062,00		
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 20	Penyedlaan Rutinitas Perkantoran	0,00	271.100.000,00	5.000.000,00	276.100.000,00	(16.360.867,00)	94,07
		0,00	259.739.133,00	0,00	259.739.133,00		
4.01 . 4.01.11	KECAMATAN SIANTAN TENGAH	662.640.000,00	472.204.000,00	430.330.000,00	1.565.174.000,00	(31.576.845,00)	97,98
		633.238.716,00	472.128.439,00	428.230.000,00	1.533.597.155,00		
4.01 . 4.01.11 . 01	KECAMATAN SIANTAN TENGAH	662.640.000,00	472.204.000,00	430.330.000,00	1.565.174.000,00	(31.576.845,00)	97,98
		633.238.716,00	472.128.439,00	428.230.000,00	1.533.597.155,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	662.640.000,00	472.204.000,00	430.330.000,00	1.565.174.000,00	(31.576.845,00)	97,98
		633.238.716,00	472.128.439,00	428.230.000,00	1.533.597.155,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	66.450.000,00	0,00	0,00	66.450.000,00	0,00	100,00
		66.450.000,00	0,00	0,00	66.450.000,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	596.190.000,00	0,00	0,00	596.190.000,00	(29.401.284,00)	95,07
		566.788.716,00	0,00	0,00	566.788.716,00		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	0,00	472.204.000,00	430.330.000,00	902.534.000,00	(2.175.561,00)	99,76
		0,00	472.128.439,00	428.230.000,00	900.358.439,00		
4.01 . 4.01.12	KECAMATAN SIANTAN UTARA	11.350.000,00	95.000.000,00	69.550.000,00	175.900.000,00	(8.727.900,00)	95,04
		11.110.000,00	94.519.000,00	61.543.100,00	167.172.100,00		
4.01 . 4.01.12 . 01	KECAMATAN SIANTAN UTARA	11.350.000,00	95.000.000,00	69.550.000,00	175.900.000,00	(8.727.900,00)	95,04
		11.110.000,00	94.519.000,00	61.543.100,00	167.172.100,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	11.350.000,00	95.000.000,00	69.550.000,00	175.900.000,00	(8.727.900,00)	95,04
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	11.110.000,00	94.519.000,00	61.543.100,00	167.172.100,00	(240.000,00)	97,59
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	9.450.000,00	500.000,00	0,00	9.950.000,00		
		9.210.000,00	500.000,00	0,00	9.710.000,00		
4.01 . 4.01.13	<b>KECAMATAN JEMAJA BARAT</b>	1.900.000,00	94.500.000,00	69.550.000,00	165.950.000,00	(8.487.900,00)	94,89
		1.900.000,00	94.019.000,00	61.543.100,00	157.462.100,00		
4.01 . 4.01.13		20.925.000,00	210.020.000,00	68.025.000,00	298.970.000,00	(7.061.840,00)	97,64
		20.925.000,00	203.085.660,00	67.897.500,00	291.908.160,00		
4.01 . 4.01.13 . 01	<b>KECAMATAN JEMAJA BARAT</b>	20.925.000,00	210.020.000,00	68.025.000,00	298.970.000,00	(7.061.840,00)	97,64
		20.925.000,00	203.085.660,00	67.897.500,00	291.908.160,00		
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	20.925.000,00	210.020.000,00	68.025.000,00	298.970.000,00	(7.061.840,00)	97,64
		20.925.000,00	203.085.660,00	67.897.500,00	291.908.160,00		
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	20.925.000,00	0,00	0,00	20.925.000,00	0,00	100,00
		20.925.000,00	0,00	0,00	20.925.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	0,00	210.020.000,00	68.025.000,00	278.045.000,00	(7.061.840,00)	97,46
		0,00	203.085.660,00	67.897.500,00	270.983.160,00		
4.02	<b>Pengawasan</b>	1.710.869.668,00	4.520.195.232,00	102.739.100,00	6.333.804.000,00	(307.738.285,00)	95,14
		1.658.275.088,00	4.265.522.027,00	102.268.600,00	6.026.065.715,00		
4.02 . 4.02.01	<b>INSPEKTORAT</b>	1.686.869.668,00	4.117.695.232,00	102.739.100,00	5.907.304.000,00	(245.940.685,00)	95,84
		1.636.275.088,00	3.922.819.627,00	102.268.600,00	5.661.363.315,00		
4.02 . 4.02.01 . 01	<b>INSPEKTORAT</b>	1.686.869.668,00	4.117.695.232,00	102.739.100,00	5.907.304.000,00	(245.940.685,00)	95,84
		1.636.275.088,00	3.922.819.627,00	102.268.600,00	5.661.363.315,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	1.039.655.000,00	1.183.406.900,00	90.239.100,00	2.313.301.000,00	(44.295.855,00)	98,09
		1.021.545.420,00	1.157.625.525,00	89.834.200,00	2.269.005.145,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	537.250.000,00	0,00	0,00	537.250.000,00	(12.425.000,00)	97,69
		524.825.000,00	0,00	0,00	524.825.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	496.755.000,00	0,00	0,00	496.755.000,00	(5.684.580,00)	98,86
		491.070.420,00	0,00	0,00	491.070.420,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	5.650.000,00	1.183.406.900,00	90.239.100,00	1.279.296.000,00	(26.186.275,00)	97,95
		5.650.000,00	1.157.625.525,00	89.834.200,00	1.253.109.725,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	286.948.000,00	1.229.380.000,00	0,00	1.516.328.000,00	(110.516.550,00)	92,71
		284.348.000,00	1.121.463.450,00	0,00	1.405.811.450,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 01	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	42.000.000,00	104.455.000,00	0,00	146.455.000,00	(652.528,00)	99,55
		41.500.000,00	104.302.472,00	0,00	145.802.472,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 02	Koordinasi dan Penyelesaian Kerugian Daerah (TPTGR)	72.600.000,00	77.549.000,00	0,00	150.149.000,00	(3.392.900,00)	97,74
		72.000.000,00	74.756.100,00	0,00	146.756.100,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 04	Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	36.348.000,00	68.006.000,00	0,00	104.354.000,00	(169.000,00)	99,84
		36.348.000,00	67.837.000,00	0,00	104.185.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 05	Kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Kepulauan Anambas	136.000.000,00	911.770.000,00	0,00	1.047.770.000,00	(102.693.122,00)	90,20
		134.500.000,00	810.576.878,00	0,00	945.076.878,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 08	Revisi Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	67.600.000,00	0,00	67.600.000,00	(3.609.000,00)	94,66
		0,00	63.991.000,00	0,00	63.991.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 16	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>	0,00	44.707.000,00	0,00	44.707.000,00	(2.781.960,00)	93,78
		0,00	41.925.040,00	0,00	41.925.040,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 03	Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP	0,00	44.707.000,00	0,00	44.707.000,00	(2.781.960,00)	93,78
		0,00	41.925.040,00	0,00	41.925.040,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17	<b>Program Akuntabilitas dan Koordinasi Aparatur Pengawasan</b>	32.506.668,00	195.516.332,00	12.500.000,00	240.523.000,00	(26.198.361,00)	89,11
		32.306.668,00	169.583.571,00	12.434.400,00	214.324.639,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 03	Verifikasi LHKPN/LHKASN	32.506.668,00	43.809.332,00	12.500.000,00	88.816.000,00	(3.565.968,00)	95,98
		32.306.668,00	40.508.964,00	12.434.400,00	85.250.032,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 04	Monitoring Dan Evaluasi Pelayanan Publik	0,00	60.837.000,00	0,00	60.837.000,00	(15.791.719,00)	74,04
		0,00	45.045.281,00	0,00	45.045.281,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 05	Monitoring Dan Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	0,00	90.870.000,00	0,00	90.870.000,00	(6.840.674,00)	92,47
		0,00	84.029.326,00	0,00	84.029.326,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18	<b>Program Peningkatan dan Penguatan Kapasitas, Kapabilitas Kelembagaan/SDM Aparatur Pengawas</b>	0,00	256.571.000,00	0,00	256.571.000,00	(12.125.109,00)	95,27
		0,00	244.445.891,00	0,00	244.445.891,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 01	Diklat Penjenjangan dan Peningkatan Kapabilitas APIP	0,00	256.571.000,00	0,00	256.571.000,00	(12.125.109,00)	95,27
		0,00	244.445.891,00	0,00	244.445.891,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19	<b>Program Peningkatan Pengawasan Aparatur Negara</b>	327.760.000,00	1.208.114.000,00	0,00	1.535.874.000,00	(50.022.850,00)	96,74
		298.075.000,00	1.187.776.150,00	0,00	1.485.851.150,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 01	Review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	3.700.000,00	38.873.100,00	0,00	42.573.100,00	(27.000,00)	99,94
		3.700.000,00	38.846.100,00	0,00	42.546.100,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 02	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD	4.440.000,00	104.959.900,00	0,00	109.399.900,00	(6.679.649,00)	93,89
		4.440.000,00	98.280.251,00	0,00	102.720.251,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 03	Review Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	0,00	47.200.000,00	0,00	47.200.000,00	(723.735,00)	98,47
		0,00	46.476.265,00	0,00	46.476.265,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 04	Review Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	9.620.000,00	63.813.881,00	0,00	73.433.881,00	(95.000,00)	99,87
		9.620.000,00	63.718.881,00	0,00	73.338.881,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 07	Kegiatan Saber Pungli	310.000.000,00	229.271.000,00	0,00	539.271.000,00	(33.305.653,00)	93,82
		280.315.000,00	225.650.347,00	0,00	505.965.347,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 08	Opname Kas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	0,00	47.833.000,00	0,00	47.833.000,00	0,00	100,00
		0,00	47.833.000,00	0,00	47.833.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 09	Monev Laporan Gratifikasi	0,00	45.870.000,00	0,00	45.870.000,00	(6.316.519,00)	86,23
		0,00	39.553.481,00	0,00	39.553.481,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 10	Kegiatan Pemeriksaan Reguler Perangkat Daerah	0,00	193.243.119,00	0,00	193.243.119,00	(463.319,00)	99,76
		0,00	192.779.800,00	0,00	192.779.800,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 11	Periksaan Desa	0,00	277.000.000,00	0,00	277.000.000,00	(56.000,00)	99,98
		0,00	276.944.000,00	0,00	276.944.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 13	Review Penyerapan Anggaran PBJ dan Dana Desa	0,00	59.840.000,00	0,00	59.840.000,00	(1.391.111,00)	97,68
		0,00	58.448.889,00	0,00	58.448.889,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 14	Koordinasi, dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH)	0,00	100.210.000,00	0,00	100.210.000,00	(964.864,00)	99,04
		0,00	99.245.136,00	0,00	99.245.136,00		
4.02 . 4.01.03	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	24.000.000,00	402.500.000,00	0,00	426.500.000,00	(61.797.600,00)	85,51
		22.000.000,00	342.702.400,00	0,00	364.702.400,00		
4.02 . 4.01.03 . 04	<b>BAGIAN BINA EKONOMI, INFRASTRUKTUR,</b>	24.000.000,00	402.500.000,00	0,00	426.500.000,00	(61.797.600,00)	85,51
		22.000.000,00	342.702.400,00	0,00	364.702.400,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.02 . 4.01.03 . 04 . 16	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prqsedur Penngawasan</b>	24.000.000,00	402.500.000,00	0,00	426.500.000,00	(61.797.600,00)	85,51
		22.000.000,00	342.702.400,00	0,00	364.702.400,00		
4.02 . 4.01.03 . 04 . 16 . 01	Percepatan dan Pengendalian Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Daerah	0,00	166.000.000,00	0,00	166.000.000,00	(35.908.600,00)	78,37
		0,00	130.091.400,00	0,00	130.091.400,00		
4.02 . 4.01.03 . 04 . 16 . 02	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	24.000.000,00	236.500.000,00	0,00	260.500.000,00	(25.889.000,00)	90,06
		22.000.000,00	212.611.000,00	0,00	234.611.000,00		
4.03	<b>Perencanaan</b>	2.081.894.000,00	5.139.805.426,00	412.822.500,00	7.634.521.926,00	(224.476.604,00)	97,06
		1.941.700.302,00	5.073.510.120,00	394.834.900,00	7.410.045.322,00		
4.03 . 4.03.01	<b>BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN DAERAH</b>	1.856.475.000,00	3.582.110.426,00	393.995.000,00	5.832.580.426,00	(200.360.702,00)	96,56
		1.730.914.302,00	3.525.298.022,00	376.007.400,00	5.632.219.724,00		
4.03 . 4.03.01 . 01	<b>BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN DAERAH</b>	1.856.475.000,00	3.582.110.426,00	393.995.000,00	5.832.580.426,00	(200.360.702,00)	96,56
		1.730.914.302,00	3.525.298.022,00	376.007.400,00	5.632.219.724,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.547.125.000,00	1.691.080.326,00	393.995.000,00	3.632.200.326,00	(176.854.006,00)	95,13
		1.427.064.302,00	1.652.274.618,00	376.007.400,00	3.455.346.320,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 07	Penyedlaan Jasa Administrasi Keuangan	732.150.000,00	0,00	0,00	732.150.000,00	(94.200.000,00)	87,13
		637.950.000,00	0,00	0,00	637.950.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	804.825.000,00	0,00	0,00	804.825.000,00	(25.860.698,00)	96,79
		778.964.302,00	0,00	0,00	778.964.302,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	10.150.000,00	1.691.080.326,00	393.995.000,00	2.095.225.326,00	(56.793.308,00)	97,29
		10.150.000,00	1.652.274.618,00	376.007.400,00	2.038.432.018,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07	<b>Program Perencanaan Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan</b>	26.100.000,00	284.431.250,00	0,00	310.531.250,00	(1.538.171,00)	99,50
		26.100.000,00	282.893.079,00	0,00	308.993.079,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 07	Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kerjasama	26.100.000,00	284.431.250,00	0,00	310.531.250,00	(1.538.171,00)	99,50
		26.100.000,00	282.893.079,00	0,00	308.993.079,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	235.500.000,00	940.286.850,00	0,00	1.175.786.850,00	(18.122.969,00)	98,46
		230.000.000,00	927.663.881,00	0,00	1.157.663.881,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 08	Penyusunan Rancangan RKPD	140.150.000,00	104.225.000,00	0,00	244.375.000,00	(2.212.377,00)	99,09
		139.450.000,00	102.712.623,00	0,00	242.162.623,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	10.600.000,00	291.244.350,00	0,00	301.844.350,00	(177.750,00)	99,94
		10.600.000,00	291.066.600,00	0,00	301.666.600,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 12	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	10.050.000,00	74.746.500,00	0,00	84.796.500,00	(1.029.950,00)	98,79
		10.050.000,00	73.716.550,00	0,00	83.766.550,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	69.750.000,00	223.586.000,00	0,00	293.336.000,00	(14.435.600,00)	95,08
		64.950.000,00	213.950.400,00	0,00	278.900.400,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 20	Penyusunan KUA dan PPAS	4.950.000,00	246.485.000,00	0,00	251.435.000,00	(267.292,00)	99,89
		4.950.000,00	246.217.708,00	0,00	251.167.708,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sosial dan Budaya</b>	20.550.000,00	226.359.000,00	0,00	246.909.000,00	(1.050.000,00)	99,57
		20.550.000,00	225.309.000,00	0,00	245.859.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 04	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya	20.550.000,00	226.359.000,00	0,00	246.909.000,00	(1.050.000,00)	99,57
		20.550.000,00	225.309.000,00	0,00	245.859.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19	<b>Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana</b>	27.200.000,00	439.953.000,00	0,00	467.153.000,00	(2.795.556,00)	99,40
		27.200.000,00	437.157.444,00	0,00	464.357.444,00		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 01	Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	27.200.000,00	439.953.000,00	0,00	467.153.000,00	(2.795.556,00)	99,40
		27.200.000,00	437.157.444,00	0,00	464.357.444,00		
4.03 . 4.01.03	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	225.419.000,00	1.557.695.000,00	18.827.500,00	1.801.941.500,00	(24.115.902,00)	98,66
		210.786.000,00	1.548.212.098,00	18.827.500,00	1.777.825.598,00		
4.03 . 4.01.03 . 01	<b>BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	19.844.000,00	874.450.000,00	0,00	894.294.000,00	(10.345.921,00)	98,84
		11.711.000,00	872.237.079,00	0,00	883.948.079,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 15	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	19.844.000,00	874.450.000,00	0,00	894.294.000,00	(10.345.921,00)	98,84
		11.711.000,00	872.237.079,00	0,00	883.948.079,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 15 . 06	Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	0,00	103.350.000,00	0,00	103.350.000,00	(362.755,00)	99,65
		0,00	102.987.245,00	0,00	102.987.245,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 15 . 40	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	10.844.000,00	705.600.000,00	0,00	716.444.000,00	(9.523.476,00)	98,67
		2.711.000,00	704.209.524,00	0,00	706.920.524,00		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 15 . 42	Inventarisasi dan Pembakuan Nama Rupa Bumi	9.000.000,00	65.500.000,00	0,00	74.500.000,00	(459.690,00)	99,38
		9.000.000,00	65.040.310,00	0,00	74.040.310,00		
4.03 . 4.01.03 . 08	<b>BAGIAN ORGANISASI PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI</b>	205.575.000,00	683.245.000,00	18.827.500,00	907.647.500,00	(13.769.981,00)	98,48
		199.075.000,00	675.975.019,00	18.827.500,00	893.877.519,00		

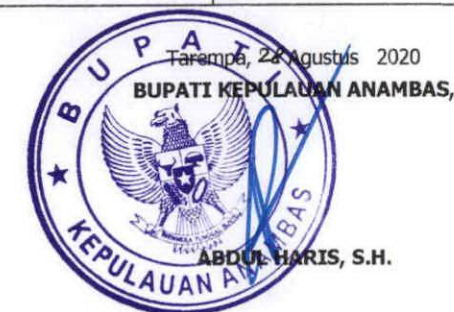
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.03 . 4.01.03 . 08 . 15	<i>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	205.575.000,00	683.245.000,00	18.827.500,00	907.647.500,00	(13.769.981,00)	98,48
		199.075.000,00	675.975.019,00	18.827.500,00	893.877.519,00		
4.03 . 4.01.03 . 08 . 15 . 35	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	113.250.000,00	464.217.500,00	0,00	577.467.500,00	(1.365.092,00)	99,76
		113.250.000,00	462.852.408,00	0,00	576.102.408,00		
4.03 . 4.01.03 . 08 . 15 . 43	Penyusunan Lakip	92.325.000,00	219.027.500,00	18.827.500,00	330.180.000,00	(12.404.889,00)	96,24
		85.825.000,00	213.122.611,00	18.827.500,00	317.775.111,00		
4.04	<b>Keuangan</b>	6.147.280.000,00	7.665.977.031,40	692.482.900,00	14.505.739.931,40	(960.026.733,40)	93,38
		5.650.549.048,00	7.225.030.850,00	670.133.300,00	13.545.713.198,00		
4.04 . 4.04.05	<b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b>	6.147.280.000,00	7.665.977.031,40	692.482.900,00	14.505.739.931,40	(960.026.733,40)	93,38
		5.650.549.048,00	7.225.030.850,00	670.133.300,00	13.545.713.198,00		
4.04 . 4.04.05 . 01	<b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b>	6.147.280.000,00	7.665.977.031,40	692.482.900,00	14.505.739.931,40	(960.026.733,40)	93,38
		5.650.549.048,00	7.225.030.850,00	670.133.300,00	13.545.713.198,00		
4.04 . 4.04.05 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	3.688.050.000,00	2.283.324.981,40	662.482.900,00	6.633.857.881,40	(433.801.033,40)	93,46
		3.342.061.548,00	2.215.362.000,00	642.633.300,00	6.200.056.848,00		
4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 07	Jasa Administrasi Keuangan	1.941.100.000,00	24.000.000,00	0,00	1.965.100.000,00	(26.700.000,00)	98,64
		1.914.400.000,00	24.000.000,00	0,00	1.938.400.000,00		
4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	1.733.000.000,00	0,00	0,00	1.733.000.000,00	(318.163.452,00)	81,64
		1.414.836.548,00	0,00	0,00	1.414.836.548,00		
4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	13.950.000,00	2.259.324.981,40	662.482.900,00	2.935.757.881,40	(88.937.581,40)	96,97
		12.825.000,00	2.191.362.000,00	642.633.300,00	2.846.820.300,00		
4.04 . 4.04.05 . 01 . 15	<i>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	130.925.000,00	961.605.000,00	0,00	1.092.530.000,00	(161.159.550,00)	85,25
		92.845.000,00	838.525.450,00	0,00	931.370.450,00		
4.04 . 4.04.05 . 01 . 15 . 03	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	87.480.000,00	394.000.000,00	0,00	481.480.000,00	(121.207.350,00)	74,83
		54.900.000,00	305.372.650,00	0,00	360.272.650,00		
4.04 . 4.04.05 . 01 . 15 . 10	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	43.445.000,00	567.605.000,00	0,00	611.050.000,00	(39.952.200,00)	93,46
		37.945.000,00	533.152.800,00	0,00	571.097.800,00		
4.04 . 4.04.05 . 01 . 16	<i>Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota</i>	2.328.305.000,00	4.421.047.050,00	30.000.000,00	6.779.352.050,00	(365.066.150,00)	94,62
		2.215.642.500,00	4.171.143.400,00	27.500.000,00	6.414.285.900,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI				(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			JUMLAH		
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.04 . 4.04.05 . 01 . 16 . 01	Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Satuan Harga Barang (SHB)	0,00	269.941.300,00	0,00	269.941.300,00	(2.192.000,00)	99,19
		0,00	267.749.300,00	0,00	267.749.300,00		
4.04 . 4.04.05 . 01 . 16 . 03	Penyusunan dan Pembahasan Perubahan APBD	502.175.000,00	498.659.500,00	0,00	1.000.834.500,00	(31.166.300,00)	96,89
		483.375.000,00	486.293.200,00	0,00	969.668.200,00		
4.04 . 4.04.05 . 01 . 16 . 04	Penyusunan dan Pembahasan APBD	507.175.000,00	582.340.000,00	0,00	1.089.515.000,00	(17.209.800,00)	98,42
		504.400.000,00	567.905.200,00	0,00	1.072.305.200,00		
4.04 . 4.04.05 . 01 . 16 . 05	Penyusunan LPP APBD	9.000.000,00	141.732.100,00	0,00	150.732.100,00	(522.000,00)	99,65
		9.000.000,00	141.210.100,00	0,00	150.210.100,00		
4.04 . 4.04.05 . 01 . 16 . 06	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	120.750.000,00	302.121.150,00	0,00	422.871.150,00	0,00	100,00
		120.750.000,00	302.121.150,00	0,00	422.871.150,00		
4.04 . 4.04.05 . 01 . 16 . 07	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	499.600.000,00	489.450.000,00	0,00	989.050.000,00	(79.225.500,00)	91,99
		490.450.000,00	419.374.500,00	0,00	909.824.500,00		
4.04 . 4.04.05 . 01 . 16 . 10	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD	18.550.000,00	237.255.000,00	0,00	255.805.000,00	(9.645.100,00)	96,23
		16.500.000,00	229.659.900,00	0,00	246.159.900,00		
4.04 . 4.04.05 . 01 . 16 . 14	Rekonsiliasi Data Keuangan Triwulan PD dan Instansi Vertikal Lainnya	47.355.000,00	460.215.000,00	0,00	507.570.000,00	(21.871.100,00)	95,69
		42.892.500,00	442.806.400,00	0,00	485.698.900,00		
4.04 . 4.04.05 . 01 . 16 . 15	Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	201.000.000,00	589.365.000,00	30.000.000,00	820.365.000,00	(60.632.650,00)	92,61
		199.500.000,00	532.732.350,00	27.500.000,00	759.732.350,00		
4.04 . 4.04.05 . 01 . 16 . 17	Sensus Barang Milik Daerah	422.700.000,00	849.968.000,00	0,00	1.272.668.000,00	(142.601.700,00)	88,80
		348.775.000,00	781.291.300,00	0,00	1.130.066.300,00		
4.05	Kepegawaian	949.280.000,00	6.013.197.001,84	264.055.000,00	7.226.532.001,84	(633.498.581,44)	91,23
		845.470.909,00	5.499.173.326,40	248.389.185,00	6.593.033.420,40		
4.05 . 4.05.08	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	949.280.000,00	6.013.197.001,84	264.055.000,00	7.226.532.001,84	(633.498.581,44)	91,23
		845.470.909,00	5.499.173.326,40	248.389.185,00	6.593.033.420,40		
4.05 . 4.05.08 . 01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	949.280.000,00	6.013.197.001,84	264.055.000,00	7.226.532.001,84	(633.498.581,44)	91,23
		845.470.909,00	5.499.173.326,40	248.389.185,00	6.593.033.420,40		
4.05 . 4.05.08 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	671.805.000,00	1.016.952.500,00	146.655.000,00	1.835.412.500,00	(143.896.422,60)	92,16
		622.720.909,00	937.271.883,40	131.523.285,00	1.691.516.077,40		
4.05 . 4.05.08 . 01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	117.300.000,00	0,00	0,00	117.300.000,00	(1.800.000,00)	98,47
		115.500.000,00	0,00	0,00	115.500.000,00		



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.05 . 4.05.08 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	546.630.000,00	0,00	0,00	546.630.000,00	(46.909.091,00)	91,42
		499.720.909,00	0,00	0,00	499.720.909,00		
4.05 . 4.05.08 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	7.875.000,00	1.016.952.500,00	146.655.000,00	1.171.482.500,00	(95.187.331,60)	91,87
		7.500.000,00	937.271.883,40	131.523.285,00	1.076.295.168,40		
4.05 . 4.05.08 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35.700.000,00	3.239.714.001,84	0,00	3.275.414.001,84	(138.193.251,84)	95,78
		26.850.000,00	3.110.370.750,00	0,00	3.137.220.750,00		
4.05 . 4.05.08 . 01 . 05 . 19	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	7.950.000,00	85.000.000,00	0,00	92.950.000,00	0,00	100,00
		7.950.000,00	85.000.000,00	0,00	92.950.000,00		
4.05 . 4.05.08 . 01 . 05 . 20	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	27.750.000,00	3.154.714.001,84	0,00	3.182.464.001,84	(138.193.251,84)	95,66
		18.900.000,00	3.025.370.750,00	0,00	3.044.270.750,00		
4.05 . 4.05.08 . 01 . 12	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	241.775.000,00	1.756.530.500,00	117.400.000,00	2.115.705.500,00	(351.408.907,00)	83,39
		195.900.000,00	1.451.530.693,00	116.865.900,00	1.764.296.593,00		
4.05 . 4.05.08 . 01 . 12 . 01	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dan Uji Kompetensi	24.450.000,00	412.777.000,00	0,00	437.227.000,00	(59.010.588,00)	86,50
		20.550.000,00	357.666.412,00	0,00	378.216.412,00		
4.05 . 4.05.08 . 01 . 12 . 04	Monitoring dan Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS dan PTT Daerah	23.250.000,00	761.750.000,00	0,00	785.000.000,00	(278.412,00)	99,96
		23.250.000,00	761.471.588,00	0,00	784.721.588,00		
4.05 . 4.05.08 . 01 . 12 . 07	Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara	114.325.000,00	358.275.000,00	117.400.000,00	590.000.000,00	(256.107.140,00)	56,59
		75.350.000,00	141.676.960,00	116.865.900,00	333.892.860,00		
4.05 . 4.05.08 . 01 . 12 . 09	Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan II Menggunakan CAT	31.950.000,00	118.050.000,00	0,00	150.000.000,00	(33.613.475,00)	77,59
		28.950.000,00	87.436.525,00	0,00	116.386.525,00		
4.05 . 4.05.08 . 01 . 12 . 11	Pelantikan, Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Administrasi Aparatur	47.800.000,00	105.678.500,00	0,00	153.478.500,00	(2.399.292,00)	98,44
		47.800.000,00	103.279.208,00	0,00	151.079.208,00		
4.07	Penelitian dan Pengembangan	88.400.000,00	964.567.575,00	0,00	1.052.967.575,00	(62.950.585,00)	94,02
		83.600.000,00	906.416.990,00	0,00	990.016.990,00		
4.07 . 4.03.01	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN DAERAH	85.600.000,00	472.629.600,00	0,00	558.229.600,00	(23.588.827,00)	95,77
		80.800.000,00	453.840.773,00	0,00	534.640.773,00		
4.07 . 4.03.01 . 01	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN DAERAH	85.600.000,00	472.629.600,00	0,00	558.229.600,00	(23.588.827,00)	95,77
		80.800.000,00	453.840.773,00	0,00	534.640.773,00		
4.07 . 4.03.01 . 01 . 16	Program Pengembangan Data/Informasi	58.250.000,00	98.667.000,00	0,00	156.917.000,00	(4.830.045,00)	96,92
		53.450.000,00	98.636.955,00	0,00	152.086.955,00		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
4.07 . 4.03.01 . 01 . 16 . 09	Implementasi dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	58.250.000,00	98.667.000,00	0,00	156.917.000,00	(4.830.045,00)	96,92
		53.450.000,00	98.636.955,00	0,00	152.086.955,00		
4.07 . 4.03.01 . 01 . 17	Program Penelitian dan Pengembangan	27.350.000,00	373.962.600,00	0,00	401.312.600,00	(18.758.782,00)	95,33
		27.350.000,00	355.203.818,00	0,00	382.553.818,00		
4.07 . 4.03.01 . 01 . 17 . 01	Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan	27.350.000,00	373.962.600,00	0,00	401.312.600,00	(18.758.782,00)	95,33
		27.350.000,00	355.203.818,00	0,00	382.553.818,00		
4.07 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	2.800.000,00	491.937.975,00	0,00	494.737.975,00	(39.361.758,00)	92,04
		2.800.000,00	452.576.217,00	0,00	455.376.217,00		
4.07 . 4.01.03 . 05	BAGIAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA	2.800.000,00	491.937.975,00	0,00	494.737.975,00	(39.361.758,00)	92,04
		2.800.000,00	452.576.217,00	0,00	455.376.217,00		
4.07 . 4.01.03 . 05 . 15	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	2.800.000,00	491.937.975,00	0,00	494.737.975,00	(39.361.758,00)	92,04
		2.800.000,00	452.576.217,00	0,00	455.376.217,00		
4.07 . 4.01.03 . 05 . 15 . 04	Perencanaan Pembangunan Bidang Pengelolaan Batas Negara dan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	2.800.000,00	428.090.000,00	0,00	430.890.000,00	(39.361.758,00)	90,87
		2.800.000,00	388.728.242,00	0,00	391.528.242,00		
4.07 . 4.01.03 . 05 . 15 . 05	Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (GERBANGDUTAS) Kabupaten Kepulauan Anambas	0,00	63.847.975,00	0,00	63.847.975,00	0,00	100,00
		0,00	63.847.975,00	0,00	63.847.975,00		
JUMLAH		111.849.113.165,98	280.899.680.612,22	433.929.711.472,82	826.678.505.251,02	(103.022.742.183,03)	87,54
		104.579.742.837,00	256.272.782.230,23	362.803.238.000,76	723.655.763.067,99		



# LAMPIRAN I.4



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**  
**REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN**  
**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**  
 TAHUN ANGGARAN

KODE			URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1			2	3	4	5	6
01			PELAYANAN UMUM	359.582.633.290,52	336.748.102.487,40	(22.834.530.803,12)	93,65
01	2	03	Pangan	319.880.000,00	291.325.103,00	(28.554.897,00)	91,07
01	2	10	Komunikasi dan Informatika	16.264.976.885,00	15.669.787.689,00	(595.189.196,00)	96,34
01	2	14	Statistik	252.753.655,00	239.613.562,00	(13.140.093,00)	94,80
01	2	15	Persandian	159.750.000,00	153.840.028,00	(5.909.972,00)	96,30
01	2	18	Kearsipan	81.500.000,00	81.224.549,00	(275.451,00)	99,66
01	4	01	Administrasi Pemerintahan	130.368.417.153,58	122.697.729.445,00	(7.670.687.708,58)	94,12
01	4	02	Pengawasan	13.266.654.000,00	12.780.499.523,00	(486.154.477,00)	96,34
01	4	03	Perencanaan	13.847.625.320,12	12.691.257.188,00	(1.156.368.132,12)	91,65
01	4	04	Keuangan	172.455.123.906,98	160.730.446.290,00	(11.724.677.616,98)	93,20
01	4	05	Kepegawalan	11.512.984.794,84	10.422.362.120,40	(1.090.622.674,44)	90,53
01	4	07	Penelitian dan Pengembangan	1.052.967.575,00	990.016.990,00	(62.950.585,00)	94,02
03			KETERTIBAN DAN KEAMANAN	36.742.968.420,00	35.084.788.904,00	(1.658.179.516,00)	95,49
03	1	05	Ketertiban dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	36.742.968.420,00	35.084.788.904,00	(1.658.179.516,00)	95,49
04			EKONOMI	116.074.278.943,23	108.728.892.929,00	(7.345.386.014,23)	93,67
04	2	01	Tenaga Kerja	1.388.870.400,00	1.306.120.459,00	(82.749.941,00)	94,04
04	2	07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.088.719.400,00	3.934.419.526,00	(154.299.874,00)	96,23
04	2	09	Perhubungan	40.508.798.862,25	38.454.966.334,00	(2.053.832.528,25)	94,93
04	2	11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.543.491.362,98	7.277.418.341,00	(266.073.021,98)	96,47
04	2	12	Penanaman Modal	7.298.076.322,00	7.108.543.743,00	(189.532.579,00)	97,40
04	3	01	Kelautan dan Perikanan	24.313.311.060,00	22.328.352.473,00	(1.984.958.587,00)	91,84
04	3	03	Pertanian	4.344.704.300,00	3.455.089.541,00	(889.614.759,00)	79,52
04	3	06	Perdagangan	12.974.249.909,00	12.634.125.113,00	(340.124.796,00)	97,38
04	3	07	Perindustrian	13.466.057.327,00	12.082.673.599,00	(1.383.383.728,00)	89,73
04	3	08	Transmigrasi	148.000.000,00	147.183.800,00	(816.200,00)	99,45
05			LINGKUNGAN HIDUP	6.315.644.571,00	5.957.882.842,00	(357.761.729,00)	94,34
05	2	04	Pertanian	584.936.000,00	495.371.765,00	(89.564.235,00)	84,69



KODE			URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1			2	3	4	5	6
05	2	05	Lingkungan Hidup	5.730.708.571,00	5.462.511.077,00	(268.197.494,00)	95,32
06			<b>PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM</b>	265.129.134.657,89	215.566.975.354,00	(49.562.159.303,89)	81,31
06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	225.545.488.657,89	178.775.599.961,00	(46.769.888.696,89)	79,26
06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	39.583.646.000,00	36.791.375.393,00	(2.792.270.607,00)	92,95
07			<b>KESEHATAN</b>	199.961.374.884,43	172.882.204.305,00	(27.079.170.579,43)	86,46
07	1	02	Kesehatan	196.442.089.984,43	169.976.221.843,00	(26.465.868.141,43)	86,53
07	2	08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.519.284.900,00	2.905.982.462,00	(613.302.438,00)	82,57
08			<b>PARIWISATA DAN BUDAYA</b>	15.604.437.550,00	14.282.484.380,00	(1.321.953.170,00)	91,53
08	2	16	Kebudayaan	2.270.265.940,00	2.153.449.893,00	(116.816.047,00)	94,85
08	3	02	Pariwisata	13.334.171.610,00	12.129.034.487,00	(1.205.137.123,00)	90,96
10			<b>PENDIDIKAN</b>	256.065.197.081,55	212.957.434.568,59	(43.107.762.512,96)	83,17
10	1	01	Pendidikan	241.384.578.581,55	201.629.734.929,59	(39.754.843.651,96)	83,53
10	2	13	Kepemudaan dan Olah Raga	14.334.218.500,00	10.982.297.018,00	(3.351.921.482,00)	76,62
10	2	17	Perpustakaan	346.400.000,00	345.402.621,00	(997.379,00)	99,71
11			<b>PERLINDUNGAN SOSIAL</b>	13.094.539.297,00	12.502.396.751,00	(592.142.546,00)	95,48
11	1	06	Sosial	3.998.772.991,00	3.722.274.821,00	(276.498.170,00)	93,09
11	2	02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.545.174.000,00	1.321.344.664,00	(223.829.336,00)	85,51
11	2	06	Administrasi Kependudukan dan Capil	7.550.592.306,00	7.458.777.266,00	(91.815.040,00)	98,78
<b>JUMLAH</b>				1.268.570.208.695,62	1.114.711.162.520,99	(153.859.046.174,63)	87,87



# LAMPIRAN II

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH  
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2019	2018
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.11.1.2	57.221.052.240,42	94.076.338.671,34
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	-	57.221.052.240,42	94.076.338.671,34
3	Sub Total (1 - 2)	-	0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	-	63.983.386.446,40	57.221.052.240,42
5	Sub Total (4 - 3)	-	63.983.386.446,40	57.221.052.240,42
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	0,00	0,00
7	Lain-lain	-	0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 s/d 7)	-	63.983.386.446,40	57.221.052.240,42

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,  
  
ABDUL HARIS, SH

# LAMPIRAN III



LAPORAN OPERASIONAL (LO)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	REF	2019	2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL	7.11.1.4.1				
2	PENDAPATAN – LO	7.11.1.4.1.1				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	7.11.1.4.1.1.1				
4	Pendapatan Pajak Daerah – LO	7.11.1.4.1.1.2	16.953.661.566,36	17.939.077.147,00	(985.415.580,64)	(5,49)
5	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	7.11.1.4.1.1.3	4.990.159.942,00	2.960.171.548,79	2.029.988.393,21	68,58
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	7.11.1.4.1.1.4	1.451.789.587,00	1.934.686.786,00	(482.897.199,00)	(24,96)
7	Lain-lain PAD Yang Sah – LO		13.260.755.507,29	12.666.997.651,33	593.757.855,96	4,69
8	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO (4 s/d 7)	7.11.1.4.1.2	36.656.366.602,65	35.500.933.133,12	1.155.433.469,53	3,25
9	PENDAPATAN TRANSFER – LO	7.11.1.4.1.2.1				
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	7.11.1.4.1.2.2	1.007.483.678.934,00	716.579.765.314,00	290.903.913.620,00	40,60
11	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	7.11.1.4.1.2.3	-	43.487.568.000,00	(43.487.568.000,00)	-
12	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	7.11.1.4.1.2.4	48.945.647.896,00	28.888.042.389,28	20.057.605.506,72	69,43
13	Bantuan Keuangan – LO		-	-	-	-
14	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER – LO (10 s/d 13)	7.11.1.4.1.3	1.056.429.326.830,00	788.955.375.703,28	267.473.951.126,72	33,90
15	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	7.11.1.4.1.3.1	-	-	-	-
16	Pendapatan Hibah – LO		10.842.598.855,01	49.224.170.027,65	(38.381.571.172,64)	(77,97)
17	Dana Darurat – LO	7.11.1.4.1.3.2	-	-	-	-
18	Pendapatan Lainnya – LO		-	-	-	-
19	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO (16 s/d 18)		10.842.598.855,01	49.224.170.027,65	(38.381.571.172,64)	(77,97)
20	JUMLAH PENDAPATAN – LO (8 + 14 + 19)	7.11.1.4.2	1.103.928.292.287,66	873.680.478.864,05	230.247.813.423,61	26,35
21	BEBAN – LO	7.11.1.4.2.1				
22	Beban Pegawai – LO	7.11.1.4.2.2	357.252.766.795,00	344.884.299.188,00	12.368.467.607,00	3,59
24	Beban Persediaan	7.11.1.4.2.3	26.433.984.434,42	50.769.857.432,50	(24.335.872.998,08)	(47,93)
25	Beban Jasa	7.11.1.4.2.4	106.624.799.805,08	79.133.538.103,67	27.491.261.701,41	34,74
26	Beban Pemeliharaan	7.11.1.4.2.5	6.510.388.739,00	9.499.542.386,00	(2.989.153.647,00)	(31,47)
27	Beban Perjalanan Dinas		70.387.844.505,00	52.755.677.396,00	17.632.167.109,00	33,42
29	Beban Bunga		-	-	-	-
30	Beban Subsidi	7.11.1.4.2.6	-	-	-	-
31	Beban Hibah	7.11.1.4.2.7	47.764.995.371,00	4.492.460.400,00	43.272.534.971,00	963,23
32	Beban Bantuan Sosial	7.11.1.4.2.8	156.555.000,00	117.000.000,00	39.555.000,00	33,81
33	Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.11.1.4.2.9	99.299.535.434,00	98.529.848.928,78	769.686.505,22	0,78
34	Beban Penyisihan Piutang	7.11.1.4.2.10	552.835.135,64	491.964.283,89	60.870.851,75	12,37
35	Beban Lain-lain		-	4.053.500,00	(4.053.500,00)	(100,00)
36	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		-	-	-	-
37	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-	-	-
38	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	7.11.1.4.2.11	-	-	-	-
39	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	7.11.1.4.2.12	133.556.102.984,00	99.140.196.447,00	34.415.906.537,00	34,71
40	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		367.927.617,00	330.067.410,00	37.860.207,00	11,47
41	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
42	JUMLAH BEBAN (22 s/d 41)	7.11.1.4.3	848.907.735.820,14	740.148.505.475,84	108.759.230.344,30	14,69
43	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (20 – 42)	7.11.1.4.4	255.020.556.467,52	133.531.973.388,21	121.488.583.079,31	90,98
44	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL					
45	Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO		-	-	-	-
46	Surplus/Peñyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO		-	-	-	-
47	Surplus dari Kegiatan Non Operasional -LO		(4.641.502.585,65)	2.643.531.599,03	(7.285.034.184,68)	(275,58)
48	Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO		-	-	-	-
49	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO		-	-	-	-
50	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		(53.043.854.944,65)	(4.628.079.701,00)	(48.415.775.243,65)	1.046,13
51	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL (45 s/d 50)		48.402.352.359,00	7.271.611.300,03	41.130.741.058,97	565,63

No	URAIAN	REF	2019	2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
52	SURPLUS/DEFISIT DARI NON OPERASI (45 s/d 47) (48 s/d 50)		48.402.352.359,00	7.271.611.300,03	41.130.741.058,97	565,63
53	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (43 - 52)	7.11.1.4.5	303.422.908.826,52	140.803.584.688,24	162.619.324.138,28	115,49
54	POS LUAR BIASA					
55	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
56	Beban Luar Biasa		-	28.918.843.549,00	(28.918.843.549,00)	(100,00)
57	JUMLAH POS LUAR BIASA (55 - 56)	7.11.1.4.6	-	(28.918.843.549,00)	28.918.843.549,00	(100,00)
58	SURPLUS/DEFISIT-LO (53 - 57)		303.422.908.826,52	111.884.741.139,24	191.538.167.687,28	171,19



# LAMPIRAN IV

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

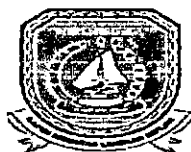
NO	URAIAN	REF	2019	2018
1	EKUITAS AWAL		1.649.904.219.242,99	1.684.296.364.307,97
2	SURPLUS/DEFISIT-LO		303.422.908.826,52	111.884.741.139,24
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:			
4	Koreksi Nilai Persediaan		-	-
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
6	Koreksi ekuitas lainnya		-	-
7	a. Koreksi Atas Perubahan Nilai Kas Lainnya		(21.115.309,00)	-
8	b. Koreksi Atas Perubahan Nilai Piutang		313.673.109,00	-
9	c. Koreksi Atas Perubahan Nilai Investasi		(779.099.130,00)	567.457.561,00
10	d. Koreksi Atas Perubahan Nilai Aset Tetap		(64.034.867.186,00)	(185.712.130.768,17)
11	e. Koreksi Atas Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		-	41.267.545.979,28
12	f. Koreksi Atas Perubahan Nilai aset Lainnya		1.424.039.724,76	(346.069.561,00)
13	g. Koreksi Atas Perubahan Nilai Kewajiban		307.365.654,00	23.650.909,00
14	h. Koreksi Lainnya		3.055.858.439,53	(2.077.340.324,33)
15	Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya (7 s/d 14)		(59.734.144.697,71)	(146.276.886.204,22)
16	EKUITAS AKHIR		1.893.592.983.371,80	1.649.904.219.242,99

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,  
ABDUL HARIS, SH

# LAMPIRAN V



NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NERACA

Per 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2019	2018
1	ASET	7.11.1.3.1		
2	ASET LANCAR	7.11.1.3.1.1		
3	Kas Di Kas Daerah	7.11.1.3.1.1.1	60.193.608.789,43	56.234.085.570,87
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran	7.11.1.3.1.1.2	-	-
5	Kas Di Bendahara Penerimaan	7.11.1.3.1.1.3	65.204.908,40	146.303.308,40
6	Kas Di Bendahara FKTP Puskesmas	7.11.1.3.1.1.4	-	-
7	Kas Di Bendahara BOS	7.11.1.3.1.1.5	3.743.988.579,57	840.663.361,15
8	Kas Lainnya	7.11.1.3.1.1.6	47.330.075,69	-
9	Setara Kas		-	-
10	Investasi Jangka Pendek	7.11.1.3.1.1.7	-	-
11	Piutang Pendapatan	7.11.1.3.1.1.8	909.894.813,00	869.932.158,00
12	Penyisihan Piutang Pajak		(352.459.568,94)	(682.459.112,29)
13	Piutang Pajak Netto (11 - 12)		557.435.244,06	187.473.045,71
14	Piutang Retribusi		-	8.735.340,00
15	Penyisihan Piutang Retribusi		-	-
16	Piutang Retribusi Netto (14 - 15)		-	8.735.340,00
17	Piutang Transfer		33.751.734.069,00	-
18	Belanja Dibayar Dimuka		-	-
19	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
20	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
21	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara Netto (18 - 19)		-	-
22	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-
23	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-
24	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Netto (21 - 22)		-	-
25	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		357.540.703,00	-
26	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		(357.540.703,00)	-
27	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto (24 - 25)		-	-
28	Piutang Lainnya		331.161.006,00	-
29	Penyisihan Piutang Lainnya		(169.007.978,79)	-
30	Piutang Lainnya Netto (27 - 28)		162.153.027,21	-
31	Persediaan	7.11.1.3.1.1.9	27.892.368.873,73	17.654.771.006,00
32	JUMLAH ASET LANCAR (3 s/d 10+13+16+17+18+21+24+27+30+31)		126.413.823.567,09	75.072.031.632,13
33	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.11.1.3.1.2		
34	INVESTASI NON PERMANEN	7.11.1.3.1.2.1		
35	Pinjaman Jangka Panjang		-	-
36	Dana Bergulir		13.217.429.880,00	14.032.748.586,00
37	Penyisihan Dana Bergulir		(12.210.883.663,50)	(12.929.432.558,50)
38	Dana Bergulir Netto (35 - 36)		1.006.546.216,50	1.103.316.027,50
39	Investasi Non Permanen Lainnya		-	-
40	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN (35 + 38 + 39)		1.006.546.216,50	1.103.316.027,50
41	INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN	7.11.1.3.1.2.2	-	-
42	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
43	Investasi Permanen Lainnya		-	-
44	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen (42 s/d 43)		7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
45	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (40 + 44)		8.506.546.216,50	8.603.316.027,50
46	ASET TETAP	7.11.1.3.1.3		
47	Tanah	7.11.1.3.1.3.1	173.797.417.658,00	174.880.863.170,00
48	Peralatan dan Mesin	7.11.1.3.1.3.2	329.890.563.501,04	284.110.185.756,28
49	Gedung dan Bangunan	7.11.1.3.1.3.3	597.240.572.286,46	568.432.112.431,54
50	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.11.1.3.1.3.4	1.018.830.032.441,14	879.396.259.091,06
51	Aset Tetap Lainnya	7.11.1.3.1.3.5	12.614.703.735,00	11.291.064.685,00
52	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.11.1.3.1.3.6	237.194.691.051,99	164.615.719.048,99

53	Akumulasi Penyusutan	7.11.1.3.1.3.7	(648.038.602.186,42)	(555.461.170.972,75)
54	<b>JUMLAH ASET TETAP (47 s/d 53)</b>		<b>1.721.529.378.487,21</b>	<b>1.527.265.033.210,12</b>
55	<b>DANA CADANGAN</b>		-	-
56	Dana Cadangan		-	-
57	<b>JUMLAH DANA CADANGAN (56)</b>		-	-
58	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>7.11.1.3.1.4</b>		
59	Tuntutan Ganti Rugi		95.624.475,00	367.540.703,00
60	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi		-	(14.749.073,76)
61	Tuntutan Ganti Rugi Netto (58 - 59)		95.624.475,00	352.791.629,24
62	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
63	Aset Tak Berwujud	7.11.1.3.1.4.1	46.072.036.544,00	45.326.412.544,00
64	Amortisasi Aset Tak Berwujud		(30.446.625.585,00)	(25.993.865.748,00)
65	Aset Tak Berwujud Netto (62 – 63)		15.625.410.959,00	19.332.546.796,00
66	Aset Lain-lain	7.11.1.3.1.4.2	32.833.128.333,00	30.460.772.190,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		-	(1.344.156.601,00)
67	<b>JUMLAH ASET LAINNYA (61+65+66)</b>		<b>48.554.163.767,00</b>	<b>48.801.954.014,24</b>
68	<b>JUMLAH ASET (32 + 45 + 54 + 67)</b>		<b>1.905.003.912.037,80</b>	<b>1.659.742.334.883,99</b>
69	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>7.11.1.3.2</b>		
70	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>7.11.1.3.2.1</b>		
71	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.11.1.3.2.1.1	19.415.831,00	-
72	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
73	Pendapatan Diterima Dimuka		-	-
74	Utang Beban	7.11.1.3.2.1.2	1.272.791.805,00	1.639.113.254,00
75	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.11.1.3.2.1.3	10.118.721.030,00	8.199.002.387,00
76	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (71 s/d 75)</b>		<b>11.410.928.666,00</b>	<b>9.838.115.641,00</b>
77	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>7.11.1.3.2.2</b>		
78	Utang Dalam Negeri – Sektor Perbankan		-	-
79	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
80	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (78 s/d 79)</b>		-	-
81	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (76 + 80)</b>		<b>11.410.928.666,00</b>	<b>9.838.115.641,00</b>
82	EKUITAS	5.3.3.	1.893.592.983.371,80	1.649.904.219.242,99
83	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>7.11.1.3.3</b>	<b>1.893.592.983.371,80</b>	<b>1.649.904.219.242,99</b>
84	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (81 + 83)</b>		<b>1.905.003.912.037,80</b>	<b>1.659.742.334.883,99</b>

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,  
  
 ABDUL HARIS, SH

# LAMPIRAN VI



LAPORAN ARUS KAS (LAK)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
LAPORAN ARUS KAS  
Per 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2019	2018
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	7.11.1.5.1		
2	Arus Masuk Kas	7.11.1.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	7.11.1.5.1.1.1	16.948.784.838,36	17.892.503.420,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	7.11.1.5.1.1.2	4.998.895.282,00	2.883.828.952,69
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.11.1.5.1.1.3	1.451.789.587,00	1.934.686.786,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.11.1.5.1.1.4	13.172.944.107,60	12.385.802.018,54
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	7.11.1.5.1.1.5	44.678.061.732,00	50.565.592.623,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	7.11.1.5.1.1.6	371.235.764.748,00	198.884.693.009,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	7.11.1.5.1.1.7	388.403.719.000,00	364.320.074.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	7.11.1.5.1.1.8	161.416.927.702,00	81.899.202.983,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	7.11.1.5.1.1.9	19.321.535.229,00	20.910.202.699,00
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus (Dana Desa)	7.11.1.5.1.1.10	51.179.675.000,00	43.487.568.000,00
13	Penerimaan Dana Penyesuaian		-	-
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	7.11.1.5.1.1.11	37.621.584.350,00	34.974.162.215,00
15	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		-	-
16	Penerimaan Hibah	7.11.1.5.1.1.12	10.787.832.655,01	7.350.546.011,95
17	Penerimaan Dana Darurat		-	-
18	Penerimaan Lainnya		-	-
19	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		-	-
20	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19)		1.121.217.514.230,97	897.488.862.718,18
21	Arus Keluar Kas	7.11.1.5.1.2		
22	Pembayaran Pegawai	7.11.1.5.1.2.1	357.208.194.340,00	342.874.433.335,00
23	Pembayaran Barang & Jasa	7.11.1.5.1.2.2	256.272.778.730,23	200.404.088.299,50
24	Pembayaran Bunga		-	-
25	Pembayaran Subsidi		-	-
26	Pembayaran Hibah	7.11.1.5.1.2.3	4.278.388.000,00	4.431.333.000,00
27	Pembayaran Bantuan Sosial	7.11.1.5.1.2.4	156.555.000,00	117.000.000,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan	7.11.1.5.1.2.5	82.812.329.950,00	55.982.695.857,00
29	Pembayaran Tak Terduga	7.11.1.5.1.2.6	-	290.624.000,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		-	-
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		-	-
32	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintahan Desa	7.11.1.5.1.2.7	51.179.675.000,00	43.487.568.000,00
33	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		-	-
34	Jumlah Arus Kas Keluar (22 s/d 33)		751.907.921.020,23	647.587.742.491,50
35	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (20 - 34)		369.309.593.210,74	189.901.120.226,68
36	Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	7.11.1.5.2		
37	Arus Masuk Kas			
38	Pencairan Dana Cadangan		-	-
39	Penjualan atas Tanah		-	-
40	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
41	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
42	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
43	Penjualan Aset Tetap		-	-
44	Penjualan Aset Lainnya		-	-
45	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
46	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
47	Jumlah Arus Masuk Kas (38 s/d 46)		-	-

NO	URAIAN	REF	2019	2018
48	Arus Keluar Kas	7.11.1.5.2.1		
49	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
50	Perolehan Tanah	7.11.1.5.2.1.1	4.022.083.585,00	1.904.277.555,00
51	Perolehan Peralatan dan Mesin	7.11.1.5.2.1.2	58.640.818.568,76	29.362.613.443,00
52	Perolehan Gedung dan Bangunan	7.11.1.5.2.1.3	156.832.046.585,00	84.126.407.735,00
53	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.11.1.5.2.1.4	141.102.217.189,00	111.399.083.128,00
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya	7.11.1.5.2.1.5	2.218.168.073,00	346.699.000,00
55	Perolehan Aset Lainnya (investasi Pemda)		-	-
56	Jumlah Arus Keluar Kas (49 s/d 55)		362.815.334.000,76	227.139.080.861,00
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (48 - 57)		(362.815.334.000,76)	(227.139.080.861,00)
58	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	7.11.1.5.3	-	-
59	Arus Masuk Kas	7.11.1.5.3.1	-	-
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
63	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
64	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		768.074.996,00	737.637.258,00
65	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
66	Pencairan Dana Cadangan		-	-
67	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
68	Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 67)		768.074.996,00	737.637.258,00
69	Arus Keluar Kas	7.11.1.5.3.2		
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
73	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
74	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	500.000.000,00
75	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		500.000.000,00	-
76	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
77	Jumlah Arus Keluar Kas (70 s/d 76)		500.000.000,00	500.000.000,00
78	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan (68 - 77)		268.074.996,00	237.637.258,00
79	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	7.11.1.5.4		
80	Arus Masuk Kas	7.11.1.5.4.1		
81	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		74.625.543.462,36	56.753.713.503,00
82	Jumlah Arus Masuk Kas (84)		74.625.543.462,36	56.753.713.503,00
83	Arus Kas Keluar	7.11.1.5.4.2		
84	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		74.606.127.631,36	56.779.234.866,00
85	Jumlah Arus Kas Keluar (84)		74.606.127.631,36	56.779.234.866,00
86	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (82 - 86)		19.415.831,00	(25.521.363,00)
87	Kenaikan/ (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (35 + 57 + 78 + 86)		6.781.750.036,98	(37.025.844.739,32)
88	Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran		57.221.052.240,42	94.100.593.671,34
89	Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran (87 + 88)		64.002.802.277,40	57.074.748.932,02
90	Kas Di Bendahara Penerimaan		-	146.303.308,40
91	Kas Di BLUD		-	-
92	Kas Di Bendahara FKTP Puskesmas		-	-
93	Kas Di Bendahara BOS		-	-
94	Kas Lainnya		-	-
95	Saldo Akhir Kas (89 s/d 94)		64.002.802.277,40	57.221.052.240,42

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,  
  
 ABDUL HARIS, SH

# LAMPIRAN VII

**7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**7.6. PENDAHULUAN**

**7.6.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan Pasal 101 menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir dan ketentuan Pasal 102 menyatakan bahwa Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, ketentuan Pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ketentuan Pasal 297 menyatakan bahwa Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (2) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

**7.6.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan keuangan ini didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau;
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- i. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;



- 
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
  - q. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - r. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - s. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
  - t. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - u. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
  - v. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
  - w. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - x. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - y. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
  - dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
  - ff. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
  - gg. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - hh. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah;
  - ii. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
  - jj. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019;
  - kk. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019;
  - ll. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7.a1 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah Kabupaten Kepulauan Anambas;
  - mm. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7.a2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Kepulauan Anambas;
  - nn. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7.a3 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran Kabupaten Kepulauan Anambas;
-

- oo. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7.a4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir Kabupaten Kepulauan Anambas;
- pp. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7.a5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel Kabupaten Kepulauan Anambas;
- qq. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7.a6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kabupaten Kepulauan Anambas;
- rr. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7.a7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- ss. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7.a8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Kepulauan Anambas;
- tt. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7.a9 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- uu. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7.a10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- vv. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- ww. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- xx. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- yy. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019;
- zz. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 99 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- aaa. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019;

### 7.6.3. Komponen Laporan Keuangan

Komponen Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 yang disusun berdasarkan kompilasi dari laporan keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu sebanyak 28 SKPD terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Puskesmas);
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana;
- f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- g. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- h. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- i. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

- j. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian;
- k. Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- l. Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan;
- m. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- n. Sekretariat Daerah;
- o. Sekretariat DPRD;
- p. Kecamatan Siantan;
- q. Kecamatan Jemaja;
- r. Kecamatan Palmatak;
- s. Kecamatan Siantan Timur;
- t. Kecamatan Siantan Selatan;
- u. Kecamatan Jemaja Timur;
- v. Kecamatan Siantan Tengah;
- w. Kecamatan Jemaja Barat
- x. Kecamatan Siantan Utara
- y. Inspektorat;
- z. Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah;
- aa. Badan Keuangan Daerah; dan
- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

#### 7.6.3.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Pendapatan LRA (basis kas) adalah penerimaan oleh PPKD atau SKPD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah;
- b. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh PPKD atau SKPD yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah;
- c. Transfer adalah pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa; dan
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun Tahun-Tahun Anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

#### 7.6.3.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

#### 7.6.3.3. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh Pemerintah Daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya
- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah; dan
- Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

#### 7.6.3.4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada Pemerintah Daerah, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil; dan
- Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Daerah.

#### 7.6.3.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah;
- Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

#### 7.6.3.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.



#### 7.6.3.7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (*full Disclosure*).

### 7.7. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN, EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### 7.7.1. Kebijakan Fiskal/Keuangan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuannya menimbulkan hak dan kewajiban yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan tersebut perlu dikelola secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan pelaksanaan kebijakan fiskal dalam fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

APBD merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut dan atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, APBD merupakan media untuk mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode Tahunan.

Dasar penyusunan APBD tersebut didasarkan kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah atau RKPD (yakni dokumen perencanaan daerah untuk periode satu Tahun dan hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif terhadap Kebijakan Umum APBD atau KUA (yakni dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu Tahun dan Prioritas dan Plafon Anggaran atau PPA (yakni program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD).

Adapun yang menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan APBD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA (yakni dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran), yang juga berfungsi sebagai landasan pengendalian terhadap pelaksanaan APBD.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD tersebut maka entitas akuntansi dan entitas pelaporan diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan kepada sistem akuntansi pemerintahan daerah (yakni serangkaian prosedur yang meliputi proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer). Sebagai dokumen formal pernyataan kebijakan fiskal yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas maka telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019. Dalam pelaksanaan, APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 mengalami sekali perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019.

#### 7.7.1.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam satu Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas, diupayakan secara mandiri dalam jangka panjang melalui optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dapat ditempuh antara lain melalui:

- a. Mengembangkan dan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel;
- b. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- c. Penerapan *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
- d. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD;
- e. Peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah;
- f. Mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan;
- g. Mengupayakan memaksimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Bidang Jasa Pelayanan Pertambangan, dan lain-lain; dan
- h. Penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### 7.7.1.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan untuk belanja daerah meliputi:

- a. Belanja Daerah mengacu kepada prioritas pembangunan yang masih tertuang dalam KUA dan PPAS. Prioritas pembangunan dilaksanakan belum mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Anambas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas dengan memperhatikan dokumen perencanaan terkait lainnya;
- b. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- c. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur dan diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Kebijakan pengalokasian belanja daerah dirinci menurut: urusan pemerintahan daerah, fungsi, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja;
- e. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara;
- g. Klasifikasi belanja menurut organisasi yang disesuaikan dengan susunan organisasi yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- h. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- i. Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari: (1) belanja operasi meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa (2) belanja modal;
- j. Masing-masing jenis belanja tersebut terbagi atas obyek dan rincian obyek belanja sesuai nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Nomor 37 Tahun 2012;
- k. Klasifikasi beban menurut kelompok beban terdiri dari: (1) beban operasi, beban transfer, defisit non anggaran dan beban luar biasa;
- l. Efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengandung arti bahwa dana yang tersedia harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan:

- 1) Tujuan, sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai;
  - 2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.
- m. Untuk mendukung kebijakan nasional, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas selain merencanakan anggaran untuk kegiatan yang menjadi prioritas di daerah, perlu juga melakukan dukungan pendanaan terhadap:
- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong percepatan realisasi belanja pemerintah (APBD) untuk menjaga tingkat konsumsi serta investasi untuk meningkatkan demand guna menstimulus perekonomian khususnya disektor riil. Percepatan belanja modal dan infrastruktur tidak hanya akan mendorong investasi tetapi akan memberikan *multiplier effect* ke sektor ekonomi lainnya;
  - 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendukung sektor industri pengolahan dengan mengutamakan tender-tender proyek Pemerintah kepada industri domestik seperti proyek tol laut pemerintah bagi komoditas perdagangan;
  - 3) Mempercepat proses perizinan khususnya terkait analisis dampak lingkungan (AMDAL) untuk mendorong percepatan realisasi investasi serta dengan membentuk Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPMPTSP);
  - 4) Peningkatan stabilitas politik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta upaya membangun masyarakat madani dengan memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan secara komprehensif dan terintegrasi, serta memfasilitasi komunikasi dengan elemen masyarakat guna menciptakan ketenteraman dan ketertiban, termasuk peningkatan kerukunan umat beragama;
  - 5) Peningkatan keserasian pembangunan di daerah dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi berbagai kegiatan antara pusat dan daerah, antara provinsi dan kabupaten/kota, serta antar daerah, baik pada tataran perencanaan maupun pelaksanaan dan pengendaliannya; dan
  - 6) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah dan desa melalui upaya pemberdayaan masyarakat dengan melaksanakan berbagai program, seperti peningkatan kapasitas ekonomi rakyat dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan administrasi pemerintahan desa, dukungan terhadap kegiatan PKK dan bulan bakti gotong royong, termasuk upaya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan teknologi pedesaan guna menunjang efektivitas pengelolaan pembangunan di pedesaan.
- n. Meningkatkan pengawasan baik melalui pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat sehingga dana yang tersedia dalam APBD dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

#### 7.7.1.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan dilakukan atas pemanfaatan surplus anggaran atau kebijakan untuk menutupi defisit anggaran dengan memperhatikan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun lalu. Kebijakan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan (*good governance*) yang baik dan benar dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan tersebut perlu dikelola secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab, untuk sebesar-besarnya kemakmuran pegawai negeri sipil daerah khususnya dan seluruh masyarakat daerah, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD. APBD merupakan media untuk mengkoordinasikan aktivitas pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan.

Dasar penyusunan APBD tersebut didasarkan kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahunan, yang merupakan penjabaran RPJMD Kepala Daerah selama 5 (lima) Tahun. Kebijakan Keuangan pada Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Anambas dalam satu Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan keuangan pada belanja daerah lebih menitikberatkan pada anggaran yang bersifat efektif, efisien, dan ekonomi yang lebih memprioritaskan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur dan diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keuangan pada pembiayaan daerah di penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber pada sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman dana bergulir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dengan memberikan pinjaman daerah yang bersifat dana bergulir untuk mengentas kemiskinan pada masyarakat. Kebijakan pembiayaan dilakukan atas pemanfaatan surplus anggaran atau kebijakan untuk menutupi defisit anggaran dengan memperhatikan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

7.7.2. Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator ekonomi makro terhadap perkembangan suatu daerah. Apabila dilihat dari peranan Produk Domestik Regional Bruto (BDRB) Tanpa Migas pada Tahun 2017 yang memberikan sumbangan terbesar dihasilkan oleh antara lain 75,18% untuk sektor Pertambangan dan Penggalian, 10,67% untuk sektor Industri Pengolahan terhadap total perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam kurun waktu 4 (empat) Tahun yaitu Tahun 2015-2018 menunjukkan bahwa kategori Pertambangan dan Penggalian serta Industri Pengolahan cenderung stabil setiap tahunnya.

Tabel 1  
Peranan PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas (tanpa Migas) Tahun 2015 s.d 2018

persen					
Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,11	5,44	2,53	0,51
B	Petambangan dan Penggalian	2,61	2,47	(0,39)	(4,61)
C	Industri Pengolahan	2,92	1,42	(3,55)	(99,09)
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	4,59	10,60	6,50	(0,99)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,39	5,64	4,26	2,50
F	Konstruksi	8,91	9,03	8,24	5,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,67	5,33	4,39	3,78
H	Transfortasi dan Pergudangan	4,48	4,73	4,52	3,81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,52	6,98	7,44	6,88
J	Informasi dan Komunikasi	5,66	5,75	5,82	5,84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,88	4,62	4,41	4,40
L	Real Estate	5,93	6,58	5,49	3,23
M,N	Jasa Perusahaan	6,17	6,23	5,96	5,47
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	(0,08)	6,89	0,97	4,71
P	Jasa Pendidikan	5,80	6,10	4,92	5,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,85	8,09	7,91	7,95
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,10	3,04	3,54	5,47

Sumber Data diolah dari Katalog BPS: 1102001.2105

Tabel 2  
Laju Pertumbuhan Rill PDRB Kab. Kep. Anambas (tanpa Migas) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 s.d 2018

(persen)						
Kategori	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,46	4,52	4,78	4,90	5,23
B	Petambangan dan Penggalian	75,98	75,34	74,76	74,58	83,54
C	Industri Pengolahan	10,95	11,25	10,90	10,32	0,12

Kategori	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	-	-	-	-
F	Konstruksi	3,87	4,02	4,37	4,72	5,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,71	1,83	1,96	2,10	2,32
H	Transfortasi dan Pergudangan	0,14	0,15	0,17	0,17	0,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10
J	Informasi dan Komunikasi	0,29	0,29	0,31	0,34	0,37
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,10	0,10	0,10	0,11	0,12
L	Real Estate	0,44	0,46	0,50	0,52	0,56
M,N	Jasa Perusahaan	-	-	-	-	-
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,62	1,58	1,64	1,68	1,86
P	Jasa Pendidikan	0,14	0,14	0,15	0,17	0,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,14	0,14	0,16	0,18	0,20
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data diolah dari Katalog BPS: 1102001.2105

7.7.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta nomenklatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan APBD berkaitan dengan pengelolaan **urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan** maupun **urusan pemerintahan fungsi penunjang** yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan yang berskala kabupaten sebanyak 26 urusan. Sedangkan bersifat urusan pilihan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan antara lain perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata.

7.7.3.1. Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar Yang Dilaksanakan

Jumlah program urusan wajib pelayanan dasar ditetapkan sebanyak 57 program dengan 205 kegiatan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2019 pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tujuh program dan dijabarkan ke dalam 10 Program 55 kegiatan;
- b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 13 program dan dijabarkan ke dalam 71 kegiatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman terdiri dari 13 program dan dijabarkan ke dalam 27 kegiatan;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari empat program dan dijabarkan ke dalam enam kegiatan;
- e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari lima program dan dijabarkan ke dalam 14 kegiatan;
- f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari 12 program dan dijabarkan ke dalam 32 kegiatan;

**7.7.3.2. Prioritas Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Yang Dilaksanakan**

Jumlah Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar ditetapkan sebanyak 33 program dengan 73 Kegiatan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2019 pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu terdiri dari:

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari dua Program dan dijabarkan kedalam sembilan kegiatan;
- b. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup terdiri dari 11 Program dan dijabarkan kedalam 24 kegiatan;
- c. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik terdiri dari delapan program dan dijabarkan kedalam 14 Kegiatan;
- d. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari enam Program dan dijabarkan kedalam 16 Kegiatan;
- e. Dinas Penanamna Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja terdiri dari enam Program dan dijabarkan kedalam sepuluh Kegiatan;

**7.7.3.3. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan**

Urusan Pilihan ditetapkan sebanyak 17 Program dengan 36 Kegiatan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2019 pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu terdiri dari:

- a. Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan terdiri dari sepuluh Program dan dijabarkan kedalam 26 Kegiatan;
- b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari tujuh Program dan dijabarkan kedalam sepuluh Kegiatan;

**7.7.3.4. Prioritas Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Yang Dilaksanakan**

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang ditetapkan sebanyak 64 Program dengan 116 Kegiatan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2019 pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu terdiri dari:

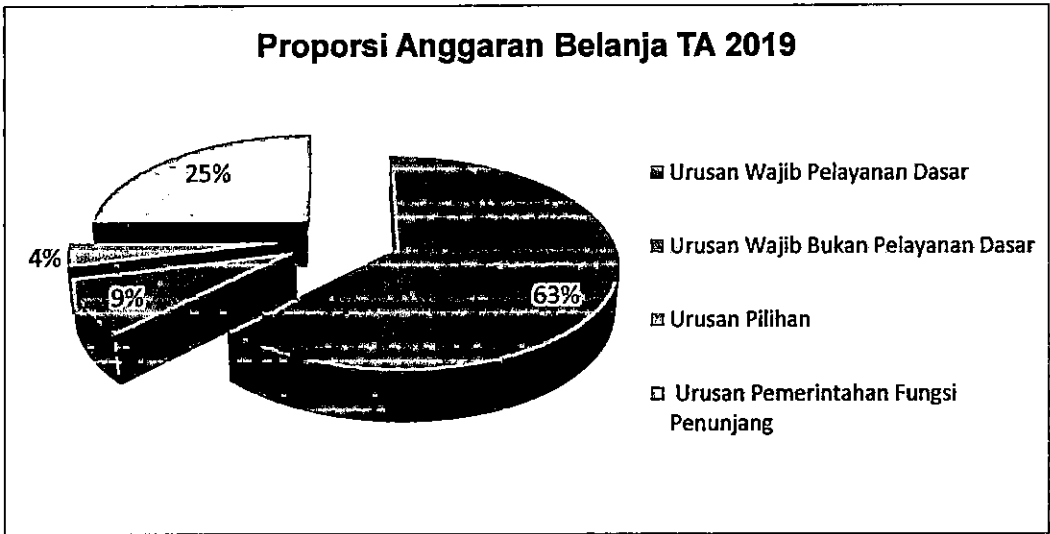
- a. Sekretariat Daerah terdiri dari 17 program dan dijabarkan ke dalam 44 kegiatan;
- b. Sekretariat DPRD terdiri dari empat Program dan dijabarkan kedalam 23 Kegiatan;
- c. Kecamatan Siantan terdiri dari empat Program dan dijabarkan kedalam sepuluh kegiatan;
- d. Kecamatan Jemaja terdiri dari lima Program dan dijabarkan kedalam 13 kegiatan;
- e. Kecamatan Palmatak terdiri dari dua Program dan dijabarkan kedalam empat kegiatan;
- f. Kecamatan Siantan Timur terdiri dari dua Program dan dijabarkan kedalam empat kegiatan;
- g. Kecamatan Siantan Selatan terdiri dari dua Program dan dijabarkan kedalam empat kegiatan;
- h. Kecamatan Jemaja Timur terdiri dari dua Program dan dijabarkan kedalam empat kegiatan;
- i. Kecamatan Siantan Tengah terdiri dari dua Program dan dijabarkan kedalam empat kegiatan;
- j. Kecamatan Siantan Utara terdiri dari dua Program dan dijabarkan kedalam tiga kegiatan;
- k. Kecamatan Jemaja Barat terdiri dari dua Program dan dijabarkan kedalam tiga kegiatan;
- l. Inspektorat terdiri dari tujuh Program dan dijabarkan kedalam 24 kegiatan;
- m. Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah terdiri dari tujuh Program dan dijabarkan kedalam 13 kegiatan;
- n. Badan Keuangan Daerah terdiri dari tiga Program dan dijabarkan kedalam 15 kegiatan;

- o. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia terdiri dari tiga Program dan dijabarkan kedalam sepuluh kegiatan;

7.7.3.5. **Proporsi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

Adapun proporsi anggaran Belanja Tahun Anggaran 2019 bila diklasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1



7.7.3.5.1. **Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

Rincian atas urusan wajib pelayanan dasar pada P-APBD Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3  
Anggaran Belanja Berdasarkan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun Anggaran 2019  
(Dalam Rupiah)

No	SKPD	ANGGARAN BELANJA
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	255.718.797.081,55
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	199.961.374.884,43
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	267.608.690.657,89
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	14.005.994.575,00
5	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah	7.715.472.281,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	16.396.662.955,00
JUMLAH		761.406.992.434,87

7.7.3.5.2. **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

Rincian atas urusan bukan wajib pelayanan dasar pada P-APBD Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4  
Anggaran Belanja Berdasarkan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tahun Anggaran 2019  
(Dalam Rupiah)

No	SKPD	ANGGARAN BELANJA
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.550.592.306,00
2	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	43.759.951.433,25
3	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	12.257.943.540,00
4	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	33.983.798.598,98
5	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	8.834.946.722,00
JUMLAH		106.387.232.600,23

7.7.3.5.3.            **Urusan Pilihan**

Rincian atas urusan pilihan pada P-APBD Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 5**  
**Anggaran Belanja Berdasarkan Urusan Pilihan Tahun Anggaran 2019**  
(Dalam Rupiah)

No	SKPD	ANGGARAN BELANJA
1	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	28.977.895.360,00
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	15.604.437.550,00
JUMLAH		44.582.332.910,00

7.7.3.5.4.            **Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**

Rincian atas urusan pemerintahan fungsi penunjang pada P-APBD Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 6**  
**Anggaran Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Tahun Anggaran 2019**  
(Dalam Rupiah)

No	SKPD	ANGGARAN BELANJA
1	DPRD	1.592.919.950,00
2	KDh/WKDh	1.200.139.375,00
3	Sekretariat Daerah	68.001.114.274,00
4	Sekretariat DPRD	39.690.483.908,00
5	Kecamatan Siantari	7.988.510.787,00
6	Kecamatan Jemaja	7.533.748.790,00
7	Kecamatan Palmatak	5.501.661.961,58
8	Kecamatan Siantan Timur	3.054.160.379,00
9	Kecamatan Siantan Selatan	2.895.936.810,00
10	Kecamatan Jemaja Timur	3.875.526.950,00
11	Kecamatan Siantan Tengah	3.883.609.315,00
12	Inspektorat	12.840.154.000,00
13	Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah	12.603.913.420,12
14	Badan Keuangan Daerah	121.275.448.906,98
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.512.984.794,84
16	Kecamatan Siantan Utara	577.197.174,00
17	Kecamatan Jemaja Barat	986.464.955,00
JUMLAH		305.013.975.750,52

7.8.                    **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

7.8.1.                **Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pencapaian kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Tahun Anggaran 2019 dapat dikategorikan baik menurut aspek jumlah realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang melebihi pendapatan yang ditargetkan diterima di Tahun 2018. Hal tersebut terlihat dalam ikhtisar pendapatan dalam tabel berikut.

**Tabel 7**  
**Ikhtisar Realisasi Capaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2019**  
(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
1	PENDAPATAN – LRA	1.211.349.156.455,20	1.121.205.421.730,97	92,56
2				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	42.966.598.128,00	36.560.321.314,96	85,09
4	PENDAPATAN TRANSFER – LRA	1.149.582.158.327,20	1.073.857.267.761,00	92,77



NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
5	BANTUAN KEUANGAN	8.000.000.000,00	0,00	-
6	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LRA	10.800.400.000,00	10.787.832.655,01	99,88
7				
8	<b>BELANJA</b>	<b>1.217.390.533.695,62</b>	<b>1.063.531.487.520,99</b>	<b>87,36</b>
9				
10	BELANJA OPERASI	782.871.854.222,80	700.728.249.520,23	89,51
11	BELANJA MODAL	433.929.711.472,82	362.803.238.000,76	83,61
12	BELANJA TAK TERDUGA	588.968.000,00	0,00	-
13				
14	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>51.179.675.000,00</b>	<b>51.179.675.000,00</b>	<b>100,00</b>
15				
16	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (8+14)</b>	<b>1.268.570.208.695,62</b>	<b>1.114.711.162.520,99</b>	<b>87,87</b>
17				
18	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(57.221.052.240,42)</b>	<b>6.494.259.209,98</b>	<b>(11,35)</b>
19				
20	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>57.221.052.240,42</b>	<b>57.221.052.240,42</b>	<b>100,00</b>
21				
22	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	57.721.052.240,42	57.989.127.236,42	100,46
23	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
24				
25	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>57.221.052.240,42</b>	<b>57.489.127.236,42</b>	<b>100,47</b>
26				
27	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>0.00</b>	<b>63.983.386.446,40</b>	

**7.8.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan**

**7.8.2.1. Pendapatan**

Jumlah Pendapatan yang ditargetkan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.211.349.156.455,20 (satu triliun dua ratus sebelas milyar tiga ratus empat puluh Sembilan juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah dua puluh sen), dan terealisasi pada Tahun Anggaran berjalan sebesar Rp1.121.205.421.730,97 (satu triliun seratus dua puluh satu milyar dua ratus lima juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh tujuh sen), atau sebesar 92.56%.

Pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019, terdapat beberapa kendala dalam penerimaan pada beberapa jenis pendapatan antara lain:

- a. Pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp42.966.598.128,00 dan yang terealisasi sebesar Rp36.560.321.314,96 atau sebesar 85.09% yang disebabkan masih terdapatnya wajib pajak yang tidak patuh dan taat untuk membayar pajak tepat waktu dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan membayar retribusi, selain itu terdapat beberapa jenis retribusi daerah yang memiliki target pendapatan akan tetapi tidak terealisasi disebabkan karena masih terkendala dengan fasilitas pendukung;
- b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang ditargetkan sebesar Rp1.149.582.158.327,20 dan yang terealisasi sebesar Rp1.073.857.267.761,00 atau sebesar 93.41%, dikarenakan Pemerintah Daerah sudah melakukan yang terbaik dalam penyerapan anggaran yang diterima dari pusat, dan tepat waktu pelaporan ke Kementerian Keuangan RI akan taatnya Pemerintah Daerah dengan peraturan perundang-undang yang berlaku akan tetapi ada beberapa kendala lain sperti serapan dana DAK serta progres fisik yang menjadi syarat utama untuk penyaluran dana tidak terpenuhi dengan maksimal, sehingga adanya pemotongan dari pemerintah pusat; dan
- c. Pendapatan lain-lain yang sah yang ditargetkan sebesar Rp10.800.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.787.832.655,01 atau sebesar 99,88% .

**7.8.2.2. Belanja**

Belanja daerah yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.217.390.533.695,62 (satu triliun dua ratus tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah enam puluh dua sen), dan terealisasi pada Tahun Anggaran berjalan sebesar Rp1.063.531.487.520,99 (satu triliun enam puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah sembilan puluh sembilan sen), atau sebesar 87,36 %.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target belanja yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2019 terdapat pada kelompok yang terdiri dari:

- a. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp782.871.854.222,80 dan terealisasi sebesar Rp700.728.249.520,23 atau sebesar 89,51%.
- b. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp433.929.711.472,82 dan terealisasi sebesar Rp362.803.238.000,76 atau sebesar 83,61%
- c. Belanja Tak Terduga yang dianggarkan sebesar Rp588.968.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%, disebabkan tidak terdapatnya bencana alam atau musibah yang harus ditanggulangi oleh pemerintah daerah.

**7.8.2.3. Surplus/Defisit**

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada APBD Tahun Anggaran 2019 mengalami defisit anggaran atas belanja daerah yang dibandingkan dengan pendapatan sebesar (Rp57.221.052.240,42) dan surplus realisasi sebesar Rp6.494.259.209,98 atau (11,35%).

**7.8.2.4. Pembiayaan Netto**

Pembiayaan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2019, terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp57.721.052.240,42 dan terealisasi sebesar Rp57.989.127.236,42 atau sebesar 100,46% yang merupakan penggunaan SiLPA Tahun lalu, dan terdiri dari Rp57.221.052.240,42 dan penerimaan kembali pinjaman daerah kepada kelompok masyarakat atau piutang pokok dana bergulir sebesar Rp768.074.996,00;
- b. Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp500.000.000,00 atau sebesar 100%. di gunakan untuk pembiayaan dana bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian.

**7.8.2.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp63.983.386.446,40.

**7.9. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL****7.9.1. Entitas Akuntansi**

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

Entitas akuntansi adalah Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan SKPD yang kemudian akan digabungkan dan/atau dikonsolidasikan di entitas pelaporan kedalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

### 7.9.2. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan (a) Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran, (b) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, (c) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan (d) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas pelaporan keuangan daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2019, meliputi 26 SKPD yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah yang mencakup Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 9 Bagian;
- b. Sekretariat DPRD yang mencakup DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Empat Badan yang mencakup Badan Keuangan Daerah yang mencakup SKPKD-PPKD, Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. 11 Dinas yang mencakup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat PR Kawasan Pemukiman, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- f. Satu satuan yang mencakup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- g. Sembilan kecamatan yang mencakup Kecamatan Siantan, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan Tengah, Jemaja Barat dan Siantan Utara.

### 7.9.3. Prosedur Konsolidasian

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

## **7.10. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

### **7.10.1. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 44 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Di samping itu, dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

### **7.10.2. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Implementasi tersebut melanjutkan penyajian laporan keuangan Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 telah berbasis akrual. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2019 telah sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun Tahun berjalan dengan Tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada Tahun 2019 adalah merupakan implementasi akuntansi berbasis akrual.

Pengakuan (*recognition*) dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas akuntansi yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

### **7.10.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada Pemerintah Daerah**

#### **7.10.3.1. Akuntansi Pendapatan (LRA dan LO)**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu Tahun Anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah termasuk rekening kas SKPD.

##### **a. Pendapatan-LRA diakui pada saat:**

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

## b. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pendapatan-LO diakui apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya Surat Ketetapan Pendapatan Daerah (SKP-D)/Surat Ketetapan Retrisbusi Daerah (SKRD) yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Perda/Pergub/Perbup) dimana hingga akhir Tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan bersamaan dengan Pendapatan-LRA dengan kondisi sebagai berikut.

- 1) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai kepada Bendahara Penerimaan/BUD tanpa penetapan);
- 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi; dan
- 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.

**7.10.3.2. Akuntansi Belanja Dan Beban**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran termasuk dokumen perubahan pelaksanaan anggaran SKPD (DPA/DPPA-SKPD).

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut. Belanja dan beban dapat diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan organisasi. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer dan beban tak terduga. Pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, yang mencakup:

**7.10.3.2.1. Belanja/Beban Operasi**

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi: (1) Belanja/Beban Pegawai, (2) Belanja/Beban Barang dan Jasa, (3) Belanja/Beban Bunga, (4) Belanja/Beban Hibah (5), Bantuan Sosial dan (6) Belanja Bantuan Keuangan.

**7.10.3.2.2. Belanja Modal**

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja modal meliputi: (1) Belanja Tanah, (2) Belanja Peralatan dan Mesin, (3) Belanja Gedung dan Bangunan, (4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, (5) Belanja Aset Tetap Lainnya, dan (6) Belanja Aset Lainnya.

**7.10.3.2.3. Belanja Tak Terduga/Beban Luar Biasa**

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

**7.10.3.2.4. Transfer/Beban Transfer**

Transfer/Beban Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.

**a. Pengakuan belanja diakui pada saat:**

- 1) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui penerbitan SP2D LS untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD;
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

**b. Pengakuan beban diakui pada saat:**

- 1) Saat timbulnya kewajiban;
- 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

**7.10.3.2.5. Akuntansi Surplus/Defisit**

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

**7.10.3.2.6. Akuntansi Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

**7.10.3.2.6.1. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penggunaan SiLPA Tahun lalu, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan, serta penggunaan SiLPA Tahun lalu. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto (sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran).

**7.10.3.2.6.2. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun Anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos Pendapatan Asli Daerah lainnya.

### 7.10.3.2.6.3. Akuntansi Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode Tahun Anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

### 7.11.1.1.1.1. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Nilai akun SiLPA yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun nilai akun SiLPA dalam Neraca memiliki nilai yang sama yakni mencakup SiLPA Tahun berjalan maupun Tahun-Tahun sebelumnya.

#### a. Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

#### b. Aset Lancar

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari: (1) Kas di Kas Daerah, (2) Kas di Bendahara Penerimaan, (3) Kas di Bendahara Pengeluaran, (4) Kas di BLUD, (5) Kas Lainnya, (6) Setara Kas, (7) Investasi Jangka Pendek, (8) Piutang Pendapatan, (9) Piutang Lainnya, (10) Penyisihan Piutang, (11) Beban Dibayar Dimuka, dan (12) Persediaan.

#### c. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya yang terbagi atas Investasi Non Permanen dan Permanen. Akun ini dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

##### 1) Investasi Non Permanen.

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan tersebut, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau diperjualbelikan/menarik kembali.

##### 2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi ini dilakukan untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

#### d. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset Tetap dibagi menjadi 6 (enam) klasifikasi, yaitu: (1) Tanah, (2) Peralatan dan Mesin, (3) Gedung dan Bangunan, (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan, (5) Aset Tetap Lainnya, dan (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan. Pengukuran Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut

untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya. Aset Lainnya terdiri dari Aset Tidak Berwujud (*Software*, Lisensi, Hak Cipta, Hasil Kajian, *Masterplan*) dan Aset Lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

f. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran, dibentuk berdasarkan kebijakan pemerintah yang sumbernya adalah dari hasil penyisihan sebagian kelebihan realisasi pendapatan digunakan sebagai Cadangan Anggaran Pembangunan. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dana cadangan yang sudah ditetapkan peruntukannya tersebut tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Pembentukan dan penggunaan dana cadangan tersebut dilakukan dengan persetujuan dewan legislatif. Apabila terdapat lebih dari satu dana cadangan, maka dana cadangan harus diungkapkan dan dirinci menurut peruntukannya. Akun ini dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk. Jika terdapat hasil yang diperoleh dari dana cadangan diperlakukan sebagai penambah nilai dana cadangan tersebut.

g. Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar kembali dan/atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari: (1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), (2) Utang Bunga, (3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, (4) Pendapatan Diterima Dimuka, (5) Utang Beban, (6) Utang Jangka Pendek Lainnya. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali dan/atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan dari penerbitan sekuritas pemerintah.

Pengakuan kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dapat timbul dari antara lain: (1) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*), (2) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), (3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*), (4) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

h. Akuntansi Ekuitas

Ekuitas merupakan pos pada laporan di neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam laporan keuangan *accrual basis*, ekuitas tidak lagi rinci dan/atau dikelompokkan seperti pada saat *cash toward accrual*.

i. Kebijakan Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi Aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pada periode tertentu. Yang dimaksud dengan penerimaan adalah semua penerimaan kas daerah yang dibukukan



dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan; sedangkan pengeluaran adalah semua pengeluaran kas daerah yang dibukukan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan.

### 1) Klasifikasi Penyajian

Arus Kas disajikan ke dalam empat kelompok aktivitas berikut.

#### a) Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang ditujukan untuk aktivitas operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari: (a) Penerimaan Perpajakan; (b) Penerimaan Retribusi; (c) Penerimaan Hibah; (d) Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Negara/Daerah dan Investasi Lainnya; (e) Lain-lain PAD yang Sah, dan (f) Transfer Masuk. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran: (a) Belanja Pegawai; (b) Belanja Barang; (c) Bunga; (d) Subsidi; (e) Hibah; (f) Bantuan Sosial; (g) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan (h) Transfer Keluar.

#### b) Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari: (a) Penjualan Aset Tetap; (b) Penjualan Aset Lainnya. Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari: (a) Perolehan Aset Tetap; (b) Perolehan Aset Lainnya.

#### c) Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain: (a) Penggunaan SILPA Tahun Lalu; (b) Penerimaan Pinjaman; (c) Penerimaan Hasil Penjualan Obligasi/Surat Utang Negara; (d) Penerimaan dari Divestasi; (e) Penerimaan Kembali Pinjaman; dan (f) Pencairan Dana Cadangan. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain: (a) Penyertaan Modal Pemerintah; (b) Pembayaran Pokok Pinjaman; (c) Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan (d) Pembentukan Dana Cadangan.

#### d) Aktivitas Non Anggaran

Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Kiriman Uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk Pihak Ketiga. Adapun Kiriman Uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah. Arus masuk kas dari aktivitas non anggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk. Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.

### 2) Metode Penyajian

Entitas pelaporan dapat menyajikan laporan arus kas dengan menggunakan cara:

- a) Metode Langsung, metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
- b) Metode Tidak Langsung, metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional non kas, penangguhan (*deferral*) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur pendapatan dan belanja dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi aset non keuangan dan pembiayaan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menggunakan metode langsung dalam menyusun laporan arus kas sebagaimana yang disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

## 7.11. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

### 7.11.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Selama periode berjalan pada Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengadakan perubahan APBD, hal ini disebabkan adanya target penerimaan yang tidak terealisasi dengan baik, sehingga perlu adanya perubahan program dan kegiatan dalam rangka penghematan belanja pemerintah daerah dan sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 ini telah memasukkan unsur Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019.

Laporan Keuangan yang telah disusun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, meliputi:

- Laporan Realisasi Anggaran;
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Neraca;
- Laporan Operasional;
- Laporan Arus Kas;
- Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- Catatan atas Laporan Keuangan.

Penjelasan lebih lanjut masing-masing jenis laporan keuangan disajikan sebagai berikut ini.

#### 7.11.1.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

##### 7.11.1.1.1. Pendapatan – LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Sumber Pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut.

**Tabel 8**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Pendapatan daerah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	42.966.598.128,00	36.560.321.314,96	85,09	(6.406.276.813,04)	35.178.837.743,93
2	Pendapatan Transfer – LRA	1.157.582.158.327,20	1.073.857.267.761,00	92,77	(83.724.890.566,20)	795.041.495.529,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	10.800.400.000,00	10.787.832.655,01	99,88	(12.567.344,99)	7.504.705.261,24
<b>JUMLAH</b>		<b>1.211.349.156.455,20</b>	<b>1.121.205.421.730,97</b>	<b>92,56</b>	<b>(90.143.734.724,23)</b>	<b>837.725.038.534,17</b>

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.211.349.156.455,20 terealisasi sebesar Rp1.121.205.421.730,97 atau 92,56%. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 Rp837.725.038.534,17 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp283.480.383.196,80. Kenaikan capaian realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 dari Tahun Anggaran 2018 terutama terjadi pada Pendapatan Asli Daerah yang melebihi dari Target serta Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Masing-masing realisasi akun Pendapatan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

7.11.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 9  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Pendapatan daerah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Pendapatan Pajak Daerah	19.151.855.000,00	16.913.698.911,36	88,31	(2.238.156.088,64)	17.877.624.532,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.035.952.375,00	4.998.895.282,00	99,26	(37.057.093,00)	3.015.612.992,09
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.934.686.786,00	1.451.789.587,00	75,04	(482.897.199,00)	1.934.686.786,00
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16.844.103.967,00	13.195.937.534,60	78,34	(3.648.166.432,40)	12.350.913.433,84
JUMLAH		42.966.598.128,00	36.560.321.314,96	85,09	(6.406.276.813,04)	35.178.837.743,93

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

7.11.1.1.1.1.2. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah merupakan Pendapatan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel 10  
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Pajak Hotel	3.000.000.000,00	4.086.851.395,36	136,23	1.086.851.395,36	2.444.817.006,00
2	Pajak Restoran	10.441.855.000,00	9.024.438.546,00	86,43	(1.417.416.454,00)	10.646.109.580,00
3	Pajak Hiburan	150.000.000,00	145.629.504,00	97,09	(4.370.496,00)	91.601.680,00
4	Pajak Reklame	42.000.000,00	17.950.408,00	42,74	(24.049.592,00)	14.962.500,00
5	Pajak Penerangan Jalan	3.570.000.000,00	2.538.764.130,00	71,11	(1.031.235.870,00)	3.672.601.023,00
6	Pajak Air Tanah	63.000.000,00	3.845.216,00	6,10	(59.154.784,00)	4.933.229,00
7	Pajak Sarang Burung Walet	52.500.000,00	12.200.000,00	23,24	(40.300.000,00)	10.500.000,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dari Batuan	500.000.000,00	152.491.289,00	30,50	(347.508.711,00)	52.441.562,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan	682.500.000,00	349.871.962,00	51,26	(332.628.038,00)	319.946.477,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	650.000.000,00	581.656.461,00	89,48	(68.343.539,00)	619.711.475,00
JUMLAH		19.151.855.000,00	16.913.698.911,36	88,31	(2.238.156.088,64)	17.877.624.532,00

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp19.151.855.000,00 terealisasi sebesar Rp16.913.698.911,36 atau 88,31%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp17.877.624.532,00 mengalami penurunan sebesar Rp963.925.620,64. Penurunan tersebut terjadi pada Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan BPHTB.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mulai Tahun Anggaran 2011 sudah melaksanakan Pendaerahan PBB yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Daerah. Sebelum dimulainya pendaerahan PBB / pemungutan PBB Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki saldo piutang dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Berkas Permohonan Pelayanan PBB-P2 Nomor: BA- 55/WPJ.02/KP.07/2014 tanggal 30 Januari 2014 dan Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBBP2, dan Aset Sitaan Nomor BA-58/WPJ.02/KP.07/2014 tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang selaku Pihak Pertama dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Pihak Kedua.

Pembayaran pajak daerah ada 2 (dua) metode yaitu metode *self assesment* dan *official assesment*, dimana *self assesment* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. *self assesment* terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dari Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan *official assesment* Sistem Pemungutan Pajak Yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Pemerintah dalam hal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk. *Official Assesment* meliputi Pajak Reklame, Pajak BPHTB dan Pajak Bumi Dan Bangunan.

7.11.1.1.1.2.1. Pendapatan Pajak Hotel

Pendapatan Pajak Hotel merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Hotel yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Hotel dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut.

Tabel 11  
Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)						
No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Losmen/Rumah Penginapan/Pesangrahan/Hotel/Rumah Kos	3.000.000.000,00	4.086.851.395,36	136,23	1.086.851.395,36	2.444.817.006,00
JUMLAH		3.000.000.000,00	4.086.851.395,36	136,23	1.086.851.395,36	2.444.817.006,00

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp4.086.851.395,36 atau 136,23%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.444.817.006,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.642.034.389,36.

7.11.1.1.1.2.2. Pendapatan Pajak Restoran

Pendapatan Pajak Restoran merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Restoran yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Restoran dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut.

Tabel 12  
Anggaran dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Restoran	625.000.000,00	981.596.683,00	157,06	356.596.683,00	877.428.380,00
2	Rumah Makan	540.000.000,00	457.606.955,00	84,74	(82.393.045,00)	207.969.986,00
3	Kantin	68.355.000,00	4.023.000,00	5,89	(64.332.000,00)	4.337.800,00
4	Catering	9.040.500.000,00	7.431.867.560,00	82,21	(1.608.632.440,00)	9.459.835.073,00
5	Kedai Kopi	168.000.000,00	149.344.348,00	88,90	(18.655.652,00)	96.538.341,00
JUMLAH		10.441.855.000,00	9.024.438.546,00	86,42	(1.417.416.454,00)	10.646.109.580,00

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp10.441.855.000,00 terealisasi sebesar Rp9.024.438.546,00 atau 86,43%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp10.646.109.580,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.621.671.034,00.

7.11.1.1.1.2.3. Pendapatan Pajak Hiburan

Pendapatan Pajak Hiburan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Restoran yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Hiburan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut.

Tabel 13  
Anggaran dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Tontonan Film/Bioskop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Diskotik, Karaoke, Club Malam dan Sejenisnya	131.257.500,00	132.400.995,00	100,87	1.143.495,00	83.766.900,00
3	Permainan Biliar, Golf, Bowling	2.205.000,00	1.084.200,00	49,17	(1.120.800,00)	565.600,00
4	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Centre)	16.537.500,00	12.144.309,00	73,43	(4.393.191,00)	7.269.180,00
JUMLAH		150.000.000,00	145.629.504,00	97,09	(4.370.496,00)	91.601.680,00

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp145.629.504,00 atau 97,09%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp91.601.680,00 mengalami kenaikan sebesar Rp54.027.824,00.

7.11.1.1.1.2.4. Pendapatan Pajak Reklame

Pendapatan Pajak Reklame merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Reklame yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Reklame dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut.

Tabel 14  
Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Reklame Papan/Bill Board/Wideotron/ Megatron	42.000.000,00	14.613.608,00	34,79	(27.386.392,00)	14.962.500,00
2	Reklame Kain	0,00	3.336.800,00	0,00	3.336.800,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
JUMLAH		42.000.000,00	17.950.408,00	42,74	(24.049.592,00)	14.962.500,00

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp42.000.000,00 terealisasi sebesar Rp17.950.408,00 atau 42,74%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp14.962.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.987.908,00.

7.11.1.1.1.2.5. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Penerangan Jalan yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Penerangan Jalan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut.

Tabel 15  
Anggaran dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Pajak Penerangan Jalan PLN	1.680.000.000,00	1.842.660.801,00	109,68	162.660.801,00	1.623.553.873,00
2	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	1.890.000.000,00	696.103.329,00	36,83	(1.193.896.671,00)	2.049.047.150,00
JUMLAH		3.570.000.000,00	2.538.764.130,00	71,11	(1.031.235.870,00)	3.672.601.023,00

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.570.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.538.764.130,00 atau 71,11%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.672.601.023,00,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.133.836.893,00. Hal ini disebabkan oleh penyaluran transfer PPJ Non PLN tidak direalisasikan tepat pada waktunya sehingga terjadi Tunda Salur Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2019.

7.11.1.1.1.2.6. Pendapatan Pajak Air Tanah

Pendapatan Pajak Air Tanah merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Air Tanah yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Air Tanah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut.

Tabel 16  
Anggaran dan Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Pajak Air Tanah	63.000.000,00	3.845.216,00	6,10	(59.154.784,00)	4.933.229,00
JUMLAH		63.000.000,00	3.845.216,00	6,10	(59.154.784,00)	4.933.229,00

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp63.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.845.216,00 atau 6,10%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.933.229,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.088.013,00.

7.11.1.1.1.2.7. Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet

Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Sarang Burung Walet yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Sarang Burung Walet dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut.

Tabel 17  
Anggaran dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Pajak Sarang Burung Walet	52.500.000,00	12.200.000,00	23,24	(40.300.000,00)	10.500.000,00
JUMLAH		52.500.000,00	12.200.000,00	23,24	(40.300.000,00)	10.500.000,00

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp52.500.000,00 terealisasi sebesar Rp12.200.000,00 atau 23,24%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp10.500.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.700.000,00.

7.11.1.1.1.2.8. Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut.

Tabel 18  
Anggaran dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Granit/ Andesit	0,00	7.972.697,00	0,00	7.972.697,00	21.500.000,00
2	Pasir dan Krikil	250.000.000,00	118.837.290,00	47,53	(131.162.710,00)	30.941.562,00
3	Mineral Bukan logam dan Lainnya	250.000.000,00	3.907.128,00	1,56	(246.092.872,00)	0,00
4	Tanah Liat	0,00	21.774.174,00	0,00	21.774.174,00	0,00
JUMLAH		500.000.000,00	152.491.289,00	30,50	(347.508.711,00)	52.441.562,00

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp152.491.289,00 atau 30,50%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp52.441.562,00 mengalami kenaikan sebesar Rp100.049.727,00.

7.11.1.1.1.2.9. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Tanah dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut.

Tabel 19  
Anggaran dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan	682.500.000,00	349.871.962,00	51,26	(332.628.038,00)	319.946.477,00

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
	Perkotaan					
	JUMLAH	682.500.000,00	349.871.962,00	51,26	(332.628.038,00)	319.946.477,00

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp682.500.000,00 terealisasi sebesar Rp349.871.962,00 atau 51,26%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp319.946.468,00 mengalami kenaikan sebesar Rp29.925.485,00, hal ini disebabkan adanya penambahan ketetapan PBBP2 setelah cetak masal yang merupakan Wajib Pajak Baru dan adanya mutasi PBBP2.

7.11.1.1.1.2.10. Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut.

Tabel 20  
Anggaran dan Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	650.000.000,00	581.656.461,00	89,48	(68.343.539,00)	619.711.475,00
	JUMLAH	650.000.000,00	581.656.461,00	89,48	(68.343.539,00)	619.711.475,00

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp650.000.000,00 terealisasi sebesar Rp581.656.461,00 atau 89,48%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp619.711.475,00 mengalami penurunan sebesar Rp38.055.014,00.

7.11.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.

Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 dipungut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Minum, Retribusi Daerah dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 21  
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.269.500.000,00	4.740.310.620,00	111,03	470.810.620,00	2.834.918.446,09
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	157.500.000,00	68.190.000,00	43,30	(89.310.000,00)	73.115.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	240.000.000,00	96.423.510,00	40,18	(143.576.490,00)	20.555.492,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	15.064.875,00	0,00	0,00	(15.064.875,00)	0,00



No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
5	Retribusi Jasa Kepelabuhan	287.437.500,00	50.471.000,00	17,56	(236.966.500,00)	55.238.000,00
6	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.500.000,00	43.500.152,00	414,29	33.000.152,00	22.646.254,00
7	Retribusi Izin Gangguan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Retribusi Izin Trayek	7.350.000,00	0,00	0,00	(7.350.000,00)	0,00
9	Retribusi Perpanjangan IMTA	48.600.000,00	0,00	0,00	(48.600.000,00)	9.139.800,00
JUMLAH		5.035.952.375,00	4.998.895.282,00	99,26	(37.057.093,00)	3.015.612.992,09

Data tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.035.952.375 terealisasi sebesar Rp4.998.895.282,00 atau sebesar 99,26%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.015.612.992,09 mengalami kenaikan sebesar Rp1.983.282.289,91

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan, Retribusi Jasa Umum dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 22  
Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.269.500.000,00	4.740.310.620,00	111,03	470.810.620,00	2.834.918.446,09
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	157.500.000,00	68.190.000,00	43,29	(89.310.000,00)	73.115.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	240.000.000,00	96.423.510,00	40,17	(143.576.490,00)	20.555.492,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	15.064.875,00	0,00	0,00	(15.064.875,00)	0,00
JUMLAH		4.682.064.875,00	4.904.924.130,00	104,76	222.859.255,00	2.928.588.938,09

Dari data tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan retribusi jasa umum Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.682.064.875,00 terealisasi sebesar Rp4.904.924.130,00 atau 104,76%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.928.588.938,09 mengalami kenaikan sebesar Rp1.976.335.191,91;

b. Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan dengan pemakaian Aset Daerah, Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kepulauan Anambas hanya terdapat satu retribusi yaitu sebagai berikut.

Tabel 23  
Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	287.437.500,00	50.471.000,00	17,56	(236.966.500,00)	55.238.000,00
JUMLAH		287.437.500,00	50.471.000,00	17,56	(236.966.500,00)	55.238.000,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Retribusi Jasa Usaha merupakan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp287.437.500,00 terealisasi sebesar Rp50.471.000,00 atau sebesar 17,56%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp55.238.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.767.000,00.

c. Retribusi Perijinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan ijin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Retribusi Perijinan Tertentu merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 24  
Anggaran dan Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Retribusi Izin Pelayanan Mendirikan Bangunan	10.500.000,00	43.500.152,00	414,29	33.000.152,00	22.646.254,00
2	Retribusi Izin Trayek Kepada Badan	7.350.000,00	0,00	0,00	(7.350.000,00)	0,00
3	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	48.600.000,00	0,00	0,00	(48.600.000,00)	9.139.800,00
JUMLAH		66.450.000,00	43.500.152,00	65,46	(22.949.848,00)	31.786.054,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran penerimaan Retribusi Perijinan Tertentu Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp66.450.000,00 terealisasi sebesar Rp43.500.152,00 atau 65,46%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp31.786.054,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.714.098,00.

7.11.1.1.1.2.1. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh Puskesmas sebagai unit penghasil.

Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 dipungut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 25  
Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas-LRA	231.500.000,00	303.933.500,00	131,29	72.433.500,00	2.834.918.446,09
2	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah-LRA	4.038.000.000,00	4.436.377.120,00	109,87	398.377.120,00	0,00
JUMLAH		4.269.500.000,00	4.740.310.620,00	111,03	470.810.620,00	2.834.918.446,09

Data tabel di atas menunjukkan anggaran penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.269.500.000,00 terealisasi sebesar Rp4.740.310.620,00 atau 111,03%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.834.918.446,09 mengalami kenaikan sebesar Rp1.905.392.173,91.

7.11.1.1.1.2.2. Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit penghasil.

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 dipungut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 26**  
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum**  
**Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	157.500.000,00	68.190.000,00	43,30	(89.310.000,00)	73.115.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>157.500.000,00</b>	<b>68.190.000,00</b>	<b>43,30</b>	<b>(89.310.000,00)</b>	<b>73.115.000,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp157.500.000,00 terealisasi sebesar Rp68.190.000,00 atau 43,30%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp73.115.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.925.000,00.

#### 7.11.1.1.1.2.3. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit penghasil.

Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 dipungut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Retribusi Pelayanan Pasar dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 27**  
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	240.000.000,00	96.423.510,00	40,18	(143.576.490,00)	20.555.492,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>96.423.510,00</b>	<b>40,18</b>	<b>(143.576.490,00)</b>	<b>20.555.492,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Kios Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp240.000.000,00 terealisasi sebesar Rp96.423.510,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp20.555.492,00 mengalami kenaikan sebesar Rp75.868.018,00.

#### 7.11.1.1.1.2.4. Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit penghasil.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 dipungut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 28**  
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Retribusi PKB – Sepeda Motor –	15.064.875,00	0,00	0,00	(15.064.875,00)	0,00

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
	Sepeda Motor Roda 2					
	<b>JUMLAH</b>	<b>15.064.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.064.875,00)</b>	<b>0,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp15.064.875,00 terealisasi sebesar Rp0,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan.

#### 7.11.1.1.1.2.5. Pendapatan Retribusi Jasa Kepelabuhanan

Pendapatan Retribusi Jasa Kepelabuhanan merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Jasa Kepelabuhanan dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit penghasil.

Retribusi Jasa Kepelabuhanan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2018 dipungut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Minum, Retribusi Jasa Kepelabuhanan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 29**  
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Kepelabuhanan Tahun 2019 dan 2018**  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Retribusi Jasa Kepelabuhanan	287.437.500,00	50.471.000,00	17,56	(236.966.500,00)	55.238.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>287.437.500,00</b>	<b>50.471.000,00</b>	<b>17,56</b>	<b>(236.966.500,00)</b>	<b>55.238.000,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Jasa Kepelabuhanan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp287.437.500,00 terealisasi sebesar Rp50.471.000,00 atau 17,56%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp55.238.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.767.000,00.

#### 7.11.1.1.1.2.6. Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Jasa Kepelabuhanan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit penghasil.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 dipungut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 30**  
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2019 dan 2018**  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.500.000,00	43.500.152,00	414,29	33.000.152,00	22.646.254,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>43.500.152,00</b>	<b>414,29</b>	<b>33.000.152,00</b>	<b>22.646.254,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp10.500.000,00 terealisasi sebesar Rp43.500.152,00 atau 414,29%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar

Rp22.646.254,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.853.898,00.

7.11.1.1.1.2.7. Pendapatan Retribusi Izin Trayek

Pendapatan Retribusi Izin Trayek merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Izin Trayek dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit penghasil.

Retribusi Izin Gangguan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 dipungut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Retribusi Izin Trayek dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 31  
Anggaran dan Realisasi Retribusi Izin Trayek Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)						
No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Retribusi Izin Trayek Kepada Badan	7.350.000,00	0,00	0,00	(7.350.000,00)	0,00
JUMLAH		7.350.000,00	0,00	0,00	(7.350.000,00)	0,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.350.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

7.11.1.1.1.2.8. Pendapatan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Pendapatan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal PTSP Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Izin Trayek dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal PTSP Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit penghasil.

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 dipungut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 32  
Anggaran dan Realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)						
No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing-LRA	48.600.000,00	0,00	0,00	(48.600.000,00)	9.139.800,00
JUMLAH		48.600.000,00	0,00	0,00	(48.600.000,00)	9.139.800,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp48.600.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp9.139.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.139.800,00. Hal ini karena pada tahun 2019 Tenaga Kerja Asing yang terdaftar di Kabupaten hanya satu orang untuk tiga jabatan sehingga tidak dikenakan retribusi, untuk itu perlu adanya tindakan kooperatif dan respon positif dari Pihak Tenaga Kerja Asing dalam melaporkan dan pembayaran retribusi serta perlunya pengawasan intensif dari SKPD yang menangani ketenagakerjaan.

7.11.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, pendapatannya diterima dan dikelola melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berupa Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Bank Riau Kepri. Realisasi Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 33  
Anggaran dan Realiasi Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah  
Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)						
No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Penyertaan Modal Pada Bank Riau Kepri	1.934.686.786,00	1.451.789.587,00	75,04	(482.897.199,00)	1.934.686.786,00
JUMLAH		1.934.686.786,00	1.451.789.587,00	75,04	(482.897.199,00)	1.934.686.786,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.934.686.786,00 terealisasi sebesar Rp1.451.789.587,00 atau 75,04%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.934.686.786,00 mengalami penurunan sebesar Rp482.897.199,00. Penurunan ini disebabkan penurunan besaran laba bersih Bank Riau Kepri Tahun Anggaran 2019 sehingga pembagian deviden kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas meningkat.

7.11.1.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2019 merupakan Pendapatan dari 4 (empat) Satuan Kerja Perangkat Kerja (SKPD) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah untuk periode Tahun Anggaran 2019 dan Tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 34  
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)						
No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Penerimaan Jasa Giro	2.500.000.000,00	970.922.439,00	38,84	(1.529.077.561,00)	1.315.323.115,54
2	Penerimaan Bunga	6.000.000.000,00	6.121.070.741,00	102,02	162.815.135,00	4.151.041.377,00
3	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	15.750.000,00	0,00	0,00	(15.750.000,00)	0,00
4	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.128.000.000,00	505.476.475,00	44,81	(622.523.525,00)	1.357.044,00
5	Pendapatan Denda Retribusi	10.000.000,00	59.557.652,00	595,58	49.557.652,00	1.200,00
6	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	367.500.000,00	0,00	0,00	(367.500.000,00)	589.908.308,00
7	Pendapatan Dari Pengembalian	3.422.750.000,00	2.600.164.685,60	75,97	(822.585.314,40)	3.428.662.322,30
8	Hasil Dari Pengelolaan dana Bergulir	16.341.780,00	41.744.394,00	255,45	(16.341.780,00)	0,00
9	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	3.383.762.187,00	2.877.410.441,00	85,04	(506.351.746,00)	2.850.100.798,00
10	Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	0,00	14.519.269,00
11	Pendapatan Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	18.819.500,00	0,00	18.819.500,00	0,00
13	Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	0,00	771.207,00	0,00	771.207,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
	JUMLAH	16.844.103.967,00	13.195.937.534,60	78,34	(3.648.166.432,40)	12.350.913.433,84

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp16.844.103.967,00 terealisasi sebesar Rp13.195.937.534,60 atau 78,34%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp12.350.913.433,84 mengalami kenaikan sebesar Rp845.024.100,76. Kenaikan terdapat pada akun Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Pendapatan Kapitasi Program JKN, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2019. Hal ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan manajemen kas dengan penempatan Deposito pada Bank Riau Kepri dan Bank BRI, pada Tahun 2019 juga terdapatnya pembayaran atas denda keterlambatan atas retribusi daerah serta penyeteroran bunga dana bergulir ke Kas Daerah. Lain-lain PAD yang Sah dapat dirinci sebagai berikut.

#### 7.11.1.1.1.4.1. Penerimaan Jasa Giro

Penerimaan Jasa Giro merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari jasa atas penempatan dana pada perbankan, penerimaan jasa giro dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 35**  
**Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jasa Giro Tahun 2019 dan 2018**  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Jasa Giro Kas Daerah	2.500.000.000,00	970.922.439,00	38,84	(1.529.077.561,00)	1.315.323.115,54
	JUMLAH	2.500.000.000,00	970.922.439,00	38,84	(1.529.077.561,00)	1.315.323.115,54

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp970.922.439 atau 38,84%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.315.323.115,54 mengalami penurunan sebesar Rp344.400.676,54 Penurunan ini sesuai dengan jasa giro pada kas daerah yang diperoleh.

#### 7.11.1.1.1.4.2. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga merupakan pendapatan bunga deposito sebagai manajemen kas yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah dengan ketentuan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan kualitas pelayanan publik. Pendapatan Bunga Deposito dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 36**  
**Anggaran dan Realisasi Penerimaan Bunga Tahun 2019 dan 2018**  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Bunga Deposito pada Bank Riau Kepri	6.000.000.000,00	5.963.193.978,00	102,02	121.070.741,00	4.151.041.377,00
2	Bunga Deposito pada Bank Rakyat Indonesia		157.876.763,00			
	JUMLAH	6.000.000.000,00	6.121.070.741,00	102,02	121.070.741,00	4.151.041.377,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Penerimaan Bunga Deposito Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp6.121.070.741,00 atau 102,02%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.151.041.377,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.970.029.364,00.

7.11.1.1.1.4.3. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan pengembalian/penyeteroran atas keterlambatan pelaksanaa pekerjaan proyek/tender pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang menjadi sumber PAD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 37  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan  
Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan Bidang Pendidikan	5.250.000,00	0,00	0,00	(5.250.000,00)	0,00
2	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan Bidang Kesehatan	5.250.000,00	0,00	0,00	(5.250.000,00)	0,00
3	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum	5.250.000,00	0,00	0,00	(5.250.000,00)	0,00
JUMLAH		15.750.000,00	0,00	0,00	(15.750.000,00)	0,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp15.750.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan.

7.11.1.1.1.4.4. Pendapatan Denda Pajak

Pendapatan Denda Pajak merupakan keterlambatan atas pembayaran pajak oleh Wajib Pajak wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Denda Pajak dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 38  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda PajakTahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ Kurang)	Realisasi 2018
1.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.000.000,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)	42.400,00
2.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.119.500.000,00	470.687.380,00	42,04	(648.812.620,00)	942.644,00
3.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.500.000,00	0,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00
4.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.500.000,00	0,00	0,00	(1.500.000,00)	372.000,00
5.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.500.000,00	0,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00
6.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.500.000,00	34.789.095,00	2.319,27	33.289.095,00	0,00
7.	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.500.000,00	0,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00
JUMLAH		1.128.000.000,00	505.476.475,00	44,81	(622.523.525,00)	1.357.044,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.128.000.000,00 terealisasi sebesar Rp505.476.475,00 atau 44,81%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.357.044,00 mengalami kenaikan sebesar Rp504.119.431,00, kenaikan ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2018 adanya kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya tepat waktu.



7.11.1.1.1.4.5. Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan Denda Retribusi merupakan pengembalian/ penyeteroran atas keterlambatan penyeteroran atas retribusi yang dikenakan sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 39  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Denda Retribusi Pelayan Kesehatan	2.500.000,00	59.557.652,00	2.382,3	57.057.652,00	0,00
2	Denda Retribusi Pelayan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.500.000,00	0,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00
3	Denda Retribusi Izin Gangguan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Denda Retribusi Pelayanan Pasar	2.000.000,00	0,00	0,00	(2.000.000,00)	1.200,00
5	Denda Retribusi Kepelabuhan	1.500.000,00	0,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00
6	Denda Izin Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Denda Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1.500.000,00	0,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00
JUMLAH		10.000.000,00	59.557.652,00	595,58	49.557.652,00	1.200,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp59.557.652,00 atau 598,58%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.200,00 mengalami peningkatan sebesar Rp59.556.452,00.

7.11.1.1.1.4.6. Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan

Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan merupakan eksekusi atas pelaksanaan pekerjaan/proyek yang tidak selesai sesuai dengan perjanjian/kontrak pelaksanaan pekerjaan yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 40  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pengadaan Barang/Jasa	367.500.000,00	0,00	0,00	(367.500.000,00)	589.908.308,00
JUMLAH		367.500.000,00	0,00	0,00	(367.500.000,00)	589.908.308,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp367.500.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp589.908.308,00 mengalami penurunan sebesar Rp589.908.308,00, hal ini disebabkan pelaksanaan kontrak Pengadaan barang/jasa sesuai perjanjian/kontrak.

7.11.1.1.1.4.7. Pendapatan Dari Pengembalian

Pendapatan Dari Pengembalian merupakan pengembalian atas pembayaran gaji dan tunjangan, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, uang muka, raskin otonom, UYHD Tahun lalu, belanja barang dan jasa, belanja tidak langsung, kesalahan pembayaran/perhitungan dan pengembalian PT. Taspen yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 41  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pengembalian Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	336.000.000,00	1.434.375,00	0,43	(334.565.625,00)	159.815.000,00
2	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	78.750.000,00	12.398.676,00	15,74	(66.351.324,00)	28.673.868,00
3	Pendapatan Dari Pengembalian Raskin Otonom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Dari Pengembalian BTL	735.000.000,00	487.789.623,00	66,37	(247.210.377,00)	0,00
5	Pendapatan Dari Pengembalian Barang dan Jasa	52.500.000,00	162.139.668,60	308,84	109.639.668,60	46.352.866,00
6	Pendapatan Dari Pengembalian Belanja Tidak Langsung di PPKD	0,00	0,00	0,00	0,00	344.899.432,00
7	Pendapatan Dari Pengembalian Kesalahan Pembayaran/Perhitungan	157.500.000,00	(12.092.500,00)	(7,68)	(169.592.500,00)	53.801.766,30
8	Pendapatan Dari Pengembalian Dari PT. TASPEN	10.500.000,00	39.240.911,00	373,72	28.740.911,00	8.400.000,00
9	Pendapatan Dari Pengembalian Kerugian Ke Kas Daerah (TP-TGR)	2.000.000.000,00	1.672.572.932,00	83,63	(327.427.068,00)	2.786.719.390,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Lainnya di Tahun Sebelumnya	52.500.000,00	236.681.000,00	450,82	184.181.000,00	0,00
JUMLAH		3.422.750.000,00	2.600.164.685,60	75,97	(822.585.314,40)	3.428.662.322,30

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pengembalian Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.422.750.000,00 terealisasi sebesar Rp2.600.164.685,60 atau 75,97%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.428.662.322,30 mengalami penurunan sebesar Rp828.497.636,70, penurunan ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2019 ditingkatkannya pengawasan atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga mengurangi kesalahan dalam realisasi belanja.

7.11.1.1.1.4.8. Hasil Dari Pengelolaan Dana Bergulir

Hasil Dari Pengembalian Dana Bergulir merupakan bunga dari pengguliran pembiayaan dalam rangka membantu perekonomian masyarakat untuk mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kepulauan Anambas yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah ddapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 42  
Anggaran dan Realisasi Hasil Dari Pengembalian Dana Bergulir Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1.	Hasil Dari Pengembalian Dana Bergulir Dari Kelompok Masyarakat	16.341.780,00	41.744.394,00	255,45	25.402.614,00	0,00
JUMLAH		16.341.780,00	41.744.394,00	255,45	25.402.614,00	0,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Hasil Dari Pengembalian Dana Bergulir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp16.341.780,00 terealisasi sebesar Rp41.744.394,00 atau 255,45%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp41.744.394,00.

7.11.1.1.1.4.9.     **Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)**

Dana Kapitasi pada FKTP merupakan pendapatan yang tidak melalui Kas Umum Daerah tetapi pendapatannya langsung ke Bendahara Penerimaan masing-masing puskesmas, dan Bendahara Umum Daerah hanya melakukan pengesahan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Belanja (SP2B) yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 43**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN Tahun 2019 dan 2018**  
**(Dalam Rupiah)**

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Tarempa	891.765.666,00	840.755.131,00	94,28	(51.010.535,00)	859.241.700,00
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Palmatak	810.810.000,00	796.737.575,00	98,26	(14.072.425,00)	820.265.440,00
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Siantan Timur	331.320.000,00	248.958.633,00	75,14	(82.361.367,00)	209.780.158,00
4	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Siantan Selatan	260.452.517,00	209.974.899,00	80,62	(50.477.618,00)	165.308.500,00
5	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Jemaja Timur	227.688.400,00	218.744.947,35	96,07	(8.943.452,65)	156.541.500,00
6	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Letung	514.168.164,00	380.522.204,65	74,01	(133.645.959,35)	398.134.500,00
7	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Siantan Tengah	347.557.440,00	181.717.051,00	52,28	(165.840.389,00)	240.829.000,00
JUMLAH		3.383.762.187,00	2.877.410.441,00	85,04	(506.351.746,00)	2.850.100.798,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.383.762.187,00 terealisasi sebesar Rp2.877.410.441,00 atau 85,04%, dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.850.100.798,00 mengalami kenaikan sebesar Rp27.309.643,00, hal ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2019 peningkatan jumlah masyarakat yang berobat ke puskesmas.

7.11.1.1.1.4.10.     **Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**

Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional merupakan besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 maka tarif non kapitasi diberlakukan pada FKTP yang melakukan pelayanan: (i) pelayanan ambulans. (ii) pelayanan obat program rujuk balik, (iii) pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik, (iv) rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis, (v) jasa pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya, serta (vi) pelayanan keluarga berencana. Alokasi dana kapitasi disesuaikan dengan peraturan kepala daerah masing-masing FKTP, dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 44**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN Tahun 2019 dan 2018**  
**(Dalam Rupiah)**

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Pendapatan Dana Non Kapitasi pada FKRTL RS. Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782.400,00
2	Pendapatan Dana Non Kapitasi pada FKRTL RS. Bergerak	0,00	0,00	0,00	0,00	11.736.869,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	0,00	14.519.269,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Dana Non Kapitasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp14.519.269,00 atau 0,00%, dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp14.519.269,00 mengalami penurunan.

7.11.1.1.1.4.11. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Realisasi Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah ini disebabkan adanya penilaian terhadap kekayaan daerah yang di sewa oleh pihak ke tiga atau masyarakat. Berikut rincian anggaran dan realisasinya.

Tabel 45  
Anggaran dan Realisasi Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Reallsasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	18.819.500,00	0,00	18.819.500,00	0,00
JUMLAH		0,00	18.819.500,00	0,00	18.819.500,00	0,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp18.819.500,00 atau 0,00%, dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp18.819.500,00.

7.11.1.1.1.4.12. Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya

Realisasi lain-lain PAD yang sah lainnya tahun 2019 merupakan Reklas atas pembayaran PBB untuk NOP Kota Batam bukan Kab Kep Anambas sebesar Rp296.832,00, dan kelebihan setoran uang persediaan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar Rp474.375,00. Berikut rincian realisasi lain-lain PAD yang sah lainnya.

Tabel 46  
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1.	Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	0,00	771.207,00	0,00	771.207,00	0,00
JUMLAH		0,00	771.207,00	0,00	771.207,00	0,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp771.207,00, dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp771.207,00

7.11.1.1.1.2. Pendapatan Transfer - LRA

Realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 47  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)	1.060.133.627.531,00	985.056.008.411,00	92,92	(75.077.619.120,00)	716.579.765.314,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (Dana Desa)	51.179.675.000,00	51.179.675.000,00	100,00	0,00	43.487.568.000,00
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Kepulauan Riau)	38.268.855.796,20	37.621.584.350,00	98,31	(647.271.446,20)	34.974.162.215,00

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
4	Bantuan Keuangan	8.000.000.000,00	0,00	0,00	(8.000.000.000,00)	0,00
JUMLAH		1.157.582.158.327,20	1.073.857.267.761,00	92,77	(83.724.890.566,20)	795.041.495.529,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.157.582.158.327,20 terealisasi sebesar Rp1.073.857.267.761,00 atau 92,77%, dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp795.041.495.529,00 mengalami kenaikan sebesar Rp278.815.772.232,00.

7.11.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Anggaran dan Realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 2019 dan 2018 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 48  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan  
Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Bagi Hasil Pajak- LRA	61.514.108.532,00	44.678.061.732,00	72,63	(16.836.046.800,00)	50.565.592.623,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam (SDA)- LRA	429.128.664.369,00	371.235.764.748,00	86,51	(57.892.899.621,00)	198.884.693.009,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)- LRA	385.760.629.000,00	388.403.719.000,00	100,69	2.643.090.000,00	364.320.074.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA	163.204.246.201,00	161.416.927.702,00	98,90	(1.787.318.499,00)	81.899.202.983,00
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA	20.525.979.429,00	19.321.535.229,00	94,13	(1.204.444.200,00)	20.910.202.699,00
JUMLAH		1.060.133.627.531,00	985.056.008.411,00	92,92	(75.077.619.120,00)	716.579.765.314,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Transfer Pusat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.060.133.627.531,00 terealisasi sebesar Rp985.056.008.411,00 atau 92,92%, dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp716.579.765.314,00 mengalami kenaikan sebesar Rp268.476.243.097,00.

Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak untuk periode Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut.

7.11.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak - LRA

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode Tahun Anggaran 2019 dan 2018. Dana Bagi Hasil Pajak dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 49  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan – LRA	0,00	18.500.142.280,00	0,00	18.500.142.280,00	0,00
2	Bagi Hasil dari PPH Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH Pasal 21 – LRA	15.953.621.446,00	9.576.589.446,00	60,03	(6.377.032.000,00)	16.251.232.983,00
3	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor	0,00	150.220.912,00	0,00	150.220.912,00	101.221.514,00

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
	Perkebunan – LRA					
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00	57.101.400,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	45.560.487.086,00	16.451.109.094,00	36,11	(29.109.377.992,00)	34.156.036.726,00
JUMLAH		61.514.108.532,00	44.678.061.732,00	72,63	(16.836.046.800,00)	50.565.592.623,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp61.514.108.532,00 terealisasi sebesar Rp44.678.061.732,00 atau 72,63%, dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp50.565.592.623,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.887.530.891,00.

7.11.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA

Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk periode Tahun Anggaran 2019 dan 2018, dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 50  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan- LRA	1.082.777.671,00	689.340.471,00	63,66	(393.437.200,00)	701.234.591,00
2	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi – LRA	264.422.360.753,00	110.141.284.185,00	41,65	(154.281.076.568,00)	54.152.301.439,00
3	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LRA	155.029.411.930,00	254.897.086.670,00	164,42	99.867.674.740,00	139.910.851.661,00
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum – LRA	8.187.880.319,00	5.118.232.654,00	62,51	(3.069.647.665,00)	3.846.943.233,00
5	Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau – LRA	290.418.240,00	290.418.240,00	100,00	0,00	228.405.600,00
6	Bagi Hasil dari Kehutanan – LRA	115.815.456,00	13.064.072,00	11,28	(102.751.384,00)	44.956.485,00
7	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	0,00	86.338.456,00	0,00	86.338.456,00	0,00
JUMLAH		429.128.664.369,00	371.235.764.748,00	86,51	(57.892.899.621,00)	198.884.693.009,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp429.128.664.369,00 terealisasi sebesar Rp371.235.764.748,00 atau 86,51%, dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp198.884.693.009,00 mengalami kenaikan sebesar Rp172.351.071.739,00.

7.11.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA

Pendapatan Dana Alokasi Umum merupakan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas Dana Alokasi Umum untuk periode Tahun Anggaran 2019, dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 51  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Dana Alokasi Umum – LRA	385.760.629.000,00	388.403.719.000,00	100,69	2.643.090.000,00	364.320.074.000,00
JUMLAH		385.760.629.000,00	388.403.719.000,00	100,69	2.643.090.000,00	364.320.074.000,00

Alokasi DAU yang diperoleh sesuai Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan ditampung dalam rekening giro Bank Riau Kepri a.n. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dana Alokasi Umum Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp385.760.629.000,00 realisasi Rp388.403.719.000,00 dibandingkan dengan Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp24.083.645.000,00.

7.11.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik- LRA

Pendapatan Dana Alokasi Khusus merupakan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk periode Tahun Anggaran 2018, dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 52  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan	6.153.612.018,00	6.153.612.018,00	100,00	0,00	6.758.000.000,00
2	Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Kesehatan	24.360.604.918,00	25.073.286.419,00	102,93	712.681.501,00	17.167.384.185,00
3	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Jalan	12.210.000.000,00	12.210.000.000,00	100,00	0,00	19.386.621.933,00
4	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Irigasi	6.777.391.239,00	6.777.391.239,00	100,00	0,00	3.631.836.000,00
5	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Sanitasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Laut dan Perikanan	2.536.531.960,00	2.536.531.960,00	100,00	0,00	3.784.005.645,00
7	Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537.032.600,00
8	Dana Alokasi Khusus Afirmasi Bidang Kesehatan	59.985.045.953,00	57.485.045.953,00	95,83	(2.500.000.000,00)	0,00
9	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560.366.000,00
10	Dana Alokasi Khusus Afirmasi Bidang Transportasi	4.674.638.935,00	4.674.638.935,00	100,00	0,00	85.000,00
11	Dana Alokasi Khusus Afirmasi Bidang Air Minum	3.625.468.266,00	3.625.468.266,00	100,00	0,00	4.354.306.910,00
12	DAK Afirmasi Bidang Sanitasi	2.014.358.000,00	2.014.358.000,00	100,00	0,00	10.746.881.000,00
13	DAK Reguler Bidang Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224.823.933,00
14	DAK Reguler Bidang Pertanian	849.845.700,00	849.845.700,00	100,00	0,00	1.747.859.777,00
15	DAK Reguler Bidang Industri Kecil dan Menengah	12.466.088.127,00	12.466.088.127,00	100,00	0,00	0,00
16	DAK Reguler Bidang Jalan	19.125.245.000,00	19.125.245.000,00	100,00	0,00	0,00
17	DAK Afirmasi Bidang Pendidikan	3.674.388.994,00	3.674.388.994,00	100,00	0,00	0,00
18	DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB	53.822.530,00	53.822.530,00	100,00	0,00	0,00
19	DAK Penugasan Bidang Air Minum	1.733.999.998,00	1.733.999.998,00	100,00	0,00	0,00
20	DAK Penugasan Pasar	2.963.204.563,00	2.963.204.563,00	100,00	0,00	0,00
JUMLAH		163.204.246.201,00	161.416.927.702,00	98,90	(1.787.318.499,00)	81.899.202.983,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp163.204.246.201,00 terealisasi sebesar Rp161.416.927.702,00 atau 98,90%, dibandingkan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp81.899.202.983,00 mengalami kenaikan sebesar Rp79.517.724.719,00.

7.11.1.1.2.1.5. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik- LRA

Pendapatan Dana Alokasi Khusus merupakan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk periode Tahun Anggaran 2019, dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 53  
Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)						
No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD – LRA	7.641.689.120,00	6.923.182.520,00	90,60	(718.506.600,00)	7.704.350.080,00
2	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD – LRA	264.712.736,00	533.750.000,00	201,63	269.037.264,00	609.000.000,00
3	Dana Tunjangan Khusus Guru	2.821.766.000,00	2.066.791.136,00	73,24	(754.974.864,00)	2.218.519.000,00
4	Dana Bantuan Operasional Kesehatan – LRA	4.512.536.213,00	4.512.536.213,00	100,00	0,00	7.174.428.484,00
5	Dana Jaminan Persalinan – LRA	406.000.000,00	406.000.000,00	100,00	0,00	0,00
6	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana – LRA	1.207.194.260,00	1.207.194.260,00	100,00	0,00	1.664.196.400,00
7	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	866.800.000,00	866.800.000,00	100,00	0,00	648.600.000,00
8	Dana Akreditasi Puskesmas	328.182.000,00	328.182.000,00	100,00	0,00	0,00
9	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.012.019.100,00	1.012.019.100,00	100,00	0,00	891.108.735,00
10	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	161.700.000,00	161.700.000,00	100,00	0,00	0,00
11	Dana Akreditasi Rumah Sakit	644.800.000,00	644.800.000,00	100,00	0,00	0,00
12	Dana Jaminan Persalinan	406.000.000,00	406.000.000,00	100,00	0,00	0,00
13	Dana Pelayanan Kepariwisata	658.580.000,00	658.580.000,00	100,00	0,00	0,00
JUMLAH		20.931.979.429,00	19.727.535.229,00	94,25	(1.204.444.200,00)	20.910.202.699,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp20.931.979.429,00 terealisasi sebesar Rp19.727.535.229 atau 94.25%, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp20.910.202.699,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.182.667.470,00

7.11.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk periode Tahun 2019 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.



Tabel 54  
Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya  
(Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus) Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Dana Otonomi Khusus-LRA	51.179.675.000,00	51.179.675.000,00	100,00	0,00	43.487.568.000,00
JUMLAH		51.179.675.000,00	51.179.675.000,00	100,00	0,00	43.487.568.000,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran penerimaan transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Alokasi Khusus (Alokasi Dana Desa) Tahun 2019 sebesar Rp51.179.675.000,00 terealisasi sebesar Rp51.179.675.000,00 atau 100%. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp43.487.568.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.692.107.000,00.

7.11.1.1.2.3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Pendapatan Transfer Daerah Lainnya merupakan transfer dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dialokasikan untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi dana bantuan/instruksi untuk pembangunan dan bantuan keuangan dari Gubernur Kepulauan Riau, berdasarkan pada Keputusan Gubernur Kepulauan Riau. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 dan 2018 dalam Laporan Realisasi Pendapatan tersebut dapat di rinci sebagai berikut.

Tabel 55  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak (dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau)	38.268.855.796,20	37.621.584.350,00	98,31	(647.271.446,20)	34.974.162.215,00
JUMLAH		38.268.855.796,20	37.621.584.350,00	98,31	(647.271.446,20)	34.974.162.215,00

Data tabel di atas menunjukkan target anggaran penerimaan transfer pemerintah daerah lainnya (Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp38.268.855.796,20 terealisasi sebesar Rp37.621.584.350,00 atau 98,31%. Dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp34.974.162.215,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.647.422.135,00. Pendapatan Transfer Daerah Lainnya ini dapat dirinci lebih lanjut pada tabel sebagai berikut.

Tabel 56  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak  
Dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Pajak Kendaraan Bermotor	9.507.850.227,80	8.635.303.430,00	90,82	(872.546.797,80)	8.836.950.530,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.264.378.602,60	5.264.378.602,00	100,00	0,60	4.296.975.936,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	5.558.375.325,20	18.071.239.112,00	325,12	12.512.863.786,80	15.513.444.219,00
4	Pajak Air Permukaan	13.142.764.421,40	94.470.420,00	0,72	(13.048.294.001,40)	(170.287.646,00)
5	Pajak Rokok	4.795.487.219,20	5.556.192.786,00	115,86	760.705.566,80	6.497.079.176,00
JUMLAH		38.268.855.796,20	37.621.584.350,00	98,31	(647.271.446,20)	34.974.162.215,00

Data tabel di atas menunjukkan target anggaran penerimaan transfer pemerintah daerah lainnya (Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp38.268.855.796,20 terealisasi sebesar Rp37.621.584.350,00 atau 98,31%. Dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp34.974.162.215,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.647.422.135,00. Hal ini disebabkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

7.11.1.1.1.3. Bantuan Keuangan - LRA

Pendapatan Transfer - Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diperuntukkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi dana bantuan keuangan /instruksi untuk pembangunan dari Gubernur Kepulauan Riau, berdasarkan pada Keputusan Gubernur Kepulauan Riau. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dalam Laporan Realisasi Pendapatan tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 57  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)						
No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	8.000.000.000,00	0,00	0,00	(8.000.000.000,00)	0,00
JUMLAH		8.000.000.000,00	0,00	0,00	(8.000.000.000,00)	0,00

Data tabel di atas menunjukkan target anggaran Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp8.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp0,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan.

7.11.1.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah (Pendapatan Dana BOS) yang tidak melalui Kas Umum Daerah tetapi pendapatannya langsung ke rekening masing-masing sekolah, dan BUD hanya melakukan pengesahan melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp10.787.832.655,01. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dalam Laporan Realisasi Pendapatan tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 58  
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)						
No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	10.800.400.000,00	10.787.832.655,01	99,88	(12.567.344,99)	7.504.705.261,24
JUMLAH		10.800.400.000,00	10.787.832.655,01	99,98	(12.567.344,99)	7.504.705.261,24

Data tabel di atas menunjukkan target anggaran Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp10.800.400.000,00 terealisasi sebesar Rp10.787.832.655,01 (99,88%) dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp7.504.705.261,24 mengalami kenaikan sebesar Rp3.283.127.393,77. Hal ini disebabkan pada Tahun 2019 selain Dana BOS Reguler dan Dana BOS Kinerja ada penambahan Dana BOS Afirmasi dari Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mendukung operasional rutin bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dialokasikan khusus untuk pembelian tablet pada sekolah-sekolah.

7.11.1.1.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan. Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2019 yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar

Rp1.063.531.487.520,99 atau sebesar 87,36% dari anggaran sebesar Rp1.217.390.533.695,62. Belanja Daerah berdasarkan jenis kelompoknya terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 serta Realisasi Tahun Anggaran 2018 diuraikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 59  
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Operasi	782.871.854.222,80	700.728.249.520,23	89,51	(82.143.604.702,57)	603.971.422.999,09
2	Belanja Modal	433.929.711.472,82	362.803.238.000,76	83,61	(71.126.473.472,06)	227.140.347.224,00
3	Belanja Tak Terduga	588.968.000,00	0,00	0,00	(588.968.000,00)	290.624.000,00
JUMLAH		1.217.390.533.695,62	1.063.531.487.520,99	87,36	(153.859.046.174,63)	831.402.394.223,09

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.217.390.533.695,62 terealisasi sebesar Rp1.063.531.487.520,99 atau 87,36%, dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp831.402.394.223,09 mengalami kenaikan sebesar Rp232.129.093.297,90.

7.11.1.1.2.1. Belanja Operasi

Anggaran dan realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 60  
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Pegawai	406.455.018.250,58	357.208.194.340,00	87,88	(49.246.823.910,58)	342.874.433.335,00
2	Belanja Barang dan Jasa	280.899.680.612,22	256.272.327.730,23	91,23	(24.626.898.381,99)	200.565.960.807,09
3	Belanja Hibah	4.541.892.000,00	4.278.388.000,00	94,20	(263.504.000,00)	4.431.333.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial	183.555.000,00	156.555.000,00	85,29	(27.000.000,00)	117.000.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan	90.791.708.360,00	82.812.329.950,00	91,21	(7.979.378.410,00)	55.982.695.857,00
JUMLAH		782.871.854.222,80	700.727.795.020,23	89,51	(82.144.059.202,57)	603.971.422.999,09

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp782.871.854.222,80 terealisasi sebesar Rp700.727.795.020,23 atau 89,51%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp603.971.422.999.09 mengalami kenaikan sebesar Rp96.756.372.021,14.

7.11.1.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara dan pensiunan serta pegawai honorer lingkup pemerintahan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Akun Belanja Pegawai ini meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah, Tambahan Penghasilan, Tunjangan Operasional KDH/WKDH dan Penerimaan Pimpinan & Anggota DPRD, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS/Non PNS, Uang Lembur dan Uang Duka Wafat/Tewas. Anggaran dan realisasi belanja ini Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 61  
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	120.890.511.275,60	106.853.642.255,00	88,39	(14.036.869.020,60)	97.464.805.759,00

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	169.155.088.530,00	141.840.767.904,00	83,85	(27.314.320.626,00)	140.934.874.832,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.496.175.000,00	3.220.293.219,00	92,11	(275.881.781,00)	2.769.506.081,00
4	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	875.282.064,00	689.373.125,00	78,76	(185.908.939,00)	539.637.500,00
5	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	188.848.215,00	24.375.000,00	12,91	(164.473.215,00)	30.250.000,00
6	Honorarium PNS	17.528.268.167,98	15.795.048.137,00	90,11	(1.733.220.030,98)	12.424.650.300,00
7	Honorarium Non PNS	93.863.864.998,00	88.366.634.400,00	94,14	(5.497.230.598,00)	88.311.638.063,00
8	Uang Duka Wafat/Tewas	456.980.000,00	418.060.300,00	91,48	(38.919.700,00)	399.070.800,00
JUMLAH		406.455.018.250,58	357.208.194.340,00	87,88	(49.246.823.910,58)	342.874.433.335,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp406.455.018.250,58 terrealisasi sebesar Rp357.208.194.340,00 atau 87,88%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp342.874.433.335,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.333.761.005,00.

Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai per SKPD Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 62  
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per SKPD Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	155.134.878.254,93	122.321.116.170,00	78,85	(32.813.762.084,93)	118.248.223.758,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	54.723.072.670,43	51.598.314.405,00	94,29	(3.124.758.265,43)	50.288.855.856,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	11.324.906.374,00	9.987.100.278,00	88,19	(1.337.806.096,00)	8.498.006.147,00
4	Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah	8.155.178.394,12	7.092.926.168,00	86,97	(1.062.252.226,12)	7.293.219.174,00
5	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	12.356.046.476,96	11.685.351.069,00	94,57	(670.695.407,96)	12.268.119.860,00
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5.047.747.406,00	4.967.379.177,00	98,41	(80.485.140,00)	4.519.078.014,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	8.731.700.964,00	8.409.995.669,00	96,32	(321.705.295,00)	8.352.532.929,00
8	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	6.624.917.922,00	6.434.847.509,00	97,13	(190.070.413,00)	6.987.338.322,00

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
9	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah	5.467.059.081,00	5.242.114.077,00	95,89	(224.945.004,00)	3.942.629.415,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10.756.431.975,00	10.276.904.589,00	95,54	(479.527.386,00)	7.949.259.697,00
11	DPRD	1.592.919.950,00	1.463.041.566,00	91,85	(129.878.384,00)	1.366.076.305,00
12	KDH/WKDH	1.200.139.375,00	888.798.643,00	74,06	(311.340.732,00)	406.511.505,00
13	Sekretariat Daerah	23.822.568.318,00	22.858.172.014,00	95,95	(964.396.304,00)	21.384.391.938,00
14	Sekretariat DPRD	14.401.223.277,00	14.033.805.334,00	97,45	(367.417.943,00)	14.623.093.974,00
15	Badan Keuangan Daerah	16.810.865.615,58	14.408.334.190,00	85,71	(2.402.531.425,58)	15.068.895.705,00
16	Inspektorat	8.619.719.668,00	8.390.708.896,00	97,34	(229.010.772,00)	6.708.576.183,00
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.235.732.793,00	4.674.799.609,00	89,29	(560.933.184,00)	4.772.410.104,00
18	Kantor Kecamatan Siantan	4.558.107.287,00	4.410.687.625,00	96,77	(147.419.662,00)	3.754.925.759,00
19	Kantor Kecamatan Jemaja	5.496.370.740,00	5.095.539.462,00	92,71	(400.831.278,00)	4.898.192.964,00
20	Kantor Kecamatan Palmatak	4.227.682.961,58	4.106.343.066,00	97,13	(121.339.895,58)	3.527.341.558,00
21	Kantor Kecamatan Siantan Timur	2.261.809.947,00	2.090.430.435,00	92,42	(71.379.512,00)	1.780.919.970,00
22	Kantor Kecamatan Siantan Selatan	2.191.610.610,00	2.129.216.400,00	97,15	1.776.102.430,00	1.776.102.430,00
23	Kantor Kecamatan Jemaja Timur	3.347.076.950,00	3.187.473.603,00	95,23	(159.603.347,00)	3.054.233.457,00
24	Kantor Kecamatan Siantan Tengah	2.748.075.315,00	2.653.475.610,00	96,56	(94.599.705,00)	2.300.921.194,00
25	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	4.986.701.183,00	4.760.139.071,00	95,46	(226.562.112,00)	4.182.519.875,00
26	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.796.351.050,00	5.071.434.674,00	87,49	(724.916.376,00)	4.955.266.722,00
27	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	14.537.118.200,00	13.242.465.619,00	91,09	(1.294.652.581,00)	15.020.593.731,00
28	Dinas Koperasi, UKM, Pedagangan dan Perindustrian	5.309.038.362,98	5.047.211.505,00	95,07	(261.826.857,98)	4.946.196.989,00
29	Kantor Kecamatan Siantan Utara	338.547.174,00	276.565.882,00	81,69	(61.981.292,00)	0,00
30	Kantor Kecamatan Jemaja Barat	651.419.955,00	403.502.025,00	61,94	(247.917.30,00)	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>406.455.018.250,58</b>	<b>357.208.194.340,00</b>	<b>87,88</b>	<b>(49.246.823.910,58)</b>	<b>342.874.433.335,00</b>

#### 7.11.1.1.2.1.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan

Akun Belanja Gaji dan Tunjangan diperuntukkan untuk pembayaran Gaji Pokok beserta tunjangan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran dan realisasi belanja Gaji dan Tunjangan Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 63**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	83.627.011.029,77	75.622.033.454,00	90,43	(8.004.977.575,77)	67.607.628.590,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga	8.579.002.461,11	7.017.368.616,00	81,80	(1.561.633.845,11)	6.598.538.318,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan	5.663.379.944,00	5.286.500.850,00	93,35	(376.879.094,00)	4.849.942.500,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional	4.482.926.382,00	3.161.654.500,00	70,53	(1.321.271.882,00)	3.124.479.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	2.129.290.660,00	1.836.430.000,00	86,25	(292.860.660,00)	1.510.895.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras	5.360.236.666,00	4.334.885.153,00	80,87	(1.025.351.513,00)	4.140.094.380,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	162.786.511,04	56.402.736,00	34,65	(106.383.775,04)	43.692.272,00
8	Belanja Pembulatan Gaji	4.084.082,00	1.193.375,00	29,22	(2.890.707,00)	1.078.687,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	3.315.579.332,68	2.134.227.721,00	64,37	(1.181.351.611,68)	1.914.040.925,00
10	Belanja Uang Paket	38.682.000,00	38.062.500,00	98,40	(619.500,00)	38.682.000,00
11	Belanja Tunjangan Badan Munsyawarah	14.433.300,00	10.627.050,00	73,63	(3.806.250,00)	12.971.700,00
12	Belanja Tunjangan Komisi	26.856.900,00	21.924.000,00	81,63	(4.932.900,00)	26.856.900,00
13	Belanja Tunjangan Badan Anggaran	15.529.500,00	11.905.950,00	76,67	(3.623.550,00)	14.067.900,00
14	Belanja Tunjangan Badan Kehormatan	7.125.300,00	4.658.850,00	65,38	(2.466.450,00)	5.663.700,00
15	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	24.481.800,00	0,00	0,00	(24.481.800,00)	15.757.875,00
16	Belanja Tunjangan Perumahan	2.965.200.000,00	2.945.000.000,00	99,32	(20.200.000,00)	3.001.200.000,00
17	Uang Duka Wafat/Tewas	675.691.507,00	616.743.750,00	91,28	(58.947.757,00)	675.567.512,00
18	Belanja Uang Jasa Pengabdian	162.000.000,00	156.450.000,00	96,57	(5.550.000,00)	0,00
19	Belanja Tunjangan Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	168.000.000,00	83,33	(33.600.000,00)	201.600.000,00
20	Belanja Tunjangan Badan Legislasi	10.413.900,00	8.373.750,00	80,41	(2.040.150,00)	10.048.500,00
21	Tunjangan Transportasi	3.004.200.000,00	3.001.200.000,00	99,90	(3.000.000,00)	3.042.000.000,00
22	Tunjangan Reses	420.000.000,00	420.000.000,00	100,00	0,00	630.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>120.890.511.275,60</b>	<b>106.853.642.255,00</b>	<b>88,39</b>	<b>(14.036.869.020,60)</b>	<b>97.464.805.759,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja gaji dan tunjangan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp120.890.511.275,60 terealisasi sebesar Rp106.853.642.255,00 atau 88,39%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp97.464.805.759,00

mengalami kenaikan sebesar Rp9.388.836.496,00.

7.11.1.1.2.1.1.2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Belanja Tambahan Penghasilan PNS merupakan tunjangan yang diberikan kepada PNS berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi belanja Tambahan Penghasilan PNS Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 64  
Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	47.403.928.350,00	40.042.375.200,00	84,47	(7.361.553.150,00)	39.610.641.528,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	3.750.137.500,00	1.373.942.500,00	36,64	(2.376.195.000,00)	1.601.977.000,00
3	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	54.291.510.000,00	47.109.592.493,00	86,77	(7.181.917.507,00)	46.188.747.961,00
4	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	51.387.339.680,00	42.828.314.771,00	83,34	(8.559.024.909,00)	43.401.897.543,00
5	Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah Bersumber Dari APBN	591.000.000,00	453.750.000,00	76,78	(137.250.000,00)	533.750.000,00
6	Belanja Tambahan Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah Bersumber Dari APBN	8.852.157.000,00	7.818.767.740,00	88,33	(1.033.389.260,00)	7.488.835.460,00
7	Belanja Tambahan Tunjangan Khusus Guru PNS Daerah Bersumber Dari APBN	2.879.016.000,00	2.214.025.200,00	76,90	(664.990.800,00)	1.909.025.340,00
JUMLAH		169.155.088.530,00	141.840.767.904,00	83,85	(27.314.320.626,00)	140.934.874.832,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp169.155.088.530,00 terealisasi sebesar Rp141.840.767.904,00 atau 83,85%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp140.934.874.832,00 mengalami kenaikan sebesar Rp905.893.072,00.

7.11.1.1.2.1.1.3. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH merupakan tunjangan komunikasi dan belanja penunjang operasional pada Pimpinan dan Anggota DPRD dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Anggaran dan realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD, KDH/WKDH Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 65**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta**  
**KDH/WKDH Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.488.500.000,00	2.488.500.000,00	100,00	0,00	2.520.000.000,00
2	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	350.000.000,00	265.593.219,00	75,88	(84.406.781,00)	249.506.081,00
3	Tunjangan Remunerasi KDH/WKDH	657.675.000,00	466.200.000,00	70,89	(191.475.000,00)	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>3.496.175.000,00</b>	<b>3.220.293.219,00</b>	<b>92,11</b>	<b>(275.881.781,00)</b>	<b>2.769.506.081,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.496.175.000,00 terealisasi sebesar Rp3.220.293.219,00 atau 92,11%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.769.506.081,00 mengalami kenaikan sebesar Rp450.787.138,00.

#### **7.11.1.1.2.1.1.4. Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah**

Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah merupakan insentif yang diberikan kepada Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan pajak apabila mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Anggaran dan realisasi Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 66**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	139.375.000,00	107.591.250,00	77,20	(31.783.750,00)	58.125.000,00
2	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	514.219.564,00	506.557.500,00	98,51	(7.662.064,00)	459.512.500,00
3	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	6.312.500,00	2.849.375,00	45,14	(3.463.125,00)	1.375.000,00
4	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	1.575.000,00	500.000,00	31,75	(1.075.000,00)	0,00
5	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	133.875.000,00	42.500.000,00	31,75	(91.375.000,00)	0,00
6	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	2.362.500,00	0,00	0,00	(2.362.500,00)	0,00
7	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	1.968.750,00	0,00	0,00	(1.968.750,00)	0,00
8	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	18.750.000,00	0,00	0,00	(18.750.000,00)	0,00
9	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	25.593.750,00	0,00	0,00	(25.593.750,00)	0,00
10	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas	31.250.000,00	29.375.000,00	94,00	(1.875.000,00)	20.625.000,00



No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
	Tanah dan Bangunan					
JUMLAH		875.282.064,00	689.373.125,00	78,76	(185.908.939,00)	539.637.500,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp875.282.064,00 terealisasi sebesar Rp689.373.125,00 atau 78,76%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp539.637.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp149.735.625,00.

7.11.1.1.2.1.1.5. Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah merupakan Insentif yang diberikan kepada Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan retribusi apabila mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Anggaran dan realisasi Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 67  
Anggaran dan Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	160.106.250,00	24.375.000,00	15,22	(135.731.250,00)	27.750.000,00
2	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum	5.906.250,00	0,00	0,00	(5.906.250,00)	2.500.000,00
3	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	9.000.000,00	0,00	0,00	(9.000.000,00)	0,00
4	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	564.933,00	0,00	0,00	(564.933,00)	0,00
5	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan	10.778.907,00	0,00	0,00	(10.778.907,00)	0,00
6	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	393.750,00	0,00	0,00	(393.750,00)	0,00
7	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	275.625,00	0,00	0,00	(275.625,00)	0,00
9	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenga Kerja Asing (IMTA)	1.822.500,00	0,00	0,00	(1.822.500,00)	0,00
JUMLAH		188.848.215,00	24.375.000,00	12,91	(164.473.215,00)	30.250.000,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp188.848.215,00 terealisasi sebesar Rp24.375.000,00 atau 12,91%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp30.250.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.875.000,00.

7.11.1.1.2.1.1.6. Honorarium PNS

Honorarium PNS merupakan honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai akibat adanya Keputusan yang diterbitkan yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan Realisasi Honorarium PNS Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 68  
Anggaran dan Realisasi Honorarium PNS Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.975.068.168,00	6.555.376.887,00	93,98	(419.691.281,00)	5.337.799.300,00
2	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.456.150.000,00	1.244.235.000,00	85,45	(211.915.000,00)	863.760.000,00
3	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima/ Pemeriksa Hasil Pekerjaan	577.835.000,00	315.490.000,00	54,60	(262.345.000,00)	583.435.000,00
4	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	5.451.159.999,98	5.091.882.500,00	93,41	(360.327.499,98)	4.031.213.750,00
5	Honorarium PPTK	1.549.155.000,00	1.328.831.250,00	85,78	(220.323.750,00)	889.325.000,00
6	Honorarium Tim Penyusunan Rekomendasi Kebijakan (TPRK)	950.000.000,00	718.950.000,00	75,68	(231.050.000,00)	335.000.000,00
7	Honorarium Focus Group Discussion (FGD)	16.000.000,00	0,00	0,00	(16.000.000,00)	10.500.000,00
8	Honorarium Khusus Satpol PP	425.700.000,00	421.482.500,00	99,01	(4.217.500,00)	322.851.250,00
9	Honorarium Majelis TP-TGR	0,00	0,00	0,00	0,00	50.766.000,00
10	Honorarium Pengelola Aset Daerah	127.200.000,00	118.800.000,00	93,40	(8.400.000,00)	0,00
JUMLAH		17.528.268.167,98	15.795.048.137,00	90,11	(1.733.220.030,98)	12.424.650.300,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Honorarium PNS Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp17.528.268.167,98 terealisasi sebesar Rp15.795.048.137,00 atau 90,11%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp12.424.650.300,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.370.397.837,00. Hal ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2019 terdapat beberapa kegiatan baru dan terdapat peningkatan jumlah pengadaan belanja barang dan jasa dan belanja modal sehingga peningkatan pada honorarium panitia pelaksana kegiatan dan pengadaan barang dan jasa.

7.11.1.1.2.1.1.7. Honorarium Non PNS

Honorarium Non PNS merupakan honorarium yang diberikan kepada Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Pegawai selain Pegawai Negeri Sipil sebagai akibat adanya Keputusan yang diterbitkan yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan Realisasi Honorarium Non PNS Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 69

Anggaran dan Realisasi Honorarium Non PNS Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	87.021.201.998,00	82.104.112.500,00	94,35	(4.917.089.498,00)	84.495.464.563,00
2	Honorarium Staf Pendukung Administrasi	1.619.577.000,00	1.563.772.456,00	96,55	(55.804.544,00)	1.205.557.500,00
3	Honorarium Peserta Pelatihan	766.450.000,00	730.950.000,00	95,37	(35.500.000,00)	469.650.000,00
4	Honorarium Tim Asistensi	0,00	0,00	0,00	0,00	20.450.000,00
5	Honorarium Non PNS Lainnya	4.456.636.000,00	3.967.799.444,00	89,03	(488.836.556,00)	2.120.516.000,00
JUMLAH		93.863.864.998,00	88.366.634.400,00	94,14	(5.497.230.598,00)	88.311.638.063,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Honorarium Non PNS Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp93.863.864.998,00 terealisasi sebesar Rp88.366.634.400,00 atau 94,14%. Realisasi Tahun Anggaran 2018 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp88.311.638.063,00 mengalami kenaikan sebesar Rp54.996.337,00

7.11.1.1.2.1.1.8. Uang Duka Wafat/Tewas

Uang Duka Wafat/Tewas merupakan Uang Kompensasi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dikarenakan meninggal dunia pada saat masih aktif bekerja. Anggaran dan Realisasi Uang Duka/Wafat Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 70  
Anggaran dan Realisasi Uang Duka Wafat/Tewas Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)						
No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Uang Duka Wafat/Tewas	456.980.000,00	418.060.300,00	91,48	(38.919.700,00)	399.070.800,00
JUMLAH		456.980.000,00	418.060.300,00	91,48	(38.919.700,00)	399.070.800,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Uang Duka Wafat/Tewas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp456.980.000,00 terealisasi sebesar Rp418.060.300,00 atau 91,48%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp399.070.800,00 mengalami kenaikan sebesar Rp18.989.500,00.

7.11.1.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian barang da/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat diluar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Akun belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja habis pakai, belanja bahan dan material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian dinas, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja jasa konsultasi, belanja barang/uang yang diserahkan kemasyarakat/pihak ketiga, belanja beasiswa dan belanja kursus/pelatihan/bimtek. Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 71  
Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)						
No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Bahan Pakai Habis	9.658.074.140,00	9.370.525.154,40	97,02	(287.548.985,60)	7.765.903.278,00
2	Belanja Bahan/Material	17.935.357.075,00	16.744.897.335,00	93,36	(1.190.459.740,00)	12.545.272.830,00
3	Belanja Jasa Kantor	48.352.672.544,84	40.621.859.911,00	84,01	(7.730.812.633,84)	32.914.186.217,00
4	Belanja Premi Asuransi	8.051.889.400,00	10.053.274.114,00	124,86	2.001.384.714,00	7.379.619.000,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.962.442.694,00	4.794.008.971,00	80,40	(1.168.433.723,00)	4.113.776.573,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.910.589.060,00	5.552.452.311,00	93,94	(358.136.749,00)	4.408.109.406,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/ Parkir	5.635.982.901,00	5.408.483.921,00	95,96	(227.498.980,00)	7.966.317.101,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.940.330.000,00	1.862.495.000,00	95,99	(77.835.000,00)	1.844.074.950,00
9	Belanja Sewa Alat Berat	30.800.000,00	30.800.000,00	100	0,00	28.050.000,00
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	255.450.000,00	207.700.000,00	81,31	(47.750.000,00)	122.100.000,00

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
11	Belanja Makanan dan Minuman	15.320.334.600,00	14.209.874.374,00	92,75	(1.110.460.226,00)	10.035.384.401,00
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	736.992.000,00	694.526.910,00	94,24	(42.465.090,00)	458.862.000,00
13	Belanja Pakaian Kerja	1.285.171.940,00	1.277.761.250,00	99,42	(7.410.690,00)	290.891.700,00
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	7.149.151.410,00	7.096.127.950,00	99,26	(53.023.460,00)	3.449.974.010,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	74.862.663.231,60	70.387.844.505,00	94,02	(4.474.818.726,60)	52.755.677.396,00
16	Belanja Pemeliharaan	8.211.578.751,00	6.510.388.739,00	79,28	(1.701.190.012,00)	9.499.542.386,00
17	Belanja Jasa Konsultansi	6.095.051.800,00	4.812.044.000,00	78,95	(1.283.007.800,00)	2.623.640.800,00
18	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	44.686.549.016,00	37.779.372.171,00	84,54	(6.907.176.845,00)	23.279.759.191,00
19	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	634.500.000,00	634.500.000,00	100	0,00	697.050.000,00
20	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.368.867.000,00	4.158.059.258,00	95,17	(210.807.742,00)	2.565.546.153,00
21	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	687.100.000,00	633.350.000,00	92,18	(53.750.000,00)	440.500.000,00
22	Belanja Bantuan Operasional Sekolah	9.616.659.548,78	10.149.418.880,83	105,54	532.759.332,05	12.991.862.965,09
23	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	2.683.873.500,00	2.681.773.500,00	99,92	(2.100.000,00)	2.288.869.500,00
24	Belanja Pelayanan Kesehatan	425.000.000,00	336.543.975,00	79,19	(88.456.025,00)	100.990.950,00
25	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	402.600.000,00	264.700.000,00	65,75	(137.900.000,00)	0,00
JUMLAH		280.899.680.612,22	256.272.782.230,23	91,23	(24.626.898.381,99)	200.565.960.807,09

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp280.899.680.612,22 terealisasi sebesar Rp256.272.782.230,23 atau 91,23%. Dibandingkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp200.565.960.807,09 mengalami kenaikan sebesar Rp55.706.821.423,14.

Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 72  
Anggaran dan Realisasi SKPD atas Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	44.296.966.450,78	39.870.140.247,83	90,01	(4.426.826.202,95)	26.471.767.636,09
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	54.904.771.038,00	50.184.523.113,00	91,40	(4.720.247.925,00)	39.346.622.530,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	36.924.704.330,20	30.948.082.356,00	83,81	(5.976.621.974,20)	28.931.886.153,00
4	Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan	4.054.740.026,00	3.979.138.795,00	98,14	(75.601.231,00)	3.407.622.940,00

No	SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
	Daerah					
5	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	7.335.386.063,00	6.969.902.866,00	95,02	(365.483.197,00)	4.648.727.969,00
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.034.385.000,00	2.027.268.089,00	99,65	(7.116.911,00)	2.004.416.166,00
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	7.383.737.991,00	6.819.859.411,00	92,36	(563.878.580,00)	7.009.821.797,00
8	Dinas Penanaman Modal PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2.073.150.400,00	1.990.260.593,00	96,00	(82.889.807,00)	2.394.825.680,00
9	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah	2.123.505.200,00	2.116.578.080,00	99,67	(6.927.120,00)	1.861.399.728,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.990.892.600,00	1.980.336.999,00	99,47	(10.555.601,00)	1.351.923.546,00
11	Sekretariat Daerah	38.111.885.476,00	35.983.271.883,00	94,41	(2.128.613.593,00)	28.092.569.778,00
12	Sekretariat DPRD	24.293.395.331,00	21.367.385.287,00	87,96	(2.926.010.044,00)	18.437.538.022,00
13	Badan Keuangan Daerah	7.665.977.031,40	7.225.030.850,00	94,25	(440.946.181,40)	6.064.088.380,00
14	Inspektorat	4.117.695.232,00	3.922.819.627,00	95,27	(194.875.605,00)	3.133.138.435,00
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.013.197.001,84	5.499.173.326,40	91,45	(514.023.675,44)	3.337.932.428,00
16	Kantor Kecamatan Siantan	2.297.728.500,00	2.197.643.400,00	95,64	(100.085.100,00)	1.510.060.911,00
17	Kantor Kecamatan Jemaja	1.267.694.199,00	1.235.765.079,00	97,48	(31.929.120,00)	1.161.528.000,00
18	Kantor Kecamatan Palmatak	1.130.206.000,00	1.129.787.309,00	99,96	(418.691,00)	1.073.983.580,00
19	Kantor Kecamatan Siantan Timur	695.136.000,00	685.276.453,00	98,58	(9.859.547,00)	797.555.450,00
20	Kantor Kecamatan Siantan Selatan	694.162.200,00	693.282.578,00	99,87	(879.622,00)	684.652.420,00
21	Kantor Kecamatan Jemaja Timur	523.450.000,00	508.247.133,00	97,10	(15.202.867,00)	466.841.000,00
22	Kantor Kecamatan Siantan Tengah	705.204.000,00	705.128.439,00	99,99	(75.561,00)	805.119.264,00
23	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5.650.546.872,00	5.408.699.227,00	95,72	(241.847.645,00)	5.357.850.345,00
24	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.529.766.410,00	7.332.231.402,00	97,38	(197.535.008,00)	3.731.290.382,00
25	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	13.642.604.060,00	12.161.203.198,00	89,14	(1.481.400.862,00)	6.903.602.013,00
26	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	3.002.673.200,00	2.906.795.329,00	96,81	(95.877.871,00)	1.579.196.254,00
27	Kantor Kecamatan Siantan Utara	169.100.000,00	165.309.000,00	97,76	(3.791.000,00)	0,00
28	Kantor Kecamatan Jemaja Barat	267.020.000,00	259.642.160,00	97,24	(7.377.840,00)	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>280.899.680.612,22</b>	<b>256.272.782.230,23</b>	<b>91,23</b>	<b>(24.626.898.381,99)</b>	<b>200.565.960.807,09</b>

7.11.1.1.2.1.1. Belanja Bahan Pakai Habis

Belanja Bahan Pakai Habis merupakan belanja bahan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran. Anggaran dan realisasi belanja bahan pakai habis Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 73  
Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Bahan Pakai Habis Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Alat Tulis Kantor	4.077.016.240,00	3.992.670.896,00	97,93	(84.345.344,00)	3.138.853.502,00
2	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	618.385.700,00	574.857.295,00	92,96	(43.528.405,00)	543.489.280,00
3	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	656.967.000,00	629.875.700,00	95,88	(26.041.300,00)	426.748.550,00
4	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	967.882.200,00	947.300.975,00	97,87	(20.581.225,00)	613.166.450,00
5	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.860.442.000,00	2.784.215.863,00	97,34	(76.226.137,00)	2.523.725.796,00
6	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	30.000.000,00	29.964.000,00	99,88	(36.000,00)	0,00
7	Belanja Pengisian Tabung Gas	113.839.000,00	102.125.000,00	89,71	(11.714.000,00)	102.770.000,00
8	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	275.237.000,00	251.210.475,40	91,27	(24.026.524,60)	417.149.700,00
9	Belanja perlengkapan Olah Raga	58.305.000,00	58.304.950,00	100,00	(50,00)	0,00
JUMLAH		9.658.074.140,00	9.370.525.154,40	97,02	(287.548.985,60)	7.765.903.278,00

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Bahan Pakai Habis Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp9.658.074.140,00 terealisasi sebesar Rp9.370.525.154,40 atau 97,02%. Dibandingkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp7.765.903.278,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.604.621.876,40

7.11.1.1.2.1.2.2. Belanja Bahan/Material

Belanja Bahan/Material merupakan belanja untuk pembelian bahan baku bangunan, bibit tanaman/ternak, nbahan obat-obatan, bahan kimia, bahan pembelajaran, alat perlengkapan, bahan sembako dan bahan meterial lainnya. Anggaran dan realisasi belanja bahan/material Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 74  
Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Bahan/Material Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	9.240.000,00	92,40	(760.000,00)	275.391.600,00
2	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	21.160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3	Belanja Bibit Ternak	179.700.000,00	179.700.000,00	100,00	0,00	178.957.296,00
4	Belanja Bahan Obat-Obatan	11.559.781.714,00	10.722.662.065,00	92,76	(837.119.649,00)	7.897.205.526,00
5	Belanja Bahan Kimia	97.100.000,00	88.880.000,00	91,53	(8.220.000,00)	0,00
6	Belanja Persediaan Makanan Pokok	16.000.000,00	15.958.100,00	99,74	(41.900,00)	19.694.300,00
7	Belanja Bahan Pembelajaran	510.509.250,00	503.209.125,00	98,57	(7.300.125,00)	1.043.451.157,00

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
8	Belanja Alat Perlengkapan	2.612.830.531,00	2.516.906.122,00	96,33	(95.924.409,00)	1.398.851.924,00
9	Belanja Bahan Sembako	1.552.102.780,00	1.491.447.660,00	96,09	(60.655.120,00)	1.195.995.227,00
10	Belanja Bahan Material Lainnya	1.376.172.800,00	1.216.894.263,00	88,43	(159.278.537,00)	534.725.800,00
JUMLAH		17.935.357.075,00	16.744.897.335,00	93,36	(1.190.459.740,00)	12.545.272.830,00

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Bahan/Material Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp17.935.357.075,00 terealisasi sebesar Rp16.744.897.335,00 atau 93,36%. Dibandingkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp12.545.272.830,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.199.624.505,00.

7.11.1.1.2.3. Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Kantor merupakan belanja jasa untuk keperluan perkantoran. Anggaran dan realisasi belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 75  
Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Jasa Kantor Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Telepon	103.440.000,00	101.069.250,00	97,71	(2.370.750,00)	94.515.650,00
2	Belanja Air	125.936.443,00	113.311.550,00	89,98	(12.624.893,00)	80.358.700,00
3	Belanja Listrik	3.705.545.845,00	3.365.824.359,00	90,83	(339.721.486,00)	2.869.029.777,00
4	Belanja Surat Kabar/Majalah	698.863.650,00	568.706.000,00	81,38	(130.157.650,00)	725.548.225,00
5	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet	3.007.235.941,00	2.967.068.133,00	98,66	(40.167.808,00)	3.800.907.597,00
6	Belanja Paket/Pengiriman	264.850.000,00	254.081.750,00	95,93	(10.768.250,00)	134.417.000,00
7	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.565.406.076,84	10.123.037.158,00	80,56	(2.442.368.918,84)	6.381.516.769,00
8	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	60.000.000,00	46.309.430,00	77,18	(13.690.570,00)	1.055.000,00
9	Belanja Jasa Administrasi	883.500.000,00	532.290.500,00	60,25	(351.209.500,00)	599.000.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	18.227.112.789,00	14.217.100.138,00	78,00	(4.010.012.651,00)	11.982.787.973,00
11	Belanja Jasa Cleaning Service	429.050.000,00	403.062.000,00	93,94	(25.988.000,00)	50.470.000,00
12	Belanja Jasa Electronical Service	141.495.000,00	136.430.000,00	96,42	(5.065.000,00)	70.850.400,00
13	Belanja Jasa Publikasi	5.889.368.800,00	5.809.879.040,00	98,65	(79.489.760,00)	5.082.453.826,00
14	Belanja Jasa Kantor Lainnya	2.250.868.000,00	1.983.690.603,00	88,13	(267.177.397,00)	1.041.275.300,00
JUMLAH		48.352.672.544,84	40.621.859.911,00	84,01	(7.730.812.633,84)	32.914.186.217,00

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp48.352.672.544,84 terealisasi sebesar Rp40.621.859.911,00 atau 84,01%. Dibandingkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp32.914.186.217,00 kenaikan sebesar Rp7.707.673.694,00. Hal ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2019 Pemindahan beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang pindah ke Kantor Bupati di Pasir Peti sehingga kebutuhan belanja jasa kantor meningkat, serta adanya kegiatan-kegiatan yang membutuhkan belanja transportasi dan akomodasi dan belanja jasa tenaga ahli/narasumber.

#### 7.11.1.1.2.1.2.4. Belanja Premi Asuransi

Belanja Premi Asuransi merupakan pengeluaran atas pembayaran premi asuransi kesehatan untuk pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anggaran dan realisasi belanja premi asuransi Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 76

#### Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Premi Asuransi Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	7.832.095.000,00	9.847.423.714,00	125,73	2.015.328.714,00	7.379.619.000,00
2	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	219.794.400,00	205.850.400,00	93,66	(13.944.000,00)	0,00
JUMLAH		8.051.889.400,00	10.053.274.114,00	124,86	2.001.384.714,00	7.379.619.000,00

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja premi asuransi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp8.051.889.400,00 terealisasi sebesar Rp10.053.274.114,00 atau 124,86%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp7.379.619.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.673.655.114,00 ini merupakan DAU Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang langsung ditransfer oleh Kementerian Keuangan ke BPJS Kesehatan berdasarkan SP2D 190191304029033 pada Tanggal 29 November 2019 sebesar Rp2.643.090.000,00.

#### 7.11.1.1.2.1.2.5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor merupakan pengeluaran atas pembayaran jasa service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak/pelumas, pajak kendaraan dan Surat Tanda Motor Kendaraan pada kendaraan dinas dilingkungan pemerintah kabupaten kepulauan anambas. Anggaran dan realisasi belanja perawatan kendaraan bermotor Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 77

#### Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja perawatan kendaraan bermotor Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Jasa Service	1.565.659.694,00	1.138.420.165,00	72,71	(427.239.529,00)	1.085.747.128,00
2	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.028.965.000,00	1.813.276.925,00	89,37	(215.688.075,00)	1.433.961.245,00
3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas	1.772.997.400,00	1.690.260.081,00	95,33	(82.737.319,00)	1.344.273.000,00
4	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	575.820.600,00	147.070.000,00	25,54	(428.750.600,00)	8.074.400,00
5	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	19.000.000,00	4.981.800,00	26,22	(14.018.200,00)	241.720.800,00
JUMLAH		5.962.442.694,00	4.794.008.971,00	80,40	(1.168.433.723,00)	4.113.776.573,00

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja perawatan kendaraan bermotor Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.962.442.694,00 terealisasi sebesar Rp4.794.008.971,00 atau 80,40%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.113.776.573,00 mengalami kenaikan sebesar Rp680.232.398,00

#### 7.11.1.1.2.1.2.6. Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Cetak dan Penggandaan merupakan pengeluaran atas belanja barang-barang cetakan dan belanja penggandaan/fotocopy. Anggaran dan realisasi belanja Cetak dan Penggandaan Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.



**Tabel 78**  
**Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Cetak dan Penggandaan Tahun 2019 dan 2018**  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Cetak	3.713.118.950,00	3.437.318.636,00	92,57	(275.800.314,00)	2.971.160.050,00
2	Belanja Penggandaan	2.197.470.110,00	2.115.133.675,00	96,25	(82.336.435,00)	1.436.949.356,00
<b>JUMLAH</b>		<b>5.910.589.060,00</b>	<b>5.552.452.311,00</b>	<b>93,94</b>	<b>(358.136.749,00)</b>	<b>4.408.109.406,00</b>

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja cetak dan penggandaan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.910.589.060,00 terealisasi sebesar Rp5.552.452.311,00 atau 93,94%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.408.109.406,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.144.342.905,00

#### 7.11.1.1.2.1.2.7. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir merupakan pengeluaran atas belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas, sewa gedung kantor, sewa gudang, sewa ruang rapat/pertemuan sewa tempat parkir/uang tambat. Anggaran dan realisasi belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 79**  
**Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Tahun 2019 dan 2018**  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	340.697.500,00	280.572.420,00	82,35	(60.125.080,00)	245.693.000,00
2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.675.885.401,00	4.604.689.501,00	98,48	(71.195.900,00)	7.234.351.130,00
3	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	552.520.000,00	456.342.000,00	82,59	(96.178.000,00)	434.082.500,00
4	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/ Hanggar Sarana Mobilitas	66.880.000,00	66.880.000,00	100,00	0,00	52.190.471,00
<b>JUMLAH</b>		<b>5.635.982.901,00</b>	<b>5.408.483.921,00</b>	<b>95,96</b>	<b>(227.498.980,00)</b>	<b>7.966.317.101,00</b>

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.635.982.901,00 terealisasi sebesar Rp5.408.483.921,00 atau 95,96%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp7.966.317.101,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.557.833.180,00

#### 7.11.1.1.2.1.2.8. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Belanja Sewa Sarana Mobilitas merupakan pengeluaran atas belanja sewa sarana mobilitas darat dan air. Anggaran dan realisasi belanja Sewa Sarana Mobilitas Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 80**  
**Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Sewa Sarana Mobilitas Tahun 2019 dan 2018**  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	128.400.000,00	102.500.000,00	79,83	(25.900.000,00)	82.695.000,00
2	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	1.811.930.000,00	1.759.995.000,00	97,13	(51.935.000,00)	1.761.379.950,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.940.330.000,00</b>	<b>1.862.495.000,00</b>	<b>95,99</b>	<b>(77.835.000,00)</b>	<b>1.844.074.950,00</b>

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Sewa Sarana Mobilitas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.940.330.000,00 terealisasi sebesar Rp1.862.495.000,00 atau 95,99%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.844.074.950,00 mengalami kenaikan sebesar Rp18.420.050,00.

**7.11.1.1.2.1.2.9. Belanja Sewa Alat Berat**

Belanja Sewa Alat Berat merupakan pengeluaran atas belanja sewa alat berat berupa eskavator. Anggaran dan realisasi belanja sewa alat berat Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 81****Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Sewa Alat Berat Tahun 2019 dan 2018****(Dalam Rupiah)**

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Sewa Eskavator	30.800.000,00	30.800.000,00	100,00	0,00	28.050.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>30.800.000,00</b>	<b>30.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.050.000,00</b>

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Sewa Alat Berat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp30.800.000,00 terealisasi sebesar Rp30.800.000,00 atau 100,00%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp28.050.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.750.000,00.

**7.11.1.1.2.1.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor merupakan pengeluaran atas belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor. Anggaran dan realisasi belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 82****Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor****Tahun 2019 dan 2018****(Dalam Rupiah)**

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Sewa Meja Kursi	40.000.000,00	32.000.000,00	80,00	(8.000.000,00)	59.000.000,00
2	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	0,00	0,00
4	Belanja Sewa Sound System	26.200.000,00	26.200.000,00	100,00	0,00	10.000.000,00
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	172.250.000,00	132.730.000,00	77,06	(39.520.000,00)	53.100.000,00
6	Belanja Sewa Komputer dan Printer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>255.450.000,00</b>	<b>207.930.000,00</b>	<b>81,40</b>	<b>(47.750.000,00)</b>	<b>122.100.000,00</b>

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp255.450.000,00 sebesar Rp207.700.000,00 atau 81,40%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp122.100.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp85.830.000,00.

**7.11.1.1.2.1.2.11. Belanja Makanan dan Minuman**

Belanja Makanan dan Minuman merupakan pengeluaran atas belanja makanan dan minuman harian pegawai, belanja makan dan minuman rapat, belanja makan dan minuman tamu dan makan dan minuman kegiatan. Anggaran dan realisasi belanja makanan dan minuman Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 83****Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Makanan dan Minuman Tahun 2019 dan 2018****(Dalam Rupiah)**

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	221.760.000,00	130.240.000,00	58,73	(91.520.000,00)	188.822.000,00

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
2	Belanja Makan dan Minuman Rapat	2.043.609.000,00	1.789.426.352,00	87,56	(254.182.648,00)	1.422.299.528,00
3	Belanja Makan dan Minuman Tamu	2.818.932.400,00	2.766.080.896,00	98,13	(52.851.504,00)	1.807.642.632,00
4	Belanja Makan dan Minuman Kegiatan	10.236.033.200,00	9.524.127.126,00	93,05	(711.906.074,00)	6.616.620.241,00
<b>JUMLAH</b>		<b>15.320.334.600,00</b>	<b>14.209.874.374,00</b>	<b>92,75</b>	<b>(1.110.460.226,00)</b>	<b>10.035.384.401,00</b>

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Makanan dan Minuman Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp15.320.334.600,00 terealisasi sebesar Rp14.209.874.374,00 atau 92,75%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp10.035.384.401,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.174.489.973,00.

#### 7.11.1.1.2.1.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya merupakan pengeluaran atas belanja pakaian dinas bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta pegawai negeri sipil maupun pegawai honorer/pegawai tidak tetap beserta atribut kedinasan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi belanja pakaian dinas dan atributnya Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 84**  
**Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Tahun 2019 dan 2018**  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Pakaian Dinas KDH/WKDH	57.000.000,00	53.716.410,00	94,24	(3.283.590,00)	45.705.000,00
2	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	57.200.000,00	55.000.000,00	96,15	(2.200.000,00)	56.760.000,00
3	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	70.000.000,00	68.200.000,00	97,43	(1.800.000,00)	0,00
4	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	507.292.000,00	474.765.500,00	93,59	(32.526.500,00)	323.837.000,00
5	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	33.000.000,00	30.800.000,00	93,33	(2.200.000,00)	32.560.000,00
6	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	12.500.000,00	12.045.000,00	96,36	(455.000,00)	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>736.992.000,00</b>	<b>694.526.910,00</b>	<b>94,24</b>	<b>(42.465.090,00)</b>	<b>458.862.000,00</b>

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp736.992.000,00 terealisasi sebesar Rp694.526.910,00 atau 94,24%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp458.862.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp235.664.910,00

#### 7.11.1.1.2.1.2.13. Belanja Pakaian Kerja

Belanja Pakaian Kerja merupakan pengeluaran atas belanja pakaian kerja bagi pegawai negeri sipil maupun pegawai honorer/pegawai tidak tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi belanja pakaian kerja Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 85**  
**Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Pakaian Kerja Tahun 2019 dan 2018**  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	853.887.940,00	848.048.500,00	99,32	(5.839.440,00)	260.894.700,00
2	Belanja Pakaian Kerja Lainnya	431.284.000,00	429.712.750,00	99,64	(1.571.250,00)	29.997.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.285.171.940,00</b>	<b>1.277.761.250,00</b>	<b>99,42</b>	<b>(7.410.690,00)</b>	<b>290.891.700,00</b>

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Pakaian Kerja Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.285.171.940,00 terealisasi sebesar Rp1.277.761.250,00 atau 98,36%. Realisasi Tahun Anggaran 2019 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp290.891.700,00 mengalami kenaikan sebesar Rp986.869.550,00.

7.11.1.1.2.1.2.14. **Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu**

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu merupakan pengeluaran atas belanja pakaian adat daerah, belanja pakaian batik tradisional, belanja pakaian olahraga bagi pegawai negeri sipil maupun pegawai honorer/pegawai tidak tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan belanja pakaian seragam sekolah serta belanja pakaian Paskibraka. Anggaran dan realisasi belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 86**  
**Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu**  
**Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)						
No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Pakaian Adat Daerah	881.198.455,00	864.996.800,00	98,16	(16.201.655,00)	1.153.673.650,00
2	Belanja Pakaian Batik Tradisional	498.750.000,00	495.544.500,00	99,36	(3.205.500,00)	389.922.050,00
3	Belanja Pakaian Olahraga	2.342.601.755,00	2.327.797.700,00	99,37	(14.804.055,00)	946.478.360,00
4	Belanja Pakaian Seragam Sekolah	3.220.641.200,00	3.205.835.450,00	99,54	(14.805.750,00)	788.779.000,00
5	Belanja Pakaian PASKIBRAKA	194.760.000,00	190.866.300,00	98,00	(3.893.700,00)	171.120.950,00
6	Belanja Pakaian LINMAS	11.200.000,00	11.087.200,00	98,99	(112.800,00)	0,00
JUMLAH		7.149.151.410,00	7.096.127.950,00	99,26	(53.023.460,00)	3.449.974.010,00

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.149.151.410,00 terealisasi sebesar Rp7.096.127.950,00 atau 99,26%. Realisasi Tahun Anggaran 2019 jika dibandingkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3,449,974,010.00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.646.153.940,00

7.11.1.1.2.1.2.15. **Belanja Perjalanan Dinas**

Belanja Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran atas biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula guna keperluan urusan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan. Anggaran dan realisasi belanja perjalanan dinas Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 87**  
**Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)						
No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.467.852.270,00	23.809.485.169,00	93,49	(1.658.367.101,00)	18,782,736,096.00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.294.810.961,60	46.578.359.336,00	94,49	(2.716.451.625,60)	33,972,941,300.00
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	100.000.000,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00
JUMLAH		74.862.663.231,60	70.387.844.505,00	94,02	(4.474.818.726,60)	52.755.677.396,00

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp74.862663.231,60 terealisasi sebesar Rp70.387.844.505,00 atau 94,02%. Realisasi Tahun Anggaran 2019 jika dibandingkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp52.755.677.396,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.632.167.109,00

**7.11.1.1.2.1.2.16. Belanja Pemeliharaan**

Belanja Pemeliharaan merupakan pengeluaran atas pemeliharaan bersifat rutin atas Aset Tetap. Anggaran dan realisasi belanja pemeliharaan Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 88****Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Pemeliharaan Tahun 2019 dan 2018****(Dalam Rupiah)**

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.277.816.750,00	1.161.364.000,00	50,99	(1.116.452.750,00)	1,189,591,039.00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.744.920.981,00	1.554.234.807,00	89,07	(190.686.174,00)	1,648,946,881.00
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	969.963.390,00	775.198.000,00	79,92	(194.765.390,00)	6,175,474,553.00
4	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.218.877.630,00	3.019.591.932,00	93,81	(199.285.698,00)	485,529,913.00
<b>JUMLAH</b>		<b>8.211.578.751,00</b>	<b>6.510.388.739,00</b>	<b>79,28</b>	<b>(1.701.190.012,00)</b>	<b>9.499.542.386,00</b>

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp8.211.578.751,00 terealisasi sebesar Rp6.510.388.739,00 atau 79,28%. Realisasi Tahun Anggaran 2019 jika dibandingkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp9.499.542.386,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.989.153.647,00.

**7.11.1.1.2.1.2.17. Belanja Jasa Konsultansi**

Belanja Jasa Konsultansi merupakan pengeluaran atas pembayaran kepada penyedia konsultansi terhadap kegiatan yang dilakukan dengan aktif, tekun dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta dan menghasilkan suatu pengetahuan dan terhadap kegiatan proses mendefinisikan tujuan, membuat strategi/cara-cara untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktifitas kerja. Anggaran dan realisasi belanja jasa konsultansi Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 89****Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Jasa Konsultansi Tahun 2019 dan 2018****(Dalam Rupiah)**

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	5.694.758.800,00	4.443.402.000,00	78,03	(1.251.356.800,00)	2,033,290,800.00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	226.293.000,00	195.074.000,00	86,20	(31.219.000,00)	446,350,000.00
3	Belanja Jasa Konsultansi Hukum	144.000.000,00	144.000.000,00	100,00	0,00	144,000,000.00
4	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Rek Ini dipindahkan ke BM)	30.000.000,00	29.568.000,00	98,56	(432.000,00)	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>6.095.051.800,00</b>	<b>4.812.044.000,00</b>	<b>78,95</b>	<b>(1.283.007.800,00)</b>	<b>2.623.640.800,00</b>

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp6.095.051.800,00 terealisasi sebesar Rp4.812.044.000,00 atau 78,95%. Realisasi Tahun Anggaran 2018 jika dibandingkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.623.640.800,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.188.403.200,00.

**7.11.1.1.2.1.2.18. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga**

Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga merupakan pengeluaran atas pembelian barang-barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga guna keperluan urusan dinas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran dan

realisasi belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 90  
**Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Barang Untuk Diserahkan  
Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	25.119.056.016,00	21.421.793.952,00	85,28	(3.697.262.064,00)	18,567,257,791.00
2	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	19.567.493.000,00	16.357.578.219,00	83,60	(3.209.914.781,00)	4,712,501,400.00
<b>JUMLAH</b>		<b>44.686.549.016,00</b>	<b>37.779.372.171,00</b>	<b>84,54</b>	<b>(6.907.176.845,00)</b>	<b>23,279,759,191.00</b>

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp44.686.549.016,00 terealisasi sebesar 37.779.372.171,00 atau 84,54%. Realisasi Tahun Anggaran 2019 jika dibandingkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp23.279.759.191,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.499.612.980.00.

Perincian Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan pada masyarakat antara lain sebagai berikut.

Tabel 91  
**Belanja Barang Yang Di Serahkan Kepada Masyarakat pada SKPD Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	4.650.927.900,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	97.537.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4.588.993.994,00
4	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.318.766.200,00
5	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	164.395.000,00
6	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	7.242.257.678,00
7	Dinas Pariwisata dari Kebudayaan	1.567.845.860,00
8	Sekretariat Daerah	1.376.085.920,00
9	Kecamatan Siantan	268.054.600,00
10	Kecamatan Siantan Timur	11.415.800,00
11	Kecamatan Jemaja Timur	12.980.000,00
12	Kecamatan Siantan Utara	5.450.000,00
13	Badan Keuangan Daerah	117.084.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>21.421.793.952,00</b>

Perincian Belanja Barang dan Jasa SKPD yang diserahkan pada pihak ketiga antara lain sebagai berikut.

Tabel 92  
**Belanja Barang Yang Di Serahkan Kepada Masyarakat pada SKPD Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.102.996.724,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	13.327.577.395,00
3	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	199.826.000,00
4	Sekretariat Daerah	467.273.000,00
5	Kecamatan Palmatak	134.245.100,00
6	Kecamatan Siantan Tengah	114.000.000,00
7	Badan Keuangan Daerah	11.660.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>16.357.578.219,00</b>

**7.11.1.1.2.1.2.19. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS**

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS merupakan pengeluaran atas beasiswa pendidikan tugas belajar PNS guna keperluan urusan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan serta menunjang keprofesionalisme kinerja aparatur pemerintah. Anggaran dan realisasi belanja Beasiswa Pendidikan PNS Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 93****Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Tahun 2019 dan 2018****(Dalam Rupiah)**

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	474.500.000,00	474.500.000,00	100	0,00	537,050,000.00
2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	160.000.000,00	160.000.000,00	100	0,00	160,000,000.00
<b>JUMLAH</b>		<b>634.500.000,00</b>	<b>634.500.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>697.050.000,00</b>

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp634.500.000,00 terealisasi sebesar Rp634.500.000,00 atau 100%. Realisasi Tahun Anggaran 2019 jika dibandingkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp697.050.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp 62.550.000,00.

**7.11.1.1.2.1.2.20. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS merupakan pengeluaran atas biaya kursus-kursus singkat/pelatihan PNS, biaya sosialisasi bagi PNS/Non PNS, bimbingan teknis bagi PNS/Non PNS guna keperluan urusan dinas yang diselenggarakan oleh pihak lain dan diwajibkan untuk membayar uang kontribusi. Anggaran dan realisasi belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 94****Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun 2019 dan 2018****(Dalam Rupiah)**

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	3.380.577.000,00	3.300.031.200,00	97,62	(80.545.800,00)	1,519,738,800.00
2	Belanja Sosialisasi	49.200.000,00	49.200.000,00	100	0,00	45,000,000.00
3	Belanja Bimbingan Teknis	939.090.000,00	808.828.058,00	86,13	(130.261.942,00)	1,000,807,353.00
<b>JUMLAH</b>		<b>4.368.867.000,00</b>	<b>4.158.059.258,00</b>	<b>95,17</b>	<b>(210.807.742,00)</b>	<b>2.565.546.153,00</b>

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.368.867.000,00 terealisasi sebesar Rp4.158.059.258,00 atau 95,17%. Realisasi Tahun Anggaran 2018 jika dibandingkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.565.546.153,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.592.513.105,00.

**7.11.1.1.2.1.2.21. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat**

Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat merupakan pengeluaran atas hadiah yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga guna keperluan urusan dinas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran dan realisasi Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 95**  
**Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	83.200.000,00	73.200.000,00	87,98	(10.000.000,00)	22.000.000,00
2	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	603.900.000,00	560.150.000,00	92,76	(43.750.000,00)	418.500.000,00
JUMLAH		687.100.000,00	633.350.000,00	92,18	(53.750.000,00)	440.500.000,00

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp687.100.000,00 terealisasi sebesar Rp633.350.000,00 atau 92,18%. Realisasi Tahun Anggaran 2019 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp440.500.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 192.850.000,00.

**7.11.1.1.2.1.2.22. Belanja Bantuan Operasional Sekolah**

Belanja Bantuan Operasional Sekolah merupakan dana bantuan khusus untuk operasional sekolah. Anggaran dan realisasi belanja Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 96**  
**Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)	4.671.807.500,00	4.671.807.500,00	100	0,00	4.758.307.250,00
2	Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD dan SMP	4.677.252.048,78	5.210.011.380,83	111,39	532.759.332,05	7.970.355.715,09
3	Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	267.600.000,00	267.600.000,00	100	0,00	263.200.000,00
JUMLAH		9.616.659.548,78	10.149.418.880,83	105,54	532.759.332,05	12.991.862.965,09

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp9.616.659.548,78 terealisasi sebesar Rp10.148.418.880,83 atau 105,54%. Realisasi Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp12.991.862.965,09 mengalami penurunan sebesar Rp2.842.444.084,26. Hal ini disebabkan Pada Tahun 2019 terjadi penurunan peserta didik dibandingkan Tahun 2018, sehingga alokasi anggaran BOS pada Tahun Anggaran 2019 juga mengalami penurunan karena alokasi belanja BOS berdasarkan data pokok pendidikan.

**7.11.1.1.2.1.2.23. Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS**

Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS merupakan Belanja Beasiswa bagi siswa berprestasi pada sekolah-sekolah dilingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas dan beasiswa mahasiswa dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang melanjutkan ke perguruan tinggi/Universitas di Luar Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas

**Tabel 97**  
**Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Beasiswa Non PNS Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Beasiswa Siswa Berprestasi	384.750.000,00	384.750.000,00	100	0,00	204.996.000,00



No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
2	Belanja Beasiswa Mahasiswa	2.299.123.500,00	2.297.023.500,00	99,91	(2.100.000,00)	2.083.873.500,00
JUMLAH		2.683.873.500,00	2.681.773.500,00	99,92	(2.100.000,00)	2.288.869.500,00

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Beasiswa Non PNS Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.683.873.500,00 terealisasi sebesar Rp2.681.773.500,00 atau 99,92%. Realisasi Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.288.869.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp392.904.000,00.

7.11.1.1.2.1.2.24. Belanja Pelayanan Kesehatan

Belanja Pelayanan Kesehatan merupakan belanja pelayanan kesehatan berupa belanja medical check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Anggaran dan realisasi Belanja Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 98  
Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Pelayanan Kesehatan  
Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Pelayanan Kesehatan	425.000.000,00	336.543.975,00	79,19	(88.456.025,00)	100.990.950,00
JUMLAH		425.000.000,00	336.543.975,00	79,19	(88.456.025,00)	100.990.950,00

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp425.000.000,00 terealisasi sebesar Rp336.543.975,00 atau 79,19%. Realisasi Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp100.990.950,00 mengalami kenaikan sebesar Rp235.553.025,00.

7.11.1.1.2.1.2.25. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS merupakan pengeluaran atas biaya kursus-kursus singkat/pelatihan Non PNS, biaya sosialisasi bagi PNS/Non PNS, bimbingan teknis bagi PNS/Non PNS guna keperluan urusan dinas yang diselenggarakan oleh pihak lain dan diwajibkan untuk membayar uang kontribusi. Anggaran dan realisasi belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 99  
Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi  
dan Bimbingan Teknis Non PNS Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	319.500.000,00	198.600.000,00	62,16	(120.900.000,00)	0,00
2	Belanja Sosialisasi	22.100.000,00	22.100.000,00	100,00	0,00	0,00
3	Belanja Bimbingan Teknis	61.000.000,00	44.000.000,00	72,13	(17.000.000,00)	0,00
JUMLAH		402.600.000,00	264.700.000,00	65,75	(137.900.000,00)	0,00

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp402.600.000,00 terealisasi sebesar Rp264.700.000,00 atau 65,75%. Realisasi Tahun Anggaran 2019 jika dibandingkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp264.700.000,00.

7.11.1.1.2.1.3. Belanja Hibah

Belanja hibah merupakan pengeluaran anggaran yang ditujukan kepada instansi pemerintah, organisasi masyarakat dan Dana BOS Untuk Satuan Pendidikan Dasar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Akun belanja Hibah Tahun Anggaran 2019 merupakan belanja hibah kepada Pemerintah, belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan dan belanja hibah dana BOS untuk satuan pendidikan dasar. Anggaran dan realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Hibah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 100  
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Hibah Kepada Organisasi Masyarakat	3.369.900.000,00	3.150.596.000,00	93,49	(219.304.000,00)	4.431.333.000,00
2	Belanja Hibah Anggota Masyarakat	128.960.000,00	84.760.000,00	65,73	(44.200.000,00)	0,00
3	Belanja Hibah Kepada Pemerintah	1.043.032.000,00	1.043.032.000,00	65,73	0,00	0,00
JUMLAH		4.541.892.000,00	4.278.388.000,00	94,20	(263.504.000,00)	4.431.333.000,00

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.541.892.000,00 terealisasi sebesar Rp4.278.388.000,00 atau 94,20%. Realisasi Tahun Anggaran 2019 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.431.333.000 mengalami penurunan sebesar Rp152.945.000,00, hal ini disebabkan pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan peningkatan pengendalian pemberian hibah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu lebih memprioritaskan pada penganggaran Belanja Hibah yang bersifat wajib dan mengikat.

7.11.1.1.2.1.3.1. Belanja Hibah Dana Kepada Organisasi Kemasyarakatan

Belanja hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan yang mendukung kegiatan Pemerintahan, Anggaran dan realisasi belanja hibah Dana Kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 101  
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan  
Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Hibah Organisasi Kemasyarakatan	3.369.900.000,00	3.150.596.000,00	93,49	(219.304.000,00)	4.431.333.000,00
JUMLAH		3.369.900.000,00	3.150.596.000,00	93,49	(219.304.000,00)	4.431.333.000,00

Rincian Anggaran dan realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 102  
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Organisasi Kemasyarakatan per Organisasi  
Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Belanja Hibah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Hibah Kepada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Kep. Anambas	220.000.000,00	220.000.000,00	100,00	0,00	100.000.000,00

No	Belanja Hibah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
2	Belanja Hibah Kepada Pondok Pesantren Khaira Ummah	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
3	Beban Hibah Kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00	200.000.000,00
4	Beban Hibah Kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI)	288.800.000,00	288.800.000,00	100,00	0,00	1.942.500.000,00
5	Beban Hibah Kepada Pemuda Pancasila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Hibah Kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka (KWARCAB)	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00	200.000.000,00
7	Beban Hibah Kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00	0,00
8	Beban Hibah Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI)	150.000.000,00	149.496.000,00	99,66	504.000,00	50.000.000,00
9	Beban Belanja Hibah Kepada Form Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Beban Hibah Kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00	0,00	890.533.000,00
11	Beban Hibah Kepada Panitia Pelaksana STQ / MTQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Beban Hibah Kepada Badan Hisab Ruqyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Hibah Kepada Kamar Dagang Dan Industri (KADIN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Hibah Kepada Ikatan Mahasiswa / Pelajar Kab. Kep. Anambas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Hibah Kepada Panitia Pelaksana PHBN Kab. Kep. Anambas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Hibah Kepada Sekolah Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00	760.800.000,00
17	TK Al-Muhajirin	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00	0,00	0,00
18	TK Al Qur'an	51.000.000,00	51.000.000,00	100,00	0,00	0,00
19	TK Kurnia Rintis	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00	0,00	0,00
20	TK Rasa Sayang	17.400.000,00	17.400.000,00	100,00	0,00	0,00
21	TK Islam Terpadu Insan Utama	22.800.000,00	22.800.000,00	100,00	0,00	0,00
22	PAUD Rasa Sayang	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	0,00	0,00
23	KB Al-Muhajirin	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00	0,00
24	TPA Al-Muhajirin	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	0,00	0,00
25	TPA Kurnia	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	0,00	0,00
26	KB Kurnia	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	0,00	0,00
27	TK Al-Jabamur	10.200.000,00	9.000.000,00	88,24	(1.200.000,00)	0,00
28	TK Kusuma Bangsa	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00	0,00	0,00
29	TK Karunia	16.200.000,00	16.200.000,00	100,00	0,00	0,00
30	TK An-Nur Bayat	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00	0,00
31	TK Anugrah	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	0,00	0,00
32	TK Pelangi	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00	0,00
33	TK Wijaya Kusuma	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00	0,00	0,00
34	PAUD Darul Awlad	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00
35	PAUD Mutiara	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	0,00	0,00
36	KB Al-Muttaqin	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	0,00	0,00
37	PAUD Anoa	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00	0,00

No	Belanja Hibah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
38	KB Al Hikmah	15.000.000,00	8.100.000,00	54,00	(6.900.000,00)	0,00
39	PAUD Pelangi	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00	0,00	0,00
40	PAUD Mutiara Hati	16.800.000,00	9.300.000,00	55,36	(7.500.000,00)	0,00
41	TK Harapan Bunda	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	0,00	0,00
42	PAUD Nurul Huda	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	0,00	0,00
43	PAUD Nurul Iman	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	0,00	0,00
44	PAUD Harapan Bunda	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	0,00	0,00
45	PAUD Raudhatul Khadijah	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	0,00	0,00
46	TK Air Sena	13.800.000,00	6.600.000,00	47,83	(7.200.000,00)	0,00
47	TK Lestari	7.800.000,00	0,00	0,00	(7.800.000,00)	0,00
48	TK Pertiwi	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00	0,00
49	PAUD Tunas Bangsa	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	0,00	0,00
50	PAUD Harapan Bunda	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	0,00	0,00
51	PAUD Kasih Bunda	17.400.000,00	17.400.000,00	100,00	0,00	0,00
52	PAUD Permata Bunda	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00	0,00	0,00
53	PAUD Kasih Ibu Siantan Timur	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00	0,00	0,00
54	PAUD Kasih Ibu Jemaja	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	0,00	0,00
55	PAUD Amanda	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	0,00	0,00
56	PAUD Kasih Sayang	9.000.000,00	0,00	0,00	(9.000.000,00)	0,00
57	PAUD Cinta Ananda	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	0,00	0,00
58	TK Sri Rambut	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00
59	PAUD Pintar	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00	0,00
60	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	0,00	0,00
61	Operasional Lembaga PKBM Kusuma Bangsa	43.200.000,00	0,00	0,00	(43.200.000,00)	0,00
62	Operasional Lembaga PKBM Suri Tauladan	46.500.000,00	46.500.000,00	100,00	0,00	0,00
63	Operasional Lembaga PKBM Al - Kiromah	28.800.000,00	14.400.000,00	50,00	(14.400.000,00)	0,00
64	Operasional Lembaga PKBM Anambas Cerdas	43.200.000,00	21.600.000,00	50,00	(21.600.000,00)	0,00
65	Ikatan Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Anambas (IMKKA) Pekanbaru	50.000.000,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00
66	Keluarga Pelajar Mahasiswa Anambas (KPMA) Bandung	50.000.000,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00
67	Belanja Hibah Kepada Panitia Pelaksana PHBI Kab. Kep. Anambas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Beban Adat Melayu (LAM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Beban Hibah Kepada Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Beban Hibah Kepada LSM Pegiat Perfilman Anambas (PANGLIMA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Belanja Hibah Kepada NGO SEBORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Beban Hibah Kepada Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Beban Hibah Kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Kepulauan Anambas	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00
74	Beban Hibah Kepada Sekolah Negeri Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>3.369.900.000,00</b>	<b>3.150.596.000,00</b>	<b>93,49</b>	<b>(219.304.000,00)</b>	<b>4.431.333.000,00</b>

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Hibah Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.369.900.000,00 terealisasi sebesar Rp3.150.596.000,00 atau 93,49%. Realisasi Tahun Anggaran 2019 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.431.333.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.280.737.000,00.

7.11.1.1.2.1.3.2. Belanja Hibah Kepada Anggota Masyarakat

Belanja hibah kepada Anggota Masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Anggaran dan realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Hibah dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 103  
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dana BOS Untuk Satuan Pendidikan Dasar  
Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Hibah kepada Anggota Masyarakat	128.960.000,00	84.760.000,00	65,73	(44.200.000,00)	0,00
JUMLAH		128.960.000,00	84.760.000,00	65,73	(44.200.000,00)	0,00

Rincian Anggaran dan realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 104  
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Organisasi Kemasyarakatan per Organisasi  
Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Belanja Hibah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Ikatan Remaja Masjid ALMUTAQIN Desa Ladan Kecamatan Palmatak	49.360.000,00	49.360.000,00	100,00	0,00	0,00
2	Sanggar Seni Tuah Gemilang	35.400.000,00	35.400.000,00	100,00	0,00	0,00
3	Persatuan Kesenian Mendu Bintang Pelangi Atap Desa Mampok Kecamatan Jemaja	44.200.000,00	0,00	0,00	(44.200.000,00)	0,00
JUMLAH		128.960.000,00	84.760.000,00	65,73	(44.200.000,00)	0,00

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Hibah kepada Anggota Masyarakat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp128.960.000,00 terealisasi sebesar Rp84.760.000,00 atau 65,73%. Realisasi Tahun Anggaran 2019 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp84.760.000,00.

7.11.1.1.2.1.3.3. Belanja Hibah Dana Kepada Pemerintah

Belanja hibah Kepada Pemerintah merupakan Hibah kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum dan Kepolisian Negara RI di Daerah Resor Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Hibah Kepada Pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 105  
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah	1.043.032.000,00	1.043.032.000,00	100	0,00	0,00
JUMLAH		1.043.032.000,00	1.043.032.000,00	100	0,00	0,00

Rincian Anggaran dan realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Hibah Kepada Pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 106  
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah per Instansi  
Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00	0,00
2	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	0,00	0,00
3	Kepolisian Negara RI Daerah Resor Kepulauan Anambas	393.032.000,00	393.032.000,00	100,00	0,00	0,00
JUMLAH		1.043.032.000,00	1.043.032.000,00	100,00	0,00	0,00

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Hibah Dana BOS Untuk Satuan Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.043.032.000,00 terealisasi sebesar Rp1.043.032.000,00 atau 100,00%. Realisasi Tahun Anggaran 2019 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.043.032.000,00.

7.11.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Akun Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2019 direalisasikan dalam bentuk pemberian bantuan keuangan kepada Organisasi Sosial, kelompok masyarakat dan anggota masyarakat, dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 107  
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	183.555.000,00	156.555.000,00	85,29	(27.000.000,00)	95.000.000,00
JUMLAH		183.555.000,00	156.555.000,00	85,29	(27.000.000,00)	117.000.000,00

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp183.555.000,00 terealisasi sebesar Rp156.555.000,00 atau 85,29%. Realisasi Tahun Anggaran 2019 jika dibandingkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp117.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp39.555.000,00, hal ini disebabkan pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan pengendalian pemberian Bantuan Sosial sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas lebih memprioritaskan pada penganggaran Belanja Bantuan Sosial yang bersifat wajib dan mengikat.

7.11.1.2.1.4.1. Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan merupakan pengeluaran bantuan sosial kepada organisasi sosial masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Akun Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan pada Tahun Anggaran 2019 direalisasikan dalam bentuk pemberian bantuan sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 108  
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan  
Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0 %. Realisasi Tahun Anggaran 2019 jika dibandingkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp22.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp22.000.000,00.

7.11.1.1.2.1.4.2. Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat merupakan pengeluaran bantuan sosial kepada anggota masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Akun Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat pada Tahun Anggaran 2019 direalisasikan dalam bentuk pemberian bantuan kepada anggota masyarakat, dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 109  
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat  
Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Mahasiswa Dari Keluarga Miskin/Tidak Mampu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	183.555.000,00	156.555.000,00	85,29	(27.000.000,00)	95.000.000,00
JUMLAH		183.555.000,00	156.555.000,00	85,29	(27.000.000,00)	95.000.000,00

Rincian Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 110  
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat  
Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat atas Musibah Kebakaran di Kecamatan Siantan (an. Helin)	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00	0,00
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Atas Musibah Puting Beliung di Kecamatan Siantan Selatan (An. Anasrudin)	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00
3	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Atas Musibah Puting Beliung di Kecamatan Siantan Selatan (An. Bisman)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00
4	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Atas Musibah Puting Beliung di Kecamatan Jemaja (An. Norhayati)	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Atas Musibah Puting Beliung di	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
	Kecamatan Palmatak (An. Afiar)					
6	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Atas Musibah Puting Beliung di Kecamatan Siantan Timur (An. Sarika)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00
7	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Atas Musibah Puting Beliung di Kecamatan Siantan Timur (An. Sahril)	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00	0,00
8	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Atas Musibah Puting Beliung di Kecamatan Siantan Timur (An. Jamaludin)	6.555.000,00	6.555.000,00	100,00	0,00	0,00
9	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Atas Musibah Puting Beliung di Kecamatan Siantan Timur (An. Safarudin)	12.000.000,00	0,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00
10	Bantuan Sosial Tidak Terencana	15.000.000,00	0,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00
11	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat atas Musibah Pompong Rusak Akibat Kecelakaan Laut di Kecamatan Palmatak (An. Saleh)	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00
12	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat atas Musibah Kebakaran Laut di Kecamatan Siantan Selatan (An. Azahar)	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00
13	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat atas Musibah Gelombang Tinggi di Kecamatan Siantan Selatan (An. Esparizan)	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00	0,00
14	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat atas Musibah Gelombang Tinggi di Kecamatan Siantan Selatan (An. Tin Tin)	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00	0,00
15	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00
JUMLAH		183.555.000,00	156.555.000,00	85,29	(27.000.000,00)	95.000.000,00

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp183.555.000,00 terealisasi sebesar Rp156.555.000,00 atau 85,29%. Realisasi Tahun Anggaran 2019 jika dibandingkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp95.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp61.555.000,00.

7.11.1.1.2.1.5. Belanja Bantuan Keuangan

Akun Belanja Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2019 merupakan Belanja Bantuan Keuangan kepada desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 111  
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	90.423.780.743,00	82.444.402.333,00	91,18	(7.979.378.410,00)	55.652.628.447,00
2	Belanja Bantuan	367.927.617,00	367.927.617,00	100,00	0,00	330.067.410,00



No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
	Keuangan Kepada Partai Politik					
	JUMLAH	90.791.708.360,00	82.812.329.950,00	91,21	(7.979.378.410,00)	55.982.695.857,00

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2019 sebesar Rp90.791.708.360,00 terealisasi sebesar Rp82.812.329.950,00 atau 91,21%. Realisasi Tahun Anggaran 2019 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp55.982.695.857,00 mengalami kenaikan sebesar Rp26.829.634.093,00.

7.11.1.1.2.1.5.1. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa

Akun Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2019 kepada Desa-desanya yang berada dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa berdasarkan wilayah kecamatan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 112  
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Belanja Bantuan Keuangan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa Di Kec. Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa Di Kec. Siantan (ADD)	10.363.102.422,00	9.533.535.655,00	91,99	(829.566.767,00)	6.501.624.469,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa Di Kec. Siantan (DBH)	497.098.915,00	393.401.619,00	79,14	(103.697.296,00)	367.520.804,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa Di Kec. Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa Di Kec. Jemaja (ADD)	9.532.812.305,00	8.829.499.455,00	92,62	(703.312.850,00)	7.770.591.546,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa Di Kec. Jemaja (DBH)	202.815.013,00	157.680.623,00	77,75	(45.134.390,00)	182.928.900,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa Di Kec. Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa Di Kec. Palmatak (ADD)	22.024.880.579,00	20.740.599.849,00	94,17	(1.284.280.730,00)	15.944.358.181,00
9	Belanja Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa Di Kec. Palmatak (DBH)	615.157.224,00	501.840.788,00	81,58	(113.316.436,00)	471.364.432,00
10	Belanja Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa Di Kec. Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa Di Kec. Siantan Timur (ADD)	10.228.941.186,00	9.367.061.201,00	91,57	(861.879.985,00)	6.391.053.744,00
12	Belanja Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten	224.434.980,00	155.037.173,00	69,08	(69.397.807,00)	134.305.036,00

No	Belanja Bantuan Keuangan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
	Kepada Pemerintahan Desa Di Kec. Siantan Timur (DBH)					
13	Belanja Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa Di Kec. Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa Di Kec. Siantan Selatan (ADD)	11.671.976.195,00	10.680.326.930,00	91,50	(991.649.265,00)	7.037.258.107,00
15	Belanja Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa Di Kec. Siantan Selatan (DBH)	280.075.565,00	216.055.427,00	77,14	(64.020.138,00)	178.726.111,00
16	Belanja Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa Di Kec. Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa Di Kec. Jemaja Timur (ADD)	6.891.066.490,00	6.305.602.563,00	91,50	(585.463.927,00)	4.498.026.637,00
18	Belanja Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa Di Kec. Jemaja Timur (DBH)	169.736.491,00	112.690.264,00	66,39	(57.046.227,00)	101.752.208,00
19	Belanja Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa Di Kec. Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa Di Kec. Siantan Tengah (ADD)	9.742.281.273,00	8.914.578.588,00	91,50	(827.702.685,00)	5.509.462.713,00
21	Belanja Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa Di Kec. Siantan Tengah (DBH)	212.600.300,00	149.632.650,00	70,38	(62.967.650,00)	123.655.559,00
22	Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa	355.000.000,00	355.000.000,00	100,00	0,00	440.000.000,00
23	Belanja Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa Di Kec. Jemaja Barat (ADD)	3.623.796.782,00	3.209.326.191,00	88,56	(414.470.591,00)	0,00
24	Belanja Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa Di Kec. Jemaja Barat (DBH)	110.555.903,00	73.769.640,00	66,73	(36.786.263,00)	0,00
25	Belanja Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa Di Kec. Siantan Utara (ADD)	3.571.142.772,00	2.680.789.368,00	75,07	(890.353.404,00)	0,00
26	Belanja Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa Di Kec. Siantan Utara (DBH)	106.306.348,00	67.974.349,00	63,94	(38.331.999,00)	0,00
JUMLAH		90.423.780.743,00	82.444.402.333,00	91,18	(7.979.378.410,00)	55.652.628.447,00

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun 2019 sebesar Rp90.423.780.743,00 terealisasi sebesar Rp82.444.402.333,00 atau 91,18%. Realisasi Tahun Anggaran 2019 jika dibandingkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp55.652.628.447,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 26.791.773.886,00.

7.11.1.1.2.1.5.2. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik merupakan pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk memberikan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas dan dibayarkan berdasarkan jumlah kursi/suara.

Akun Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2019 kepada Partai Politik berdasarkan jumlah yang berada dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 113  
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik  
Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)						
No	Belanja Bantuan Keuangan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PDI- Perjuangan	69.328.431,00	69.328.431,00	100,00	0,00	69.328.431,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik GOLKAR	40.334.523,00	40.334.523,00	100,00	0,00	40.334.523,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik GERINDRA	37.400.238,00	37.400.238,00	100,00	0,00	37.400.238,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik DEMOKRAT	37.860.207,00	37.860.207,00	100,00	0,00	0,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PAN	46.837.533,00	46.837.533,00	100,00	0,00	46.837.533,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PPP	65.442.486,00	65.442.486,00	100,00	0,00	65.442.486,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik HANURA	32.356.440,00	32.356.440,00	100,00	0,00	32.356.440,00
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PBB	38.367.759,00	38.367.759,00	100,00	0,00	38.367.759,00
JUMLAH		367.927.617,00	367.927.617,00	100,00	0,00	330.067.410,00

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp367.927.617,00 terealisasi sebesar Rp367.927.617,00 atau 100%. Realisasi Tahun Anggaran 2019 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp330.067.410,00 mengalami kenaikan sebesar Rp37.860.207,00, hal ini disebabkan hanya 8 (delapan) Partai Politik yang mengajukan pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang sesuai persyaratan telah memperoleh Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Peggunaan Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sementara pada Tahun Anggaran 2018 terdapat 1 (satu) Partai Politik tidak mengajukan pencairan dikarenakan belum memiliki Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Peggunaan Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Partai Demokrat.

Rincian Perhitungan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 46 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Memperoleh Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu Tahun 2014 - 2019 sebagai berikut.

Tabel 114  
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik  
Berdasarkan Perolehan Kursi dan Jumlah Suara Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Nama Partai Politik	Perolehan Kursi	Jumlah Suara	Jumlah
1	Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P)	3 Kursi	4.371	69.328.431,00
2	Partai GOLKAR	2 Kursi	2.543	40.334.523,00
3	Partai GERINDRA	2 Kursi	2.358	37.400.238,00
4	Partai DEMOKRAT	2 Kursi	2.387	37.860.207,00
5	Partai Amanat Nasional (PAN)	2 Kursi	2.953	46.837.533,00
6	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4 Kursi	4.126	65.442.486,00
7	Partai HANURA	2 Kursi	2.040	32.356.440,00
8	Partai PBB	3 Kursi	2.419	38.367.759,00
JUMLAH		20 Kursi	23.197	367.927.617,00

7.11.1.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya dengan masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2019 dan realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 115  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Tanah	5.523.633.288,00	4.022.083.585,00	72,82	(1.501.549.703,00)	1.904.277.555,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.171.152.439,20	58.640.818.568,76	88,62	(7.530.333.870,44)	29.362.613.443,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	194.406.143.172,42	156.832.046.585,00	80,67	(37.574.096.587,42)	84.127.674.098,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	165.603.254.728,20	141.090.121.189,00	85,20	(24.501.037.539,20)	111.399.083.128,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.225.527.845,00	2.218.168.073,00	99,67	(7.359.772,00)	346.699.000,00
JUMLAH		433.929.711.472,82	362.803.238.000,76	83,61	(71.126.473.472,06)	227.140.347.224,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp433.929.711.472,82 terealisasi sebesar Rp362.803.238.000,76 atau 83,61%. Realisasi Tahun Anggaran 2019 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp227.140.347.224,00 mengalami kenaikan sebesar Rp135.662.890.776,76.

7.11.1.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran dalam rangka perolehan aset tetap tanah. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 116  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Kosong	0,00	0,00	0,00	0,00	228.150.000,00

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
2	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Pernakanan	0,00	0,00	0,00	0,00	69.563.750,00
3	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	3.329.000.000,00	2.645.901.000,00	79,48	(683.099.000,00)	0,00
4	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	2.194.633.288,00	1.376.182.585,00	62,71	(818.450.703,00)	1.606.563.805,00
JUMLAH		5.523.633.288,00	4.022.083.585,00	72,82	(1.501.549.703,00)	1.904.277.555,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.523.633.288,00 terealisasi sebesar Rp4.022.083.585,00 atau 72,82%. Realisasi Tahun 2019 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.904.277.555,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.117.806.030,00.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 117

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Per SKPD Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	650.000.000,00	610.106.297,00	93,86	(39.893.703)	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.579.000.000,00	2.895.901.000,00	80,91	(683.099.000,00)	1.411.831.770,00
3	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	1.294.633.288,00	516.078.288,00	39,86	(778.557.000,00)	194.732.035,00
4	Kantor Camat Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	228.150.000,00
5	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	69.563.750,00
JUMLAH		5.523.633.288,00	4.022.083.585,00	72,82	(1.501.549.703,00)	1.904.277.555,00

7.11.1.1.2.2.1.1. Belanja Modal - Pengadaan Tanah Kosong

Belanja Modal Pengadaan Tanah Kosong merupakan pengeluaran dalam rangka perolehan aset tetap tanah kosong berupa pengadaan tanah oleh Kecamatan Jemaja. Anggaran dan realisasi belanja Modal Pengadaan Tanah kosong Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Pengadaan Tanah Kosong dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 118

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah Kosong Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Kosong	0,00	0,00	0,00	0,00	228.150.000,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	0,00	228.150.000,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Kosong Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00 dan Belanja Modal Pengadaan Tanah Kosong Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp228.150.000,00. Realisasi Tahun 2019 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp228.150.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp228.150.000,00.

7.11.1.1.2.2.1.2. Belanja Modal - Pengadaan Tanah Peternakan

Belanja Modal Pengadaan Tanah Peternakan merupakan pengeluaran dalam rangka perolehan aset tetap tanah peternakan berupa pengadaan tanah oleh Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan. Anggaran dan realisasi belanja Modal Pengadaan Tanah Peternakan Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Pengadaan Tanah Peternakan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 119

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah Peternakan Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	69.563.750,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	0,00	69.563.750,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Peternakan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00 dan Belanja Modal Pengadaan Tanah Peternakan Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp69.563.750,00. Realisasi Tahun 2019 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp69.563.750,00 mengalami penurunan sebesar Rp69.563.750,00.

7.11.1.1.2.2.1.3. Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung

Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung merupakan pengeluaran dalam rangka perolehan aset tetap tanah untuk bangunan gedung perdagangan dan tempat kerja. Anggaran dan realisasi belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 120

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Gedung  
Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G, Tempat Tinggal	444.000.000,00	434.914.000,00	97,95	(9.086.000,00)	0,00
4	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Kosong	250.000.000,00	0,00	0,00	(250.000.000,00)	0,00
5	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan	320.000.000,00	0,00	0,00	(320.000.000,00)	0,00
6	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	2.315.000.000,00	2.210.987.000,00	95,51	(104.013.000,00)	0,00
JUMLAH		3.329.000.000,00	2.645.901.000,00	79,48	(683.099.000,00)	0,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.329.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.645.901.000,00 atau 79,48%. Realisasi Tahun 2019 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.645.901.000,00.

7.11.1.1.2.2.1.4. Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung

Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung merupakan pengeluaran dalam rangka perolehan aset tetap tanah untuk bangunan bukan gedung berupa pengadaan tanah lapangan parkir, pengadaan tanah lapangan terbang, pengadaan tanah untuk bangunan jaringan dan pengadaan tanah untuk bangunan bersejarah. Anggaran dan realisasi belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan bukan Gedung Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan bukan Gedung dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 121  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung  
Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)						
No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Terbang	1.294.633.288,00	516.076.288,00	39,86	(778.557.000,00)	194.732.035,00
2	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.831.770,00
3	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Ibadah	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang	650.000.000,00	610.106.297,00	93,86	(39.893.703,00)	0,00
JUMLAH		2.194.633.288,00	1.376.182.585,00	62,71	(818.450.703,00)	1.606.563.805,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.194.633.288,00 terealisasi sebesar Rp1.376.182.585,00 atau 62,71%. Realisasi Tahun Anggaran 2019 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.606.563.805,00 mengalami penurunan sebesar Rp230.381.220,00.

7.11.1.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap berupa peralatan dan mesin. Anggaran dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 122  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	1.180.675.000,00	1.160.840.000,00	98,32	(19.835.000,00)	128.700.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	5.068.550.100,00	4.093.386.885,00	80,76	(975.163.215,00)	936.682.500,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	30.000.000,00	29.700.000,00	99,00	(300.000,00)	0,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	719.500.000,00	680.185.000,00	94,54	(39.315.000,00)	4.397.279.000,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	262.000.000,00	262.000.000,00	100,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	1.356.954.805,00	795.887.438,00	58,65	(561.067.367,00)	8.210.000,00
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemeliharaan Tanaman/ Alat Penyimpanan	151.295.000,00	146.163.500,00	96,61	(5.131.500,00)	14.828.000,00
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	11.412.232.812,20	6.644.128.426,76	58,22	(4.768.104.385,44)	2.283.609.529,00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.874.343.590,00	8.565.270.170,00	96,52	(309.073.420,00)	2.143.033.947,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.081.342.021,00	7.928.086.754,00	98,10	(153.255.267,00)	4.505.948.179,00
13	Belanja Modal Peralatan dari Mesiri - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	752.024.557,00	701.335.700,00	93,26	(50.688.857,00)	446.208.642,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	1.263.456.800,00	1.241.671.239,00	98,28	(21.785.561,00)	1.089.208.900,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	24.000.000,00	23.600.000,00	98,33	(400.000,00)	32.002.700,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	4.308.000,00	4.177.800,00	96,98	(130.200,00)	0,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	22.539.398.226,00	22.243.685.668,00	98,69	(295.712.558,00)	12.558.351.177,00
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	118.114.000,00	107.091.600,00	90,67	(11.022.400,00)	0,00
19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-unit Laboratorium	2.674.742.316,00	2.490.010.548,00	93,09	(184.731.768,00)	599.397.269,00
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	907.564.912,00	879.322.640,00	96,89	(28.242.272,00)	119.158.600,00
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	539.543.300,00	539.543.300,00	100,00	0,00	0,00
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5.904.000,00	0,00	0,00	(5.904.000,00)	0,00
23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium	50.000.000,00	49.764.000,00	99,53	(236.000,00)	0,00



No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
	Hidrodinamika					
24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	55.203.000,00	54.967.900,00	99,57	(235.100,00)	0,00
25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Sinar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan (laboratorium pertanian)	0,00	0,00	0,00	0,00	99.995.000,00
28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	100.000.000,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00
JUMLAH		66.171.152.439,20	58.640.818.568,76	88,62	(7.530.333.870,44)	29.362.613.443,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp66.171.152.439,20 terealisasi sebesar Rp58.640.818.568,76 atau 88,62%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp29.362.613.443,00 berarti mengalami kenaikan sebesar Rp29.278.205.125,76.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 123  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per SKPD Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	13.125.262.024,20	8.804.311.833,76	67,08	(4.320.950.190,44)	1.078.166.897,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	410.281.100,00
3	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	32.711.854.272,00	30.898.214.302,00	94,46	(1.813.639.970,00)	15.580.833.046,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.346.550.000,00	2.414.850.200,00	72,16	(931.699.800,00)	0,00
5	Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	393.995.000,00	376.007.400,00	95,43	(17.987.600,00)	352.730.200,00
6	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	1.014.838.000,00	1.010.090.240,00	99,53	(4.747.760,00)	4.501.295.000,00
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	468.459.900,00	464.130.000,00	99,08	(4.329.900,00)	229.921.200,00
8	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	281.224.000,00	277.593.000,00	98,71	(3.631.000,00)	37.400.000,00
9	Dinas Penanaman Modal PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	136.878.400,00	136.739.900,00	99,90	(138.500,00)	69.487.000,00
10	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan	124.908.000,00	124.872.000,00	99,97	(36.000,00)	100.560.600,00

No	SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
	Bencana Daerah					
11	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.258.670.000,00	1.257.734.000,00	99,93	(936.000,00)	30.798.076,00
12	Sekretariat Daeah	5.517.660.480,00	5.430.954.012,00	98,43	(86.706.468,00)	1.603.712.140,00
13	Sekrefariat DPRD	995.865.300,00	973.133.300,00	97,72	(22.732.000,00)	240.851.300,00
14	Badan Keuangan Daerah	692.482.900,00	670.133.300,00	96,77	(22.349.600,00)	361.451.000,00
15	Inspektorat	102.739.100,00	102.266.600,00	99,54	(470.500,00)	65.274.800,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	264.055.000,00	248.389.185,00	94,07	(15.665.815,00)	465.073.894,00
17	Kecamatan Siantan	657.767.000,00	553.045.900,00	84,08	(104.721.100,00)	740.550.400,00
18	Kecamatan Jemaja	175.975.851,00	170.539.250,00	96,91	(5.436.601,00)	177.588.000,00
19	Kecamatan Palmatak	93.773.000,00	93.717.000,00	99,94	(56.000)	16.998.300,00
20	Kecamatan Siantan Timur	97.214.432,00	94.795.575,00	97,51	(2.418.857,00)	40.206.100,00
21	Kecamatan Siantan Selatan	10.164.000,00	8.700.000,00	85,60	(1.464.000,00)	106.587.000,00
22	Kecamatan Siantan Tengah	414.000.000,00	411.950.000,00	99,50	(2.050.000,00)	55.544.400,00
23	Kecamatan Jemaja Timur	5.000.000,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00
24	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.620.695.485,00	1.599.501.643,00	98,69	(21.193.842,00)	2.165.987.505,00
25	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	468.173.100,00	347.357.800,00	74,19	(120.815.300,00)	355.682.343,00
26	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	260.110.570,00	259.876.770,00	99,91	(233.800,00)	469.525.742,00
27	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	1.795.261.625,00	1.782.472.758,00	99,29	(12.788.867,00)	106.107.400,00
28	Kecamatan Siantan Utara	69.550.000,00	61.543.100,00	88,49	(8.006.900,00)	0,00
29	Kecamatan Jemaja Barat	68.025.000,00	67.897.500,00	99,81	(127.500,00)	0,00
JUMLAH		66.171.152.439,20	58.640.818.568,76	88,62	(7.530.333.870,44)	29.362.613.443,00

7.11.1.1.2.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Bantu

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Bantu merupakan pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap peralatan dan mesin berupa pengadaan alat-alat bantu. Anggaran dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Bantu Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Bantu dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 124

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat - Alat Bantu  
Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Feeder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compressor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	1.146.675.000,00	1.141.975.000,00	99,42	(6.700.000,00)	128.700.000,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan	30.000.000,00	16.885.000,00	56,28	(13.115.000,00)	0,00

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
	Pompa					
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor	2.000.000,00	1.980.000,00	99,00	(20.000,00)	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.180.675.000,00</b>	<b>1.160.840.000,00</b>	<b>98,32</b>	<b>(19.835.000,00)</b>	<b>128.700.000,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat-Alat Bantu Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.180.675.000,00 terealisasi sebesar Rp1.160.840.000,00 atau 98,32%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp128.700.000,00 berarti mengalami kenaikan sebesar Rp1.032.140.000,00.

#### 7.11.1.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor merupakan pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap peralatan dan mesin berupa pengadaan alat angkutan darat bermotor. Anggaran dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 125**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin –**  
**Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	484.000.000,00	480.000.000,00	99,17	(4.000.000,00)	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	2.506.282.320,00	1.566.655.605,00	62,51	(939.626.715,00)	666.836.000,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	672.947.825,00	649.807.825,00	96,56	(23.140.000,00)	191.400.000,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	219.823.575,00	219.473.575,00	99,84	(350.000,00)	78.446.500,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.185.496.380,00	1.177.449.880,00	99,32	(8.046.500,00)	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>5.068.550.100,00</b>	<b>4.093.386.885,00</b>	<b>80,76</b>	<b>(975.163.215,00)</b>	<b>936.682.500,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.068.550.100,00 terealisasi sebesar Rp4.093.386.885,00 atau 80,76%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp936.682.500,00 berarti mengalami kenaikan sebesar Rp3.156.704.385,00.

#### 7.11.1.1.2.2.3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor merupakan pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap peralatan dan mesin berupa pengadaan alat angkutan darat tak bermotor. Anggaran dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Tahun Anggaran 2019 serta realisasi

Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 126  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin –  
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	30.000.000,00	29.700.000,00	99,00	(300.000,00)	0,00
JUMLAH		30.000.000,00	29.700.000,00	99,00	(300.000,00)	0,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Angkutan Darat Tak Bermotor Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp30.000.000,00 terealisasi sebesar Rp29.700.000,00 atau 99,00%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 berarti mengalami kenaikan sebesar Rp29.700.000,00.

7.11.1.2.2.2.4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor merupakan pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap peralatan dan mesin berupa pengadaan alat angkut apung bermotor. Anggaran dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 127  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin –  
Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	670.000.000,00	630.685.000,00	94,13	(39.315.000,00)	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397.279.000,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang	49.500.000,00	49.500.000,00	100,00	0,00	0,00
JUMLAH		719.500.000,00	680.185.000,00	94,54	(39.315.000,00)	4.397.279.000,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Angkut Apung Bermotor Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp719.500.000,00 terealisasi sebesar Rp680.185.000,00 atau 94,54%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.397.279.000,00 berarti mengalami penurunan sebesar Rp3.717.094.000,00.

7.11.1.2.2.2.5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor merupakan pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap peralatan dan mesin berupa pengadaan alat angkut apung tak bermotor. Anggaran dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung tak Bermotor dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 128**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin –**  
**Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	262.000.000,00	262.000.000,00	100,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>262.000.000,00</b>	<b>262.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp262.000.000,00 terealisasi sebesar Rp262.000.000,00 atau 100%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 berarti mengalami kenaikan sebesar Rp262.000.000,00.

#### 7.11.1.1.2.2.2.6. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur merupakan pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap peralatan dan mesin berupa pengadaan alat ukur. Anggaran dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 129**

**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin –**  
**Pengadaan Alat Ukur Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	1.356.954.805,00	795.887.438,00	58,65	(561.067.367,00)	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.356.954.805,00</b>	<b>795.887.438,00</b>	<b>58,65</b>	<b>(561.067.367,00)</b>	<b>8.210.000,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.356.954.805,00 terealisasi sebesar Rp795.887.438,00 atau 58,65%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp8.210.000,00 berarti mengalami kenaikan sebesar Rp787.677.438,00.

#### 7.11.1.1.2.2.2.7. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan merupakan pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap peralatan dan mesin berupa pengadaan alat pengolahan berupa alat pasca panen. Anggaran dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 130**

**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin –**  
**Pengadaan Alat Pengolahan Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen	100.000.000,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(100.000.000,00)</b>	<b>0,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp100.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp0,00 atau 0,00%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 berarti tidak mengalami kenaikan atau penurunan.

7.11.1.1.2.2.2.8. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan/Tanaman/Alat Penyimpan merupakan pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap peralatan dan mesin berupa Pengadaan Alat PemeliharaanTanaman/Alat Penyimpan. Anggaran dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat PemeliharaanTanaman/Alat Penyimpan Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat PemeliharaanTanaman/Alat Penyimpan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 131  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat PemeliharaanTanaman/Alat Penyimpan Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	75.295.000,00	70.180.000,00	93,21	(5.115.000,00)	14.828.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	50.000.000,00	49.989.500,00	99,98	(10.500,00)	0,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	26.000.000,00	25.994.000,00	99,98	(6.000,00)	0,00
JUMLAH		151.295.000,00	146.163.500,00	96,61	(5.131.500,00)	14,828,000.00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Pengadaan Alat PemeliharaanTanaman/Alat Penyimpan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp151.295.000,00 terealisasi sebesar Rp146.163.500,00 atau 96,61%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp14.828.000,00 berarti mengalami kenaikan sebesar Rp131.335.500,00.

7.11.1.1.2.2.2.9. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor merupakan pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap peralatan dan mesin berupa Pengadaan Alat Kantor. Anggaran dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 132  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	0,00	0,00	0,00	0,00	49.830.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.585.000,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	129.735.000,00	122.551.620,00	94,46	(7.183.380,00)	105.735.300,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	11.282.497.812,20	6.521.576.806,76	57,80	(4.760.921.005,44)	2.112.459.229,00

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
	JUMLAH	11.412.232.812,20	6.644.128.426,76	58,22	(4.768.104.385,44)	2.283.609.529,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Pengadaan Alat Kantor Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp11.412.232.812,20 terealisasi sebesar Rp6.644.128.426,76 atau 58,22%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.283.609.529,00 berarti mengalami kenaikan sebesar Rp4.768.104.385,44.

7.11.1.1.2.2.10. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga merupakan pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap peralatan dan mesin berupa Pengadaan Alat Rumah Tangga. Anggaran dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 133  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin –  
Pengadaan Alat Rumah Tangga Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.514.037.200,00	5.416.224.002,00	98,23	(97.813.198,00)	1.749.986.947,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	56.060.000,00	48.461.500,00	86,45	(7.598.500,00)	238.357.300,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	593.117.000,00	578.195.500,00	97,48	(14.921.500,00)	0,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	30.500.000,00	28.912.500,00	94,80	(1.587.500,00)	10.600.000,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.868.076.000,00	1.683.450.281,00	90,12	(184.625.719,00)	141.190.100,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	812.553.390,00	810.026.387,00	99,69	(2.527.003,00)	2.899.600,00
	JUMLAH	8.874.343.590,00	8.565.270.170,00	96,52	(309.073.420,00)	2.143.033.947,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Pengadaan Alat Rumah Tangga Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp8.874.343.590,00 terealisasi sebesar Rp8.565.270.170,00 atau 96,52%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.143.033.947,00 berarti mengalami kenaikan sebesar Rp6.422.236.223,00.

7.11.1.1.2.2.11. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer merupakan pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap peralatan dan mesin berupa Pengadaan Komputer. Anggaran dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 134  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin –  
Pengadaan Komputer Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
----	--------	---------------	----------------	-----------	-----------------	----------------

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	883.416.180,00	879.529.334,00	99,56	(3.886.846,00)	195.644.500,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.479.826.141,00	5.438.602.480,00	99,25	(41.223.661,00)	1.871.606.859,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	96.060.000,00	88.440.000,00	92,07	(7.620.000,00)	0,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mini Komputer	190.571.000,00	172.207.200,00	90,36	(18.363.800,00)	63.221.600,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.210.312.200,00	1.145.078.340,00	94,61	(65.233.860,00)	337.868.579,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	221.156.500,00	204.229.400,00	92,35	(16.927.100,00)	2.037.606.641,00
<b>JUMLAH</b>		<b>8.081.342.021,00</b>	<b>7.928.086.754,00</b>	<b>98,10</b>	<b>(153.255.267,00)</b>	<b>4.505.948.179,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan komputer Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp8.081.342.021,00 terealisasi sebesar Rp7.928.086.754,00 atau 98,10%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.505.948.179,00 berarti mengalami kenaikan sebesar Rp3.422.138.575,00.

**7.11.1.1.2.2.12. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat merupakan pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap peralatan dan mesin berupa Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat. Anggaran dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 135**

**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin –  
Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Tahun 2019 dan 2018**  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	47.550.000,00	46.871.000,00	98,57	(679.000,00)	213.827.900,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	230.000.000,00	228.074.000,00	99,16	(1.926.000,00)	119.389.600,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	120.492.557,00	114.459.700,00	94,99	(6.032.857,00)	80.907.992,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	339.000.000,00	296.949.000,00	87,60	(42.051.000,00)	15.686.000,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di ruangan Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699.750,00



No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	14.982.000,00	14.982.000,00	100,00	0,00	11.697.400,00
JUMLAH		752.024.557,00	701.335.700,00	93,26	(50.688.857,00)	446.208.642,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp752.024.557,00 terealisasi sebesar Rp701.335.700,00 atau 93,26%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp446.208.642,00 berarti mengalami kenaikan sebesar Rp255.127.058,00.

7.11.1.1.2.2.2.13. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio merupakan pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap peralatan dan mesin berupa Pengadaan Alat Studio. Anggaran dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 136  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin –  
Pengadaan Alat Studio Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	424.457.100,00	407.173.039,00	95,93	(17.284.061,00)	839.276.500,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual dan Film	479.399.300,00	477.645.800,00	99,63	(1.753.500,00)	0,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	287.600.400,00	286.584.400,00	99,65	(1.016.000,00)	249.932.400,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual dan Film A	72.000.000,00	70.268.000,00	97,59	(1.732.000,00)	0,00
JUMLAH		1.263.456.800,00	1.241.671.239,00	98,28	(21.785.561,00)	1.089.208.900,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan Alat Studio Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.263.456.800,00 terealisasi sebesar Rp1.241.671.239,00 atau 98,28%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.089.208.900,00 mengalami kenaikan sebesar Rp152.462.339,00.

7.11.1.1.2.2.2.14. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi merupakan pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap peralatan dan mesin berupa Pengadaan Alat Komunikasi. Anggaran dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 137**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin –**  
**Pengadaan Alat Komunikasi Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00	16.217.700,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	18.000.000,00	17.600.000,00	97,78	(400.000,00)	0,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	0,00	0,00	0,00	0,00	15.785.000,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Sandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>24.000.000,00</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>98,33</b>	<b>(400.000,00)</b>	<b>32.002.700,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan Alat Komunikasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp24.000.000,00 terealisasi sebesar Rp23.600.000,00 atau 98,33%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp32.002.700,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.402.700,00.

**7.11.1.1.2.2.2.15. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Peralatan Pemancar merupakan pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap peralatan dan mesin berupa Alat Pemancar. Anggaran dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin – Peralatan Pemancar Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Peralatan Pemancar dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 138**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar**  
**Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola	4.308.000,00	4.177.800,00	96,98	(130.200,00)	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>4.308.000,00</b>	<b>4.177.800,00</b>	<b>96,98</b>	<b>(130.200,00)</b>	<b>0,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal peralatan dan mesin - Alat Pengolahan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.308.000,00 terealisasi sebesar Rp4.177.800,00 atau 96,98%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.177.800,00,00.

**7.11.1.1.2.2.2.16. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran merupakan pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap peralatan dan mesin berupa Pengadaan Alat Kedokteran. Anggaran dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 139  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin –  
Pengadaan Alat Kedokteran Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	10.403.641.888,00	10.114.626.066,00	97,22	(289.015.822,00)	9.700.821.821,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	1.490.750.000,00	1.490.750.000,00	100,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bedah	1.458.338.716,00	1.458.338.716,00	100,00	0,00	597.133.050,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	563.000.000,00	561.234.000,00	99,69	(1.766.000,00)	11.148.500,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin –Pengadaan Poliklinik Set	5.500.000,00	5.322.000,00	96,76	(178.000,00)	0,00
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	5.020.934.135,00	5.017.021.399,00	99,92	(3.912.736,00)	0,00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249.247.806,00
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin –Pengadaan Alat Farmasi	319.134.156,00	318.294.156,00	99,74	(840.000,00)	0,00
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin –Pengadaan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	3.278.099.331,00	3.278.099.331,00	100,00	0,00	0,00
JUMLAH		22.539.398.226,00	22.243.685.668,00	98,69	(295.712.558,00)	12.558.351.177,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan Alat Kedokteran Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp22.539.398.226,00 terealisasi sebesar Rp22.243.685.668,00 atau 98,69%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp12.558.351.177,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.685.334.491,00.

7.11.1.1.2.2.2.17. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan merupakan pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap peralatan dan mesin berupa Pengadaan Alat Kesehatan. Anggaran dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 140  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin –  
Pengadaan Alat Kesehatan Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	22.114.000,00	11.385.000,00	51,48	(10.729.000,00)	0,00

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	96.000.000,00	95.706.600,00	99,69	(293.400,00)	0,00
JUMLAH		118.114.000,00	107.091.600,00	90,67	(11.022.400,00)	0,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp118.114.000,00 terealisasi sebesar Rp107.091.600,00 atau 90,67%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp107.091.600,00.

7.11.1.1.2.2.2.18. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium merupakan pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap peralatan dan mesin berupa Pengadaan Unit-Unit Laboratorium. Anggaran dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium. Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 141  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin –  
Pengadaan Unit-Unit Laboratorium Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)						
No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran	2.674.742.316,00	2.487.139.548,00	92,99	(187.602.768,00)	599.397.269,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	0,00	2.871.000,00	0,00	2.871.000,00	0,00
JUMLAH		2.674.742.316,00	2.490.010.548,00	93,09	(184.731.768,00)	599.397.269,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.674.742.316,00 terealisasi sebesar Rp2.490.010.548,00 atau 93,09%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp599.397.269,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.890.613.279,00.

7.11.1.1.2.2.2.19. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah merupakan pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap peralatan dan mesin berupa Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah. Anggaran dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah. Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 142  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin –  
Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)						
No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00	119.158.600,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/ Keterampilan Lain-lain	907.564.912,00	879.322.640,00	96,89	(28.242.272,00)	0,00
JUMLAH		907.564.912,00	879.322.640,00	96,89	(28.242.272,00)	119.158.600,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp907.564.912,00 terealisasi sebesar Rp879.322.640,00 atau 96,89%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp119.158.600,00 mengalami kenaikan sebesar Rp760.164.040,00.

7.11.1.1.2.2.20. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika merupakan pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap peralatan dan mesin berupa Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika berupa Pengadaan System Power Supply. Anggaran dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika. Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 143**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin –**  
**Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Tahun 2019 dan 2018**  
**(Dalam Rupiah)**

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan System/Power Supply	539.543.300,00	539.543.300,00	100,00	0,00	0,00
JUMLAH		539.543.300,00	539.543.300,00	100,00	0,00	0,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp539.543.300,00 terealisasi sebesar Rp539.543.300,00 atau 100,00%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp539.543.300,00.

7.11.1.1.2.2.21. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Lingkungan Hidup merupakan pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap peralatan dan mesin berupa Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup berupa Pengadaan alat laboratorium penunjang. Anggaran dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup. Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 144**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin –**  
**Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Tahun 2019 dan 2018**  
**(Dalam Rupiah)**

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat laboratorium penunjang	5.904.000,00	0,00	0,00	(5.904.000,00)	0,00
JUMLAH		5.904.000,00	0,00	0,00	(5.904.000,00)	0,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.904.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan.

7.11.1.1.2.2.22. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Hidrodinamika merupakan pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap peralatan dan mesin berupa Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika berupa Pengadaan peralatan umum.

Anggaran dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika. Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 145**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin –**  
**Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika Tahun 2019 dan 2018**  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan peralatan umum	50.000.000,00	49.764.000,00	99,53	(236.000,00)	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>49.764.000,00</b>	<b>99,53</b>	<b>(236.000,00)</b>	<b>0,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp49.764.000,00 atau 99,53%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp49.764.000,00.

**7.11.1.1.2.2.2.23. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api merupakan pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap peralatan dan mesin berupa Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api. Anggaran dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api. Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 146**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin –**  
**Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api Tahun 2019 dan 2018**  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan	42.503.000,00	42.337.900,00	99,61	(165.100,00)	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Non Senjata Api	12.700.000,00	12.630.000,00	99,45	(70.000,00)	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>55.203.000,00</b>	<b>54.967.900,00</b>	<b>99,57</b>	<b>(235.100,00)</b>	<b>0,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp55.203.000,00 terealisasi sebesar Rp54.967.900,00 atau 99,57%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp54.967.900,00,00.

**7.11.1.1.2.2.2.24. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan merupakan pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap peralatan dan mesin berupa Alat Keamanan dan Perlindungan. Anggaran dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Keamanan dan Perlindungan. Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Keamanan dan Perlindungan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 147  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Keamanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Perlindungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal peralatan dan mesin - Alat Keamanan dan Perlindungan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 tidak mengalami kenaikan atau penurunan.

7.11.1.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran yang untuk mendapatkan aset tetap. Anggaran dan realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 148  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	187.141.997.991,42	149.790.762.852,00	80,04	(37.351.235.139,42)	79.873.267.098,00
2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	4.419.749.064,00	4.198.262.616,00	94,99	(221.486.448,00)	476.718.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	0,00	0,00	0,00	397.632.000,00
5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-rambu	1.846.845.117,00	1.846.661.117,00	99,99	(184.000,00)	2.288.076.000,00
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	997.551.000,00	996.360.000,00	99,88	(1.191.000,00)	1.091.981.000,00
JUMLAH		194.406.143.172,42	156.832.046.585,00	80,67	(37.574.096.587,42)	84.127.674.098,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp194.406.143.172,42 terealisasi sebesar Rp156.832.046.585,00 atau 80,67%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp84.127.674.098,00 mengalami kenaikan sebesar Rp72.704.372.487,00.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 149  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	41.224.746.506,64	39.723.257.626,00	96,36	(1.501.488.880,64)	26.304.276.953,00

No	SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Periduduk dan Keluarga Berencana	53.723.356.904,00	38.363.228.485,00	71,41	(15.360.128.419,00)	3.629.302.546,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	53.745.498.992,49	35.409.031.372,00	65,88	(18.336.467.620,49)	37.335.542.993,00
4	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	19.737.505.838,29	19.385.308.307,00	98,22	(352.197.531,29)	7.300.930.409,00
5	Sekretariat Daerah	100.000.000,00	99.505.000,00	99,51	(495.000,00)	74.820.000,00
6	Badan Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.018.209.520,00	1.618.941.534,00	80,22	(399.267.986,00)	1.629.140.000,00
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	23.193.700,00
9	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	330.000.000,00	323.740.500,00	98,10	(6.259.500,00)	1.413.357.477
10	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	23.526.825.411,00	21.909.033.761,00	93,12	(1.617.791.650,00)	6.417.110.020,00
JUMLAH		194.406.143.172,42	156.832.046.585,00	80,67	(37.574.096.587,42)	84.127.674.098,00

7.11.1.1.2.2.3.1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Kerja

Belanja Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Kerja merupakan pengeluaran yang untuk mendapatkan aset tetap Gedung dan Bangunan berupa Pengadaan Bangunan Tempat Kerja. Anggaran dan realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Kerja Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Kerja dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 150  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan –  
Pengadaan Bangunan Tempat Kerja Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	84.925.942.670,13	67.245.667.913,00	79,18	(17.680.274.757,13)	34.364.275.964,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	5.145.000.000,00	4.902.620.501,00	95,29	(242.379.499,00)	0,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	186.560.000,00	186.560.000,00	100,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	1.919.692.500,00	1.919.692.500,00	100,00	0,00	2.127.079.172,00
5	Belanja Moda Gedung danl Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	29.298.348.000,00	29.004.577.497,00	99,00	(293.770.503,00)	24.766.575.499,00
6	Belanja Moda Gedung danl Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.209.130.000,00	820.204.000,00	67,83	(388.926.000,00)	555.794.000,00
7	Belanja Moda Gedung danl Bangunan -	8.874.291.548,00	8.475.863.126,00	95,51	(398.428.422,00)	292.905.000,00



No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					
8	Belanja Modal Gedung danl Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.750.250.000,00	1.719.977.490,00	98,27	(30.272.510,00)	6.704.634.671,00
9	Belanja Modal Gedung danl Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertokoan/Koperasi/ Pasar	5.367.845.284,00	5.358.963.756,00	99,83	(8.881.528,00)	6.616.106.020,00
10	Belanja Modal Gedung danl Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara	16.666.109.721,29	16.327.398.190,00	97,97	(338.711.531,29)	3.778.126.909,00
11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	31.798.828.268,00	13.829.237.879,00	43,49	(17.969.590.389,00)	667.769.863
JUMLAH		187.141.997.991,42	149.790.762.852,00	80,04	(37.351.235.139,42)	79.873.267.098,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal gedung dan bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Kerja Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp187.141.997.991,42 terealisasi sebesar Rp149.790.762.852,00 atau 80,04%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp79.873.267.098,00 mengalami kenaikan sebesar Rp69.917.495.754.00.

7.11.1.1.2.2.3.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Tinggal

Belanja Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Tinggal merupakan pengeluaran yang untuk mendapatkan aset tetap Gedung dan Bangunan berupa Pengadaan Bangunan Tempat Tinggal. Anggaran dan realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Tinggal Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Tinggal dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 151  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan –  
Pengadaan Bangunan Tempat Tinggal Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	809.079.520,00	798.737.534,00	98,72	(10.341.986,00)	476.718.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	3.610.669.544,00	3.399.525.082,00	94,15	(211.144.462,00)	0,00
JUMLAH		4.419.749.064,00	4.198.262.616,00	94,99	(221.486.448,00)	476.718.000,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal gedung dan bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Tinggal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.419.749.064,00 terealisasi sebesar Rp4.198.262.616,00 atau 94,99%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp476.718.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.721.544.616,00.

7.11.1.1.2.2.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan

Belanja Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan merupakan pengeluaran yang untuk mendapatkan aset tetap Gedung dan Bangunan berupa Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan. Anggaran dan realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 152  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan –  
Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	397.632.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	0,00	397.632.000,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp397.632.000,00. Realisasi Tahun 2019 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp397.632.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp397.632.000,00.

7.11.1.1.2.2.3.4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu

Belanja Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu merupakan pengeluaran yang untuk mendapatkan aset tetap Gedung dan Bangunan berupa Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu. Anggaran dan realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 153  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	1.846.845.117,00	1.846.661.117,00	99,99	(184.000,00)	2.288.076.000,00
JUMLAH		1.846.845.117,00	1.846.661.117,00	99,99	(184.000,00)	2.288.076.000,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.846.845.117,00 terealisasi sebesar Rp1.846.661.117,00 atau 99,99%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.288.076.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp441.414.883,00.

7.11.1.1.2.2.3.5. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara

Belanja Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara merupakan pengeluaran yang untuk mendapatkan aset tetap Gedung dan Bangunan berupa Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara. Anggaran dan realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal

Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 154**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Signal	997.551.000,00	996.360.000,00	99,88	(1.191.000,00)	1.091.981.000,00
JUMLAH		997.551.000,00	996.360.000,00	99,88	(1.191.000,00)	1.091.981.000,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp997.551.000,00 terealisasi sebesar Rp996.360.000,00 atau 99,88%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.091.981.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp95.621.000,00.

**7.11.1.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap berupa Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan. Anggaran dan realisasi belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 155**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	123.437.900.348,02	103.779.238.371,00	84,07	(19.658.661.977,02)	94.051.565.837,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	1.474.018.000,00	1.367.508.000,00	92,77	(106.510.000,00)	144.013.000,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	6.728.156.489,00	6.728.156.486,00	100,00	(3,00)	3.708.364.000,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.554.467.511,18	3.528.292.500,00	99,26	(26.175.011,18)	1.843.473.000,00
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	12.922.524.347,00	12.770.488.085,00	98,82	(152.036.262,00)	720.950.000,00
6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	3.541.369.000,00	2.978.715.000,00	84,11	(562.654.000,00)	603.308.450,00
7	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	1.834.045.000,00	1.294.689.000,00	70,59	(539.356.000,00)	661.561.716,00
8	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00	24.970.000,00
9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	2.779.510.000,00	719.995.000,00	25,90	(2.059.515.000,00)	0,00
10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -	26.000.000,00	25.760.000,00	99,08	(240.000,00)	0,00

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
	Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah					
11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	1.714.795.767,00	1.705.174.767,00	99,44	(9.621.000,00)	1.557.905.000,00
12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	197.862.000,00
13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	6.890.468.266,00	5.527.060.980,00	80,21	(1.363.407.286,00)	6.073.877.039,00
14	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	500.000.000,00	465.043.000,00	93,01	(34.957.000,00)	139.084.000,00
15	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	199.771.000,00
16	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.378.086,00
JUMLAH		165.603.254.728,20	141.090.121.189,00	85,20	(24.513.133.539,20)	111.399.083.128,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp165.603.254.728,20 terealisasi sebesar Rp141.090.121.189,00 atau 85,20%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp111.399.083.128,00 berarti mengalami kenaikan sebesar Rp29.691.038.061,00. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 156  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Per SKPD Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.898.320.000,00	1.837.924.000,00	47,15	(2.060.396.000,00)	24.970.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	158.688.030.961,20	136.251.178.022,00	85,86	(22.436.852.939,20)	106.820.208.436,00
4	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	1.740.795.767,00	1.730.934.767,00	99,43	(9.861.000,00)	1.557.905.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	199.771.000,00
6	Kantor Kecamatan Siantan	458.400.000,00	453.327.000,00	98,89	(5.073.000,00)	348.822.000,00
7	Kantor Kecamatan Jemaja	593.708.000,00	593.690.000,00	100,00	(18.000,000)	287.991.000,00
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.415.692,00
9	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sekretariat Daerah	224.000.000,00	223.067.400,00	99,58	(932.600,00)	0,00
JUMLAH		165.603.254.728,20	141.090.121.189,00	85,20	(24.513.133.539,20)	111.399.083.128,00

**7.11.1.1.2.2.4.1. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Pengadaan Jalan. Anggaran dan realisasi belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 157

**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –  
Pengadaan Jalan Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	86.180.046.348,02	68.332.898.971,00	79,29	(17.847.147.377,02)	64.619.248.451,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	37.033.854.000,00	35.223.272.000,00	95,11	(1.810.582.000,00)	27.404.471.694,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	224.000.000,00	223.067.400,00	99,58	(932.600,00)	2.027.845.692,00
<b>JUMLAH</b>		<b>123.437.900.348,02</b>	<b>103.779.238.371,00</b>	<b>84,07</b>	<b>(19.658.661.977,02)</b>	<b>94.051.565.837,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp123.437.900.348,02 terealisasi sebesar Rp103.779.238.371,00 atau 84,07%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp94.051.565.837,00 berarti mengalami kenaikan sebesar Rp9.727.672.534,00.

**7.11.1.1.2.2.4.2. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Pengadaan Jembatan. Anggaran dan realisasi belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 158

**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –  
Pengadaan Jembatan Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	1.320.000.000,00	1.213.508.000,00	91,93	(106.492.000,00)	0,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan	154.018.000,00	154.000.000,00	99,99	(18.000,00)	144.013.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.474.018.000,00</b>	<b>1.367.508.000,00</b>	<b>92,77</b>	<b>(106.510.000,00)</b>	<b>144.013.000,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.474.018.000,00 terealisasi sebesar Rp1.367.508.000,00 atau 92,77%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp144.013.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.223.495.000,00.

#### 7.11.1.1.2.2.4.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Pengadaan Bangunan Air Irigasi. Anggaran dan realisasi belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 159

#### Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air Irigasi Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	6.728.156.489,00	6.728.156.486,00	100,00	(3,00)	0,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708.364.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>6.728.156.489,00</b>	<b>6.728.156.486,00</b>	<b>100,00</b>	<b>(3,00)</b>	<b>3.708.364.000,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.728.156.489,00 terealisasi sebesar Rp6.728.156.486,00 atau 100%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.708.364.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.019.792.486,00.

#### 7.11.1.1.2.2.4.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam. Anggaran dan realisasi belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 160

#### Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	3.554.467.511,18	3.528.292.500,00	99,26	(26.175.011,18)	1.843.473.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>3.554.467.511,18</b>	<b>3.528.292.500,00</b>	<b>99,26</b>	<b>(26.175.011,18)</b>	<b>1.843.473.000,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.554.467.511,18 terealisasi sebesar Rp3.528.292.500,00 atau 99,26%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.843.473.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.684.819.500,00.

#### 7.11.1.1.2.2.4.5. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Modal

Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku. Anggaran dan realisasi belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 161**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)						
No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku	11.103.714.347,00	10.962.034.085,00	98,72	(141.680.262,00)	589.380.000,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	1.118.810.000,00	1.117.929.000,00	99,92	(881.000,00)	0,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Baku	0,00	0,00	0,00	0,00	131.570.000,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Baku	700.000.000,00	690.525.000,00	98,65	(9.475.000,00)	0,00
JUMLAH		12.922.524.347,00	12.770.488.085,00	98,82	(152.036.262,00)	720.950.000,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp12.922.524.347,00 terealisasi sebesar Rp12.770.488.085,00 atau 98,82%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp720.950.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.049.538.085,00.

**7.11.1.1.2.2.4.6. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Pengadaan Bangunan Air Kotor. Anggaran dan realisasi belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 162**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)						
No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00	603.308.450,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	3.541.369.000,00	2.978.715.000,00	84,11	(562.654.000,00)	0,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		3.541.369.000,00	2.978.715.000,00	84,11	(562.654.000,00)	603.308.450,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.541.369.000,00

teralisasi sebesar Rp2.978.715.000,00 atau 84,11%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp603.308.450,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.375.406.550,00.

7.11.1.1.2.2.4.7. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Pengadaan Bangunan Air. Anggaran dan realisasi belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 163  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –  
Pengadaan Bangunan Air Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Laut	1.734.045.000,00	1.294.689.000,00	74,66	(439.356.000,00)	661.561.716,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	100.000.000,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00
JUMLAH		1.834.045.000,00	1.294.689.000,00	70,59	(539.356.000,00)	661.561.716,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.834.045.000,00 terealisasi sebesar Rp1.294.689.000,00 atau 70,59%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp661.561.716,00 mengalami kenaikan sebesar Rp633.127.284,00.

7.11.1.1.2.2.4.8. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih. Anggaran dan realisasi belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 164  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –  
Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Minum/Air Bersih	0,00	0,00	0,00	0,00	24.970.000,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber/ Mata Air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00	0,00
JUMLAH		200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00	24.970.000,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp200.000.000,00 atau 100%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp24.970.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp175.030.000,00.



**7.11.1.1.2.2.4.9. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Pengadaan Instalasi Air Kotor. Anggaran dan realisasi belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 165**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –**  
**Pengadaan Instalasi Air Kotor Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Kotor	2.779.510.000,00	719.995.000,00	25,90	(2.059.515.000,00)	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.779.510.000,00</b>	<b>719.995.000,00</b>	<b>25,90</b>	<b>(2.059.515.000,00)</b>	<b>0,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.779.510.000,00 terealisasi sebesar Rp719.995.000,00 atau 25,90%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp719.995.000,00.

**7.11.1.1.2.2.4.10. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah. Anggaran dan realisasi belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 166**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –**  
**Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	26.000.000,00	25.760.000,00	99,08	(240.000,00)	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>26.000.000,00</b>	<b>25.760.000,00</b>	<b>99,08</b>	<b>(240.000,00)</b>	<b>0,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp26.000.000,00 terealisasi sebesar Rp25.760.000,00 atau 99,08%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp25.760.000,00.

**7.11.1.1.2.2.4.11. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik. Anggaran dan realisasi belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 167  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –  
Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya	1.714.795.767,00	1.705.174.767,00	99,44	(9.621.000,00)	1.557.905.000,00
JUMLAH		1.714.795.767,00	1.705.174.767,00	99,44	(9.621.000,00)	1.557.905.000,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.714.795.767,00 terealisasi sebesar Rp1.705.174.767,00 atau 99,44%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.557.905.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp147.269.767,00.

7.11.1.1.2.2.4.12. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Pengadaan Instalasi Gardu Listrik. Anggaran dan realisasi belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 168  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –  
Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	197.862.000,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	0,00	197.862.000,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00 dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp197.862.000,00. Realisasi Tahun 2019 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp197.862.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp197.862.000,00.

7.11.1.1.2.2.4.13. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Pengadaan Jaringan Air Minum. Anggaran dan realisasi belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 169  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –  
Pengadaan Jaringan Air Minum Tahun 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah	6.890.468.266,00	5.527.060.980,00	80,21	(1.363.407.286,00)	6.073.877.039,00
JUMLAH		6.890.468.266,00	5.527.060.980,00	80,21	(1.363.407.286,00)	6.073.877.039,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.890.468.266,00 terealisasi sebesar Rp5.527.060.980,00 atau 80,21%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp6.073.877.039,00 mengalami penurunan sebesar Rp546.816.059,00.

7.11.1.1.2.2.4.14. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Pengadaan Jaringan Listrik. Anggaran dan realisasi belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 170  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –  
Pengadaan Jaringan Listrik Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	500.000.000,00	465.043.000,00	93,01	(34.957.000,00)	0,00
2.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	139.084.000,00
JUMLAH		500.000.000,00	465.043.000,00	93,01	(34.957.000,00)	139.084.000,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp465.043.000,00 atau 93,01%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp139.084.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp325.959.000,00.

7.11.1.1.2.2.4.15. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Pengadaan Jaringan Gas. Anggaran dan realisasi belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 171  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –  
Pengadaan Jaringan Gas Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	199.771.000,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	0,00	199.771.000,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00 dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp199.771.000,00. Realisasi Tahun 2019 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp199.771.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp199.771.000,00.

7.11.1.1.2.2.4.16. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah. Anggaran dan realisasi belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 172  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –  
Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.378.086,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.378.086,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00 dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp1.472.378.086,00. Realisasi Tahun 2019 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.472.378.086,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.472.378.086,00.

7.11.1.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap berupa Aset Tetap Lainnya. Anggaran dan realisasi belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 173  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	748.943.845,00	748.094.950,00	99,89	(848.895,00)	0,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	596.330.000,00	593.300.423,00	99,49	(3.029.577,00)	199.299.000,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	216.508.000,00	214.445.000,00	99,05	(2.063.000,00)	0,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	663.746.000,00	662.327.700,00	99,79	(1.418.300,00)	147.400.000,00
JUMLAH		2.225.527.845,00	2.218.168.073,00	99,67	(7.359.772,00)	346.699.000,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.225.527.845,00 terealisasi sebesar Rp2.218.168.073,00 atau 99,67%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp346.699.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.871.469.073,00. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 174  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per SKPD Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.286.943.845,00	1.283.099.773,00	99,70	(3.844.072,00)	199.299.000,00
2	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	280.746.000,00	280.646.000,00	99,96	(100.000,00)	147.400.000,00
3	Sekretariat Daerah	225.000.000,00	222.998.600,00	99,11	(2.001.400,00)	0,00
4	Kecamatan Palmatak	50.000.000,00	49.995.000,00	99,99	(5.000,00)	0,00
5	Kecamatan Siantan	16.508.000,00	16.445.000,00	99,62	(63.000,00)	0,00
6	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	350.000.000,00	348.703.700,00	99,63	(1.296.300,00)	0,00
7	Kecamatan Siantan Tengah	16.330.000,00	16.280.000,00	99,69	(50.000,00)	0,00
JUMLAH		2.225.527.845,00	2.218.168.073,00	99,67	(7.359.772,00)	346.699.000,00

7.11.1.1.2.2.5.1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan Aset Tetap Lainnya berupa pengadaan buku. Anggaran dan realisasi belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 175  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya –  
Pengadaan Buku Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	498.956.595,00	498.172.700,00	99,84	(783.895,00)	0,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olahraga	249.987.250,00	249.922.250,00	99,97	(65.000,00)	0,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Sejarah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		748.943.845,00	748.094.950,00	99,89	(848.895,00)	0,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp748.943.845,00 terealisasi sebesar Rp748.094.950,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp748.094.950,00.

7.11.1.1.2.2.5.2. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan Aset Tetap Lainnya berupa Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan. Anggaran dan realisasi belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 176  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya –  
Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	546.330.000,00	543.305.423,00	99,45	(3.024.577,00)	0,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	199.299.000,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan	50.000.000,00	49.995.000,00	99,99	(5.000,00)	0,00
JUMLAH		596.330.000,00	593.300.423,00	99,49	(3.029.577,00)	199.299.000,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp596.330.000,00 terealisasi sebesar Rp593.300.423,00 atau 99,49%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp199.299.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp394.001.423,00.

7.11.1.1.2.2.5.3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olahraga Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olahraga Lainnya merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan Aset Tetap Lainnya berupa Pengadaan Alat Olahraga Lainnya. Anggaran dan realisasi belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olahraga Lainnya Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olahraga Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 177  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya –  
Pengadaan Alat Olahraga Lainnya Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ Kurang	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	216.508.000,00	214.445.000,00	99,05	(2.063.000,00)	0,00
JUMLAH		216.508.000,00	214.445.000,00	99,05	(2.063.000,00)	0,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olahraga Lainnya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp216.508.000,00 terealisasi sebesar Rp214.445.000,00 atau 99,05%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp214.445.000,00.

7.11.1.1.2.2.5.4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan Aset Tetap Lainnya berupa Pengadaan Aset Tetap Renovasi. Anggaran dan realisasi belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 178  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya –  
Pengadaan Aset Tetap Renovasi Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	663.746.000,00	662.327.700,00	99,79	(1.418.300,00)	147.400.000,00
JUMLAH		663.746.000,00	662.327.700,00	99,79	(1.418.300,00)	147.400.000,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp663.746.000,00 terealisasi sebesar Rp662.327.700,00 atau 99,79%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp147.400.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp514.927.700,00.

7.11.1.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang tidak terdapat dalam program dan/atau kegiatan, antara lain bencana alam dan lain sebagainya. Akun ini menggambarkan Belanja Tidak Terduga untuk periode Tahun Anggaran 2019 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 179  
Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
1	Belanja Tak Terduga	588.968.000,00	0,00	0,00	588.968.000,00	290.624.000,00
JUMLAH		588.968.000,00	0,00	0,00	588.968.000,00	290.624.000,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp588.968.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp290.624.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp290.624.000,00. Belanja Tak Terduga tersebut dikeluarkan untuk keperluan Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang.

7.11.1.1.3. Transfer

7.11.1.1.3.1. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan adalah penyaluran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai kompensasi bagi hasil pajak-pajak daerah. Anggaran dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Transfer Bantuan Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 180  
Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	51.179.675.000,00	51.179.675.000,00	100,00	0,00	43.487.568.000,00
JUMLAH		51.179.675.000,00	51.179.675.000,00	100,00	0,00	43.487.568.000,00

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp51.179.675.000,00 terealisasi sebesar Rp51.179.675.000,00 atau 100,00%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018

sebesar Rp43.487.568.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.692.107.000,00, hal ini disebabkan Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa berdasarkan pencapaian target pajak daerah yang dikompensasikan ke Pemerintah Desa diwilayah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

7.11.1.1.3.1.1. Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa

Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa merupakan pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk memberikan Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Pemerintahan Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Anggaran dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintahan Desa dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 181  
Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintahan Desa  
Berdasarkan Tingkat Kecamatan Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Di Kecamatan Siantan	6.285.655.000,00	6.285.655.000,00	100,00	0,00	5.274.775.000,00
2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Di Kecamatan Jemaja	6.147.953.800,00	6.147.953.800,00	100,00	0,00	6.204.480.000,00
3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Di Kecamatan Palmatak	14.121.213.200,00	14.121.213.200,00	100,00	0,00	13.005.900.000,00
4	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Di Kecamatan Siantan Timur	6.182.766.000,00	6.182.766.000,00	100,00	0,00	5.214.721.000,00
5	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Di Kecamatan Siantan Selatan	6.656.492.000,00	6.656.492.000,00	100,00	0,00	5.694.774.000,00
6	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Di Kecamatan Jemaja Timur	4.442.147.000,00	4.442.147.000,00	100,00	0,00	3.696.863.000,00
7	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Di Kecamatan Siantan Tengah	5.016.804.000,00	5.016.804.000,00	100,00	0,00	4.396.055.000,00
8	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Di Kecamatan Siantan Utara	1.295.746.800,00	1.295.746.800,00	100,00	0,00	0,00
9	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Di Kecamatan Jemaja Barat	1.030.897.200,00	1.030.897.200,00	100,00	0,00	0,00
JUMLAH		51.179.675.000,00	51.179.675.000,00	100,00	0,00	43.487.568.000,00

7.11.1.1.3.2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dimana dalam penganggaran pemerintah dimaksud untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan berasal antara lain dari penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya dan penerimaan kembali piutang kepada Perusahaan Negara, sedangkan pengeluaran pembiayaan berasal antara lain dari penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah kepada Kelompok Masyarakat, dapat dijelaskan sebagai berikut.



7.11.1.1.3.2.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah merupakan penerimaan yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) Tahun lalu, adapun anggaran/realisasi Tahun Anggaran 2019 dan realisasi 2018 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 182  
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya	57.221.052.240,42	57.221.052.240,42	100,00	0,00	94.076.338.671,34
2	Penerimaan Kembali Piutang Kepada Perusahaan Negara	500.000.000,00	768.074.996,00	153,61	268.074.996,00	809.637.258,00
JUMLAH		57.721.052.240,42	57.989.127.236,42	100,46	268.074.996,00	94.885.975.929,34

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp57.721.052.240,42 terealisasi sebesar Rp57.989.127.236,42 atau 100,46%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp94.813.975.929,34 mengalami penurunan sebesar Rp36.896.848.692,92.

7.11.1.1.3.2.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayan Daerah merupakan pengeluaran yang penggunaannya antara lain untuk penyertaan modal daerah, pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo, serta pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 dan 2018 anggaran dan realisasi dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 183  
Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Penyertaan Modal pada Kelompok Masyarakat	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00	500.000.000,00
JUMLAH		500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00	500.000.000,00

Data tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada anggaran Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp500.000.000,00 atau 100%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp500.000.000,00 berarti tidak mengalami kenaikan atau penurunan.

7.11.1.1.3.2.3. Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto merupakan perhitungan penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dengan tabel berikut.

Tabel 184  
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Pembiayaan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2018
1	Penerimaan Pembiayaan	57.721.052.240,42	57.989.127.236,42	100,46	268.074.996,00	94.885.975.929,34
2	Pengeluaran Pembiayaan	(500.000.000,00)	(500.000.000,00)	100,00	0,00	(500.000.000,00)
JUMLAH		57.221.052.240,42	57.489.127.236,42	100,47	268.074.996,00	94.385.975.929,34

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pembiayaan netto Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp57.221.052.240,42 terealisasi sebesar Rp57.489.127.236,42 atau 100,47%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp94.385.975.929,34 mengalami penurunan sebesar Rp36.896.848.692,92.

7.11.1.1.3.2.4. SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN APBD (SiLPA/SiKPA)

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah, dapat di jelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 185

Anggaran dan Realisasi Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA) Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	SILPA/SIKPA	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2018
1	Pendapatan Daerah	1.211.349.156.455,20	1.121.205.421.730,97	92,56	(90.144.734.724,23)	837.725.038.534,17
2	Belanja Daerah	1.217.390.533.695,62	1.063.531.487.520,99	87,36	(153.859.046.174,63)	831.402.394.223,09
3	Transfer	51.179.675.000,00	51.179.675.000,00	100,00	0,00	43.487.568.000,00
4	Surplus/Defisit (1 – 2 - 3)	(57.221.052.240,42)	6.494.529.209,98	11,35	63.714.581.450,40	(37.164.923.688,92)
5	Penerimaan Pembiayaan	57.721.052.240,42	57.989.127.236,42	100,46	268.074.996,00	94.885.975.929,34
6.	Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00	500.000.000,00
7.	Pembiayaan Netto (5 – 6)	57.221.052.240,42	57.489.127.236,42	100,47	268.074.996,00	94.385.975.929,34
SILPA/SIKPA (4 – 7)		0,00	63.983.386.446,40	0,00	63.446.506.454,40	57.221.052.240,42

7.11.1.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, penjelasan atas pos-pos perubahan saldo anggaran lebih yaitu sebagai berikut.

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA Tahun-Tahun Anggaran sebelumnya dan Tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2019 sebesar Rp57.221.052.240,42 terjadi penurunan sebesar Rp36.855.286.430,92 bila dibandingkan saldo anggaran lebih awal Tahun 2018 yaitu sebesar Rp94.076.338.671,34.

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp57.221.052.240,42 bila dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp94.076.338.671,34. Sehingga terjadi penurunan sebesar Rp36.855.286.430,92 hal ini dikarenakan target pendapatan yang tercapai dan kurangnya realisasi belanja Tahun 2019. Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019, mengalami sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp63.983.386.446,40 dibandingkan Tahun sebelumnya yang masih terdapat Silpa sebesar Rp57.221.052.240,42. Penggunaan SAL Tahun Anggaran sebelumnya sebagai pembiayaan digunakan langsung untuk membiayai operasional Pemerintah Daerah.

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp63.983.386.446,40 atau mengalami kenaikan sebesar Rp6.762.334.205,98 bila dibandingkan Tahun Anggaran 2018 yang mengalami Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp57.221.052.240,42. Berikut koreksi SILPA/SIKPA tahun 2019:

1. Koreksi Tambah atas belanja modal Jalan, Irigasi dan Jembatan yang diakui menjadi utang jangka pendek lainnya sebesar Rp 12.096.000,00;
2. Koreksi Tambah atas kelebihan pencatatan pendapatan dana kapitasi pada Puskesmas Siantan Selatan sebesar Rp14.510.899,00;

3. Koreksi Tambah atas kelebihan pencatatan pendapatan dana kapitasi pada Puskesmas Jemaja Timur sebesar Rp43.191.947,35;
4. Koreksi Tambah Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Pendapatan Non Kapitasi) pada Puskesmas Letung sebesar Rp1.000.000,00;
5. Koreksi Kurang Pengembalian atas Retur dari Rekening Penerima sebesar Rp12.092.500,00;
6. Koreksi Kurang atas kesalahan pencatatan pendapatan dana kapitasi pada Puskesmas Tarempa sebesar Rp25.230.044,00;
7. Koreksi Kurang atas kesalahan pencatatan pendapatan dana kapitasi pada Puskesmas Siantan Timur sebesar Rp9.255.367,00;
8. Koreksi Kurang atas kesalahan pencatatan pendapatan dana kapitasi pada Puskesmas Siantan Tengah sebesar Rp39.131.949,00;
9. Koreksi Kurang atas kesalahan pencatatan pendapatan dana kapitasi pada Puskesmas Letung sebesar Rp5.200.795,35;
10. Koreksi Kurang atas Biaya Potongan Bank untuk pengembalian dari PT. Jatria sebesar Rp3.500,00.

**Tabel 186**  
**Realisasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2019 dan 2018**  
(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI 2019	REALISASI 2018
1	PENDAPATAN – LRA	1.121.205.421.730,97	837.725.038.534,17
2	BELANJA	1.063.531.487.520,99	831.402.394.223,09
3	TRANSFER	51.179.675.000,00	43.487.568.000,00
4	SURPLUS / (DEFISIT)	6.494.259.209,98	(37.164.923.688,92)
5	PEMBIAYAAN		
6	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	57.989.127.236,42	94.885.975.929,34
7	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000,00	500.000.000,00
8	PEMBIAYAAN NETTO	57.489.127.236,42	94.385.975.929,34
9	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN SILPA/SIKPA)	63.983.386.446,40	57.221.052.240,42

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Untuk Tahun 2019 dan Tahun 2018 tidak terdapat kesalahan koreksi pembukuan pada tahun sebelumnya.

**7.11.1.3. NERACA**

**7.11.1.3.1. Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

**7.11.1.3.1.2.1. Aset Lancar**

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset Lancar sebagaimana dimaksud di atas meliputi: (1) Kas dan Setara Kas, (2) Investasi Jangka Pendek, (3) Piutang dan (4) Persediaan. Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp126.413.823.567,09 dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 187  
Aset Lancar Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	%
Kas Di Kas Daerah	60.193.608.789,43	56.234.085.570,87	107,04
Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	-
Kas Di Bendahara Penerimaan	65.204.908,40	146.303.308,40	(44,57)
Kas Lainnya	0,00	0,00	-
Kas Di Bendahara FKTP Puskesmas	0,00	0,00	-
Kas Di Bendahara BOS	3.743.988.579,57	840.663.361,15	445,41
Kas Lainnya	47.330.075,69	0,00	-
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	-
Piutang Pendapatan	909.894.813,00	869.932.158,00	104,59
Penyisihan Piutang	(352.459.568,94)	(682.459.112,29)	(51,65)
Piutang Retribusi	0,00	8.735.340,00	(100,00)
Piutang Transfer	33.751.734.089,00	0,00	-
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	357.540.703,00	0,00	-
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(357.540.703,00)	0,00	-
Piutang Lainnya	331.161.006,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Lainnya	(169.007.978,79)	0,00	0,00
Persediaan	27.892.368.873,73	17.654.771.006,00	157,99
JUMLAH ASET LANCAR	126.413.823.567,09	75.072.031.632,13	168,39

7.11.1.3.1.1.1. Kas Di Kas Daerah

Kas Di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Jumlah Kas Di Kas Daerah yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp60.193.608.789,43 terdiri dari:

Tabel 188  
Kas Di Kas Daerah Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian:	Saldo 31 Desember 2019
Kas Di Kas Daerah	
1. Bank Riau Kepri Capem Tarempa No. Rek. 170 – 02 – 00001	0,00
2. Bank Riau Kepri Capem Tarempa No. Rek. 170 – 02 – 00002	59.078.821.557,02
3. Saldo Akhir Kas FKTP Puskesmas Dana JKN Kapitasi	1.028.087.232,41
4. Dana Bergulir Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	77.400.000,00
5. Koreksi atas Kesalahan transfer bank, dana sudah dikembalikan ke kasda tanggal 29 Januari 2020	9.300.000,00
Jumlah	60.193.608.789,43

Reklasifikasi Pencatatan Saldo Akhir Kas FKTP Puskesmas Dana JKN Kapitasi merupakan saldo akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.028.087.232,41, terdiri dari:

Tabel 189  
Kas Di Bendahara FKTP Puskesmas - Dana JKN Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

Puskesmas	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal	Pendapatan	Belanja/Beban	Saldo Akhir
Puskesmas Tarempa	432.203.570,00	(25.230.044,00)	865.985.175,00	655.966.679,00	616.992.022,00
Puskesmas Palmatak	108.889.470,00	0,00	796.737.575,00	816.624.554,00	89.002.491,00
Puskesmas Letung	120.530.695,35	(5.200.795,35)	385.723.000,00	432.430.200,00	68.622.700,00
Puskesmas Siantan Selatan	25.621.616,00	14.510.899,00	195.464.000,00	166.276.950,00	69.319.565,00
Puskesmas Siantan Tengah	135.473.011,94	(39.131.949,00)	220.849.000,00	248.920.050,00	68.270.012,94
Puskesmas Siantan Timur	57.864.241,00	(9.255.367,00)	258.214.000,00	258.367.412,00	48.455.462,00
Puskesmas Jemaja Timur	14.078.832,12	43.191.947,35	175.553.000,00	165.398.800,00	67.424.979,47
JUMLAH	894.661.436,41	(21.115.309,00)	2.898.525.750,00	2.743.984.645,00	1.028.087.232,41

7.11.1.3.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas Di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran dari sisa UYHD/UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah pertanggal neraca. Jumlah Kas Di Bendahara Pengeluaran yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

7.11.1.3.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas Di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Jumlah Kas Di Bendahara Penerimaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp65.204.908,40.

Tabel 190  
Kas Di Bendahara Penerimaan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)				
SKPD/Unit Kerja	Saldo Awal	Pendapatan	Setor ke Kasda	Saldo Akhir
RSUD Palmatak (Jasa Raharja dan Kas Lainnya - Dana Non Kapitasi INA-CBG's)	7.681.000,00	16.421.189,00	4.898.600,00	19.203.589,00
RSUD Jemaja (Jasa Raharja dan Kas Lainnya - Dana Non Kapitasi INA-CBG's)	126.369.269,00	2.131,00	114.642.400,00	11.729.000,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	1.298.220,00	0,00	1.298.220,00	0,00
Puskesmas Letung (Kas Lainnya - Dana Non Kapitasi INA-CBG's)	3.075.000,00	13.133.000,00	3.075.000,00	13.133.000,00
Puskesmas Siantan Timur (Kas Lainnya - Dana Non Kapitasi INA-CBG's)	2.695.000,00	0,00	2.695.000,00	0,00
Puskesmas Jemaja Timur (Kas Lainnya - Dana Non Kapitasi INA-CBG's)	4.949.819,40	20.794.500,00	4.840.000,00	20.904.319,40
Puskesmas Siantan Tengah (Kas Lainnya - Dana Non Kapitasi INA-CBG's)	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
JUMLAH	146.303.308,40	50.350.820,00	131.449.220,00	65.204.908,40

7.11.1.3.1.1.4. Kas Di Bendahara FKTP Puskesmas

Kas Di Bendahara FKTP Puskesmas merupakan saldo akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00,

7.11.1.3.1.1.5. Kas Di Bendahara BOS

Kas Di Bendahara BOS merupakan Kas Di Bendahara BOS pada saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara BOS yang sumbernya berasal dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), sumbernya dari Pemerintah Pusat yang di transfer oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.743.988.579,57, yang terdiri dari Kas di Bendahara BOS sebesar Rp3.724.572.748,57 dan Kas Lainnya berupa Potongan Pajak yang belum disetorkan oleh Bendahara Dana BOS ke Kas Negara sebesar Rp19.415.831,00 dapat dijelaskan sebagai berikut

Tabel 191  
Kas Di Bendahara BOS Tahun 2019

(Dalam Rupiah)				
Tingkatan Sekolah	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja/Beban Tahun 2019	Saldo Akhir
Sekolah Dasar	389.905.282,55	6.399.050.694,63	5.050.305.343,61	1.738.650.633,57
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	450.758.078,60	4.388.781.960,38	2.853.617.923,98	1.985.922.115,00
JUMLAH	840.663.361,15	10.787.832.655,01	7.903.923.267,59	3.724.572.748,57
Potongan Pajak Yang Belum Disetor Ke Kas Negara				19.415.831,00

Tingkatan Sekolah	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja/Beban Tahun 2019	Saldo Akhir
Jumlah Kas di Bendahara Dana BOS				3.743.988.579,57

Berdasarkan tabel di atas Saldo akhir Kas di Bendahara Bos sebesar Rp3.724.572.748,57 yang terdiri dari Tingkatan Sekolah Dasar sebesar Rp1.738.650.633,57 dan tingkatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebesar Rp1.985.922.115,00 serta Potongan Pajak Yang Belum Disetor Ke Kas Negara sebesar Rp19.415.831,00.

Rincian Kas di Bendahara BOS pada tingkatan Sekolah Dasar per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.738.650.633,57 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 192

## Kas Di Bendahara BOS pada Tingkatan Sekolah Dasar Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

Nama Sekolah	Nomor Rekening	Saldo Kas pada Bank	Saldo Kas pada Tunai	Saldo Akhir
SDN 001 LETUNG	7031612588	106.083,99	0,00	106.083,99
SDN 002 KERAMUT	7031612599	52.181.352,02	0,00	52.181.352,02
SDN 003 REWAK	7031612602	56.013,75	0,00	56.013,75
SDN 004 MAMPOK	7031612618	15.511.323,96	0,00	15.511.323,96
SDN 005 LETUNG	7031612629	345.894,19	0,00	345.894,19
SDN 006 IMPOL	7031612637	44.090.830,64	0,00	44.090.830,64
SDN 007 LEMBAH REWAK	7031612645	113.136,30	0,00	113.136,30
SDN 008 LETUNG	7031612653	78.330.869,48	0,00	78.330.869,48
SDN 009 PULAU DARAK	7031612677	152.736,44	4.800.000,00	4.952.736,44
SDN 010 SUNGGAK	7031612688	130.246,13	0,00	130.246,13
SDN 011 AIR BIRU	7059983207	181.140,11	52.000,00	233.140,11
SDN 012 LANDAK	7061488965	278.266,22	0,00	278.266,22
SDN 001 KUALA MARAS	5610003240	90.260.036,69	0,00	90.260.036,69
SDN 002 ULU MARAS	5610003253	78.222,62	0,00	78.222,62
SDN 003 BUKIT PADI	5610003267	48.205.316,23	0,00	48.205.316,23
SDN 004 GENTING PULUR	5610003271	42.120.084,96	128.650,00	42.248.734,96
SDN 001 TELAGA	7031612963	59.602,34	2.157.600,00	2.217.202,34
SDN 002 KIABU	7031612661	70.181.814,99	0,00	70.181.814,99
SDN 003 MENGKAIT	7031612971	83.712,02	0,00	83.712,02
SDN 004 GENTING	7031612987	53.284.261,94	0,00	53.284.261,94
SDN 005 LINGAI	7031612998	356.983,25	925,00	357.908,25
SDN 006 TELAGA KECIL	7031613005	32.106.705,97	3.697.700,00	35.804.405,97
SDN 007 LINGAI BESAR	7031613013	230.170,25	0,00	230.170,25
SDN 008 HARUNG HIJAU	7042962885	67.716,09	0,00	67.716,09
SDN 001 AIR ASUK	7031613021	136.443,79	14.278.000,00	14.414.443,79
SDN 002 AIR NANGAK	7031613037	238.279,70	1.707.000,00	1.945.279,70
SDN 003 AIR SENA	7031613048	4.606.907,29	291.000,00	4.897.907,29
SDN 004 TELUK SUNTING	7031613056	56.141.416,49	0,00	56.141.416,49
SDN 005 LIDI	7031613064	48.274.185,46	2.695.354,00	50.969.539,46
SDN 006 LIUK	7031613072	123.109,63	1.778.400,00	1.901.509,63
SDN 007 MUNTAL	7061489128	243.829,63	22.723.200,00	22.967.029,63
SDN 001 NYAMUK	7031613088	90.208.214,69	800,00	90.209.014,69
SDN 002 MUNJAN	7031613099	62.139.198,29	4.950.000,00	67.089.198,29
SDN 003 AIR PUTIH	7031603689	35.120.677,43	3.196.800,00	38.317.477,43
SDN 004 SERAT	7031613118	54.099,15	0,00	54.099,15
SDN 005 TEMBURUN	7031613129	55.708.244,91	450.000,00	56.158.244,91
SDN 006 BATU BELAH	7031613137	296.836,87	160.500,00	457.336,87
SDN 007 ETANG	7031613145	64.408,09	100.000,00	164.408,09
SDN 008 PENEBUG	7031613153	126.731,69	1.500.000,00	1.626.731,69
SDN 009 NOKOK	7061489066	67.951,10	2.165.000,00	2.232.951,10
SDN 010 LUAP	7076490273	117.634,85	0,00	117.634,85

Nama Sekolah	Nomor Rekening	Saldo Kas pada Bank	Saldo Kas pada Tunai	Saldo Akhir
SDN 001 LADAN	7031612734	148.338.067,44	1.827.500,00	150.165.567,44
SDN 002 PIASAN	7031612742	56.176.314,71	0,00	56.176.314,71
SDN 003 PUTIK	7031612758	164.565,56	1.866.300,00	2.030.865,56
SDN 004 BAYAT	7031612769	58.294.379,99	0,00	58.294.379,99
SDN 005 PAYALAMAN	7031612777	374.176,21	1.640.025,00	2.014.201,21
SDN 006 PIABUNG	7031612785	96.228.312,67	4.383.800,00	100.612.112,67
SDN 007 MATAK	7031612793	62.233.670,60	0,00	62.233.670,60
SDN 008 LANGIR	7031612807	62.277.176,05	0,00	62.277.176,05
SDN 009 PALAH	7031612815	71.657,14	0,00	71.657,14
SDN 010 PIAN PASIR	7031612823	62.211.957,06	0,00	62.211.957,06
SDN 011 CANDI	7031612831	62.984.271,32	178.000,00	63.162.271,32
SDN 012 TEBANG	7031612847	99.315,56	10.809.600,00	10.908.915,56
SDN 013 BELIBAK	7031612858	38.119.439,61	0,00	38.119.439,61
SDN 014 BATU AMPAR	7031612866	163.987,06	6.500,00	170.487,06
SDN 015 TELUK DURIAN	7031612874	581.439,92	0,00	581.439,92
SDN 016 MUBUR	7079869858	116.628,55	0,00	116.628,55
SDN 001 SIANTAN	7031612882	21.860.175,54	23.222.297,00	45.082.472,54
SDN 002 TAREMPA	7031612898	205.286,64	21.370,17	226.656,81
SDN 003 TAREMPA	7031612904	211.169,02	0,00	211.169,02
SDN 004 BUKIT TAMBUN	7031612912	63.453,76	0,00	63.453,76
SDN 005 ANTANG	7031612928	127.388,55	0,00	127.388,55
SDN 006 TANJUNG	7031612939	156.885,61	0,00	156.885,61
SDN 007 SEDAK	7031612947	74.723,55	5.173.000,00	5.247.723,55
SDN 008 DUSUN	7031612955	68.216.351,81	1.029.200,00	69.245.551,81
SDN 009 REKAM	7061489187	128.628,83	0,00	128.628,83
JUMLAH		1.621.660.112,40	116.990.521,17	1.738.650.633,57

Rincian Kas di Bendahara BOS pada tingkatan Sekolah Menengah Pertama per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.985.922.115,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 193  
Kas Di Bendahara BOS pada Tingkatan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2019  
(Dalam Rupiah)

Nama Sekolah	Nomor Rekening	Saldo Kas pada Bank	Saldo Kas pada Tunai	Saldo Akhir
SMPN 1 JEMAJA	5610002996	272.505.420,66	1.600.200,00	274.105.620,66
SMPN 2 SUNGGAK	7042775945	72.358.900,47	0,00	72.358.900,47
SMPN 3 SATAP REWAK	7096655031	72.317.791,34	0,00	72.317.791,34
SMPN 1 JEMAJA TIMUR	7033892238	94.259.614,85	0,00	94.259.614,85
SMPN 1 KIABU	5610003075	89.175,22	0,00	89.175,22
SMPN 2 MENGKAIT	5610003061	76.132.129,99	64.400,00	76.196.529,99
SMPN 3 TELAGA	5610003093	121.381,05	11.850.000,00	11.971.381,05
SMPN 4 GENTING	5610003726	62.130.543,06	0,00	62.130.543,06
SMPN 5 SATAP HARUNG HIJAU	7079471498	70.505.963,28	0,00	70.505.963,28
SMPN 6 SATAP LINGAI	7097041835	36.107.361,06	3.200.000,00	39.307.361,06
SMPN 1 AIR NANGAK	5610003102	82.711,77	2.800.000,00	2.882.711,77
SMPN 2 AIR ASUK	7042977548	78.525,73	0,00	78.525,73
SMPN 1 SIANTAN TIMUR	5610003116	156.502.385,13	0,00	156.502.385,13
SMPN 2 BATU BELAH	5610003120	86.468,01	0,00	86.468,01
SMPN 3 MUNJAN	7075495457	56.167.217,27	0,00	56.167.217,27
SMPN 1 PALMATAK	5610003013	321.646.411,78	28.300,00	321.674.711,78
SMPN 2 PALMATAK	5610003027	98.631.899,01	0,00	98.631.899,01
SMPN 3 PIABUNG	5610003044	114.464.577,98	5.006.000,00	119.470.577,98
SMPN 4 PUTIK	5610003031	148.406.088,49	0,00	148.406.088,49
SMPN 5 BAYAT	7116131409	68.150.993,41	0,00	68.150.993,41

Nama Sekolah	Nomor Rekening	Saldo Kas pada Bank	Saldo Kas pada Tunai	Saldo Akhir
SMPN 1 SIANTAN	5610002951	79.206,98	0,00	79.206,98
SMPN 2 SIANTAN	5610002965	238.034.916,36	1.370.922,00	239.405.838,36
SMPN 3 SEDAK	5610002979	62.017,72	0,00	62.017,72
SMPN 4 DUSUN	5610002982	191.075,88	665.600,00	856.675,88
SMPN 5 BUKIT TAMBUN	7042989864	118.637,50	105.279,00	223.916,50
JUMLAH		1.959.231.414,00	26.690.701,00	1.985.922.115,00

Rincian Potongan Pajak yang belum disetorkan oleh Bendahara BOS ke Kas Negara per 31 Desember 2019 sebesar Rp19.415.831,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 194  
Kas Di Bendahara BOS Pemotongan Pajak Yang Belum Disetor Ke Kas Negara  
Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

Nama Sekolah	Saldo BKU	Saldo Kas pada Bank	Saldo Kas pada Tunai	Selisih	Keterangan
SDN 011 AIR BIRU	943.140,11	181.140,11	52.000,00	710.000,00	Pajak setor 2020
SDN 004 GENTING	53.484.261,94	53.284.261,94	0,00	200.000,00	Pajak setor 2020
SDN 005 LIDI	51.423.539,46	48.274.185,46	2.695.354,00	454.000,00	Pajak setor 2020
SDN 005 TEMBURUN	56.237.744,91	55.708.244,91	450.000,00	79.500,00	Pajak belum setor
SDN 001 LADAN	153.012.367,44	148.338.067,44	1.827.500,00	2.846.800,00	Pajak setor 2020
SDN 006 PIABUNG	103.268.812,67	96.228.312,67	6.723.800,00	2.656.700,00	Pajak setor 2020
SDN 009 PALAH	341.657,14	71.657,14	0,00	270.000,00	Pajak setor 2020
SDN 011 CANDI	63.768.071,32	62.984.271,32	178.000,00	605.800,00	Pajak belum setor
SDN 012 TEBANG	12.068.915,56	99.315,56	10.809.600,00	1.160.000,00	Pajak setor 2020
SDN 014 BATU AMPAR	2.343.687,06	163.987,06	6.500,00	2.173.200,00	Pajak setor 2020
SDN 005 ANTANG	514.788,55	127.388,55	0,00	387.400,00	Pajak setor 2020
SDN 009 REKAM	167.378,83	128.628,83	0,00	38.750,00	Pajak setor 2020
SMPN 1 SIANTAN TIMUR	157.934.366,13	156.502.385,13	0,00	1.431.981,00	Pajak setor 2020
SMPN 1 PALMATAK	328.033.711,78	321.646.411,78	28.300,00	6.359.000,00	Pajak belum setor
SMPN 4 DUSUN	899.375,88	191.075,88	665.600,00	42.700,00	Pajak setor 2020
Jumlah	984.441.818,78	943.929.333,78	21.096.654,00	19.415.831,00	

7.11.1.3.1.1.5. Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan sisa dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disetor ke Kas Daerah Tahun 2020, saldo akhir Kas Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp47.330.075,69, dibandingkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00

7.11.1.3.1.1.8. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak yang diatur didalam perundang-undangan dibidang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan berakhirnya periode akhir pelaporan akuntansi atas hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar. Jumlah Piutang Pajak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp35.350.330.591,00 setelah dilakukan Penyisihan Piutang sebesar Rp879.008.250,73 sehingga Piutang Pendapatan Netto sebesar Rp34.471.322.340,27 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 195  
Mutasi Piutang Pendapatan dan Penyisihan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)



No	Uraian	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
1	Piutang PBB P2	869.932.158,00	516.090.368,00	476.127.713,00	909.894.813,00
2	Penyisihan Pajak PBBP2	(682.459.112,29)	9.775.721,11	(320.223.822,24)	(352.459.568,94)
3	Piutang Pajak Netto (1-2)	187.473.045,71	525.866.089,11	155.903.891,76	557.435.244,06
4	Piutang Retribusi	8.735.340,00	0,00	8.735.340,00	0,00
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	22.427.670.523,00	0,00	22.427.670.523,00
6	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	11.324.063.546,00	0,00	11.324.063.546,00
7	Piutang Pendapatan TP-TGR	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Penyisihan Piutang Pendapatan TP-TGR	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Piutang Pendapatan TP-TGR Netto Netto (6-7)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	357.540.703,00	0,00	357.540.703,00
11	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	(357.540.703,00)	0,00	(357.540.703,00)
12	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto (9-10)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Piutang Lainnya	0,00	340.461.006,00	9.300.000,00	331.161.006,00
14	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	(169.007.978.79)	0,00	(169.007.978.79)
15	Piutang Lainnya Netto (12-13)	0,00	171.453.027,21	9.300.000,00	162.153.027,21
16	Jumlah Piutang Sebelum Penyisihan (1+4+5+6+7+10+13)	878.667.498,00	34.965.826.146,00	494.163.053,00	35.350.330.591,00
17	Jumlah Piutang Setelah Penyisihan (3+4+5+6+9+12+15)	196.208.385,71	34.449.053.185,32	173.939.230,76	34.471.322.340,27

7.11.1.3.1.1.8.1. Piutang Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan

Jumlah Piutang Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar 909.894.813,00 dengan penyisihan piutang sebesar Rp352.459.568,95 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 196  
Rincian Perhitungan Piutang Tak Tertagih Atas Piutang Pajak PBB P2 Tahun 2019  
(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	UMUR PIUTANG				JUMLAH (Rp)
		LANCAR (Rp)	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
1	Piutang PBB P2	217.238.247,00	268.081.917,00	200.018.926,00	224.555.723,00	909.894.813,00
2	Penyisihan	1.086.191,24	26.808.191,70	100.009.463,00	224.555.723,00	352.459.568,95
Nilai Yang Dapat Direalisasikan		216.152.055,76	241.273.725,30	100.009.463,00	0,00	557.435.244,06

7.11.1.3.1.1.8.6. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00 dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp8.735.340,00 yang merupakan Piutang Retribusi atas Sewa Kios dan Los dan telah disetorkan ke Kas Daerah, sebagai berikut.

Tabel 197  
Mutasi Piutang Lainnya Tahun 2018  
(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Piutang Retribusi	8.735.340,00	0,00	8.735.340,00	0,00
Jumlah	8.735.340,00	0,00	8.735.340,00	0,00

7.11.1.3.1.1.8.6. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019 merupakan Pengakuan piutang atas Pendapatan Transfer tahun 2019 sesuai dengan PMK Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar DBH TA 2019 sebesar Rp22.427.670.523,00, dibandingkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00. Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut.

Tabel 198  
Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Piutang Transfer Pemerintah Pusat (DBH PPh 21)	0,00	2.220.701.374,00	0,00	2.220.701.374,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat (DBH PPh 25/29)	0,00	283.737.719,00	0,00	283.737.719,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat (DBH PBB Bagi Rata)	0,00	196.640.935,00	0,00	196.640.935,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat (DBH PBB Perkebunan)	0,00	25.349.069,00	0,00	25.349.069,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat (DBH PBB Minyak dan Gas Bumi)	0,00	3.205.998.805,00	0,00	3.205.998.805,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat (DBH PBB Sektor Lainnya)	0,00	24.340.993,00	0,00	24.340.993,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat (DBH PBB Kehutanan)	0,00	8.421.986,00	0,00	8.421.986,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat (DBH Minyak dan Gas Bumi)	0,00	16.291.851.739,00	0,00	16.291.851.739,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat (SDA Perikanan)	0,00	170.627.903,00	0,00	170.627.903,00
Jumlah	0,00	22.427.670.523,00	0,00	22.427.670.523,00

7.11.1.3.1.1.8.6. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2019 merupakan Pengakuan piutang atas Pendapatan Transfer tahun 2019 sesuai dengan SK Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perhitungan Tunda Salur Bagi Hasil PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok sebesar Rp11.324.063.546,00, dibandingkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00. Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggran 2019 sebagai berikut.

Tabel 199  
Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Piutang Transfer Pemerintah Provinsi DBH (PKB)	0,00	2.121.478.812,00	0,00	2.121.478.812,00
Piutang Transfer Pemerintah Provinsi DBH (BBNKB)	0,00	3.029.921.911,00	0,00	3.029.921.911,00
Piutang Transfer Pemerintah Provinsi DBH (Pajak Air Permukaan)	0,00	8.478.920,00	0,00	8.478.920,00
Piutang Transfer Pemerintah Provinsi DBH (PBBKB)	0,00	5.399.993.035,00	0,00	5.399.993.035,00
Piutang Transfer Pemerintah Provinsi DBH (Pajak Rokok)	0,00	764.190.868,00	0,00	764.190.868,00
Jumlah	0,00	11.324.063.546,00	0,00	11.324.063.546,00

7.11.1.3.1.1.8.6. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan Piutang Pendapatan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp357.540.703,00 dan Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp357.540.703,00 karena merupakan Piutang Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang telah melebihi batas tanggal jatuh tempo yang diatur paling lambat 24 bulan dari tanggal penandatanganan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Piutang Tuntutan Gati Rugi Tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp108.577.597,51;
- 2. Piutang TGR PT. Natuna Insani berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Tanggal 15 Oktober 2014 sebesar Rp106.365.742,64;
- 3. Piutang TGR PT. Andesta/R. Taufan Perkasa berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Tanggal 11 November 2014 sebesar Rp117.597.362,85;
- 4. Piutang TGR Partai Bulan Bintang berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp25.000.000,00.

7.11.1.3.1.1.8.6. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 331.161.006,00, dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp0,00. Piutang Lainnya Tahun 2019 terdiri dari :

- 1. Piutang Denda PBBP2 dari tahun 1995 s.d. 2019 sebesar Rp331.161.006,00;
- 2. Penyisihan Piutang Denda PBBP2 tahun 1995 s.d. 2019 sebesar Rp169.007.978,79.

7.11.1.3.1.1.9. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk tidak dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jumlah Persediaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp27.892.368.873,73 terdiri dari:

Tabel 200  
Persediaan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)		
Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Alat Tulis Kantor	474.076.968,00	270.669.208,00
Blanko E-KTP dan Karcis	84.519.259,00	108.336.404,00
Obat-obatan dan Alat Kesehatan	19.351.000.754,73	15.613.183.050,00
Bahan Bakar Minyak (BBM)/Gas	28.820.843,00	15.718.500,00
Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar dan Batrai Kering)	0,00	758.000,00
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	24.889.550,00	365.000,00
Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.760.000,00	316.000,00
Persediaan Bahan/Material (Bibit Ternak Ikan dan Pakan)	314.475,00	28.430.844,00
Alat Perlengkapan	1.588.846.104,00	0,00
Bahan Pembelajaran	1.720.563.033,00	0,00
Bahan Baku Bangunan	610.106.297,00	0,00
Bahan Sembako	1.361.255.200,00	0,00
Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.645.216.390,00	1.616.994.000,00
JUMLAH PERSEDIAAN	27.892.368.873,73	17.654.771.006,00

Rincian persediaan per Organisasi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 201  
Persediaan Per Organisasi/SKPD  
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019  
(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	449.038.000,00	9.339.455.061,00	5.124.494.237,00	4.663.998.824,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.622.303.180,00	13.478.253.795,73	8.803.209.108,00	20.297.347.867,73
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.186.250.000,00	18.758.989.787,00	19.070.148.787,00	875.091.000,00
Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	698.500,00	195.931.500,00	196.029.840,00	600.160,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	15.838.700,00	1.001.084.950,00	994.416.395,00	22.507.255,00
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	214.243.552,00	423.598.985,00	346.533.997,00	291.308.540,00
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	320.100,00	1.534.402.725,00	1.534.139.825,00	583.000,00
Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja	258.500,00	89.624.700,00	76.353.967,00	13.529.233,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah	1.375.000,00	144.955.350,00	145.316.350,00	1.014.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	825.000,00	264.941.900,00	265.177.300,00	589.600,00
Sekretariat Daerah	14.551.280,00	6.298.658.834,00	6.250.537.064,00	62.673.050,00
Sekretariat DPRD	8.863.000,00	578.757.965,00	585.509.215,00	2.111.750,00
Badan Keuangan Daerah	84.811.742,00	463.158.150,00	475.722.396,00	72.247.496,00
Inspektorat	396.400,00	110.156.000,00	109.231.700,00	1.320.700,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.719.000,00	124.826.735,40	124.404.235,40	4.141.500,00
Kecamatan Siantan	1.086.000,00	469.446.650,00	317.477.000,00	153.055.650,00
Kecamatan Jemaja	2.727.000,00	282.379.500,00	284.110.500,00	996.000,00
Kecamatan Palmatak	82.500,00	413.716.900,00	363.065.970,00	50.733.430,00
Kecamatan Siantan Timur	1.471.000,00	75.945.900,00	75.999.900,00	1.417.000,00
Kecamatan Siantan Selatan	3.040.894,00	104.945.000,00	105.981.894,00	2.004.000,00
Kecamatan Jemaja Timur	604.000,00	65.436.000,00	65.648.000,00	392.000,00
Kecamatan Siantan Tengah	209.000,00	151.548.000,00	151.635.000,00	122.000,00
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	1.395.150,00	203.492.920,00	203.680.270,00	1.207.800,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	767.664,00	2.102.508.510,00	2.102.735.031,00	541.143,00
Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	28.562.844,00	9.368.241.588,00	8.034.869.757,00	1.361.934.675,00
Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian	11.333.000,00	365.611.272,00	366.840.472,00	10.103.800,00
Kecamatan Siantan Utara	0,00	26.434.000,00	26.243.000,00	191.000,00
Kecamatan Jemaja Barat	0,00	46.014.500,00	45.408.100,00	606.400,00
Jumlah	17.654.771.006,00	66.482.517.178,13	56.244.919.310,40	27.892.368.873,73

Berikut rincian saldo persediaan per 31 Desember 2019 untuk per OPD dan per jenis barang.

Tabel 202  
Persediaan Per Jenis Per Organisasi/SKPD  
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019  
(Dalam Rupiah)

Organisasi/SKPD	31 Desember 2019	Keterangan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	4.663.998.824,00	ATK, Materai, BBM dan Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20.297.347.867,73	ATK, Alat Kebersihan, Obat-obatan
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	875.091.000,00	ATK dan Barang Yang diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	600.160,00	ATK
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	22.507.255,00	ATK, Bahan Pembersih dan Karcis
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	291.308.540,00	ATK, Formulir dan Blanko E-KTP
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	583.000,00	ATK
Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja	13.529.233,00	ATK
Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah	1.014.000,00	ATK
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	589.600,00	ATK
Sekretariat Daerah	62.673.050,00	ATK
Sekretariat DPRD	2.111.750,00	ATK dan Alat Kebersihan
Badan Keuangan Daerah	72.247.496,00	ATK
Inspektorat	1.320.700,00	ATK
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.141.500,00	ATK
Kecamatan Siantan	153.055.650,00	ATK
Kecamatan Jemaja	996.000,00	ATK
Kecamatan Palmatak	50.733.430,00	ATK dan BBM
Kecamatan Siantan Timur	1.417.000,00	ATK
Kecamatan Siantan Selatan	2.004.000,00	ATK, Bahan Pembersih dan BBM
Kecamatan Jemaja Timur	392.000,00	ATK
Kecamatan Siantan Tengah	122.000,00	ATK
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	1.207.800,00	ATK
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	541.143,00	ATK, Materai dan BBM
Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	1.361.934.675,00	ATK, Bibit Ikan, Beras Bulog dan Beras Raskin
Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian	10.103.800,00	ATK
Kecamatan Siantan Utara	191.000,00	ATK
Kecamatan Jemaja Barat	606.400,00	ATK dan BBM
JUMLAH PERSEDIAAN	27.892.368.873,73	

7.11.1.3.1.2.      **Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi non permanen dan investasi permanen. Jumlah investasi jangka panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.506.546.216,50 yang terdiri dari Investasi non permanen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berupa pemberian pinjaman kepada kelompok masyarakat dalam bentuk dana bergulir yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.006.546.216,50 dan investasi jangka panjang permanen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berupa penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera sebesar Rp7.500.000.000,00, dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 203  
Investasi Jangka Panjang Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
<b>Investasi Non Permanen</b>		
Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)	13.217.429.880,00	14.032.748.586,00
Dana Bergulir Tak Tertagih	(12.210.883.663,50)	(12.929.432.558,50)
<b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>	<b>1.006.546.216,50</b>	<b>1.103.316.027,50</b>
<b>Investasi Permanen</b>		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
Koreksi Nilai Laba Tahun 2018	0,00	0,00
Pengurangan Nilai Investasi Tahun 2019	0,00	0,00
Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah s/d Tahun 2019	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
Pengurangan Nilai Investasi Tahun 2018	0,00	0,00
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>7.500.000.000,00</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>8.506.546.216,50</b>	<b>8.603.316.027,50</b>

7.11.1.3.1.2.1.    **Investasi Non Permanen**

Investasi Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas diberikan adalah Investasi Non Permanen Lainnya yaitu dalam bentuk dana bergulir kepada masyarakat yang disalurkan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan.

Dasar penilaian Investasi Non Permanen Lainnya (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan (*Net Realizable Value*) yaitu dengan mengurangi nilai dana bergulir tercatat dengan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih. Jatuh tempo dana bergulir berkisar antara 1 sampai dengan 5 Tahun. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.

Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.006.546.216,50 dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 204  
Dana Bergulir Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
1. Dana Bergulir Per 31 Desember 2018	14.032.748.586,00
2. Pengguliran Dana Bergulir Tahun 2019	500.000.000,00
3. Pengembalian Pokok Dana Bergulir s/d Tahun 2019	(768.074.996,00)
4. Kelebihan Pengembalian Dana Bergulir Tahun 2019	2.622.205,00
5. Koreksi Kurang karena Kesalahan Pencatatan Pengembalian Untuk Dana Bergulir Tahun 2019	(549.865.915,00)
6. Dana Bergulir Per 31 Desember 2019 Sebelum Penyisihan (1+2+3+4+5)	13.217.429.880,00
7. Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih Tahun 2018	12.210.883.663,50
8. NRV Dana Bergulir Per 31 Desember 2017 Netto (5 – 6)	1.006.546.216,50

Dari saldo diatas, diketahui NRV per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.006.546.216,50 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 205**  
**NRV Dana Bergulir Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

Kategori	Umur Dana	Kualitas	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (%)	Saldo Pokok Dana Bergulir per 31 Desember 2019	Penyisihan Saldo Pokok Dana Bergulir Tidak Tertagih per 31 Desember 2019	NRV Dana Bergulir per 31 Desember 2019
Tertagih	0 Tahun s/d < 1 Tahun	Lancar	0%	840.547.459,00	0,00	840.547.459,00
Memungkinkan Dapat Ditagih	1 Tahun s/d < 3 Tahun	Kurang Lancar	50%	327.557.015,00	163.778.507,50	163.778.507,50
Diragukan Dapat Ditagih	3 Tahun s/d < 4 Tahun	Ragu-ragu	75%	8.881.000,00	6.660.750,00	2.220.250,00
Tidak dapat Ditagih	4 Tahun ≤	Macet	100%	12.040.444.406,00	12.040.444.406,00	0,00
<b>Jumlah</b>				<b>13.217.429.880,00</b>	<b>12.210.883.663,50</b>	<b>1.006.546.216,50</b>

Dana bergulir tersebut dikelola dengan menggunakan rekening pada Bank Riau Kepri, per 31 Desember 2019 masih terdapat saldo dana bergulir pokok dan bunga pada Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan yang belum disetor ke kas daerah, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 206**  
**Rincian Penerimaan Dana Bergulir yang Belum Disetor ke Kas Daerah Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2019
1	170-02-00030	Pengem. Dana Pokok Bergulir KKA	0,00
2	170-02-00029	Pengem. Dana Bunga Bergulir KKA	0,00
3	170-02-00061	Dana Bergulir T.A. 2019	0,00
4	170-02-00063	Dana Pokok Bergulir Kelautan dan Perikanan	72.000.000,00
5	170-02-00064	Dana Bunga Bergulir Kelautan dan Perikanan	5.400.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>77.400.000,00</b>

#### 7.11.1.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen adalah Investasi Jangka Panjang Permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.500.000.000,00 terdiri dari penyertaan modal pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 207**  
**Penyertaan Modal Tahun 2018**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Des 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2019
PT. Bank Riau Kepri	7.500.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00
Perusda Anambas Sejahtera	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH (1+2)</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000.000,00</b>

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.500.000.000,00 pada PT. Bank Riau Kepri sedangkan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Perusahaan Anambas Sejahtera Per 31 Desember 2018 disajikan sebesar sebesar Rp4.628.079.701,00 adalah nilai kerugian sampai dengan Tahun 2018 yang disajikan pada Neraca di Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera.

#### PT Bank Riau Kepri

Penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri sebesar Rp7.500.000.000,00 dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 0,71%. Metode penilaian investasi PT Bank Riau Kepri adalah metode biaya, tidak ada penambahan/pengurangan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas ke PT. Bank Riau Kepri selama Tahun 2018. Dari Total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas di PT. Bank Riau Kepri telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Riau Kepri, dimana jumlah penyertaan Modal telah dibatasi sebesar

Rp7.500.000.000,00, maka apabila terdapat penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Riau Kepri sesuai dengan ketentuan maka perlu Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Riau Kepri yang dituangkan dalam Akte Notaris Feri Mondro, SH. M.Kn, Nomor 03, tanggal 03 Maret 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Riau Kepri berasal dari konversi atas Deviden Saham menjadi tambahan setoran modal Pemerintah Daerah berupa deviden saham sebesar Rp323.713.768,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) yang dapat dikonversi dalam bentuk lembar saham sebesar Rp323.700.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp13.768,00 (tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dicatat pada rekening Pos-pos Kredit Dalam Penyelesaian Lain-Lainnya dan akan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam bentuk saham apabila telah mencukupi nilai untuk perolehan 1 (satu) lembar saham.

#### Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera

Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera berdiri tanggal 7 Februari 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2012. Perusahaan ini beroperasi pada tanggal 27 Juli 2013 sejak dilantiknya Direksi Perusahaan Daerah. Perusahaan bergerak di bidang Pengelolaan Pasar dan Pertokoan, Air Minum (Air Baku), Listrik, Apotik, Pengangkutan Laut dan Darat, Penyaluran Bahan Bakar Cair, Kontraktor dan Leveransir, Perhotelan, Pariwisata, Pertanian dan Lain-Lain. Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera per 31 Desember 2019 (*unaudited*), nilai kerugian selama Tahun 2019 sebesar Rp17.414.104.158,00 dan saldo Ekuitas dan kewajiban adalah sebesar Rp223.316.787,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 208**  
**Neraca Perusda Anambas Sejahtera per 31 Desember 2019**

(Dalam Rupiah)			
	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.	Aset Lancar	144.467.308,00	1.064.338.808,00
2.	Aset Tidak Lancar	78.849.479,00	(31.009.007,00)
3.	<b>Jumlah Aset (1+2)</b>	<b>223.316.787,00</b>	<b>1.033.329.801,00</b>
4.	Kewajiban Lancar	7.074.920.945,00	6.350.338.945,00
5.	Kewajiban Tidak Lancar (4+5)	4.562.500.000,00	4.562.500.000,00
6.	<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>11.637.420.945,00</b>	<b>10.912.838.945,00</b>
7.	Modal Setor	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
8.	Saldo Laba/(Rugi) Akumulasi (3-6-7)	(17.414.104.158,00)	(15.879.509.144,00)
9.	<b>Jumlah Ekuitas (1 - 6)</b>	<b>(11.414.104.158,00)</b>	<b>(9.879.509.144,00)</b>
10.	<b>Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas (6+9)</b>	<b>223.316.787,00</b>	<b>1.033.329.801,00</b>

#### 7.11.1.3.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap terdiri dari: (1) Tanah, (2) Peralatan dan Mesin, (3) Gedung dan Bangunan, (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan, (5) Aset Tetap Lainnya, dan (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp1.721.529.378.487,21 dibandingkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.527.265.033.210,12, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 209**  
**Mutasi Aset Tetap Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)				
Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	173.797.417.658,00	174.880.863.170,00	(1.083.445.512,00)	(0,62)
Peralatan Dan Mesin	329.890.563.501,04	284.110.185.756,28	45.780.377.744,76	16,11
Gedung Dan Bangunan	597.240.572.286,46	568.432.112.431,54	28.808.459.854,92	5,07



Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.018.830.032.441,14	879.396.259.091,06	139.433.773.350,08	15,86
Aset Tetap Lainnya	12.614.703.735,00	11.291.064.685,00	1.323.639.050,00	11,72
Konstruksi Dalam Pengerjaan	237.194.691.051,99	164.615.719.048,99	72.578.972.003,00	44,09
Akumulasi Penyusutan	(648.038.602.186,42)	(555.461.170.972,75)	(92.577.431.213,67)	16,67
Jumlah Aset Tetap	1.721.529.378.487,21	1.527.265.033.210,12	194.252.249.277,09	12,72

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Aset Tetap per 31 Desember 2019 setelah dihitung penyusutan sebesar Rp1.721.529.378.487,21, Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dirinci sebagai berikut :

7.11.1.3.1.3.1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk didalamnya tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Pada Tahun 2019 terdapat mutasi aset tetap tanah dan jumlah aset tetap tanah yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp173.797.417.658,00 dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp174.880.863.170,00.

Tabel 210  
Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2019

(Dalam Rupiah)				
Uraian	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Tanah Perkebunan	6.912.063.750,00	0,00	0,00	6.912.063.750,00
Tanah Kebun Campur	850.000.000,00	0,00	0,00	850.000.000,00
Tanah Hutan	20.488.198.000,00	0,00	0,00	20.488.198.000,00
Tanah Danau/Rawa	94.582.500,00	0,00	0,00	94.582.500,00
Tanah Untuk Bangunan Gedung	131.938.229.144,00	3.061.181.000,00	8.023.986.600,00	126.975.423.544,00
Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	13.185.958.006,00	1.126.182.585,00	5.048.469.497,00	9.263.671.094,00
Tanah Untuk Bangunan Jalan	1.411.831.770,00	7.801.647.000,00	0,00	9.213.478.770,00
JUMLAH	174.880.863.170,00	11.989.010.585,00	13.072.456.097,00	173.797.417.658,00

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah per SKPD Tahun 2019, dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 211  
Mutasi Aset Tetap Tanah per SKPD Tahun 2019

(Dalam Rupiah)				
SKPD	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	45.882.061.000,00	610.106.297,00	7.582.626.797,00	38.909.540.500,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.085.069.000,00	0,00	0,00	1.085.069.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	6.353.249.970,00	10.697.548.000,00	684.914.000,00	16.365.883.970,00
Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	610.784.135,00	516.076.288,00	366.552.100,00	760.308.323,00
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	110.226.000,00	0,00	0,00	110.226.000,00

SKPD	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja	344.250.000,00	0,00	0,00	344.250.000,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	114.853.840.985,00	0,00	4.438.363.200,00	110.415.477.785,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siantan	1.206.605.000,00	0,00	0,00	1.206.605.000,00
Kecamatan Jemaja	630.890.000,00	0,00	0,00	630.890.000,00
Kecamatan Palmatak	237.750.750,00	0,00	0,00	237.750.750,00
Kecamatan Siantan Timur	347.380.500,00	0,00	0,00	347.380.500,00
Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jemaja Timur	1.288.065.000,00	0,00	0,00	1.288.065.000,00
Kecamatan Siantan Tengah	86.982.000,00	0,00	0,00	86.982.000,00
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	67.920.000,00	0,00	0,00	67.920.000,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	551.003.000,00	165.280.000,00	0,00	716.283.000,00
Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	495.370.750,00	0,00	0,00	495.370.750,00
Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian	729.415.080,00	0,00	0,00	729.415.080,00
<b>Jumlah</b>	<b>174.880.863.170,00</b>	<b>11.989.010.585,00</b>	<b>13.072.456.097,00</b>	<b>173.797.417.658,00</b>

Berdasarkan Tabel diatas terdapat Mutasi Tambah Aset Tetap - Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp11.989.010.585,00 dan Mutasi Kurang Aset Tetap - Tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp13.072.456.097,00, dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 212

## Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap – Tanah Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2019
Saldo Per 31 Desember 2018	174.880.863.170,00
Koreksi Saldo Awal 1 Januari 2019	0,00
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun 2019	4.022.083.585,00
Penambahan Aset Tanah Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	165.280.000,00
Penambahan Aset Tanah Badan Jalan dari Hasil Penaksiran	7.801.647.000,00
Total Mutasi Tambah	11.989.010.585,00
Mutasi Kurang:	
Pengurangan Aset Tetap Tanah ke Beban Persediaan	610.106.297,00
Pengurangan Aset Tetap Tanah Reklasifikasi ke KDP	684.914.000,00
Pengurangan Aset Tetap Tanah Hibah Ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	6.972.520.500,00
Pengurangan Aset Tetap Tanah Hibah Ke Instansi Vertikal (Kementerian Perhubungan)	4.804.915.300,00
Total Mutasi Kurang	13.072.456.097,00
Saldo Per 31 Desember 2019	173.797.417.658,00

## 7.11.1.3.1.3.2 Peralatan dan mesin

Peralatan dan Mesin mencakup antara lain alat bantu, alat berat, alat angkutan darat bermotor, alat angkutan tidak bermotor, alat apung bermotor, , alat bengkel dan alat ukur,

alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat komunikasi, dan pemancar, alat pengolahan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat praga sekolah, alat persenjataan, alat laboratorium kimia nuklir/elektronika, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan, dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Jumlah aset tetap peralatan dan mesin yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp329.890.563.501,04 dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp284.110.185.756,28, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 213  
Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Alat-Alat Bantu	391.700.940,45	1.393.553.785,00	199.500.000,00	1.585.754.725,45
Alat-Alat Besar	1.823.098.250,00	0,00	0,00	1.823.098.250,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	45.020.916.050,00	3.860.673.100,00	1.053.360.000,00	47.828.229.150,00
Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	341.503.000,00	29.700.000,00	0,00	371.203.000,00
Alat Angkut Apung Bermotor	24.571.945.235,00	680.185.000,00	5.152.639.000,00	20.099.491.235,00
Alat Angkut Apung Tidak Bermotor	97.196.000,00	262.000.000,00	0,00	359.196.000,00
Alat-alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor	797.539.600,00	0,00	0,00	797.539.600,00
Alat-Alat Bengkel	967.120.854,00	0,00	0,00	967.120.854,00
Alat-alat Ukur	3.848.218.091,00	795.887.438,00	39.710.000,00	4.604.395.529,00
Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	462.739.500,00	0,00	0,00	462.739.500,00
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	2.313.964.269,00	342.183.500,00	0,00	2.656.147.769,00
Peralatan Kantor	15.382.541.245,00	6.194.112.026,76	5.826.990.247,00	15.749.663.024,76
Perlengkapan Kantor	2.489.872.085,00	1.005.122.700,00	0,00	3.494.994.785,00
Komputer	43.010.201.054,83	8.010.534.977,00	193.985.000,00	50.826.751.031,83
Peralatan Rumah Tangga	35.382.633.073,00	7.811.625.470,00	99.313.500,00	43.094.945.043,00
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.134.428.191,00	712.720.700,00	98.505.000,00	6.748.643.891,00
Alat-alat Studio	6.896.486.954,00	1.237.171.239,00	147.877.400,00	7.985.780.793,00
Alat-alat Komunikasi	9.410.435.645,00	34.796.200,00	0,00	9.445.231.845,00
Alat Pengolahan	15.373.637.535,00	0,00	0,00	15.373.637.535,00
Alat-alat Kedokteran	24.404.154.935,00	56.338.000,00	0,00	24.460.492.935,00
Alat-alat Kesehatan	878.413.129,00	22.283.054.268,00	0,00	23.161.467.397,00
Alat-alat Laboratorium	11.868.203.277,00	2.539.774.548,00	0,00	14.407.977.825,00
Alat Praga/Praktek Sekolah	28.077.987.982,00	879.322.640,00	19.822.000,00	28.937.488.622,00
Alat Persenjataan/Keamanan/ Olahraga	1.215.058.561,00	0,00	0,00	1.215.058.561,00
Unit Alat Lab Kimia Nuklir/Elektronika	350.183.500,00	539.543.300,00	0,00	889.726.800,00
Alat-alat Proteksi Radiasi/Radiasi Lingkungan	2.022.154.400,00	0,00	0,00	2.022.154.400,00
Alat-alat Laboratorium Lingkungan Hidup	256.087.400,00	0,00	0,00	256.087.400,00
Alat Laboratorium Hidrodinamika	172.220.000,00	0,00	49.764.000,00	122.456.000,00
Alat Kemanan dan Perlindungan	149.545.000,00	54.967.900,00	61.422.900,00	143.090.000,00
JUMLAH	284.110.185.756,28	58.723.266.791,76	12.942.889.047,00	329.890.563.501,04

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan Mesin per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2019, dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 214

## Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	49.698.696.324,83	8.831.993.856,76	2.248.773.327,00	56.281.916.854,59
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	61.386.166.811,00	30.898.214.302,00	2.342.047.483,00	89.942.333.630,00
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	6.877.846.072,00	2.414.850.200,00	0,00	9.292.696.272,00
Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	3.854.653.676,00	376.007.400,00	45.527.700,00	4.185.133.376,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	25.919.753.049,45	1.010.090.240,00	6.157.170.400,00	20.772.672.889,45
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	2.842.445.420,00	464.130.000,00	2.999.700,00	3.303.575.720,00
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	6.849.935.899,00	277.593.000,00	13.156.000,00	7.114.372.899,00
Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3.053.248.850,00	191.506.100,00	1.575.300,00	3.243.179.650,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah	926.699.918,00	124.872.000,00	0,00	1.051.571.918,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10.101.712.476,00	1.257.734.000,00	1.496.000,00	11.357.950.476,00
Sekretariat Daerah	57.616.479.116,00	5.430.954.012,00	211.010.000,00	62.836.423.128,00
Sekretariat DPRD	9.465.970.175,00	973.133.300,00	265.705.000,00	10.173.398.475,00
Badan Keuangan Daerah	5.044.553.906,00	670.133.300,00	4.455.000,00	5.710.232.206,00
Inspektorat	1.453.625.575,00	102.268.600,00	19.987.000,00	1.535.907.175,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.782.353.154,00	248.389.185,00	1.121.366.037,00	1.909.376.302,00
Kecamatan Siantan	2.056.671.151,00	553.045.900,00	202.485.800,00	2.407.231.251,00
Kecamatan Jemaja	1.602.733.585,00	170.539.250,00	13.000.000,00	1.760.272.835,00
Kecamatan Palmatak	1.281.831.556,00	93.717.000,00	17.545.000,00	1.358.003.556,00
Kecamatan Siantan Timur	1.034.267.876,00	94.795.575,00	0,00	1.129.063.451,00
Kecamatan Siantan Selatan	1.008.204.631,00	8.700.000,00	13.860.000,00	1.003.044.631,00
Kecamatan Jemaja Timur	1.095.054.000,00	0,00	0,00	1.095.054.000,00
Kecamatan Siantan Tengah	1.352.179.791,00	411.950.000,00	0,00	1.764.129.791,00
Kecamatan Siantan Utara	0,00	61.543.100,00	1.600.000,00	59.943.100,00
Kecamatan Jemaja Barat	0,00	67.897.500,00	0,00	67.897.500,00
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	7.425.754.635,00	1.599.501.643,00	195.715.000,00	8.829.541.278,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.232.260.382,00	259.876.770,00	0,00	5.492.137.152,00
Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	10.411.737.237,00	347.357.800,00	34.414.300,00	10.724.680.737,00
Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian	3.735.350.490,00	1.782.472.758,00	29.000.000,00	5.488.823.248,00
<b>Jumlah</b>	<b>284.110.185.756,28</b>	<b>58.723.266.791,76</b>	<b>12.942.889.047,00</b>	<b>329.890.563.501,04</b>

Berdasarkan Tabel diatas terdapat Mutasi Tambah Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp58.723.266.791,76 dan Mutasi Kurang Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp12.942.889.047,00, dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 215**  
**Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Tahun 2019**  
**(Dalam Rupiah)**

Uraian	Saldo 31 Desember 2019
Saldo Per 31 Desember 2018	284.110.185.756,28
Mutasi Tambah:	
Penambahan Aset dari Belanja Modal Tahun 2019	55.946.906.682,00
Penambahan Aset dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	2.693.911.886,76
Penambahan Aset Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	27.682.023,00
Penambahan Aset Tetap Peralata dan Mesin dari Hibah Instansi Vertikal	54.766.200,00
Total Mutasi Tambah	58.723.266.791,76
Mutasi Kurang:	
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Yang Di Hibahkan kepada Masyarakat	151.595.400,00
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Yang Di Hibahkan kepada Instansi Vertikal (Kementerian Perhubungan RI)	1.004.531.400,00
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	193.985.000,00
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	19.822.000,00
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	29.810.000,00
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Kondisi Rusak Berat)	7.141.648.814,00
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Reklasifikasi ke Beban Persediaan	3.203.349.637,00
Pengurangan Aset di Bawah Nilai Rp.1.000.000,00 (Ekstrakomptabel)	1.198.146.796,00
Total Mutasi Kurang	12.942.889.047,00
Saldo Per 31 Desember 2019	329.890.563.501,04

**7.11.1.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monument, bangunan menara, rambu-rambu, dan tugu titik kontrol/pasti. Jumlah aset tetap gedung dan bangunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp597.240.572.286,46 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 Rp568.432.112.431,54.

**Tabel 216**  
**Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2019**

**(Dalam Rupiah)**

Uraian	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Bangunan Gedung Tempat Kerja	494.197.467.291,55	117.714.262.503,92	130.045.842.635,00	481.865.887.160,47
Bangunan Tempat Pertokoan/Koperasi/Pasar	9.984.578.000,00	5.358.963.756,00	0,00	15.343.541.756,00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	23.193.700,00	28.905.072.497,00	0,00	28.928.266.197,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	36.449.889.686,01	4.198.262.616,00	0,00	40.648.152.302,01
Bangunan Bersejarah/ Monumen dan Tugu	16.980.187.555,00	0,00	165.280.000,00	16.814.907.555,00
Bangunan Rambu-Rambu Transportasi	7.143.122.198,98	2.843.021.117,00	0,00	9.986.143.315,98
Bangunan Rambu Lalu Lintas Udara	856.347.000,00	0,00	0,00	856.347.000,00
Bangunan Bandara Pelabuhan	2.797.327.000,00	0,00	0,00	2.797.327.000,00
JUMLAH	568.432.112.431,54	159.019.582.489,92	130.211.122.635,00	597.240.572.286,46

Mutasi Penambahan dan Pegurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019, dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 217**  
**Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	145.658.565.673,00	39.756.235.626,00	4.857.399.976,00	180.557.401.323,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	56.454.020.860,00	38.363.228.485,00	20.214.914.480,00	74.602.334.865,00
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	60.646.226.428,99	35.422.616.372,00	29.500.824.372,00	66.568.018.424,99
Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	149.855.950.566,55	19.702.214.211,92	71.207.080.307,00	98.351.084.471,47
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	46.200.000,00	0,00	0,00	46.200.000,00
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	3.036.426.500,00	0,00	0,00	3.036.426.500,00
Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja	419.986.000,00	0,00	0,00	419.986.000,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	79.094.896.292,00	1.428.960.000,00	2.086.804.000,00	78.437.052.292,00
Sekretariat DPRD	5.133.756.317,00	0,00	0,00	5.133.756.317,00
Badan Keuangan Daerah	1.157.748.000,00	0,00	0,00	1.157.748.000,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siantan	5.849.679.502,00	0,00	1.329.455.000,00	4.520.224.502,00
Kecamatan Jemaja	1.264.253.700,00	0,00	0,00	1.264.253.700,00
Kecamatan Palmatrak	5.093.323.549,00	0,00	0,00	5.093.323.549,00
Kecamatan Siantan Timur	946.219.374,00	0,00	0,00	946.219.374,00
Kecamatan Siantan Selatan	1.076.391.222,00	0,00	0,00	1.076.391.222,00
Kecamatan Jemaja Timur	2.599.495.845,00	0,00	0,00	2.599.495.845,00
Kecamatan Siantan Tengah	1.449.850.033,00	0,00	0,00	1.449.850.033,00
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	5.744.967.731,00	0,00	0,00	5.744.967.731,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12.831.503.572,00	1.661.786.534,00	690.904.000,00	13.802.386.106,00
Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	8.011.165.692,00	323.740.500,00	323.740.500,00	8.011.165.692,00
Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian	22.061.485.578,00	22.360.800.761,00	0,00	44.422.286.339,00
<b>Jumlah</b>	<b>568.432.112.431,54</b>	<b>159.019.582.489,92</b>	<b>130.211.122.635,00</b>	<b>597.240.572.286,46</b>

Berdasarkan Tabel diatas terdapat Mutasi Tambah Aset Tetap - Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp159.019.582.489,92 dan Mutasi Kurang Aset Tetap - Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp130.211.122.635,00 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 218**  
**Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2019
Saldo Per 31 Desember 2018	568.432.112.431,54
Mutasi Tambah:	

Uraian	Saldo 31 Desember 2019
Penambahan Aset dari Belanja Modal Tahun 2019	156.832.046.585,00
Penambahan Aset Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	36.259.904,92
Penambahan Aset Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	462.781.000,00
Penambahan Aset Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	359.040.000,00
Penambahan dari Mutasi Aset Antar Perangkat Daerah	1.329.455.000,00
Total Mutasi Tambah	159.019.582.489,92
Mutasi Kurang	
Pengurangan Aset Reklasifikasi Ke Aset Tetap Tanah	165.280.000,00
Pengurangan Aset Reklasifikasi Ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	18.777.665.074,00
Pengurangan Aset Reklasifikasi Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	51.094.045.352,00
Pengurangan Aset Reklasifikasi Ke Aset Lainnya (Rusak Berat)	6.206.351.719,00
Pengurangan Aset Hibah Ke Instansi Vertikal (Kementerian Perhubungan RI)	52.241.089.000,00
Pengurangan Aset Atas Penghapusan Barang Milik Daerah	6.714.000,00
Pengurangan Aset Reklasifikasi ke Beban Persediaan	1.719.977.490,00
Total Mutasi Kurang	130.211.122.635,00
Saldo Per 31 Desember 2019	597.240.572.286,46

7.11.1.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, Irigasi, dan Jaringan di Neraca antara lain meliputi Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan. Akun ini tidak mencakup Tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun Tanah. Jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.018.830.032.441,14 dibandingkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp879.396.259.091,06.

Tabel 219  
Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)				
Uraian	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Jalan	579.154.499.382,09	105.484.413.138,00	22.355.592.008,00	662.283.320.512,09
Jembatan	29.393.966.675,97	1.367.508.000,00	0,00	30.761.474.675,97
Bangunan Air Irigasi	39.164.078.500,00	6.728.156.486,00	0,00	45.892.234.986,00
Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	10.048.292.150,00	18.297.549.065,00	0,00	28.345.841.215,00
Bangunan Air Kotor	471.738.450,00	2.978.715.000,00	0,00	3.450.453.450,00
Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	6.416.134.460,00	0,00	0,00	6.416.134.460,00
Pelabuhan Dermaga	372.174.700,00	19.143.922.074,00	36.259.904,92	19.479.836.869,08
Jaringan Irigasi/Waduk /Bendungan	23.581.987.681,00	0,00	0,00	23.581.987.681,00
Bangunan Pengamanan Sungai/Penangguangan Bencana Alam	1.843.473.000,00	3.734.373.500,00	0,00	5.577.846.500,00
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.472.378.086,00	1.294.689.000,00	0,00	2.767.067.086,00
Jaringan Gas Telepon	57.929.386.275,00	0,00	0,00	57.929.386.275,00
Jaringan Listrik	13.512.206.093,00	465.043.000,00	0,00	13.977.249.093,00
Instalasi Air Kotor/Air Bersih	3.332.033.500,00	919.995.000,00	0,00	4.252.028.500,00
Instalasi Listrik dan Telephon	79.764.079.249,00	1.385.501.000,00	0,00	81.149.580.249,00
Instalasi Pengolahan	32.939.830.889,00	25.760.000,00	0,00	32.965.590.889,00
JUMLAH	879.396.259.091,06	161.825.625.263,00	22.391.851.912,92	1.018.830.032.441,14

Mutasi Penambahan dan Pegurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019, dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 220  
Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD Tahun 2019  
(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	604.949.700,00	473.403.767,00	0,00	1.078.353.467,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.212.802.279,00	1.837.924.000,00	39.721.000,00	6.011.005.279,00
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	806.408.545.654,06	136.263.274.022,00	20.213.213.008,00	922.458.606.668,06
Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	41.478.000,00	0,00	0,00	41.478.000,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	29.861.748.127,00	20.352.080.074,00	2.138.917.904,92	48.074.910.296,08
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	4.695.000,00	0,00	0,00	4.695.000,00
Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja	132.202.500,00	0,00	0,00	132.202.500,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	19.755.500,00	0,00	0,00	19.755.500,00
Sekretariat Daerah	18.974.942.500,00	1.608.568.400,00	0,00	20.583.510.900,00
Sekretariat DPRD	174.139.800,00	0,00	0,00	174.139.800,00
Badan Keuangan Daerah	330.896.720,00	0,00	0,00	330.896.720,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siantan	1.219.641.300,00	453.327.000,00	0,00	1.672.968.300,00
Kecamatan Jemaja	2.235.771.000,00	593.690.000,00	0,00	2.829.461.000,00
Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siantan Timur	4.785.000,00	0,00	0,00	4.785.000,00
Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jemaja Timur	2.001.079.500,00	0,00	0,00	2.001.079.500,00
Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	1.903.552.005,00	193.985.000,00	0,00	2.097.537.005,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.523.171.183,00	0,00	0,00	3.523.171.183,00
Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	7.656.517.823,00	49.373.000,00	0,00	7.705.890.823,00
Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian	85.585.500,00	0,00	0,00	85.585.500,00
Jumlah	879.396.259.091,06	161.825.625.263,00	22.391.851.912,92	1.018.830.032.441,14

Tabel diatas terdapat mutasi tambah Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2019 sebesar Rp161.825.625.263,00 dan Mutasi Kurang Aset Tetap - Jalan,



Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp22.391.851.912,92, dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 221**  
**Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap - Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2019**  
(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2019
Saldo Per 31 Desember 2018	879.396.259.091,06
Mutasi Tambah	
Penambahan dari Belanja Modal Tahun 2019	141.102.217.189,00
Penambahan Aset dari Koreksi Hibah Kepada Pemerintah Provinsi Kepri	1.385.501.000,00
Penambahan Aset Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	193.985.000,00
Penambahan Aset Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	18.777.665.074,00
Penambahan Aset Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	366.257.000,00
Total Mutasi Tambah	161.825.625.263,00
Mutasi Kurang	
Pengurangan Aset Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	36.259.904,92
Pengurangan Aset Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.848.125.986,00
Pengurangan Aset Hibah Ke Masyarakat	675.007.000,00
Pengurangan Aset Hibah Ke Instansi Vertikal (Kementerian Perhubungan RI)	2.102.658.000,00
Pengurangan Aset Atas Penyesuaian Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya	5.729.801.022
Total Mutasi Kurang	22.391.851.912,92
Saldo Per 31 Desember 2019	1.018.830.032.441,14

#### 7.11.1.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga. Jumlah aset tetap lainnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.614.703.735,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp11.291.064.685,00.

**Tabel 222**  
**Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Buku dan Perpustakaan	7.775.991.458,00	748.094.950,00	373.893.000,00	8.150.193.408,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	2.736.084.500,00	629.567.423,00	77.677.023,00	3.287.974.900,00
Hewan/Ternak dan Tumbuhan	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Peralatan Olahraga	768.988.727,00	198.000.000,00	0,00	966.988.727,00
Aset Tetap Renovasi	0,00	662.327.700,00	462.781.000,00	199.546.700,00
<b>JUMLAH</b>	<b>11.291.064.685,00</b>	<b>2.237.990.073,00</b>	<b>914.351.023,00</b>	<b>12.614.703.735,00</b>

Mutasi Penambahan dan Pegurangan Aset Tetap Lainnya pada SKPD Tahun Anggaran 2019, dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 223**  
**Mutasi Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	6.808.213.996,00	1.302.921.773,00	434.553.023,00	7.676.582.746,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.515.000,00	0,00	0,00	4.515.000,00

SKPD	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	34.862.200,00	0,00	0,00	34.862.200,00
Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	168.050.000,00	0,00	0,00	168.050.000,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	231.230.600,00	280.646.000,00	280.646.000,00	231.230.600,00
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	3.498.000,00	0,00	0,00	3.498.000,00
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	10.750.000,00	0,00	0,00	10.750.000,00
Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	545.754.800,00	0,00	0,00	545.754.800,00
Sekretariat Daerah	1.744.864.000,00	222.998.600,00	0,00	1.967.862.600,00
Sekretariat DPRD	486.916.181,00	16.445.000,00	0,00	503.361.181,00
Badan Keuangan Daerah	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Inspektorat	49.755.172,00	0,00	0,00	49.755.172,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24.915.000,00	0,00	0,00	24.915.000,00
Kecamatan Siantan	326.748.000,00	0,00	0,00	326.748.000,00
Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Palmatak	4.100.000,00	49.995.000,00	49.995.000,00	4.100.000,00
Kecamatan Siantan Timur	11.248.136,00	0,00	0,00	11.248.136,00
Kecamatan Siantan Selatan	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siantan Tengah	14.900.000,00	16.280.000,00	0,00	31.180.000,00
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	36.159.500,00	0,00	0,00	36.159.500,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	424.229.500,00	0,00	0,00	424.229.500,00
Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	225.036.600,00	0,00	0,00	225.036.600,00
Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian	124.318.000,00	348.703.700,00	149.157.000,00	323.864.700,00
Jumlah	11.291.064.685,00	2.237.990.073,00	914.351.023,00	12.614.703.735,00

Berdasarkan Tabel diatas terdapat Mutasi Tambah Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.237.990.073,00 dan Mutasi Kurang Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp914.351.023,00, dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 224  
Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Tahun 2019  
(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2019
Saldo Per 31 Desember 2018	11.291.064.685,00
Mutasi Tambah:	
Penambahan Atas Belanja Modal Tahun 2018	2.218.168.073,00
Penambahan Aset Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	19.822.000,00
Total Mutasi Tambah	2.237.990.073,00
Mutasi Kurang:	
Pengurangan Aset Reklasifikasi kePeralatan dan Mesin	27.682.023,00
Pengurangan Aset Reklasifikasi keGedung dan Bangunan	462.781.000,00

Uraian	Saldo 31 Desember 2019
Pengurangan Aset Reklasifikasi ke Beban Persediaan	423.888.000,00
Total Mutasi Kurang	914.351.023,00
Saldo Per 31 Desember 2019	12.614.703.735,00

7.11.1.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Jumlah aset tetap konstruksi dalam pengerjaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp237.194.691.051,99 dibandingkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp164.615.719.048,99.

Tabel 225  
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD Tahun 2019

(Dalam Rupiah)					
No	SKPD	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2.900.289.000,00	612.836.000,00	0,00	3.513.125.000,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	78.059.000,00	24.617.436.756,00	0,00	24.695.495.756,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	159.531.714.271,99	46.789.996.451,00	13.585.000,00	206.308.125.722,99
4	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	789.926.000,00	711.103.000,00	366.257.000,00	1.134.772.000,00
5	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	0,00
6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	42.845.000,00	0,00	42.845.000,00	0,00
7	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	492.125.000,00	54.367.500,00	0,00	546.492.500,00
8	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	773.720.777,00	525.569.296,00	302.610.000,00	996.680.073,00
JUMLAH		164.615.719.048,99	73.311.309.003,00	732.337.000,00	237.194.691.051,99

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp237.194.691.051,99 terdapat pada enam Perangkat Daerah dapat diuraikan dalam tabel 227 s.d. 232:

Tabel 226  
Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2019  
(Dalam Rupiah)

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	Bangunan Tempat Olahraga	2013	448.000.000,00	Tanjung Momong	Akan dilakukan Reklasifikasi Ke Aset Lainnya	Keterbatasan Anggaran
2	Bangunan Tempat Olahraga	2013	1.082.130.000,00	Tanjung Momong	Akan dilakukan Reklasifikasi Ke Aset Lainnya	Keterbatasan Anggaran
3	Perencanaan Bangunan Gedung Kantor Permanen	2017	48.413.000,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
4	Perencanaan Bangunan Gedung Kantor Permanen	2017	41.635.000,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2021	

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
5	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	2017	31.923.000,00	Kecamatan Palmatak	Tahun 2020	
6	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	2017	40.943.000,00	Kecamatan Jemaja Timur	Tahun 2020	
7	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	2017	39.909.000,00	Kecamatan Jemaja	Tahun 2020	
8	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	2017	9.934.000,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
9	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	2017	37.929.000,00	Kecamatan Siantan Selatan	Tahun 2020	
10	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	2017	26.874.000,00	Kecamatan Palmatak	Tahun 2020	
11	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	2017	24.894.000,00	Kecamatan Siantan Selatan	Tahun 2020	
12	Perencanaan Ruang Laboratorium Komputer	2017	11.859.000,00	Kecamatan Siantan Tengah	Tahun 2020	
13	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	2017	20.879.000,00	Kecamatan Siantan Timur	Tahun 2020	
14	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	2017	36.884.000,00	Kecamatan Jemaja	Tahun 2020	
15	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	2017	37.874.000,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
16	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	2017	7.954.000,00	Kecamatan Jemaja Timur	Tahun 2020	
17	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru	2017	47.334.000,00	Kecamatan Palmatak	Tahun 2020	
18	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru	2017	38.864.000,00	Kecamatan Siantan Tengah	Tahun 2020	
19	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru	2017	48.874.000,00	Kecamatan Siantan Timur	Tahun 2020	
20	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru	2017	47.928.000,00	Kecamatan Siantan Selatan	Tahun 2020	
21	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru	2017	37.874.000,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
22	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru	2017	49.864.000,00	Kecamatan Jemaja Timur	Tahun 2020	
23	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru	2017	49.864.000,00	Kecamatan Jemaja	Tahun 2020	
24	Perencanaan Pembangunan Jamban Siswa/Guru	2017	25.829.000,00	Kecamatan Palmatak	Tahun 2020	
25	Perencanaan Pembangunan Jamban Siswa/Guru	2017	41.779.000,00	Kecamatan Siantan Selatan	Tahun 2020	
26	Perencanaan Pembangunan Jamban Siswa/Guru	2017	33.914.000,00	Kecamatan Jemaja Timur	Tahun 2020	
27	Perencanaan Pembangunan Jamban Siswa/Guru	2017	16.941.000,00	Kecamatan Siantan Tengah	Tahun 2020	
28	Perencanaan	2017	33.914.000,00	Kecamatan	Tahun 2020	

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
	Pembangunan Jamban Siswa/Guru			Jemaja		
29	Perencanaan Pembangunan Jamban Siswa/Guru	2017	20.356.000,00	Kecamatan Siantan Timur	Tahun 2020	
30	Perencanaan Gedung SDN 003	2018	10.780.000,00	Air Sena	Tahun 2020	
31	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMP 001 Palmatak	2018	14.410.000,00	Kecamatan Palmatak	Tahun 2020	
32	Perencanaan Pembangunan SDN 012 Landak dan SMPN 003 Rewak	2018	14.729.000,00	Kecamatan Jemaja	Tahun 2020	
33	Perencanaan Pembangunan SMPN 001 Jemaja Timur	2018	13.915.000,00	Kecamatan Jemaja Timur	Tahun 2020	
34	Perencanaan Pemasangan Paving Blok	2018	11.110.000,00	Desa Lidi, Kecamatan Siantan Tengah	Tahun 2020	
35	Perencanaan Pembangunan SDN 005 Palmatak	2018	4.961.000,00	Kecamatan Palmatak	Tahun 2020	
36	Perencanaan TK Negeri Pembina Kecamatan Siantan	2018	3.905.000,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
37	Perencanaan Pembangunan Rumah Gasing	2018	7.909.000,00	Desun Muntai, Desa Teluk Siantan, Kecamatan Siantan Tengah	Tahun 2020	
38	Perencanaan Lapangan Bulu Tangkis dan Lapangan Futsal Desa Piasan	2018	12.859.000,00	Desa Langir dan Desa Piasan	Tahun 2020	
39	Perencanaan Rumah Dinas Guru	2018	34.947.000,00	Kecamatan Siantan Timur	Tahun 2020	
40	Perencanaan Rumah Dinas Guru SD	2018	49.775.000,00	Kecamatan Jemaja Timur	Tahun 2020	
41	Perencanaan Rumah Dinas Guru SMP	2018	36.300.000,00	Kecamatan Jemaja Timur	Tahun 2020	
42	Perencanaan Rumah Dinas Guru SD	2018	24.904.000,00	Kecamatan Siantan Timur	Tahun 2020	
43	Perencanaan Rumah Dinas Guru SD	2018	67.980.000,00	Kecamatan Palmatak	Tahun 2020	
44	Perencanaan Rumah Dinas Guru SMP	2018	34.925.000,00	Kecamatan Palmatak	Tahun 2020	
45	Perencanaan Rumah Dinas Guru SD	2018	35.893.000,00	Kecamatan Jemaja	Tahun 2020	
46	Perencanaan Rumah Dinas Guru SMP	2018	30.305.000,00	Kecamatan Jemaja	Tahun 2020	
47	Perencanaan Rumah Dinas Guru SMP	2018	27.929.000,00	Kecamatan Siantan Tengah	Tahun 2020	
48	Perencanaan Sumber Pusat Inklusif SMP	2018	21.384.000,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
49	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Guru SMP 2 Mengkait	2019	27.874.000,00	Kecamatan Siantan Selatan	Tahun 2021	
50	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung PGRI	2019	81.800.000,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2021	
51	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMPN 1 Palmatak	2019	31.922.000,00	Kecamatan Palmatak	Tahun 2020	
52	Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri 4	2019	22.429.000,00	Kecamatan Palmatak	Tahun 2020	

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
	Putik					
53	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD 003 Air Putih	2019	14.344.000,00	Kecamatan Siantan Timur	Tahun 2020	
54	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD 010 Pian Pasir	2019	14.344.000,00	Kecamatan Siantan Utara	Tahun 2020	
55	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD 001 Letung	2019	8.954.000,00	Kecamatan Jemaja	Tahun 2020	
56	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD 004 Serat	2019	31.944.000,00	Kecamatan Siantan Timur	Tahun 2020	
57	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD 009 Nokok	2019	31.889.000,00	Kecamatan Siantan Timur	Tahun 2020	
58	Perencanaan Rehabilitasi Ruang UKS SD 007 Lembah Rewak	2019	3.949.000,00	Kecamatan Jemaja	Tahun 2020	
59	DED Pembangunan Ruang Inklusif SPMN 4 Putik	2019	21.659.000,00	Kecamatan Palmatak	Tahun 2020	
60	Perencanaan Penimbunan Tanah Lapangan TK Siantan Selatan	2019	6.897.000,00	Kecamatan Siantan Selatan	Tahun 2020	
61	Konsultansi Perencanaan Rehab Ruang Kelas Sekolah di Kecamatan Jemaja Timur	2019	13.420.000,00	Kecamatan Jemaja Timur	Tahun 2020	
62	Konsultansi Perencanaan Rehab Ruang Kelas di Kecamatan Siantan Tengah	2019	14.839.000,00	Kecamatan Siantan Tengah	Tahun 2020	
63	DED Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang, Baik beserta Sanitasinya atau Tanpa Sanitasinya SMPN 1 Palmatak	2019	7.942.000,00	Kecamatan Palmatak	Tahun 2020	
64	DED Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang, Baik beserta Sanitasinya atau Tanpa Sanitasinya SMPN 1 Air Nangak	2019	7.931.000,00	Kecamatan Siantan Tengah	Tahun 2020	
65	DED Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya SMPN 2 Palmatak	2019	22.594.000,00	Kecamatan Palmatak	Tahun 2020	
66	DED Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya SMPN 002 Piasan	2019	19.899.000,00	Kecamatan Siantan Utara	Tahun 2020	
67	DED Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya SMPN 004 Serat	2019	19.844.000,00	Kecamatan Siantan Timur	Tahun 2020	
68	DED Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Perabotnya SDN 007 Lembah Rewak	2019	8.415.000,00	Kecamatan Jemaja	Tahun 2020	

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
69	DED Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Perabotnya SDN 006 Piabung	2019	13.464.000,00	Kecamatan Palmatak	Tahun 2020	
70	DED Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Perabotnya SMPN 3 Lembah Rewak SATAP	2019	29.854.000,00	Kecamatan Jemaja	Tahun 2020	
71	DED Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Perabotnya SMDN 011 Air Biru	2019	9.944.000,00	Kecamatan Jemaja	Tahun 2020	
72	DED Rumah Dinas Guru dengan Tingkat Kerusakan sedang atau berat beserta Perabotnya SDN 004 Bukit Tambun	2019	6.919.000,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
73	DED Rumah Dinas Guru dengan Tingkat Kerusakan sedang atau berat beserta Perabotnya SDN 003 Rewak	2019	8.404.000,00	Kecamatan Jemaja	Tahun 2020	
74	DED Rumah Dinas Guru dengan Tingkat Kerusakan sedang atau berat beserta Perabotnya SMPN 1 Jemaja Timur	2019	11.924.000,00	Kecamatan Jemaja Timur	Tahun 2020	
75	DED Rumah Dinas Guru dengan Tingkat Kerusakan sedang atau berat beserta Perabotnya SDN 009 Palah	2019	25.509.000,00	Kecamatan Palmatak	Tahun 2020	
76	DED Rumah Dinas Guru dengan Tingkat Kerusakan sedang atau berat beserta Perabotnya SDN 009 Nokok	2019	25.454.000,00	Kecamatan Siantan Timur	Tahun 2020	
77	DED Rumah Dinas Guru dengan Tingkat Kerusakan sedang atau berat beserta Perabotnya SMPN 3 Satu Atap Munjan	2019	27.104.000,00	Kecamatan Siantan Timur	Tahun 2020	
78	DED Rumah Dinas Guru dengan Tingkat Kerusakan sedang atau berat beserta Perabotnya SDN 011 Air Biru	2019	15.884.000,00	Kecamatan Jemaja	Tahun 2020	
79	DED Rumah Dinas Guru dengan Tingkat Kerusakan sedang atau berat beserta Perabotnya SDN 003 Mengkait	2019	25.487.000,00	Kecamatan Siantan Selatan	Tahun 2020	
Jumlah			3.513.125.000,00			

**Tabel 227**  
**Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	Perencanaan Pembangunan Pagar dan Paving Blok Puskesmas	2017	49.800.000,00	Kecamatan Jemaja Timur	Tahun 2018	
2	Perencanaan Pembangunan Paving Blok RSUD Jemaja	2018	16.357.000,00	Kecamatan Jemaja	Tahun 2019	
3	Perencanaan Pagar dan Parit Puskesmas Pembantu	2018	11.902.000,00	Desa Air Sena	Tahun 2020	
4	Perencanaan Pengadaan Bangunan Rumah Pelindung IPAL Puskesmas Siantan Timur	2019	29.810.000,00	Kecamatan Siantan Timur	Tahun 2020	
5	Perencanaan Pembangunan Ruang Operasi RSUD Jemaja	2019	92.785.000,00	Kecamatan Jemaja	Tahun 2020	
6	Perencanaan Pembangunan Ruang Operasi RSUD Palmatak	2019	93.775.000,00	Kecamatan Palmatak	Tahun 2020	
7	Perencanaan dan Pengawas Puskesmas Siantan Selatan	2019	3.966.736.480,00	Kecamatan Siantan Selatan	Tahun 2020	Uang Muka 30%, Termin 25%
8	Perencanaan dan Pengawas Puskesmas Siantan Timur	2019	2.776.795.550,00	Kecamatan Siantan Timur	Tahun 2020	Uang Muka 30%, Termin 25%
9	Perencanaan dan Pengawas Puskesmas Siantan Tengah	2019	7.131.594.770,00	Kecamatan Siantan Tengah	Tahun 2020	Uang Muka 30%, Termin 50%, 75%
10	Perencanaan dan Pengawas Puskesmas Palmatak	2019	5.600.037.680,00	Kecamatan Palmatak	Tahun 2020	Uang Muka 30%, Termin 25%, 50%
11	Perencanaan Master Plan DED Pembangunan Rumah Dinas dan Puskesmas Siantan Selatan	2019	553.190.000,00	Kecamatan Siantan Selatan	Tahun 2020	
12	Perencanaan pembangunan Tempat Penampungan Limbah Sementara	2019	19.877.000,00	Kecamatan Siantan Selatan	Tahun 2020	
13	Perencanaan Pembangunan Rumah Pelindung/IPAL Puskesmas Jemaja Timur	2019	19.844.000,00	Kecamatan Jemaja Timur	Tahun 2020	
14	Pembangunan Puskesmas Kecamatan Siantan Tengah	2019	1.457.714.526,00	Kecamatan Siantan Tengah	Tahun 2020	Utang Jangka Pendek Lainnya TA. 2019
15	Pembangunan Puskesmas Kecamatan Siantan Tengah	2019	2.875.276.750,00	Kecamatan Palmatak	Tahun 2020	Utang Jangka Pendek Lainnya TA. 2019
<b>Jumlah</b>			<b>24.695.495.756,00</b>			

**Tabel 228**  
**Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	Kantor Bupati Kepulauan Anambas	2013	4.991.193.900,00	Kecamatan Siantan	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
2	Kantor Bupati Kepulauan Anambas	2013	785.879.000,00	Kecamatan Siantan	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke	



No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
					Aset Lainnya	
3	Pembangunan Water Front City Tahap I dan Tahap II	2014	30.793.636.000,00	Kecamatan Siantan	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Keterbatasan Anggaran
4	Perencanaan Pembangunan Jalan Piabung - Muntai dan Langir - Muntai	2014	269.225.000,00	Kecamatan Palmatak	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Keterbatasan Anggaran
5	Perencanaan Pembuatan Pagar/Wiremesh	2014	28.633.000,00	Dusun Teluk Pring, Desa Putik, Kecamatan Palmatak	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Keterbatasan Anggaran
6	Kantor Bupati Kepulauan Anambas	2014	3.754.808.450,00	Kecamatan Siantan	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
7	Kantor Bupati Kepulauan Anambas	2014	49.320.000,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
8	Kantor Bupati Kepulauan Anambas	2015	13.008.025.970,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
9	Kantor Bupati Kepulauan Anambas	2016	5.334.265.720,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
10	Kantor Bupati Kepulauan Anambas	2017	21660.489.010,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
11	Pembangunan Mesjid Agung	2017	15.917.921.459,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	Terdapat Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp953.098.699,00
12	DED Pembangunan Astaka	2017	48.785.000,00	Lapangan Sulaiman Abdullah, Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
13	Penataan Tempat Pemakaman Umum	2017	48.730.000,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
14	DED Pembangunan Jalan Padang Melang Jalur 2	2017	49.225.000,00	Kecamatan Jemaja	Tahun 2020	
15	DED Pembangunan Jalan Bayat - Mubur Kecil - Piasan - Pian Pasir - Palah	2017	190.135.000,00	Kecamatan palmatak	Tahun 2020	
16	DED Pembangunan Jalan Pasir Merah	2017	89.265.000,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
17	DED Pembangunan Jalan Rewak - Padang Melang	2017	188.485.000,00	Kecamatan Jemaja	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Keterbatasan Anggaran
18	DED Jalan Lingkar Pulau Bajau	2017	279.070.000,00	Pulau Bajau, Kecamatan Siantan Timur	Tahun 2020	
19	SSID Jalan Genting Pulur - Besuh	2017	270.105.000,00	Kecamatan Jemaja Timur	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Keterbatasan Anggaran
20	SSID Pembangunan Jalan Lingkar Desa Tiangau Teluk Rambut - Desan	2017	284.625.000,00	Kecamatan Siantan Selatan	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Keterbatasan Anggaran
21	SSID Pembangunan Jalan Lingkar Matak Kecil (Teluk Durian-Nuan-Buton-Sedak)	2017	239.085.000,00	Kecamatan Palmatak	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Keterbatasan Anggaran
22	SSID Pembangunan Jalan Lingkar Muntai - Kampung Baru	2017	266.805.000,00	Kecamatan Siantan Tengah	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Keterbatasan Anggaran
23	DED Pembangunan Jembatan Beton Padang Melang Jalur 2	2017	169.345.000,00	Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Jemaja Timur	Tahun 2020	

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
24	SSID Jalan Pelantar Beton Penghubung Antar Desa Belibak - Desa Tebang	2017	302.005.000,00	Kecamatan palmatak	Tahun 2020	
25	DED Pelantar Beton Payaklaman - Batu Ampar	2017	49.225.000,00	Kecamatan Palmatak	Tahun 2020	
26	DED Pelantar Serkah Desa Tarempa Barat dan DED Lorong Sempit	2017	125.125.000,00	Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
27	Perencanaan Pembangunan Jembatan Beton Desa Piabung	2017	137.885.000,00	Kecamatan Palmatak	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Keterbatasan Anggaran
28	SSID Pembangunan Pelantar Beton Antang	2017	286.935.000,00	Desa Tarempa Timur	Tahun 2020	
29	Pemasangan Bronjong Landscape Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas	2018	3.776.676.780,00	Pasir Peti, Desa Pesisir Timur	Tahun 2020	
30	Lanjutan Pembangunan Tambahan Ruang RSUD	2018	8.191.100.000,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
31	Pembangunan Mesjid Agung dan Perencanaan dan Pengawasan	2018	24.668.561.800,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
32	DED Pembangunan Menuju TPA	2018	48.565.000,00	Kecamatan Siantan	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Keterbatasan Anggaran
33	Pembangunan Jalan Putik - Teluk Pring	2018	17.343.203.980,00	Kecamatan palmatak	Tahun 2020	
34	Peningkatan Jalan Genting - Desan	2018	5.461.767.899,99	Kecamatan Siantan Selatan	Tahun 2019	
35	Perencanaan Pembangunan Jalan	2018	97.075.000,00	Kecamatan Jemaja Timur	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Keterbatasan Anggaran
36	DED Jalan Sri Tanjung - Luwe	2018	449.625.000,00	Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Keterbatasan Anggaran
37	DED Pembanguna Jalan Pitik - Teluk Pring	2018	48.565.000,00	Kecamatan Palmatak	Tahun 2019	
38	DED Peningkatan Jalan Rewak - Kusik	2018	98.010.000,00	Kecamatan Jemaja	Tahun 2020	
39	DED Nomalisasi Bendung Dapit	2018	97.515.000,00	Kecamatan Jemaja Timur	Tahun 2019	
40	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	2018	99.000.000,00	Kecamatan Jemaja	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Keterbatasan Anggaran
41	DED Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi	2018	98.890.000,00	Kecamatan Jemaja Timur	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Keterbatasan Anggaran
42	DED Peningkatan Jaringan Daerah Irigasi	2018	99.000.000,00	Kecamatan Jemaja	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Keterbatasan Anggaran
43	DED Peningkatan Jaringan Daerah Irigasi Matan	2018	98.890.000,00	Kecamatan Jemaja	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Keterbatasan Anggaran
44	Perencanaan Pembangunan Batu Miring TPU	2018	11.935.000,00	Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja	Tahun 2020	
45	Perencanaan Lanjutan Penimbunan Tanah Gereja Santa dan Perencanaan lanjutan Pemasangan batu Miring Gang Nangka	2018	22.110.000,00	Desa Air Sena dan Desa Air Asuk, Kecamatan Siantan Tengah	Tahun 2020	
46	Perencanaan Pemasangan Batu	2018	36.080.000,00	Desa Telagak	Tahun 2020	

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
	Miring Abrasi Pantai			Besar		
47	DED Normalisasi Gunung Lintang	2018	96.085.000,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
48	Perencanaan Pembuatan Drainase/Gorong-gorong Jalan Abdurahman ke Jalan Kampung Baru	2018	10.340.000,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
49	Pembebasan Tanah/Lahan Kegiatan Tahap II Masjid Agung Kabupaten Kepulauan Anambas	2019	250.000.000,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
50	Review DED Landscap Perkantoran Bupati Kepulauan Anambas	2019	29.890.000,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
51	Manajemen Konstruksi Pembangunan Land Clearing Pembangunan Kantor OPD (Multi Years) Tahun 1	2019	116.766.380,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2021	
52	Pematangan Lahan Perumahan Khusus di Tarempa Selatan dan Perencanaan dan Pengawasan	2019	434.914.000,00	Kecamatan Siantan Selatan	Tahun 2020	
53	Perencanaan dan Pengawasan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan Kecamatan Jemaja Timur	2019	81.444.000,00	Kecamatan Jemaja Timur	Tahun 2020	Utang Jangka Pendek Lainnya TA. 2019
54	Pengawasan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur	2019	36.575.000,00	Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur	Tahun 2020	Utang Jangka Pendek Lainnya TA. 2019
55	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Lanjutan Pelantar Beton Bertulang Desa Genting Pulur Kecamatan Jemaja Timur	2019	32.274.000,00	Kecamatan Jemaja Timur	Tahun 2020	Terdapat Utang Jangka Pendek Lainnya
56	Pembangunan dan Pengawasan Pembangunan Reservoir dan Jaringan SPAM IKK Kecamatan Siantan	2019	935.616.180,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	Utang Jangka Pendek Lainnya TA. 2019 sebesar Rp862.219.176,00
57	Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Jemaja Timur	2019	25.872.000,00	Kecamatan Jemaja Timur	Tahun 2020	Utang Jangka Pendek Lainnya TA. 2019
58	Pembangunan Penampung Air Desa Payalaman Kecamatan Palmatak (Lanjutan)	2019	73.870.000,00	Kecamatan Palmatak	Tahun 2020	Utang Jangka Pendek Lainnya TA. 2019
59	Pembangunan Masjid Agung kabupaten Kepulauan Anambas	2019	28.905.072.500,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
60	Pembangunan Jalan SP II (Multi Years)	2019	10.894.993.270,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2021	
61	DED jalan Ulu Maras - Air Terjun	2019	99.495.000,00	Kecamatan Jemaja Timur	Tahun 2020	
62	DED Peningkatan Jalan SP. Serat - Teluk Rung - SP. Tinggil	2019	99.495.000,00	Kecamatan Siantan Timur	Tahun 2020	
63	DED Peningkatan Jalan SP. SMP 1 (Tanjung Momong - Simpang Air	2019	99.770.000,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
	Padang (Teluk Rit)					
64	DED Peningkatan Jalan Payalaman - Gunung Ncak	2019	98.601.000,00	Kecamatan Palamatak	Tahun 2020	
65	DED Peningkatan Jalan SP Pasiran - Kuala Maras	2019	98.601.000,00	Kecamatan Jemaja Timur	Tahun 2020	
66	DED jalan Air Bayo - Mampok	2019	99.044.000,00	Kecamatan Jemaja	Tahun 2020	
67	DED Jalan Bukit Padi - Air Biru	2019	99.601.000,00	Kecamatan Jemaja	Tahun 2020	
68	DED Peningkatan Jalan SP Letung - SP Pelabuhan Letung - SP Rewak	2019	98.601.000,00	Kecamatan Jemaja	Tahun 2020	
69	Perencanaan lanjutan Pembangunan Jalan Beton Jalur Laut Dari Kampung Sunjuk Menuju Kampung Tumuk Desa Kuala Maras	2019	14.960.000,00	Kecamatan Jemaja Timur	Tahun 2020	Utang Jangka Pendek Lainnya TA. 2019
70	Perencanaan dan Pengawasan Rehabilitasi dan Preservasi Ruas Jalan Se Kabupaten Kepulauan Anambas	2019	99.225.000,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	Utang Jangka Pendek Lainnya TA. 2019
71	DED Peningkatan Jalan Rewak - Sedanau	2019	99.044.000,00	Kecamatan Jemaja	Tahun 2020	Utang Jangka Pendek Lainnya TA. 2019
72	Pengawasan Pembangunan Jalan Masuk Menuju Kantor Bupati KKA	2019	12.144.000,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	Utang Jangka Pendek Lainnya TA. 2019
73	DED Jalan Atas Semuak - Teluk Kaut	2019	98.249.000,00	Kecamatan Jemaja	Tahun 2020	Utang Jangka Pendek Lainnya TA. 2019
74	Penagawasan pembangunan Jalan pelantar Seberang Dermaga I Timur Kelurahan Letung	2019	98.780.000,00	Kecamatan Jemaja	Tahun 2020	Utang Jangka Pendek Lainnya TA. 2019
75	Pembangunan Jalan Masuk Menuju Kantor Bupati KKA	2019	449.095.500,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
76	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan Pelantar Beton Kuala Maras	2019	119.240.000,00	Kecamatan Jemaja Timur	Tahun 2020	Utang Jangka Pendek Lainnya TA. 2019
77	Perencanaan Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi	2019	99.000.000,00	Kecamatan Jemaja Timur	Tahun 2020	
78	DED jaringan Sekunder Daerah Irigasi Desa Bukit Padi	2019	99.110.000,00	Kecamatan Jemaja Timur	Tahun 2020	
79	Review Design Pembangunan Embung Batu Tabir	2019	192.995.000,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
80	DED Pembangunan Bendung Pasiran	2019	98.780.000,00	Kecamatan Jemaja Timur	Tahun 2020	
81	Penyusunan Masterplan Drainase	2019	266.750.000,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
82	Perencanaan Pembangunan Pemecah Ombak Desa Landak	2019	13.750.000,00	Kecamata Jemaja	Tahun 2020	
83	Renovasi Talaud Pemecah Ombak Desa	2019	790.597.214,00	Kecamatan Siantan Selatan	Tahun 2020	Terdapat Utang Jangka Pendek

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
	Mengkait Dusun I dan II					Lainnya sebesar Rp188.858.220
84	Review Pengerukan Normalisasi Sungai Dapit Menuju Kuala Maras	2019	98.010.000,00	Kecamatan Jemaja Timur	Tahun 2020	
85	DED Normalisasi Sungai Semajuk Padang Melang Sampai Mampok	2019	97.625.000,00	Kecamatan Jemaja	Tahun 2020	
86	Pembangunan Reservoir dan Jaringan SPAM IKK	2019	381.257.710,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
87	Penyusunan DED Peningkatan Kapasitas Air Baku dan Jaringan SPAM Kelurahan Letung	2019	97.790.000,00	Kecamatan Jemaja	Tahun 2020	
Jumlah			206.308.125.722,99			

Tabel 229  
Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup  
Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	Perencanaan Rehabilitasi Dermaga Rakyat	2017	34.540.000,00	Desa Genting Kecamatan Siantan Selatan	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Keterbatasan Anggaran
2	Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Pariwisata Manda Riau	2017	49.060.000,00		Akan Dilakukan Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Keterbatasan Anggaran
3	Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Pariwisata Pulau Penjalin	2017	49.500.000,00	Pulau Penjalin	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
4	Perencanaan Dermaga Rakyat	2017	44.220.000,00	Desa Telaga Kecil Kecamatan Siantan Selatan	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Keterbatasan Anggaran
5	Perencanaan Pembangunan Dermaga Rakyat	2017	48.565.000,00	Desa Tarempa Timur Kecamatan Siantan	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Keterbatasan Anggaran
6	Perencanaan Peningkatan Pelabuhan Pemda	2017	49.544.000,00	Letung, Kecamatan Jemaja	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Keterbatasan Anggaran
7	Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	2017	29.800.000,00	Desa Air Bini dan Desa Arung Hijau Kecamatan Siantan Selatan	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Keterbatasan Anggaran
8	Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	2017	14.810.000,00	Desa Munjan Kecamatan Siantan Timur	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Keterbatasan Anggaran
9	Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	2017	14.850.000,00	Desa Mengkait Kecamatan Siantan Selatan	Tahun 2020	
10	Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	2017	29.920.000,00	Desa Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Keterbatasan Anggaran
11	Perencanaan Pengadaan Pagar	2017	48.950.000,00	Kecamatan Siantan Selatan	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke	Keterbatasan Anggaran

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
	Pengaman Jalan (Guardrail)				Aset Lainnya	
12	Perencanaan Pembangunan Batu Miring Pelabuhan	2018	9.910.000,00	Desa Kiabu	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Keterbatasan Anggaran
13	Perencanaan Penambahan Gedung Kantor	2019	79.799.000,00	Kecamatan Siantan		
14	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pelabuhan Kuku	2019	99.000.000,00	Kecamatan Jemaja	Tahun 2020	
15	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pelabuhan Pemda Letung	2019	99.800.000,00	Kecamatan Jemaja	Tahun 2020	
16	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Peningkatan Pelabuhan Matak Kecil	2019	99.528.000,00	Kecamatan Palmatak	Tahun 2020	
17	DED Pelabuhan Bayat	2019	79.766.000,00	Kecamatan Siantan Utara	Tahun 2020	
18	Perencanaan Peningkatan Pelabuhan Desa Temburun	2019	29.826.000,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
19	DED Pelabuhan Sri Tanjung	2019	64.064.000,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
20	Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Desa Ladan	2019	59.620.000,00	Kecamatan Palmatak	Tahun 2020	
21	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Tambatan Perahu Kelurahan Letung	2019	99.700.000,00	Kecamatan Jemaja	Tahun 2020	
Jumlah			1.134.772.000,00			

Tabel 230  
Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Tahun 2019  
(Dalam Rupiah)

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	Perencanaan Pembangunan Pabrik Es	2015	26.950.000,00	Desa Keramut, Kecamatan Jemaja Timur	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Untuk diusulkan Ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
2	Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	340.000.000,00	Desa Air Putih, Kecamatan Siantan Timur	Akan Dilakukan Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Untuk diusulkan Ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
3	Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Hewan	2017	28.105.000,00	Desa Bukit Padi Kecamatan Jemaja Timur	Tahun 2020	
4	Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Hewan	2017	28.105.000,00	Kecamatan Palmatak	Tahun 2019	
5	Perencanaan Jalan Desa	2017	29.645.000,00	Desa Rekam Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
6	Perencanaan Jalan Desa	2017	29.370.000,00	Desa Tiangau, Kecamatan Siantan	Tahun 2019	
7	Perencanaan Pembangunan Pagar Kelling Puskesmas	2018	9.950.000,00	Kecamatan Palmatak	Tahun 2019	

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
8	Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Gudang Penyimpanan Rumput Laut	2019	24.667.500,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
9	DED Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian	2019	29.700.000,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
Jumlah			546.492.500,00			

Tabel 231  
Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Koperasi , Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	Perencanaan Pembangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2017	98.230.000,00	Pasar Inpres Tarempa	Tahun 2020	
2	Perencanaan Pasar Loka	2018	372.880.777,00	Kecamatan Siantan	Tahun 2020	
3	Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas	2019	525.569.296,00	Kecamatan Palmatak	Tahun 2020	Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2019
Jumlah			996.680.073,00			

7.11.1.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Penyusutan didefinisikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan basis akrual dalam SAP. Metode Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan metode garis lurus yang dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap bulan selama masa manfaat. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp648.038.602.186,42 dibandingkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp555.461.170.972,75.

Tabel 232  
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Akumulasi Penyusutan	(555.461.170.972,75)	(96.288.860.580,33)	(3.711.429.366,66)	(648.038.602.186,42)
Jumlah	(555.461.170.972,75)	(96.288.860.580,33)	(3.711.429.366,66)	(648.038.602.186,42)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Tahun 2019 sebesar Rp648.038.602.186,42 dan Tahun 2018 sebesar Rp555.461.170.972,75. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 233  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo per 31 Desember 2018	Koreksi Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2018	Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2018	Penyusutan Tahun 2019	Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2019
1	2	3	4 = (2-3)	5	6=(4+5)
Peralatan Dan Mesin	(218.294.992.166,45)	(2.269.344.383,33)	(216.025.647.783,12)	(24.243.071.750,00)	(240.268.719.533,12)
Gedung Dan Bangunan	(12.256.442.749,00)	0,00	(12.256.442.749,00)	(8.878.592.912,00)	(21.135.035.661,00)

Uraian	Saldo per 31 Desember 2018	Koreksi Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2018	Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2018	Penyusutan Tahun 2019	Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2019
1	2	3	4 = (2-3)	5	6=(4+5)
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	(324.909.736.057,30)	0,00	(324.909.736.057,30)	(61.725.110.935,00)	(386.634.846.992,30)
<b>Jumlah</b>	<b>(555.461.170.972,75)</b>	<b>(2.269.344.383,33)</b>	<b>(553.191.826.589,42)</b>	<b>(94.846.775.597,00)</b>	<b>(648.038.602.186,42)</b>

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Tahun 2019 sebesar Rp648.038.602.186,42 dan Tahun 2018 sebesar Rp555.461.170.972,75 pada masing-masing SKPD dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 234**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per SKPD Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo per 31 Desember 2018	Koreksi Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2018	Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2018	Penyusutan Tahun 2019	Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2019
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	(55.594.833.885,45)	(2.269.344.383,33)	(53.325.489.502,12)	(7.937.538.359,00)	(61.263.027.861,12)
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(38.401.584.597,00)	0,00	(38.401.584.597,00)	(10.133.262.724,00)	(48.534.847.321,00)
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(268.747.794.378,00)	0,00	(268.747.794.378,00)	(58.539.859.728,00)	(327.287.654.106,00)
Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	(3.097.323.999,00)	0,00	(3.097.323.999,00)	(235.237.076,00)	(3.332.561.075,00)
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	(32.731.320.280,00)	0,00	(32.731.320.280,00)	(5.427.454.451,00)	(38.158.774.731,00)
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	(2.570.061.126,00)	0,00	(2.570.061.126,00)	(252.616.387,00)	(2.822.677.513,00)
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	(6.632.282.296,00)	0,00	(6.632.282.296,00)	(408.675.242,00)	(7.040.957.538,00)
Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja	(3.087.652.387,00)	0,00	(3.087.652.387,00)	(135.122.727,00)	(3.222.775.114,00)
Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah	(561.857.697,00)	0,00	(561.857.697,00)	(146.347.733,00)	(708.205.430,00)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(8.821.436.679,00)	0,00	(8.821.436.679,00)	-473.620.647,00	(9.295.057.326,00)
Sekretariat Daerah	(75.407.679.346,30)	0,00	(75.407.679.346,30)	(5.762.695.686,00)	(81.170.375.032,30)
Sekretariat DPRD	(8.906.129.087,00)	0,00	(8.906.129.087,00)	(359.671.913,00)	(9.265.801.000,00)
Badan Keuangan Daerah	(3.743.066.221,00)	0,00	(3.743.066.221,00)	(520.083.105,00)	(4.263.149.326,00)
Inspektorat	(1.288.893.622,00)	0,00	(1.288.893.622,00)	(86.734.209,00)	(1.375.627.831,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan	(2.178.187.906,00)	0,00	(2.178.187.906,00)	(152.554.923,00)	(2.330.742.829,00)



SKPD	Saldo per 31 Desember 2018	Koreksi Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2018	Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2018	Penyusutan Tahun 2019	Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2019
Sumber Daya Manusia					
Kecamatan Siantan	(2.474.550.969,00)	0,00	(2.474.550.969,00)	(344.972.341,00)	(2.819.523.310,00)
Kecamatan Jemaja	(2.846.200.992,00)	0,00	(2.846.200.992,00)	-196.893.777,00	(3.043.094.769,00)
Kecamatan Palmatak	(2.286.021.434,00)	0,00	(2.286.021.434,00)	(158.319.594,00)	(2.444.341.028,00)
Kecamatan Siantan Timur	(1.139.755.896,00)	0,00	(1.139.755.896,00)	(59.081.756,00)	(1.198.837.652,00)
Kecamatan Siantan Selatan	(1.046.106.933,00)	0,00	(1.046.106.933,00)	(70.147.430,00)	(1.116.254.363,00)
Kecamatan Jemaja Timur	(2.385.096.476,00)	0,00	(2.385.096.476,00)	(157.554.079,00)	(2.542.650.555,00)
Kecamatan Siantan Tengah	(1.380.725.798,00)	0,00	(1.380.725.798,00)	(132.731.366,00)	(1.513.457.164,00)
Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	(2.530.059,00)	(2.530.059,00)
Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	(5.366.944,00)	(5.366.944,00)
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	(7.437.519.393,00)	0,00	(7.437.519.393,00)	(607.519.449,00)	(8.045.038.842,00)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(5.847.345.028,00)	0,00	(5.847.345.028,00)	(865.978.261,00)	(6.713.323.289,00)
Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	(11.242.600.691,00)	0,00	(11.242.600.691,00)	(1.155.006.333,00)	(12.397.607.024,00)
Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian	(5.605.143.856,00)	0,00	(5.605.143.856,00)	(519.199.298,00)	(6.124.343.154,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(555.461.170.972,75)</b>	<b>(2.269.344.383,33)</b>	<b>(553.191.826.589,42)</b>	<b>(94.846.775.597,00)</b>	<b>(648.038.602.186,42)</b>

Nilai Akumulasi Penyusutan aset tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp648.038.602.186,42 dan Tahun 2018 sebesar Rp555.461.170.972,75 tersebut tidak termasuk aset yang berasal dari belanja modal yang nilainya lebih kecil dari Rp1.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 235

## Daftar Barang yang Nilainya di Bawah Rp1.000.000,00 (Ekstrakomtabel)

(Dalam Rupiah)

SKPD	Ekstrakomtabel Aset Tetap s/d 2018	Ekstrakomtabel Aset Tetap Tahun 2019	Total Ekstrakomtabel Tahun 2019
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2.963.597.640,00	287.326.290,00	3.250.923.930,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	371.828.079,00	168.557.883,00	540.385.962,00
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	135.959.495,00	0,00	135.959.495,00
Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	51.764.500,00	45.527.700,00	97.292.200,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	107.620.000,00	0,00	107.620.000,00
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	183.880.600,00	2.999.700,00	186.880.300,00
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	174.127.200,00	13.156.000,00	187.283.200,00
Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja	117.598.700,00	1.575.300,00	119.174.000,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah	100.512.500,00	0,00	100.512.500,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	378.546.500,00	1.496.000,00	380.042.500,00
Sekretariat Daerah	887.654.262,00	211.010.000,00	1.098.664.262,00
Sekretariat DPRD	84.385.400,00	265.705.000,00	350.090.400,00

SKPD	Ekstrakomtabel Aset Tetap s/d 2018	Ekstrakomtabel Aset Tetap Tahun 2019	Total Ekstrakomtabel Tahun 2019
Badan Keuangan Daerah	36.661.500,00	1.650.000,00	38.311.500,00
Inspektorat	88.645.000,00	19.987.000,00	108.632.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	32.256.000,00	17.116.223,00	49.372.223,00
Kecamatan Siantan	158.533.000,00	50.890.400,00	209.423.400,00
Kecamatan Jemaja	37.576.316,00	13.000.000,00	50.576.316,00
Kecamatan Palmatak	123.810.000,00	17.545.000,00	141.355.000,00
Kecamatan Siantan Timur	83.694.000,00	0,00	83.694.000,00
Kecamatan Siantan Selatan	83.625.000,00	13.860.000,00	97.485.000,00
Kecamatan Jemaja Timur	107.194.000,00	0,00	107.194.000,00
Kecamatan Siantan Tengah	80.148.000,00	0,00	80.148.000,00
Kecamatan Siantan Utara	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	67.965.000,00	1.730.000,00	69.695.000,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	47.100.000,00	0,00	47.100.000,00
Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	366.487.555,00	34.414.300,00	400.901.855,00
Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian	93.902.400,00	29.000.000,00	122.902.400,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.965.072.647,00</b>	<b>1.198.146.796,00</b>	<b>8.163.219.443,00</b>

#### 7.11.1.3.1.4. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari: (1) Tagihan Jangka Panjang, (2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga, (3) Aset Tak Berwujud (4) Aset Lain-lain. Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp48.554.163.767,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp48.801.954.014,00.

**Tabel 236**  
**Rincian Aset Lainnya Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>ASET LAINNYA</b>		
1. Tuntutan Ganti Rugi	95.624.475,00	367.540.703,00
2. Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00	(14.749.073,76)
3. Tuntutan Ganti Rugi Netto (1+2)	95.624.475,00	352.791.629,24
4. Aset Tak Berwujud	46.072.036.544,00	45.326.412.544,00
5. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(30.446.625.585,00)	(25.993.865.748,00)
6. Aset Tak Berwujud Netto (4+5)	15.625.410.959,00	19.332.546.796,00
7. Aset Lain-lain	32.833.128.333,00	30.460.772.190,00
8. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	(1.344.156.601,00)
9. Aset Lain-lain Netto (7+8)	32.833.128.333,00	29.116.615.589,00
<b>Jumlah Aset Lainnya (3+6+9)</b>	<b>48.554.163.767,00</b>	<b>48.801.954.014,24</b>

#### 7.11.1.3.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang - Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tagihan Janga Panjang merupakan Reklasifikasi dari Tuntutan Gati Rugi (TGR) sebesar Rp95.624.475,00 yang terdiri dari :

1. Piutang Tuntutan Ganti Rugi atas nama Tarmizi sebesar Rp30.490.425,00 berdasarkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak tanggal 10 September 2019;
2. Piutang Tuntutan Ganti Rugi atas nama Regarani Pratiwi sebesar Rp65.134.050,00 berdasarkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak bulan Maret 2019.

7.11.1.3.1.4.2. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), hak paten, dan hak lainnya, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Saldo akhir per 31 Desember 2019, Aset Tak Berwujud sebesar Rp46.072.036.544,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp45.326.412.544,00 pada masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 237  
Penambahan dan Pengurangan Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2019  
(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.877.260.400,00	0,00	0,00	1.877.260.400,00
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	25.228.907.600,00	0,00	0,00	25.228.907.600,00
Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	4.444.099.000,00	0,00	0,00	4.444.099.000,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	2.094.508.500,00	0,00	0,00	2.094.508.500,00
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	17.669.400,00	0,00	0,00	17.669.400,00
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	77.640.000,00	0,00	0,00	77.640.000,00
Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja	247.828.000,00	0,00	0,00	247.828.000,00
Sekretariat Daerah	1.964.714.000,00	0,00	0,00	1.964.714.000,00
Sekretariat DPRD	39.600.000,00	0,00	0,00	39.600.000,00
Badan Keuangan Daerah	993.215.000,00	0,00	0,00	993.215.000,00
Inspektorat	186.500.000,00	0,00	0,00	186.500.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	531.685.000,00	0,00	0,00	531.685.000,00
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	69.410.000,00	0,00	0,00	69.410.000,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.065.760.500,00	525.624.000,00	0,00	6.591.384.500,00
Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	1.247.500.000,00	220.000.000,00	0,00	1.467.500.000,00
Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian	240.115.144,00	0,00	0,00	240.115.144,00
Jumlah	45.326.412.544,00	745.624.000,00	0,00	46.072.036.544,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp30.446.625.585,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 238  
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2019  
(Dalam Rupiah)

SKPD	Amortisasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2018	Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2019	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	(1.422.193.960,00)	(135.904.480,00)	(1.558.098.440,00)
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(12.433.162.697,00)	(2.522.890.760,00)	(14.956.053.457,00)
Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	(3.176.871.500,00)	(434.478.000,00)	(3.611.349.500,00)

SKPD	Amortisasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2018	Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2019	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	(1.276.130.171,00)	(210.239.183,00)	(1.486.369.354,00)
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	(5.889.800,00)	0,00	(5.889.800,00)
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	(74.010.000,00)	(3.630.000,00)	(77.640.000,00)
Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja	(117.666.733,00)	(24.782.800,00)	(142.449.533,00)
Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	(1.407.457.483,00)	(94.184.200,00)	(1.501.641.683,00)
Sekretariat DPRD	(39.600.000,00)	0,00	(39.600.000,00)
Badan Keuangan Daerah	(562.592.833,00)	(81.366.750,00)	(643.959.583,00)
Inspektorat	(186.500.000,00)	0,00	(186.500.000,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(531.685.000,00)	0,00	(531.685.000,00)
Kecamatan Siantan	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	(60.335.000,00)	(9.075.000,00)	(69.410.000,00)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(3.977.316.017,00)	(773.557.450,00)	(4.750.873.467,00)
Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	(634.145.833,00)	(124.750.000,00)	(758.895.833,00)
Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian	(88.308.721,00)	(37.901.214,00)	(126.209.935,00)
Jumlah	(25.993.865.748,00)	(4.452.759.837,00)	(30.446.625.585,00)

Nilai buku aset tak berwujud Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp15.625.410.959,00 pada masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 239  
Nilai Buku Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

SKPD	Aset Tak Berwujud Tahun 2019	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	Saldo Akhir/Nilai Buku Tahun 2019
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.877.260.400,00	(1.558.098.440,00)	319.161.960,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	25.228.907.600,00	(14.956.053.457,00)	10.272.854.143,00
Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	4.444.099.000,00	(3.611.349.500,00)	832.749.500,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	2.094.508.500,00	(1.486.369.354,00)	608.139.146,00
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	17.669.400,00	(5.889.800,00)	11.779.600,00
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	77.640.000,00	(77.640.000,00)	0,00
Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja	247.828.000,00	(142.449.533,00)	105.378.467,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	1.964.714.000,00	(1.501.641.683,00)	463.072.317,00

SKPD	Aset Tak Berwujud Tahun 2019	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	Saldo Akhir/Nilai Buku Tahun 2019
Sekretariat DPRD	39.600.000,00	(39.600.000,00)	0,00
Badan Keuangan Daerah	993.215.000,00	(643.959.583,00)	349.255.417,00
Inspektorat	186.500.000,00	(186.500.000,00)	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	531.685.000,00	(531.685.000,00)	0,00
Kecamatan Siantan	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	69.410.000,00	(69.410.000,00)	0,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.591.384.500,00	(4.750.873.467,00)	1.840.511.033,00
Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	1.467.500.000,00	(758.895.833,00)	708.604.167,00
Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian	240.115.144,00	(126.209.935,00)	113.905.209,00
Jumlah	(46.072.036.544,00)	(30.446.625.585,00)	15.625.410.959,00

7.11.1.3.1.4.3. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset dalam kondisi rusak berat berdasarkan usulan dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif karena rusak berat pemakaian. Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp32.833.128.333,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp30.460.772.190,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 240  
Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain per SKPD Tahun 2019

(Dalam Rupiah)				
SKPD	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	6.920.376.089,00	2.051.182.719,00	6.820.475.390,00	2.151.083.418,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	228.920.000,00	884.760.000,00	0,00	1.113.680.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.806.559.920,00	0,00	0,00	3.806.559.920,00
Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	936.628.000,00	0,00	0,00	936.628.000,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	712.052.000,00	5.152.639.000,00	0,00	5.864.691.000,00
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	98.450.000,00	0,00	0,00	98.450.000,00
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	568.074.050,00	0,00	0,00	568.074.050,00
Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja	169.547.000,00	0,00	0,00	169.547.000,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah	973.474.002,00	0,00	0,00	973.474.002,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	665.194.500,00	0,00	0,00	665.194.500,00

SKPD	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Sekretariat Daerah	6.278.771.674,00	2.080.090.000,00	2.080.090.000,00	6.278.771.674,00
Sekretariat DPRD	261.434.000,00	0,00	0,00	261.434.000,00
Badan Keuangan Daerah	935.401.839,00	0,00	0,00	935.401.839,00
Inspektorat	220.532.000,00	0,00	0,00	220.532.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	177.366.000,00	1.104.249.814,00	0,00	1.281.615.814,00
Kecamatan Siantan	674.586.000,00	0,00	0,00	674.586.000,00
Kecamatan Jemaja	1.139.413.599,00	0,00	0,00	1.139.413.599,00
Kecamatan Palmatak	844.072.801,00	0,00	0,00	844.072.801,00
Kecamatan Siantan Timur	466.565.900,00	0,00	0,00	466.565.900,00
Kecamatan Siantan Selatan	530.554.300,00	0,00	0,00	530.554.300,00
Kecamatan Jemaja Timur	256.318.500,00	0,00	0,00	256.318.500,00
Kecamatan Siantan Tengah	185.599.000,00	0,00	0,00	185.599.000,00
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	500.922.000,00	0,00	0,00	500.922.000,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	296.294.000,00	0,00	0,00	296.294.000,00
Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	1.172.511.316,00	0,00	0,00	1.172.511.316,00
Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian	1.441.153.700,00	0,00	0,00	1.441.153.700,00
Jumlah	30.460.772.190,00	11.272.921.533,00	8.900.565.390,00	32.833.128.333,00

7.11.1.3.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Jumlah Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp11.410.928.666,00.

7.11.1.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman (bagian lancar utang jangka panjang dan utang kepada pihak ketiga), utang bunga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), serta utang jangka pendek lainnya. Kewajiban jangka pendek yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp11.410.928.666,00. terdiri dari:

- 1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) atas Potongan Pajak yang belum disetorkan oleh Bendahara Dana BOS ke Kas Negara sebesar Rp19.415.831,00
- 2. Utang beban Tahun 2019 sebesar Rp1.272.791.805,00;
- 3. Utang jangka pendek lainnya Tahun 2019 sebesar Rp10.118.721.030,00.

Kewajiban Jangka Pendek dapat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 241  
Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	19.415.831,00	0,00
Utang Beban	1.272.791.805,00	1.639.113.254,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	10.118.721.030,00	8.199.002.387,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	11.410.928.666,00	9.838.115.641,00

7.11.1.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2019 sebesar Rp19.415.831,00 yang merupakan Potongan Pajak yang telah dipungut namun belum disetorkan oleh Bendahara Dana BOS ke Kas Negara, sehingga menjadi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dengan Mutasi Penambahan dan Pengurangan Utang Perhitungan Pihak Ketiga dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 242  
Mutasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Utang PFK	0,00	74.625.543.462,36	74.606.127.631,36	19.415.831,00
Jumlah	0,00	74.625.543.462,36	74.606.127.631,36	19.415.831,00

Mutasi penambahan utang perhitungan pihak ketiga pada Bendahara Umum Daerah sebesar Rp74.625.937.962,36 dan Mutasi Pengurangan pihak ketiga pada Bendahara Umum Daerah sebesar Rp74.606.127.631,36 sehingga saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2019 sebesar Rp19.810.331,00 yang merupakan Pajak yang sudah dipotong dan belum disetor ke kas negara oleh Bendahara BOS.

Mutasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 243  
Data Mutasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)  
pada Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal Tahun 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Tahun 2019
1	Iuran Wajib Pegawai	0,00	7.026.588.840,00	7.026.588.840,00	0,00
2	Taperum	0,00	144.718.000,00	144.718.000,00	0,00
3	Askes	0,00	2.127.391.094,00	2.127.391.094,00	0,00
4	PPh Pasal 21	0,00	12.241.568.565,00	12.241.032.414,00	536.151,00
5	PPh Pasal 22	0,00	1.396.319.546,09	1.395.377.166,09	906.780,00
6	PPh Pasal 23	0,00	811.504.932,00	811.324.932,00	247.400,00
7	PPh Pasal 4 Ayat (2)	0,00	7.246.502.250,00	7.246.502.250,00	0,00
8	PPN	0,00	39.777.631.529,27	39.759.874.229,27	17.725.500,00
9	Iuran BPJS 3%	0,00	2.312.459.915,00	2.312.459.915,00	0,00
10	Iuran BPJS 2%	0,00	1.540.540.610,00	1.540.540.610,00	0,00
11	PPh Final Transaksi Sewa	0,00	318.181,00	318.181,00	0,00
Jumlah		0,00	74.625.543.462,36	74.606.127.631,36	19.415.831,00

Data mutasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 244  
Data Mutasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)  
pada Bendahara Umum Daerah (BUD) Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal Tahun 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Tahun 2019
1	Iuran Wajib Pegawai	0,00	7.026.588.840,00	7.026.588.840,00	0,00
2	Taperum	0,00	144.718.000,00	144.718.000,00	0,00
3	Askes	0,00	2.127.391.094,00	2.127.391.094,00	0,00
4	PPh Pasal 21	0,00	11.718.399.889,00	11.718.399.889,00	0,00
5	PPh Pasal 22	0,00	1.225.691.718,09	1.225.691.718,09	0,00
6	PPh Pasal 23	0,00	356.229.916,00	356.229.916,00	0,00
7	PPh Pasal 4 Ayat (2)	0,00	7.230.014.750,00	7.230.014.750,00	0,00
8	PPN	0,00	38.062.348.949,27	38.062.348.949,27	0,00
9	Iuran BPJS 3%	0,00	2.312.459.915,00	2.312.459.915,00	0,00
10	Iuran BPJS 2%	0,00	1.540.540.610,00	1.540.540.610,00	0,00
Jumlah		0,00	71.744.383.681,36	71.744.383.681,36	0,00

Data mutasi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 245**  
**Data Mutasi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**  
**pada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal Tahun 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Tahun 2019
1	PPh Pasal 21	0,00	522.632.525,00	522.632.525,00	0,00
2	PPh Pasal 22	0,00	169.649.848,00	169.685.448,00	(35.600,00)
3	PPh Pasal 23	0,00	455.162.416,00	455.095.016,00	67.400,00
4	PPh Pasal 4 Ayat (2)	0,00	16.487.500,00	16.487.500,00	0,00
5	PPN	0,00	1.697.493.480,00	1.697.525.280,00	(31.800,00)
6	PPh Final Transaksi Sewa	0,00	318.181,00	318.181,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>2.861.743.950,00</b>	<b>2.861.743.950,00</b>	<b>0,00</b>

Utang Perhitungan Fihak Ketiga yang merupakan Pajak yang sudah dipotong dan belum disetor ke kas negara oleh Bendahara BOS Tahun Anggaran 2019 dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 246**  
**Data Mutasi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**  
**pada Bendahara Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal Tahun 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Tahun 2019
1	PPh Pasal 21	0,00	536.151,00	0,00	536.151,00
2	PPh Pasal 22	0,00	942.380,00	0,00	942.380,00
3	PPh Pasal 23	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
5	PPN	0,00	17.757.300,00	0,00	17.757.300,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>19.415.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.415.831,00</b>

#### 7.11.1.3.2.1.2 Utang Beban

Utang Beban berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan akhir priode anggaran. Akun ini pada umumnya muncul di satuan kerja perangkat daerah, yang melakukan kegiatan perolehan barang/jasa. Jumlah utang beban yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.272.791.805,00 yang terdiri dari Utang Beban atas Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 pekerjaan telah selesai dilaksanakan namun belum dilakukan pencairan dikarenakan proses pengajuan pencairan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp398.128.000,00, serta Koreksi Utang Beban Pegawai Atas Jasa Pelayanan RSUD Jemaja, RSUD Palmatak dan Puskesmas Tarempa Tahun 2019 Yang Belum Dibayarkan sebesar Rp874.663.805,00.

**Tabel 247**  
**Mutasi Utang Beban Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Utang Beban	1.639.113.254,00	1.611.469.281,00	1.977.790.730,00	1.272.791.805,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.639.113.254,00</b>	<b>1.611.469.281,00</b>	<b>1.977.790.730,00</b>	<b>1.272.791.805,00</b>

Mutasi penambahan dan pengurangan pada Utang Beban Tahun Anggaran 2019, sehingga saldo utang beban per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.272.791.805,00 pada masing-masing SKPD sebagai berikut.

**Tabel 248**  
**Utang Beban per SKPD Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	0,00



SKPD	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.396.986.520,00	882.803.805,00	1.405.126.520,00	874.663.805,00
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	722.494.000,00	324.366.000,00	398.128.000,00
Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	800,00	0,00	800,00	0,00
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	0,00
Sekretariat Daerah	7.333.524,00	6.166.476,00	13.500.000,00	0,00
Sekretariat DPRD	55.492.060,00	0,00	55.492.060,00	0,00
Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	171.240.350,00	0,00	171.240.350,00	0,00
Jumlah	1.639.113.254,00	1.611.469.281,00	1.977.790.730,00	1.272.791.805,00

Dari tabel 250 diketahui saldo utang beban per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.272.791.805,00, berikut rincian saldo utang beban tersebut.

Tabel 249  
Daftar Penambahan Utang Beban Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

SKPD	Nama Pekerjaan	Nilai Utang Beban
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belanja Pegawai Atas Jasa Pelayanan RSUD Jemaja, RSUD Palmatak dan Puskesmas Tarempa Tahun 2019 Yang Belum Dibayarkan	874.663.805,00
Jumlah		874.663.805,00
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Belanja Barang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (Pembayaran Termin 100% Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor di Kecamatan Jemaja Timur)	15.708.000,00
	Belanja Barang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (Pembayaran Termin 100% Perencanaan Pembangunan Jalan Masuk Menuju Kantor Mapolres Kabupaten Kepulauan Anambas)	69.795.000,00
	Belanja Barang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (Pembayaran Termin 100% Pengawasan Pembangunan Masjid Tahap I Gudang Tengah)	16.280.000,00
	Belanja Barang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (Pembayaran Termin 100% Perencanaan Revitalisasi Masjid Nurul Ikhsan Desa Tarempa Barat)	98.395.000,00
	Dilakukan Reklasifikasi dari Utang Jangka Pendek Lainnya ke Utang Beban atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Pembayaran Termin 100% Pemasangan Paving Blok Kantor Desa dan Bali Desa Ulu Maras Kecamatan Jemaja Timur)	197.950.000,00
Jumlah		398.128.000,00
Total		1.272.791.805,00

7.11.1.3.2.1.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang belanja modal Tahun Anggaran berkenaan, selain bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga (*account payable*), utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, dan uang muka. Utang jangka pendek lainnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp10.118.721.030,00.

Tabel 250  
Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Utang Jangka Pendek Lainnya	8.199.002.387,00	7.666.509.667,00	5.746.791.024,00	10.118.721.030,00
Jumlah	8.199.002.387,00	7.666.509.667,00	5.746.791.024,00	10.118.721.030,00

Dari tabel 252 diketahui saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.118.721.030,00, berikut rincian saldo utang jangka pendek lainnya tersebut.

**Tabel 251**  
**Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya pada SKPD Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8.182.012.387,00	2.807.949.095,00	5.729.801.024,00	5.260.160.458,00
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	4.332.991.276,00	0,00	4.332.991.276,00
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	525.569.296,00	0,00	525.569.296,00
Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	9.950.000,00	0,00	9.950.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.199.002.387,00</b>	<b>7.666.509.667,00</b>	<b>5.746.791.024,00</b>	<b>10.118.721.030,00</b>

Berdasarkan tabel diatas masih terdapat utang jangka pendek lainnya pada Tahun 2019 yang belum dilakukan pelunasan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, maka pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan penganggaran dan melakukan pelunasan atas utang jangka pendek lainnya dan apabila ada kewajiban Pihak Ketiga terhadap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, maka akan dilakukan pemotongan dari SP2D Pelunasan atas Utang Jangka Pendek Lainnya pada Tahun Anggaran 2020.

Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat Penambahan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp8.199.002.387,00, dan pada Tahun 2019 dilakukan pelunasan sebesar Rp5.746.791.024,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Sisa Paket Pekerjaan Pemasangan Bronjong dan Landscape Kantor Bupati Kepulauan Anambas sebesar Rp370.193.178,91, pada Tahun 2019 belum dilakukan pelunasan karena terdapat kekurangan volume sebesar Rp280.762.318,34 dan Denda Keterlambatan sebesar Rp168.269.626,50, sehingga Kekurangan volume dan denda keterlambatan lebih besar dari Sisa Paket Pekerjaan yang diakui utang Jangka Pendek Lainnya;
2. Sisa Paket Lanjutan Pembangunan Tambahan Ruang RSUD Tarempa sebesar Rp799.865.501,00, pada Tahun 2019 belum dilakukan pelunasan karena terdapat kekurangan volume sebesar Rp1.344.300.491,83 dan Denda Keterlambatan sebesar Rp363.575.267,61, sehingga kekurangan volume dan denda keterlambatan lebih besar dari Sisa Paket Pekerjaan yang diakui utang Jangka Pendek Lainnya;
3. Sisa Paket Peningkatan Jalan Genting - Desa Kecamatan Siantan selatan sebesar Rp216.528.116,00 dan Pada Tahun 2019 dilakukan penganggaran dan pelunasan sebesar Rp178.824.057,00 yang merupakan Sisa Paket Pekerjaan setelah dikurangi temuan kekurangan volume pekerjaan.
4. Sisa Paket Pembagunan Jalan Putik - Teluk Pring Kecamatan Palmatak (Silpa DAK) sebesar Rp6.795.425.591,00 dan pada Tahun 2019 dilakukan Penganggaran dan pelunasan sebesar Rp5.550.976.967,00 dimana nilai Sisa Paket Pekerjaan Pekerjaan dikurangi kekurangan volume sebesar Rp5.588.641.026,36 sehingga kekurangan kewajiban kepada Pihak Ketiga sebesar Rp37.684.058,00.
5. Belanja Modal Infokes Kegiatan Penyediaan Rutinitas Perkantoran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa sebesar Rp7.040.000,00 pada Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan penganggaran dan pelunasan sebesar Rp7.040.000,00;
6. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar Puskesmas Hewan sebesar Rp9.950.000,00 Pada Tahun 2019 Pihak Ketiga melakukan pernyataan tidak akan melakukan penagihan kembali kepada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan sehingga telah dilakukan Jurnal Koreksi Penghapusan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp9.950.000,00.

Adapun Rincian Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya pada Tahun Anggaran 2019 dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 252**  
**Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya pada SKPD Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

SKPD	Nama Pekerjaan	Nilai Utang Jk Pendek Lainnya
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Pembayaran Termin 100% Perencanaan Pembangunan Lanjutan Pelantar Beton Bertulang Desa Genting Pulur Kecamatan Jemaja Timur)	19.855.000,00
	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Pembayaran Termin 100% Perencanaan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan Kecamatan Jemaja Timur)	51.700.000,00
	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Pembayaran Termin 100% Perencanaan Lanjutan Pembangunan Jalan Beton Jalur Laut dari Kampung Sunjuk Menuju Kampung Tumuk Desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur)	14.960.000,00
	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Pembayaran Termin 100% Pengawasan Pembangunan Jalan Pelantar Beton Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur)	44.605.000,00
	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan dan Bangunan (Pembayaran Termin 100% Perencanaan Pembangunan Jalan Pelantar Beton Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur)	74.635.000,00
	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Pembayaran Termin 100% Perencanaan Pembangunan Jalan Pelantar Beton Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur)	29.744.000,00
	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Pembayaran Termin 100% Pengawasan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan Jemaja dan Jemaja Timur)	36.575.000,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Pembayaran Termin 100% Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor di Kecamatan Jemaja Timur)	25.872.000,00
	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Pembayaran Termin 100% Perencanaan Rehabilitasi dan Preservasi Ruas Jalan Se-Kabupaten Kepulauan Anambas)	49.555.000,00
	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Pembayaran Termin 100% Pengawasan Rehabilitasi dan Preservasi Ruas Jalan Se-Kabupaten Kepulauan Anambas)	49.670.000,00
	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Pembayaran Termin 100% Pembangunan Penampung Air Desa Payalaman Kecamatan Palmatak (Lanjutan))	73.870.000,00
	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Pembayaran Termin 100% DED Peningkatan Jalan Rewak - Sedanau)	99.044.000,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Pembayaran Termin 100% Pengawasan Pembangunan Jalan Masuk Menuju Kantor Bupati KKA)	12.144.000,00
	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Pembayaran Termin 100% Pengawasan Pembangunan Jalan Pelantar Seberang Dermaga I Timur Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja)	98.780.000,00
	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Pembayaran Termin 100% Pengawasan Pembangunan Lanjutan Pelantar Beton Bertulang Desa Genting Pulur Kecamatan Jemaja Timur)	12.419.000,00
	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Pembayaran Termin 100% DED Jalan Atap Semuak - Teluk Kaut Kecamatan Jemaja)	98.249.000,00
	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Pembayaran Termin 100% Pembangunan Reservoir dan Jaringan SPAM IKK Siantan)	862.219.176,00
	Renovasi Talaud Pemecah Ombak Dsa Mengkait Dusun I dan Dusun II Desa Mengkait Kecamatan Siantan Selatan	188.858.220,00
	Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Kepulauan Anambas	953.098.699,00
	Pengawasan Batu Miring Desa Tarempa Selatan	12.096.000,00
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembangunan Puskesmas Kecamatan Siantan Tengah	1.457.714.526,00
	Pembangunan Puskesmas Kecamatan Palmatak	2.875.276.750,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas	525.569.296,00
<b>Total Utang Jangka Pendek Lainnya TA. 2019</b>		<b>7.666.509.667,00</b>

#### 7.11.1.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Pada Tahun Anggaran 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak memiliki kewajiban jangka panjang yang akan dibayar pada masa mendatang.

#### 7.11.1.3.3. Ekuitas

Ekuitas merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.893.592.983.371,80 dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp1.649.904.219.242,99.

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Saldo Ekuitas dan Kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.905.003.306.537,80 dibandingkan Ekuitas dan Kewajiban per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.659.742.334.883,99 mengalami kenaikan sebesar Rp 245.260.971.653,81 atau sebesar 14,78%, hal ini disebabkan adanya penambahan Aset Tetap dan adanya Penambahan Kewajiban Jangka Pendek Lainnya pada Tahun Anggaran 2019.

**Tabel 253**  
**Ekuitas Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Ekuitas	1.893.592.983.371,80	1.649.904.219.242,99
Jumlah Ekuitas	1.893.592.983.371,80	1.649.904.219.242,99

#### 7.11.1.4. LAPORAN OPERASIONAL

##### 7.11.1.4.1. Pendapatan - LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan - LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah.

Pendapatan LO telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 254**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	36.656.366.602,65	35.500.933.133,12	1.155.433.469,53	3,25
2	Pendapatan Transfer	1.056.429.326.830,00	788.955.375.703,28	267.473.951.126,72	33,90
3	Pendapatan Lain-Lain Yang Sah	10.842.598.855,01	49.224.170.027,65	(38.381.571.172,64)	(77,97)
<b>JUMLAH</b>		<b>1.103.928.292.287,66</b>	<b>873.680.478.864,05</b>	<b>230.247.813.423,61</b>	<b>26,35</b>

Realisasi Pendapatan LO Tahun 2019 sebesar Rp1.103.928.292.287,66 mengalami kenaikan sebesar Rp230.247.813.423,61 atau 26,35% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp873.680.478.864,05. Masing-masing akun pendapatan LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

7.11.1.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Akun PAD ini merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2019 dan 2018. Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp36.706.972.336,65 dibandingkan dengan Tahun 2018 yang terealisasi sebesar Rp35.500.933.133,12 mengalami kenaikan sebesar Rp1.206.039.203,53 atau naik sebesar 3,40% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 255  
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Pendapatan Asli Daerah	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah- LO	16.953.661.566,36	17.939.077.147,00	(985.415.580,64)	(5,49)
2.	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	4.990.159.942,00	2.960.171.548,79	2.029.988.393,21	68,58
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO	1.451.789.587,00	1.934.686.786,00	(482.897.199,00)	(24,96)
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO	13.260.755.507,29	12.666.997.651,33	593.757.855,96	4,69
JUMLAH		36.656.366.602,65	35.500.933.133,12	1.155.433.469,53	3,25

7.11.1.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2019, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2019 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan Tahun 2019. Pembayaran atas piutang Tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp16.953.661.566,36 dibandingkan dengan Tahun 2018 yang terealisasi sebesar Rp17.939.077.147,00 mengalami penurunan sebesar Rp985.415.580,64 atau turun (5,49)% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 256  
Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel – LO	4.086.851.395,36	2.444.817.006,00	1.642.034.389,36	67,16
2	Pajak Restoran – LO	981.596.683,00	877.428.380,00	104.168.303,00	11,87
3	Rumah Makan – LO	457.606.955,00	207.969.986,00	249.636.969,00	120,04
4	Kantin – LO	4.023.000,00	4.337.800,00	(314.800,00)	(7,26)
5	Katering – LO	7.431.867.560,00	9.459.835.073,00	(2.027.967.513,00)	(21,44)
6	Kedai Kopi – LO	149.344.348,00	96.538.341,00	52.806.007,00	54,70
7	Pajak Diskotik, Karaoke, Club Malam, dan Sejenisnya – LO	132.400.995,00	83.766.900,00	48.634.095,00	58,06
8	Permainan Bilyar, Golf dan Bowling	1.084.200,00	565.600,00	518.600,00	91,69
9	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO	10.113.309,00	0,00	10.113.309,00	0,00
10	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes Centre)-LO	2.031.000,00	7.269.180,00	(5.238.180,00)	(72,06)
11	Tontonan Film/Bioskop – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pajak Reklame – LO	14.613.608,00	14.962.500,00	(348.892,00)	(2,33)
13	Pajak Reklame Kain - LO	3.336.800,00	0,00	3.336.800,00	0,00
14	Pajak Penerangan Jalan PLN – LO	1.842.660.801,00	1.623.553.873,00	219.106.928,00	13,50
15	Pajak Penerangan Jalan Non PLN – LO	696.103.329,00	2.049.047.150,00	(1.352.943.821,00)	(66,03)

No	Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
16	Pajak Air Tanah – LO	3.845.216,00	4.933.229,00	(1.088.013,00)	(22,05)
17	Pajak Sarang Burung Walet	12.200.000,00	10.500.000,00	1.700.000,00	16,19
18	Granit/Andesit – LO	7.972.697,00	0,00	7.972.697,00	0,00
19	Pasir dan kerikil - LO	118.837.290,00	0,00	118.837.290,00	0,00
20	Tanah Liat - LO	21.774.174,00	0,00	21.774.174,00	0,00
21	Pajak Mineral Bukan Logam dari Batuan – LO	3.907.128,00	52.441.562,00	(48.534.434,00)	(92,55)
22	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan – LO	389.834.617,00	381.399.092,00	8.435.525,00	2,21
23	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	581.656.461,00	619.711.475,00	(38.055.014,00)	(6,14)
JUMLAH		16.953.661.566,36	17.939.077.147,00	(985.415.580,64)	(5,49)

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Asli Daerah pada LO dengan Pendapatan Asli Daerah pada LRA sebagai berikut.

Tabel 257  
Perbedaan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA Tahun 2019  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Pendapatan Pajak Daerah	16.953.661.566,36	16.913.698.911,36	39.962.655,00
Jumlah		16.953.661.566,36	16.913.698.911,36	39.962.655,00

Berdasarkan tabel diatas terdapat Selisih antara Pendapatan Pajak Daerah - LO dengan Pendapatan Pajak Daerah - LRA Tahun 2019 adalah sebesar Rp39.962.655,00 terdiri dari :

- Penambahan Piutang Pajak Daerah (PBBP2) TA 2019 :Rp 516.090.368,00
- Pengurangan Piutang Pajak Daerah (PBBP2) TA 2019:(Rp 476.127.713,00)
- Selisih Pendapatan Pajak Daerah (LO dan LRA) :Rp 39.962.655,00

7.11.1.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dipungut dan dikelola oleh 5 (lima) SKPD penghasil yaitu Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas didasarkan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp4.990.159.942,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.029.988.393,21 atau 68,58% dibandingkan dengan Tahun 2018 yang terealisasi sebesar Rp2.960.171.548,79 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 258  
Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas – LO	4.740.310.620,00	2.770.741.662,79	1.969.568.957,21	71,08
2	Penyediaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum –LO	68.190.000,00	73.115.000,00	(4.925.000,00)	(6,74)
3	Pelayanan Jasa Kepelabuhan – LO	50.471.000,00	55.238.000,00	(4.767.000,00)	(8,63)
4	Pelayanan Pasar– LO	87.688.170,00	29.290.832,00	58.397.338,00	199,37
5	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan – LO	43.500.152,00	22.646.254,00	20.853.898,00	92,09

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
6	Pemberian Izin Gangguan Tempat Usaha / Kegiatan Kepada Orang Pribadi – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pemberian Izin Gangguan Tempat Usaha / Kegiatan Kepada Badan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pemberian Izin Usaha Perikanan Kepada Orang Pribadi – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pemberian Izin Usaha Perikanan Kepada Orang Badan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pemberian Perpanjangan Kepada Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) – LO	0,00	9.139.800,00	(9.139.800,00)	(100,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>4.990.159.942,00</b>	<b>2.960.171.548,79</b>	<b>2.029.988.393,21</b>	<b>68,58</b>

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Asli Daerah pada LO dengan Pendapatan Asli Daerah pada LRA sebagai berikut.

**Tabel 259**  
**Perbedaan Realisasi Retribusi Daerah LO dan LRA Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Pendapatan Retribusi Daerah	4.990.159.942,00	4.998.895.282,00	8.735.340,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.990.159.942,00</b>	<b>4.998.895.282,00</b>	<b>8.735.340,00</b>

Berdasarkan tabel diatas terdapat Selisih antara Pendapatan Retribusi Daerah - LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah - LRA Tahun 2019 adalah sebesar Rp8.735.340,00 yang merupakan Pendapatan Retribusi sewa pasar kios dan loss pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018 yang dibayarkan pada Tahun 2019.

#### 7.11.1.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan ini adalah Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Bank Riau Kepri. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.451.789.587,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.934.686.786,00 mengalami penurunan sebesar Rp482.897.199,00, tidak terdapat perbedaan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada LRA, berikut rinciannya.

**Tabel 260**

**Realiasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2019 dan 2018**  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan /Penurunan	%
1	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri - LO	1.451.789.587,00	1.934.686.786,00	(482.897.199,00)	(24,96)
<b>JUMLAH</b>		<b>1.451.789.587,00</b>	<b>1.934.686.786,00</b>	<b>(482.897.199,00)</b>	<b>(24,96)</b>

Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO dengan Pendapatan Asli Daerah - LRA dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 261**

**Perbedaan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dan LRA Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.451.789.587,00	1.451.789.587,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.451.789.587,00</b>	<b>1.451.789.587,00</b>	<b>0,00</b>

Berdasarkan tabel diatas tidak terdapat selisih antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA Tahun 2019.

#### 7.11.1.4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah - LO

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD untuk periode 31 Desember 2019 sebesar Rp13.260.755.507,29 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp12.666.997.651,33 mengalami kenaikan sebesar Rp593.757.857,29 atau 4,69%. Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 262**  
**Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Jasa Giro Daerah – LO	970.922.439,00	1.287.330.969,00	(316.408.530,00)	(24,58)
2	Pendapatan Bunga – LO	0,00	4.158.754.635,00	(4.158.754.635,00)	(100,00)
3	Pendapatan Bunga Deposito – LO	6.121.070.741,00	0,00	6.121.070.741,00	0,00
4	Pendapatan Bunga Dana Bergulir – LO	41.744.394,00	0,00	41.744.394,00	0,00
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bendahara – LO	0,00	258.963.105,00	(258.963.105,00)	(100,00)
6	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara -	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pendapatan Denda Pajak Hotel – LO	0,00	42.400,00	(42.400,00)	(100,00)
10	Pendapatan Denda Pajak Restoran – LO	505.476.475,00	942.644,00	504.533.831,00	53.523,26
11	Pendapatan Denda PBBP2 – LO	17.487.897,00	0,00	17.487.897,00	0,00
12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	59.557.652,00	0,00	59.557.652,00	0,00
13	Pendapatan Denda Pajak Hiburan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Pendapatan Denda Pajak Reklame – LO	0,00	372.000,00	(372.000,00)	(100,00)
15	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar – LO	0,00	1.200,00	(1.200,00)	(100,00)
19	Hasil Eksekusi Atas Jaminan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa – LO	0,00	589.908.308,00	(589.908.308,00)	(100,00)
20	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan – LO	1.434.375,00	159.815.000,00	(158.380.625,00)	(99,10)
21	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas – LO	12.398.676,00	28.673.868,00	(16.275.192,00)	(56,76)
22	Pendapatan dari Pengembalian Raskin Otonom – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pendapatan dari Pengembalian UYHD Tahun Lalu – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pendapatan dari Pengembalian Barang dan Jasa – LO	150.047.168,60	46.352.866,00	103.694.302,60	223,71
25	Pendapatan dari Pengembalian Belanja Tidak Langsung (BTL) – LO	487.789.623,00	344.899.432,00	142.890.191,00	41,43



No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaiikan/ Penurunan	%
26	Pendapatan dari Pengembalian Kesalahan Pembayaran Atau Perhitungan – LO	0,00	53.801.766,00	(53.801.766,00)	(100,00)
27	Pendapatan dari Pengembalian Kesalahan Pembayaran PT. Taspen – LO	39.240.911,00	8.400.000,00	30.840.911,00	367,15
28	Pendapatan dan Pengembalian Kerugian Ke Kas Daerah (TP/TGR)	1.672.572.932,00	2.786.719.390,00	(1.114.146.458,00)	(39,98)
29	Pendapatan dari Pengembalian Lainnya di Tahun Sebelumnya	236.681.000,00	0,00	236.681.000,00	0,00
30	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa – LO	18.819.500,00	0,00	18.819.500,00	0,00
31	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya – LO	771.207,00	77.400.000,00	(76.628.793,00)	(99,00)
32	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Tarempa – LO	840.755.131,00	859.241.700,00	(18.486.569,00)	(2,15)
35	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Palmatak – LO	796.737.575,00	820.265.440,00	(23.527.865,00)	(2,87)
36	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Siantan Timur – LO	248.958.633,00	209.780.158,00	39.178.475,00	18,68
37	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Siantan Selatan – LO	209.974.899,00	165.308.500,00	44.666.399,00	27,02
38	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Jemaja Timur – LO	218.744.947,35	156.541.500,00	62.203.447,35	39,74
39	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Letung - LO	380.522.204,65	398.134.500,00	(17.612.295,35)	(4,42)
40	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Siantan Tengah – LO	181.717.051,00	240.829.000,00	(59.111.949,00)	(24,55)
41	Pendapatan Dana Non Kapitasi	0,00	14.519.269,00	(14.519.269,00)	(100,00)
42	Dana Bantuan Operasional Sekolah	47.330.075,69	0,00	47.330.075,69	0,00
JUMLAH		13.260.755.507,29	12.666.997.651	593.757.857,29	4,69

Penjelasan Perbedaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada LO dengan Pendapatan Asli Daerah pada LRA sebagai berikut.

Tabel 263  
Perbedaan Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah LO dan LRA Tahun 2019

(Dalam Rupiah)				
No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Lain-lain PAD Yang Sah	13.260.755.507,29	13.195.937.534,60	64.817.972,69
Jumlah		13.260.755.507,29	13.195.937.534,60	64.817.972,69

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Lain-lain PAD Yang Sah - LRA dengan Lain-lain PAD Yang Sah - LO Pada Tahun 2019 sebesar Rp64.817.972,69 terdiri dari :

1. Sisa Dana BOSDA dan DAK yang disetor ke Kas Daerah Tahun 2020 sebesar Rp47.330.075,69;
2. Koreksi atas Piutang Denda PBBP2 Tahun 2019 sebesar Rp17.487.897,00.

#### 7.11.1.4.1.2. Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diterima dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selaku SKPKD-PPKD. Adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.056.429.326.830,00 mengalami kenaikan sebesar Rp267.473.951.126,72 atau sebesar 33,90% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 yang terealisasi sebesar Rp788.955.375.703,28, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 264**  
**Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaiikan/ Penurunan	%
1	Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)	1.007.483.678.934,00	716.579.765.314,00	290.903.913.620,00	40,60
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus)	0,00	43.487.568.000,00	(43.487.568.000,00)	(100,00)
3	Transfer Pemerintah Provinsi (Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Kepri)	48.945.647.896,00	28.888.042.389,28	20.057.605.506,72	69,43
4	Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya (Bantuan Keuangan dari Provinsi Kepri)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.056.429.326.830,00</b>	<b>788.955.375.703,28</b>	<b>267.473.951.126,72</b>	<b>33,90</b>

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Transfer pada LO dengan Pendapatan Transfer pada LRA sebagai berikut.

**Tabel 265**  
**Perbedaan Realisasi Pendapatan Transfer LO dan LRA Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Lain-lain PAD Yang Sah	1.056.429.326.830,00	1.073.857.267.761,00	17.427.940.931,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.056.429.326.830,00</b>	<b>1.073.857.267.761,00</b>	<b>17.427.940.931,00</b>

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Pendapatan Transfer - LRA dengan Pendapatan Transfer - LO Pada Tahun 2019 sebesar Rp17.427.940.931,00 terdiri dari :

1. Terdapat penambahan piutang transfer pemerintah pusat atas PMK Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar DBH TA 2019 sebesar Rp22.427.670.523,00;
2. Terdapat penambahan piutang transfer pemerintah provinsi atas SK Gubernur Prov Kepri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perhitungan Tunda Salur Bagi Hasil PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok sebesar Rp11.324.063.546,00;
3. Terdapat koreksi kurang atas pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya (Dana Desa) sebesar Rp51.179.675.000,00 karena Dana Desa dikecualikan dari pendapatan transfer LO.

#### 7.11.1.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO

Realiasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode Tahun 2019 secara total terealisasi sebesar Rp1.007.483.678.934,00 mengalami kenaikan sebesar Rp290.903.913.620,00 atau sebesar 40,60%, bila dibandingkan Tahun 2018 yang terealisasi sebesar Rp716.579.765.314,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 266**  
**Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaiikan/ Penurunan	%
1	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan – LO	18.500.142.280,00	0,00	18.500.142.280,00	0,00
2	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan	150.220.912,00	101.221.514,00	48.999.398,00	48,41

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan	16.451.109.094,00	34.156.036.726,00	-17.704.927.632,00	(51,84)
4	Bagi Hasil Dari PPh Ps1 25 dan Ps1 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Ps1 21 – LO	9.576.589.446,00	16.251.232.983,00	-6.674.643.537,00	(41,07)
5	Bagi Hasil Cukai Tembakau-LO	0,00	57.101.400,00	-57.101.400,00	(100,00)
6	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan – LO	86.338.456,00	0,00	86.338.456,00	0,00
7	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan – LO	689.340.471,00	701.234.591,00	-11.894.120,00	(1,70)
8	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi – LO	110.141.284.185,00	54.152.301.439,00	55.988.982.746,00	103,39
9	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi – LO	254.897.086.670,00	139.910.851.661,00	114.986.235.009,00	82,19
10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum – LO	5.118.232.654,00	3.846.943.233,00	1.271.289.421,00	33,05
11	Bagi Hasil Dari Cukai Tembakau – LO	290.418.240,00	228.405.600,00	62.012.640,00	27,15
12	Bagi Hasil Dari Kehutanan – LO	13.064.072,00	44.956.485,00	-31.892.413,00	(70,94)
13	Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	388.403.719.000,00	364.320.074.000,00	24.083.645.000,00	6,61
14	DAK Penugasan Bidang Jalan – LO	12.210.000.000,00	19.386.621.933,00	-7.176.621.933,00	(37,02)
15	DAK Penugasan Bidang Irigasi – LO	6.777.391.239,00	3.631.836.000,00	3.145.555.239,00	86,61
16	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat – LO	4.674.638.935,00	4.560.366.000,00	114.272.935,00	2,51
17	DAK Penugasan Bidang Sanitasi – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
18	DAK Afirmasi Bidang sanitasi – LO	2.014.358.000,00	10.746.881.000,00	-8.732.523.000,00	(81,26)
19	DAK Afirmasi Bidang Air Minum – LO	3.625.468.266,00	4.354.306.910,00	-728.838.644,00	(16,74)
20	DAK Reguler Bidang Kesehatan – LO	25.073.286.419,00	17.167.384.185,00	7.905.902.234,00	46,05
21	DAK Afirmasi Bidang Kesehatan – LO	57.485.045.953,00	0,00	57.485.045.953,00	0,00
22	DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan – LO	2.536.531.960,00	3.784.005.645,00	-1.247.473.685,00	(32,97)
23	DAK Reguler Bidang Pariwisata-LO	0,00	3.537.032.600,00	-3.537.032.600,00	(100,00)
24	DAK Reguler Bidang Pasar – LO	0,00	6.224.823.933,00	-6.224.823.933,00	(100,00)
25	DAK Reguler Bidang Pertanian –LO	849.845.700,00	1.747.859.777,00	-898.014.077,00	(51,38)
26	DAK Reguler Bidang Industri Kecil dan Menengah - LO	12.466.088.127,00	0,00	12.466.088.127,00	0,00
27	DAK Reguler Bidang Jalan - LO	19.125.245.000,00	0,00	19.125.245.000,00	0,00
28	DAK Afirmasi Bidang Pendidikan – LO	3.674.388.994,00	0,00	3.674.388.994,00	0,00
29	DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB - LO	53.822.530,00	0,00	53.822.530,00	0,00
30	DAK Penugasan Bidang Air Minum – LO	1.733.999.998,00	0,00	1.733.999.998,00	0,00
31	DAK Penugasan Pasar - LO	2.963.204.563,00	0,00	2.963.204.563,00	0,00
32	DAK Bidang Lingkungan Hidup – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
33	DAK Bidang Pertanian – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
34	DAK Reguler Bidang Pendidikan – LO	6.153.612.018,00	6.758.000.000,00	-604.387.982,00	(8,94)
35	DAK Afirmasi Bidang Transportasi– LO	0,00	85.000,00	-85.000,00	(100,00)
36	DAK – Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD – LO	6.923.182.520,00	7.704.350.080,00	-781.167.560,00	(10,14)

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
37	DAK – Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD – LO	533.750.000,00	609.000.000,00	-75.250.000,00	(12,36)
38	DAK - Dana Tunjangan Khusus Guru – LO	2.066.791.136,00	2.218.519.000,00	-151.727.864,00	(6,84)
39	DAK - Dana Bantuan Operasional Sekolah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DAK - Dana Bantuan Operasional Kesehatan – LO	4.512.536.213,00	7.174.428.484,00	-2.661.892.271,00	(37,10)
41	DAK - Dana Jaminan Persalinan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DAK - Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana – LO	1.207.194.260,00	1.664.196.400,00	-457.002.140,00	(27,46)
43	DAK - Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	866.800.000,00	648.600.000,00	218.200.000,00	33,64
44	DAK - Dana Akreditasi Puskesmas	328.182.000,00	0,00	328.182.000,00	0,00
45	DAK - Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.012.019.100,00	891.108.735,00	120.910.365,00	13,57
46	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan – LO	161.700.000,00	0,00	161.700.000,00	0,00
47	Dana Akreditasi Rumah Sakit – LO	644.800.000,00	0,00	644.800.000,00	0,00
48	Dana Jaminan Persalinan - LO	406.000.000,00	0,00	406.000.000,00	0,00
49	Dana Pelayanan Kepariwisataa -- LO	658.580.000,00	0,00	658.580.000,00	0,00
50	Pengakuan piutang atas Pendapatan Transfer tahun 2018 sesuai dengan PMK Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH pada TA 2020	22.427.670.523,00	0	22.427.670.523,00	0,00
JUMLAH		1.007.483.678.934,00	716.579.765.314,00	290.903.913.620,00	40,60

7.11.1.4.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO merupakan dana DBH dari Provinsi Kepulauan Riau kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebesar Rp48.945.647.896,00 dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp28.888.042.389,28 mengalami kenaikan sebesar Rp20.057.605.506,72 atau 69,43%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 267  
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO	10.756.782.242,00	7.080.938.253,80	3.675.843.988,20	51,91
2	Pendapatan Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	8.294.300.513,00	4.149.806.473,40	4.144.494.039,60	99,87
3	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	23.471.232.147,00	11.619.835.871,80	11.851.396.275,20	101,99
4	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan - LO	102.949.340,00	32.754.172,50	70.195.167,50	214,31
5	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok-LO	6.320.383.654,00	6.004.707.617,78	315.676.036,22	5,26
JUMLAH		48.945.647.896,00	28.888.042.389,28	20.057.605.506,72	69,43

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya- LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA TA 2019 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 268

**Perbedaan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO dan LRA Tahun 2019**  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Pendapat Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	48.945.647.896,00	37.621.584.350,00	11.324.063.546,00
	<b>Jumlah</b>	<b>48.945.647.896,00</b>	<b>37.621.584.350,00</b>	<b>11.324.063.546,00</b>

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA Tahun 2019 sebesar Rp11.324.063.546,00 terdiri dari:

1. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi DBH (PKB) sebesar Rp2.121.478.812,00;
2. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi DBH (BBNKB) sebesar Rp3.029.921.911,00;
3. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi DBH (Pajak Air Permukaan) sebesar Rp8.478.920,00,;
4. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi DBH (PBBKB) sebesar Rp5.399.993.035,00;
5. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi DBH (Pajak Rokok) sebesar Rp.764.190.868,00.

**7.11.1.4.1.3. Pendapatan Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Pendapatan Lain-lain Yang Sah - LO adalah sebesar Rp10.842.598.855,01 sedangkan Pendapatan Lain-lain Yang Sah - LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp49.224.170.027,65. Adapun rincian Pendapatan Lain-lain Yang Sah - LO Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 269

**Realisasi Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah	10.842.598.855,01	49.224.170.027,65	(38.381.571.172,64)	(77,97)
2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>10.842.598.855,01</b>	<b>49.224.170.027,65</b>	<b>(38.381.571.172,64)</b>	<b>(77,97)</b>

**7.11.1.4.1.3.1. Pendapatan Hibah - LO**

Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berasal dari hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Instansi Lainnya. Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Pendapatan Hibah - LO adalah sebesar Rp10.842.598.855,01 sedangkan Pendapatan Hibah - LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp49.224.170.027,65. Pada Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar Rp38.381.571.172,64 atau sebesar (77,97)%. Adapun rincian Pendapatan Hibah - LO Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 270

**Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah	10.842.598.885,01	49.224.170.027,65	(38.381.571.172,64)	(77,97)
	<b>JUMLAH</b>	<b>10.842.598.885,01</b>	<b>49.224.170.027,65</b>	<b>(38.381.571.172,64)</b>	<b>(77,97)</b>

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Hibah - LO dengan Pendapatan Hibah - LRA Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 271

**Perbedaan Realisasi Pendapatan Hibah LO dan LRA Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Pendapatan Hibah	10.842.598.885,01	10.787.832.655,01	54.766.200,00
	Jumlah	10.842.598.885,01	10.787.832.655,01	54.766.200,00

Berdasarkan tabel diatas Pada Tahun 2019 terdapat selisih antara Pendapatan Hibah – LO dengan Pendapatan Hibah – LRA sebesar Rp54.766.200,00 karena adanya penambahan Hibah Barang Milik Negara Dari Kementerian Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berupa Komputer, Printer dan Modem sebesar Rp54.766.200,00.

#### 7.11.1.4.1.3.2. Dana Darurat

Tidak terdapat anggaran dan realisasi Dana Darurat – LO untuk Tahun Anggaran 2019 dan 2018 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

#### 7.11.1.4.1.3.2. Pendapatan Lainnya

Tidak terdapat anggaran dan realisasi Pendapatan Lainnya – LO untuk Tahun Anggaran 2019 dan 2018 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

#### 7.11.1.4.2. Beban - LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, dan/atau kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar - benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 Tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut Tahun 2019 dan dapat diuraikan sebagai berikut.

##### 7.11.1.4.2.1. Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai-LO Tahun 2019 adalah sebesar Rp357.252.766.795,00, sedangkan Beban Pegawai-LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp344.884.299.188,00. Terdapat kenaikan beban pegawai sebesar Rp12.368.467.607,00 atau sebesar 3,59%. Rincian Beban Pegawai-LO Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 272  
Realisasi Beban Pegawai Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31 Desember 2018	Saldo 31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	118.248.223.758,00	122.832.722.420,00	4.584.498.662,00	3,88
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	52.298.721.709,00	51.131.280.610,00	(1.167.441.099,00)	(2,23)
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8.498.006.147,00	9.987.100.278,00	1.489.094.131,00	17,52
Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	7.293.219.174,00	7.092.926.168,00	(200.293.006,00)	(2,75)
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	12.268.119.660,00	11.685.351.069,00	(582.768.591,00)	(4,75)
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	4.519.078.014,00	4.967.379.177,00	448.301.163,00	9,92
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	8.352.532.929,00	8.409.995.669,00	57.462.740,00	0,69

SKPD	Saldo 31 Desember 2018	Saldo 31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja	6.987.338.322,00	6.434.847.509,00	(552.490.813,00)	(7,91)
Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah	3.942.629.415,00	5.242.114.077,00	1.299.484.662,00	32,96
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7.949.259.697,00	10.276.904.589,00	2.327.644.892,00	29,28
DPRD	0,00	1.463.041.566,00	1.463.041.566,00	0,00
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	888.798.643,00	888.798.643,00	0,00
Sekretariat Daerah	21.790.903.443,00	22.858.172.014,00	1.067.268.571,00	4,90
Sekretariat DPRD	15.989.170.279,00	14.033.805.334,00	(1.955.364.945,00)	(12,23)
Badan Keuangan Daerah	15.068.895.705,00	14.408.334.190,00	(660.561.515,00)	(4,38)
Inspektorat	6.708.576.183,00	8.390.708.896,00	1.682.132.713,00	25,07
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.772.410.104,00	4.674.799.609,00	(97.610.495,00)	2,05
Kecamatan Siantan	3.754.925.759,00	4.410.687.625,00	655.761.866,00	17,46
Kecamatan Jemaja	4.898.192.964,00	5.095.539.462,00	197.346.498,00	4,03
Kecamatan Palmatak	3.527.341.558,00	4.106.343.066,00	579.001.508,00	16,41
Kecamatan Siantan Timur	1.780.919.970,00	2.090.430.435,00	309.510.465,00	17,38
Kecamatan Siantan Selatan	1.776.102.430,00	2.129.216.400,00	353.113.970,00	19,88
Kecamatan Jemaja Timur	3.054.233.457,00	3.187.473.603,00	133.240.146,00	4,36
Kecamatan Siantan Tengah	2.300.921.194,00	2.653.475.610,00	352.554.416,00	15,32
Kecamatan Siantan Utara	0,00	276.565.882,00	276.565.882,00	0,00
Kecamatan Jemaja Barat	0,00	403.502.025,00	403.502.025,00	0,00
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	4.182.519.875,00	4.760.139.071,00	577.619.196,00	13,81
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.955.266.722,00	5.071.434.674,00	116.167.952,00	2,34
Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	15.020.593.731,00	13.242.465.619,00	(1.778.128.112,00)	(11,84)
Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian	4.946.196.989,00	5.047.211.505,00	101.014.516,00	2,04
Jumlah	344.884.299.188,00	357.252.766.795,00	12.368.467.607,00	3,59

Penjelasan Perbedaan Beban Pegawai - LO dengan Belanja Pegawai - LRA Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 273  
Perbedaan Realisasi Beban Pegawai LO dan Belanja Pegawai LRA Tahun 2019  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban/Belanja Pegawai	357.252.766.795,00	357.208.194.340,00	44.572.455,00
	Jumlah	357.252.766.795,00	357.208.194.340,00	44.572.455,00

Berdasarkan tabel diatas Pada Tahun 2019 terdapat selisih antara Beban Pegawai – LO dengan Belanja Pegawai – LRA sebesar Rp44.572.455,00 terdiri dari :

1. Beban Pegawai Pembayaran Utang Beban Pegawai Atas Jasa Pelayanan Tahun 2018 Yang Dibayarkan pada Tahun 2019 Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.341.697.600,00;
2. Koreksi Reklasifikasi Beban Persediaan yang merupakan Beban Pegawai atas Belanja Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp511.606.250,00;
3. Koreksi Reklasifikasi Utang Belanja Pegawai atas Jasa Pelayanan RSUD Jemaja, RSUD Palmatak dan Puskesmas Tarempa Tahun 2019 yang belum dibayarkan sebesar Rp874.663.805,00.

#### 7.11.1.4.2.2. Beban Persediaan - LO

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO). Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Beban Persediaan - LO adalah sebesar Rp26.433.984.434,42 sedangkan Beban Persediaan-LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp50.769.857.432,50, mengalami penurunan sebesar Rp24.335.872.989,10 atau turun sebesar 47,93%. Adapun rincian Beban Persediaan-LO Tahun 2019 dan 2018 sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut.

**Tabel 274**  
**Realisasi Beban Persediaan Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	3.789.263.136,00	2.829.534.257,00	959.728.879,00	33,92
2	Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Bateri Kering)	575.615.295,00	542.767.280,00	32.848.015,00	6,05
4	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	627.431.700,00	427.200.550,00	200.231.150,00	46,87
5	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	922.776.425,00	613.344.450,00	309.431.975,00	50,45
6	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	2.771.113.520,00	2.518.487.296,00	252.626.224,00	10,03
7	Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	29.964.000,00	0,00	29.964.000,00	0,00
8	Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas	102.125.000,00	102.770.000,00	(645.000,00)	(0,63)
9	Beban Persediaan Perlengkapan Olah Raga	58.304.950,00	0,00	58.304.950,00	0,00
10	Beban Persediaan Bahan Pakai Habis Lainnya	251.210.475,40	417.149.700,00	(165.939.224,60)	(39,78)
11	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	1.190.890.000,00	275.391.600,00	915.498.400,00	(332,44)
12	Beban Persediaan Bahan Bibit Tanaman	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
13	Beban Persediaan Bahan Bibit Ternak	207.816.369,00	150.526.452,00	57.289.917,00	38,06
14	Beban Persediaan Bahan Obat-Obatan	7.034.844.360,27	4.101.549.991,00	2.933.294.369,27	71,52
15	Beban Persediaan Bahan Kimia	88.880.000,00	0,00	88.880.000,00	0,00
16	Beban Persediaan Bahan Makanan Pokok	15.958.100,00	19.694.300,00	(3.736.200,00)	(18,97)
17	Beban Persediaan Bahan Pembelajaran	503.209.125,00	1.043.451.157,00	(540.242.032,00)	(51,77)
18	Beban Persediaan Alat Perlengkapan	928.060.018,00	1.398.851.924,00	(470.791.906,00)	(33,66)
19	Beban Persediaan Bahan Sembako	130.192.460,00	1.195.995.227,00	(1.065.802.767,00)	(89,11)
20	Beban Persediaan Bahan Material Lainnya	1.216.894.263,00	534.725.800,00	682.168.463,00	127,57
21	Beban Persediaan Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Beban Persediaan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Beban Persediaan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Beban Persediaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Beban Persediaan Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Beban Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00



No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan / Penurunan	%
27	Beban Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	17.490.269.591,00	(17.490.269.591,00)	(100,00)
28	Beban Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	4.277.157.400,00	(4.277.157.400,00)	(100,00)
29	Beban Persediaan Bahan Habis Pakai Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Beban Persediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah	2.951.244.467,00	4.758.307.250,00	(1.807.062.783,00)	(37,98)
32	Beban Persediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD dan SMP	2.770.590.770,75	7.808.483.207,50	(5.037.892.436,75)	(64,52)
33	Beban Persediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	267.600.000,00	263.200.000,00	4.400.000,00	1,67
JUMLAH		26.433.984.434,42	50.769.857.432,50	(24.335.872.998,08)	(47,93)

Jumlah Beban Persediaan Pada Tahun 2019 sebesar Rp26.433.984.434,42 dapat dirinci pada masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 275  
Beban Persediaan per SKPD Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31 Desember 2019	Saldo 31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	9.132.154.471,75	14.403.011.105,50	(5.270.856.633,75)	(36,60)
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.043.415.847,27	6.119.585.823,00	(3.076.169.975,73)	(50,27)
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.818.290.695,00	14.150.009.630,00	(10.331.718.935,00)	(73,02)
Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	196.029.840,00	181.442.500,00	14.587.340,00	8,04
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	630.195.395,00	686.458.390,00	(56.262.995,00)	(8,20)
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	346.533.997,00	128.460.048,00	218.073.949,00	169,76
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	215.373.625,00	2.951.765.270,00	(2.736.391.645,00)	(92,70)
Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja	76.353.967,00	121.545.355,00	(45.191.388,00)	(37,18)
Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah	145.316.350,00	103.986.160,00	41.330.190,00	39,75
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	265.177.300,00	123.191.900,00	141.985.400,00	115,26
Sekretariat Daerah	4.407.178.144,00	3.328.713.125,00	1.078.465.019,00	32,40
Sekretariat DPRD	585.509.215,00	774.790.005,00	(189.280.790,00)	(24,43)
Badan Keuangan Daerah	349.783.396,00	390.340.708,00	(40.557.312,00)	(10,39)
Inspektorat	109.231.700,00	113.263.500,00	(4.031.800,00)	(3,56)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	124.404.235,40	77.011.200,00	47.393.035,40	61,54
Kecamatan Siantan	201.017.800,00	443.528.400,00	(242.510.600,00)	(54,68)
Kecamatan Jemaja	284.110.500,00	403.348.000,00	(119.237.500,00)	(29,56)
Kecamatan Palmatak	278.815.870,00	382.768.080,00	(103.952.210,00)	(27,16)
Kecamatan Siantan Timur	64.584.100,00	321.772.000,00	(257.187.900,00)	(79,93)
Kecamatan Siantan Selatan	105.981.894,00	112.344.506,00	(6.362.612,00)	(5,66)
Kecamatan Jemaja Timur	52.668.000,00	85.981.350,00	(33.313.350,00)	(38,74)
Kecamatan Siantan Tengah	37.635.000,00	203.035.500,00	(165.400.500,00)	(81,46)
Kecamatan Siantan Utara	20.793.000,00	0,00	20.793.000,00	0,00

SKPD	Saldo 31 Desember 2019	Saldo 31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
Kecamatan Jemaja Barat	45.408.100,00	0,00	45.408.100,00	0,00
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	203.680.270,00	98.181.150,00	105.499.120,00	107,45
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	534.889.171,00	407.602.381,00	127.286.790,00	31,23
Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	792.612.079,00	4.409.127.896,00	(3.616.515.817,00)	(82,02)
Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian	366.840.472,00	248.593.450,00	118.247.022,00	47,57
<b>Jumlah</b>	<b>26.433.984.434,42</b>	<b>50.769.857.432,50</b>	<b>(24.335.872.998,08)</b>	<b>(47,93)</b>

Penjelasan Perbedaan Beban Persediaan - LO dengan Belanja Barang (Persediaan) - LRA Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 276

**Perbedaan Realisasi Beban Persediaan - LO dan Belanja Barang (Persediaan) - LRA Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban/Belanja Persediaan	26.433.984.434,42	33.875.420.760,15	7.441.436.325,73
	<b>Jumlah</b>	<b>26.217.976.442,69</b>	<b>33.875.420.760,15</b>	<b>7.441.436.325,73</b>

Berdasarkan tabel diatas Pada Tahun 2019 terdapat selisih antara Beban Persediaan – LO dengan Belanja Barang (Persediaan) – LRA sebesar Rp7.441.436.325,73 terdiri dari :

Tabel 277

**Rincian Perbedaan Realisasi Beban Persediaan - LO dan Belanja Barang (Persediaan) - LRA Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban/Belanja Alat Tulis Kantor	3.789.263.136,00	3.992.670.896,00	203.407.760,00
2	Alat Listrik dan Elektronik (Bateri Kering)	575.615.295,00	574.857.295,00	(758.000,00)
3	Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya	627.431.700,00	629.875.700,00	2.444.000,00
4	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	922.776.425,00	947.300.975,00	24.524.550,00
5	Bahan Bakar Minyak/Gas	2.771.113.520,00	2.784.215.863,00	13.102.343,00
6	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	29.964.000,00	29.964.000,00	0,00
7	Pengisian Isi Tabung Gas	102.125.000,00	102.125.000,00	0,00
8	Bahan Pakai Habis Lainnya	251.210.475,40	251.210.475,40	0,00
9	Perlengkapan Olahraga	58.304.950,00	58.304.950,00	0,00
10	Bahan Baku Bangunan	1.190.890.000,00	9.240.000,00	(1.181.650.000,00)
11	Bahan Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00
12	Bahan Bibit Ternak	207.816.369,00	179.700.000,00	(28.116.369,00)
13	Bahan Obat-Obatan	7.034.844.360,27	10.772.662.065,00	3.737.817.704,73
14	Bahan Kimia	88.880.000,00	88.880.000,00	0,00
15	Bahan Makanan Pokok	15.958.100,00	15.958.100,00	0,00
16	Bahan Pembelajaran	503.209.125,00	503.209.125,00	0,00
17	Alat Perlengkapan	928.060.018,00	2.516.906.122,00	1.588.846.104,00
18	Bahan Sembako	130.192.460,00	1.491.447.660,00	1.361.255.200,00
19	Bahan Material Lainnya	1.216.894.263,00	1.216.894.263,00	0,00
20	Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
21	Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
22	Bantuan Operasional Sekolah Daerah	2.951.244.467,00	4.671.807.500,00	1.720.563.033,00
23	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	2.770.590.770,75	2.770.590.770,75	0,00

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
	Jenjang SD dan SMP			
24	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	267.600.000,00	267.600.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>26.433.984.434,42</b>	<b>33.875.420.760,15</b>	<b>7.441.436.325,73</b>

#### 7.11.1.4.2.3. Beban Jasa - LO

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Beban Jasa-LO adalah sebesar Rp106.624.799.805,08 sedangkan Beban Jasa-LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp79.133.538.103,67. Adapun rincian Beban Jasa-LO Tahun 2019 dan 2018 sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut.

**Tabel 278**  
**Beban Jasa Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Jasa Kantor	40.621.859.911,00	32.914.186.217,00	7.707.673.694,00	23,42
2	Beban Premi Asuransi	10.053.274.114,00	7.379.619.000,00	2.673.655.114,00	36,23
3	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	4.794.008.971,00	4.113.776.573,00	680.232.398,00	16,54
4	Beban Cetak dan Penggandaan	5.552.452.311,00	4.408.109.406,00	1.144.342.905,00	25,96
5	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	5.408.483.921,00	7.966.317.101,00	(2.557.833.180,00)	(32,11)
6	Beban Sewa Sarana Mobilitas	1.862.495.000,00	1.844.074.950,00	18.420.050,00	1,00
7	Beban Sewa Alat Berat	30.800.000,00	28.050.000,00	2.750.000,00	9,80
8	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	207.700.000,00	122.100.000,00	85.600.000,00	70,11
9	Beban Makanan dan Minuman	14.209.874.374,00	10.035.384.401,00	4.174.489.973,00	41,60
10	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	694.526.910,00	458.862.000,00	235.664.910,00	51,36
11	Beban Pakaian Kerja	1.277.761.250,00	290.891.700,00	986.869.550,00	339,26
12	Beban Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	7.096.127.950,00	3.449.974.010,00	3.646.153.940,00	105,69
13	Beban Jasa Konsultansi	4.812.044.000,00	2.623.640.800,00	2.188.403.200,00	83,41
14	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	634.500.000,00	697.050.000,00	(62.550.000,00)	(8,97)
15	Beban Kursus Pelatihan Sosialisasi dan Bimtek PNS dan Non PNS	4.422.759.258,00	2.565.546.153,00	1.857.213.105,00	72,39
16	Beban Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	440.500.000,00	(440.500.000,00)	(100,00)
17	Beban Beasiswa Pendidikan Non PNS	2.681.773.500,00	2.288.869.500,00	392.904.000,00	17,17
18	Beban Pelayanan Kesehatan	336.543.975,00	0,00	336.543.975,00	0,00
19	Beban Barang Yang Bersumber Dari Dana BOS	1.927.814.360,08	(2.493.413.707,33)	4.421.228.067,41	(177,32)
	<b>JUMLAH</b>	<b>106.624.799.805,08</b>	<b>79.133.538.103,67</b>	<b>27.226.561.701,41</b>	<b>34,74</b>

Realisasi Belanja Jasa LRA tahun 2019 sebesar Rp106.624.799.805,08 dan diketahui tidak terdapat perbedaan dengan realisasi Beban Jasa tahun 2019. Jumlah Beban Jasa Pada Tahun 2019 sebesar Rp106.624.799.805,08 tersebut dapat dirinci ke masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 279  
Beban Jasa per SKPD Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31 Desember 2019	Saldo 31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	17.191.663.082,08	5.335.672.192,67	11.855.990.889,41	222,20
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	27.052.795.519,00	21.152.698.103,00	5.900.097.416,00	27,89
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4.204.759.052,00	3.169.521.249,00	1.035.237.803,00	32,66
Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	1.629.216.383,00	1.535.052.378,00	94.164.005,00	6,13
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	3.398.855.676,00	2.281.140.660,00	1.117.715.016,00	49,00
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	719.186.240,00	734.492.260,00	(15.306.020,00)	(2,08)
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	2.316.446.677,00	1.722.030.031,00	594.416.646,00	34,52
Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja	896.082.966,00	1.319.349.407,00	(423.266.441,00)	(32,08)
Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah	1.067.479.784,00	989.013.483,00	78.466.301,00	7,93
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.160.757.038,00	865.085.500,00	295.671.538,00	34,18
Sekretariat Daerah	18.341.707.917,00	15.887.043.850,00	2.454.664.067,00	15,45
Sekretariat DPRD	6.769.338.996,00	6.985.687.275,00	(216.348.279,00)	(3,10)
Badan Keuangan Daerah	2.578.532.300,00	2.523.956.580,00	54.575.720,00	2,16
Inspektorat	1.421.376.501,00	1.467.516.995,00	(46.140.494,00)	(3,14)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.175.981.437,00	2.179.802.532,00	1.996.178.905,00	91,58
Kecamatan Siantan	1.269.663.387,00	651.156.608,00	618.506.779,00	94,99
Kecamatan Jemaja	576.939.500,00	474.510.000,00	102.429.500,00	21,59
Kecamatan Palmatak	388.732.300,00	371.686.800,00	17.045.500,00	4,59
Kecamatan Siantan Timur	430.731.153,00	318.922.450,00	111.808.703,00	35,06
Kecamatan Siantan Selatan	318.039.120,00	372.653.460,00	(54.614.340,00)	(14,66)
Kecamatan Jemaja Timur	327.597.000,00	291.150.400,00	36.446.600,00	12,52
Kecamatan Siantan Tengah	319.656.000,00	381.978.500,00	(62.322.500,00)	(16,32)
Kecamatan Siantan Utara	71.515.000,00	0,00	71.515.000,00	0,00
Kecamatan Jemaja Barat	108.787.000,00	0,00	108.787.000,00	0,00
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	3.354.154.866,00	4.351.102.702,00	(996.947.836,00)	(22,91)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.138.714.486,00	2.450.249.900,00	1.688.464.586,00	68,91
Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	1.572.638.594,00	1.001.547.422,00	571.091.172,00	57,02
Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian	823.451.831,00	320.517.366,00	502.934.465,00	156,91
Jumlah	106.624.799.805,08	79.133.538.103,67	27.491.261.701,41	34,74

Penjelasan Perbedaan Beban Jasa - LO dengan Belanja Jasa - LRA Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 280  
Perbedaan Realisasi Beban Jasa - LO dan Belanja Jasa - LRA Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban/Belanja Jasa	106.624.799.805,08	106.624.799.805,08	0,00
	Jumlah	106.624.799.805,08	106.624.799.805,08	0,00

Berdasarkan tabel diatas Pada Tahun 2019 diketahui tidak terdapat selisih antara Beban Jasa – LO dengan Belanja Jasa – LRA.

#### 7.11.1.4.2.4. Beban Pemeliharaan - LO

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Beban Pemeliharaan-LO adalah sebesar 6.510.388.739,00 sedangkan Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp9.499.542.386,00. Adapun rincian Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut.

**Tabel 281**  
**Beban Pemeliharaan Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.161.364.000,00	1.189.591.039,00	(28.227.039,00)	(2,37)
2	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.554.234.807,00	1.648.946.881,00	(94.712.074,00)	(5,74)
3	Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	775.198.000,00	6.175.474.553,00	(5.400.276.553,00)	(87,45)
4	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.019.591.932,00	485.529.913,00	2.534.062.019,00	521,92
<b>JUMLAH</b>		<b>6.510.388.739,00</b>	<b>9.499.542.386,00</b>	<b>(2.989.153.647,00)</b>	<b>(31,47)</b>

Realisasi Belanja Pemeliharaan LRA tahun 2019 sebesar Rp6.510.388.739,00 dengan rincian pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut.

**Tabel 282**  
**Beban Pemeliharaan per SKPD Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31 Desember 2019	Saldo 31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	143.039.100,00	314.262.500,00	(171,223,400.00)	(54,48)
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	944.600.466,00	950.022.828,00	(5.422.362,00)	(0,57)
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.937.201.732,00	6.218.638.553,00	(3,281,436,821.00)	(52,77)
Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	4.427.000,00	0,00	4,427,000.00	0,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	704.996.254,00	238.515.500,00	466,480,754.00	195,58
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	18.490.000,00	11.590.000,00	6,900,000.00	59,53
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	0,00	21.915.000,00	(21,915,000.00)	(100,00)
Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	27.060.000,00	9.970.000,00	17,090,000.00	171,41
Sekretariat Daerah	634.146.000,00	537.906.150,00	96,239,850.00	17,89
Sekretariat DPRD	163.271.932,00	228.015.842,00	(64,743,910.00)	(28,39)
Badan Keuangan Daerah	186.732.800,00	210.777.600,00	(24,044,800.00)	(11,41)
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.060.000,00	29.805.000,00	(13.745.000.00)	(46,12)
Kecamatan Siantan	246.369.255,00	232.264.189,00	14,105,066.00	6,07
Kecamatan Jemaja	67.000.000,00	65.500.000,00	1,500,000.00	2,29

SKPD	Saldo 31 Desember 2019	Saldo 31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
Kecamatan Palmatak	39.008.200,00	128.068.000,00	(89,059,800.00)	(69,54)
Kecamatan Siantan Timur	14.950.000,00	0,00	14,950,000.00	0,00
Kecamatan Siantan Selatan	28.943.000,00	50.934.060,00	(21,991,060.00)	(43,18)
Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siantan Tengah	42.924.500,00	38.910.000,00	4,014,500.00	10,32
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	177.612.500,00	89.543.200,00	88,069,300.00	98,35
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	24.985.000,00	58.285.964,00	(33,300,964.00)	(57,13)
Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	14.590.400,00	4.483.600,00	10,106,800.00	225,42
Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian	73.980.600,00	60.134.400,00	13,846,200.00	23,03
<b>Jumlah</b>	<b>6.510.388.739,00</b>	<b>9.499.542.386,00</b>	<b>(2.989.153.647,00)</b>	<b>(31,47)</b>

Penjelasan Perbedaan Beban Pemeliharaan - LO dengan Belanja Pemeliharaan - LRA Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 283**  
**Perbedaan Realisasi Beban Pemeliharaan - LO dan Belanja Pemeliharaan - LRA**  
**Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban/Belanja Pemeliharaan	6.510.388.739,00	6.510.388.739,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.510.388.739,00</b>	<b>6.510.388.739,00</b>	<b>0,00</b>

Berdasarkan tabel diatas Pada Tahun 2019 tidak terdapat selisih antara Beban Pemeliharaan - LO dengan Belanja Pemeliharaan - LRA.

#### 7.11.1.4.2.5. Beban Perjalanan Dinas - LO

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Beban Perjalanan Dinas-LO adalah sebesar Rp70.387.844.505,00, mengalami kenaikan sebesar Rp17.632.167.109,00 atau sebesar 33,42% bila dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp52.755.677.396,00. Adapun rincian Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2019 dan 2018 sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut.

**Tabel 284**  
**Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan Tahun 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan / Penurunan	%
1	Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.578.359.336,00	33.972.941.300,00	12.605.418.036,00	37,10
2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.809.485.169,00	18.782.736.096,00	5.026.749.073,00	26,76
	<b>JUMLAH</b>	<b>70.387.844.505,00</b>	<b>52.755.677.396,00</b>	<b>17.632.167.109,00</b>	<b>33,42</b>

Realisasi Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2019 sebesar Rp70.387.844.505,00 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut.

**Tabel 285**  
**Beban Perjalanan Dinas per SKPD Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31 Desember 2019	Saldo 31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	5.852.254.331,00	3.137.978.673,00	2.714.275.658,00	86,50
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.714.025.544,00	7.513.844.076,00	1.200.181.468,00	15,97
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	5.047.128.285,00	4.209.696.721,00	837.431.564,00	19,89
Badan Penelitian Pengembangan dan	2.149.563.912,00	1.691.399.562,00	458.164.350,00	27,09

SKPD	Saldo 31 Desember 2019	Saldo 31 Desember 2018	Kenaiakan/ Penurunan	%
Perencanaan Daerah				
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	1.864.965.986,00	1.428.400.719,00	436.565.267,00	30,56
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	950.512.123,00	916.175.806,00	34.336.317,00	3,75
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	2.918.510.009,00	2.314.901.396,00	603.608.613,00	26,07
Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.004.552.927,00	955.593.418,00	48.959.509,00	5,12
Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Penanggulangan Bencana Daerah	904.142.946,00	768.529.945,00	135.613.001,00	17,65
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	527.578.061,00	353.322.146,00	174.255.915,00	49,32
Sekretariat Daerah	10.625.009.132,00	8.368.930.765,00	2.256.078.367,00	26,96
Sekretariat DPRD	13.856.016.394,00	10.440.920.400,00	3.415.095.994,00	32,71
Badan Keuangan Daerah	3.996.611.100,00	2.855.747.250,00	1.140.863.850,00	39,95
Inspektorat	2.391.287.126,00	1.552.330.540,00	838.956.586,00	54,04
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.182.305.154,00	1.049.905.196,00	132.399.958,00	12,61
Kecamatan Siantan	184.414.108,00	182.388.714,00	2.025.394,00	1,11
Kecamatan Jemaja	309.446.079,00	215.908.000,00	93.538.079,00	43,32
Kecamatan Palmatak	230.129.909,00	191.562.200,00	38.567.709,00	20,13
Kecamatan Siantan Timur	163.649.400,00	156.712.000,00	6.937.400,00	4,43
Kecamatan Siantan Selatan	217.155.458,00	146.693.000,00	70.462.458,00	48,03
Kecamatan Jemaja Timur	115.214.133,00	89.903.500,00	25.310.633,00	28,15
Kecamatan Siantan Tengah	176.999.939,00	181.131.264,00	-4.131.325,00	(2,28)
Kecamatan Siantan Utara	52.910.000,00	0	52.910.000,00	0,00
Kecamatan Jemaja Barat	104.840.660,00	0	104.840.660,00	0,00
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	1.673.438.941,00	817.628.143,00	855.810.798,00	104,67
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.066.023.406,00	816.236.473,00	249.786.933,00	30,60
Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	2.465.407.816,00	1.460.368.451,00	1.005.039.365,00	68,82
Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian	1.643.751.626,00	939.469.038,00	704.282.588,00	74,97
Jumlah	70.387.844.505,00	52.755.677.396,00	17.632.167.109,00	33,42

Penjelasan Perbedaan Beban Perjalanan Dinas - LO dengan Belanja Perjalanan Dinas - LRA Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 286  
Perbedaan Realisasi Beban Perjalanan Dinas - LO dan Belanja Perjalanan Dinas - LRA  
Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban/Belanja Perjalanan Dinas	70.387.844.505,00	70.387.844.505,00	0,00
Jumlah		70.387.844.505,00	70.387.844.505,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas Pada Tahun 2019 tidak terdapat selisih antara Beban Perjalanan Dinas – LO dengan Belanja Perjalanan Dinas – LRA.

7.11.1.4.2.6. Beban Hibah - LO

Beban Hibah-LO merupakan pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Akun Beban Hibah Tahun Anggaran 2019 merupakan hibah kepada Badan/Lembaga/Instansi Vertikal/Organisasi Swasta. Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Beban Hibah-LO adalah sebesar Rp47.764.955.371,00 sedangkan Beban Hibah-LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp4.492.460.400,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 287**  
**Beban Hibah Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Lebih/(Kurang)	%
1	Belanja Hibah - LRA	4.278.388.000,00	4.492.460.400,00	(214.072.400,00)	(4,77)
2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	7.532.268.624,00	0,00	7.532.268.624,00	0,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	97.537.000,00	0,00	97.537.000,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	18.116.749.389,00	0,00	18.116.749.389,00	0,00
5	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	1.269.266.200,00	0,00	1.269.266.200,00	0,00
6	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	364.221.000,00	0,00	364.221.000,00	0,00
7	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	7.259.757.678,00	0,00	7.259.757.678,00	0,00
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.567.845.860,00	0,00	1.567.845.860,00	0,00
9	Sekretariat Daerah	6.365.472.120,00	0,00	6.365.472.120,00	0,00
10	Badan Keuangan Daerah	128.744.000,00	0,00	128.744.000,00	0,00
11	Kecamatan Siantan	295.804.600,00	0,00	295.804.600,00	0,00
12	Kecamatan Siantan Timur	35.615.800,00	0,00	35.615.800,00	0,00
13	Kecamatan Jemaja Timur	12.980.000,00	0,00	12.980.000,00	0,00
14	Kecamatan Siantan Utara	19.900.000,00	0,00	19.900.000,00	0,00
15	Kecamatan Palmatak	192.445.100,00	0,00	192.445.100,00	0,00
16	Kecamatan Siantan Tengah	128.000.000,00	0,00	128.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>47.764.995.371,00</b>	<b>4.492.460.400,00</b>	<b>43.272.534.971,00</b>	<b>963,23</b>

Tabel di atas menggambarkan bahwa realisasi Beban Hibah-LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp47.764.995.371,00 sedangkan Beban Hibah-LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp4.492.460.400,00. mengalami kenaikan sebesar Rp43.272.534.971,00 atau sebesar (963,23)%.

Penjelasan Perbedaan Beban Hibah - LO dengan Belanja Hibah - LRA Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 288**  
**Perbedaan Realisasi Beban Hibah LO dan Belanja Hibah LRA Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban/Belanja Hibah	47.764.995.371,00	4.278.388.000,00	43.486.607.371,00
<b>Jumlah</b>		<b>47.764.995.371,00</b>	<b>4.278.388.000,00</b>	<b>43.486.607.371,00</b>

Berdasarkan tabel diatas Pada Tahun 2019 terdapat selisih antara Beban Hibah – LO dengan Belanja Hibah – LRA terdiri dari :

1. Reklas dari Beban Persediaan dan Beban Jasa ke Beban Hibah sesuai Permendagri 39 Tahun 2012 sebesar Rp39.372.610.171,00;
2. Hibah Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Kementerian Perhubungan RI (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda) ke Beban Hibah sebesar Rp4.438.363.200,00;
3. Koreksi Menghapus utang berdasarkan hasil verifikasi Inspektorat sebesar Rp324.366.000,00.

#### **7.11.1.4.2.7. Beban Bantuan Sosial – LO**

Beban Bantuan sosial-LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp156.555.000,00, sedangkan Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp117.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.



**Tabel 289**  
**Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,00	22.000.000,00	(22.000.000,00)	(100,00)
2	Beban Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial Kepada Mahasiswa Dari Keluarga Miskin / Tidak Mampu – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat – LO	156.555.000,00	95.000.000,00	61.555.000,00	64,79
<b>JUMLAH</b>		<b>156.555.000,00</b>	<b>117.000.000,00</b>	<b>39.555.000,00</b>	<b>33,81</b>

Tabel di atas menggambarkan Beban Bantuan sosial-LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp156.555.000,00, sedangkan Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp117.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp39.555.000,00 atau sebesar 33,81%.

Penjelasan Perbedaan Beban Bantuan Sosial - LO dengan Belanja Bantuan Sosial - LRA Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 290****Perbedaan Realisasi Beban Bantuan Sosial LO dan Belanja Bantuan Sosial LRA Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban/Belanja Bantuan Sosial	156.555.000,00	156.555.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>156.555.000,00</b>	<b>156.555.000,00</b>	<b>0,00</b>

Berdasarkan tabel diatas Pada Tahun 2019 tidak terdapat selisih antara Beban Bantuan Sosial – LO dengan Belanja Bantuan Sosial – LRA.

#### 7.11.1.4.2.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO

Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO merupakan beban Penyusutan alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa yang diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva dibebankan secara bertahap.

Untuk Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp99.299.535.434,00. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 291****Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Beban Penyusutan Tahun 219	Beban Amortisasi Tahun 2019	Akumulasi Beban Penyusutan Dan Amortisasi 2019
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	(7.937.538.359,00)	(135.904.480,00)	(8.073.442.839,00)
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(10.133.262.724,00)	0,00	(10.133.262.724,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(58.539.859.728,00)	(2.522.890.760,00)	(61.062.750.488,00)
4	Badan Pernelilitan, Pengembangan dan Perencanaan Daerah	(235.237.076,00)	(434.478.000,00)	(669.715.076,00)
5	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	(5.427.454.451,00)	(210.239.183,00)	(5.637.693.634,00)
6	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	(252.616.387,00)	(3.630.000,00)	(256.246.387,00)

No	Uraian	Beban Penyusutan Tahun 219	Beban Amortisasi Tahun 2019	Akumulasi Beban Penyusutan Dan Amortisasi 2019
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	(408.675.242,00)	0,00	(408.685.242,00)
8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja	(135.122.727,00)	(24.782.800,00)	(159.905.527,00)
9	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah	(146.347.733,00)	0,00	(146.347.733,00)
10	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(473.620.647,00)	0,00	(473.620.647,00)
11	Sekretariat Daerah	(5.762.695.686,00)	(94.184.200,00)	(5.856.879.886,00)
12	Sekretariat DPRD	(359.671.913,00)	0,00	(359.671.913,00)
13	Badan Keuangan Daerah	(520.083.105,00)	(81.366.750,00)	(601.449.855,00)
14	Inspektorat	(86.734.209,00)	0,00	(86.734.209,00)
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(152.554.923,00)	0,00	(152.554.923,00)
16	Kecamatan Siantan	(344.972.341,00)	0,00	(344.972.341,00)
17	Kecamatan Jemaja	(196.893.777,00)	0,00	(196.893.777,00)
18	Kecamatan Palmatak	(158.319.594,00)	0,00	(158.319.594,00)
19	Kecamatan Siantan Timur	(59.081.756,00)	0,00	(59.081.756,00)
20	Kecamatan Siantan Selatan	(70.147.430,00)	0,00	(70.147.430,00)
21	Kecamatan Jemaja Timur	(157.554.079,00)	0,00	(157.554.079,00)
22	Kecamatan Siantan Tengah	(132.731.366,00)	0,00	(132.731.366,00)
23	Kecamatan Siantan Utara	(2.530.059,00)	0,00	(2.530.059,00)
24	Kecamatan Jemaja Barat	(5.366.944,00)	0,00	(5.366.944,00)
25	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	(607.519.449,00)	(9.075.000,00)	(616.594.449,00)
26	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(865.978.261,00)	(773.557.450,00)	(1.639.535.711,00)
27	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	(1.155.006.333,00)	(124.750.000,00)	(1.279.756.333,00)
28	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	(519.199.298,00)	(37.901.214,00)	(557.100.512,00)
JUMLAH		(94.846.775.597,00)	(4.452.759.837,00)	(99.299.535.434,00)

Tabel di atas menggambarkan bahwa realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 sebesar Rp99.299.535.434,00 terdiri dari Beban Penyusutan sebesar Rp94.846.775.597,00 dan Amortisasi sebesar Rp4.452.759.837,00. Tidak terdapat perbedaan realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 dengan penyusutan dan amortisasi tahun 2019 pada neraca.

7.11.1.4.2.9.      **Beban Penyisihan Piutang-LO**

Beban Penyisihan Piutang pajak yang tak tertagih Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp491.964.283,89 dan Jumlah Penyisihan Piutang Pajak yang tak tertagih sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp552.835.136,64 yaitu:

**Tabel 292**  
**Mutasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)				
Uraian	Saldo 31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Saldo 31 Desember 2019
Penyisihan Piutang	491.964.283,89	753.105.686,15	692.234.833,40	552.835.136,64
Jumlah	491.964.283,89	753.105.686,15	692.234.833,40	552.835.136,64

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Beban Penyisihan Piutang-LO adalah sebesar Rp552.835.136,64. Rincian Beban Penyisihan Piutang-LO Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 293**  
**Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019 Akhir
1	Badan Keuangan Daerah	27.628.599,14
2	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	525.206.536,50
<b>JUMLAH</b>		<b>552.835.136,64</b>

#### 7.11.1.4.2.10. Beban Lain-Lain - LO

Beban Lain-lain merupakan Beban atas aset yang nilainya dibawah satu juta rupiah / ekstrakomtabel Tahun 2019 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 294****Mutasi Beban Lain-lain Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo -31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Saldo -31 Desember 2019
Penyisihan Piutang	4.053.500,00	0,00	4.053.500,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.053.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.053.500,00</b>	<b>0,00</b>

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Beban Lain-lain - LO adalah sebesar Rp0,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.053.500,00 Rincian Beban Penyisihan Piutang-LO Tahun 2019. Realisasi Belanja Lain-Lain – LRA tahun 2019 sebesar Rp0,00 sehingga tidak terdapat selisih.

#### 7.11.1.4.2.11. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - LO

Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa merupakan beban pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk memberikan Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Pemerintahan Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa. Besaran Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa untuk Tahun 2019 adalah sebesar Rp133.556.102.984,00 terdiri dari Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintahan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang terealisasi sebesar Rp99.140.196.447,00. Adapun rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan Desa-LO Tahun 2019 dan 2018 sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut.

**Tabel 295****Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan Desa - LO	133.556.102.984,00	99.140.196.447,00	34.415.906.537,00	34,71
<b>JUMLAH</b>		<b>133.556.102.984,00</b>	<b>99.140.196.447,00</b>	<b>34.415.906.537,00</b>	<b>34,71</b>

Jumlah Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa pada Tahun 2019 sebesar Rp133.556.102.984,00 pada masing-masing Desa per Tingkat Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 296****Beban Transfer Bantuan Keuangan Desa per Kecamatan Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa di Kecamatan Siantan - LO	16.212.592.274,00	12.143.920.273,00	4.068.672.001,00	33,50
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa di Kecamatan Jemaja - LO	15.135.133.878,00	14.158.000.446,00	977.133.432,00	6,90
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa di	35.363.653.837,00	29.421.622.613,00	5.942.031.224,00	20,20

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan / Penurunan	%
	Kecamatan Palmatak - LO				
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa di Kecamatan Siantan Timur - LO	15.704.864.374,00	11.740.079.780,00	3.964.784.594,00	33,77
5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa di Kecamatan Siantan Selatan - LO	17.552.874.357,00	12.910.758.218,00	4.642.116.139,00	35,96
6	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa di Kecamatan Jemaja Timur - LO	10.860.439.827,00	8.296.641.845,00	2.563.797.982,00	30,90
7	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa di Kecamatan Siantan Tengah - LO	14.081.015.238,00	10.029.173.272,00	4.051.841.966,00	40,40
8	Beban Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa	355.000.000,00	440.000.000,00	(85.000.000,00)	(19,32)
9	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa di Kecamatan Jemaja Barat - LO	4.578.842.631,00	0,00	4.578.842.631,00	-
10	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa di Kecamatan Siantan Utara - LO	3.711.686.568,00	0,00	3.711.686.568,00	-
JUMLAH		133.556.102.984,00	99.140.196.447,00	34.415.906.537,00	34,71

Penjelasan Perbedaan Beban Transfer Bantuan Keuangan - LO dengan Transfer Bantuan Keuangan - LRA dapat diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 297

Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan – LO dengan Belanja Bantuan Keuangan - LRA Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban/Belanja Transfer Bantuan Keuangan	133.556.102.984,00	51.179.675.000,00	82.376.427.984,00
Jumlah		133.556.102.984,00	51.179.675.000,00	82.376.427.984,00

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Belanja Transfer Bantuan Keuangan - LRA dengan Beban Transfer Bantuan Keuangan - LO Tahun 2019 sebesar Rp82.376.427.984,00, merupakan Bantuan Keuangan Kepada Desa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 298

Rincian Belanja/Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Belanja Bantuan Keuangan	Realisasi
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Di Kecamatan Siantan	9.926.937.274,00
2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Di Kecamatan Jemaja	8.987.180.078,00
3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Di Kecamatan Palmatak	21.242.440.637,00
4	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Di Kecamatan Siantan Timur	9.522.098.374,00
5	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Di Kecamatan Siantan Selatan	10.896.382.357,00
6	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Di Kecamatan Jemaja Timur	6.418.292.827,00
7	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Di Kecamatan Siantan Tengah	9.064.211.238,00
8	Transfer Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa	355.000.000,00
9	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Di Kecamatan Jemaja Barat	3.283.095.831,00
10	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Di Kecamatan Siantan Utara	2.680.789.368,00
JUMLAH		82.376.427.984,00

7.11.1.4.2.12. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - LO

Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan beban pengeluaran pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk memberikan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas dan dibayarkan berdasarkan jumlah

kursi/suara. Besaran Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2019 adalah sebesar Rp367.927.617,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 299  
Rincian Belanja/Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2019  
(Dalam Rupiah)

No	Belanja Bantuan Keuangan	Realisasi
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PDI- Perjuangan	69.328.431,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik GOLKAR	40.334.523,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik GERINDRA	37.400.238,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik DEMOKRAT	37.860.207,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PAN	46.837.533,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PPP	65.442.486,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik HANURA	32.356.440,00
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PBB	38.367.759,00
JUMLAH		367.927.617,00

Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya-LO merupakan Beban pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk memberikan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas. Bantuan Keuangan tersebut dibayarkan berdasarkan jumlah kursi/suara. Anggaran dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun Anggaran 2019 serta realisasi Tahun Anggaran 2018 pada Transfer Bantuan Keuangan Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 300  
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Per Partai Politik Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Bertambah/ Berkurang	%
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PDI- Perjuangan	69.328.431,00	69.328.431,00	0,00	0,00
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik GOLKAR	40.334.523,00	40.334.523,00	0,00	0,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik GERINDRA	37.400.238,00	37.400.238,00	0,00	0,00
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik DEMOKRAT	37.860.207,00	0,00	37.860.207,00	0,00
5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PAN	46.837.533,00	46.837.533,00	0,00	0,00
6	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PPP	65.442.486,00	65.442.486,00	0,00	0,00
7	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik HANURA	32.356.440,00	32.356.440,00	0,00	0,00
8	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PBB	38.367.759,00	38.367.759,00	0,00	0,00
JUMLAH		367.927.617,00	330.067.410,00	37.860.207,00	11,47

Beban transfer bantuan keuangan lainnya Tahun Anggaran 2019 merupakan beban atas belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik yang terealisasi sebesar Rp367.927.617,00. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp330.067.410,00, mengalami kenaikan sebesar Rp37.860.207,00 atau 11,47%. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik – LRA tahun 2019 sebesar Rp367.927.617,00 sehingga tidak terdapat selisih.

7.11.1.4.3. Surplus/Defisit dari Operasi - LO

Surplus/Defisit dari Operasi-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Surplus/Defisit dari Operasi-LO adalah sebesar Rp255.020.556.467,52 sedangkan Surplus/Defisit dari Operasi-LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp133.531.973.388,21. Rincian Surplus/Defisit dari Operasi-LO Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut.

**Tabel 301**  
**Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan – LO	1.103.928.292.287,66	873.680.478.864,05	230.247.813.423,61	26,35
2	Beban – LO	848.907.735.820,14	740.148.505.475,84	108.759.230.344,30	14,69
	<b>JUMLAH</b>	<b>255.020.556.467,52</b>	<b>133.531.973.388,21</b>	<b>121.488.583.079,31</b>	<b>90,98</b>

#### 7.11.1.4.4. Kegiatan Non Operasional-LO

Kegiatan Non Operasional-LO Tahun 2019 merupakan Surplus dari kegiatan non operasional lainnya berupa Pengembalian dari Partai Golkar sebesar Rp10.000.000,00 serta adanya koreksi atas penghapusan beban pesediaan yang belum digunakan sebesar Rp4.710.320.741,00, Surplus dari Kegiatan Non Operasional berupa Koreksi atas Kurang Catat Pendapatan Dana Kapitasi Tahun-Tahun sebelumnya pada Puskesmas Tarempa, Puskesmas Siantan Timur, Puskesmas Siantan Tengah dan Puskesmas Letung sebesar Rp78.818.155,35. Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari Dana Otonomi Khusus (Dana Desa) sebesar Rp51.179.675.000, Koreksi tambah atas Kelebihan Pencatatan Pendapatan Dana Kapitasi tahun-tahun sebelumnya pada Puskesmas Siantan Selatan dan Puskesmas Jemaja Timur sebesar Rp57.702.846,35 dan menghapus Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah LO atas salah catat Piutang TGR An. Tarmizi sebesar Rp30.490.425,00, koreksi pendapatan pengembalian yang merupakan retur dari rekening penerima dan akan dibayarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sebesar Rp12.092.500,00, koreksi atas jasa administrasi sebesar Rp3.500,00 serta koreksi atas persediaan yang sudah digunakan sebesar Rp1.879.296.366,00. Rincian penyesuaian Kegiatan Non Operasional-LO Tahun 2019 sebesar Rp48.402.352.359,00 sedangkan rincian Kegiatan Non Operasional-LO Tahun 2018 sebesar Rp7.271.611.300,03 dengan dirinci sebagai berikut.

**Tabel 302**  
**Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Surplus Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Tahun 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya-LO	(4.641.502.585,65)	2.643.531.599,03	(7.285.034.184,68)	(275,58)
3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya-LO	(53.043.854.944,65)	(4.628.079.701,00)	(48.415.775.243,65)	1.046,13
4	Defisit Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH (1+2)-(3+4)</b>	<b>48.402.352.359,00</b>	<b>7.271.611.300,03</b>	<b>41.130.741.058,97</b>	<b>565,63</b>

#### 7.11.1.4.5. Pos Luar Biasa-LO

Pos luar Biasa-LO pada Tahun 2019 sebesar Rp0,00 merupakan beban luar biasa atas kesalahan pengurangan Aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan terhadap Aset yang dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

**Tabel 303**  
**Pos Luar Biasa - LO Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Luar Biasa	0,00	(28.918.843.549,00)	28.918.843.549,00	(100,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>(28.918.843.549,00)</b>	<b>28.918.843.549,00</b>	<b>(100,00)</b>

7.11.1.4.6. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada LO untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 adalah surplus sebesar Rp303.422.908.826,52 sedangkan pada Laporan Operasional untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 adalah surplus sebesar Rp111.884.741.139,24 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 304  
Surplus/Defisit - LO Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	303.422.908.826,52	140.803.584.688,24	162.619.324.138,28	115,49
2	Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	0,00	(28.918.843.549,00)	28.918.843.549,00	(100,0)
JUMLAH		303.422.908.826,52	111.884.741.139,24	191.538.167.687,28	171,19

7.11.1.5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama Tahun Anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD. Sisa kas di Bendahara SKPD baik Bendahara Penerimaan maupun pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara SKPD merupakan bagian dari Kas Daerah, dimana sampai dengan akhir Tahun Anggaran belum disetor ke BUD. Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 dan 2018 terdiri atas:

Tabel 305  
Realisasi Arus Kas Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
A	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	369.309.593.210,74	189.901.120.226,68
B	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(362.815.334.000,76)	(227.139.080.861,00)
C	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	268.074.996,00	237.637.258,00
D	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	19.415.831,00	(25.521.363,00)
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas		6.781.750.036,98	(37.025.844.739,32)

Berdasarkan realisasi Arus Kas Bersih Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.781.750.036,98 mengalami kenaikan sebesar Rp43.807.594.776,30 atau sebesar 118,32%, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 yang mengalami defisit sebesar Rp37.025.844.739,32 dengan rincian sebagai berikut.

7.11.1.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 306  
Realisasi Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Arus Kas Masuk	1.121.217.514.230,97	837.488.862.718,18
2	Arus Kas Keluar	751.907.921.020,23	647.587.742.491,50
Jumlah (1 – 2)		369.309.593.210,74	189.901.120.226,68

Berdasarkan realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp369.309.593.210,74 mengalami kenaikan sebesar Rp179.408.472.984,06 atau sebesar 94,47%, dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp189.901.120.226,68. Realisasi arus kas aktivitas operasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

**7.11.1.5.1.1. Arus Kas Masuk**

Realisasi Arus Kas Masuk sejumlah Rp1.121.217.514.230,97 merupakan Arus Kas Masuk atas Aktivitas Operasi yang berasal dari:

**7.11.1.5.1.1.1. Penerimaan Pajak Daerah - LRA**

Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp16.948.784.838,36 mengalami penurunan sebesar Rp943.718.581,64 atau sebesar 5,27%, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp17.892.503.420,00;

**7.11.1.5.1.1.2. Penerimaan Retribusi Daerah - LRA**

Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp4.998.895.282,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.115.066.329,31 atau sebesar 73,34%, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.883.828.952,69;

**7.11.1.5.1.1.3. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA**

Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2019 yang berasal deviden Bank Riau Kepri sebesar Rp1.451.789.587,00 mengalami penurunan sebesar Rp482.897.199,00 atau sebesar 24,96%, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.934.686.786,00;

**7.11.1.5.1.1.4. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA**

Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp13.172.944.107,60 mengalami kenaikan sebesar Rp787.142.089,06 atau sebesar 6,36%, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp12.385.802.018,54;

**7.11.1.5.1.1.5. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak - LRA**

Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp44.678.061.732,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.887.530.891,00 atau sebesar 11,64%, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp50.565.592.623,00;

**7.11.1.5.1.1.6. Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)- LRA**

Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp371.235.764.748,00 mengalami kenaikan sebesar Rp172.351.071.739,00 atau sebesar 86,66%, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp198.884.693.009,00;

**7.11.1.5.1.1.7. Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)**

Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp388.403.719.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp24.083.645.000,00 atau sebesar 6,61%, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp364.320.074.000,00;



**7.11.1.5.1.1.8. Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 161.416.927.702,00 mengalami kenaikan sebesar Rp79.517.724.719,00 atau sebesar 97,09%, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp81.899.202.983,00;

**7.11.1.5.1.1.9. Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik**

Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp19.321.535.229,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.588.667.470,00 atau sebesar 7,60%, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp20.910.202.699,00;

**7.11.1.5.1.1.10. Penerimaan Dana Otonomi Khusus (Dana Desa)**

Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Otonomi Khusus (Dana Desa) Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp51.179.675.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.692.107.000,00 atau sebesar 17,69%, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp43.487.568.000,00;

**7.11.1.5.1.1.11. Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak**

Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp37.621.584.350,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.647.422.135,00 atau sebesar 7,57%, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp34.974.162.215,00;

**7.11.1.5.1.1.12. Penerimaan Hibah**

Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Hibah (penerimaan Hibah Dana BOS) Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp10.787.832.655,01 mengalami kenaikan sebesar Rp3.437.286.643,06 atau sebesar 46,76%, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp7.350.546.011,95;

**7.11.1.5.1.2. Arus Kas Keluar**

Realisasi arus Kas Keluar Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp751.907.921.020,23 merupakan saldo Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Operasi yang terdiri dari:

**7.11.1.5.1.2.1. Pembayaran Pegawai**

Realisasi Arus Kas Keluar dari Pembayaran Pegawai Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp357.208.194.340,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.333.761.005,00 atau sebesar 4,18%, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp342.874.433.335,00;

**7.11.1.5.1.2.2. Pembayaran Barang dan Jasa**

Realisasi Arus Kas Keluar dari Pembayaran Barang Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp256.272.778.730,23 mengalami kenaikan sebesar Rp55.868.690.430,73 atau sebesar 27,88%, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp200.404.088.299,50;

**7.11.1.5.1.2.3. Pembayaran Hibah**

Realisasi Arus Kas Keluar dari Pembayaran Hibah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp4.278.388.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp152.945.000,00 atau sebesar 3,45%, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.431.333.000,00;

**7.11.1.5.1.2.4. Pembayaran Bantuan Sosial**

Realisasi Arus Kas Keluar dari Pembayaran Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp156.555.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp39.555.000,00 atau sebesar 33,81%, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp117.000.000,00;

**7.11.1.5.1.2.5. Pembayaran Bantuan Keuangan**

Realisasi Arus Kas Keluar dari Pembayaran Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp82.812.329.950,00 mengalami kenaikan sebesar Rp26.829.634.093,00 atau sebesar 47,92%, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp55.982.695.857,00;

**7.11.1.5.1.2.6. Pembayaran Tak Terduga**

Realisasi Arus Kas Keluar dari Pembayaran Tak Terduga di Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar 0,00 mengalami penurunan sebesar Rp290.624.000,00 atau sebesar 100%, dibandingkan realisasi di Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp290.624.000,00;

**7.11.1.5.1.2.7. Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintahan Desa**

Realisasi Arus Kas Keluar dari Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp51.179.675.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.692.107.000,00 atau sebesar 17,69%, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp43.487.568.000,00;

**7.11.1.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi****7.11.1.5.2.1. Arus Keluar Kas**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Realisasi meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar adalah sebagai berikut.

Tabel 307

Realisasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Arus Kas Masuk	0,00	0,00
2	Arus Kas Keluar	362.815.334.000,76	227.139.080.861,00
Jumlah (1 – 2)		(362.815.334.000,76)	(227.139.080.861,00)

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2019 sebesar (Rp362.815.334.000,76) karena tidak adanya Arus kas masuk dari Aktivitas Investasi. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi digunakan untuk belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, dan perolehan aset lainnya yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut.

**7.11.1.5.2.1.1. Perolehan Tanah**

Realisasi Arus Kas Keluar dalam rangka perolehan tanah pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp4.022.083.585,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.117.806.030,00 atau sebesar 111,21% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.904.277.555,00;

**7.11.1.5.2.1.2. Perolehan Peralatan dan Mesin**

Realisasi Arus Kas Keluar dalam rangka perolehan Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp58.640.818.568,76 mengalami kenaikan sebesar Rp29.278.205.125,76 atau sebesar 99,71% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp29.362.613.443,00;

7.11.1.5.2.1.3. Perolehan Bangunan dan Gedung

Realisasi Arus Kas Keluar dalam rangka Perolehan Bangunan dan Gedung pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp156.832.046.585,00 mengalami kenaikan sebesar Rp72.705.638.850,00 atau sebesar 86,42%, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp84.126.407.735,00;

7.11.1.5.2.1.4. Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Arus Kas Keluar dalam rangka Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp141.102.217.189,00 mengalami kenaikan sebesar Rp29.703.134.061,00 atau sebesar 26,66% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp111.399.083.128,00;

7.11.1.5.2.1.5. Perolehan Aset Tetap Lainnya

Realisasi Arus Kas Keluar dalam rangka Perolehan aset tetap lainnya pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp2.218.168.073,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.871.469.073,00 atau sebesar 539,80% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp346.699.000,00.

7.11.1.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai berikut.

Tabel 308  
Realisasi Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)			
No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Arus Kas Masuk	768.074.996,00	737.637.258,00
2	Arus Kas Keluar	500.000.000,00	500.000.000,00
Jumlah (1 – 2)		268.074.996,00	237.637.258,00

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2019 adalah surplus sebesar Rp268.074.996,00 yang merupakan selisih antara nilai realisasi pengembalian pokok dana bergulir pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp768.074.996,00 dengan realisasi pemberian pinjaman kepada kelompok masyarakat melalui UPT Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (penyaluran dana bergulir) pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp500.000.000,00.

7.11.1.5.3.1. Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan merupakan realisasi pengembalian pokok dana bergulir di Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp768.074.996,00 mengalami kenaikan sebesar Rp30.437.738,00 atau sebesar 4,13% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp737.637.258,00.

7.11.1.5.3.2. Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan merupakan realisasi penyaluran dana bergulir pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp500.000.000,00 tidak mengalami kenaikan dan penurunan dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp500.000.000,00.

7.11.1.5.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris realisasinya meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 309**  
**Realisasi Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Tahun 2019 dan 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Arus Kas Masuk	74.625.543.462,36	56.753.713.503,00
2	Arus Kas Keluar	74.606.127.631,36	56.779.234.866,00
Jumlah (1 – 2)		19.415.831,00	(25.521.363,00)

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00 merupakan selisih antara arus kas masuk dari penerimaan yang berasal dari pungutan dan/atau potongan pajak dengan arus kas keluar pembayaran atas pungutan dan/atau potongan pajak Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) kepada Kas Negara dan tidak dapat selisih karna Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menyeter seluruhnya atas potongan pajak Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) kepada Kas Negara , yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut.

#### **7.11.1.5.4.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris**

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris merupakan penerimaan yang berasal dari pungutan dan/atau Potongan Pajak Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp74.625.543.462,36 mengalami kenaikan sebesar Rp17.871.829.959,36 atau sebesar 31,49% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp56.753.713.503,00.

#### **7.11.1.5.4.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris**

Arus Kas Keluar dari aktivitas transitoris merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran atas pungutan dan/atau potongan pajak Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) kepada kas negara. Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp74.606.127.631,36 mengalami kenaikan sebesar Rp17.826.892.765,36 atau sebesar 31,40% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp56.779.234.866,00.

#### **8.11.1.5.4.2. Saldo Akhir Kas**

Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp57.221.052.240,42 merupakan Saldo akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2018. Realisasi saldo awal di BUD dan Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp36.879.541.430,92 atau sebesar 39,19% dibandingkan dengan realisasi saldo awal di BUD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp94.100.593.671,34. Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp64.002.802.277,40.

### **5.11.1.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada Tahun pelaporan. Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Saldo awal ekuitas Tahun 2019 sebesar Rp1.649.904.219.242,99 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2018, sesuai dengan Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (*audited*) Tahun Anggaran 2018;
2. Surplus/defisit - LO sebesar Rp303.422.908.826,52 merupakan surplus atas kegiatan operasional Tahun 2019 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2019;
3. Selain adanya penambahan ekuitas dari surplus atas kegiatan operasional Pemerintah Daerah Tahun 2019, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi perubahan nilai pada beberapa pos laporan Tahun sebelumnya sebesar Rp59.734.144.697,71 dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Koreksi Kurang atas perubahan nilai Kas di FKTP yang merupakan bagian dari kas daerah sebesar Rp21.115.309,00 pada Puskesmas;
- b. Koreksi tambah atas perubahan nilai piutang lainnya untuk denda PBBP2 sebesar Rp313.673.109,00;
- c. Koreksi Kurang atas Perubahan Nilai Investasi sebesar Rp779.099.130,00 pada Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian.
- d. Koreksi Kurang Atas Perubahan Nilai Aset Tetap sebesar Rp64.034.863.686,00 yang terdiri dari penambahan dan pengurangan ekuitas sebagai berikut.
  1. Mutasi Kurang atas perubahan nilai Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Sebesar Rp2.619.820.196,00 yaitu sebagai berikut.
    - Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga sebesar Rp287.326.290,00;
    - Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp557.348.333,00;
    - Pada Puskesmas sebesar Rp28.351.550,00;
    - Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp1.496.000,00;
    - Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp13.156.000,00;
    - Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp2.999.700,00;
    - Pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp1.004.531.400,00;
    - Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika sebesar Rp1.730.000,00;
    - Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp29.000.000,00;
    - Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar Rp1.575.300,00;
    - Pada Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan sebesar Rp34.414.300,00;
    - Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp211.010.000,00;
    - Pada Sekretariat DPRD sebesar Rp265.705.000,00;
    - Kecamatan Siantan sebesar Rp50.890.400,00;
    - Kecamatan Jemaja sebesar Rp13.000.000,00;
    - Kecamatan Palmatak sebesar Rp17.545.000,00;
    - Kecamatan Siantan Selatan sebesar Rp13.860.000,00;
    - Kecamatan Siantan Utara sebesar Rp1.600.000,00;
    - Pada Inspektorat sebesar Rp19.987.000,00;
    - Pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perencanaan Daerah sebesar Rp45.527.700,00;
    - Pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp1.650.000,00;
    - Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp17.116.223,00.
  2. Mutasi Tambah atas perubahan nilai Aset Tetap - Gedung dan Bangunan pada Bagian Pengelola Barang Sekretariat Daerah sebesar Rp1.329.455.000,00.
  3. Mutasi Kurang atas perubahan nilai Aset Tetap - Gedung dan Bangunan sebesar Rp53.577.258.000,00 yaitu sebagai berikut.
    - Pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp52.241.089.000,00;
    - Pada Bagian Pengelola Barang Sekretariat Daerah sebesar Rp6.714.000,00;
    - Kecamatan Siantan sebesar Rp1.329.455.000,00;
  4. Mutasi Tambah atas perubahan nilai Aset Tetap - Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.385.501.000,00 pada Pengelola Barang Sekretariat Daerah;

5. Mutasi Kurang atas perubahan nilai Aset Tetap - Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.114.754.000,00 yaitu sebagai berikut.
  - Pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp2.102.658.000,00;
  - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp12.096.000,00;
6. Mutasi Kurang atas perubahan nilai Aset Tetap - Tanah Sebesar Rp7.339.072.600,00 yaitu sebagai berikut.
  - Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp6.972.520.500,00;
  - Pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp366.552.100,00;
7. Mutasi Tambah atas perubahan nilai Aset Tetap - Tanah Sebesar Rp7.801.647.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
8. Mutasi kurang atas Perubahan nilai Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Sebesar Rp8.900.565.390 yaitu sebagai berikut.
  - Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp6.820.475.390,00;
  - Pada Bagian Pengelola Barang Sekretariat Daerah sebesar Rp2.080.090.000,00.
9. Mutasi Kurang atas Jasa Administrasi Retur/Pengembalian dari PT. Jatria sebesar Rp3.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- e. Koreksi atas Perubahan Nilai Aset Lainnya sebesar Rp1.424.039.724,76 terdiri dari :
  - Mutasi Tambah atas salah Perhitungan Saldo TGR Tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp14.749.073,76 pada Badan Keuangan Daerah;
  - Mutasi Tambah atas Penetapan SKTJM atas nama Regarini Pratiwi sebesar Rp65.134.050,00 pada Badan Keuangan Daerah;
  - Mutasi Tambah penghapusan penyusutan aset lain-lain (Rusak Berat) yang memiliki kondisi rusak berat sebesar Rp1.344.156.601,00.
- f. Koreksi atas Perubahan Nilai Kewajiban sebesar Rp307.365.654,00 yaitu sebagai berikut.
  1. Mutasi Kurang atas utang beban tahun 2018 yang tidak akan di bayarkan kembali pada dinas sebesar Rp14.311.476,00 yaitu sebagai berikut.
    - Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp8.140.000,00;
    - Pada Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah sebesar Rp5.000,00;
    - Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp6.166.476,00.
  2. Mutasi Tambah atas utang beban dan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp321.677.130,00 pada Perangkat Daerah sebagai berikut.
    - Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp6.900.000,00
    - Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp63.428.920,00;
    - Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp800,00;
    - Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp1,165.000,00;
    - Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp13.500.000,00;
    - Pada Sekretariat DPRD sebesar Rp55.492.060,00;
    - Pada Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan sebesar Rp 181.190.350,00
- g. Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp3.055.858.439,53 yang terdiri dari:
  1. Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp1.113.795.719,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2. Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp4.169.654.158,53 yang terdiri dari:

- Mutasi tambah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan kelebihan perhitungan akumulasi penyusutan sebesar Rp2.269.344.383,33;
- Mutasi tambah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp84.519.259,00;
- Mutasi tambah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp1.277.175.200,00;
- Mutasi tambah pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp707.535.855,50;
- Mutasi Kurang atas Koreksi atas Penyisihan Denda Piutang PBBP2 tahun sebelumnya sebesar Rp168.920.539,30

Saldo akhir Ekuitas Tahun 2019 sebesar Rp1.893.592.983.371,80 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2019, nilai saldo akhir Ekuitas Tahun 2019 ini telah sesuai dengan nilai Ekuitas yang tersaji dalam Neraca per 31 Desember 2019.

**7.11.1.7. PENGUNGKAPAN ATAS POS-POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAN REKONSILIASINYA DENGAN PENERAPAN BASIS KAS, UNTUK ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN YANG MENGGUNAKAN BASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH**

Bermula di Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berusaha sepenuhnya mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2018, untuk mewujudkan akuntansi berbasis akrual yang telah di dukung dengan aplikasi dari Tim Pengembangan Simda BPKP baik dalam penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban serta pelaporan. Dalam penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan dalam pelaporan berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian dan pengungkapan neraca pada pos-pos aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019, antara lain terdapat pengelompokan piutang pendapatan, piutang lainnya, penyisihan piutang dan beban dibayar dimuka. Pada pos aset tetap dicatat akumulasi penyusutan aset tetap sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sedangkan pada pos kewajiban dalam penerapan akuntansi basis akrual terdapat pengungkapan pengakuan utang beban yang tidak terbayar yang berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan. dan dibayar pada Tahun Anggaran berikutnya pada program dan kegiatan serta rekening obyektif belanja yang sama dan akan dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya pada APBD Perubahan.

Untuk pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2019 yang berbasis *accrual* direklasifikasikan menjadi ekuitas.

Dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berkomitmen mengimplementasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, serta besar harapan kami untuk dapat memperoleh capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### 7.11.1.7.3. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan - LRA/ Pendapatan LAK

##### 7.11.1.7.3.1. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan Asli Daerah - LRA / Pendapatan Asli Daerah LAK

Tabel 310

Rincian Selisih Antara Pendapatan Asli Daerah LRA dengan Pendapatan Asli Daerah LAK Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	Penerimaan Pajak Daerah	16.913.698.911,36	16.948.784.838,36	(35.085.927,00)
2	Penerimaan Retribusi Daerah	4.998.895.282,00	4.998.895.282,00	0,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.451.789.587,00	1.451.789.587,00	0,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	13.195.937.534,60	13.172.944.107,60	22.993.427,00
Jumlah		36.560.321.314,96	36.572.413.814,96	(12.092.500,00)

Pada Tahun 2019 terdapat adanya selisih antara Pendapatan Asli Daerah - LRA dengan Pendapatan Asli Daerah - LAK yaitu merupakan Koreksi pendapatan pengembalian yang merupakan retur dari rekening penerima dan akan dibayarkan kembali pada Paket Pekerjaan Pengawasan Batu Miring Desa Tarempa Selatan sebesar Rp12.092.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

##### 7.11.1.7.3.2. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan Transfer - LRA / Pendapatan Transfer - LAK

Pada Tahun 2019 tidak didapati adanya selisih antara Pendapatan Transfer - LRA dengan Pendapatan Transfer - LAK, yaitu sebagai berikut.

Tabel 311

Rincian Selisih Antara Pendapatan Transfer LRA dengan Pendapatan Transfer LAK Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	985.056.008.411,00	985.056.008.411,00	0,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	51.179.675.000,00	51.179.675.000,00	0,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	37.621.584.350,00	37.621.584.350,00	0,00
Jumlah		1.073.857.267.761,00	1.073.857.267.761,00	0,00

##### 8.11.1.7.3.2. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA / Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LAK

Perbedaan antara Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA dengan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LAK dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 312

Rincian Selisih Antara Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA dengan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LAK Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	Pendapatan Hibah	10.787.832.655,01	10.787.832.655,01	0,00
Jumlah		10.787.832.655,01	10.787.832.655,01	0,00

Pada Tahun 2019 tidak didapati adanya selisih antara Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA dengan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LAK.



**7.11.1.7.3.3. Pengungkapan Perbedaan Belanja - LRA/ Belanja - LAK**

Perbedaan Belanja -LRA dengan Belanja -LAK dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 313**

**Rincian Selisih Antara Belanja LRA dengan Belanja LAK Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	Belanja Pegawai	357.208.194.340,00	357.208.194.340,00	0,00
2	Belanja Barang dan Jasa	256.272.782.230,23	256.272.778.730,23	3.500,00
3	Belanja Hibah	4.278.388.000,00	4.278.388.000,00	0,00
4	Belanja Bantuan Sosial	156.555.000,00	156.555.000,00	0,00
5	Belanja Bantuan Keuangan	82.812.329.950,00	82.812.329.950,00	0,00
6	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>700.728.246.020,23</b>	<b>700.728.246.020,23</b>	<b>3.500,00</b>

Pada Tahun 2019 terdapat selisih antara Belanja - LRA dengan Belanja - LAK merupakan koreksi belanja tambah atas biaya potongan bank untuk pengembalian dana PT. Jatria sebesar Rp3.500,00

**7.11.1.7.3.4. Pengungkapan Perbedaan antara Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa - LRA dengan Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa - LAK**

Perbedaan antara Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa - LRA dengan Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa - LAK dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 314**

**Rincian Selisih Antara Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa - LRA dengan Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa - LAK Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	51.179.675.000,00	51.179.675.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>51.179.675.000,00</b>	<b>51.179.675.000,00</b>	<b>0,00</b>

Pada Tahun 2019 tidak didapati adanya selisih antara Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa - LRA dengan Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa - LAK.

**7.11.1.7.3.5. Pengungkapan Perbedaan antara Belanja Modal - LRA dengan Belanja Modal - LAK**

Perbedaan antara Belanja Modal - LRA dengan Belanja Modal - LAK dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 315**

**Rincian Selisih Antara Belanja Modal - LRA dengan Belanja Modal - LAK Tahun 2019**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	Belanja Modal Tanah	4.022.083.585,00	4.022.083.585,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.640.818.568,76	58.640.818.568,76	0,00
3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	156.832.046.585,00	156.832.046.585,00	0,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	141.090.121.189,00	141.102.217.189,00	(12.096.000,00)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.218.168.073,00	2.218.168.073,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>362.803.238.000,76</b>	<b>362.815.334.000,76</b>	<b>(12.096.000,00)</b>

Pada Tahun 2019 terdapat selisih antara Belanja Modal - LRA dengan Belanja Modal - LAK yang merupakan Koreksi belanja karena diakui menjadi utang jangka pendek lainnya pada Paket Pekerjaan Pengawasan Batu Miring Desa Tarempa Selatan sebesar Rp12.096.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2020.

7.11.1.7.3.6. **Pengungkapan Perbedaan antara Penerimaan Daerah - LRA dengan Aktivitas Pendanaan - LAK**

Perbedaan antara Penerimaan Daerah - LRA dengan Aktivitas Pendanaan - LAK dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 316

Rincian Selisih Antara Penerimaan Daerah - LRA dengan Aktivitas Pendanaan - LAK Tahun 2019  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara (Dana Bergulir)	768.074.996,00	768.074.996,00	0,00
Jumlah		768.074.996,00	768.074.996,00	0,00

Pada Tahun 2018 tidak didapati adanya selisih antara Penerimaan Daerah - LRA dengan Aktivitas Pendanaan - LAK.

7.11.1.7.3.7. **Pengungkapan Perbedaan antara Pengeluaran Daerah - LRA dengan Aktivitas Pendanaan - LAK**

Perbedaan antara Pengeluaran Daerah - LRA dengan Aktivitas Pendanaan - LAK dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 317

Rincian Selisih Antara Pengeluaran Daerah - LRA dengan Aktivitas Pendanaan - LAK  
Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
Jumlah		500.000.000,00	500.000.000,00	0,00

Pada Tahun 2019 tidak didapati adanya selisih antara Pengeluaran Daerah - LRA dengan Aktivitas Pendanaan - LAK.

7.11.1.8. **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan yang dapat disampaikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019, yang secara langsung mempengaruhi pengguna laporan keuangan dapat diuraikan sebagai berikut.

Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berangkat dari peraturan yang legal dan formal, serta semangat masyarakat untuk melakukan perubahan akan keberadaan sistem pemerintahan di daerah, maka munculah berbagai gagasan, keinginan, pendapat dan tuntutan di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya. Tuntutan yang datang dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas itu adalah untuk mengatur sendiri pemerintahan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai otonomi daerah, yang terus di gaungkan di masing-masing daerah. Salah satunya daerah kepulauan yang turut menggaungkan pemekaran perubahan untuk mengelola pemerintahan sendiri yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas agar daerahnya di bentuk menjadi kabupaten pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah tersebut yang sebelumnya di bawah wilayah hukum pemerintahan Kabupaten Natuna.

Kabupaten Kepulauan Anambas yang terletak di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang sebelum mengalami perubahan status menjadi kabupaten yang merupakan gugusan kepulauan yang terdiri dari tiga pulau besar tempat kedudukan kecamatan yaitu Pulau Siantan untuk Kecamatan Siantan, Pulau Jemaja untuk Kecamatan Jemaja dan Pulau Matak untuk Kecamatan Matak, yang menjadi wilayah administratif Kabupaten Natuna. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas melalui pemekaran daerah ini merupakan suatu bentuk protes masyarakat Kepulauan Anambas kepada Pemerintah atas ketidakmerataan pembangunan dan minimnya fasilitas publik di daerah yang kaya sumber daya alam dan migas tersebut.

Beranjak dari hal tersebut munculah suatu keinginan untuk membentuk kabupaten baru dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri secara mandiri sesuai dengan potensi yang ada, sehingga tidak terikat lagi dengan Kabupaten Natuna. Kabupaten Kepulauan

Anambas merupakan kabupaten termuda di Propinsi Kepulauan Riau, yang ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2008 melalui proses pemekaran wilayah. Proses pemekaran menjadikan Kepulauan Anambas sebagai sebuah kabupaten melalui perjalanan yang cukup panjang, dimulai ketika Kepulauan Riau dibentuk menjadi sebuah Propinsi pada Tahun 2002. Dalam perjuangan pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas terjadi dinamika politik dan proses tarik ulur kepentingan antara elit-elit politik lokal daerah Anambas dengan kabupaten induk sehingga perjalanan pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas sempat terhenti karena terkendala beberapa hal. Mulai dari penolakan kabupaten induk, tertunda pembahasan pembentukan dikarenakan kelengkapan persyaratan administrasi, sampai pada sengketa penetapan letak ibukota kabupaten dan akhirnya daerah yang mempunyai potensi ekonomi kandungan laut dan migas ini ditetapkan menjadi kabupaten. Pemekaran Kepulauan Anambas menjadi kabupaten dimaksud untuk mendekatkan rentang kendali dan memperpendek jalur birokrasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mengingat kondisi Kepulauan Anambas yang cukup jauh dari Kabupaten Natuna yaitu sekitar 15 jam perjalanan kapal laut dan lebih dekat dengan Ibukota Propinsi Kepulauan Riau. Di samping sarana transportasi yang terbatas yang dikelilingi oleh lautan yang luas, dimana pada musim-musim tertentu sulit ditempuh dengan menggunakan kapal laut dan belum tersedianya transportasi udara sampai saat ini untuk menuju ibukota Kabupaten Natuna dalam rangka mengakses pelayanan publik. Dukungan untuk keinginan menyelenggarakan pemerintahan sendiri merupakan hal usaha masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan.

Aspirasi pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan oleh segenap lapisan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, kaum intelektual, ulama, para pengusaha, dan wakil rakyat serta masyarakat awam melalui Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas (BP2KKA) yang merupakan wadah perjuangan masyarakat anambas dalam pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas. Akhirnya setelah lebih dari lima Tahun cita-cita untuk memiliki, mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan potensi, kemampuan yang didasarkan pada kearifan lokal terwujud sudah dengan ditetapkannya Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Propinsi Kepulauan Riau, tanggal 24 Juli 2008, terdiri dari 7 Kecamatan yaitu: Siantan, Siantan Timur, Siantan Tengah, Siantan Selatan, Palmatak, Jemaja dan Jemaja Timur, dua kelurahan, dan 34 desa (termasuk di dalamnya dua desa persiapan). Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Tarempa Selatan, Desa Tarempa Timur, Desa Sri Tanjung, Desa Tarempa Barat Daya, Desa Lidi, Desa Liuk, Desa Teluk Sunting, Desa Sewrat, Desa Air Putih, Desa Temburun, Desa Air Bini, Desa Teluk Bayur, Desa Matak, Desa Batu Ampar, Desa Payamaram, Desa Paiasan, Desa Belibak, Desa Berapit dan Desa Landak maka saat ini jumlah Desa pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 52 Desa.

Saat ini Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh Bapak Abdul Harris, S.H. sebagai Bupati Kepulauan Anambas dan Bapak Wan Zuhendra sebagai Wakil Bupati untuk Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021, sesuai dengan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Tahun 2015. Setelah pemekaran Kabupaten Kepulauan Anambas dari Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas memiliki tujuh wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Tengah, dan Kecamatan Jemaja Timur. Pada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Jemaja Barat, maka bertambah 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Jemaja Barat. Pada Tahun 2019 dilakukan pemekaran lagi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Kute Siantan sehingga Jumlah Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 10 Kecamatan

Letak Geografis dan Batas Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, terletak antara 2°10'0"-3°40'0" LU s/d 105°15'0"-106°45'0" BT berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2008. Sebagai kabupaten yang terletak di wilayah terdepan Indonesia, Kabupaten Kepulauan Anambas berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga lainnya yaitu Laut Cina Selatan/Vietnam di sebelah utara, Kepulauan Tambelan di sebelah selatan, Laut Cina Selatan/Malaysia di sebelah barat, Laut Natuna di sebelah timur.

Sebagai wilayah kepulauan di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar di Perairan Laut Natuna dan Laut Cina Selatan.

Dari total luas Kabupaten Kepulauan Anambas  $\pm 46.664,15 \text{ km}^2$  hanya  $607,72 \text{ km}^2$  (1,3%) yang merupakan daratan, selebihnya  $\pm 46.056,43 \text{ km}^2$  (98,7%) merupakan lautan. Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Anambas terbagi dalam tujuh kecamatan, dua kelurahan, dan 34 (tiga puluh empat) desa (termasuk di dalamnya dua desa persiapan) yang meliputi

- Kecamatan Siantan dengan ibu kota Tarempa, terdiri atas Kelurahan Tarempa, Desa Tarempa Barat, Desa Tarempa Timur, Desa Tarempa Selatan, Desa Pesisir Timur, Desa Barat Daya dan Desa Sri Tanjung;
- Kecamatan Siantan Selatan dengan ibu kota Air Bini, terdiri dari Desa Tiangau, Desa Mengkait, Desa Lingai, Desa Kiabu, Desa Telaga, Desa Telaga Kecil, dan Desa Air Bini;
- Kecamatan Siantan Timur dengan ibu kota Nyamuk, terdiri atas Desa Nyamuk, Desa Batu Belah, Desa Munjan, Desa Temburun, Desa Serat, dan Desa Air Putih;
- Kecamatan Siantan Tengah dengan ibu kota Air Asuk, terdiri atas Desa Teluk Siantan, Desa Air Asuk, Desa Air Sena, Desa Lidi, Desa Teluk Sunting dan Desa Liuk;
- Kecamatan Palmatak dengan ibu kota Tebang Ladan, terdiri dari Desa Piabung, Desa Tebang, Desa Ladan, Desa Langir, Desa Putik, Desa Candi, Desa Belibak;
- Kecamatan Jemaja dengan ibu kota Letung, terdiri dari satu Kelurahan, Desa Rewak, Desa Mampok, Desa Air Biru, Desa Batu Berapit, dan Desa Landak dan;
- Kecamatan Jemaja Timur dengan ibu kota Ulu Maras, terdiri dari Desa Ulu Maras, Desa Kuala Maras, Desa Genting Pulur, dan Desa Bukit Padi.
- Kecamatan Jemaja Barat ibu kota Impol terdiri dari Desa Impol, Desa Sunggak dan Desa Keramut;
- Kecamatan Siantan Utara ibu kota Mubur terdiri dari Desa Mubur, Desa Bayat dan Desa Piasan;
- Kecamatan Kute Siantan ibu kota Payalaman terdiri dari Desa Payalaman, Teluk Bayur, Desa Matak, Desa Batu Ampar dan Desa Payamaram.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Tarempa Selatan, Desa Tarempa Timur, Desa Sri Tanjung, Desa Tarempa Barat Daya, Desa Lidi, Desa Liuk, Desa Teluk Sunting, Desa Sewrat, Desa Air Putih, Desa Temburun, Desa Air Bini, Desa Teluk Bayur, Desa Matak, Desa Batu Ampar, Desa Payamaram, Desa Piasan, Desa Belibak, Desa Berapit dan Desa Landak maka saat ini jumlah Desa pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 52 Desa.

Ditinjau jarak ibu kota kecamatan ke ibu kota kabupaten, maka kecamatan terjauh adalah Jemaja dengan jarak  $\pm 38,70 \text{ mil}$ , disusul dengan Jemaja Timur dengan jarak  $\pm 37,37 \text{ mil}$ . Di ukur dari Ibukota Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang maka jarak terjauh adalah Kecamatan Palmatak ( $\pm 208,41 \text{ mil}$ ) dan Siantan Tengah ( $\pm 205,16 \text{ mil}$ ). Untuk melakukan pergerakan antar wilayah kecamatan saat ini melalui transportasi laut, untuk melakukan perjalanan ke provinsi dan kabupaten lain dapat dilakukan melalui transportasi laut dan udara. Sebagai kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga, jarak Tarempa ke negara tetangga terdekat yaitu Singapura adalah  $\pm 202,29 \text{ mil}$ , ke Johor (Malaysia)  $\pm 205,97 \text{ mil}$  dan Kuching (Malaysia)  $\pm 318,91 \text{ mil}$ , sedangkan jarak Tarempa ke ibu kota Jakarta  $\pm 640,72 \text{ mil}$ .

#### 7.11.1.8.1. Aplikasi Pendukung Pengelolaan Keuangan Daerah

Aplikasi pendukung dalam menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 antara lain:

#### 7.11.1.8.2. Aplikasi SIMDA Keuangan

Aplikasi SIMDA Keuangan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mulai Tahun Anggaran 2011 sampai dengan sekarang. Aplikasi SIMDA Keuangan yang digunakan telah mengakomodir dalam bentuk penganggaran, penatausahaan akuntansi, pelaporan dan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada periode anggaran.

Aplikasi SIMDA Keuangan dipergunakan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai client dengan cara online menuju ke database server yang ada di ruangan server, terkecuali SKPD yang berada di luar Ibu Kota Kabupaten antara lain Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Timur dan Kecamatan Siantan Selatan dengan melakukan export dan import data dari client ke server atau sebaliknya. Export dan import yang dilakukan dalam bentuk pelaporan dan penatausahaan keuangan.

Tim Pengembangan Aplikasi SIMDA Keuangan selalu melakukan pengembangan-pengembangan dengan cara *update* data yang mempermudah pengguna aplikasi dalam mendukung terwujudnya akuntansi berbasis akrual.

#### 7.11.1.8.3. Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah

Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mulai akhir Tahun Anggaran 2011 sampai sekarang. Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) yang digunakan telah mengakomodir dalam bentuk kebijakan penyusutan dan umur aset tetap, kebijakan akuntansi dan pelaporan aset tetap.

Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) dipergunakan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai client dengan cara online menuju ke database server yang ada di ruangan server, terkecuali SKPD yang berada di luar Ibu Kota Kabupaten antara lain Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Timur dan Kecamatan Siantan Selatan dengan melakukan *expot* dan *import* data dari *client* ke server atau sebaliknya. Tim Pengembangan Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) melakukan pengembangan-pengembangan dengan cara *update* data yang mempermudah pengguna aplikasi dalam mendukung pencatatan dan pelaporan aset tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

#### 7.11.1.8.4. Aplikasi SIMGAJI TASPEN

Aplikasi SIMGAJI TASPEN yang dikeluarkan oleh PT TASPEN, Tbk. dan dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mulai Agustus 2015 sampai sekarang. Aplikasi SIMGAJI Taspem yang digunakan telah mengakomodir dalam bentuk pelaporan ke Kementerian Keuangan terkait dengan Dana Alokasi Umum (DAU), dan pelaporan Iuran Wajib Pegawai (IWP), Pemotongan PPh 21, Asuransi Kesehatan dan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri.

Aplikasi SIMGAJI TASPEN dipergunakan secara terpusat di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam penginputan dan pencetakan daftar gaji seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan pangkat dan golongan yang ada dimasing-masing organisasi/SKPD. Penginputan data perubahan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dilakukan setiap awal bulan berjalan, dan pencetakan daftar gaji bulan berjalan dilakukan setiap tanggal 25 bulan berjalan, daftar gaji yang telah dicetak dapat diambil oleh bendahara pengeluaran SKPD di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan pengajuan pembayaran gaji PNSD diawal bulan dengan batas pengajuan pada tanggal 5 bulan berjalan, sehingga mempermudah staf gaji untuk melakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga.

#### 7.11.1.8.5. Aplikasi Income Point

Aplikasi Income Point dikeluarkan oleh konsultan dan dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dari Tahun 2011 sampai dengan saat ini. Aplikasi Income Point digunakan untuk pencatatan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah.

#### 7.11.1.8.7. Aplikasi Anambas Single Information System

Aplikasi Anambas *Single Information System* dirancang oleh Aparatur Sipil Negara pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas bertujuan untuk

Memenuhi tantangan perkembangan teknologi dalam pengelolaan keuangan yang berbasis aplikasi, Aplikasi yang terintegrasi dari proses perencanaan, penatausahaan keuangan dan pelaporan, mendukung Implementasi Transaksi Non Tunai dan SP2D *Online* yang terintegrasi ke Aplikasi *Payment system* pada perbankan (Bank Riau Kepri) yang bermanfaat untuk memastikan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri, pengendalian internal pengelolaan kas meningkat, informasi posisi kas secara real time dan proses tutup buku lebih cepat dan handal serta kedisiplinan pengelolaan keuangan meningkat.

8.11.1.8.7. Aplikasi Monitoring Transaksi

Aplikasi Monitoring Transaksi dari Bank Riau Kepri digunakan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam melakukan monitoring Keluar dan Masuk Dana pada Kas Daerah maupun pada rekening Bendahara Pengeluaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

7.11.1.8.8. Peristiwa-Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Penerimaan dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 belum diterima seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 333 Tahun 2019 tentang Penghitungan Tunda Salur dan Lebih Salur Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 dan perubahannya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 511 Tahun 2019 tentang Penghitungan Tunda Salur dan Lebih Salur Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 sebesar Rp10.559.872.677,40 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 318  
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019  
(Dalam Rupiah)

No	DBH Provinsi T.A 2019	Alokasi	Tunda Salur 2019	Realisasi	Yang Akan Salur
		Pergub No. 333 T.A 2019	Pergub No. 12 Tahun 2020	RKUD	
1.	PKB	9.423.033.141,00	8.787.358.527,00	6.665.879.715,00	2.121.478.811,00
2.	BBN – KB	4.907.142.857,00	6.955.636.196,00	3.925.714.285,00	3.029.921.910,00
3.	PBB – KB	16.355.365.448,00	18.484.285.393,00	13.084.292.358,00	5.399.993.035,00
4.	Pajak Air Permukaan	714.285.714,00	44.477.277,00	35.998.357,00	8.478.920,00
5.	Pajak Rokok	5.994.359.024,00	796.032.154,00	31.841.286,00	764.190.868,00
	Jumlah	37.394.186.184,00	35.067.789.547,00	23.743.726.001,00	11.324.063.546,00

7.11.1.9. PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 ini disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2015

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang menjadi dasar dalam proses penyusunan laporan keuangan.



Akhir kata, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 dapat memenuhi kewajiban kami dalam melaporkan dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

 **BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,**  
**ABDEL HARIS, SH**



# LAMPIRAN VIII



<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019</div>						
No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 - 6
1	Piutang PBBP2	2019	Rp 869.932.158,00	Rp 516.090.368,00	Rp 476.127.713,00	Rp 909.894.813,00
2	Piutang Retribusi	2019	Rp 8.735.340,00	Rp -	Rp 8.735.340,00	Rp -
3	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	2019	Rp -	Rp 22.427.670.523,00	Rp -	Rp 22.427.670.523,00
4	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	2019	Rp -	Rp 11.324.063.546,00	Rp -	Rp 11.324.063.546,00
5	Piutang Pendapatan TP-TGR	2019	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	2019	Rp -	Rp 357.540.703,00	Rp -	Rp 357.540.703,00
7	Piutang Lainnya	2019	Rp -	Rp 340.461.006,00	Rp 9.300.000,00	Rp 331.161.006,00
Jumlah			Rp 878.667.498,00	Rp 34.965.826.146,00	Rp 494.163.053,00	Rp 35.350.330.591,00
<div><div>Tarempa, 28 Agustus 2020</div><div>BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,</div><div><div>ABDUL HARIS, S.H.</div></div></div>						
LAMPIRAN VIII PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - DAFTAR PIUTANG DAERAH						

# LAMPIRAN IX



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**  
**DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Uraian	Umur Piutang				
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1.	Piutang PBB-P2	217.238.247,00	268.081.917,00	200.018.926,00	224.555.723,00	909.894.813,00
2.	Penyisihan	1.086.191,24	26.808.191,70	100.009.463,00	224.555.723,00	352.459.568,94
3.	Nilai yang Dapat Direalisasikan	216.152.055,76	241.273.725,30	100.009.463,00	-	557.435.244,06



Tarempa, 28 Agustus 2020  
**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,**

**ABDUL HARIS, SH**

# LAMPIRAN X





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**  
**DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Dana Bergulir Per 31 Desember 2018	Penguliran Dana Bergulir Tahun 2019	Pengembalian Pokok Dana Bergulir s/d Tahun 2019	Kelebihan Pengembalian Dana Bergulir Tahun 2019	Koreksi Kurang Karena Pencatatan Pengembalian Untuk Dana Bergulir Tahun 2019	Dana Bergulir Per 31 Desember 2019 Sebelum Penyisihan	Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih Tahun 2019	NRV Dana Bergulir Per 31 Desember 2019 Netto
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5+6	8	9=5-8
1.	14.032.748.586,00	500.000.000,00	(768.074.996,00)	2.622.205,00	(549.865.915,00)	13.217.429.880,00	12.210.883.663,50	1.006.546.216,50



Tarapaka, 28 Agustus 2020  
 BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,  
 ABDUL HARIS, SH

# LAMPIRAN XI



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**  
**DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH**  
 TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal yang telah disertakan s.d Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang telah disertakan s.d Akhir Tahun Ini	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) yang diterima kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan s.d Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2012	PT. BPD Bank Riau Kepri	Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2012	Investasi Jangka Panjang	Rp 7.500.000.000,00	Rp 7.500.000.000,00	Rp -	Rp 7.500.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	2013	Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera	Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2012	Investasi Jangka Panjang	Rp 6.000.000.000,00	Rp 6.000.000.000,00	Rp -	Rp 6.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
<b>Jumlah</b>					Rp 13.500.000.000,00	Rp 13.500.000.000,00	Rp -	Rp 13.500.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

Tarempa, 28 Agustus 2020  
**SUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,**  
  
**ABDUL HARIS, S.H.**

# LAMPIRAN XII





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Tanah	Rp 174.880.863.170,00	Rp 11.989.010.585,00	Rp 13.072.456.097,00	Rp 173.797.417.658,00
2	Peralatan Dan Mesin	Rp 284.110.185.756,28	Rp 58.723.266.791,76	Rp 12.942.889.047,00	Rp 329.890.563.501,04
3	Gedung Dan Bangunan	Rp 568.432.112.431,54	Rp 159.019.582.489,92	Rp 130.211.122.635,00	Rp 597.240.572.286,46
4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	Rp 879.396.259.091,06	Rp 161.825.625.263,00	Rp 22.391.851.912,92	Rp 1.018.830.032.441,14
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 11.291.064.685,00	Rp 2.237.990.073,00	Rp 914.351.023,00	Rp 12.614.703.735,00
6	Konstruksi Dalam Pekerjaan	Rp 164.615.719.048,99	Rp 73.311.309.003,00	Rp 732.337.000,00	Rp 237.194.691.051,99
7	Akumulasi Penyusutan	Rp (555.461.170.972,75)	Rp (96.288.860.580,33)	Rp (3.711.429.366,66)	Rp (648.038.602.186,42)
Jumlah		Rp 1.527.265.033.210,12	Rp 370.817.923.625,35	Rp 176.553.578.348,26	Rp 1.721.529.378.487,21

Tarempa, 28/8/2020  
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,  
ABDUL HARIS, S.H.

# LAMPIRAN XIII



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**  
**DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	2	3	4
<b>Aset Tetap</b>			
1.	Tanah	173.797.417.658,00	174.880.863.170,00
2.	Peralatan dan Mesin	329.890.563.501,04	284.110.185.756,28
3.	Gedung dan Bangunan	597.240.572.286,46	568.432.112.431,54
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.018.830.032.441,14	879.396.259.091,06
5.	Aset Tetap Lainnya	12.614.703.735,00	11.291.064.685,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	237.194.691.051,99	164.615.719.048,99
7.	Akumulasi Penyusutan	(648.038.602.186,42)	(555.461.170.972,75)
<b>Jumlah</b>		<b>1.721.529.378.487,21</b>	<b>1.527.265.033.210,12</b>

Tarempa, 28 Agustus 2020  
**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,**  
  
**ABDUL HARIS, SH**

# LAMPIRAN XIV





**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**  
**DAFTAR KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN**  
 TAHUN ANGGARAN 2019


NO	JENIS ASET TETAP	TAHUN PENGADAAN	NILAI	KET
1	2	3	4	5
<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>				
1	Bangunan Tempat Olahraga	2013	448,000,000.00	
2	Bangunan Tempat Olahraga	2013	1,082,130,000.00	
3	Perencanaan Bangunan Gedung Kantor Permanen	2017	48,413,000.00	
4	Perencanaan Bangunan Gedung Kantor Permanen	2017	41,635,000.00	
5	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	2017	31,923,000.00	
6	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	2017	40,943,000.00	
7	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	2017	39,909,000.00	
8	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	2017	9,934,000.00	
9	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	2017	37,929,000.00	
10	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	2017	26,874,000.00	
11	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	2017	21,891,000.00	
12	Perencanaan Ruang Laboratorium Komputer	2017	11,859,000.00	
13	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	2017	20,879,000.00	
14	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	2017	36,884,000.00	
15	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	2017	37,874,000.00	
16	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	2017	7,954,000.00	
17	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru	2017	47,334,000.00	
18	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru	2017	38,864,000.00	
19	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru	2017	48,874,000.00	
20	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru	2017	47,928,000.00	
21	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru	2017	37,874,000.00	
22	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru	2017	49,864,000.00	
23	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru	2017	49,864,000.00	
24	Perencanaan Pembangunan Jamban Siswa/Guru	2017	25,829,000.00	
25	Perencanaan Pembangunan Jamban Siswa/Guru	2017	41,779,000.00	
26	Perencanaan Pembangunan Jamban Siswa/Guru	2017	33,914,000.00	
27	Perencanaan Pembangunan Jamban Siswa/Guru	2017	16,941,000.00	
28	Perencanaan Pembangunan Jamban Siswa/Guru	2017	33,914,000.00	
29	Perencanaan Pembangunan Jamban Siswa/Guru	2017	20,356,000.00	
30	Perencanaan Gedung SDN 003	2018	10,780,000.00	
31	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMP 001 Palmatak	2018	14,410,000.00	
32	Perencanaan Pembangunan SDN 012 Landak dan SMPN 003 Rewak	2018	14,729,000.00	
33	Perencanaan Pembangunan SMPN 001 Jemaja Timur	2018	13,915,000.00	
34	Perencanaan Pemasangan Paving Blok	2018	11,110,000.00	
35	Perencanaan Pembangunan SDN 005 Palmatak	2018	4,961,000.00	
36	Perencanaan TK Negeri Pembina Kecamatan Siantan	2018	3,905,000.00	
37	Perencanaan Pembangunan Rumah Gasing	2018	7,909,000.00	
38	Perencanaan Lapangan Bulu Tangkis dan Lapangan Futsal Desa Piasan	2018	12,859,000.00	
39	Perencanaan Rumah Dinas Guru	2018	34,947,000.00	
40	Perencanaan Rumah Dinas Guru SD	2018	49,775,000.00	
41	Perencanaan Rumah Dinas Guru SMP	2018	36,300,000.00	
42	Perencanaan Rumah Dinas Guru SD	2018	24,904,000.00	
43	Perencanaan Rumah Dinas Guru SD	2018	67,980,000.00	
44	Perencanaan Rumah Dinas Guru SMP	2018	34,925,000.00	
45	Perencanaan Rumah Dinas Guru SD	2018	35,893,000.00	
46	Perencanaan Rumah Dinas Guru SMP	2018	30,305,000.00	
47	Perencanaan Rumah Dinas Guru SMP	2018	27,929,000.00	
48	Perencanaan Perencanaan Sumber Pusat Inklusif SMP	2018	21,384,000.00	
49	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Guru SMP 2 Mengkait	2019	27,874,000.00	
50	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung PGRI	2019	81,800,000.00	
51	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMPN 1 Palmatak	2019	31,922,000.00	
52	Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri 4 Putik	2019	22,429,000.00	
53	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD 003 Air Putih	2019	14,344,000.00	
54	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD 010 Pian Pasir	2019	14,344,000.00	
55	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD 001 Letung	2019	8,954,000.00	

NO	JENIS ASET TETAP	TAHUN PENGADAAN	NILAI	KET
1	2	3	4	5
56	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD 004 Serat	2019	31,944,000.00	
57	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD 009 Nokok	2019	31,889,000.00	
58	Perencanaan Rehabilitasi Ruang UKS SD 007 Lembah Rewak	2019	3,949,000.00	
59	DED Pembangunan Ruang Inklusif SPMN 4 Putik	2019	21,659,000.00	
60	Perencanaan Penimbunan Tanah Lapangan TK Siantan Selatan	2019	6,897,000.00	
61	Konsultasi Perencanaan Rehab Ruang Kelas Sekolah di Kecamatan Jemaja Timur	2019	13,420,000.00	
62	Perencanaan Rehab Ruang Kelas di Kecamatan Siantan Tengah	2019	14,839,000.00	
63	DED Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang, Baik beserta Sanitasinya atau Tanpa Sanitasinya SMPN 1 Palmatak	2019	7,942,000.00	
64	DED Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang, Baik beserta Sanitasinya atau Tanpa Sanitasinya SMPN 1 Air Nangak	2019	7,931,000.00	
65	DED Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya SMPN 2 Palmatak	2019	22,594,000.00	
66	DED Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya SMPN 002 Piasan	2019	19,899,000.00	
67	DED Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya SMPN 004 Serat	2019	19,844,000.00	
68	DED Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Perabotnya SDN 007 Lembah Rewak	2019	8,415,000.00	
69	DED Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Perabotnya SDN 006 Piabung	2019	13,464,000.00	
70	DED Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Perabotnya SMPN 3 Lembah Rewak SATAP	2019	29,854,000.00	
71	DED Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Perabotnya SMDN 011 Air Biru	2019	9,944,000.00	
72	DED Rumah Dinas Guru dengan Tingkat Kerusakan sedang atau berat beserta Perabotnya SDN 004 Bukit Tambun	2019	6,919,000.00	
73	DED Rumah Dinas Guru dengan Tingkat Kerusakan sedang atau berat beserta Perabotnya SDN 003 Rewak	2019	8,404,000.00	
74	DED Rumah Dinas Guru dengan Tingkat Kerusakan sedang atau berat beserta Perabotnya SMPN 1 Jemaja Timur	2019	11,924,000.00	
75	DED Rumah Dinas Guru dengan Tingkat Kerusakan sedang atau berat beserta Perabotnya SDN 009 Palah	2019	25,509,000.00	
76	DED Rumah Dinas Guru dengan Tingkat Kerusakan sedang atau berat beserta Perabotnya SDN 009 Nokok	2019	25,454,000.00	
77	DED Rumah Dinas Guru dengan Tingkat Kerusakan sedang atau berat beserta Perabotnya SMPN 3 Satu Atap Munjan	2019	27,104,000.00	
78	DED Rumah Dinas Guru dengan Tingkat Kerusakan sedang atau berat beserta Perabotnya SDN 011 Air Biru	2019	15,884,000.00	
79	DED Rumah Dinas Guru dengan Tingkat Kerusakan sedang atau berat beserta Perabotnya SDN 003 Mengkait	2019	25,487,000.00	
<b>Jumlah</b>			<b>3,513,125,000.00</b>	
<b>DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				
1	Perencanaan Pembangunan Pagar dan Paving Blok Puskesmas	2017	49,800,000.00	
2	Perencanaan Pembangunan Paving Blok RSUD Jemaja	2018	16,357,000.00	
3	Perencanaan Pagar dan Parit Puskesmas Pembantu	2018	11,902,000.00	
4	Perencanaan Pengadaan Bangunan Rumah Pelindung IPAL Puskesmas Siantan Timur	2019	29,810,000.00	
5	Perencanaan Pembangunan Ruang Operasi RSUD Jemaja	2019	92,785,000.00	
6	Perencanaan Pembangunan Ruang Operasi RSUD Palmatak	2019	93,775,000.00	
7	Perencanaan dan Pengawas Puskesmas Siantan Selatan	2019	3,966,736,480.00	
8	Perencanaan dan Pengawas Puskesmas Siantan Timur	2019	2,776,795,550.00	
9	Perencanaan dan Pengawas Puskesmas Siantan Tengah	2019	7,131,594,770.00	
10	Perencanaan dan Pengawas Puskesmas Palmatak	2019	5,600,037,680.00	

NO	JENIS ASET TETAP	TAHUN PENGADAAN	NILAI	KET
1	2	3	4	5
11	Perencanaan Master Plan DED Pembangunan Rumah Dinas dan Puskesmas Siantan Selatan	2019	553,190,000.00	
12	Perencanaan pembangunan Tempat Penampungan Limbah Sementara	2019	19,877,000.00	
13	Perencanaan Pembangunan Rumah Pelindung/IPAL Puskesmas Jemaja Timur	2019	19,844,000.00	
14	Pembangunan Puskesmas Kecamatan Siantan Tengah	2019	1,457,714,526.00	
15	Pembangunan Puskesmas Kecamatan Siantan Tengah	2019	2,875,276,750.00	
Jumlah			24,695,495,756.00	
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM</b>				
1	Kantor Bupati Kepulauan Anambas	2013	4,991,193,900.00	
2	Kantor Bupati Kepulauan Anambas	2013	785,879,000.00	
3	Pembangunan Water Front City Tahap I dan Tahap II	2014	30,793,636,000.00	
4	Perencanaan Pembangunan Jalan Piabung - Muntai dan Langir - Muntai	2014	269,225,000.00	
5	Perencanaan Pembuatan Pagar/Wiremesh	2014	28,633,000.00	
6	Kantor Bupati Kepulauan Anambas	2014	3,754,808,450.00	
7	Kantor Bupati Kepulauan Anambas	2014	49,320,000.00	
8	Kantor Bupati Kepulauan Anambas	2015	13,008,025,970.00	
9	Kantor Bupati Kepulauan Anambas	2016	5,334,265,720.00	
10	Kantor Bupati Kepulauan Anambas	2017	21,660,489,010.00	
11	Pembangunan Mesjid Agung	2017	15,917,921,459.00	
12	DED Pembangunan Astaka	2017	48,785,000.00	
13	Penataan Tempat Pemakaman Umum	2017	48,730,000.00	
14	DED Pembangunan Jalan Padang Melang Jalur 2	2017	49,225,000.00	
15	DED Pembangunan Jalan Bayat - Mubur Kecil - Piasan - Pian Pasir - Palah	2017	190,135,000.00	
16	DED Pembangunan Jalan Pasir Merah	2017	89,265,000.00	
17	DED Pembangunan Jalan Rewak - Padang Melang	2017	188,485,000.00	
18	DED Jalan Lingkar Pulau Bajau	2017	279,070,000.00	
19	SSID Jalan Genting Pulur - Besuh	2017	270,105,000.00	
20	SSID Pembangunan Jalan Lingkar Desa Tiangau Teluk Rambut - Desan	2017	284,625,000.00	
21	SSID Pembangunan Jalan Lingkar Matak Kecil (Teluk Durian-Nuan-Buton-Sedak)	2017	239,085,000.00	
22	SSID Pembangunan Jalan Lingkar Muntai - Kampung Baru	2017	266,805,000.00	
23	DED Pembangunan Jembatan Beton Padang Melang Jalur 2	2017	169,345,000.00	
24	SSID Jalan Pelantar Beton Penghubung Antar Desa Belibak - Desa Tebang	2017	302,005,000.00	
25	DED Pelantar Beton Payaklaman - Batu Ampar	2017	49,225,000.00	
26	DED Pelantar Serkah Desa Tarempa Barat dan DED Lorong Sempit	2017	125,125,000.00	
27	Perencanaan Pembangunan Jembatan Beton Desa Piabung	2017	137,885,000.00	
28	SSID Pembangunan Pelantar Beton Antang	2017	286,935,000.00	
29	Pemasangan Bronjong Landscape Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas	2018	3,776,676,780.00	
30	Lanjutan Pembangunan Tambahan Ruang RSUD	2018	8,191,100,000.00	
31	Pembangunan Mesjid Agung dan Perencanaan dan Pengawasan	2018	24,668,561,800.00	
32	DED Pembangunan Menuju TPA	2018	48,565,000.00	
33	Pembangunan Jalan Putik - Teluk Pring	2018	17,343,203,980.00	
34	Peningkatan Jalan Genting - Desan	2018	5,461,767,899.99	
35	Perencanaan Pembangunan Jalan	2018	97,075,000.00	
36	DED Jalan Sri Tanjung - Luwe	2018	449,625,000.00	
37	DED Pembanguna Jalan Pitik - Teluk Pring	2018	48,565,000.00	
38	DED Peningkatan Jalan Rewak - Kusik	2018	98,010,000.00	
39	DED Normalisasi Bendung Dapit	2018	97,515,000.00	
40	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	2018	99,000,000.00	
41	DED Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi	2018	98,890,000.00	
42	DED Peningkatan Jaringan Daerah Irigasi	2018	99,000,000.00	
43	DED Peningkatan Jaringan Daerah Irigasi Matan	2018	98,890,000.00	
44	Perencanaan Pembangunan Batu Miring TPU	2018	11,935,000.00	
45	Perencanaan Lanjutan Penimbunan Tanah Gereja Santa dan Perencanaan lanjutan Pemasangan batu Miring Gang Nangka	2018	22,110,000.00	
46	Perencanaan Pemasangan Batu Miring Abrasi Pantai	2018	36,080,000.00	
47	DED Normalisasi Gunung Lintang	2018	96,085,000.00	

NO	JENIS ASET TETAP	TAHUN PENGADAAN	NILAI	KET
1	2	3	4	5
48	Perencanaan Pembuatan Drainase/Gorong-gorong Jalan Abdurahman ke Jalan Kampung Baru	2018	10,340,000.00	
49	Pembebasan Tanah/Lahan Kegiatan Tahap II Masjid Agung Kabupaten Kepulauan Anambas	2019	250,000,000.00	
50	Review DED Landscap Perkantoran Bupati Kepulauan Anambas	2019	29,890,000.00	
51	Manajemen Konstruksi Pembangunan Land Clearing Pembangunan Kantor OPD (Multi Years) Tahun 1	2019	116,766,380.00	
52	Pematangan Lahan Perumahan Khusus di Tarempa Selatan dan Perencanaan dan Pengawasan	2019	434,914,000.00	
53	Perencanaan dan Pengawasan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Pedesaan Kecamatan Jemaja Timur	2019	81,444,000.00	
54	Pengawasan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur	2019	36,575,000.00	
55	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Lanjutan Pelantar Beton Bertulang Desa Genting Pulur Kecamatan Jemaja Timur	2019	32,274,000.00	
56	Pembangunan dan Pengawasan Pembangunan Reservoir dan Jaringan SPAM IKK Kecamatan Siantan	2019	935,616,180.00	
57	Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Jemaja Timur	2019	25,872,000.00	
58	Pembangunan Penampung Air Desa Payalaman Kecamatan Palmatak (Lanjutan)	2019	73,870,000.00	
59	Pembangunan Masjid Agung kabupaten Kepulauan Anambas	2019	28,905,072,500.00	
60	Pembangunan Jalan SP II (Multi Years)	2019	10,894,993,270.00	
61	DED jalan Ulu Maras - Air Terjun	2019	99,495,000.00	
62	DED Peningkatan Jalan SP. Serat - Teluk Rung - SP. Tinggil	2019	99,495,000.00	
63	DED Peningkatan Jalan SP. SMP 1 (Tanjung Momong - Simpang Air Padang (Teluk Rit)	2019	99,770,000.00	
64	DED Peningkatan Jalan Payalaman - Gunung Neak	2019	98,601,000.00	
65	DED Peningkatan Jalan SP Pasiran - Kuala Maras	2019	98,601,000.00	
66	DED jalan Air Bayo - Mampok	2019	99,044,000.00	
67	DED Jalan Bukit Padi - Air Biru	2019	99,601,000.00	
68	DED Peningkatan Jalan SP Letung - SP Pelabuhan Letung - SP Rewak	2019	98,601,000.00	
69	Perencanaan lanjutan Pembangunan Jalan Beton Jalur Laut Dari Kampung Sunjuk Menuju Kampung Tumuk Desa Kuala Maras	2019	14,960,000.00	
70	Perencanaan dan Pengawasan Rehabilitasi dan Preservasi Ruas Jalan Se Kabupaten Kepulauan Anambas	2019	99,225,000.00	
71	DED Peningkatan Jalan Rewak - Sedanau	2019	99,044,000.00	
72	Pengawasan Pembangunan Jalan Masuk Menuju Kantor Bupati KKA	2019	12,144,000.00	
73	DED Jalan Atap Semuak - Teluk Kaut	2019	98,249,000.00	
74	Penagawasan pembangunan Jalan pelantar Seberang Dermaga I Timur Kelurahan Letung	2019	98,780,000.00	
75	Pembangunan Jalan Masuk Menuju Kantor Bupati KKA	2019	449,095,500.00	
76	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan Pelantar Beton Kuala Maras	2019	119,240,000.00	
77	Perencanaan Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi	2019	99,000,000.00	
78	DED jaringan Sekunder Daerah Irigasi Desa Bukit Padi	2019	99,110,000.00	
79	Review Design Pembangunan Embung Batu Tabir	2019	192,995,000.00	
80	DED Pembangunan Bendung Pasiran	2019	98,780,000.00	
81	Penyusunan Masterplan Drainase	2019	266,750,000.00	
82	Perencanaan Pembangunan Pemecah Ombak Desa Landak	2019	13,750,000.00	
83	Renovasi Talaud Pemecah Ombak Desa Mengkait Dusun I dan II	2019	790,597,214.00	
84	Review Pengerukan Normalisasi Sungai Dapit Menuju Kuala Maras	2019	98,010,000.00	
85	DED Normalisasi Sungai Semajuk Padang Melang Sampai Mampok	2019	97,625,000.00	
86	Pembangunan Reservoir dan Jaringan SPAM IKK	2019	381,257,710.00	
87	Penyusunan DED Peningkatan Kapasitas Air Baku dan Jaringan SPAM Kelurahan Letung	2019	97,790,000.00	
<b>Jumlah</b>			<b>206,308,125,722.99</b>	



NO	JENIS ASET TETAP	TAHUN PENGADAAN	NILAI	KET
1	2	3	4	5
<b>DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				
1	Perencanaan Rehabilitasi Dermaga Rakyat	2017	34,540,000.00	
2	Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Pariwisata Manda Riau	2017	49,060,000.00	
3	Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Pariwisata Pulau Penjalin	2017	49,500,000.00	
4	Perencanaan Dermaga Rakyat	2017	44,220,000.00	
5	Perencanaan Pembangunan Dermaga Rakyat	2017	48,565,000.00	
6	Perencanaan Peningkatan Pelabuhan Pemda	2017	49,544,000.00	
7	Perencanaan Pengadaan dan Permasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	2017	29,800,000.00	
8	Perencanaan Pengadaan dan Permasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	2017	14,810,000.00	
9	Perencanaan Pengadaan dan Permasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	2017	14,850,000.00	
10	Perencanaan Pengadaan dan Permasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	2017	29,920,000.00	
11	Perencanaan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)	2017	48,950,000.00	
12	Perencanaan Pembangunan Batu Miring Pelabuhan	2018	9,910,000.00	
13	Perencanaan Penambahan Gedung Kantor	2019	79,799,000.00	
14	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pelabuhan Kuku	2019	99,000,000.00	
15	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pelabuhan Pemda Letung	2019	99,800,000.00	
16	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Peningkatan Pelabuhan Matak Kecil	2019	99,528,000.00	
17	DED Pelabuhan Bayat	2019	79,766,000.00	
18	Perencanaan Peningkatan Pelabuhan Desa Temburun	2019	29,826,000.00	
19	DED Pelabuhan Sri Tanjung	2019	64,064,000.00	
20	Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Desa Ladan	2019	59,620,000.00	
21	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Tambatan Perahu Kelurahan Letung	2019	99,700,000.00	
<b>Jumlah</b>			<b>1,134,772,000.00</b>	
<b>DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN</b>				
1	Perencanaan Pembangunan Pabrik Es	2015	26,950,000.00	
2	Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	340,000,000.00	
3	Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Hewan	2017	28,105,000.00	
4	Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Hewan	2017	28,105,000.00	
5	Perencanaan Jalan Desa	2017	29,645,000.00	
6	Perencanaan Jalan Desa	2017	29,370,000.00	
7	Perencanaan Pembangunan Pagar Keliling Puskesmas	2018	9,950,000.00	
8	Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Gudang Penyimpanan Rumpit Laut	2019	24,667,500.00	
9	DED Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian	2019	29,700,000.00	
<b>Jumlah</b>			<b>546,492,500.00</b>	
<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>				
1	Perencanaan Pembangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2017	98,230,000.00	
2	Perencanaan Pasar Loka	2018	372,880,777.00	
3	Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas	2019	525,569,296.00	
<b>Jumlah</b>			<b>996,680,073.00</b>	
<b>TOTAL ASET KDP KKA</b>			<b>237,194,691,051.99</b>	
<div style="text-align: right;">  <p>Tareng, 28 Agustus 2020  <b>BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,</b>  <b>ABDUL HARIS, SH</b></p> </div>				

# LAMPIRAN XV

<div>  <div>           PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS            DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA            TAHUN ANGGARAN 2019         </div> </div>			
No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	2	3	4
1	Tuntutan Ganti Rugi	Rp 95.240.703,00	Rp 367.540.703,00
2	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	Rp -	Rp 14.749.073,76
3	<b>Tuntutan Ganti Rugi Netto (1-2)</b>	<b>Rp 95.240.703,00</b>	<b>Rp 352.791.629,24</b>
4	Aset Yang Tidak Berwujud	Rp 46.072.036.544,00	Rp 45.326.412.544,00
5	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp 30.446.625.585,00	Rp 25.993.865.748,00
6	<b>Aset Tidak Berwujud Netto (4- 5)</b>	<b>Rp 15.625.410.959,00</b>	<b>Rp 19.332.546.796,00</b>
7	Aset Lain-lain	Rp 32.833.128.333,00	Rp 30.460.772.190,00
8	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	Rp -	Rp 1.344.156.601,00
9	<b>Aset Lain-lain Netto (7-8)</b>	<b>Rp 32.833.128.333,00</b>	<b>Rp 29.116.615.589,00</b>
<b>Jumlah Aset Lainnya (3+6+9)</b>		<b>Rp 48.553.779.995,00</b>	<b>Rp 48.801.954.014,24</b>
<div> <div>  <div>           Ta. 28 Agustus 2020            BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,            ABDUL HARIS, S.H.         </div> </div> </div>			
LAMPIRAN XV PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA			



# LAMPIRAN XVI



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**  
**DAFTAR DANA CADANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8
		<b>N I H I L</b>						
<b>Jumlah</b>								

# NIHIL

**Jumlah**


 Parempa, 28 Agustus 2020  
**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,**  
**ABDUL HARIS, S.H.**

# LAMPIRAN XVII



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**  
**DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**  
 TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	2	3	4
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	19.415.831,00	0,00
2	Utang Beban	1.272.791.805,00	1.639.113.254,00
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	10.118.721.030,00	8.199.002.387,00
<b>J u m l a h</b>		<b>11.410.928.666,00</b>	<b>9.838.115.641,00</b>

Tarempa, 28 Agustus 2020  
**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,**  
  
**ABDUL HARIS, SH**



# LAMPIRAN XVIII





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**  
**DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	2	3	4
Kewajiban Jangka Panjang			
	<b>N I H I L</b>		
Jumlah		-	



Tarempa, 23 Agustus 2020  
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS, SH

# LAMPIRAN XIX



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**  
**DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN**  
**DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Jumlah Realisasi Tahun n-2, Tahun n-1 dan Tahun n			Jumlah Akumulasi Realisasi s.d. Akhir Tahun n	Jumlah yang Dianggarkan dalam APBD Tahun Berikutnya
			Realisasi Tahun n-2	Realisasi Tahun n-1	Realisasi Tahun n		
1	2	3	4	5	6	7 = (4+5+6)	8
1		<b>N I H I L</b>					
2							
3							
4							
5							
<b>JUMLAH</b>							

LAMPIRAN XIX PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA



**Cara Pengisian :**

1. Kolom 1 diisi dengan nomor kegiatan yang belum diselesaikan.
2. Kolom 2 diisi dengan kode kegiatan yang belum diselesaikan.
3. Kolom 3 diisi dengan judul kegiatan yang belum diselesaikan.
4. Kolom 4 diisi dengan jumlah realisasi tahun n-2 atas kegiatan yang belum diselesaikan.
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah realisasi tahun n-1 atas kegiatan yang belum diselesaikan.
6. Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi tahun n atas kegiatan yang belum diselesaikan.
7. Kolom 7 diisi dengan jumlah akumulasi realisasi sampai dengan akhir tahun n atas kegiatan yang belum diselesaikan.
8. Kolom 8 diisi dengan jumlah yang dianggarkan dalam APBD tahun berikutnya atas kegiatan yang belum diselesaikan.

# LAMPIRAN XX



